

2023

Laporan Tahunan
Annual Report

inJourney

TOURISM DEVELOPMENT
CORPORATION



Momentum Emas Menggapai Masa Depan Berkelanjutan

A Golden Momentum in Achieving Sustainable Future

Sekapur Sirih

Preface



Momentum Emas Menggapai Masa Depan Berkelanjutan

A Golden Momentum
in Achieving Sustainable Future

Tahun 2023 merupakan momentum bagi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) untuk mencapai usia emasnya. Eksistensi ini merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam mengembangkan dan mengelola kawasan pariwisata terintegrasi di Indonesia. Periode emas ini sekaligus menjadi fondasi kuat bagi Perusahaan untuk senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kapabilitas nilai usaha demi menggapai masa depan berkelanjutan. ITDC akan terus hadir demi negeri dan berperan aktif dalam menyambut periode 50 tahun berikutnya, khususnya di sektor pariwisata Indonesia yang semakin kuat.

The year 2023 is the momentum for the InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) to reach its golden age. This existence is a manifestation of the Company's commitment to developing and managing integrated tourism areas in Indonesia. This golden period also provides a strong foundation for the Company to continuously improve and increase its business value capabilities to achieve a sustainable future. ITDC will continue to be present in the country and play an active role in welcoming the next 50 years, especially in Indonesia's increasingly strong tourism sector.

Kesinambungan Tema

Theme Sustainability



INVESTING IN INDONESIA'S FUTURE

Berinvestasi untuk Masa Depan Indonesia

2022

ITDC sebagai BUMN yang bergerak di pariwisata telah berinvestasi secara nyata untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Melalui penciptaan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis, ITDC berupaya untuk mengoptimalkan potensi pariwisata negara ini. Investasi yang telah dilakukan dalam menciptakan sebuah kawasan pariwisata seperti membangun infrastruktur dasar yang memadai, pembangunan hotel, sirkuit dan fasilitas pendukung lainnya.

ITDC as a state-owned enterprise engaged in tourism has invested significantly to create a better future for Indonesia. Through the creation and development of strategic areas, ITDC strives to optimize the country's tourism potential. Investments have been made in creating a tourism area such as building adequate basic infrastructure, building hotels, circuits and other supporting facilities.



RESILIENT IN THE FACE OF CHALLENGES

Resilient in the Face of Challenges

2021

Efek pandemi masih membayangi iklim usaha di sepanjang tahun 2021. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha, tak terkecuali sektor pariwisata. Namun demikian, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) senantiasa berkomitmen untuk terus melaju memberikan kinerja terbaiknya. Melalui penyelesaian pembangunan Sirkuit dan penyelenggaraan World Superbike (WSBK) di The Mandalika pada 2021, ITDC telah menetapkan pondasi usaha yang lebih kuat, yang secara fundamental akan membawa nama Mandalika, Lombok, dan Indonesia ke kancah dunia.

The effects of the pandemic still overshadow the business climate throughout 2021. This is certainly a challenge for business owners, including the tourism sector. However, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia or Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) is always committed to continue to deliver its best performance. Through the completion of the construction of the Circuit and organizing World Superbike (WSBK) at The Mandalika in 2021, ITDC has set a business foundation that is stronger, which will fundamentally bring the names of Mandalika, Lombok, and Indonesia to the world stage.



MAINTAINING STABILITY AMIDST VOLATILITY **2020**

Maintaining Stability Amidst Volatility

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Perekonomian dunia dihadapkan dengan berbagai tantangan di semua sektor imbas dari pandemi COVID-19, termasuk sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor dengan dampak terparah. Kendati demikian, kondisi tersebut tak menyurutkan upaya PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk tetap fokus kepada hal-hal yang ingin dicapai di tengah iklim usaha yang penuh dengan ketidakpastian. Ini merupakan pondasi yang bersifat fundamental dalam mempersiapkan masa depan usaha ke level yang lebih tinggi.

2020 is a year full of challenges. The world economy presents various challenges in all sectors as a result of the COVID-19 pandemic, including the tourism sector which is one of the sectors with the worst impact. However, this condition does not dampen the efforts of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia or the Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) to stay focused on the things to be achieved in the midst of a business climate full of uncertainty. This is a fundamental foundation in preparing the future of business to a higher level.



RACING TO A SUSTAINABLE FUTURE **2019**

Racing to a Sustainable Future

The Mandalika sebagai destinasi pariwisata kelas dunia dan membawa Perseroan ke masa depan yang lebih baik. Salah satunya adalah melalui penandatanganan promoter's agreement dengan Dorna Sports SL untuk membawa balap motor kelas dunia MotoGP ke The Mandalika, yang akan menjadi atraksi kelas dunia andalan Indonesia mulai 2021. Dari sisi konstruksi, pada 2019 ITDC mulai membangun Sirkuit Mandalika sebagai sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan menjadi tempat gelaran MotoGP dan ikon dari perkembangan sportainment Indonesia di mata dunia.

The Mandalika as world class tourism destination that can bring the Company to a brighter future. One of these measures was carried out by the signing of promoter's agreement with Dorna Sports SL to host the world class motorcycle racing competition MotoGP at The Mandalika, which will become Indonesia's world class attraction in 2021. In terms of construction, in 2019 ITDC has started to construct Mandalika Circuit as the first main street circuit in the world to host MotoGP and a worldwide icon for the sportainment development in Indonesia.

DAFTAR ISI

Table of Contents

2	Sekapur Sirih Preface	78	Visi dan Misi Perusahaan Vision and Mission of the Company
4	Kesinambungan Tema Theme Sustainability	81	Nilai-Nilai Perusahaan Company Values
6	Daftar Isi Table of Contents	82	Makna Logo Perusahaan Corporate Logo Definition
01	Ikhtisar Kinerja Performance Highlights	84	Profil Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Profile
10	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights	90	Profil Direksi The Board of Directors' Profile
15	Ikhtisar Operasional Operational Highlights	97	Profil Pejabat Eksekutif Executive Officers Profile
17	Ikhtisar Saham Share Highlights	102	Demografi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Employee Demographics and Competency Development
18	Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi Bonds, Sukuk, or Convertible Bond Overview	107	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition
19	Kilas Peristiwa Event Highlights	111	Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi List of Subsidiaries and Associate Entities
02	Laporan Manajemen Management Report	122	Struktur Grup Group Structure
40	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	123	Kronologi Penerbitan Saham Chronology of Share Issuance
48	Laporan Direksi Board of Directors Report	123	Kronologi Penerbitan atau Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Issuance or Other Securities Listing
60	Lembar Pengesahan dan Pernyataan Pertanggungjawaban Anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas Laporan Tahunan 2023 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Letter of Approval and Statement of Accountability for the 2023 Annual Report of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia by Members of the Board of Commissioners and Directors	123	Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professions
03	Profil Perusahaan Company Profile	127	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification
64	Informasi Umum dan Identitas ITDC General Information and ITDC Identity	128	Daftar Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, serta Informasi tentang Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan List of Addresses of Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and Information on Branches and Representative Offices
66	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	130	Informasi pada Situs Web Perusahaan Information on Company Website
71	Produk dan Jasa Products and Services	131	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Education and/or Trainings for the Board of Commissioners, Board Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit
76	Struktur Organisasi Organizational Structure		

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

142	Tinjauan Perekonomian dan Industri Economic and Industrial Overview
145	Tinjauan Operasional Operational Overview
155	Tinjauan per Segmen Usaha Overview per Business Segment
164	Tinjauan Keuangan Financial Overview
184	Tinjauan Keuangan Lainnya Other Financial Overview
194	Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information
196	Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level

05 Fungsi Penunjang Bisnis Business Supporting Function

200	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resources Management

06 Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

218	Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik General Principles of Good Corporate Governance
219	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup ITDC Implementation of Good Corporate Governance within ITDC
246	Struktur dan Organ Tata Kelola Perusahaan Structure and Organs of Corporate Governance
400	Manajemen Risiko Risk Management
421	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
428	Tata Kelola Teknologi Informasi Governance of Information Technology
443	Perkara Penting Significant Cases
451	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data

459	Kode Etik: Standar Etika Perusahaan Code of Conduct: Corporate Ethical Standards
466	Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy
469	Pengelolaan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi Management of Conflicts of Interest and Control of Gratification
470	Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik Information on Providing Funds for Political Activities
470	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara State Officials Wealth Report
474	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Policy
477	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
482	Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Policy Regarding Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors
489	Transparansi Praktik Bad Governance Transparency of Bad Governance Practices
492	Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Governance
496	Prinsip dan Landasan Hukum TJSL di Perusahaan Principles and Legal Foundations of CSR in the Company
506	Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2023 Implementation of the 2023 CSR Program

Laporan Keuangan Financial Reports

Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights

Per 31 Desember 2023, Perusahaan berhasil membukukan total aset sebesar Rp7,30 triliun, mengalami peningkatan Rp436,95 miliar atau 6,37% dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp6,86 triliun.

As of December 31, 2023, the Company recorded total assets of Rp7.30 trillion, an increase of Rp436.95 billion or 6.37% compared to 2022 which amounted to Rp6.86 trillion.





01

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Highlights

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

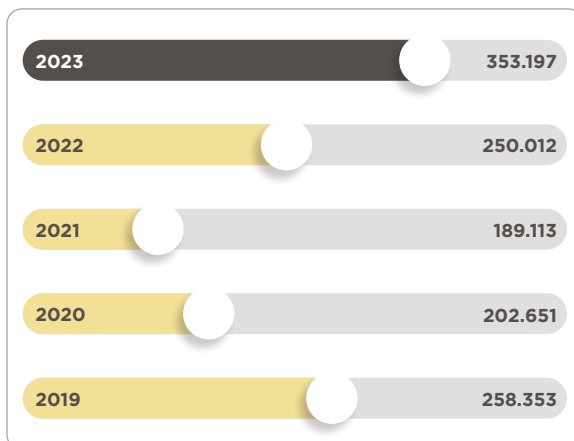
Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenue	885.214	657.488	322.783	241.675	316.026	34,64%
Pendapatan Kompensasi Compensation Revenue	353.197	250.012	189.113	202.651	258.353	41,27%
Pendapatan Non-Kompensasi Non-Compensation Revenue	532.017	407.476	133.670	39.024	57.673	30,56%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(532.769)	(357.831)	(242.309)	-	-	48,89%
Beban Usaha Operating Expenses	(433.710)	(319.319)	(234.351)	(217.868)	(232.558)	35,82%
Laba (Rugi) Bruto Gross Profit (Loss)	(81.266)	(19.662)	(153.877)	23.807	83.468	-313,31%
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Profit Before Final Tax and Income Tax	(229.355)	(179.684)	(155.054)	48.702	74.934	27,64%
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(49.717)	(30.467)	(21.809)	(21.864)	(29.061)	63,18%
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax Expense	(279.073)	(210.150)	(176.863)	26.838	45.873	32,80%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expense)	655	184	(2.561)	(3.873)	(2.497)	255,98%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	(278.417)	(209.966)	(179.424)	22.965	43.376	32,60%
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Loss)	1.625	13.559	(7.836)	14.562	(6.335)	-88,02%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	(276.793)	(196.408)	(187.260)	37.527	37.041	40,93%
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	(277.968)	(209.888)	(179.677)	24.752	43.985	32,44%
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interests	(450)	(78)	253	(1.787)	(609)	473,81%
Jumlah Total	(278.417)	(209.966)	(179.424)	22.965	43.376	32,60%

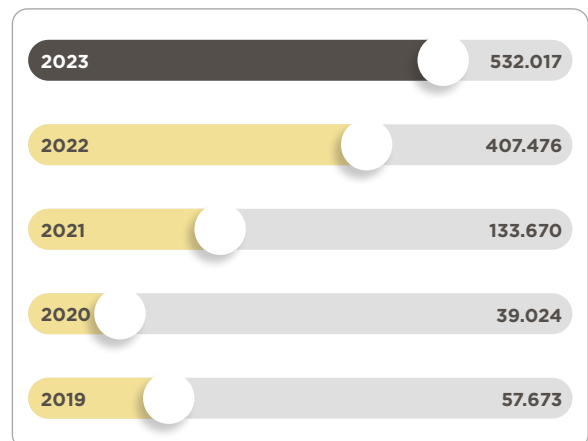

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

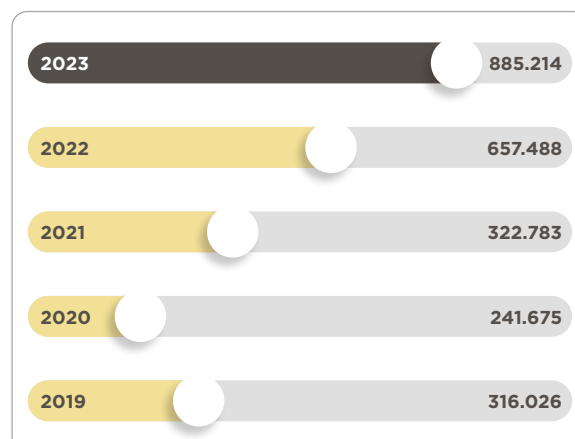
 (dalam jutaan rupiah)
 (in million rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	(276.343)	(196.329)	(187.513)	39.314	37.650	40,76%
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interests	(450)	(79)	253	(1.787)	(609)	473,95%
Jumlah Total	(276.793)	(196.408)	(187.260)	37.527	37.041	40,93%
Laba Bersih per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Net Earnings per Basic Share (Full Rupiah)	(129.638)	(99.340)	(190.720)	28.127	49.983	30,50%

Pendapatan Kompensasi
Compensation Revenue

 Rp Juta
 Rp Million

Pendapatan Non-Kompensasi
Non-Compensation Revenue

 Rp Juta
 Rp Million

Pendapatan Usaha
Operating Revenue

 Rp Juta
 Rp Million


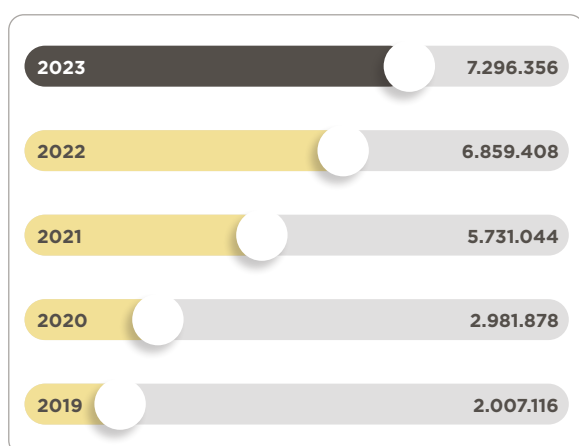
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian
Consolidated Financial Position Statement (Balance Sheet)

(dalam jutaan rupiah)
 (in million rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
Aset Assets						
Aset Lancar Current Assets	947.119	1.012.162	1.166.481	911.647	288.231	-6,43%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	6.349.237	5.847.246	4.564.563	2.070.231	1.718.885	8,59%
Jumlah Aset Total Assets	7.296.356	6.859.408	5.731.044	2.981.878	2.007.116	6,37%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity						
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	1.984.797	2.545.096	2.197.865	224.384	287.673	-22,01%
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	3.447.105	2.173.066	1.195.525	702.580	191.786	58,63%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	5.431.902	4.718.162	3.393.390	926.964	479.459	15,13%
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.864.454	2.141.246	2.337.654	2.054.914	1.527.657	-12,93%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	7.296.356	6.859.408	5.731.044	2.981.878	2.007.116	6,37%

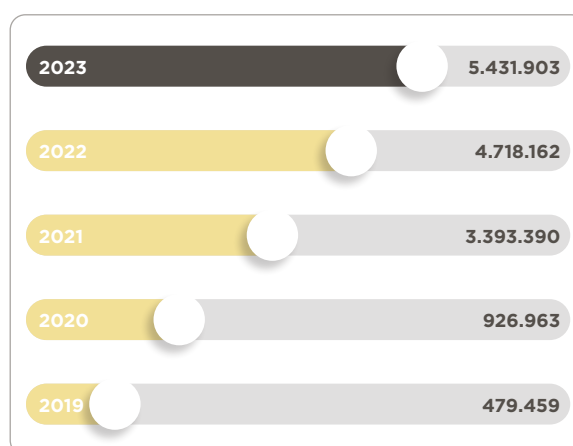
Aset
Assets

Rp Juta
Rp Million



Liabilitas
Liabilities

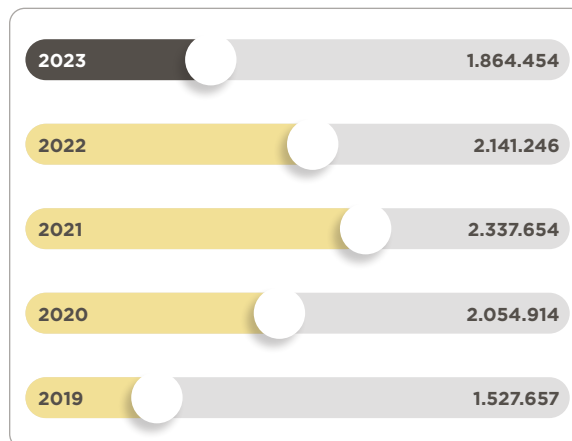
Rp Juta
Rp Million





Ekuitas Equity

Rp Juta
Rp Million



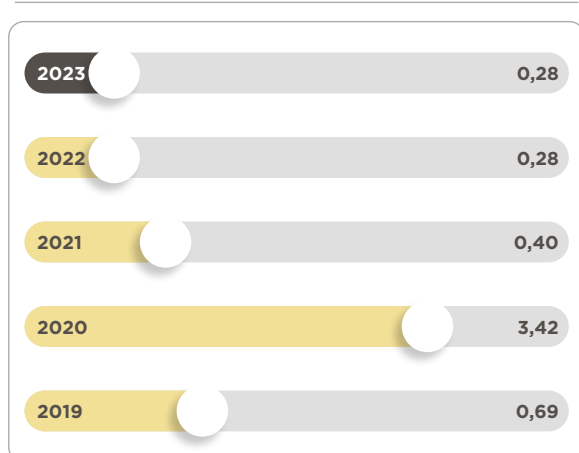
Rasio Keuangan Financial Ratios

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios						
Rasio Kas (x) Cash Ratio (x)	0,29	0,28	0,40	3,42	0,69	4,52%
Rasio Lancar (x) Current Ratio (x)	0,48	0,40	0,53	4,06	1,00	19,99%
Rasio Aktivitas Activity Ratios						
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	2,18	0,32	0,97	-	-	572,99%
Perputaran Piutang (kali) Accounts Receivable Turnover (times)	2,88	2,50	1,60	2,24	4,27	14,95%
Rasio Leverage Leverage Ratios						
Rasio Utang terhadap Total Ekuitas Debt-to-Equity Ratio	2,91	2,20	1,45	0,45	0,31	32,22%
Time Interest Earned (kali times)	(0,73)	(1,26)	(4,79)	-	-	-42,08%
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios						
Rasio Laba (Rugi) terhadap Total Aset Profit (Loss) Ratio to Total Assets	-3,82	-3,06	-3,13	0,77	2,16	-24,66%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas Profit (Loss) Ratio to Equity	-14,93	-9,81	-7,68	1,12	2,84	-52,29%

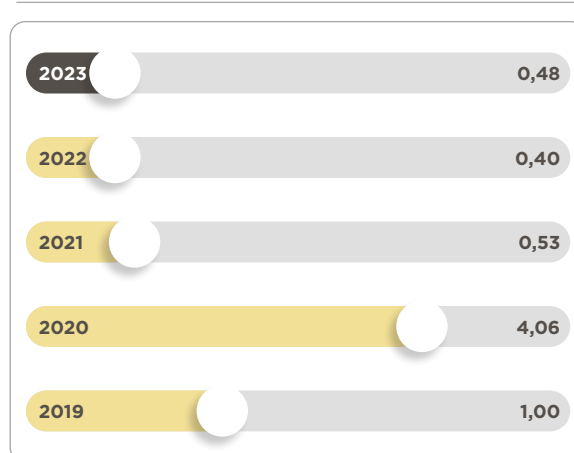
Rasio Keuangan Financial Ratios

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan Profit (Loss) Ratio to Revenue	-31,45	-31,93	-55,59	9,50	13,73	1,51%

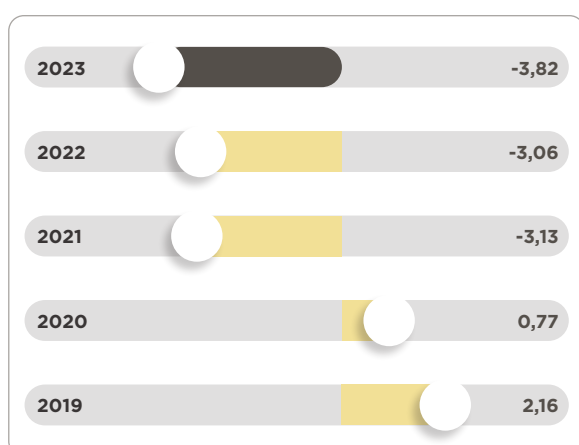
Rasio Kas Cash Ratios (x)



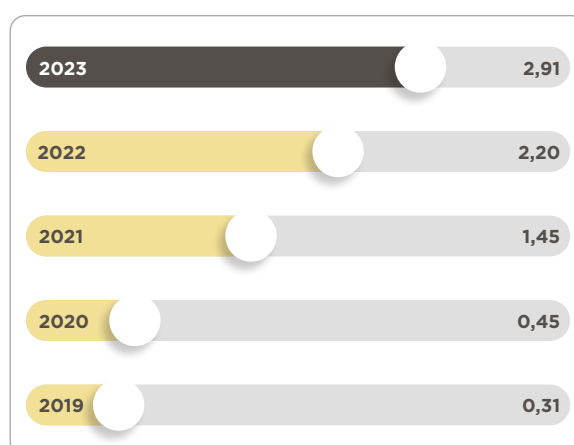
Rasio Lancar Current Ratios (x)



Rasio Laba (Rugi) terhadap Total Aset Profit (Loss) Ratio to Total Assets



Rasio Utang terhadap Total Ekuitas Profit (Loss) Ratio to Equity





Ikhtisar Operasional

Operational Highlights

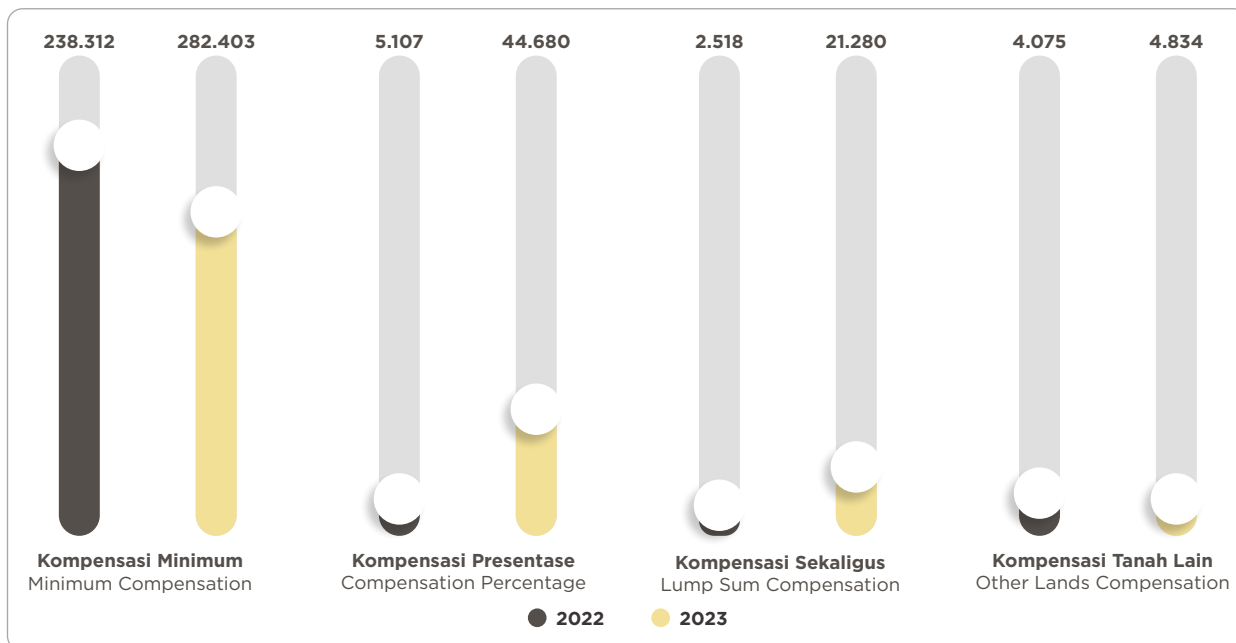
Ikhtisar Sumber Pendapatan Utama Overview of Primary Revenue Sources

(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	2023	2022	YoY 2023-2022 (%)
Kompensasi Compensation			
Kompensasi Minimum Minimum Compensation	282.403	238.312	18,50%
Kompensasi Persentase Percentage Compensation	44.680	5.107	774,85%
Kompensasi Sekaligus Lump Sum Compensation	21.280	2.518	745,02%
Kompensasi Tanah Lainnya Other Land Compensation	4.834	4.075	18,64%
Subjumlah Subtotal	353.197	250.012	41,27%
Non-Kompensasi Non-Compensation			
Event	321.729	252.244	27,55%
Hotel	75.301	16.190	365,11%
Bahan Bakar Minyak (SPBU) Gas Station (SPBU)	68.356	52.428	30,38%
Assessment	33.754	36.538	-7,62%
Pengelolaan Air Limbah dan Irigasi Wastewater and Irrigation Management	12.819	7.961	61,02%
Air Bersih Clean Water	3.734	2.510	48,76%
Jasa Akomodasi Accommodation Services	2.490	8.143	-69,43%
Lain-lain Others	13.834	31.462	-56,03%
Subjumlah Subtotal	532.017	407.476	30,56%
Jumlah Total	885.214	657.488	34,64%

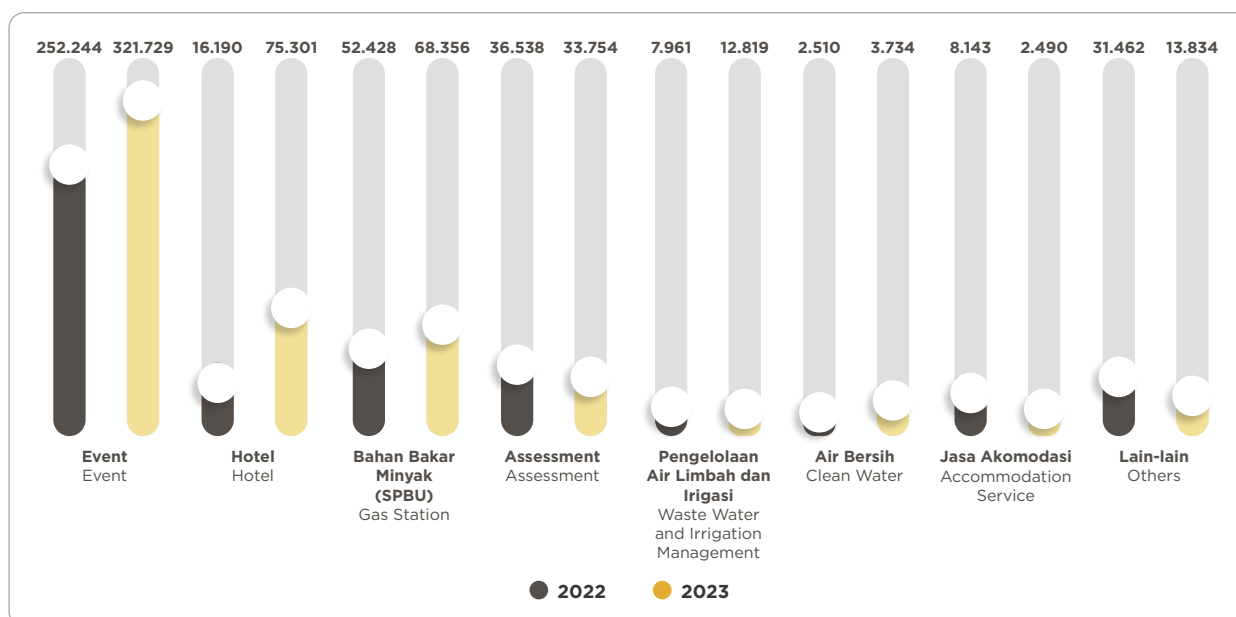
Kompensasi Compensation

Rp Juta
Rp Million



Kompensasi Compensation

Rp Juta
Rp Million





Ikhtisar Saham

Share Highlights

Komposisi Saham

Di tahun 2023, jumlah saham Seri A Dwiwarna ITDC dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berjumlah 1 lembar saham atau Rp1.000.000 dan saham Seri B dimiliki oleh PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) selaku induk BUMN Holding Aviassi dan Pariwisata Indonesia sebanyak 2.147.659 lembar saham atau Rp2.147.659.000.000.

Informasi tentang Perdagangan Saham dan Kepemilikan Saham oleh Publik

Hingga 31 Desember 2023, ITDC tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir; termasuk penghentian sementara perdagangan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Informasi tentang Aksi Korporasi

Pada 18 Januari 2023, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia. Untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia dilakukan penambahan penyertaan modal ke modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sebesar 2.147.659 lembar saham seri B.

Stock Composition

In 2023, the number of Series A Dwiwarna shares of ITDC held by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises amounted to 1 share or Rp1,000,000, and Series B shares were held by PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero), the parent company of the Indonesian Aviation and Tourism Holding, amounting to 2,147,659 shares or Rp2,147,659,000,000.

Information on Stock Trading and Public Ownership

Until December 31, 2023, ITDC has never conducted an Initial Public Offering (IPO) and has not traded its shares to the public. Thus, there is no information related to stock trading that includes market capitalization based on prices on the Stock Exchange where the shares are listed; highest, lowest, and closing stock prices based on prices on the Stock Exchange where the shares are listed; stock trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed; and information in the form of graphs containing at least closing prices based on prices on the Stock Exchange where the shares are listed and stock trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed. For each quarter in the last 2 (two) fiscal years; including temporary suspension of stock trading in the last 2 (two) years.

Information on Corporate Actions

On January 18, 2023, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 3 of 2023 concerning the Additional Capital Injection of the Republic of Indonesia into the Capital Stock of the Company PT Aviassi Pariwisata Indonesia. To strengthen the capital structure and enhance the business capacity of the Company PT Aviassi Pariwisata Indonesia, additional capital injection into the capital stock of the Company PT Aviassi Pariwisata Indonesia originating from the transfer of all series B shares owned by the Republic of Indonesia to the Company PT Pengembangan Pariwisata Indonesia amounted to 2,147,659 series B shares. Thus, the status of the Company PT Pengembangan Pariwisata Indonesia changed

Dengan demikian, Status Perusahaan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia menjadi pemegang saham Perusahaan Persero PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Informasi tentang Dividen Saham

Kebijakan terkait pembagian dividen mengacu kepada Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembagian Dividen Saham untuk tahun buku 2020 yang dilakukan di tahun 2021 dan Dividen Saham untuk tahun buku 2021 yang dibagikan di tahun 2022, serta Dividen Saham untuk tahun buku 2022 yang dibagikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Dividen Saham Stock Dividend	2023 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2022) (for Stock Dividends of 2022 Fiscal Year)	2022 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2021) (for Stock Dividends of 2021 Fiscal Year)	2021 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2020) (for Stock Dividends of 2020 Fiscal Year)
Dividen Kas yang Dibagikan Distributed Cash Dividend	-	-	-
Rasio Pembagian Dividen Dividend Distribution Ratio	-	-	-
Tanggal Pembayaran Payment Date	-	-	-

to a limited liability company, and the Company PT Aviasi Pariwisata Indonesia became the shareholder of the Company PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Information on Stock Dividends

The policy related to dividend distribution refers to the Articles of Association and decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS). The distribution of Stock Dividends for the 2020 fiscal year conducted in 2021 and Stock Dividends for the 2021 fiscal year distributed in 2022, as well as Stock Dividends for the 2022 fiscal year distributed in 2023, are as follows:

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

Bond, Sukuk, or Convertible Bond Overview

Sepanjang tahun 2023, ITDC tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya serta bentuk pendanaan lainnya seperti Medium Term Notes (MTN). Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk serta pendanaan lainnya.

Throughout the year 2023, ITDC did not issue bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities, nor did it utilize other forms of financing such as Medium Term Notes (MTN). Therefore, there is no information available regarding outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates/returns, maturity dates, and bond/sukuk ratings, as well as other forms of financing.



Kilas Peristiwa

Event Highlights



7 Januari 2023

January 7, 2023

Pengembangan Masyarakat Desa Penyangga @The Mandalika

Sejak Oktober 2022, ITDC bersama Tim P3TA dan Tim Matching Fund Unram telah melaksanakan berbagai program pengembangan masyarakat desa penyangga di The Mandalika. Pada (7/1), dilakukan monitoring program Integrated Farming System di Desa Sukadana, meliputi pengolahan pupuk organik, budidaya jamur tiram, dan pembinaan penyambungan bibit anggur. Pada (21/1), dilakukan pelatihan pembuatan baglog jamur bagi warga Dusun Belar, Desa Sukadana. Selain itu, dilakukan pelatihan mengolah dan mengemas produk hasil kebun bagi warga Dusun Ngolang, Desa Kuta, yang melibatkan 20 kelompok wanita dengan hasil kebun seperti sayur pare, selada, buah tomat, pepaya, anggur, pisang, cabe, dan jahe, yang diolah menjadi berbagai produk seperti keripik, manisan, selai, sambal, dan bubuk jahe.

Buffer Village Community Development @The Mandalika

Since October 2022, ITDC together with the P3TA Team and the Unram Matching Fund Team have implemented various buffer village community development programs in The Mandalika. On (7/1), monitoring of the Integrated Farming System program was carried out in Sukadana Village, including processing organic fertilizer, cultivating oyster mushroom, and fostering the grafting of grape seedlings. On (21/1), training was held on making mushroom baglogs for residents of Belar Hamlet, Sukadana Village. Apart from that, training was carried out on processing and packaging garden products for the residents of Ngolang Hamlet, Kuta Village, which involved 20 groups of women with garden products such as bitter melon, lettuce, tomato, papaya, grape, banana, chilli, and ginger, which processed into various products such as chips, sweets, jams, chili sauce, and ginger powder.



20 Januari 2023

January 20, 2023

ITDC NU Resmikan Penyaluran BBM Solar Subsidi di SPBU @The Mandalika

Pada Jumat (20/1), ITDC Nusantara Utilitas (NU) meresmikan penyaluran BBM Solar Subsidi di SPBU The Mandalika 54.835.14. Penyaluran ini adalah bagian dari program energi berkeadilan yang diperjuangkan oleh Pemerintah untuk menyediakan BBM yang merata di seluruh Indonesia. Kerjasama antara ITDC NU, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga mewujudkan program tersebut. Seremoni peresmian dihadiri oleh Bupati Lombok Tengah, Integrated Terminal Manager TBBM Ampenan PT Pertamina (Persero), dan kepala desa penyangga The Mandalika.

ITDC NU Inaugurates Distribution of Subsidized Diesel Fuel at SPBU @The Mandalika

On Friday (20/1), ITDC Nusantara Utilitas (NU) inaugurated the distribution of subsidized diesel fuel at The Mandalika 54.835.14 gas station. This distribution is part of the equitable energy program championed by the Government to provide fuel evenly throughout Indonesia. Collaboration between TDC NU, BPH Migas, and PT Pertamina Patra Niaga made this program possible. The inauguration ceremony was attended by the Regent of Central Lombok, the Integrated Terminal Manager TBBM Ampenan PT Pertamina (Persero), and the head of the buffer village of The Mandalika.



2-5 Februari 2023

February 2-5, 2023

ITDC Berpartisipasi Pada ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023

ITDC ikut berpartisipasi pada event ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023, untuk mempromosikan destinasi pariwisata The Nusa Dua, The Mandalika dan Golo Mori. ASEAN Tourism Forum (ATF) adalah event pariwisata tahunan terbesar di kawasan Asia Tenggara untuk mempromosikan wilayah ASEAN sebagai satu tujuan wisata di dunia. Dengan tema "ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations" ATF 2023 diselenggarakan pada 2-5 Februari 2023 di Jogja Expo Centre, Yogyakarta. ATF 2023 diharapkan dapat menarik lebih dari 2.000 peserta dari 25 negara, termasuk Organisasi Pariwisata Nasional (National Tourism Organization/NTO), para menteri dan pejabat pariwisata, peserta pameran, *buyers* internasional, media internasional dan nasional, juga *trade visitors* dalam industri pariwisata.

ITDC Participates in the 2023 ASEAN Tourism Forum (ATF)

ITDC participated in the 2023 ASEAN Tourism Forum (ATF) event, to promote tourism destinations The Nusa Dua, The Mandalika, and Golo Mori. ASEAN Tourism Forum (ATF) is the largest annual tourism event in the Southeast Asia region to promote ASEAN region as tourist destination of the world. With the theme "ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations" ATF 2023 was held on February 2-5, 2023 at the Jogja Expo Center, Yogyakarta. ATF 2023 expected to attract more than 2,000 participants from 25 countries, including National Tourism Organizations (NTO), tourism ministers and officials, exhibitors, international buyers, international and national media, as well as trade visitors in the tourism industry.



9 Februari 2023

February 9, 2023

MGPA dan APLOG Kerjasama Angkut Logistik Pembalap Jelang WSBK 2023

MGPA melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Angkasa Pura Logistik (APLOG) untuk penerimaan kedatangan barang dan pengeluaran barang di ajang WSBK Indonesian Round 2023 yang akan berlangsung 3-5 Maret 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit. Hal ini karena penerimaan logistik tersebut sangat banyak terutama yang melalui jalur laut mulai dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Perak Surabaya, hingga Pelabuhan di Bali. APLOG bertanggungjawab penuh terhadap logistik mulai dari kedatangan di Pelabuhan ataupun di Bandara sampai Sirkuit Mandalika hingga kepulangan kembali.

MGPA and APLOG Cooperate in Logistics Transport of Racers Ahead of WSBK 2023

MGPA signed cooperation agreement with PT Angkasa Pura Logistik (APLOG) for the receipt of arriving goods and the release of goods at the WSBK Indonesian Round 2023 which take place on March 3-5, 2023 at Pertamina Mandalika International Circuit. This is because there are lot of logistics receipts, especially via sea routes starting from Tanjung Priok Port, Jakarta, Perak Port, Surabaya, to the Port in Bali. APLOG is fully responsible for logistics starting from arrival at the port or airport to the Mandalika Circuit until returning home.



10-11 Februari 2023

February 10-11, 2023

Malam Puncak Bau Nyale 2023 di The Mandalika

Pantai Tanjung Aan, Lombok Tengah, NTB menjadi main venue/lokasi utama penyelenggaraan malam puncak event Bau Nyale 2023 yang merupakan kolaborasi Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kab. Loteng yang digelar pada 10-11 Februari 2023.

Bau Nyale Primary Night 2023 at The Mandalika

Tanjung Aan Beach, Central Lombok, NTB is the main venue/main location for holding the primary night of the Bau Nyale 2023 event, which is a collaboration between the Tourism Office of the NTB Provincial Government and the Loteng District Government which held on February 10-11, 2023.



11 Februari 2023

February 11, 2023

ITDC Tandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemkab Lombok Tengah

Pada 11 Februari, ITDC dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menandatangani kesepakatan di Bazaar Mandalika, Lombok, untuk program pemberdayaan masyarakat dengan hasil produksi kelompok tenaga kerja mandiri. Penandatanganan melibatkan General Manager The Mandalika, Molin Duwanno, dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. M. Nursiah, dengan saksi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan kerjasama antarpihak di wilayah tersebut.

ITDC Signed Joint Agreement with Central Lombok Regency Government

On February 11, ITDC and the Central Lombok Regency Government signed an agreement at the Mandalika Bazaar, Lombok, for community empowerment program with the production of independent labor groups. The signing involved the General Manager of The Mandalika, Molin Duwanno, and the Deputy Regent of Central Lombok, H. M. Nursiah, with the witness Minister of Manpower of the Republic of Indonesia, Ida Fauziyah. This collaboration aims to improve community welfare through resource utilization and cooperation between parties in the region.



23 Februari 2023

February 23, 2023

Tujuh Sponsor Ikut Sukseskan WSBK 2023

ITDC Group bersama dengan tujuh perusahaan terkemuka di Indonesia yang bertindak sebagai sponsor, ikut mensukseskan ajang World Superbike Indonesia Round (WSBK) 2023. Tujuh perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Astra Honda Motor, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), dan Hydro Coco.

Seven Sponsors Participated for the Success of WSBK 2023

The ITDC Group, together with seven leading companies in Indonesia who act as sponsors, is contributing for the success of the 2023 World Superbike Indonesia Round (WSBK). The seven companies include PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Astra Honda Motor, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), and Hydro Coco.



2 Maret 2023

March 2, 2023

ITDC - Bank Mandiri Tandatangani Perjanjian Kerjasama Naming Right Bale Mandiri @The Mandalika

ITDC dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani perjanjian kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan event WSBK 2023 dengan sponsor naming right Bale Mandiri di Bukit 360 di Pertamina Mandalika International Circuit. Penandatanganan diselenggarakan di Bale Mandiri Bukit 360 pada Kamis (2/3) oleh Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka dan Senior Vice President Bank Mandiri Rudi As Aturridha. Bukit 360 adalah lokasi strategis yang memungkinkan penonton melihat perhelatan balap motor dari berbagai sudut secara 360 derajat, termasuk area sirkuit, rumput, dan samudera Indonesia, menciptakan pemandangan yang indah.

ITDC - Bank Mandiri Signed Cooperation Agreement for Naming Right of Bale Mandiri @The Mandalika

ITDC and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed cooperation agreement to support the 2023 WSBK event with naming right sponsor Bale Mandiri at Bukit 360 at Pertamina Mandalika International Circuit. The signing was held at Bale Mandiri Bukit 360 on Thursday (2/3) by ITDC Director of Operations Troy Reza Warokka and Bank Mandiri Senior Vice President Rudi As Aturridha. Bukit 360 is strategic location that allows spectators to see motor racing events from various angles 360 degrees, including circuit area, grass, and the Indonesian ocean, creating beautiful view.



4 Maret 2023

March 4, 2023

Road to Thank God It's Festival (TGIF) by Univlox Sukses Digelar @The Nusa Dua

Road to Thank God It's Festival (TGIF) by UNIVLOX sukses digelar di Pulau Peninsula Nusa Dua. Event ini menampilkan artis internasional Secondhand Serenade dan artis dalam negeri seperti Astera, Nidji, JKT 48, D'Masiv, dan Pamungkas di Main Stage. Penampilan DJ dan Not So Koplo juga turut memeriahkan acara di Dwipa Stage. Dengan lebih dari 10.000 pecinta musik yang hadir, TGIF menjadi event musik yang meriah. Event ini merupakan inisiasi kedua UNIVLOX UVE di Pulau Peninsula, mengusung konsep konser luar ruangan dengan ambience yang instagramable dan berbagai booth makanan, photobooth, dan aktivitas lainnya.

Road to Thank God It's Festival (TGIF) by Univlox Successfully Held @The Nusa Dua

Road to Thank God It's Festival (TGIF) by UNIVLOX was successfully held on the Nusa Dua Peninsula Island. This event features international artists Secondhand Serenade and domestic artists such as Astera, Nidji, JKT 48, D'Masiv, and Pamungkas on the Main Stage. Performance of DJ and Not So Koplo also enlivened the event at the Dwipa Stage. With more than 10,000 music lovers attending, TGIF is a lively music event. This event is UNIVLOX UVE's second initiation on Peninsula Island, carrying the concept of an outdoor concert with an instagrammable ambience and various food booths, photobooths, and other activities.



3-5 Maret 2023
March 3-5, 2023

WSBK 2023 Indonesia Round Selesai Digelar @The Mandalika

WSBK Indonesian Round 2023 sukses di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, dengan Alvaro Bautista dari Aruba.it Racing - Ducati meraih kemenangan di dua race. Acara tersebut dihadiri oleh 59.251 penonton, naik 14,76% dari tahun sebelumnya. Sebanyak 1.621 volunteer NTB membantu penyelenggaraan. Selain kelas Superbike, acara ini juga menggelar Mandalika Racing Series 250cc. WSBK Mandalika 2023 menampilkan budaya lokal NTB, termasuk pertunjukan tarian dan Kamaval Budaya Mandalika. LSF, sebagai side event, menampilkan kerajinan dan kuliner NTB serta pertunjukan seni dan penampilan musik dari artis kenamaan. Kerjasama dengan Bank Indonesia NTB dan PT Netzme Kreasi Indonesia menyediakan sistem pembayaran digital untuk kemudahan transaksi selama event.

WSBK 2023 Indonesia Round Completed @The Mandalika

WSBK Indonesian Round 2023 was a success at the Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, with Alvaro Bautista from Aruba.it Racing - Ducati won in two races. The event was attended by 59,251 spectators, up 14.76% from the previous year. A total of 1,621 NTB volunteers helped with the implementation. Apart from the Superbike class, this event also holds the Mandalika Racing Series 250cc. WSBK Mandalika 2023 showcases local NTB culture, including dance performances and Mandalika Cultural Kamaval. LSF, as a side event, displays NTB crafts and culinary delights as well as art performances and musical performances from famous artists. Collaboration with Bank Indonesia NTB and PT Netzme Kreasi Indonesia provides digital payment system for easy transactions during the event.



7 Maret 2023
March 7, 2023

ITDC Utilitas - Recoolit Bumi Lestari Jalin Kerjasama dalam Pengembangan Limbah @The Nusa Dua

ITDC Nusantara Utilitas (ITDC Utilitas) dan PT Recoolit Bumi Lestari (Recoolit) menandatangani Nota Kesepahaman terkait Pengelolaan Limbah Refrigerant di The Nusa Dua dan sekitarnya untuk mencegah perubahan iklim. Recoolit adalah perusahaan pertama di Indonesia yang memberikan insentif kepada mitra dalam pengelolaan dan pemusnahan limbah refrigerant. Penandatanganan dilakukan di kantor The Nusa Dua pada Selasa (7/3) oleh Direktur Utama ITDC Utilitas A.A. Istri Ratna Dewi dan Head of Business Operation and Human Resources Recoolit Ni Luh Putu Yuniari. Program ini tidak membebankan biaya kepada mitra/tenant, yang nantinya akan mendapatkan Sertifikat Green Building Internasional dan Sertifikat Pengolahan serta Pemusnahan limbah sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup.

ITDC Utilitas - Recoolit Bumi Lestari Established Collaboration in Waste Development @The Nusa Dua

ITDC Nusantara Utilitas (ITDC Utilitas) and PT Recoolit Bumi Lestari (Recoolit) signed Memorandum of Understanding regarding Refrigerant Waste Management in The Nusa Dua and its surroundings to prevent climate change. Recoolit is the first company in Indonesia to provide incentives to partners in the management and destruction of refrigerant waste. The signing was conducted at The Nusa Dua office on Tuesday (7/3) by the President Director of ITDC Utilitas A.A. Istri Ratna Dewi and Head of Business Operations and Human Resources Recoolit Ni Luh Putu Yuniari. This program does not charge fees to partners/tenants, who will later receive an International Green Building Certificate and Waste Processing and Destruction Certificate according to Ministry of the Environment standards.



Maret 2023
March, 2023

Kecak & Barong Dance Show @The Nusa Dua

ITDC memperkenalkan atraksi wisata baru, Kecak and Barong Dance Show, di kawasan The Nusa Dua untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Pertunjukan perdana ini di Taksu Art Stage menampilkan pertunjukan budaya yang populer di Bali. Kecak and Barong Dance Show akan diselenggarakan setiap Jumat pukul 18.00-19.00 WITA dengan harga tiket Rp150.000/orang. Pertunjukan ini mengusung konsep "Bali Langen", menggambarkan keindahan dan daya tarik Bali yang menyenangkan.

Kecak & Barong Dance Show @The Nusa Dua

ITDC introduced new tourist attraction, Kecak and Barong Dance Show, in The Nusa Dua area to increase tourist visits. This premiere performance at the Taksu Art Stage features cultural performances that are popular in Bali. The Kecak and Barong Dance Show held every Friday at 18.00-19.00 WITA with ticket price of Rp150,000/person. This show offers the concept of "Bali Langen", depicting the beauty and delightful attraction of Bali.



17-19 Maret 2023

March 17-19, 2023

Road to Ramadhan Kareem @The Mandalika

ITDC menyelenggarakan Road to Ramadhan Kareem The Mandalika 2023 untuk menyambut bulan Ramadan 1444 H. Acara ini melibatkan kegiatan seperti Tabligh Akbar, Kuliah Subuh, Festival Da'i Cilik, Lomba Adzan, dan Festival Seni Islami di Masjid Nurul Bilad, The Mandalika. Dengan tema "Al Ittihadu Asasun Najaah" (Persatuan adalah pangkal keberhasilan), acara ini bertujuan menciptakan sinergi antara ITDC, *stakeholder*, dan masyarakat Desa Penyangga The Mandalika untuk mengembangkan pariwisata. Road to Ramadhan Kareem juga melibatkan partisipasi masyarakat desa penyangga dengan menggelar Bazaar The Mandalika. Acara tersebut mencakup berbagai lomba dan kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan, diakhiri dengan Shalat Idul Fitri 1444 H di Masjid Nurul Bilad.

Road to Ramadhan Kareem @The Mandalika

ITDC holding the Road to Ramadhan Kareem The Mandalika 2023 to welcome the month of Ramadan 1444 H. This event involves activities such as Tabligh Akbar, Fajr Lecture, Little Da'i Festival, Adhan Competition, and Islamic Arts Festival at the Nurul Bilad Mosque, The Mandalika. With the theme "Al Ittihadu Asasun Najaah" (Unity is the basis of success), this event aims to create synergy between ITDC, stakeholders, and the community of Pebungga The Mandalika Village to develop tourism. Road to Ramadhan Kareem also involves the participation of the buffer village community by holding The Mandalika Bazaar. The event includes various competitions and religious activities during the month of Ramadan, ending with the Eid al-Fitr 1444 H prayer at the Nurul Bilad Mosque.



17-19 Maret 2023

March 17-19, 2023

Joyland Festival @The Nusa Dua

Joyland Festival sukses digelar di Pulau Peninsula Nusa Dua, The Nusa Dua pada 17-19 Maret. Ada lebih dari 22.000 pengunjung yang menikmati penampilan 61 musisi, 11 film pendek, dan 13 lokakarya. Ada tiga panggung, termasuk panggung utama Joyland Stage, Plainsong Live Stage, dan Lily Pad. Musisi internasional seperti Phoenix, M.I.A, dan Sigrid tampil, serta musisi lokal seperti Tulus, Raisa, dan lainnya. Ada juga bioskop outdoor Cinerillaz, Shrooms Garden untuk stand up comedy, dan White Peacock untuk aktivitas keluarga.

Joyland Festival @The Nusa Dua

The Joyland Festival was successfully held on the Nusa Dua Peninsula Island, The Nusa Dua on March 17-19. There were more than 22,000 visitors who enjoyed performances by 61 musicians, 11 short films and 13 workshops. There were three stages, including main stage Joyland Stage, Plainsong Live Stage, and Lily Pad. International musicians such as Phoenix, M.I.A, and Sigrid performed, as well as local musicians such as Tulus, Raisa, and others. There was also an outdoor Cinerillaz, Shrooms Garden for stand up comedy, and White Peacock for family activities.



31 Maret 2023

March 31, 2023

Penyaluran Bantuan Untuk Program Stunting di Desa Mertak

Pada 31 Maret, ITDC memberikan bantuan 600 butir telur ayam untuk program stunting di Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah. Bantuan ini bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan ITDC untuk meningkatkan gizi anak-anak di desa penyangga kawasan The Mandalika. General Manager The Mandalika Molin Duwanno dan Ketua Kelompok Kerja Advokasi dan Informasi BKKBN Provinsi NTB menyerahkan bantuan tersebut kepada Kepala Desa Mertak Sahnun. Program ini kolaborasi antara ITDC dan BKKBN Provinsi NTB, diharapkan dapat mendorong institusi lain untuk mengatasi isu stunting. Menurut data BKKBN Provinsi NTB, jumlah keluarga berpotensi risiko stunting di NTB pada 2021 mencapai 557.301 keluarga, dengan Lombok Tengah menempati peringkat kedua dengan 111.407 keluarga.

Distribution of Aid for Stunting Program in Mertak Village

On March 31, ITDC provided assistance with 600 chicken eggs for the stunting program in Mertak Village, Pujut, Central Lombok. This assistance is part of ITDC's social and environmental responsibility to improve children's nutrition in the buffer villages of The Mandalika area. General Manager of The Mandalika Molin Duwanno and Chair of the NTB Province BKKBN Advocacy and Information Working Group handed over the assistance to Village Head Mertak Sahnun. This program is collaboration between ITDC and the NTB Province BKKBN. It is expected to encourage other institutions to overcome the issue of stunting. According to data from the NTB Province BKKBN, the number of families at risk of stunting in NTB in 2021 reached 557,301 families, with Central Lombok ranking second with 111,407 families.



Maret-April 2023
March-April, 2023

**Tausiyah Selama Bulan Ramadan
@The Mandalika**

ITDC mengadakan kegiatan Tausiyah setiap hari di bulan Ramadan di Masjid Nurul Bilad The Mandalika. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lombok Tengah setelah Shalat Ashar, dengan satu pembicara dan satu moderator. Acara ini dihadiri oleh seluruh masyarakat di Kawasan The Mandalika dan diakhiri dengan pembagian takjil saat berbuka puasa.

**Tausiyah During the Month of Ramadan
@The Mandalika**

ITDC held Tausiyah activities every day in the month of Ramadan at the Nurul Bilad Mosque in The Mandalika. This activity was organized by Indonesian Ulema Council (MUI) Central Lombok Regency after Asr prayers, with one speaker and one moderator. This event was attended by all people in The Mandalika area and ended with the distribution of takjil to break the fast.



18 April 2023
April 18, 2023

**Penyaluran Paket Sembako dan Santunan
bagi Masyarakat Desa Sekitar
@The Mandalika**

ITDC salurkan paket sembako dan santunan kepada warga sekitar The Mandalika. Dipimpin oleh GM The Mandalika, Molin Duwanno, bantuan disalurkan simbolis di Observation Deck Pertamina Mandalika International Circuit. Paket berisi beras, gula, mie instan, dan teh, serta santunan Rp70 juta bagi anak yatim piatu.

**Distribution of Basic Food Packages and
Compensation to Village Communities
Around @The Mandalika**

ITDC distributes basic food packages and compensation to residents around The Mandalika. Led by GM The Mandalika, Molin Duwanno, aid was distributed symbolically at the Observation Deck of the Pertamina Mandalika International Circuit. The package contains rice, sugar, instant noodles and tea, as well as compensation of Rp70 million for orphans.



7-8 Mei & 10 Mei 2023
May 7-8 & May 10, 2023

**Golo Mori Convention Center Jadi Venue
Rangkaian Event KTT ke-42 ASEAN 2023**

Golo Mori Convention Center (GMCC) menjadi tuan rumah event KTT ke-42 ASEAN 2023, yang diadakan pada tanggal 7-8 dan 10 Mei. Acara ini dimulai dengan pertemuan Committee of Permanent Representatives to ASEAN pada tanggal 7 Mei, di mana isu-isu yang akan dibahas oleh pemimpin ASEAN dibahas oleh Duta Besar M.I. Derry Aman. Pada tanggal 8 Mei, ASEAN Senior Officials' Meeting berfokus pada persiapan KTT ke-42 ASEAN 2023. Pada tanggal 10 Mei, 22 Perwakilan Pemuda ASEAN bertemu dengan pemuda lokal Labuan Bajo untuk pertukaran pandangan tentang teknologi dan kebudayaan, diikuti dengan penanaman pohon bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di sekitar Teno Amphitheater.

**Golo Mori Convention Center Becomes
Venue for Series of Events for the 42nd
ASEAN Summit 2023**

Golo Mori Convention Center (GMCC) hosted the 42nd ASEAN Summit 2023, which was held on May, 7-8 and 10. This event began with meeting of the Committee of Permanent Representatives to ASEAN on May 7, where the issues to be discussed by ASEAN leaders were discussed by Ambassador M.I. Derry Aman. On May 8, the ASEAN Senior Officials' Meeting focused on preparations for the 42nd ASEAN Summit 2023. On May 10, 22 ASEAN Youth Representatives met with local Labuan Bajo youth to exchange views on technology and culture, followed by tree planting with the Minister of Tourism and Sandiaga Uno's Creative Economy around the Teno Amphitheater.



12 Mei 2023

May 12, 2023

Monitoring Program Pencegahan Stunting @The Mandalika

Pada Jumat (12/5), ITDC melakukan kegiatan monitoring ke-4 program pencegahan stunting di desa penyangga The Mandalika, termasuk Dusun Sunggung, Desa Mertak. Selain memantau perkembangan tumbuh kembang anak dan memberikan makanan tambahan protein hewani kepada mereka, juga dilakukan sosialisasi pencegahan stunting dengan fokus pada pengurangan angka pernikahan dini kepada para Ibu di Dusun Sunggung, Desa Mertak. Hasilnya, 7 dari 10 anak di desa tersebut mengalami peningkatan berat badan rata-rata hingga 1 kg. Program ini merupakan kolaborasi TJSL ITDC dengan BKKBN Provinsi NTB.

Monitoring Stunting Prevention Program @The Mandalika

On Friday (12/5), ITDC carried out monitoring activities for the 4 stunting prevention programs in the buffer villages of The Mandalika, including Sunggung Hamlet, Mertak Village. Apart from monitoring children's growth and development and providing them with additional animal protein food, there was also outreach on preventing stunting with a focus on reducing the rate of early marriage to mothers in Sunggung Hamlet, Mertak Village. As a result, 7 out of 10 children in the village experienced an average increase in body weight of up to 1 kg. This program is a collaboration between TJSL ITDC and BKKBN NTB Province.



8-11 Juni 2023

June 8-11, 2023

Dream Machine 2023 @The Nusa Dua

The Nusa Dua sukses menjadi tuan rumah event Dream Machine 2023 dengan tema "Let's Get Tropical" dari Kamis hingga Senin (8-11/06). Sebanyak 2.500 wisatawan Australia menghadiri acara ini, yang mencakup kegiatan di beberapa hotel di kawasan tersebut seperti wellness program, pool, dan beach party. Pulau Peninsula menjadi venue utama untuk acara musik selama tiga hari berturut-turut (9-11/6). Pengunjung menginap dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di hotel-hotel seperti Grand Hyatt Bali, Melia Bali, Merusaka Nusa Dua, Nusa Dua Beach Hotel and Spa, The Laguna a Luxury Collection Resort & Spa, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Courtyard by Marriott, dan Kayumanis Nusa Dua Private Villa and Spa.

Dream Machine 2023 @The Nusa Dua

The Nusa Dua successfully hosted the Dream Machine 2023 event with the theme "Let's Get Tropical" from Thursday to Monday (8-11/06). As many as 2,500 Australian tourists attended this event, which included activities at several hotels in the area such as wellness programs, pools, and beach parties. Peninsula Island became main venue for music event for three consecutive days (9-11/6). Visitors stay and participate in various activities at hotels such as Grand Hyatt Bali, Melia Bali, Merusaka Nusa Dua, Nusa Dua Beach Hotel and Spa, The Laguna a Luxury Collection Resort & Spa, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Courtyard by Marriott, and Kayumanis Nusa Dua Private Villa and Spa.



16 Juni 2023

June 16, 2023

Penandatanganan MoU antara ITDC Nusantara Utilitas dengan PT Bhumi Visatanda Indonesia Pengelola TMII

Pada Jumat (16/6), ITDC NU dan PT Bhumi Visatanda Indonesia (pengelola Taman Mini Indonesia Indah) menandatangani MoU tentang kajian potensi kerjasama pengembangan dan pengelolaan utilitas di TMII. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Operasi ITDC NU dan Direktur Operasi PT Bhumi Visatanda Indonesia.

Signing of the MoU between ITDC Nusantara Utilitas and PT Bhumi Visatanda Indonesia of TMII Management

On Friday (16/6), ITDC NU and PT Bhumi Visatanda Indonesia (management of Taman Mini Indonesia Indah) signed MoU regarding the study of potential cooperation in developing and managing utilities at TMII. The event was attended by the Director of Operations of ITDC NU and the Director of Operations of PT Bhumi Visatanda Indonesia.



14-17 Juni 2023

June 14-17, 2023

**Bali and Beyond Travel Fair ke-9
@The Nusa Dua**

Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2023, salah satu ajang pameran perjalanan dan wisata terkemuka di Indonesia, sukses digelar di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua Bali, pada Rabu-Sabtu (14-17/6). Acara ini merupakan penyelenggaraan ke-9 dan mengusung tema "Reconnecting to Quality and Sustainable Tourism". BBTF 2023 diikuti oleh 230 *sellers* dari 5 negara, termasuk China, Italia, Malaysia, Amerika, dan Indonesia, serta dihadiri oleh 350 *buyers* dari 51 negara.

**9th Bali and Beyond Travel Fair
@The Nusa Dua**

Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2023, one of the leading travel and tourism exhibition events in Indonesia, was successfully held at the Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua Bali, on Wednesday-Saturday (14-17/6). This event is the 9th event and carries the theme "Reconnecting to Quality and Sustainable Tourism". BBTF 2023 was attended by 230 sellers from 5 countries, including China, Italy, Malaysia, America, and Indonesia, and attended by 350 buyers from 51 countries.



18 Juni 2023

June 18, 2023

**Finish Route Three Island Journey
@Pertamina Mandalika International Circuit**

Pada Minggu, (18/6), Pertamina Mandalika International Circuit menjadi *finish route* event ultra cycling, Three Island Journey 2023. Event ini menarik dengan rute yang ramah bagi pesepeda pemula dan diselenggarakan dalam tiga etape. Dimulai dari Surabaya menuju Taman Nasional Bali Barat, kemudian dari Taman Nasional Bali Barat menuju Padang Bai, hingga akhirnya, dari Hotel Raja Kuta Mandalika ke Pertamina Mandalika International Circuit. Total peserta yang ikut dalam event ini sebanyak 80 orang.

**Finish Route Three Island Journey
@Pertamina Mandalika International Circuit**

On Sunday (18/6), the Pertamina Mandalika International Circuit was the finish route for the ultra cycling event, Three Island Journey 2023. This event is interesting with a route that is friendly for beginner cyclists and is held in three stages. Starting from Surabaya to the West Bali National Park, then from the West Bali National Park to Padang Bai, until finally, from the Raja Kuta Mandalika Hotel to the Pertamina Mandalika International Circuit. The total number of participants who took part in this event was 80 people.



24 & 30 Juni 2023

June 24 & 30, 2023

**ITDC Berbagi Hewan Kurban dalam
Rangka Idulada 1444 H**

Pada peringatan Iduladha 1444 H, ITDC membagikan hewan kurban di The Mandalika, Kota Praya, dan Kota Mataram pada Sabtu (24/6). Sebanyak 10 hewan kurban diserahkan di The Mandalika oleh General Manager Molin Duwanno kepada perwakilan masyarakat dari 7 Desa Penyangga, 2 Dusun, dan 1 Kecamatan di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Sementara, dua hewan kurban lainnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di The Nusa Dua, pada Jumat (30/6), ITDC menyerahkan 2 sapi dan 3 kambing kepada perwakilan umat Muslim, disaksikan oleh Direktur SDM dan Legal Compliance Wenda Ramadya Nabel serta tim manajemen The Nusa Dua.

**ITDC Shared Sacrificial Animals in the
Commemoration of Eid al-Fitr 1444 H**

On the occasion of Eid al-Adha 1444 H, ITDC distributed sacrificial animals in The Mandalika, Praya City, and Mataram City on Saturday (24/6). A total of 10 sacrificial animals were handed over at The Mandalika by General Manager Molin Duwanno to community representatives from 7 Buffer Villages, 2 Hamlets, and 1 Subdistrict in Pujut District, Central Lombok. Meanwhile, the other two sacrificial animals were handed over to the Central Lombok Regency Government and the West Nusa Tenggara Provincial Government. At The Nusa Dua, on Friday (30/6), ITDC handed over 2 cows and 3 goats to representatives of the Muslim community, witnessed by the Director of Human Resources and Legal Compliance Wenda Ramadya Nabel and The Nusa Dua management team.



26-28 Juni 2023

June 26-28, 2023

Kolaborasi Program Bersama ITDC dengan PT Kimia Farma Diagnostika

Pada Rabu (28/6), ITDC dan PT Kimia Farma Diagnostika (KF Lab & Klinik) menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kolaborasi Pelaksanaan Program-Program Bersama dalam Bidang Hospitality Kesehatan dan Pariwisata. Kolaborasi ini meliputi dukungan program bersama dan fokus pada bidang kesehatan dan pariwisata di kawasan The Nusa Dua. Sebagai bagian dari kerjasama tersebut, dilakukan sentra vaksinasi booster II bagi pelaku pariwisata di The Nusa Dua pada (26-28/6), dihadiri sekitar 3.000 orang. Program ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan tenant di kawasan The Nusa Dua. KF Lab & Klinik menyediakan 10 tenaga medis dan 3 tenaga non-medis, sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Badung juga menyumbangkan 3 tim medis dan 2 unit ambulance.

ITDC Joint Program Collaboration with PT Kimia Farma Diagnostika

On Wednesday (28/6), ITDC and PT Kimia Farma Diagnostika (KF Lab & Clinic) signed Memorandum of Understanding regarding Collaboration in Implementing Joint Programs in the Field of Health Hospitality and Tourism. This collaboration includes joint program support and focus on health and tourism sectors in the Nusa Dua area. As part of this collaboration, a booster vaccination center II was held for tourism actors at The Nusa Dua on (26-28/6), attended by around 3,000 people. This program is supported by the Badung District Health Service and tenants in the Nusa Dua area. KF Lab & Clinic provided 10 medical personnel and 3 non-medical personnel, while the Badung District Health Service also contributed 3 medical teams and 2 ambulance units.



Juni 2023

June, 2023

Kuta Lane, Landmark Baru @The Mandalika

ITDC telah membangun Kuta Lane, sebuah koridor pedestrian yang menghubungkan Bazaar Mandalika dengan Kuta Beach Park. Koridor ini dirancang untuk meningkatkan alur aktivitas pengunjung antara kedua area tersebut. Kuta Lane menawarkan akses yang nyaman dengan berbagai fasilitas, termasuk area seni, taman bermain anak-anak, spot foto ikonik, dan panggung untuk pertunjukan seni. Pembangunan dimulai pada 21 Januari 2023 dan selesai pada 8 Mei 2023. Kuta Lane juga menjadi pusat kegiatan budaya dan seni dengan menyelenggarakan pertunjukan musik, tari, dan teater yang menarik bagi wisatawan.

Kuta Lane, New Landmark @The Mandalika

ITDC has built Kuta Lane, a pedestrian corridor that connects Mandalika Bazaar with Kuta Beach Park. This corridor is designed to improve the flow of visitor activity between the two areas. Kuta Lane offers convenient access to various facilities, including an arts area, children's playground, iconic photo spots, and a stage for art performances. Construction began on January 21, 2023 and was completed on May 8, 2023. Kuta Lane is also a center for cultural and artistic activities by hosting attractive music, dance, and theater performances for tourists.



9 Juli 2023

July 9, 2023

Erick Thohir Resmikan Tiga Proyek Baru @The Mandalika

Pada Minggu (9/7), Menteri BUMN RI Erick Thohir meresmikan tiga proyek baru di The Mandalika, NTB. Proyek tersebut meliputi Pullman Lombok Merujani Mandalika Beach Resort, Kuta Lane, dan Masjid Al-Hakim. Pullman Lombok Merujani Mandalika Beach Resort adalah hotel bintang lima pertama di Mandalika, dengan fasilitas lengkap seperti lobby, kolam renang, gym & spa, dan lainnya. Kuta Lane adalah landmark baru yang berfungsi sebagai koridor pedestrian yang nyaman antara Bazaar Mandalika dan Kuta Beach Park. Sementara Masjid Al-Hakim dibangun untuk memberikan fasilitas keagamaan yang nyaman bagi pengunjung dan masyarakat setempat di The Mandalika.

Erick Thohir Inaugurated Three New Projects @The Mandalika

On Sunday (9/7), Indonesian Minister of BUMN Erick Thohir inaugurated three new projects in The Mandalika, NTB. The project includes Pullman Lombok Merujani Mandalika Beach Resort, Kuta Lane, and Al-Hakim Mosque. Pullman Lombok Merujani Mandalika Beach Resort is the first five-star hotel in Mandalika, with complete facilities such as lobby, swimming pool, gym & spa, and others. Kuta Lane is a new landmark that functions as comfortable pedestrian corridor between Mandalika Bazaar and Kuta Beach Park. Meanwhile, the Al-Hakim Mosque was built to provide comfortable religious facilities for visitors and local community at The Mandalika.



13 Juli 2023

July 13, 2023

ITDC Kembali Tandatangani MoU dengan Kejati Bali

Pada Kamis (13/7), ITDC menandatangani MoU dengan Kejaksaan Tinggi Bali tentang hukum perdata dan tata usaha negara di Kantor ITDC The Nusa Dua. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur SDM dan Legal Compliance ITDC Wenda R. Nabel dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr. Narendra R. Jatna, SH, LLM. Ini adalah perpanjangan kerjasama yang dimulai sejak 2005 untuk mendukung bisnis di kawasan pariwisata The Nusa Dua.

ITDC Re-Signed MoU with Bali Prosecutor's Office

On Thursday (13/7), ITDC signed MoU with the Bali Prosecutor's Office regarding civil law and state administration at the ITDC The Nusa Dua Office. The signing was conducted by ITDC Director of HR and Legal Compliance Wenda R. Nabel and Head of the Bali Prosecutor's Office Dr. Narendra R. Jatna, SH, LLM. This is an extension of cooperation that began in 2005 to support businesses in the Nusa Dua tourism area.



14-16 Juli 2023

July 14-16, 2023

TGIF by UNIVLOX Live 2023 @The Nusa Dua

Kawasan The Nusa Dua menjadi tuan rumah penyelenggaraan event Thank God It's Festival (TGIF) by UNIVLOX Live pada Jumat-Minggu (14-16/7) di Peninsula Island. Event ini menampilkan sejumlah musisi dan band ternama seperti Dewa - 19, The Changcuters, Yura Yunita, dan lainnya, dan berhasil menarik hampir 13.000 pecinta musik. TGIF by UNIVLOX Live ini merupakan puncak dari event musik Road to TGIF yang telah sukses diselenggarakan sebelumnya di Pulau Peninsula The Nusa Dua pada Maret 2023.

TGIF by UNIVLOX Live 2023 @The Nusa Dua

The Nusa Dua area hosted the Thank God It's Festival (TGIF) by UNIVLOX Live event on Friday-Sunday (14-16/7) on Peninsula Island. This event featured a number of well-known musicians and bands such as Dewa 19, The Changcuters, Yura Yunita, and others, and succeeded in attracting almost 13,000 music lovers. TGIF by UNIVLOX Live is the culmination of the Road to TGIF music event which was previously successfully held on the Peninsula Island of The Nusa Dua in March 2023.



15-16 Juli 2023

July 15-16, 2023

Pertamina Enduro Mandalika Racing Series 2023 @The Mandalika

Kejuaraan Nasional Balap Motor Sport Bike Pertamina Enduro Mandalika Racing Series (MRS) 2023 putaran kedua sukses digelar di Pertamina Mandalika International Circuit pada Sabtu-Minggu (15-16/7). Sebanyak 59 pembalap papan atas Nasional berlomba dalam tiga kelas utama: Sport 250, Sport 150, dan Supersport 600, serta dua kelas Supporting Race: Underbone 150 dan Superbike Community. Pada race 2 MRS 2023, juara pertama diraih oleh Arai Agaska Dibani Laksana (Underbone 150), Mohammad Adenanta Putra (Superbike dan National Supersport 600cc), Husni Zainul Fuadzy (National Sport 150cc), dan Rheza Danica Ahrens (National Sport 250cc). Juara kedua dan ketiga juga diraih oleh pembalap yang berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Pertamina Enduro Mandalika Racing Series 2023 @The Mandalika

The second round of the 2023 Pertamina Enduro Mandalika Racing Series (MRS) National Sport Bike Racing Championship was successfully held at the Pertamina Mandalika International Circuit on Saturday-Sunday (15-16/7). A total of 59 top National racers competed in three main classes: Sport 250, Sport 150, and Supersport 600, as well as two Supporting Race classes: Underbone 150 and Superbike Community. In race 2 of MRS 2023, first place was won by Arai Agaska Dibani Laksana (Underbone 150), Mohammad Adenanta Putra (Superbike and National Supersport 600cc), Husni Zainul Fuadzy (National Sport 150cc), and Rheza Danica Ahrens (National Sport 250cc). Second and third places were also won by outstanding racers from various regions in Indonesia.



24 Juli 2023

July 24, 2023

Kolaborasi ITDC, MGPA & PLN UIW NTB Gelar Mandalika EV Experience

Pada Minggu (23/7), ITDC, MGPA, dan PT PLN UIW NTB menggelar Mandalika EV Experience di Pertamina Mandalika International Circuit. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai atau Net Zero Emission 2050 di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika. Acara internasional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat kendaraan listrik dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Penempatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di KEK Mandalika antara ITDC dan PT PLN UIW NTB. Penandatanganan dilakukan oleh General Manager The Mandalika Molin Duwanno dan General Manager PT PLN UIW NTB Sudjarwo.

Collaboration between ITDC, MGPA & PLN UIW NTB in Holding Mandalika EV Experience

On Sunday (23/7), ITDC, MGPA, and PT PLN UIW NTB held the Mandalika EV Experience at the Pertamina Mandalika International Circuit. This activity is a form of the government's commitment to accelerate the battery-based electric vehicle program or Net Zero Emission 2050 at the Mandalika Super Priority Tourism Destination (DPSP). This international event aims to provide an understanding of the benefits of electric vehicles in reducing greenhouse gas emissions and increasing energy efficiency. Apart from that, a Cooperation Agreement was signed regarding the Placement of Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) in the Mandalika KEK between ITDC and PT PLN UIW NTB. The signing was conducted by General Manager of The Mandalika Molin Duwanno and General Manager of PT PLN UIW NTB Sudjarwo.



13 Agustus 2023

August 13, 2023

Idemitsu FIM ARRC 2023 @The Mandalika

Kompetisi balap motor Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 Indonesia Round di Pertamina Mandalika International Circuit telah selesai. Pada race 2, beberapa pebalap Indonesia berhasil meraih posisi podium. Dalam kompetisi ini, 101 pebalap dari 13 negara berpartisipasi, termasuk 19 pebalap nasional dan 11 pebalap wild card. Di kelas UB150, Arai Agaska Dibani Laksana meraih posisi 1, diikuti oleh Nazirul Izzat MD Bahauddin di posisi 2, dan Husni Zainul Fuadzi di posisi 3. Sedangkan di kelas AP250, Herjun Atna Firdaus dan Rheza Danica Ahrens meraih posisi 1 dan 2, sementara posisi 3 ditempati oleh Irfan Ardiansyah. Pada kelas SS600, Mohammad Adenanta Putra berhasil meraih posisi 3.

Idemitsu FIM ARRC 2023 @The Mandalika

The Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 Indonesia Round motorbike racing competition at the Pertamina Mandalika International Circuit has finished. In race 2, several Indonesian racers managed to reach podium positions. In this competition, 101 riders from 13 countries participated, including 19 national riders and 11 wild card riders. In the UB150 class, Arai Agaska Dibani Laksana won 1st position, followed by Nazirul Izzat MD Bahauddin in 2nd position, and Husni Zainul Fuadzi in 3rd position. Meanwhile in the AP250 class, Herjun Atna Firdaus and Rheza Danica Ahrens won 1st and 2nd positions, respectively, while position 3 is occupied by Irfan Ardiansyah. In the SS600 class, Mohammad Adenanta Putra managed to get 3rd place.



23 Agustus 2023

August 23, 2023

Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Lapangan Padel di @The Nusa Dua dan @The Mandalika

Pada Rabu (23/8), ITDC dan PT Indonesian Paradise Property Tbk. menandatangani Nota Kesepahaman untuk Pengembangan Fasilitas Kompleks Lapangan Padel Tennis di The Nusa Dua, Bali, dan The Mandalika, NTB. Ini bertujuan memberikan fasilitas berkualitas bagi komunitas pemain padel yang terus berkembang di Indonesia serta mendukung lahirnya atlet-atlet padel berbakat.

Signing of Memorandum of Understanding for Padel Field Development at @The Nusa Dua and @The Mandalika

On Wednesday (23/8), ITDC and PT Indonesian Paradise Property Tbk. signed a Memorandum of Understanding for the Development of Padel Tennis Court Complex Facilities at The Nusa Dua, Bali, and The Mandalika, NTB. This aims to provide quality facilities for the padel player community which continues to grow in Indonesia and support the birth of talented padel athletes.



23 Agustus 2023

August 23, 2023

Brand Gathering MotoGP 2023

MGPA, IMI, dan Dyandra & Co. mengadakan brand gathering MotoGP 2023-Pertamina Grand Prix of Indonesia pada Rabu (23/8) di Gold Dragon, Jakarta. Acara dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua MPR dan Ketua IMI, serta perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, ITDC, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan bagi penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 dan memperkuat citra The Mandalika sebagai destinasi sport tourism di NTB. Penyelenggaraan MotoGP di KEK Mandalika diharapkan membawa peluang besar bagi NTB dan Indonesia untuk menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah event balap motor internasional yang prestisius.

Brand Gathering MotoGP 2023

MGPA, IMI, and Dyandra & Co. held a brand gathering MotoGP 2023-Pertamina Grand Prix of Indonesia on Wednesday (23/8) at Gold Dragon, Jakarta. The event was attended by various parties, including the Chair of the MPR and Chair of IMI, as well as representatives from the Ministry of Tourism and Creative Economy, West Nusa Tenggara Tourism Office, ITDC, and others. The aim is to gain support for holding the 2023 Pertamina Grand Prix of Indonesia and strengthen the image of The Mandalika as sports tourism destination in NTB. It is expected that holding MotoGP in the Mandalika SEZ will bring a great opportunity for NTB and Indonesia to show their readiness to host a prestigious international motorbike racing event.



19 September 2023

September 19, 2023

Indonesian GP 2023: Matangkan Persiapan, Lintasan Pertamina Mandalika International Circuit Dicat Ulang dan Ditutup Sementara Waktu

Persiapan penting untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit tengah berlangsung, dengan penutupan sementara sirkuit untuk optimalisasi persiapan termasuk pengecatan ulang kerb dan area run-off, pemasangan sensor, serta penempatan berbagai fasilitas pendukung seperti panggung musik, booth tenda untuk UMKM, dan area Motorsport Zone. Penutupan sirkuit akan berlangsung hingga 15 Oktober 2023, memastikan kelancaran gelaran event tersebut. Proses pengecatan ulang lintasan yang dilakukan oleh tim Roadgrip merupakan tahap krusial untuk keselamatan pembalap dan untuk mempercantik tampilan sirkuit menyambut kehadiran MotoGP di Indonesia. Selain itu, persiapan fasilitas side event juga terus dimatangkan untuk memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung Indonesian GP 2023.

Indonesian GP 2023: Finalize Preparations, Pertamina Mandalika International Circuit Track Repainted and Temporarily Closed

Important preparations for the 2023 Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) at the Pertamina Mandalika International Circuit was underway, with the temporary closure of the circuit to optimize preparations including repainting curbs and run-off areas, installing sensors, as well as placing various supporting facilities such as music stages, tent booth for MSMEs, and Motorsport Zone area. The circuit closure last until October 15, 2023, ensuring the smooth running of the event. The track repainting process carried out by the Roadgrip team is crucial stage for racer safety and to beautify the appearance of the circuit to welcome the presence of MotoGP in Indonesia. Apart from that, preparations for side event facilities are also continuing to be finalized to provide an unforgettable experience for visitors to the 2023 Indonesian GP.



21 September 2023

September 21, 2023

ITDC Bentuk Paguyuban Bagi Pedagang Asongan di KEK Mandalika

ITDC, bersama dengan Yayasan GNI, telah menjalin kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang asongan dan mendukung tumbuh kembang anak di kawasan The Mandalika. Melalui program TJSL yang mencakup pembentukan Paguyuban Pedagang Asongan dan Pusat Belajar Anak, mereka bertujuan untuk memberikan dukungan ekonomi dan pendidikan yang berkelanjutan. Paguyuban ini akan berperan dalam koordinasi, advokasi, dan perlindungan bagi pedagang asongan, sementara pusat belajar anak akan menyediakan fasilitas dan kegiatan pendidikan untuk anak-anak pedagang. Langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan kesejahteraan yang lebih besar bagi pedagang asongan dan mendukung pengembangan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata yang inklusif.

ITDC Forms an Association for Hawkers in the Mandalika SEZ

ITDC, together with the GNI Foundation, has collaborated to improve the welfare of hawkers and support the growth and development of children in the Mandalika area. Through the TJSL program which includes the establishment of Hawkers Association and a Children's Learning Center, they aim to provide sustainable economic and educational support. This association will play role in coordination, advocacy, and protection for hawkers, while the children's learning center will provide educational facilities and activities for the children of traders. This step is expected to help create greater prosperity for hawkers and support the development of The Mandalika as inclusive tourism destination.



21 September 2023

September 21, 2023

The Nusa Dua Jadi Tuan Rumah Event International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 (IOG 2023)

The Nusa Dua, yang dikelola oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), menjadi tuan rumah Konvensi Internasional Minyak dan Gas Hulu Indonesia 2023 (IOG 2023) pada tanggal 20-22 September 2023, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Dengan sekitar 3.000 peserta dari 17 negara, termasuk para pemangku kepentingan utama dalam industri minyak dan gas dan delegasi terhormat seperti para menteri, acara ini berfokus pada peningkatan ketahanan energi melalui eksplorasi minyak dan gas yang berkelanjutan. Menekankan tema-tema seperti ketahanan energi, daya tarik investasi, dinamika pasar, dan transisi energi, IOG 2023 bertujuan untuk mentransformasi industri minyak dan gas Indonesia menjadi pusat investasi dan pengurangan emisi. Fasilitas The Nusa Dua yang komprehensif, yang mengakomodasi pertemuan berskala besar dan akomodasi lebih dari 5.000 kamar, memastikan kesuksesan IOG 2023, menyoroti perannya sebagai pusat konvensi internasional terkemuka di Asia Tenggara.

The Nusa Dua Hosted the International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 (IOG 2023)

The Nusa Dua, managed by PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), is hosting the 2023 Indonesian Upstream Oil and Gas International Convention (IOG 2023) on September 20-22, 2023, at the Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). With around 3,000 participants from 17 countries, including key stakeholders in the oil and gas industry and distinguished delegates such as ministers, the event focuses on increasing energy security through sustainable oil and gas exploration. Emphasizing themes such as energy security, investment attractiveness, market dynamics, and energy transition, IOG 2023 aims to transform Indonesia's oil and gas industry into a hub for investment and emissions reduction. Nusa Dua's comprehensive facilities, which accommodate large-scale meetings and accommodation for more than 5,000 rooms, ensure the success of IOG 2023, highlighting its role as leading international convention center in Southeast Asia.



13-15 Oktober 2023

October 13-15, 2023

Pagelaran MotoGP 2023 Tembus 103.000 Penonton

Pertamina Grand Prix Of Indonesia 2023 dihadiri oleh total 103.000 penonton, naik dari tahun sebelumnya. ITDC memperbaiki infrastruktur untuk mempermudah akses penonton dan melibatkan lebih banyak UMKM NTB. Pemerintah dan sektor swasta memberikan dukungan penting, sementara acara dimulai dengan sesi latihan dan kualifikasi MotoGP, Moto2, dan Moto3. Aleix Espargaro menjadi pembalap tercepat di MotoGP, sementara Pedro Acosta mendominasi di Moto2, dan Deniz Oncu memimpin di Moto3. Pada hari kedua, Jorge Martin memenangkan Tissot Sprint di MotoGP, sedangkan Aron Canet meraih pole position untuk Moto2 dan Diogo Moreira untuk Moto3. Idemitsu Asia Talent Cup juga diadakan, dimenangkan oleh Veda Ega Pratama. Pada hari terakhir, balapan MotoGP dimenangkan oleh Francesco Bagnaia, menjadikannya pemimpin klasemen. Acara juga mencakup pertunjukan udara, tarian kolosal, dan penampilan Putri Ariani menyanyikan Indonesia Raya.

2023 MotoGP Performance Reached 103,000 Spectators

The 2023 Pertamina Grand Prix of Indonesia was attended by a total of 103,000 spectators, an increase from the previous year. ITDC is improving infrastructure to make audience access easier and involve more NTB MSMEs. The government and private sector provided vital support, while the event kicked off with MotoGP, Moto2, and Moto3 practice and qualifying sessions. Aleix Espargaro was the fastest racer in MotoGP, while Pedro Acosta dominated in Moto2, and Deniz Oncu led in Moto3. On the second day, Jorge Martin won the Tissot Sprint in MotoGP, while Aron Canet took pole position for Moto2, and Diogo Moreira for Moto3. The Idemitsu Asia Talent Cup was also held, won by Veda Ega Pratama. On the final day, the MotoGP race was won by Francesco Bagnaia, making him the leader of the standings. The event also includes an aerial show, colossal dances, and a performance by Putri Ariani singing Indonesia Raya.



13 Oktober 2023

October 13, 2023

Peresmian Kantor Administrasi KEK Mandalika

Kantor administrator KEK Mandalika diresmikan di Lombok Tengah, NTB, oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian RI. Acara dihadiri oleh berbagai pejabat termasuk Komisaris ITDC dan Direktur Utama MGPA. Gedung ini akan melayani perizinan dan fasilitas di KEK Mandalika serta berencana untuk mengintegrasikan layanan dengan instansi lain. Tujuannya adalah meningkatkan *Ease of Doing Business* di KEK Mandalika. Peresmian dilakukan dengan pemotongan pita simbolis dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan room tour.

Inauguration of the Mandalika KEK Administration Office

The Mandalika SEZ administrator's office was inaugurated in Central Lombok, NTB, by the Secretary of the Indonesian Coordinating Ministry for the Economy. The event was attended by various officials including the ITDC Commissioner and the President Director of MGPA. This building will serve permits and facilities in the Mandalika KEK and plans to integrate services with other agencies. The aim is to increase the Ease of Doing Business in KEK Mandalika. The inauguration was carried out with symbolic ribbon cutting and continued with the cutting of the tumpeng and a room tour.



10-11 Oktober 2023

October 10-11, 2023

KT AIS Forum 2023 @The Nusa Dua

The Nusa Dua menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island State (KTT AIS) Forum 2023 dengan tema "Membina kolaborasi, Memajukan Inovasi Untuk Laut dan Masa Depan Bersama". Acara dihadiri oleh 32 negara termasuk Indonesia, Micronesia, Niue, Sao Tome dan Principe, Timor Leste, dan lainnya. Selama KTT AIS, Central Parkir ITDC di The Nusa Dua digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan mobil listrik delegasi dengan fasilitas pengisian kendaraan listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

AIS Forum 2023 Summit @The Nusa Dua

The Nusa Dua is hosting the Archipelagic and Island State Summit (AIS Summit) Forum 2023 with the theme "Fostering collaboration, Advancing Innovation for the Ocean and a Shared Future". The event was attended by 32 countries including Indonesia, Micronesia, Niue, Sao Tome and Principe, Timor Leste, and others. During the AIS Summit, ITDC Central Parking at The Nusa Dua was used as parking location for delegates' electric cars with electric vehicle charging facilities provided by PT PLN (Persero).



25-27 Oktober 2023

October 25-27, 2023

InJourney Hospitality House (IHH) Batch 4 @The Mandalika

ITDC dan InJourney telah kembali menyelenggarakan program InJourney Hospitality House (IHH) Batch 4 pada tanggal 25-27 Oktober 2023 untuk para pedagang dan pelaku pariwisata di sekitar The Mandalika. Dengan partisipasi 61 peserta, program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Peserta diberikan pemahaman tentang komunikasi pelayanan, penampilan, sikap yang benar, dan presentasi produk yang menarik. Batch sebelumnya telah diadakan pada Juli, Agustus, dan September 2023 dengan jumlah peserta yang beragam.

InJourney Hospitality House (IHH) Batch 4 @The Mandalika

ITDC and InJourney have again held the InJourney Hospitality House (IHH) Batch 4 program on October 25-27, 2023 for traders and tourism players around The Mandalika. With the participation of 61 participants, this program aims to improve skills and services to support local economic growth. Participants were given an understanding of service communication, appearance, correct attitude, and attractive product presentation. Previous batches were held in July, August, and September 2023 with varying numbers of participants.



29 Oktober 2023

October 29, 2023

Final Round Balap Motor Pertamina Enduro Mandalika Racing Series 2023

Final Round Balap Motor Sport Bike Pertamina Enduro Mandalika Racing Series (MRS) 2023 berlangsung sukses pada 29 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit. Dalam kompetisi ini, 54 pembalap bersaing untuk gelar Juara Nasional dalam kategori Sport 150, Sport 250, dan Supersport 600. Tiga juara nasional terpilih: Husni Zainul Fuadzy untuk Sport 150, Rheza Danica Ahrens untuk Sport 250, dan Mohammad Adenanta Putra untuk Supersport 600. Acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi 2.127 penonton untuk menikmati aksi balap dan untuk 100 siswa dari SMKN 4 Mataram, NTB, melalui program Edu Wisata Mandalika #JuniorExperience yang menawarkan pengalaman langsung di dunia motorsport.

Final Round of Pertamina Enduro Mandalika Racing Series 2023 Motorcycle Racing

The Final Round of the 2023 Pertamina Enduro Mandalika Racing Series (MRS) Motor Sport Bike Race took place successfully on October 29 at the Pertamina Mandalika International Circuit. In this competition, 54 racers competed for the title of National Champion in the Sport 150, Sport 250, and Supersport 600 categories. Three national champions were selected: Husni Zainul Fuadzy for Sport 150, Rheza Danica Ahrens for Sport 250, and Mohammad Adenanta Putra for Supersport 600. The event was also an opportunity for 2,127 spectators to enjoy the racing action and for 100 students from SMKN 4 Mataram, NTB, through the Edu Wisata Mandalika #JuniorExperience program which offers direct experience in the world of motorsport.



31 Oktober 2023 – 5 November 2023

October 31, 2023 – November 5, 2023

The Nusa Dua Jadi Tuan Rumah Dua Event Internasional Bergengsi

The Nusa Dua menjadi tuan rumah dua acara internasional penting, yaitu World Hydropower Congress 2023 dan Kejuaraan Dunia Biathle/Triathle UIPM 2023. World Hydropower Congress membahas energi terbarukan dan pembangkit listrik tenaga air, serta isu lingkungan dan sosial. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 delegasi dan 175 pembicara tingkat tinggi dari 120 negara. Sementara itu, Kejuaraan Dunia Biathle/Triathle UIPM 2023, diikuti oleh lebih dari 500 atlet dari 40 negara, menggabungkan renang, lari, dan menembak, sebagai kualifikasi untuk Kejuaraan Dunia Pentathlon UIPM 2024. Acara ini diselenggarakan oleh UIPM dan MPI, menampilkan dua disiplin dari lima dalam Pentathlon Modern, yaitu Biathle (lari-renang-lari) dan Triathle (lari-renang-lari-menembak).

The Nusa Dua Hosted Two Prestigious International Events

The Nusa Dua is hosting two important international events, namely the World Hydropower Congress 2023 and the UIPM Biathle/Triathle World Championships 2023. The World Hydropower Congress discusses renewable energy and hydroelectric power generation, as well as environmental and social issues. The event was attended by more than 1,000 delegates and 175 high-level speakers from 120 countries. Meanwhile, the 2023 UIPM Biathle/Triathle World Championship, attended by more than 500 athletes from 40 countries, combines swimming, running, and shooting, as qualifier for the 2024 UIPM Pentathlon World Championship. This event is organized by UIPM and MPI, featuring two disciplines from five in Modern Pentathlon, namely Biathle (running-swimming-running) and Triathle (running-swimming-running-shooting).



1 November 2023

November 1, 2023

Penandatanganan Kerja Sama Investasi KEK Pariwisata Mandalika

Pada 1 November, ITDC yang berlokasi di Jakarta menandatangani kesepakatan investasi KEK Pariwisata Mandalika dengan empat investor. Kesepakatan meliputi proyek seperti Pacuan Kuda, Hotel Jambuluwuk, dan Hotel Novotel, serta kerjasama dalam Wibit Water Sport dan Circuit Café. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama ITDC Ari Respati bersama perwakilan investor, dengan disaksikan oleh pihak terkait seperti Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dan Kepala Administrator KEK Mandalika Bambang Wicaksono.

Signing of the Mandalika Tourism SEZ Investment Cooperation

On November 1, ITDC in Jakarta signed investment agreement for the Mandalika Tourism SEZ with four investors. The agreement includes projects such as Horse Racing, Hotel Jambuluwuk, and Hotel Novotel, as well as collaborations in Wibit Water Sport and Circuit Café. The signing was carried out by ITDC President Director Ari Respati together with investor representatives, witnessed by related parties such as InJourney President Director Dony Oskaria and Chief Administrator of KEK Mandalika Bambang Wicaksono.



15-16 November 2023

November 15-16, 2023

16 KK Warga Relokasi KEK Mandalika Menempati Hunian Tetap di Dusun Ngolang

Sebanyak 16 Kepala Keluarga (KK) dari total 120 KK warga relokasi di kawasan The Mandalika, yang sebelumnya tidak memiliki hak kepemilikan tanah, telah dipindahkan ke hunian tetap di Dusun Ngolang, Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Proses pemindahan berlangsung dari Rabu hingga Kamis, sebagai tindak lanjut dari verifikasi ulang yang dilakukan pada bulan September 2023 sesuai dengan SK Bupati Lombok Tengah no. 300 dan 249 tahun 2020. ITDC memberikan dukungan logistik berupa truk dan mobil pickup serta tenaga angkut untuk memfasilitasi proses pemindahan barang-barang milik warga.

16 Families of Relocated Residents of the Mandalika SEZ Occupy Permanent Housing in Ngolang Hamlet

A total of 16 heads of families (KK) from total 120 families of relocated residents in The Mandalika area, who previously did not have land ownership rights, have been moved to permanent residence in Ngolang Hamlet, Kuta Village, Central Lombok Regency, NTB. The transfer process took place from Wednesday to Thursday, as follow-up to the re-verification carried out in September 2023 in accordance with Central Lombok Regent's Decree no. 300 and 249 of 2020. ITDC provides logistical support in the form of trucks and pickup trucks as well as transport personnel to facilitate the process of moving residents' goods.



17 November 2023

November 17, 2023

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara ITDC dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pada Jumat (17/11), ITDC dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menandatangani kesepakatan bersama terkait pengembangan industri pariwisata. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Direktur Pengembangan Bisnis ITDC Ema Widiastuti, disaksikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan General Manager The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita serta tim di Wantilan Kantor ITDC The Nusa Dua. Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen untuk meningkatkan investasi di sektor pariwisata, khususnya di Kalimantan Utara, dengan rencana pengembangan destinasi pariwisata yang didukung oleh potensi pasar dan industri hilirisasi di wilayah tersebut.

Signing of Joint Agreement between ITDC and the North Kalimantan Provincial Government

On Friday (17/11), ITDC and the North Kalimantan Provincial Government signed joint agreement regarding the development of the tourism industry. This agreement was signed by the Governor of North Kalimantan Province Zainal Arifin Paliwang and ITDC Business Development Director Ema Widiastuti, witnessed by North Kalimantan Provincial Government officials and The Nusa Dua General Manager I Gusti Ngurah Ardita, as well as the team at the ITDC The Nusa Dua Office Wantilan. The agreement confirms the commitment to increase investment in the tourism sector, especially in North Kalimantan, with plans to develop tourism destinations supported by market potential and downstream industries in the region.



24 November 2023

November 24, 2023

Groundbreaking Proyek Inovatif Air Bersih dan Natural Gas @The Nusa Dua

ITDC Utilitas melakukan Ground Breaking untuk proyek penyediaan air bersih dan natural gas di The Nusa Dua. Proyek ini bertujuan untuk memastikan pasokan air bersih dan natural gas di kawasan tersebut. ITDC Utilitas bekerja sama dengan KSO PT Memiontec Indonesia - PT Bayu Surya Bakti Konstruksi (KSO MIT - BSBK) dan KSO PT National Energy Solutions - PT Laras Ngarso Gede (KSO NES - LARAS) dalam proyek ini. ITDC Utilitas, sebagai anak usaha ITDC, akan fokus pada penyediaan layanan air bersih dan natural gas di The Nusa Dua dengan konsep yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Groundbreaking of Innovative Clean Water and Natural Gas Project @The Nusa Dua

ITDC Utilitas conducted Ground Breaking for the clean water and natural gas supply project in The Nusa Dua. This project aims to ensure the supply of clean water and natural gas in the area. ITDC Utilitas is collaborating with KSO PT Memiontec Indonesia - PT Bayu Surya Bakti Construction (KSO MIT - BSBK) and KSO PT National Energy Solutions - PT Laras Ngarso Gede (KSO NES - LARAS) in this project. ITDC Utilitas, as subsidiary of ITDC, will focus on providing clean water and natural gas services in The Nusa Dua with sustainable and environmentally friendly concept.



28 November 2023

November 28, 2023

Kerjasama Pengembangan Lahan Lot KQ4 @The Mandalika

ITDC menandatangani Land Utilization and Development Agreement (LUDA) dengan PT Jelamin Mona Hotel untuk mengembangkan lahan LOT KQ4 di kawasan The Mandalika. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya yang dilakukan pada Rabu (1/11) di kantor Injourney, Gedung Sarinah, Jakarta.

Collaboration on Lot Land Development KQ4 @The Mandalika

ITDC signed a Land Utilization and Development Agreement (LUDA) with PT Jelamin Mona Hotel to develop LOT KQ4 land in The Mandalika area. This agreement is a follow-up to the previous agreement made on Wednesday (1/11) at the Injourney office, Sarinah Building, Jakarta.



1 Desember 2023

December 1, 2023

Acara Puncak HUT Ke-50 ITDC

ITDC merayakan puncak ulang tahun ke-50 dengan acara serentak di empat lokasi: The Nusa Dua, The Mandalika, The Golo Mori, dan Kantor Jakarta. Perayaan dimulai dengan menangkap momen matahari terbit di keempat lokasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan acara puncak secara hybrid. Acara ini mencakup pertunjukan seni tari dan musik dari D'Creators ITDC, perlombaan menyenangkan, sesi diskusi (D'Talks), pemberian penghargaan, dan hadiah-hadiah menarik.

Primary Event of ITDC's 50th Anniversary

ITDC celebrated the culmination of their 50th anniversary with simultaneous events at four locations: The Nusa Dua, The Mandalika, The Golo Mori, and the Jakarta Office. Celebration began by capturing the moment of sunrise at these four locations, then continued with a hybrid primary event. This event includes dance and music performances from ITDC D'Creators, fun competitions, discussion sessions (D'Talks), award presentations, and attractive prizes.



6 Desember 2023

December 6, 2023

Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Golo Mori Convention Center (GMCC) di The Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, NTT

Kegiatan peresmian tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Daisuki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Direktur Utama Injourney Dony Oskaria, dan Direktur Utama ITDC Ari Respati. Fasilitas yang diresmikan di GMCC meliputi Convention Hall dengan kapasitas 400 orang, VVIP lobby untuk 400 orang, VVIP Lounge untuk 29 orang, VIP Room untuk 12 orang, Media Center untuk 50 orang, dan Amphitheater dengan kapasitas 500 orang. Selain itu, akses jalan baru sepanjang 25 kilometer dari Labuan Bajo ke kawasan The Golo Mori telah meningkatkan konektivitas, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi warga setempat.

Minister of SOEs Erick Thohir inaugurated the Golo Mori Convention Center (GMCC) at The Golo Mori, West Manggarai Regency, NTT

The inauguration activity was attended by several important officials, including Deputy Minister of Religion Saiful Rahmat Daisuki, Minister of Tourism and Creative Economy Sandiaga Uno, Deputy Minister of Tourism and Creative Economy Angela Tanoesoedibjo, President Director of Injourney Dony Oskaria, and President Director of ITDC Ari Respati. The facilities inaugurated at GMCC include the Convention Hall with a capacity of 400 people, VVIP lobby for 400 people, VVIP Lounge for 29 people, VIP Room for 12 people, Media Center for 50 people, and Amphitheater with a capacity of 500 people. Apart from that, the new 25 kilometer access road from Labuan Bajo to The Golo Mori area has improved connectivity, which is expected to have a positive impact on local residents.



10 Desember 2023

December 10, 2023

Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023 Sukses Digelar

Pada ajang balap mobil Porsche Sprint Challenge Indonesia, driver dari tim Rizqy Motorsport, Daffa AB dan Dicko Prasetyo berhasil meraih podium pertama dalam Endurance Race, diikuti oleh driver dari Citadel Racing Team, Aldio Oekon di podium kedua, dan driver dari tim Semen Merah Putih, Hendrik Jaya Soewatdy dan John Kwon di podium ketiga.

Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023 Successfully Held

In the Porsche Sprint Challenge Indonesia car racing event, drivers from the Rizqy Motorsport team, Daffa AB, and Dicko Prasetyo managed to achieve the first podium in the Endurance Race, followed by drivers from the Citadel Racing Team, Aldio Oekon on the second podium, and drivers from the Semen Merah Putih team, Hendrik Jaya Soewatdy, and John Kwon on the third podium.



13 Desember 2023

December 13, 2023

"Bali Art Harmony" @The Nusa Dua

ITDC bekerja sama dengan Guruji Gede Prama untuk menyelenggarakan kegiatan meditasi dan Dhamma Talk yang diberi judul "Bali Art of Harmony" di Pulau Nusa Dharma, The Nusa Dua pada Rabu (13/12). Kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk wisatawan hotel di kawasan The Nusa Dua, siswa sekolah internasional di Bali, komunitas yoga dan meditasi, FORKOMPINCA Kuta Selatan, serta Bendesa Adat Desa Penyangga The Nusa Dua. Acara ini juga menampilkan persembahan "Song of Nature" dari Gus Teja dan pameran produk Tenaga Kerja Mandiri (TKM) binaan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Gianyar. Produk TKM tersebut mencakup beragam produk ramah lingkungan dan berkualitas, seperti teh secang, minyak rambut alami, sabun ramah lingkungan, anyaman dari bahan lokal, arang bambu aktif, aneka kue, keripik talas, jaje Bali, dan produksi kain dengan motif Bali.

"Bali Art Harmony" @The Nusa Dua

ITDC collaborated with Guruji Gede Prama to organize meditation and Dhamma Talk activity entitled "Bali Art of Harmony" on Nusa Dharma Island, The Nusa Dua on Wednesday (13/12). This activity was attended by 300 participants from various backgrounds, including hotel tourists in the Nusa Dua area, international school students in Bali, the yoga and meditation community, FORKOMPINCA South Kuta, and the Bendesa Adat Pebungga Village in The Nusa Dua. This event also featured a performance of "Song of Nature" from Gus Teja and an exhibition of Mandiri (TKM) products assisted by the Gianyar Regional Government Manpower Service. TKM products include variety of environmentally friendly and quality products, such as secang tea, natural hair oil, environmentally friendly soap, woven from local materials, activated bamboo charcoal, various cakes, taro chips, Balinese jaje, and fabric production with Balinese motifs.



16 Desember 2023

December 16, 2023

Bali Championship The Dewata Series Vol.2

Bali Championship The Dewata Series Vol 2 adalah kompetisi push bike bergengsi di Pulau Bali yang menarik sekitar 200 peserta reguler dan 25 peserta undangan dari Singapura, Australia, dan Indonesia dalam kategori usia 2-9 tahun. Selain kompetisi push bike, acara ini juga menyajikan food festival, pertunjukan BMX freestyle, live music, dan pertunjukan Tari Kecak dan Barong Dance Show.

Bali Championship The Dewata Series Vol.2

Bali Championship The Dewata Series Vol 2 is prestigious push bike competition on the island of Bali which attracts around 200 regular participants and 25 invited participants from Singapore, Australia and Indonesia in the 2-9 year old category. Apart from the push bike competition, this event also presents a food festival, BMX freestyle performances, live music, and Kecak Dance and Barong Dance Shows.



16-17 Desember 2023

December 16-17, 2023

bLU cRU Yamaha Sunday Race

Event balap ini, yang berlangsung pada tanggal 16-17 Desember 2023, dirancang khusus untuk bLU cRU Pro Rider, bLU cRU Community Rider, dan masyarakat umum yang ingin menikmati pengalaman balap. Dengan 150 starter di lintasan balap dan 300 peserta dalam kegiatan touring komunitas, acara ini dimulai dengan Scrutineering, Rider Briefing, dan Track Walk pada hari Jumat (15/12), dilanjutkan dengan Medical Check, kualifikasi, Race 1, dan Podium 1 pada Sabtu (16/12), serta Warm Up, Opening Ceremony, Race 2, Podium 2, dan berbagai side event pada Minggu (17/12), termasuk penampilan oleh Titik Temu dan Anjani Barbie. Grandstand K dibuka secara gratis untuk penonton, dengan doorprize menarik berupa sepeda motor Mio M3 125cc. Selain balapan, acara ini juga menyelenggarakan kegiatan senam dan fun-walk yang diikuti oleh 100 peserta, serta "SMK Contest" yang melibatkan 23 SMK dengan 121 siswa dan 68 pendamping.

bLU cRU Yamaha Sunday Race

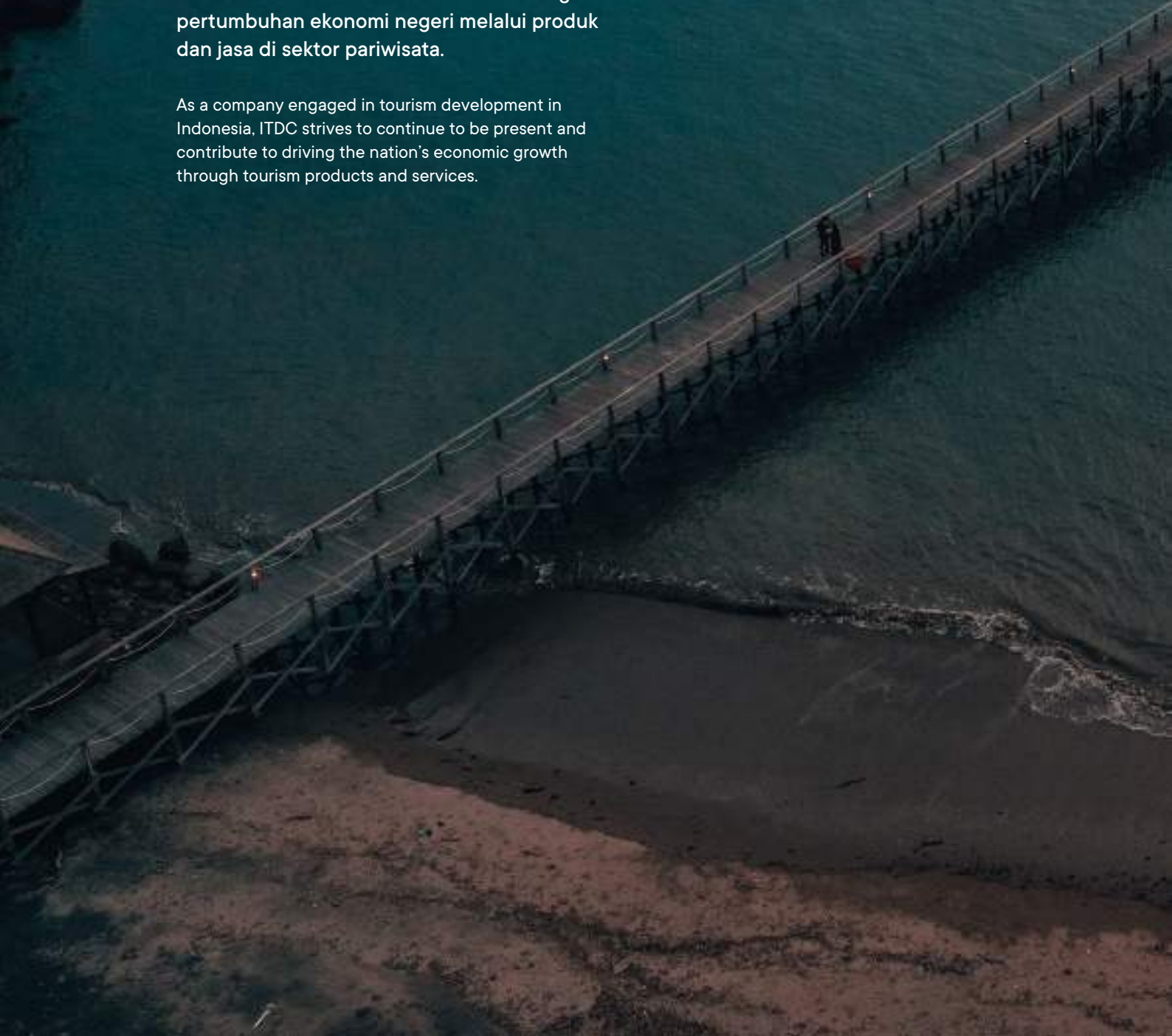
This racing event, which took place on December 16-17, 2023, is specifically designed for bLU cRU Pro Riders, bLU cRU Community Riders, and the general public who want to enjoy the racing experience. With 150 starters on the race track and 300 participants in community touring activities, this event started with Scrutineering, Rider Briefing, and Track Walk on Friday (15/12), followed by Medical Check, qualifying, Race 1, and Podium 1 on Saturday (16/12), as well as Warm Up, Opening Ceremony, Race 2, Podium 2, and various side events on Sunday (17/12), including performances by Titik Temu and Anjani Barbie. Grandstand K was opened free of charge to spectators, with an attractive door prize in the form of a 125cc Mio M3 motorbike. Apart from racing, this event also held gymnastics and fun-walk activities which were attended by 100 participants, as well as a "SMK Contest" which involved 23 Vocational Schools with 121 students and 68 companions.

Laporan Manajemen

Management Report

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan pariwisata di Indonesia, ITDC berupaya untuk terus hadir dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negeri melalui produk dan jasa di sektor pariwisata.

As a company engaged in tourism development in Indonesia, ITDC strives to continue to be present and contribute to driving the nation's economic growth through tourism products and services.





02

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

“

Dewan Komisaris berkeyakinan iklim usaha yang selalu bergerak dinamis akan mampu dilalui dengan penuh rasa optimisme.

The Board of Commissioners confident that the ever-changing business climate can be navigated with full optimism.

”

**Ricky
Joseph
Pesik**

Komisaris Utama
President Commissioner





Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dear esteemed Shareholders and Stakeholders,

Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan-Nya kepada kita semua sehingga PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) dapat mengarungi tahun 2023 dengan capaian optimal kendati dihadapkan dengan berbagai tantangan. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 ini merupakan upaya untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang upaya Perusahaan untuk membuktikan kemampuannya dalam rangka mewujudkan visinya “Menjadi pengembang destinasi wisata kelas dunia.”

Pandangan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menilai bahwa tahun 2023 Perusahaan masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan di antaranya perang antara Rusia-Ukraina yang berkelanjutan dan mengganggu rantai pasok di dunia hingga gejolak di Timur Tengah terutama antara Israel-Palestina. Namun demikian, kinerja Perusahaan tetap membukukan capaian yang baik. Hal ini diperlukan guna keberlanjutan pertumbuhan penghasilan bisnis yang sehat.

Perusahaan tetap melakukan beragam upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris menilai ITDC telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan rencana kerja tahunan, visi dan misi serta arahan strategis dari Pemegang Saham. Melalui pengamatan cermat terhadap kondisi makro ekonomi, perubahan lingkungan usaha serta perubahan perilaku, ITDC cukup mampu beradaptasi dan menerapkan strategi yang relevan sesuai perkembangan terkini.

Allow us to express our praise and gratitude to God Almighty for the grace He has given us to navigate InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) in 2023 with optimal achievements amidst various challenges. This Annual Report for the 2023 financial aims to provide a complete picture of the Company's efforts in proving its ability to realize the vision “To become a world-class tourist destination developer.”

Views of the Board of Commissioners on the Performance of the Board of Directors

The Board of Commissioners realized that in 2023, the Company was still facing several challenges including the ongoing war between Russia and Ukraine which disrupted global supply chains along with turmoil in the Middle East, especially conflict between Israel and Palestine. However, the Company's performance continued to record good results. Such achievement is necessary for the continuation of healthy business income growth.

The Company continues to make various efforts to achieve the determined targets. The Board of Commissioners assesses that ITDC has carried out its business in accordance with the annual work plan, vision and mission as well as strategic direction from Shareholders. Through careful observation of macroeconomic conditions, changes in the business environment and changes in behavior, ITDC is able to adapt and implement relevant strategies according to the latest trend.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya untuk tetap menjaga stabilitas usaha serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan di tengah kondisi yang penuh tantangan di tahun 2023. Penilaian atas kinerja Direksi yang dilakukan Dewan Komisaris juga didasarkan pada arahan pemegang saham yang tertuang melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara umum, Dewan komisaris berpendapat pada tahun 2023 Direksi telah melaksanakan tugas kepengurusan dengan sangat baik.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menggunakan beberapa parameter dalam upaya menilai kinerja Direksi, meliputi; kinerja keuangan, kepatuhan regulasi, manajemen risiko, kebijakan dan strategi, serta kinerja manajemen yaitu menilai kinerja manajemen dalam upaya mencapai target dan mengelola perusahaan secara efisien dan efektif. Di sisi lain, Dewan Komisaris juga memiliki tugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi tercipta kesesuaian dan konsistensi pelaksanaan kegiatan usaha dengan rencana bisnis Perusahaan, serta implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh unit organisasi.

Di sisi lain, Dewan Komisaris juga memandang perlunya dukungan teknologi informasi yang kuat, terintegrasi dan handal. Penerapan teknologi informasi tersebut nantinya tidak hanya akan menyediakan ruang tumbuh yang sehat bagi Perusahaan namun juga akan menjadi fundamental yang sangat menentukan bagi pengembangan dan penguatan tingkat kompetitif Perusahaan ke depan. Beberapa catatan penting terkait kebijakan mendasar di tahun 2023 akan menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk mendorong perkembangan Perusahaan ke depan. Dewan Komisaris memberikan apresiasinya terhadap kinerja, komitmen, dan dedikasi yang telah diperlihatkan Direksi sepanjang tahun 2023 serta mengapresiasi upaya Direksi dan seluruh jajarannya dalam mengantisipasi tantangan dan perkembangan bisnis ke depan.

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has made efforts to maintain business stability and maintain the trust of stakeholders amidst challenging conditions in 2023. The assessment of the performance of the Board of Directors carried out by the Board of Commissioners is also based on shareholder directions stated in the General Meeting of Shareholders (GMS). In general, the Board of Commissioners believes that in 2023 the Board of Directors have performed their management duties admirably.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners uses several parameters to assess the performance of the Board of Directors, including; financial performance, regulatory compliance, risk management, policies and strategies, as well as management performance, namely assessing management performance to achieve targets and manage the company efficiently and effectively. On the other hand, the Board of Commissioners also supervised and provided advice to the Board of Directors to create conformity and consistency in the implementation of business activities with the Company's business plan, as well as implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all organizational units.

On the other hand, the Board of Commissioners also views the need for strong, integrated, and reliable information technology support in the Company. The application of information technology will support health growth for the Company and become a fundamental factor to determine the development and strengthening the Company's competitive level in the future. Several important notes regarding fundamental policies in 2023 will be used as the basis for the Board of Commissioners to encourage the Company's future development. The Board of Commissioners conveyed its appreciation for the performance, commitment, and dedication shown by the Board of Directors throughout 2023 and lauded the efforts of the Board of Directors and all staff in anticipating future business challenges and developments.



Mekanisme dan Frekuensi Pemberian Nasihat kepada Direksi

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, keberadaan Dewan Komisaris memperkuat fungsi pengawasan bagi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Untuk itu, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun melalui kesamaan pandangan untuk mencapai visi Perusahaan.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat secara keseluruhan adalah 100%. Selain forum rapat gabungan, organ Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko, serta juga melakukan rapat dengan mengundang Direktorat dan Divisi terkait untuk membahas bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing Komite.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Kompetensi anggota Dewan Komisaris memungkinkan untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait arah dan strategi pengurusan Perusahaan; tentunya dengan batas-batas hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi

Dewan Komisaris menilai bahwa tahun 2023 iklim usaha global masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan di antaranya akibat perang antara Rusia-Ukraina yang berkelanjutan hingga gejolak di Timur Tengah khususnya perang antara Israel-Palestina di penghujung tahun 2023. Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai inisiatif strategis yang diambil oleh Direksi di tengah ketidakpastian ekonomi, namun mampu menghadirkan pencapaian kinerja yang optimal.

Mechanism and Frequency of Providing Advice to the Board of Directors

In accordance with applicable laws and regulations, the existence of the Board of Commissioners aims to strengthen the supervisory function for the management of the Company carried out by the Board of Directors. Therefore, the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is built through shared views to achieve the Company's vision.

Throughout 2023, the Board of Commissioners has held joint meetings by inviting the Board of Directors 13 (thirteen) times, with the overall attendance of the Board of Commissioners at meetings being 100%. Besides the joint meeting forum, the organs of the Board of Commissioners – consisting of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Committee – also conducted meetings by inviting relevant Directorates and Divisions to discuss issues under the responsibility of each Committee.

The Board of Commissioners always carries out its duties and responsibilities professionally and independently based on good corporate governance. The competency of members of the Board of Commissioners enables them to provide input to the Board of Directors regarding the direction and strategy of managing the Company; with the limits of the rights, authority and obligations of the Board of Commissioners and Directors.

Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Board of Commissioners learnt that global business climate in 2023 was still influenced by several challenges such as the ongoing war between Russia and Ukraine and the turmoil in the Middle East especially the conflict between Israel and Palestine at the end of 2023. The Board of Commissioners appreciates the various strategic initiatives taken by the Board of Directors in the midst of economic uncertainty, with its ability to achieve optimal performance.

Sepanjang 2023, Direksi telah menunjukkan komitmennya dan lebih akomodatif terhadap iklim usaha yang senantiasa dihadapkan dengan berbagai perubahan. Dengan pencapaian kinerja yang dihasilkan pada 2023, Dewan Komisaris yakin bahwa Direksi telah melakukan yang terbaik dalam mengimplementasikan strategi, mengendalikan risiko, serta dalam menerapkan praktik tata kelola yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2024 masih menjadi tahun yang penuh tantangan terutama iklim ketidakpastian dan iklim ekonomi. Namun, Dewan Komisaris berpendapat bahwa target-target dan langkah strategis yang ditetapkan Direksi pada RKAP 2024 merupakan target yang realistik dan sangat mungkin untuk direalisasikan. Demikian juga dengan strategi yang akan dijalankan, telah sejalan dengan rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan. Untuk itu, Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung dan senantiasa akan memberikan dukungan agar target-target tersebut dapat tercapai dengan baik.

Dewan Komisaris berkeyakinan iklim usaha yang selalu bergerak dinamis akan mampu dilalui dengan penuh rasa optimisme. Secara garis besar, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja Perusahaan untuk tahun 2024, sudah cukup baik dan selaras dengan arah serta tujuan Perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan Komisaris menilai prospek usaha yang disusun Direksi, telah mempertimbangkan asumsi-asumsi dalam makro ekonomi global dan nasional pada masa mendatang.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris senantiasa memonitor perkembangan penerapan tata kelola perusahaan secara optimal. Sebagai entitas usaha, ITDC memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dalam menghadapi persaingan bisnis yang

Throughout 2023, the Board of Directors has shown its commitment and became more accommodating to the business climate filled with constant changes. With the performance achieved in 2023, the Board of Commissioners is confident that the Board of Directors has done its best in implementing strategies, controlling risks, and in implementing governance practices in accordance with the corridors of applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners sees that the year of 2024 will still be full of challenges, especially related to the uncertain economic climate. However, the Board of Commissioners believes that the targets and strategic steps determined by the Board of Directors in the 2024 RKAP are realistic targets and are very likely to be realized. The determined strategy is in line with the Company's medium and long term plans. Thus, the Board of Commissioners fully supports efforts put to achieve the target.

The Board of Commissioners believes that the business climate which is always moving dynamically will be able to be navigated with a sense of optimism. In general, the Board of Commissioners sees that the business prospects prepared by the Board of Directors as stated in the Company's work plan for 2024, are quite favorable and in line with the Company's direction and objectives in both the short and long term. The Board of Commissioners assesses that the business prospects prepared by the Board of Directors have considered assumptions in the global and national macro economy in the future.

Views on the Implementation of Corporate Governance

The Board of Commissioners always monitors developments in the implementation of optimal corporate governance. As a business entity, ITDC is highly committed to implementing GCG principles to maintain sustainable business growth in facing increasingly dynamic business competition. Therefore, GCG implementation is part of the



semakin dinamis. Untuk itulah, penerapan GCG menjadi bagian dari rencana strategis Perusahaan untuk mewujudkan kinerja yang transparan, efisien dan bertanggung jawab dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

ITDC tak hanya hadir sebagai perusahaan yang bergerak di pengembangan destinasi wisata, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, ITDC terus memperkuat komitmennya terhadap penerapan prinsip-prinsip governansi terbaik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penerapan governansi yang komprehensif dan konsisten di seluruh jenjang organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di ITDC berjalan dengan baik dan dilaksanakan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan dalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Perusahaan, *shareholders* dan *stakeholders*. Standar-standar tersebut mengatur peran Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa kepengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat atas tindakan/kegiatan strategis yang akan dan telah dilaksanakan oleh Direksi secara hati-hati untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Sementara itu, Sebagai salah satu bentuk komitmen penerapan GCG, Perusahaan membangun mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran atau WBS. Penerapan WBS bermanfaat untuk pengembangan sistem pelaporan pelanggaran yang terkelola dengan baik, yang dapat menjadi fondasi bagi Perusahaan untuk merancang evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan. WBS juga menjadi bagian dari mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat sebuah pelanggaran. Bagi pelapor, WBS memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas.

Company's strategic plan to realize transparent, efficient, and responsible performance by increasing the principles of openness, accountability, liability, independence and fairness.

ITDC is not only present as a company engaged in developing tourist destination but is also a driving force for economic growth. In carrying out its duties, ITDC continues to strengthen its commitment to implementing the best governance principles. This commitment is realized by implementing comprehensive and consistent governance at all levels of the organization in accordance with Minister of State for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

In principle, GCG implementation at ITDC is running well and is carried out as a form of collaboration between the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees in every business activity to protect the interests of the Company, shareholders, and stakeholders. These standards regulate the role of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function to ensure the management of the Company is carried out by the Board of Directors in accordance with applicable laws and regulations and to provide advice/opinions on strategic actions/activities implemented by the Board of Directors carefully to achieve the Company's objectives.

Meanwhile, as a form of commitment to implementing GCG, the Company established a Whistleblowing System or WBS mechanism. The implementation of WBS is useful to develop a well-managed violation reporting system, which can be used as a foundation for the Company to design the necessary evaluation and follow-up. WBS is also part of an early warning system for possible problems resulting from a violation. WBS guarantees protection and identity confidentiality of whistleblowers.

Dewan Komisaris senantiasa berperan dalam hal pengawasan implementasi WBS di lingkungan Perusahaan. Salah satunya adalah memastikan bahwa sosialisasi WBS berjalan dengan baik di lingkup ITDC. Sosialisasi WBS di internal Perusahaan disampaikan melalui media internal dan presentasi langsung kepada unit kerja terkait, sedangkan untuk pihak eksternal media yang digunakan untuk sosialisasi antara lain melalui website, email, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat eksternal.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, susunan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengalami perubahan. Per 31 Desember 2023, susunan Dewan Komisaris untuk periode jabatan 2020-2025 terdiri atas 4 (empat) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

The Board of Commissioners always plays a role in supervising the implementation of WBS within the Company. One of them is ensuring the proper implementation of WBS in ITDC. WBS socialization in the Company is delivered through internal media and direct presentations to the relevant work units, while the media socialization such as websites, emails, and external activities are activated for external parties.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2023, there was no change in the composition of the Board of Commissioners. As of December 31, 2023, the composition of the Board of Commissioners for the 2020-2025 term of office consists of 4 (four) members with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Ricky Joseph Pesik	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-364/MBU/11/2020 tanggal 13 November 2020 SOEs Ministerial Decree No. SK-364/MBU/11/2020 dated November 13, 2020	13 November 2020-RUPS Tahun 2025 November 13, 2020-2025 GMS	Ke-1 First Period
H. Irzani, M.Pd, M.Si	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-49/MBU/02/2020 tanggal 14 Februari 2020 SOEs Ministerial Decree No. SK-49/MBU/02/2020 dated February 14, 2020	14 Februari 2020-RUPS Tahun 2025 February 14, 2020-2025 GMS	Ke-1 First Period
Ir. Zainal Mutaqin, MM	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-18/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 SOEs Ministerial Decree No. SK-18/MBU/01/2020 dated January 9, 2020	9 Januari 2020-RUPS Tahun 2025 January 9, 2020-2025 GMS	Ke-1 First Period
Ulin Ni'am Yusron	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-319/MBU/10/2020 tanggal 28 Oktober 2020 SOEs Ministerial Decree No. SK-319/MBU/10/2020 dated October 28, 2020	28 Oktober 2020-RUPS Tahun 2025 October 28, 2020-2025 GMS	Ke-1 First Period



Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mewakili segenap Dewan Komisaris ITDC menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas semangat, dedikasi dan pengabdian segenap jajaran Direksi, Manajemen dan Karyawan dalam merealisasikan capaian kinerja Perusahaan. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, konsumen, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaannya dalam mendukung kelangsungan usaha.

The Board of Commissioners is committed to carrying out this mandate by always prioritizing the principles of good corporate governance in the interests of shareholders and other stakeholders.

Appreciation

On this occasion, I, represent the entire Board of Commissioners of ITDC, express my appreciation for the enthusiasm and dedication of all levels of Directors, Management, and Employees in realizing the Company's performance achievements. We also thank our Shareholders, consumers, business partners, and other stakeholders for their trust in supporting our business continuity.

Jakarta, 28 Juni 2024
Jakarta, June 28, 2024

Ricky Joseph Pesik
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report

“

Direksi terus memperkuat perannya untuk berfokus dalam melakukan berbagai ekspansi, inovasi, dan kolaborasi guna mendorong pertumbuhan usaha.

Board of Directors continues to strengthen its role in focusing on various expansions, innovations, and collaborations to drive business growth.

”

Ari Respati

Direktur Utama
President Director





Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dear esteemed Shareholders and Stakeholders,

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) senantiasa berkomitmen memberikan kinerja terbaiknya dalam rangka mewujudkan salah satu misinya, yaitu mengembangkan destinasi wisata yang terpilih melalui kerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat. Di tahun 2023, kami senantiasa bersyukur bahwa ITDC dapat melaluinya dengan capaian yang cukup baik, di tengah tekanan iklim perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian. Berbagai tantangan yang dihadapi Perusahaan di sepanjang tahun 2023, menjadi momentum tersendiri untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memperkuat eksistensi ITDC ke depan.

Melalui laporan tahunan ini, izinkan saya mewakili Direksi ITDC untuk menyampaikan jalannya kepengurusan Perusahaan selama tahun 2023, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. Laporan Direksi ini akan menyajikan analisis atas kinerja Perusahaan, analisis tentang prospek usaha, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, dan informasi penting lainnya.

Tinjauan Makro Industri

Kondisi perekonomian global di tahun 2023 masih menunjukkan perlambatan seiring dengan masih berlanjutnya dampak dari ketegangan geopolitik global. Dikutip dari Laporan Perekonomian Bank Indonesia tahun 2023, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan terus melambat dari tahun 2022 sebesar 3,5% menjadi 3,0% di tahun 2023, dan akan terus melambat menjadi 2,8% di tahun 2024. Sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global, inflasi di berbagai negara-negara dunia masih tercatat cukup tinggi, yakni sebesar 6,8% atau terbilang cukup jauh dari sasaran inflasi yang ingin dicapai, khususnya bagi negara-negara maju, yang sebesar 2%.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia or InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) is always committed to provide its best performance to realize one of its missions, namely developing selected tourist destinations through collaboration with the Government and the community. In 2023, we are grateful that ITDC was able to sail through the year with quite promising results, amidst the pressure of an economic climate full of uncertainty. The various challenges faced by the Company throughout 2023 have become a momentum to increase our collective commitment to strengthening ITDC's existence in the future.

Through this annual report, allow me to represent the ITDC Board of Directors to report the course of the Company's management during 2023, as a form of our responsibility to Shareholders and all other Stakeholders. This report will present an analysis of the Company's performance, analysis of business prospects, developments in the implementation of corporate governance, and other important information.

Industry Macro Overview

Global economic conditions in 2023 were still looming by a slowdown in line with the continued impact of global geopolitical tensions. Quoted from the 2023 Bank Indonesia Economic Report, global economic growth is expected to decrease from 3.5% in 2022 to 3.0% in 2023, and would dip to 2.8% in 2024. In line with weakening growth of global economy, inflation in various countries is still recorded quite high, namely 2.8% or quite far from the inflation target, especially for developed countries, which is 2%.

Meski menghadapi kondisi yang cukup menantang, dari dalam negeri Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terjaga di level 5,04%. Meski sedikit lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang sebesar 5,31%, namun kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil didukung oleh berbagai komponen pada sektor lapangan usaha. BPS mencatatkan bahwa dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang sebesar 13,96%. Sementara, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

Bank Indonesia juga mencatatkan bahwa tingkat inflasi di dalam negeri berhasil dikendalikan secara baik sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah yang tetap terjaga. BI juga berhasil mengendalikan tingkat inflasi untuk berada pada level 2,61% atau mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tingkat inflasi tahun 2022 yang sebesar 5,51%. Keberhasilan ini juga kemudian mendorong BI untuk terus memperkuat bauran kebijakan moneter dengan meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna memastikan tingkat inflasi tetap stabil, yakni pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2024 dan 2025.

Tinjauan Segmen Industri

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh optimisme bagi industri pariwisata nasional seiring dengan kembali normalnya kondisi pascapandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir. Kembali dibukanya destinasi wisata berhasil menarik kunjungan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. BPS mencatatkan bahwa pada Desember 2023, kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia adalah sebesar 1,14 juta kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 20,17% dibanding tahun 2022. Berdasarkan data dari BPS, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia didominasi oleh wisatawan Malaysia (18,45%), kemudian Singapura (16,41%) dan Australia (11,87%). Secara kumulatif, BPS mencatatkan bahwa

Despite facing quite challenging conditions, domestically the Statistics Indonesia (BPS) recorded Indonesia's economic growth was able to be maintained at the level of 5.04%. Although it was slightly lower than the 2022 achievement of 5.31%, this condition shows a relatively stable condition in Indonesia's economic growth, supported by various components in the business sector. BPS noted that in terms of production, the highest growth occurred in the transportation and warehousing business sector, which amounted to 13.96%. Meanwhile, in terms of expenditure, the highest growth was achieved by the Consumption Expenditure of Nonprofit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) at 9.83%.

Bank Indonesia also noted that the domestic inflation rate was successfully controlled in line with the stability of the Rupiah exchange rate which was successfully maintained. BI was also able to control the inflation rate to 2.61%, a significant decline compared to the inflation rate in 2022 which amounted to 5.51%. This success has encouraged BI to continue strengthening the monetary policy mix by increasing synergy between the Central and Regional Governments to ensure the inflation rate remains stable, namely in the range of $2.5 \pm 1\%$ in 2024 and 2025.

Industry Segment Overview

The year of 2023 was full of optimism for the national tourism industry as conditions return to normal after the Covid-19 pandemic in the last few years. The reopening of tourist destinations has succeeded in attracting foreign tourists to visit Indonesia. BPS recorded that in December 2023, foreign tourist arrivals in Indonesia were amounted to 1.14 million visits or an increase of 20.17% compared to 2022. Based on data from BPS, the number of foreign tourists coming to Indonesia was dominated by Malaysian tourists (18.45%), then Singapore (16.41%) and Australia (11.87%). Cumulatively, BPS recorded that foreign tourist visits throughout 2023 increased by 98.30% compared to 2022. This increase was mainly recorded at Ngurah Rai, Bali Airport and



kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2023 meningkat hingga 98,30% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama tercatat pada pintu Bandara Ngurah Rai, Bali dan Soekarno-Hatta, Tangerang, di mana masing-masing bandara mengalami peningkatan hingga 143,64% dan 108,95%.

Perbaikan kondisi yang terjadi di industri pariwisata ini juga tercermin dari peningkatan tingkat penghunian kamar (TPK) di hotel. Berdasarkan data dari BPS, TPK di hotel bintang pada Desember 2023 mencapai 59,74%, naik 2,84 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sejalan dengan TPK hotel bintang, TPK hotel non-bintang pada Desember 2023 tercatat mencapai 28,67%, naik 2,22 poin dari tahun sebelumnya. Meski demikian, rata-rata lama tamu menginap di hotel berbintang mengalami penurunan sebesar 0,05 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu mencapai 1,57 hari.

Melihat tren industri pariwisata yang positif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menilai bahwa seluruh capaian tersebut berhasil melebihi target batas atas kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2023 yang sebesar 8,5 juta kunjungan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam di seluruh penjuru negeri, Pemerintah melalui Kemenparekraf melihat peluang tersebut dengan merancang kunjungan ke beberapa negara untuk semakin menyemarakkan upaya industri untuk terus berpromosi, sehingga nanti pada akhirnya kita mampu untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun-tahun mendatang.

Kendala yang Dihadapi dan Penanganannya

Iklim perekonomian makro maupun mikro di sepanjang tahun 2023 bergerak secara dinamis, hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri selaras dengan dampak kinerja korporasi pada masing-masing segmen usaha, tak terkecuali segmen usaha pariwisata di Indonesia. ITDC yang genap berusia 50 tahun pada November 2023 terus bergerak merevitalisasi diri untuk kembali bangkit pasca pandemi Covid-19. Kolaborasi dan sinergi

Soekarno-Hatta Airport in Tangerang, where each airport experienced an increase of up to 143.64% and 108.95%.

The improvement in tourism industry is also reflected in the increase in room occupancy rates (TPK) in hotels. Based on data from BPS, the TPK in star hotels in December 2023 reached 59.74%, an increase of 2.84 points compared to 2022. In line with the TPK for star hotels, the TPK for non-star hotels in December 2023 was recorded at 28.67%, an increase 2.22 points from the previous year. However, the average length of stay for guests at star-rated hotels decreased by 0.05 points compared to last year, reaching 1.57 days.

Reflecting on this positive tourism industry trends, the Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf) assesses that all these achievements have succeeded in exceeding the target limit for foreign tourist visits in 2023, totaling to 8.5 million visits. With its abundant culture and natural resources throughout the country, the Government through the Minister of Tourism and Creative Economy sees this opportunity by planning visits to several countries to promote Indonesian tourism, as an effort to increase foreign tourist visits in future years.

Obstacles Faced and Resolutions

The macro and micro economic climate throughout 2023 moved dynamically, creating its own challenges in line with the impact of corporate performance on each business segment, including the tourism business segment in Indonesia. ITDC, which turned 50 years old in November 2023, continued to improve itself to bounce back after the Covid-19 pandemic. Collaboration and synergy are recognized as important keys in the sustainable development

diakui menjadi kunci penting dalam keberlanjutan pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata terpadu yang menjadi kewenangan ITDC. Hal tersebut memang bukan sesuatu yang mudah, namun kami yakin ITDC mampu melaluinya dengan capaian yang baik.

Di tahun 2023, tidak terdapat kendala dan tantangan yang bersifat material yang berdampak secara signifikan baik secara kinerja keuangan maupun kinerja operasional ITDC. Manajemen telah melakukan sejumlah langkah dalam rangka transformasi antara lain perbaikan struktur keuangan Perusahaan, *value creation*, dan *social involvement*.

Membaiknya kondisi industri pariwisata pascapandemi Covid-19 turut memberikan dampak yang positif bagi kinerja Perusahaan. Perbaikan ini juga berhasil membawa Perusahaan untuk terus meningkatkan citra positif pada *brand identity* dan memiliki *positioning* yang lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, ITDC berupaya untuk mengembangkan bisnis dan nilainya dengan menjalin kerja sama dengan para pelaku industri pariwisata lainnya, pemerintah daerah, dan UMKM. Selain itu, ITDC selaku anggota holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata senantiasa melakukan sinergi dengan holding. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan aspek *Environmental, Social and Governance (ESG)* yang merupakan landasan tata kelola terintegrasi yang berkesinambungan dalam setiap program kerja dan investasi.

Peran Direksi dalam Penerapan Kebijakan Strategis

Tantangan besar yang timbul akibat iklim usaha yang dinamis adalah ketidakpastian kondisi ekonomi, baik di skala nasional maupun internasional. Fluktuasi tersebut dapat memengaruhi kondisi pasar serta kebijakan-kebijakan terkait. Direksi beserta jajaran senantiasa berinisiatif untuk menyusun target jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka pengembangan usaha. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan tantangan perekonomian Indonesia, maka ITDC menyiapkan sejumlah strategi dan target capaian yang akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan performa.

and management of integrated tourism areas under ITDC authority. This is something challenging, but we are confident that ITDC will be able to achieve it with good results.

In 2023, there was no material obstacles and challenges significantly impacting both the Company's financial performance and operational performance. Management has taken a number of steps in the context of transformation, including improving the Company's financial structure, value creation and social involvement.

The improving conditions of the tourism industry after the Covid-19 pandemic also brought a positive impact on the Company's performance. This improvement also helped the Company to sharpen its positive image in brand identity and have a stronger positioning than in previous years. To ensure the achievement of this goal, ITDC strives to develop its business and value by collaborating with other tourism industry players, regional governments and MSMEs. Apart from that, ITDC as a member of the SOEs holding in the aviation and tourism sector always synergizes with the holding. The company always pays attention to Environmental, Social and Governance (ESG) aspects, which are the basis for sustainable integrated governance in every work and investment program.

The Role of the Board of Directors in Implementing Strategic Policy

The big challenge came from a result of the dynamic business climate is the uncertainty of economic conditions, both on a national and international scale. These fluctuations can influence market conditions and related policies. The Board of Directors and staff always take the initiative to set short-term and long-term targets for business development. By paying attention to developments in the conditions and challenges of the Indonesian economy, ITDC has prepared a number of strategies and achievement targets that will be used as benchmarks for successful performance.



Pada awal tahun 2023, Direksi bersama segenap elemen ITDC telah menyusun dan menetapkan rencana strategis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagaimana tertuang pada RKAP 2023, bahwa kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan RKAP Tahun 2023 adalah berfokus pada sewa lahan, optimalisasi aset, *collection*, dan *event*. Keempat fokus tersebut menjadi dasar acuan setiap direktorat dalam menyusun strategi yang akan diterapkan di tahun 2023 Berikut disampaikan fokus strategi tiap direktorat antara lain:

1. Direktorat Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko
Pada tahun 2023, Direktorat Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko sehingga tercipta ketahanan kas Perusahaan dalam menghadapi krisis akibat Pandemi Covid-19, serta Perusahaan juga harus menjaga beberapa parameter keuangan yang menjadi covenant dalam pengajuan proses pendanaan pihak ketiga.
2. Direktorat Pengembangan Bisnis
Pada tahun 2023 diasumsikan 100% tagihan sesuai dengan LUDA dengan asumsi tenant beroperasi normal dengan strategi-strategi pemulihan yang dilakukan masing-masing tenant. Selain itu, Direktorat Pengembangan Bisnis akan berfokus pada pencarian investor baru untuk lahan di The Mandalika dan memaksimalkan aset produktif perusahaan melalui departemen komersial masing-masing wilayah kerja.
3. Direktorat Operasi
Pada tahun 2023, Direktorat Operasi akan berfokus pada pengembangan inovasi bisnis non-core melalui pengembangan wisata event dan diharapkan akan meningkatkan branding perusahaan. Selain itu, Direktorat Operasi akan mengembangkan bisnis DMO yang saat ini telah ada beberapa kawasan wisata yang telah MoU dengan ITDC, serta akan memaksimalkan kinerja SBU untuk dapat meningkatkan pendapatan.
4. Direktorat SDM & Legal Compliance
Pada tahun 2023, Direktorat SDM & Legal Compliance akan berfokus pada pengembangan

At the beginning of 2023, the Board of Directors together with all elements of ITDC have prepared and established a strategic plan for carrying out its business activities. As stated in the 2023 RKAP, the policy implemented in preparing the 2023 RKAP is to focus on land rental, asset optimization, collections and events. These four focuses are the basis of reference for each directorate in developing strategies to be implemented in 2023. The following are the strategic focuses for each directorate, including:

1. Directorate of Finance, Strategy and Risk Management
In 2023, the Directorate of Finance, Strategy and Risk Management created cash resilience for the Company in facing the crisis caused by the Covid-19 Pandemic. The Company must also maintain several financial parameters which are covenants in the application for third party funding processes.
2. Directorate of Business Development
In 2023, it is assumed that 100% of bills are in accordance with LUDA, assuming tenants operate normally with recovery strategies carried out by each tenant. In addition, this Directorate will focus on finding new investors for land in The Mandalika and maximizing the Company's productive assets through the commercial departments of each work area.
3. Directorate of Operations
In 2023, the Directorate of Operation focused on developing non-core business innovation through developing event tourism and is expected to improve company branding. Moreover, this Directorate developed the DMO business, which currently has several tourist areas that have MoUs with ITDC, and will maximize SBU performance to increase revenue.
4. Directorate of HR & Legal Compliance
In 2023, this Directorate focused on developing human resources to fulfill position formation

SDM untuk memenuhi formasi jabatan sesuai dengan kebutuhan untuk penguatan kinerja perusahaan. Selain itu dengan fungsi baru terkait pengelolaan aset akan meningkatkan pemantauan seluruh aset Perusahaan.

Direksi senantiasa optimis bahwa ITDC akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tentunya ditopang oleh lini-lini bisnis utama. Direksi juga terus memperkuat perannya untuk berfokus dalam melakukan berbagai ekspansi, inovasi, dan kolaborasi guna mendorong pertumbuhan usaha.

Kinerja Tahun 2023 dan Perbandingannya terhadap Target

Sepanjang tahun 2023 iklim usaha nasional memang dipenuhi dengan berbagai tantangan, namun hal itu tak menyurutkan kinerja usaha ITDC. Dalam penetapan RKAP, Perusahaan senantiasa memperkuat fondasi bisnis melalui kebijakan strategis yang tepat sasaran. Di tahun 2023, ITDC merencanakan perolehan dari beberapa komponen substansial sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Perusahaan. Perbandingan antara rencana dan realisasi adalah sebagai berikut:

Aset

Per 31 Desember 2023, Perusahaan membukukan jumlah aset sebesar Rp7,30 triliun, atau sebesar 98,86% dari target yaitu Rp7,38 triliun. Capaian tersebut juga mengalami peningkatan sebesar Rp436,95 miliar atau 6,37% dibanding tahun 2022 sebesar Rp6,86 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan aset tetap karena adanya penambahan investasi yang dilakukan di Mandalika dan Golomori.

Pendapatan

Per 31 Desember 2023, Perusahaan membukukan jumlah pendapatan sebesar Rp885,21 miliar, atau sebesar 79,40% dari target yaitu Rp1,11 triliun. Capaian tersebut juga mengalami peningkatan sebesar Rp227,73 miliar atau naik 34,64% dari tahun sebelumnya sebesar Rp657,49 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan kompensasi lahan, peningkatan pendapatan event dan peningkatan pendapatan dari Hotel.

according to needs to strengthen company performance. In addition, new functions related to asset management will improve monitoring of all Company assets.

The Board of Directors is always optimistic on the growth of the Company with supports from its main business line. The Board of Directors also continues to strengthen its role to focus on carrying out various expansions, innovations and collaborations to encourage business growth.

Performance in 2023 and Comparison to Target

Throughout 2023, the national business climate was full of various challenges, but it did not hamper ITDC's business performance. In determining the RKAP, the Company always strengthens its business foundation through targeted strategic policies. In 2023, ITDC planned to obtain several substantial components as benchmarks for assessing the Company's performance. The comparison between plans and realization is as follows:

Asset

As of December 31, 2023, the Company posted total assets of Rp7.30 trillion, or 98.86% of the target of Rp7.38 trillion. This achievement also increased by Rp436.95 billion or 6.37% compared to 2022 with Rp6.86 trillion. This was caused by an increase in fixed assets due to additional investments made in Mandalika and Golomori.

Revenue

As of December 31, 2023, the Company posted total revenue of Rp885.21 billion, or 79.40% of the target of Rp1.11 trillion. This achievement also increased by Rp227.73 billion or up 34.64% from the previous year of Rp657.49 billion. This increase was caused by an increase in land compensation income, an increase in event income and an increase in income from hotels.



Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2023, Perusahaan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp278,41 miliar, atau sebesar 805,14% dari target yaitu rugi Rp34,58 miliar. Kerugian tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp68,45 miliar atau naik 32,60% jika dibandingkan tahun 2022 yang tercatat rugi sebesar Rp209,97 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan, beban penyusutan, beban bunga pinjaman, dan kerugian atas pengukuran kembali program manfaat pasti.

Perbandingan antara target dan pencapaian tersebut menjadi salah satu gambaran yang dipertimbangkan dalam penyusunan target dan strategi bisnis ke depan. Dengan dukungan dari kapasitas usaha serta prospek yang dimiliki, ITDC senantiasa berkomitmen untuk terus menghadirkan kinerja yang baik secara berkelanjutan di masa mendatang.

Analisis tentang Prospek Usaha

Kondisi konflik geopolitik yang terus berkepanjangan masih menjadi faktor yang cukup signifikan atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* yang dirilis pada Januari 2024, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun 2024 akan melambat, yakni berada pada level 2,9%. Meski demikian, kebijakan moneter yang ketat di sejumlah negara diperkirakan akan membuahkan hasil positif dengan berhasil menurunkan tingkat inflasi menjadi 4,1% di tahun 2024. IMF juga memperkirakan suku bunga kebijakan global akan mencapai 5,2% pada tahun 2024, naik dari 3,5% pada tahun 2022.

Perbaikan kondisi secara bertahap yang terjadi di sepanjang tahun 2024 juga memberikan dampak positif bagi industri pariwisata. Sejak pulihnya kondisi pascapandemi Covid-19, sektor pariwisata menjadi salah satu industri dengan prospek yang cukup cerah. Tingginya kunjungan wisatawan mancanegara di sepanjang tahun 2023 menjadikan Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan capaian yang ada pada tahun mendatang.

Net Profit (Loss) for the Year

As of December 31, 2023, the Company posted a loss for the year of Rp278.41 billion, or 805.14% of the target, namely a loss of Rp34.58 billion. This loss increased by Rp68.45 billion or an increase of 32.60% compared to 2022, which recorded a loss of Rp209.97 billion. This was caused by an increase in the cost of income, depreciation expense, loan interest expense, and losses from remeasurement of defined benefit programs.

The comparison between targets and achievements is one of the illustrations to be considered in preparing targets and future business strategies. With the support of its business capacity and prospects, ITDC is always committed to continuing to provide sustainable good performance in the future.

Analysis of Business Prospects

The ongoing condition of geopolitical conflict is playing a significant factor in the slowdown in global economic growth in 2024. Based on the *World Economic Outlook* report released in January 2024, the *International Monetary Fund* (IMF) projects that global economic growth throughout 2024 will slow down, namely at the level of 2.9%. However, tight monetary policy in several countries is expected to produce positive results by successfully reducing the inflation rate to 4.1% in 2024. The IMF also estimates that global policy interest rates will reach 5.2% in 2024, up from 3.5% in 2022.

The gradual improvement in predicted conditions in 2024 will bring a positive impact on the tourism industry. Since conditions have recovered after the Covid-19 pandemic, the tourism sector has become an industry with quite bright prospects. The high number of foreign tourist visits throughout 2023 motivates the Government to improve existing achievements in the coming year.

Berdasarkan laporan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikeluarkan oleh Menparekraf menargetkan dapat menarik sebanyak 9,5-14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Nilai devisa pariwisata tahun 2024 diperkirakan mampu mencapai USD7,38-USD13,08 miliar dengan kontribusi PDB pariwisata akan mencapai 4,5%. Perbaikan kunjungan ini juga diharapkan dapat diimbangi dengan ikut meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata di tahun 2024 yang diproyeksikan dapat mencapai 22,08 juta orang. Dengan demikian, Menparekraf optimis bahwa sektor pariwisata akan terus tumbuh dengan baik dan pulih seperti semula pada tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis. Pada tahun 2024, perusahaan akan mengedepankan tema *Reinforcing The Key Business Fundamentals to Expedite Recovery*. Hal ini sejalan dengan tema utama yang digunakan oleh PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dalam penyusunan RKAP Tahun 2024 dimana para anggota *holding*, diharapkan menguatkan lini bisnis utama Perusahaan untuk mempercepat pemulihan kondisi keuangan Perusahaan. Holding juga mengharapkan kedepannya lebih tercipta kolaborasi antar anggota untuk sehingga pertumbuhan bisnis ke arah yang positif.

Di tahun 2024, ITDC akan bertransformasi menjadi pengelola dan pengembang Kawasan pariwisata. Hal ini menjadi strategi utama yang akan diterapkan dalam pengembangan bisnis Perusahaan di tahun 2024. Strategi utama tersebut dipilih untuk mendukung upaya pemulihan dan penyehatan keuangan dengan mengedepankan prinsip *financial sustainability* dan memperhatikan kecukupan likuiditas keuangan perusahaan. Terlebih, sumber pendapatan sebagian besar masih berasal dari sewa lahan di The Nusa Dua.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan pariwisata di Indonesia, ITDC berupaya untuk terus hadir dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negeri melalui produk dan jasa di sektor pariwisata. Untuk

Based on the Tourism and Creative Economy Outlook report issued by the Minister of Tourism and Creative Economy, the target is to attract 9.5-14.3 million visits from foreign tourists. The value of tourism foreign exchange in 2024 is estimated to reach USD7.38-USD13.08 billion with tourism GDP contribution reaching 4.5%. This increase in visits is also expected to be offset by the increase in the number of tourism workers in 2024, which is projected to reach 22.08 million people. Thus, the Minister of Tourism and Creative Economy is optimistic that the tourism sector will continue to grow and recover to normal in 2025.

Based on the description above, the Company has prepared various strategic policies. In 2024, the Company will prioritize the theme Reinforcing The Key Business Fundamentals to Expedite Recovery. This is in line with the main theme used by PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) in preparing the 2024 RKAP where holding members are expected to strengthen the Company's main business lines to accelerate the recovery of the Company's financial condition. Holding also asks for more collaboration between members to achieve business growth in a positive direction.

In 2024, ITDC will transform into a manager and developer of tourism areas. This will become the main strategy to be implemented in developing the Company's business in 2024. This Main Strategy was chosen to support efforts for recovery and financial health by prioritizing the principles of financial sustainability and paying attention to the adequacy of the company's financial liquidity. Moreover, most of the source of income still comes from renting land at The Nusa Dua.

Developments in the Implementation of Corporate Governance

As a company engaged in tourism development in Indonesia, ITDC strives to be present and contribute to encouraging the country's economic growth through products and services in the tourism sector. Therefore, ITDC continues to strengthen its



itu, ITDC senantiasa memperkuat komitmennya dalam menerapkan *best practice* GCG secara konsisten agar dapat berkontribusi secara positif bagi Perusahaan, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta meningkatkan kinerja dan citra perusahaan yang baik.

Penerapan prinsip terbaik GCG juga dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Perusahaan senantiasa tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan GCG di ITDC telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

ITDC memandang bahwa penerapan GCG merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien untuk memenuhi kewajiban secara bertanggung jawab kepada pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, serta masyarakat pada umumnya. Hal tersebut merupakan faktor penting agar dapat memperkuat posisi ITDC dalam persaingan bisnis yang sehat serta pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Selain itu, ITDC juga meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG secara komprehensif akan mampu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

ITDC mewujudkan komitmen dalam menerapkan praktik terbaik GCG melalui pembentukan Kerangka Kerja Tata Kelola (*Governance Framework*) yang berfungsi sebagai fondasi utama penerapan GCG di Perusahaan. Kerangka kerja tersebut terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) dan Mekanisme/Proses Tata Kelola (*Governance Process*). Kedua aspek ini saling berhubungan satu sama lain yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) sesuai dengan yang diharapkan.

Perubahan Komposisi Direksi

ITDC diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Direksi yang menjabat telah dinyatakan lulus *fit and proper*

commitment to implementing GCG best practices consistently to bring positive contribution to the Company, provide added value for stakeholders, and improve the company's performance and good image.

The implementation of the best GCG principles is also carried out by ensuring that all of the Company's business activities always comply with statutory regulations. The implementation of GCG at ITDC has referred to the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and No. PER-3/MBU/03/2023 concerning SOEs Organs and Human Resources.

ITDC sees that the implementation of GCG is an important aspect in increasing and maximizing the value of a professional, transparent and efficient Company to fulfill its obligations responsibly to shareholders, business partners, customers and society in general. This is an important factor to strengthen ITDC's position in healthy business competition and sustainable business growth. Moreover, ITDC believes that implementing GCG principles comprehensively will provide added value for stakeholders.

ITDC embodies its commitment to implementing GCG best practices through the establishment of a Governance Framework as the main foundation for implementing GCG in the Company. The framework consists of 2 (two) main aspects, namely the Governance Structure and the Governance Process. These two aspects are interconnected with each other which will ultimately reflect the Governance Outcome as expected.

Changes in Board of Directors Composition

ITDC is managed and led by a Board of Directors whose number is adjusted to the Company's needs. The serving directors have been declared

test. Di tahun 2023, komposisi Direksi Perusahaan tidak mengalami perubahan. Per 31 Desember 2023, komposisi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

to have passed the fit and proper test. In 2023, the composition of the Company's Board of Directors did not change. As of December 31, 2023, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Susunan Direksi Per 31 Desember 2023

Composition of the Board of Directors per December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Establishment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Ari Respati	Direktur Utama President Director	SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK- 169/MBU/08/2022 SOEs Minister's Decree as GMS No. SK-169/MBU/08/2022	8 Agustus 2022- RUPS Tahun 2027 August 8, 2022-2027 GMS	Ke-1 First
Ahmad Fajar	Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Strategy, and Risk Management	SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK- 169/MBU/08/2022 SOEs Minister's Decree as GMS No. SK-169/MBU/08/2022	8 Agustus 2022- RUPS Tahun 2027 August 8, 2022-2027 GMS	Ke-1 First
Wenda Ramadya Nabiel	Direktur SDM dan Legal Compliance Director of HR and Legal Compliance	SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK- 169/MBU/08/2022 SOEs Minister's Decree as GMS No. SK-169/MBU/08/2022	8 Agustus 2022- RUPS Tahun 2027 August 8, 2022-2027 GMS	Ke-1 First
Ema Widiastuti	Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development	SK Menteri BUMN selaku RUPS No. SK- 363/MBU/11/2020 SOEs Minister's Decree as GMS No. SK-363/MBU/11/2020	13 November 2020- RUPS Tahun 2025 November 13, 2020- 2025 GMS	Ke-1 First
Troy Reza Warokka	Direktur Operasi Director of Operations	SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK- 169/MBU/08/2022 SOEs Minister's Decree as GMS No. SK-169/MBU/08/2022	8 Agustus 2022- RUPS Tahun 2027 August 8, 2022-2027 GMS	Ke-1 First



Segenap jajaran Direksi berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Apresiasi

Atas capaian Perusahaan mengarungi dinamika usaha di tahun 2023, izinkan saya mewakili Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris Perusahaan. Saya mewakili segenap Direksi juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan pemegang saham, konsumen, regulator, pemasok, dan mitra usaha, atas kerjasama yang telah tercipta. Kepada seluruh Insan Perusahaan, izinkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan, semoga ITDC senantiasa mencatatkan hasil yang positif dan berkelanjutan untuk ke depannya.

The entire Board of Directors is committed to carrying out this mandate by always prioritizing the principles of good corporate governance for the interests of shareholders and other stakeholders.

Appreciation

For the Company's achievements in navigating business dynamics in 2023, allow me on behalf of the Board of Directors to convey my respect and gratitude to the Company's Board of Commissioners. On behalf of the entire Board of Directors, I would also like to express my gratitude for the trust given by shareholders, consumers, regulators, suppliers and business partners, for all of the collaborations. To all Company Personnel, allow me to express my highest appreciation for the hard work and dedication that has been shown, I hope ITDC will always record positive and sustainable results in the future.

Jakarta, 28 Juni 2024
Jakarta, June 28, 2024

Ari Respati

Direktur Utama
President Director

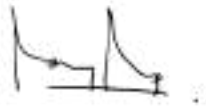
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi dari Laporan Tahunan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia disebut juga Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) berikut laporan keuangan dan informasi lain terkait Perusahaan. Laporan tahunan ini disajikan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 28 Juni 2024

DEWAN KOMISARIS THE BOARD OF COMMISSIONERS



Ricky Joseph Pesik
Komisaris Utama
President Commissioner



H. Irzani M.Pd, M.Si
Komisaris
Commissioner



Ir. Zainal Mutaqin, M.M
Komisaris
Commissioner



Ulin Ni'am Yusron
Komisaris Independen
Independent Commissioner



LETTER OF APPROVAL AND STATEMENT OF ACCOUNTABILITY FOR THE 2023 ANNUAL REPORT OF PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA BY MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The Board of Commissioners and the Board of Directors accept full responsibility for the accuracy of the Annual Report's contents of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, also known as the Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), inclusive of financial reports and other information pertaining to the Company. This annual report is presented in full following the applicable regulations.

Hence, this statement is made accurately.

Jakarta, June 28, 2024

DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS

Ari Respati

Direktur Utama
President Director

Ahmad Fajar

Direktur Keuangan,
Strategi, dan Manajemen
Risiko
Director of Finance,
Strategy, and Risk
Management

Wenda Ramadya Nabel

Direktur SDM dan Legal
Compliance
Director of HR and Legal
Compliance

Ema Widiastuti

Direktur Pengembangan
Bisnis
Director of Business
Development

Troy Reza Warokka

Direktur Operasi
Director of Operations

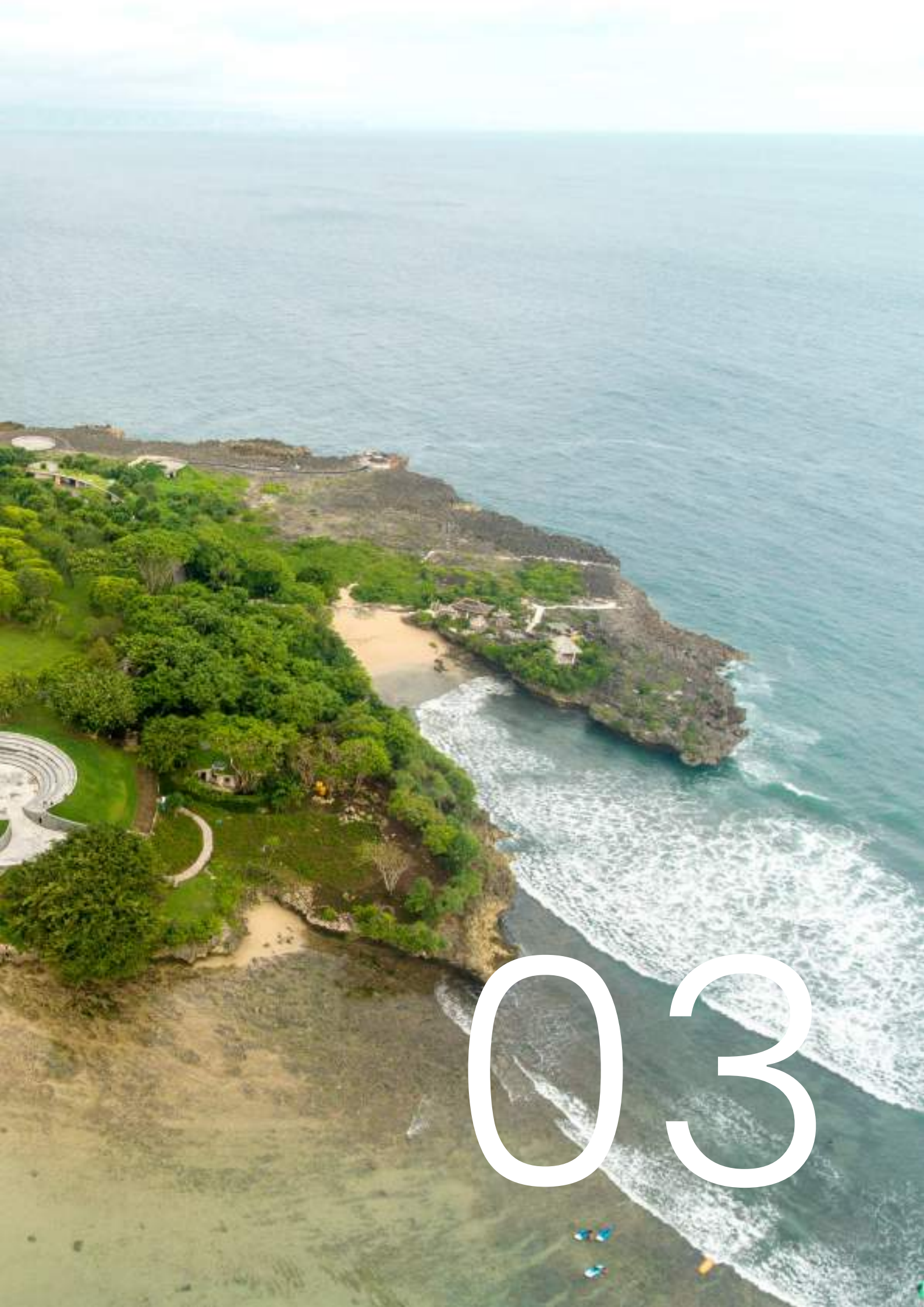
Profil Perusahaan

Company Profile

ITDC kembali mendapat penugasan ketiga oleh Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 untuk pembangunan dan pengembangan kawasan The Golo Mori di Desa Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

ITDC has received another third assignment by the Government through State Capital Participation (PMN) in 2023 for the construction and development of The Golo Mori area in Golo Mori Village, West Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT).





03

Informasi Umum dan Identitas ITDC

General Information and ITDC Identity



Nama Perusahaan | Company Name

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia



Nama Inisial | Commercial Name

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC)



Tanggal Pendirian | Establishment Date

12 November 1973 | November 12, 1973



Dasar Hukum Pendirian | Legal Basis of Establishment

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1972 dengan Akta Pendirian Nomor 33 tanggal 12 November 1973 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 29 Tanggal 13 Juni 1974 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H. Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di bawah Nomor 2673 dan 2674 Tanggal 11 Juli 1974 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 70 Tanggal 30 Agustus 1974 dan Tambahan Berita Negara Nomor 441.

Government Regulation (PP) Number 27 of 1972 with The Deed of Establishment Number 33 dated November 12, 1973, was made before Soeleman Ardjasmita, S.H., notary in Jakarta, which was amended by Amendment Deed Number 29 dated June 13, 1974, which was made before Soeleman Ardjasmita, S.H., notary in Jakarta, and has been registered in the list of companies under Number 2673 and 2674 on July 11, 1974, at The Registrar's Office of The Jakarta District Court and has been announced in State Gazette Number 70 dated August 30, 1974, and Additional State Gazette Number 441.



Tanggal Perubahan Nama | Change of Name Date

16 Mei 2014 | May 16, 2014



Dasar Hukum Perubahan Nama | Legal Basis of Change of Name

Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 63 tanggal 24 Maret 2014 dibuat di hadapan Evi Susanti Panjaitan, S.H., mengenai penetapan perubahan nama perusahaan yang semula PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) menjadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-15415.AH.01.02 Tahun 2014 Tanggal 16 Mei 2014.

The Amendment Deed of Articles of Association Number 63 dated March 24, 2014, was made before Evi Susanti Panjaitan, S.H., regarding the determination of the name change of The Company from PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) to PT Pengembangan Pariwisata Indonesia and obtained approval from The Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-15415.AH.01.02 of 2014 dated May 16, 2014.



Bidang Usaha | Line of Business

Kawasan Pariwisata | Tourism Area



Jenis Bidang Usaha | Type of Business Field

Pemilik Destinasi, Investor Aset Produktif, Pengembang dan Penyedia Utilitas, Pengelola Destinasi
Destination Owners, Productive Asset Investors, Utility Developers and Providers, Destination Management



Kepemilikan Saham | Share Ownership

Seri A Dwiwarna: Pemerintah Republik Indonesia (0,00005%)
Seri B: PT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) (99,99995%)
Dwiwarna Series A: The Indonesian Government (0,00005%)
Series B: PT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) (99,99995%)



Modal Dasar | Authorized Capital
Rp3.500.000.000.000



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | Fully Placed and Issued Capital
Rp2.147.660.000.000



Jaringan Pelayanan | Service Network
1 Kantor Pusat, 3 Kantor Wilayah (Nusa Dua, Mandalika, Golo Mori)
1 Head Office, 3 Regional Offices (Nusa Dua, Mandalika, Golo Mori)



Wilayah Pengembangan | Development Area
The Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
The Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
The Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
The Nusa Dua, Badung Regency, Bali Province
The Mandalika, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province
The Golo Mori, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province



Jumlah Karyawan | Number of Employee
197 orang (2023) | 197 people (2023)



Kelompok Usaha | Business Group
Entitas Anak | Subsidiaries:
PT ITDC Nusantara Properti
PT ITDC Nusantara Utilitas

Entitas Asosiasi | Associated Entities:
PT Garuda Adi Matra
PT Jasa Marga Bali Tol
PT Peninsula Bali Resort
PT Bali Griya Shanti

Entitas Cucu | Sub-subsidiaries Entities:
PT MGPA Nusantara Jaya
PT ITDC Nusantara Xplorin
PT Merese Mandalika Nusantara



Alamat Kantor Pusat | Head Office Address
Jl. MH Thamrin No. 1
Gedung Menara BCA Lt. 39-Kantor ITDC
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10310 Indonesia
Telepon: +62 21 80642790
Fax: +62361771014



Kontak Perusahaan | Contact
Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
Telepon: +62 21 80642790
Fax: +62361771014
Email: info@itdc.co.id
Situs Web: www.itdc.co.id



Media Sosial | Social Media
Facebook: [itdc.id](https://www.facebook.com/itdc.id)
Twitter: [@itdc_id](https://twitter.com/itdc_id)
Instagram: [@itdc_id](https://www.instagram.com/itdc_id)
Youtube: ITDC Creating Destinations

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, selanjutnya disebut “InJourney Tourism Development Corporation (ITDC)” atau “Perusahaan”, adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata terintegrasi di Indonesia. ITDC didirikan pertama kali pada tahun 1969 ketika Pemerintah Republik Indonesia melakukan kajian terhadap perkembangan pariwisata di Bali. Kajian yang dilakukan bersama konsultan pariwisata Perancis, SCETO, memberikan rekomendasi sebagai model dasar untuk mengembangkan pariwisata di Bali untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak nilai-nilai budaya dan tatanan sosial di Bali dan sekitarnya. Rekomendasi ini melatarbelakangi penjabaran masterplan pengembangan pariwisata di Bali, yakni pembangunan suatu kawasan wisata dengan pemukiman yang terpusat dan jauh dari pusat kehidupan masyarakat Bali sehari-hari sehingga dapat menekan dampak langsung wisatawan, terutama dampak negatifnya.

Untuk mengembangkan kawasan pariwisata rekomendasi dari sejumlah konsultan pariwisata baik dalam maupun luar negeri, Pemerintah mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Negara, yakni PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Pada tahun 1972, BTDC memiliki peranan awal untuk memperoleh lahan, menyusun rencana induk, membangun infrastruktur kawasan yang bertaraf internasional, serta menyusun sistem investasi yang menarik bagi investor untuk menanamkan modal di Nusa Dua.

Selanjutnya di tahun 1974, BTDC berhasil mengembangkan The Nusa Dua sebagai “Bali’s Finest Family-Friendly Resort Haven” sekaligus menjadi proyek pariwisata pertama World Bank untuk Indonesia dan kini telah menjadi tolok ukur destinasi masa depan. Kawasan ini dilengkapi dengan infrastruktur, akomodasi, dan fasilitas pertemuan berstandar internasional sehingga menjadikan kawasan ini terpilih sebagai tuan rumah berbagai event resmi berskala internasional seperti APEC 2013, Bali Democratic Forum, Miss World 2013, dan IMF-World Bank Group Annual Meetings 2018 dan Presidensi G20 pada 2022.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, hereinafter referred to as “InJourney Tourism Development Corporation (ITDC)” or “Company”, is a company focusing on the development and management of integrated tourism areas in Indonesia. ITDC was first established in 1969 when the Government of the Republic of Indonesia conducted a study of tourism development in Bali. The study carried out with the French tourism consultant, SCETO, provided recommendations as a basic model for developing tourism in Bali to improve the standard of living and welfare of the community without destroying cultural values and social order in Bali and its surroundings. This recommendation is the background to the elaboration of a master plan for tourism development in Bali, namely the development of a tourist area with centralized residential areas far from the centre of daily Balinese life, to reduce the direct impact of tourists, especially the negative impacts.

To develop tourism areas as recommended by several tourism consultants both at home and abroad, the Government established a State-Owned Enterprise, namely PT Bali Tourism Development (Persero) or Bali Tourism Development Corporation (BTDC). In 1972, BTDC had an initial role in acquiring land, preparing a master plan, building international standard regional infrastructure, and developing an attractive investment system for investors to invest in Nusa Dua.

Furthermore, in 1974, BTDC succeeded in developing The Nusa Dua as “Bali’s Finest Family-Friendly Resort Haven” as well as becoming the World Bank’s first tourism project for Indonesia and has now become a benchmark for future destinations. This area is equipped with international standard infrastructure, accommodation, and meeting facilities, making this area chosen to host various official international events such as APEC 2013, Bali Democratic Forum, Miss World 2013, IMF-World Bank Group Annual Meetings 2018, and Indonesia’s G20 Presidency in 2022.



Di tahun 2014, BTDC selanjutnya mengalami perubahan nama menjadi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) guna mengintegrasikan wisata di Bali dan Lombok yang tengah direncanakan. Perubahan tersebut dicatat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 63 tanggal 24 Maret 2014 dibuat di hadapan Evi Susanti Panjaitan, S.H., mengenai penetapan perubahan nama perusahaan yang semula PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) menjadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-15415.AH.01.02 Tahun 2014 Tanggal 16 Mei 2014.

Setelah berhasil mengembangkan The Nusa Dua, ITDC dipercaya untuk menjadi pengembang kawasan The Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memiliki luas 1.175 ha. The Mandalika “The Ultimate Lifestyle Sportstainment Destination” telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak tahun 2017 dan telah menarik investasi sebesar USD1,3 miliar. Saat ini, The Mandalika sedang diciptakan sebagai destinasi pariwisata kelas dunia dengan berbagai fasilitas dan atraksi internasional, termasuk Pertamina Mandalika International Circuit, yang menjadi tempat penyelenggaraan event balap motor dunia seperti WSBK, MotoGP dan Asian Road Racing Championship (ARRC).

Di tahun 2021, ITDC melakukan rebranding menjadi InJourney Tourism Development Corporation. Rebranding ini dilakukan sehubungan dengan masuknya Perusahaan ke dalam bagian PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2021. InJourney hadir sebagai ekosistem holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata di Indonesia dengan tujuan untuk membawa keramahan-tamahan dan keragaman budaya Indonesia kepada dunia, mendorong kebangkitan sektor pariwisata, dan mengorkestrasi kolaborasi dan integrasi dalam industri pariwisata.

Kemudian, ITDC mendapatkan penugasan ketiga dari Pemerintah untuk mengembangkan kawasan The Golo Mori “Sustainable Marine-Based MICE

In 2014, BTDC changed its name to Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) in order to integrate tourism in Bali and Lombok which was being planned. These changes were recorded in the Deed of Amendment to the Articles of Association Number 63 dated March 24, 2014, made in the presence of Evi Susanti Panjaitan, S.H., regarding the determination of the change in the name of the company from PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) to PT Pengembangan Pariwisata Indonesia and had obtained approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree Number AHU-15415.AH.01.02 of 2014 dated May 16, 2014.

After the success development of The Nusa Dua, ITDC was trusted to develop the Mandalika area in Central Lombok, West Nusa Tenggara (NTB), with an area of 1,175 ha. The Mandalika “The Ultimate Lifestyle Sportstainment Destination” has been a Special Economic Zone (KEK) since 2017 and has attracted investment of USD1.3 billion. Currently, the Mandalika is being developed as a world-class tourism destination with various international facilities and attractions, including the Pertamina Mandalika International Circuit, which is the venue for world motor racing events such as WSBK, MotoGP, and the Asian Road Racing Championship (ARRC).

In 2021, ITDC rebranded itself to InJourney Tourism Development Corporation. This rebranding was carried out in line with the entry of PT Aviastri Wisata Indonesia (Persero) or InJourney, as stated in Government Regulation No. 72 of 2021 and Government Regulation No. 104 of 2021. InJourney exists as an SOE holding ecosystem in the aviation and tourism sector in Indonesia, aiming to bring Indonesian hospitality and cultural diversity to the world, encouraging the revival of the tourism sector, and orchestrating collaboration and integration in the tourism industry.

Furthermore, ITDC received a third assignment from the Government to develop The Golo Mori “Sustainable Marine-Based MICE Tourism

"Tourism Destination" di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di dalam kawasan ini terdapat sebuah convention center kelas dunia, yaitu Golo Mori Convention Center (GMCC), yang menawarkan pemandangan memukau menghadap langsung ke Pulau Rinca. Dengan fasilitas Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) berstandar internasional, GMCC telah menjadi lokasi penyelenggaraan ASEAN Summit 2023. Selain itu, GMCC juga dilengkapi dengan Beach Club dan Dermaga, menjadikan The Golo Mori sebagai ikon pariwisata baru di area Labuan Bajo dan sedang disiapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata baru di Indonesia.

Tujuan Pendirian

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk melakukan usaha di bidang pariwisata, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sesuai dengan akta pendirian Perusahaan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah serta menggunakan tanah untuk keperluan daerah pariwisata dan menata serta membagi lebih lanjut dalam satuan-satuan lingkungan tertentu dan mengembangkan jasa-jasa prasarana dan fasilitas-fasilitas pariwisata lainnya.
2. Menyerahkan dan menyewakan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga untuk membangun sarana pariwisata berikut segala fasilitas pendukungnya menurut persyaratan yang ditentukan Perusahaan selaku pemegang hak, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu berikut keuangannya dengan ketentuan pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan yang diterapkan dalam anggaran dasar.
3. Membangun, membeli, menjual dan mengelola properti termasuk hotel, apartemen, kondominium, vila, dan agrowisata serta fasilitas penunjang lainnya.

"Destination" area in West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara (NTT). This area has a world-class convention centre, namely the Golo Mori Convention Centre (GMCC), which offers stunning views directly facing Rinca Island. With international standard Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) facilities, GMCC was appointed to host the 2023 ASEAN Summit. In addition, GMCC has its own beach club and a port, defining the Golo Mori as a new tourism icon in the Labuan Bajo area and is prepared to become a new Tourism Special Economic Zone in Indonesia.

Purpose of Establishment

The Company was established to conduct business in the tourism sector, as well as optimizing the use of the Company's resources to produce goods and/or services with high quality and strong competitiveness, to obtain/pursue profits in order to increase the value of the Company by applying the principles of Good Corporate Governance.

In accordance with the Company's deed of establishment, to achieve these aims and objectives, the Company can carry out business activities as follows:

1. Plan the allocation and use of land for regional tourism purposes and organize and further divide it into certain environmental units and develop infrastructure services and other tourism facilities.
2. Hand over and lease parts of the land to third parties to build tourism facilities and all supporting facilities according to the requirements determined by the Company as the right holder, which includes aspects of designation, use, time period and finances with the provisions for granting land rights to the third party carried out by authorized officials, in accordance with the provisions implemented in the articles of association.
3. Build, buy, sell, and manage property including hotels, apartments, condominiums, villas, and agrotourism as well as other supporting facilities.



4. Jasa konsultasi di bidang pengembangan pariwisata, manajemen properti termasuk hotel, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya.
5. Merencanakan, membangun dan mengembangkan jasa-jasa prasarana dan fasilitas-fasilitas umum lainnya meliputi pengelolaan limbah, biro perjalanan, restoran, katering, fasilitas hiburan dan olahraga serta penyewaan ruangan dalam lingkungan daerah-daerah wisata.
6. Membangun bangunan yang dipandang perlu untuk keperluan perusahaan dan administrasi daerah-daerah pariwisata.
7. Melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk usaha perkantoran, pusat perbelanjaan, convention center dan periklanan.

Informasi Perubahan Nama

Perusahaan didirikan dengan nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau Bali Tourism Development Corporation (BTDC) dan telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada 16 Mei 2014, BTDC berubah nama menjadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Kemudian, Perusahaan melakukan rebranding menjadi InJourney Tourism Development Corporation sehubungan dengan masuknya Perusahaan ke dalam bagian PT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney selaku holding BUMN di sektor aviawi dan pariwisata di Indonesia.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang termuat dalam Akta Pendirian Perusahaan, maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang pariwisata dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

4. Consulting services in the field of tourism development and property management including hotels, maintenance, and provision of other supporting facilities.
5. Plan, build and develop infrastructure services and other public facilities including waste management, travel agencies, restaurants, catering, entertainment and sports facilities as well as room rental in tourist areas.
6. Develop buildings deemed necessary for business and administration purposes in tourism areas.
7. Carrying out business activities in order to optimize the use of existing resources for office businesses, shopping centres, convention centres, and advertising.

Information on Name Change

The Company was established under the name PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) or Bali Tourism Development Corporation (BTDC) and has undergone several name changes. On May 16, 2014, BTDC changed its name to PT Pengembangan Pariwisata Indonesia or Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Then, the Company rebranded to InJourney Tourism Development Corporation in regard to the Company's entry into the PT Aviawi Wisata Indonesia (Persero) or InJourney as an SOE holding in the aviation and tourism sector in Indonesia.

Business Activities Based on the Articles of Association

Based on the Company's Articles of Association contained in the Company's Deed of Establishment, the aim and objective of establishing the Company is to conduct business in the tourism sector and optimize the use of resources owned by the Company to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/pursue profits in order to increase the value of the Company by implementing the principles of Limited Liability Companies.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha lainnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

To achieve these aims and objectives, the Company carries out main business activities and other business activities as follows:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Implemented/ Not Yet Implemented	Keterangan Description	Pangsa Pasar Market Share	Sumber Pendapatan Income Source
Pemilik Destinasi Destination Owner	✓	Bisnis penyewaan lahan di kawasan pariwisata untuk kegiatan komersial bisnis Business of land leasing in tourism areas for business commercial activities	Hotel Penyewa Komersial Rental Hotel Commercial	Biaya sewa Biaya kompensasi Rental expenses Compensation expenses
Investor Aset Produktif Productive Assets Investors	✓	Investasi di aset-aset produktif di dalam kawasan pariwisata (hotel, area komersial, dll) Investment in productive assets within tourism areas (hotels, commercial areas, etc.)	Wisatawan Tourists	Tarif kamar Dividen Bagi hasil Room rate Dividend Profit-sharing
Pengembang dan Penyedia Utilitas Utility Developer and Provider	✓	Bisnis pengembang properti residensial dan penyedia utilitas seperti unit pengolahan air bersih dan pengelolaan pasokan daya listrik (IPP dan PLN) Business of development of residential properties and provision of utilities such as clean water management unit and electricity power supply management (IPP and PLN)	Pengembang Properti Pembeli property Utilitas, Penyewa dan PLN Property developer Property buyer Utilities, renters, and PLN	Penjualan Properti Penjualan Air Bersih Property Sales Clean Water Sales
Pengelola Destinasi Destination Management	✓	Bisnis dalam bidang pengelolaan kawasan wisata Business of tourism area management	Pemilik Kawasan Pemerintah Owner of Government areas	Biaya manajemen Management expenses



Produk dan Jasa

Products and Services



The Nusa Dua

Kawasan pariwisata The Nusa Dua terletak di tenggara Pulau Bali. Sebagai kawasan pariwisata, The Nusa Dua memiliki aksesibilitas yang memudahkan para wisatawan untuk mengunjunginya. Kawasan ini berjarak 8 kilometer dari Bandara Internasional Ngurah Rai. The Nusa Dua pertama kali dikembangkan pada awal dekade 1970-an dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan fasilitas akomodasi premium bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sebagai kawasan pariwisata, The Nusa Dua juga mengusung konsep kawasan berwawasan lingkungan. Pada lingkungan The Nusa Dua, terdapat area hijau seluas ± 30 ha (10% dari luas kawasan) yang tersebar di seluruh kawasan. Area hijau tersebut ditanami 6.080 pohon, yang terdiri dari berbagai jenis tanaman, termasuk sebanyak 2.899 pohon berkategori langka.

Konsep pengembangan taman The Nusa Dua mengadopsi konsep Bali yaitu Panca Warna, penanaman pohon yang didominasi warna gelap di sebelah utara, warna putih di sebelah timur, warna merah di sebelah selatan, dan warna kuning di sebelah Barat. Taman-taman salah satunya berfungsi sebagai tempat konservasi flora lokal, seperti pandan ijo, kayu santen, camplung, bekul, juwet, yang ditanam secara menyebar di seluruh kawasan.

Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan pengelolaan sampah yang menyeluruh. Produksi sampah yang tiap harinya mencapai ± 18 m³ sebagian diolah untuk menjadi pupuk organik. Pupuk organik

The Nusa Dua

The Nusa Dua tourism area is located in the southeast of Bali Island. As a tourism area, The Nusa Dua has accessibility to accommodate tourists visits. This area is 8 kilometers away from Ngurah Rai International Airport. The Nusa Dua was first developed in the early 1970s to meet the needs of premium accommodation facilities for domestic and foreign tourists.

As a tourism area, The Nusa Dua also carries the concept of an environmentally friendly area. The Nusa Dua is covered with ± 30 ha green area (10% of the total area), spread throughout the area. The green area is planted with 6,080 trees, consisting of various types of plants, including 2,899 rare trees.

The Nusa Dua park development concept adopts the Balinese concept, namely Panca Warna, by planting trees dominated by dark colors in the north, white in the east, red in the south, and yellow in the west. The park also functions to conserve local flora, such as green pandanus, santen wood, camplung, bekul and juwet which are planted spread throughout the area.

To support these, comprehensive waste management is carried out. The daily waste production reaches ± 18 m³, some of which is processed into organic fertilizer. This organic fertilizer then uses effective

tersebut kemudian menggunakan teknologi effective microorganism, sehingga proses pembusukan dalam pembuatan pupuk dapat dipercepat.

Atas konsep wawasan lingkungan ini, pada 2004 lalu The Nusa Dua meraih sertifikasi Green Globe 21 Asia Pasific untuk kategori “Community Resort” yang dikeluarkan oleh Green Globe Foundation, sebuah lembaga dunia yang didukung PBB. The Nusa Dua merupakan kawasan pariwisata pertama di dunia yang memperoleh sertifikasi tersebut. The Nusa Dua juga menjadi destinasi pariwisata pertama di Indonesia yang meraih Sertifikat Peringkat Emas Nasional Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Indonesia atau Gold Indonesia Sustainable Tourism Certification (Gold ISTC). Penetapan diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Tourism Certification (ISTC) berdasarkan Sertifikat No. 01/LS-ISTC/IX/2019. Sertifikasi ini menggunakan standar United Nation World Tourism Organization (UNWTO) maupun Global Sustainable Tourism Council (GSTC). The Nusa Dua juga menerima Sertifikat ISO 14000:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dengan nomor SISINDOE11201917 dan Sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dengan nomor SISINDOQ11202074355 yang diberikan oleh SIS Certifications Pvt. Ltd. Sertifikat ini menunjukkan bahwa Sistem Pengolahan Air Limbah (Waste Water Treatment System) di The Nusa Dua telah terverifikasi sesuai dengan standar internasional untuk ISO 14001:2015 dan ISO 9001:2015.

Sebagai sebuah kompleks pariwisata terintegrasi, The Nusa Dua beserta seluruh tenant yang beroperasi di kawasan telah mengantongi sertifikat Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam mewujudkan green zone destination yaitu destinasi pariwisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi wisatawan di tengah pandemi COVID-19.

The Nusa Dua memiliki Renaissance Bali Nusa Dua Resort yang dapat menampung sekitar 21.000 delegasi. The Nusa Dua juga memiliki fasilitas akomodasi properti yang terdiri dari 18 hotel, satu unit condotel, tiga serviced apartment atau villa, pusat perbelanjaan, museum, tempat pertunjukan budaya, lapangan golf, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.

microorganism technology, to accelerate the decomposition process in making the fertilizer.

Based on this environmental insight concept, in 2004, The Nusa Dua received Green Globe 21 Asia Pacific certification for the “Community Resort” category issued by the Green Globe Foundation, a world institution supported by the UN. The Nusa Dua is the first tourism area in the world to obtain this certification. The Nusa Dua is also the first tourism destination in Indonesia to achieve the National Gold Rating Certificate for Indonesian Sustainable Tourism Destinations or Gold Indonesia Sustainable Tourism Certification (Gold ISTC). The acknowledgement was given by the Indonesia Sustainable Tourism Certification (ISTC) based on Certificate No. 01/LS-ISTC/IX/2019. This certification uses standards from the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) and Global Sustainable Tourism Council (GSTC). The Nusa Dua also received an ISO 14000:2015 Environmental Management System Certificate with number SISINDOE11201917 and an ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate with number SISINDOQ11202074355 awarded by SIS Certifications Pvt. Ltd. This certificate proves that the Waste Water Treatment System at The Nusa Dua has been verified in accordance with international standards for ISO 14001:2015 and ISO 9001:2015.

As an integrated tourism complex, The Nusa Dua and all operating tenants in the area have received a Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) certificate from the Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf), in line with the Company’s commitment in realizing a green zone destination namely a safe and comfortable tourism destination for tourists to visit amid the COVID-19 pandemic.

The Nusa Dua also has the Renaissance Bali Nusa Dua Resort which can accommodate around 21,000 delegates. The Nusa Dua also has property accommodation facilities consisting of 18 hotels, one condotel unit, three serviced apartments or villas, shopping centers, museums, cultural performance venues, golf courses, and various other supporting facilities.



The Mandalika

The Mandalika merupakan destinasi pariwisata yang dikembangkan Perusahaan menjadi satu dari 10 Bali Baru dan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), proyek strategis nasional. The Mandalika terletak di bagian selatan Pulau Lombok dengan garis pantai berpasir putih yang berkilau sepanjang 16 kilometer. Sejak awal, pembangunan Kawasan Pariwisata The Mandalika dirancang dengan tujuan ekowisata yang menggabungkan energi surya yang bersih, bangunan desalinasi air, dan menjaga lebih dari 51% resort sebagai ruang terbuka hijau.

Perusahaan mengembangkan konstruksi Kawasan The Mandalika dengan total luas 1.175 hektar. Infrastruktur yang dibangun oleh Perusahaan berupa infrastruktur dasar seperti reverse osmosis (untuk proses penyaringan air), sel surya, tempat pengolahan air bersih dan air limbah, serta fasilitas pendukung aksesibilitas seperti pelabuhan dan marina, sekolah pariwisata, tempat-tempat ibadah, perkantoran, jalan, jembatan, irigasi, listrik gas, serta fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Pada periode tahun 2011 hingga 2014, Perusahaan telah melakukan berbagai persiapan pengembangan kawasan seperti pembuatan Visioning Masterplan, Detail Masterplan, dokumen-dokumen lingkungan seperti AMDAL/RKL/UKL. Setelah AMDAL/RKL/UKL disahkan pada 2013, Perusahaan langsung memulai pembangunan fisik badan jalan sepanjang 4 kilometer di area pantai Tanjung Aan.

The Mandalika

The Mandalika is a tourist destination developed by the Company to become one of 10 New Bali and 5 Super Priority Tourism Destinations (DPSP), a national strategic project. The Mandalika is located in the southern part of Lombok Island with a 16-kilometer long of sparkling white sandy coastline. Since the beginning, the development of The Mandalika Tourism Area was designed with ecotourism objectives combining clean solar energy, water desalination buildings, and keeping more than 51% of the resort as green open space.

The Company is developing the construction of The Mandalika area with a total area of 1,175 hectares. The infrastructure built by the Company is in the form of basic infrastructure such as reverse osmosis (for water filtration process), solar cells, clean water and waste water treatment facilities, as well as supporting accessibility facilities such as ports and marinas, tourism schools, places of worship, offices, roads, bridges, irrigation, gas electricity, as well as communication and information technology facilities.

In the 2011-2014 period, the Company carried out various preparations for regional development such as designing a Visioning Masterplan, Detailed Masterplan, and environmental documents such as AMDAL/RKL/UKL. After the AMDAL/RKL/UKL was ratified in 2013, the Company immediately began the physical construction of a 4-kilometer long road in the Tanjung Aan beach area.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan kawasan The Mandalika sebagai 1 dari 10 destinasi wisata unggulan Indonesia. Pada Oktober 2017, secara resmi Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika.

Sesuai dengan visi Perusahaan, The Mandalika akan dipenuhi oleh hotel-hotel ternama berkapasitas besar. Keberadaan hotel berbintang 4 dan 5 di Kawasan The Mandalika nantinya akan membantu pertumbuhan bisnis MICE seiring pengembangan pusat konvensi pameran yang terpadu dengan sirkuit jalan raya yang diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan acara-acara besar, baik berskala domestik maupun internasional.

Selain itu, Perusahaan juga merancang pembangunan Theme Park dengan total luas 40,49 Ha yang menjadi daya tarik tersendiri dalam menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Lokasi Theme Park berada di Distrik Timur di area The Rainbow. Dengan pertimbangan sisi ekonomi, lahan tempat area yang direncanakan cukup strategis di pintu masuk Mandalika, maka Water Park diposisikan di area The Lagoon di distrik Barat. Sementara itu, Perusahaan juga melakukan pengembangan wisata berbasis alam di daerah Gerupuk di Mandalika yaitu The Mangrove Sanctuary of Gerupuk Beach atau The Sanctuary yang direkomendasikan agar Mangrove Ecopark ini juga memiliki fasilitas akomodasi yang dikemas menyatu dengan alam sekitarnya yang memiliki luas total 103,9 Ha.

Sebagai hasil dari percepatan pembangunan kawasan yang diemban Perusahaan sejak akhir 2015, berbagai perbaikan fisik telah dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan dan sustainability kawasan The Mandalika dan lingkungan sekitar, antara lain pembangunan fasilitas publik Masjid Nurul Bilad yang berkapasitas 4.000 jamaah, beautifikasi Kuta Beach Park berikut renovasi fasilitas penunjang area Kuta Beach Park dan Masjid Nurul Bilad berupa Sentral Parkir berkapasitas 900 kendaraan bermotor, penataan landscape dan pembersihan Area Bazaar Mandalika, peningkatan infrastruktur kawasan (rambu-rambu lalu lintas maupun signage) dan pemagaran perimeter Kawasan The Mandalika, serta peningkatan fasilitas Mandalika Dog Shelter.

Percepatan pembangunan The Mandalika kemudian dilakukan ITDC dengan membangun infrastruktur

President Joko Widodo's administration has designated The Mandalika area as 1 of Indonesia's 10 leading tourist destinations. In October 2017, President Joko Widodo officially inaugurated the operation of the Mandalika Tourism Special Economic Zone (KEK).

In accordance with the Company's vision, The Mandalika will have well-known large capacity hotels. The presence of 4 and 5 star hotels in The Mandalika area will help the growth of the MICE business along with the development of exhibition convention centers that are integrated with road circuits to encourage the holding of large events, both domestic and international.

In addition, the Company is also planning the construction of a Theme Park with a total area of 40.49 Ha as a special attraction in attracting local and foreign tourists.

The theme park is located in the East District in The Rainbow area. Considering the economic factor, the land for the planned area is quite strategic at the entrance to Mandalika, so the Water Park is positioned in The Lagoon area in the West district. Meanwhile, the Company is also developing nature-based tourism in the Gerupuk area in Mandalika, namely The Mangrove Sanctuary of Gerupuk Beach or The Sanctuary, which is recommended as accommodation facility for the Mangrove Ecopark with a total area of 103.9 Ha.

As a result of the accelerated development carried out by the Company since the end of 2015, various physical improvements have been carried out to increase tourist comfort and sustainability of The Mandalika area and the surrounding environment, including the construction of public facilities at the Nurul Bilad Mosque with a capacity for 4,000 people, the beautification of Kuta Beach Park along with renovations of supporting facilities for the Kuta Beach Park and Nurul Bilad Mosque areas include Central Parking with a capacity of 900 vehicles, landscaping and cleaning of the Mandalika Bazaar Area, improving area infrastructure (traffic signs and signage), and fencing the perimeter of The Mandalika Area, as well as improving Mandalika dog shelter facility.

The accelerated development in The Mandalika is carried out by the ITDC through the construction of



Mandalika International Street Circuit dan jalan akses ke area timur kawasan yaitu ke Pantai Gerupuk dan Tanjung Aan, juga pembangunan Hotel Pullman Lombok Mandalika Beach Resort sebagai akomodasi untuk mendukung penyelenggaraan event sport tourism internasional di The Mandalika.

Mandalika International Street Circuit infrastructure and access roads to the eastern area of the area, namely to Gerupuk Beach and Tanjung Aan, as well as building the Pullman Lombok Mandalika Beach Resort Hotel as accommodation to support the implementation of international sport tourism events at The Mandalika.

Tahun 2022 menjadi salah satu tonggak bersejarah bagi ITDC melalui penyelenggaraan MotoGP Official Test pada 11-13 Februari 2022, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 pada 18-20 Maret 2022 dan MOTUL FIM Superbike World k (WSBK) Pirelli Indonesian Round 2022 pada 11-13 November 2022. Sirkuit Mandalika memperkuat positioning The Mandalika sebagai destinasi pariwisata untuk menikmati berbagai kegiatan dan atraksi sportainment di Indonesia dan dunia.

The year 2022 was a historical milestone for ITDC by hosting the MotoGP Official Test on February 11-13, 2022, the 2022 Pertamina Grand Prix of Indonesia on March 18-20, and the MOTUL FIM Superbike World k (WSBK) Pirelli Indonesian Round 2022 on November 11-13. The Mandalika Circuit strengthens the positioning of The Mandalika as a tourism destination for various sports activities and attractions in Indonesia and the world.



The Golo Mori

ITDC kembali mendapat penugasan ketiga oleh Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 untuk pembangunan dan pengembangan kawasan The Golo Mori di Desa Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Terletak hanya 45 menit dari pusat kota Labuan Bajo, The Golo Mori menyuguhkan konsep kawasan yang benar-benar mengagumkan.

The Golo Mori

ITDC received third assignment from the Government through State Capital Participation (PMN) in 2023 for the construction and development of The Golo Mori area in Golo Mori Village, West Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT). Located only 45 minutes from the city center of Labuan Bajo, The Golo Mori offers a remarkable regional concept.

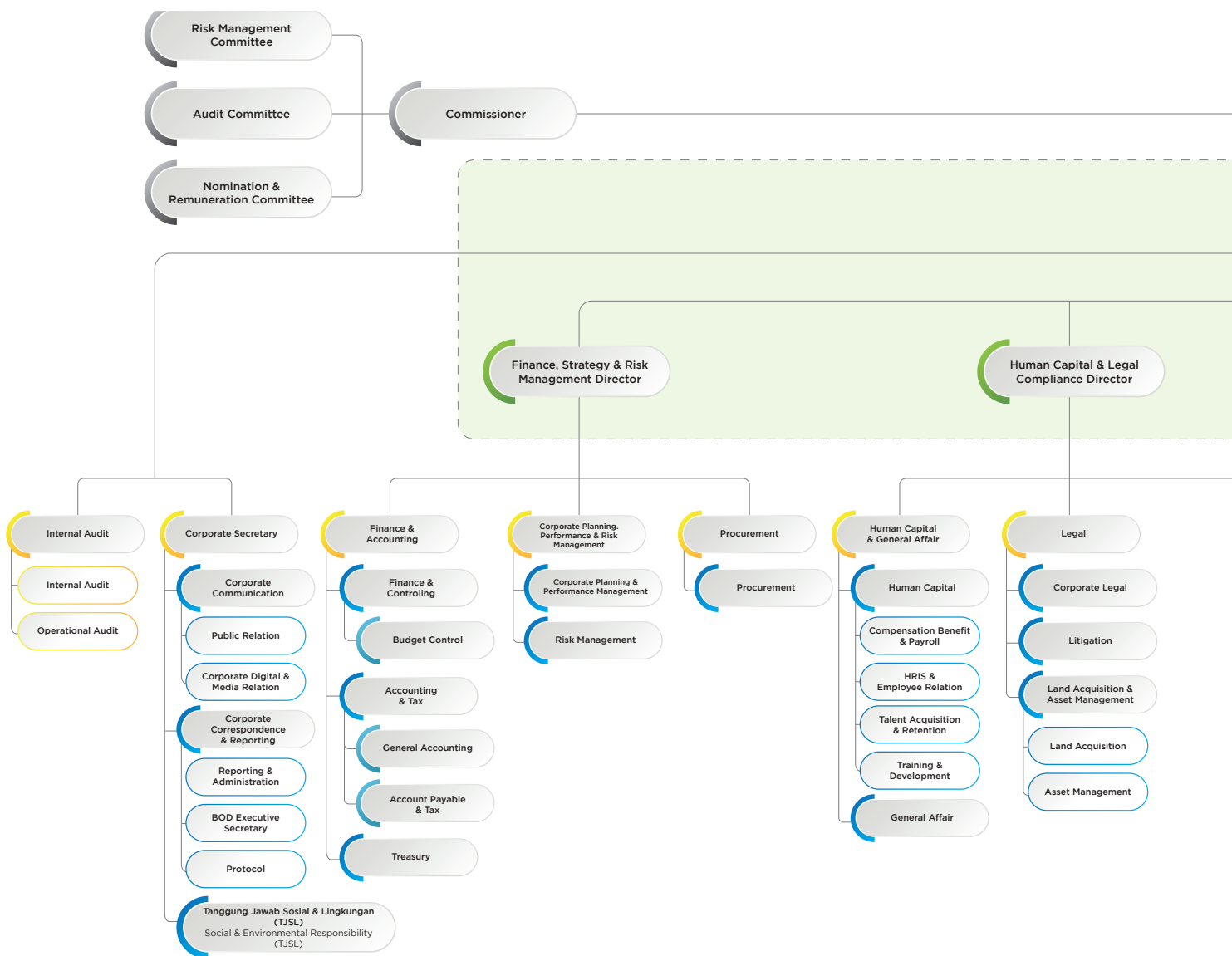
Destinasi pariwisata seluas 20 ha ini telah dilengkapi dengan Golo Mori Convention Center (GMCC), sebuah *convention center* kelas dunia yang memiliki pemandangan memukau yang menghadap langsung ke Pulau Rinca. GMCC juga telah digunakan sebagai venue rangkaian event KTT ASEAN. GMCC dilengkapi convention hall dengan kapasitas 400 pax, VVIP lobby 400 pax, VVIP lounge 29 pax, VIP room 12 pax, Media Center 50 pax, dan amphiteater dengan kapasitas 500 pax.

This 20-ha tourism destination is equipped with the Golo Mori Convention Center (GMCC), a world-class convention center with a stunning views overlooking Rinca Island. GMCC has also been used as a venue for a series of ASEAN Summit events. GMCC is equipped with a convention hall with a capacity of 400 pax, VVIP lobby 400 pax, VVIP lounge 29 pax, VIP room 12 pax, Media Center 50 pax, and an amphitheater with a capacity of 500 pax.

Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 038.1/SK/ITDC.01/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Struktur Organisasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang dapat dilihat sebagai berikut:

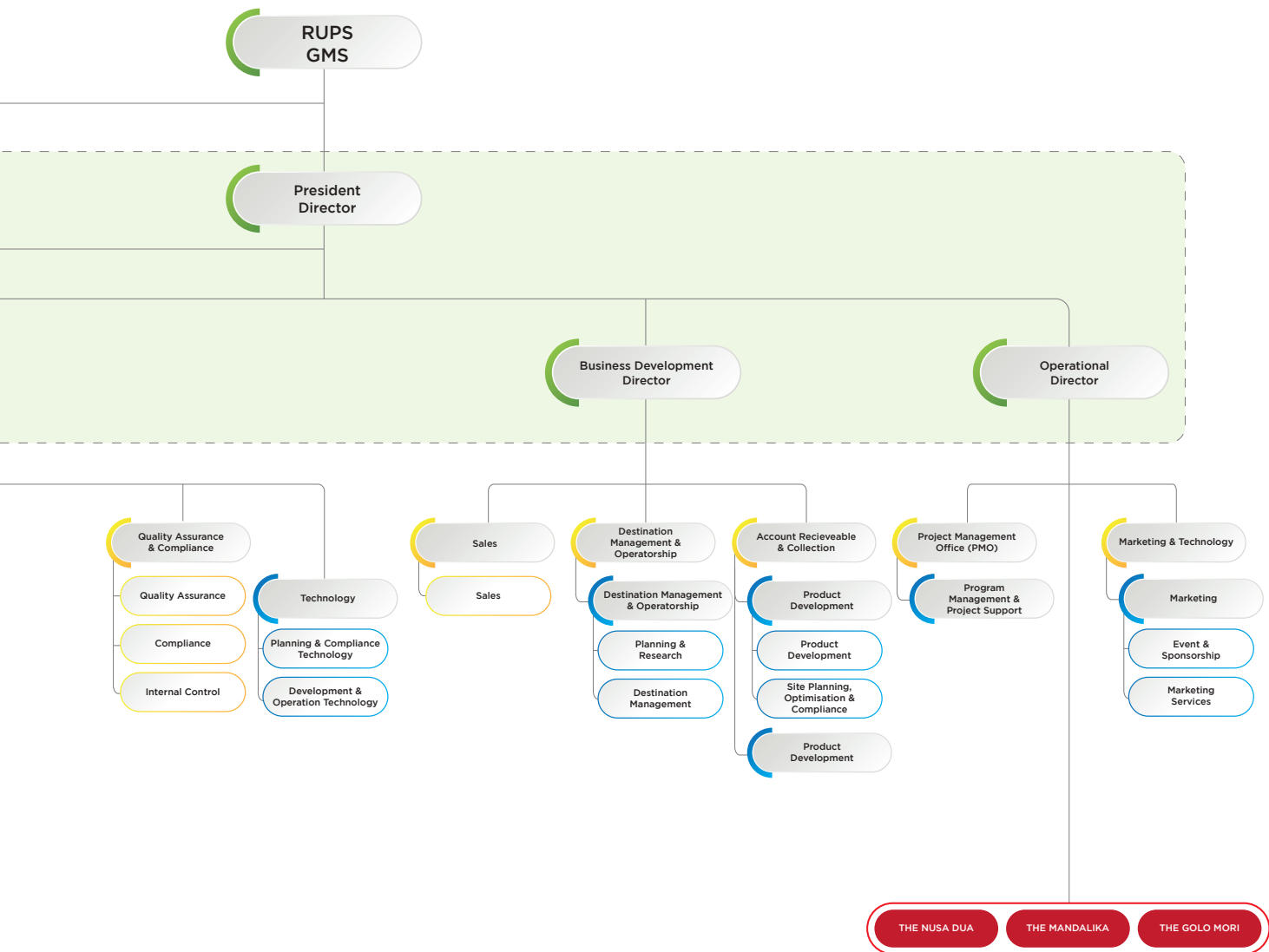


Keterangan Warna Color Note

● Commissioner
 ● Board of Directors
 ● Division Level
 ● Departement Level
 ● Unit Level
 ○ Functional Level
 ● SBU



The Company’s organizational structure has been ratified through Directors’ Decree No. 038.1/SK/ITDC.01/VII/2023 on July 31, 2023, concerning the Organizational Structure of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia which can be seen as follows:



Visi dan Misi Perusahaan

Vision and Mission of the Company



Menjadi pengembang destinasi wisata kelas dunia

Becoming a world-class tourism destination developer

VISI Vision



MISI Mission

- Mengembangkan destinasi wisata yang terpilih melalui kerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat.
- Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pengelolaan destinasi. Menjadikan brand equity Perusahaan sebagai indikator promosi destinasi pariwisata Indonesia melalui kerja sama dengan institusi internasional.
- Bersinergi dengan BUMN lain dalam pengembangan destinasi pariwisata.
- Developing selected tourism destinations in cooperation with the Government and the public.
- Developing quality human resources in destination management.
- Making the Company's brand equity as an icon of Indonesia's tourism destination promotion through cooperation with international institutions.
- Synergizing with other SOEs in the development of tourism destinations.



Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) ITDC menuntut agar seluruh Insan Perusahaan selalu menerapkan nilai-nilai inti perusahaan demi mewujudkan visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan mampu memimpin operasional Perusahaan berjalan optimal dan terarah ke depannya. Nilai-nilai inti Perusahaan diuraikan sebagai berikut:

The Human Resource (HR) management of the Company urges all ITDC personnel to always apply the core values in order to realize the vision and mission. Therefore, they are expected to be able to lead The Company's operations to run optimally in the future. The description of the Company's core values is as follows:



Fokus Pelanggan | Customer Focus

Memberikan pelayanan yang terbaik dan melebihi harapan pelanggan serta memberikan nilai tambah kepada pelanggan dari dalam maupun luar negeri.

Providing the best service and exceeding customer expectations as well as providing added value to customers both domestic or foreigners.



Inovasi | Innovation

Membuat kesempurnaan berkelanjutan dengan menciptakan produk terobosan baru dan layanan untuk menyesuaikan tuntutan bisnis yang dinamis serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

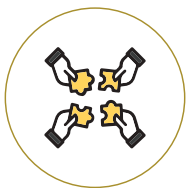
Implementing continuous perfection by creating new breakthroughs in products and services to match dynamic business demands and provide added value to the Company.



Profesionalisme | Professionalism

Bertanggung jawab untuk melakukan tugas dengan kompetisi terbaik dan komitmen yang tinggi guna mencapai tujuan Perusahaan.

Responsible for carrying out tasks with the best competition and high commitment to achieve the Company goals.



Kerja Tim | Team Work

Kerja sama sinergis dengan antusiasme yang dapat dipercaya, saling menghormati dan membantu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Synergistic cooperation with great enthusiasm that can be trusted, mutual respect, and help to achieve the determined goals.



Integritas | Integrity

Perilaku jujur, memenuhi komitmen dan bertindak dengan norma, kebijakan dan kode etik Perusahaan.

Behave honestly, fulfill commitments, and act in accordance with Company norms, policies, and code of conduct.

Penjelasan Visi dan Misi Perusahaan

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan, penjelasan terkait Visi dan Misi ITDC adalah sebagai berikut:

- Visi merupakan gambaran masa depan perusahaan, menentukan visi berarti menentukan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai (*desired end state*) oleh suatu perusahaan. Visi ITDC yaitu menjadi pengembang destinasi pariwisata kelas dunia, yang berarti dalam 5 tahun ke depan ITDC akan bertransformasi menjadi pengembang destinasi Kawasan pariwisata di Indonesia yang memiliki standar internasional.
- Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usaha mewujudkan Visi tersebut. Misi perusahaan diartikan sebagai tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu dibuat. Misi yang akan dikembangkan menggambarkan kenapa ITDC ada (*"why we exist"*).

Visi dan Misi ITDC didukung oleh 4 pilar bisnis utama yaitu sewa lahan (*landlord*), investor asset produktif di Kawasan pariwisata, developer dan utilities provider, dan manajemen destinasi pariwisata.

Review Visi dan Misi oleh Manajemen Kunci

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengkaji kembali Visi dan Misi Perusahaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi, khususnya terkait arah pengembangan Perusahaan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 Januari 2023.

Explanation of the Company's Vision and Mission

As stated in the Company's Long-Term Plan document, the explanation of ITDC's Vision and Mission is as follows:

- Vision is a picture of the company's future, determining the vision means determining the goals and ideals to be achieved (*desired end state*) by a company. ITDC's vision is to become a world-class tourism destination developer, which means that in the next 5 years ITDC will transform into a tourism destination developer in Indonesia that has international standards.
- Mission is a statement of what the company must do in order to realize the Vision. The company's mission is defined as the purpose and reason why the company was created. The mission to be developed describes why ITDC exists (*"why we exist"*).

ITDC's Vision and Mission are supported by 4 main business pillars: landlord, productive asset investor in tourism areas, developer and utilities provider, and tourism destination management.

Review of Vision and Mission by Key Management

The Board of Commissioners and the Board of Directors periodically reviewed the Company's vision and mission, especially on the Company's development plan through the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP) which was signed by the Board of Commissioners and Directors on January 30, 2023.



Nilai-Nilai Perusahaan

Company Values

Amanah

1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.



Trustworthy

1. Fulfilling promises and commitment.
2. Responsible for tasks, decisions, and actions taken.
3. Firmly uphold moral and ethical values.

Kompeten

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.



Competent

1. Increasing self-competency to respond to ever-changing challenges.
2. Helping others to learn.
3. Completing tasks with highest quality.

Harmonis

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.



Harmonious

1. Respect everyone regardless of their background.
2. Concerned with helping others.
3. Build a conducive work environment.

Loyal

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

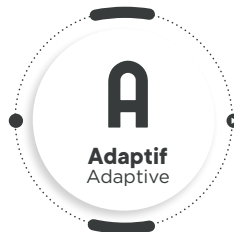


Loyal

1. Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State.
2. Willing to make sacrifices to achieve greater goals.
3. Obey the leadership as long as it does not conflict with law and ethics.

Adaptif

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bertindak proaktif.



Adaptive

1. Quickly adjust to get better.
2. Constantly make improvements to keep up with technological developments.
3. Act proactively.

Kolaboratif

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



Collaborative

1. Provide opportunities for various parties to contribute.
2. Open-minded in team work to produce added value.
3. Mobilize the use of various resources for common goals.

Makna Logo Perusahaan

Corporate Logo Definition

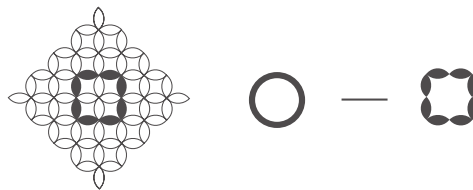


InJourney dalam logo perusahaan terdiri atas "IN" yang merepresentasikan Indonesia, sekaligus bermakna "*inbound*" sebagai harapan perusahaan agar para turis datang dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata pilihan.

InJourney memiliki arti "*in a journey*" dan "*Indonesian journey*" sebagai gambaran pengalaman perjalanan khas Indonesia. Lebih jauh lagi, "InJourney" merupakan gambaran dari seluruh layanan perusahaan yang mencakup transportasi, hotel, pariwisata, dan souvenir. Penamaan InJourney pada logo perusahaan juga bertujuan untuk memberikan kesan modern, global, dan dapat menangkap esensi pengalaman perjalanan *customer*.

InJourney in the company logo consists of "IN" which represents Indonesia, as well as meaning "inbound" as the Company's expectations that the tourists will come and make Indonesia as the preferred tourism destination.

InJourney means "in a journey" and "Indonesian journey" as a description of a typical Indonesian travel experience. Furthermore, "InJourney" is an overview of all the Company's services which include transportation, hotels, tourism, and souvenirs. The naming of InJourney on the company logo also aims to give a modern, global impression, and can capture the essence of the customer's travel experience.



Merah dan Jingga Red and Orange

Layanan berkualitas serta menjanjikan pengalaman yang hangat dan menyenangkan

Quality service and promises a warm and pleasant experience

Elemen grafis yang digunakan dalam "InJourney" pada huruf "O" terinspirasi dari pola batik kawung yang bermakna kesempurnaan dan merupakan representasi misi InJourney untuk memberikan pengalaman wisata di Indonesia yang sempurna. Pola berantai yang infinite atau tak terhingga di logo ini juga memiliki makna saling berkesinambungan, *seamless*, dan *unified* sebagai representasi dari penyatuan tujuh institusi BUMN dalam InJourney untuk mengembangkan pariwisata Indonesia.

The graphic elements used in "InJourney" on the letter "O" are inspired by the kawung batik pattern which means perfection and is a representation of InJourney's mission to provide the perfect travel experience in Indonesia. The infinite chain pattern in the logo has the meaning of being mutually sustainable, seamless, and unified as a representation of the unification of seven SOE institutions in InJourney to develop Indonesian tourism.



Biru dan Hijau Blue and Green

Wujud agar InJourney terus bertumbuh dan dapat memberikan rasa nyaman bagi pelanggan

InJourney continues to grow and can provide a sense of comfort for customers

Terdapat empat sisi yang diberikan warna berbeda dalam logo "InJourney". Spektrum warna hangat merah dan jingga merepresentasikan layanan berkualitas serta menjanjikan pengalaman yang hangat dan menyenangkan. Warna biru dan hijau merupakan wujud agar InJourney terus bertumbuh dan dapat memberikan rasa nyaman bagi pelanggan. Keempat warna tersebut dipilih terinspirasi dari keindahan alam Indonesia dan sebagai cerminan Indonesia sebagai negara yang penuh keragaman baik dari segi alam dan budaya.

There are four sides with different colors in the "InJourney" logo. The warm color spectrum of red and orange represents quality service and promises a warm and pleasant experience. The blue and green colors are a manifestation so that InJourney continues to grow and can provide a sense of comfort for customers. The four colors were chosen to be inspired by the natural beauty of Indonesia and as a reflection of Indonesia as a country full of diversity both in terms of nature and culture.



Keanggotaan dalam Asosiasi

Membership in the Association

ITDC terus memperluas jaringan bisnis dan menjalin komunikasi yang lebih luas dengan berpartisipasi secara aktif sebagai anggota asosiasi dan organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas Perusahaan di industri pengembangan pariwisata di Indonesia. Keanggotaan dalam asosiasi dan organisasi ini juga menjadi bagian dari upaya pelibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan Perusahaan. Berikut disampaikan daftar keanggotaan Perusahaan dalam asosiasi dan organisasi sepanjang tahun 2023.

ITDC continues to expand its business network and establish wider communications by actively participating as a member of associations and organizations which are expected to increase the Company's credibility in the tourism development industry in Indonesia. Membership in these associations and organizations is also part of efforts to involve stakeholders in the business activities carried out by the Company. The following is a list of the Company's membership in associations and organizations throughout 2023.

Nama Organisasi/Asosiasi Name of Organization/Association	Ruang Lingkup Coverage	Posisi Keanggotaan Membership Position
Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Nasional / BUMN National / SOE	Anggota Member

Profil Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Profile



① **Ricky Joseph Pesik**
Komisaris Utama
President Commissioner

② **Ir. Zainal Mutaqin, MM**
Komisaris
Commissioner



③ H. Irzani, M.Pd, M.Si
Komisaris
Commissioner

④ Ulin Ni'am Yusron
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Ricky Joseph Pesik

Komisaris Utama
President Commissioner

Periode Jabatan: 13 November 2020–RUPS tahun 2025 (Periode Pertama)

Term of Office: President Commissioner November 13, 2020–2025 GMS (First Period)

WNI | Indonesian

Usia: 57 tahun per 2023

Age: 57 years old per 2023

Tanggal Lahir: Bandung, 19 September 1966

Date of Birth: Bandung, September 19, 1966

Domisili: DKI Jakarta, Indonesia

Domicile: DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Penunjukan

SK Menteri Negara BUMN selaku RUPS No. SK-364/MBU/11/2020

Riwayat Pendidikan

Diploma Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung (1986-1989)

Sertifikasi yang Dimiliki

-

Pengalaman Kerja

Ricky Joseph Pesik merupakan praktisi periklanan dan memiliki pengalaman panjang dalam industri komunikasi dan konten. Dalam kurun waktu 2002–2015, perusahaan yang dipimpinnya di bidang periklanan, meraih puluhan kali penghargaan Citra Pariwara. Secara individu, dalam kapasitasnya sebagai Copywriter, Creative Director, maupun sebagai Strategic Planner, ia meraih penghargaan sebagai Penulis Naskah Iklan Terbaik pada Citra Pariwara (2002) dan Penulis Iklan Televisi Favorit Pemirsa dari SCTV (2003). Dalam skala internasional Ricky Joseph Pesik dipercaya sebagai Vice-Chairman/Conference Experience Director Asia Pacific Media Forum (2014), menjadi juri Spikes Asia di Singapura (2010 dan 2014) dan juri Cannes Lions International Advertising Festival di Cannes, Perancis (2012). Selanjutnya, dipercaya menjabat Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif pada 27 Juli 2015–25 Oktober 2019, sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap Pengawas Independen Perusahaan Umum Produksi Film Negara atau Perum PFN.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun instansi lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ITDC

Tidak memiliki saham ITDC.

Legal Basis of Appointment

Decree of the Minister of State for SOEs as GMS No. SK-364/MBU/11/2020

Education Background

Diploma in Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Bandung Institute of Technology (1986-1989)

Certification

-

Work Experience

Ricky Joseph Pesik is an advertising practitioner with various experiences in the communications and content industry. In the period 2002–2015, the company he led in the advertising sector won dozens of Citra Pariwara awards. Individually, in his capacity as a Copywriter, Creative Director, and as a Strategic Planner, he was awarded with the Best Advertising Script Writer for Citra Pariwara (2002) and Viewers' Favorite Television Commercial Writer from SCTV (2003). On an international scale, Ricky Joseph Pesik was trusted as Vice-Chairman/Conference Experience Director of the Asia Pacific Media Forum (2014), became a judge for Spikes Asia in Singapore (2010 and 2014), and a judge for the Cannes Lions International Advertising Festival in Cannes, France (2012). Furthermore, he was trusted to serve as Deputy Head of the Creative Economy Agency from July 27, 2015–October 25, 2019, as Chairman of the Supervisory Board and concurrently Independent Supervisor of the State Film Production Public Company or Perum PFN.

Concurrent Position

Does not have concurrent positions in other companies or agencies.

Affiliation

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.

ITDC Shares Ownership

Has no shares in ITDC.



H. Irzani, M.Pd, M.Si

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan: 14 Februari 2020–RUPS Tahun 2025 (Periode Pertama)
Term of Office: February 14, 2020–2025 GMS (First Period)

WNI | Indonesian

Usia: 47 tahun per 2023
Age: 47 years old per 2023

Tanggal Lahir: Suralaga, 18 Juli 1976
Date of Birth: Suralaga, July 18, 1976

Domisili: Mataram, Nusa Tenggara Barat
Domicile: Mataram, West Nusa Tenggara



Dasar Penunjukan

SK Menteri Negara BUMN selaku RUPS No. SK-49/MBU/02/2020

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Pendidikan Matematika dari STKIP Hamzanwadi Pancor (1999)
- Magister Matematika Konsentrasi Statistik dari Universitas Gadjah Mada (2004)
- Magister Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (2010)

Sertifikasi yang Dimiliki

-

Pengalaman Kerja

Karirnya dimulai pada tahun 1996 sebagai Guru/Wakil Kesiswaan pada MA NW Pancor hingga tahun 2001. Ia juga bekerja bersama institusi Internasional yaitu University Network for Free and Fair Election (UNFREL) sebagai Presidium NTB (1998-2001) dan di United Nation Development Programme (UNDP) Partnership sebagai Local Expert (2002-2004). Ia kemudian menjadi Dosen di STKIP Hamzanwadi Selong (2004-2010) sekaligus menjadi Dosen di IKIP Mataram (2007-2013) dan Dosen di UIN Mataram (2004-2018). Dia sempat bertugas menjadi Sekretaris Dewan Riset Daerah NTB (2012-2017), Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon (PWNW) NTB (2012-sekarang) dan Wakil Sekretaris MUI NTB (2012-2017). Ia juga dipercaya sebagai Ketua Tim Penyelaras Kebijakan Gubernur NTB (2013-sekarang) dan Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Muslimat Nahdlatul Wathon (NW) NTB (2017) serta sebagai Dewan Pakar KNPI NTB (2017-sekarang).

Rangkap Jabatan

Dewan Pakar KNPI NTB

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ITDC

Tidak memiliki saham ITDC.

Legal Basis of Appointment

Decree of the Minister of State for SOEs as GMS No. SK-49/MBU/02/2020

Education Background

- Bachelor of Mathematics Education from STKIP Hamzanwadi Pancor (1999)
- Master of Mathematics Concentration in Statistics from Gadjah Mada University (2004)
- Master of Education Management from Yogyakarta State University (2010)

Certification

-

Work Experience

His career began in 1996 as a Teacher/Student Representative at MA NW Pancor until 2001. He also worked with international institutions, namely the University Network for Free and Fair Election (UNFREL) as NTB Presidium (1998-2001) and at the United Nation Development Program (UNDP) as Local Expert (2002-2004). He then became a lecturer at STKIP Hamzanwadi Selong (2004-2010) as well as a lecturer at IKIP Mataram (2007-2013) and a lecturer at UIN Mataram (2004-2018). He served as Secretary of the NTB Regional Research Council (2012-2017), General Secretary of the NTB Nahdlatul Wathon (PWNW) Regional Management (2012-present) and Deputy Secretary of the NTB MUI (2012-2017). He is also trusted as Chair of the NTB Governor's Policy Alignment Team (2013-present) and General Chair of the NTB Muslimat Nahdlatul Wathon (NW) Education Development Foundation (2017) as well as on the NTB KNPI Expert Council (2017-present).

Concurrent Position

KNPI NTB Expert Council

Affiliation

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.

ITDC Shares Ownership

Has no shares in ITDC.



Ir. Zainal Mutaqin, MM

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan: 9 Januari 2020–RUPS Tahun 2025 (Periode Pertama)
Term of Office: January 9, 2020–2025 GMS (First Period)

WNI | Indonesian

Usia: 62 tahun per 2023
Age: 62 years old per 2023

Tanggal Lahir: Tasikmalaya, 21 April 1961
Date of Birth: Tasikmalaya, April 21, 1961

Domisili: Depok, Jawa Barat, Indonesia
Domicile: Depok, West Java, Indonesia

Dasar Penunjukan

SK Menteri Negara BUMN selaku RUPS No. SK-18/MBU/01/2020

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Tekstil dari Institut Tekstil Bandung (1986)
- Magister bidang Pemasaran dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) IPWI Jakarta (1998)

Sertifikasi yang Dimiliki

Qualified Risk Governance Professional (2023)

Pengalaman Kerja

Ia memiliki karir panjang di BKPM, sejak menjabat sebagai Kasubag Pengawasan pada 1992 dan berbagai posisi Kepala Sub-Bagian, termasuk Kasubag Promosi Dalam Negeri (1996-1999), Promosi Luar Negeri (1999-2001), Penilaian Aplikasi (2002-2003), Aneka Industri (2004-2006), dan Promosi Kawasan Barat (2006-2008). Selanjutnya ia diangkat menjadi Kepala Bagian Penyusunan Program pada 2009-2012, Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran (2012-2018), dan Kepala Biro Umum (2018-2019), sebelum dipercaya menjadi Direktur Perencanaan Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya BKPM sejak 2019.

Rangkap Jabatan

Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya, BKPM Eselon II.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ITDC

Tidak memiliki saham ITDC.

Legal Basis of Appointment

Decree of the Minister of State for SOEs as GMS No. SK-18/MBU/01/2020

Education Background

- Bachelor of Textile Engineering from the Bandung Textile Institute (1986)
- Masters in Marketing from the IPWI Jakarta College of Economics (STIE) (1998)

Certification

Qualified Risk Governance Professional (2023)

Work Experience

He started his career at BKPM, since becoming the Head of Supervision Subdivision in 1992 and various Sub-Section Head positions, including Head of Domestic Promotion Subdivision (1996-1999), Overseas Promotion (1999-2001), Application Assessment (2002-2003), Various Industries (2004-2006), and Promotion of the Western Region (2006-2008). Furthermore, he was appointed as Head of the Program Preparation Section in 2009-2012, Head of the Program Planning and Budget Bureau (2012-2018), and Head of the General Bureau (2018-2019), before being trusted to become Director of Agribusiness and Other Natural Resources Planning at BKPM since 2019.

Concurrent Position

Director of Agribusiness and Other Natural Resources Planning at BKPM, Echelon II.

Affiliation

Has no affiliation with other member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.

ITDC Shares Ownership

Has no shares in ITDC.



Ulin Ni'am Yusron

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Jabatan: 28 Oktober 2020–RUPS Tahun 2025 (Periode Pertama)
Term of Office: October 28, 2020-2025 GMS (First Period)

WNI | Indonesian

Usia: 48 tahun per 2023
Age: 48 years old per 2023

Tanggal Lahir: Gresik, 19 Juni 1975
Date of Birth: Gresik, June 19, 1975

Domisili: Tangerang Selatan, Indonesia
Domicile: South Tangerang, Indonesia



Dasar Penunjukan

SK Menteri Negara BUMN selaku RUPS No. SK-319/MBU/10/2020

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (2000)
- Pascasarjana Penciptaan Seni dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ) (2021)

Sertifikasi yang Dimiliki

-

Pengalaman Kerja

Ia memulai karir sebagai wartawan di Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN (sampai tahun 2008), kemudian mendirikan situs Beritasatu.com (sampai 2013). Ia juga sempat menggeluti dunia private investigation dan menjadi konsultan beberapa media online (2009-2013). Ia pernah menulis beberapa buku dan masih aktif menulis di beberapa media mengenai topik politik, media sosial dan dunia seni. Ia kini aktif menjadi penggiat media sosial dan vlogger dengan nama vlog #Jalania-Jalan-jalan Ceria di kanal Youtube.

Rangkap Jabatan

Aktif menjadi penggiat media sosial dan vlogger #Jalania - Jalan-jalan Ceria di kanal Youtube dan aktif di jejaring media sosial.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ITDC

Tidak memiliki saham ITDC.

Legal Basis of Appointment

Decree of the Minister of State for SOEs as GMS No. SK-319/MBU/10/2020

Education Background

- Bachelor of Agriculture from the Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) Surakarta (2000)
- Postgraduate of Art Creation from the Jakarta Arts Institute (IKJ) (2021)

Certification

-

Work Experience

He began his career as a journalist at KONTAN Economic and Business News (until 2008), then founded the Beritasatu.com (until 2013). He also worked in the private investigation business and became a consultant for several online media (2009-2013). He has written several books and is still active in writing in several media on political, social media, and art topics. He is now active as a social media activist and vlogger with the vlog name #Jalania-Jalan-jalan Ceria on the YouTube channel.

Concurrent Position

A social media activist and vlogger #Jalania - Jalan-Jalan Ceria on the YouTube channel and active on social media networks.

Affiliation

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.

ITDC Shares Ownership

Has no shares in ITDC.

Profil Direksi

The Board of Directors' Profile



1 Ari Respati
Direktur Utama
President Director

2 Ahmad Fajar
Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Strategy, and Risk Management



③ **Wenda Ramadya Nabiel**
Direktur SDM dan Legal Compliance
Director of HR and Legal Compliance

④ **Ema Widiastuti**
Direktur Pengembangan Bisnis
Director of Business Development

⑤ **Troy Reza Warokka**
Direktur Operasi
Director of Operations



Ari Respati

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan: 8 Agustus 2022-RUPS Tahun 2027 (Periode Pertama)
Term of Office: August 8, 2022-2027 GMS (First Period)

WNI | Indonesian

Usia: 49 tahun per 2023
Age: 49 years old per 2023

Tanggal Lahir: Jakarta, 8 November 1974
Date of Birth: Jakarta, November 8, 1974

Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Penunjukan

SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-169/MBU/08/2022

Riwayat Pendidikan

- Bachelor of Science - Architecture & Construction Science at University of Oklahoma (1998)
- Master of Science - Property Management at Arizona State University (2000)

Sertifikasi yang Dimiliki

-

Pengalaman Kerja

Ia memulai karirnya sebagai Project Officer di sebuah perusahaan konstruksi di Amerika Serikat kemudian berlanjut sebagai Pengembang Bisnis di banyak proyek. Karir profesionalnya di bidang operasional hotel dimulai dari Sales Manager hingga General Manager di Hilton International, Santika Group, dan Holiday Inn di bawah InterContinental Hotels Group (IHG). Pada tahun 2015, Ari Respati memulai perjalanannya dalam berwirausaha dan memiliki hotel butik perkotaan YATS Colony yang terkenal di Yogyakarta. Ia merupakan pendiri perusahaan Konsultasi dan Manajemen Perhotelan bernama AR Hospitality (ARH), yang telah berkontribusi bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan di Indonesia.

Rangkap Jabatan

CEO - AR Hospitality/ARH (PT Griyats Andum Naritia)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ITDC

Tidak memiliki saham ITDC.

Legal Basis of Appointment

Decree of the SOEs Minister as GMS No. SK-169/MBU/08/2022

Education Background

- Bachelor of Science - Architecture & Construction Science at University of Oklahoma (1998)
- Master of Science - Property Management at Arizona State University (2000)

Certification

-

Work Experience

He began his career as a Project Officer at a construction company in the United States and then continued as a Business Developer on many projects. His professional career in hotel operations started from Sales Manager to General Manager at Hilton International, Santika Group, and Holiday Inn under the InterContinental Hotels Group (IHG). In 2015, Ari Respati began his entrepreneurial journey and owned the famous urban boutique hotel YATS Colony in Yogyakarta. He is the founder of a Hospitality Consulting and Management company called AR Hospitality (ARH), which has contributed to the growth of the tourism and hospitality sector in Indonesia.

Concurrent Position

CEO - AR Hospitality/ARH (PT Griyats Andum Naritia)

Affiliation

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.

ITDC Shares Ownership

Has no shares in ITDC.



Ahmad Fajar

Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Strategy, and Risk Management

Periode Jabatan: 8 Agustus 2022–RUPS Tahun 2027 (Periode Pertama)
Term of Office: August 8, 2022–2027 GMS (First Period)

WNI | Indonesian

Usia: 56 tahun per 2023
Age: 56 years old per 2023

Tanggal Lahir: Solo, 22 Januari 1966
Date of Birth: Solo, January 22, 1966

Domisili: Tangerang Selatan, Indonesia
Domicile: South Tangerang, Indonesia



Dasar Penunjukan

SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-169/MBU/08/2022

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Pertanian – Agribisnis di Institut Pertanian Bogor (1988)
- Magister Manajemen – Manajemen Keuangan di Universitas Padjadjaran (2000)

Sertifikasi yang Dimiliki

-

Pengalaman Kerja

Karir profesionalnya diawali dengan menjadi Manager Foreign Exchange Trader di Bank Bumi Daya (1992-1998), selanjutnya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Funding Manager (1998-2000), Senior Manager Head of Portfolio Investment (2000-2003), sampai menjadi Vice President Head of Debt & Capital Market (2004-2008). Ia kemudian mendapat penugasan dari Bank Mandiri sebagai Direktur di Bank Century (yang menjadi Bank Mutiara) dan selanjutnya sebagai Managing Director di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2008-2013). Karir berlanjut di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagai President Director (2014-2016) dan Komisaris (2017-2018). Ia kemudian menjadi Senior Advisor di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) (2017-2018) dan terakhir menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Victoria International Tbk (2018-2022).

Rangkap Jabatan

- Komisaris Utama PT ITDC Nusantara Properti (“INP”)
- Komisaris PT Bali Griya Santhi (Mercure Nusa Dua)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ITDC

Tidak memiliki saham ITDC.

Legal Basis of Appointment

Decree of the SOEs Minister as GMS No. SK-169/MBU/08/2022

Education Background

- Bachelor of Agriculture – Agribusiness at Bogor Agricultural Institute (1988)
- Master of Management – Financial Management at Padjadjaran University (2000)

Certification

-

Work Experience

His professional career began as a Foreign Exchange Trader Manager at Bank Bumi Daya (1992-1998), then at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Funding Manager (1998-2000), Senior Manager Head of Portfolio Investment (2000-2003), and became Vice President Head of Debt & Capital Market (2004-2008). He then received an assignment from Bank Mandiri as Director at Century Bank (which became Bank Mutiara) and then as Managing Director at PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2008-2013). His career continued at PT Bank JTrust Indonesia Tbk as President Director (2014-2016) and Commissioner (2017-2018). He then became a Senior Advisor at the Indonesian Banking Development Institute (LPPI) (2017-2018) and most recently served as President Director of PT Bank Victoria International Tbk (2018-2022).

Concurrent Position

- President Commissioner of PT ITDC Nusantara Properti (“INP”)
- Commissioner of PT Bali Griya Santhi (Mercure Nusa Dua)

Affiliation

Has no affiliation with other members, members of the Board of Commissioners, or the Main and Controlling Shareholders.

ITDC Shares Ownership

Has no shares in ITDC.



Wenda Ramadya Nabel

Direktur SDM dan Legal Compliance
Director of HR and Legal Compliance

Periode Jabatan: 8 Agustus 2022–RUPS Tahun 2027 (Periode Pertama)
Term of Office: August 8, 2022-2027 GMS (First Period)

WNI | Indonesian

Usia: 49 tahun per 2023
Age: 49 years old per 2023

Tanggal Lahir: Gerong, 5 Oktober 1974
Date of Birth: Gerong, October 5, 1974

Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Penunjukan

SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-169/MBU/08/2022

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Manajemen di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (1996)
- Master of Science – Human Resource Management at University of East London (1999)

Sertifikasi yang Dimiliki

-

Pengalaman Kerja

Ia memulai karirnya sebagai HRD Coordinator di Toys R Us (2000-2002), HR Project Specialist di Thiess (2003-2004), Assistant Vice President Employee and Industrial Relations di HSBC (2004-2012), sebelum menjadi VP Employee & Industrial Relations Partner di Manulife (2012-2016) dan sempat menjadi pejabat caretaker Chief of Human Resources Officer di Manulife (2014-2015). Setelahnya, ia menjadi SVP and Head Human Capital Business Partner di Bank Muamalat Indonesia Tbk (2016-2018) dan Executive Director di Muamalat Institute (2018-2019). Sebelum bergabung di ITDC, ia menjabat sebagai Head of Human Resources di Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) (2020-2022).

Rangkap Jabatan

Komisaris PT ITDC Nusantara Properti ("INP")

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ITDC

Tidak memiliki saham ITDC.

Legal Basis of Appointment

Decree of the SOEs Minister as GMS No. SK-169/MBU/08/2022

Education Background

- Bachelor of Management at the Indonesian Community Development University (1996)
- Master of Science – Human Resource Management at University of East London (1999)

Certification

-

Work Experience

He started his career as HR Coordinator at Toys R Us (2000-2002), HR Project Specialist at Thiess (2003-2004), Assistant Vice President Employee and Industrial Relations at HSBC (2004-2012), before becoming VP Employee & Industrial Relations Partner at Manulife (2012-2016) and served as caretaker Chief of Human Resources Officer at Manulife (2014-2015). He became SVP and Head Human Capital Business Partner at Bank Muamalat Indonesia Tbk (2016-2018) and Executive Director at the Muamalat Institute (2018-2019). Before joining ITDC, he served as Head of Human Resources at Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) (2020-2022).

Concurrent Position

Commissioner at PT ITDC Nusantara Properti ("INP")

Affiliation

Has no affiliation with other members, members of the Board of Commissioners, or the Main and Controlling Shareholders.

ITDC Shares Ownership

Has no shares in ITDC.



Ema Widiastuti

Direktur Pengembangan Bisnis
Director of Business Development

Periode Jabatan: 13 November 2020–RUPS Tahun 2025 (Periode Pertama)
Term of Office: November 13, 2020-2025 GMS (First Period)

WNI | Indonesian

Usia: 51 tahun per 2023
Age: 51 years old per 2023

Tanggal Lahir: Yogyakarta, 3 Oktober 1972
Date of Birth: Yogyakarta, October 3, 1972

Domisili: DKI Jakarta, Indonesia
Domicile: DKI Jakarta, Indonesia



Dasar Penunjukan

SK Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-363/MBU/11/2020

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi – Marketing & Management di Universitas Gadjah Mada (1996)
- Master of Arts in Economic – University at Albany (2002)
- PhD Candidate in Strategic Management – University at Albany (2007)

Sertifikasi yang Dimiliki

-

Pengalaman Kerja

Ia memulai karirnya sebagai Operation Analyst and Director of Sales and Marketing di Hyatt Regency Yogyakarta (2011-2015), lalu CEO pada PT Gantari Pramana Perspektif (GP Perspektif) (2015-2019). Bergabung dengan ITDC pada 2019 sebagai Kepala Divisi Pengembangan/Business Development Head, sebelum penunjukan sebagai Direktur Pengembangan ITDC.

Rangkap Jabatan

- Komisaris PT ITDC Nusantara Utilitas
- Komisaris PT Peninsula Bali Resort (Courtyard Nusa Dua)
- Komisaris Utama PT Merese Mandalika Nusantara

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ITDC

Tidak memiliki saham ITDC.

Legal Basis of Appointment

Decree of the SOEs Minister as GMS No. SK-363/MBU/11/2020

Education Background

- Bachelor of Economics – Marketing & Management at Gadjah Mada University (1996)
- Master of Arts in Economics – University at Albany (2002)
- PhD Candidate in Strategic Management – University at Albany (2007)

Certification

-

Work Experience

She started her career as an Operation Analyst and Director of Sales and Marketing at Hyatt Regency Yogyakarta (2011-2015), then became the CEO of PT Gantari Pramana Perspektif (GP Perspektif) (2015-2019). She joined ITDC in 2019 as Head of Development Division/Business Development Head, before being appointed as ITDC Business Development Director.

Concurrent Position

- Commissioner PT ITDC Nusantara Utilitas
- Commissioner PT Peninsula Bali Resort (Courtyard Nusa Dua)
- President Commissioner PT Merese Mandalika Nusantara

Affiliation

Has no affiliation with other members, member of the Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.

ITDC Shares Ownership

Has no shares in ITDC.



Troy Reza Warokka

Direktur Operasi
Director of Operations

Periode Jabatan: 8 Agustus 2022-RUPS Tahun 2027 (Periode Pertama)
Term of Office: August 8, 2022-2027 GMS (First Period)

WNI | Indonesian

Usia: 52 tahun per 2023
Age: 52 years old per 2023

Tanggal Lahir: Jakarta, 3 November 1971
Date of Birth: Jakarta, November 3, 1971

Domisili: Tangerang Selatan, Indonesia
Domicile: South Tangerang, Indonesia

Dasar Penunjukan

SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-169/MBU/08/2022

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi – STIE Perbanas (1998)

Sertifikasi yang Dimiliki

-

Pengalaman Kerja

Ia memulai karir profesionalnya sebagai jurnalis di PT Era Media Global (1998-1999). Kemudian melanjutkan karirnya sebagai Assistant PR Manager di PT Binareksa Ekajaya (1999-2002), PR Coordinator 101 FM Radio One Jakarta (2001-2005) dan Chief Marketing Officer (CMO) di PT Avabanindo Perkasa (Mahaka Advertising) (2005-2007), sebelum bergabung di PT Mahaka Media Tbk sebagai Executive Vice President Inspire (2005-2019). Ia menjabat sebagai Direktur di PT Mahaka Media Tbk (2019-2022) dan Direktur PT Akasia Damcorp Waba (2021-2022), sebelum ditunjuk sebagai Direktur Operasi ITDC.

Rangkap Jabatan

Komisaris Utama PT ITDC Nusantara Utilitas ("INU")

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham ITDC

Tidak memiliki saham ITDC.

Legal Basis of Appointment

Decree of The Minister of SOEs as GMS No. SK-169/MBU/08/2022

Education Background

Bachelor of Economy – STIE Perbanas (1998)

Certification

-

Work Experience

He started his professional career as a journalist at PT Era Media Global (1998-1999). Then continued his career as Assistant PR Manager at PT Binareksa Ekajaya (1999-2002), PR Coordinator of 101 FM Radio One Jakarta (2001-2005) and Chief Marketing Officer (CMO) at PT Avabanindo Perkasa (Mahaka Advertising) (2005-2007), before joining PT Mahaka Media Tbk as Executive Vice President of Inspire (2005-2019). He served as Director at PT Mahaka Media Tbk (2019-2022) and Director of PT Akasia Damcorp Waba (2021-2022), before being appointed as ITDC Operations Director.

Concurrent Position

President Commissioner PT ITDC Nusantara Utilitas ("INU")

Affiliation

Has no affiliation with other members, members of the Board of Commissioners, or the Main and Controlling Shareholders.

ITDC Shares Ownership

Has no shares in ITDC.



Profil Pejabat Eksekutif

Executive Officers Profile

List Nama Pejabat Eksekutif Satu Tingkat di Bawah Direksi

List of Executive Officers One Rank Below the Board of Directors

Muhamad Slamet Umarjadikusumah Vice President Internal Audit	
Menjabat Sejak Serving Since	15 September 2022 September 15, 2022
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	53 Tahun per 2023 53 years old per 2023
Domisili Domicile	Jawa Barat West Java
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	15 September 2022 September 15, 2022
Riwayat Pendidikan Education Background	Economy Management Universitas Pancasila Magister Business Economy Universitas Pancasila
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK No. 028/SK/ITDC.01/IX/2022 tentang Struktur Organisasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Decree No. 028/SK/ITDC.01/IX/2022 concerning Organizational Structure of Indonesian Tourism Development Company

Hanna Loise M. Pandjaitan Pgs Vice President Corporate Secretary	
Menjabat Sejak Serving Since	03 Juli 2023 July 3, 2023
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	33 Tahun per 2023 33 years old per 2023
Domisili Domicile	Bali
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	02 September 2013 September 2, 2013
Riwayat Pendidikan Education Background	Fakultas School of Business (Accounting) Universitas Harapan
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	035.3/SK/ITDC.01/VII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) pada posisi Jabatan Vice President Corporate Secretary 035.3/SK/ITDC.01/VII/2023 concerning Appointment of Temporary Substitute Officers (PGS) in the position of Vice President Corporate Secretary

Kokot Dananjoyo Sapsoko
Vice President Finance & Accounting

Menjabat Sejak Serving Since	10 November 2023 November 10, 2023
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	50 Tahun per 2023 50 years old per 2023
Domisili Domicile	Banten
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	10 November 2023 November 10, 2023
Riwayat Pendidikan Education Background	Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Agriculture Faculty of Gadjah Mada University
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	022/KONTRAK/ITDC.01/XI/2023 tentang Surat Perjanjian Kerja - Vice President Finance & Accounting 022/KONTRAK/ITDC.01/XI/2023 concerning Employment Agreement Letter - Vice President Finance & Accounting

Fransiska Dita Novia Wardani
Vice President Corporate Planning, Performance & Risk Management

Menjabat Sejak Serving Since	25 Januari 2023 January 25, 2023
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	34 Tahun per 2023 34 years old per 2023
Domisili Domicile	Indonesia
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	25 Januari 2023 January 25, 2023
Riwayat Pendidikan Education Background	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Faculty of Engineering of Diponegoro University
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK No. 038.4/SK/ITDC.01/VII/2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Decree No. 038.4/SK/ITDC.01/VII/2023 concerning Nomenclature of Employee Positions at Indonesian Tourism Development Company

Novan Aryanda
Vice President Procurement

Menjabat Sejak Serving Since	12 Desember 2020 December 12, 2020
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	45 Tahun per 2023 45 years old per 2023
Domisili Domicile	Jakarta
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	13 Maret 2017 March 13, 2017
Riwayat Pendidikan Education Background	Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada Civil Engineering of Gadjah Mada University
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK No. 026.2/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Decree No. 026.2/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 concerning Nomenclature of Employee Positions at Indonesian Tourism Development Company



Desak Ketut Adi Sundarini Vice President Human Capital & General Affair	
Menjabat Sejak Serving Since	09 September 2022 September 9, 2022
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	39 Tahun per 2023 39 years old per 2023
Domisili Domicile	Bali
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	01 Juli 2006 July 1, 2006
Riwayat Pendidikan Education Background	Fakultas Ekonomi & Bisnis (Akuntansi) Universitas Udayana Economy and Business (Accounting) Faculty of Udayana University
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK No. 031/SK/ITDC.01/IX/2022 tentang Alih Tugas Pegawai PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Decree No. 031/SK/ITDC.01/IX/2022 concerning Transfer of Duties of Indonesian Tourism Development Employees

Ni Made Ria Kurniasih Astuty Human Capital & General Affair Senior Advisor	
Menjabat Sejak Serving Since	10 November 2023 November 10, 2023
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	41 Tahun per 2023 41 years old per 2023
Domisili Domicile	Bali
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	03 April 2017 April 3, 2017
Riwayat Pendidikan Education Background	Fakultas Ekonomi (Akuntansi) Universitas Indonesia Economy (Accounting) Faculty of University of Indonesia
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK No. 056.3/SK/ITDC.01/XI/2023 tentang Rotasi Pegawai PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Decree No. 056.3/SK/ITDC.01/XI/2023 concerning Employee Rotation of Indonesian Tourism Development Company

A.A. Ayu Wulan Prami Lestari Pgs Vice President Legal	
Menjabat Sejak Serving Since	11 Desember 2023 December 11, 2023
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	34 Tahun per 2023 34 years old per 2023
Domisili Domicile	Bali
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	02 September 2013 September 2, 2013
Riwayat Pendidikan Education Background	Fakultas Hukum Universitas Udayana Faculty of Law of Udayana University
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK No. 062.1/SK/ITDC.01/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Vice President Legal PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Decree No. 062.1/SK/ITDC.01/XII/2023 concerning the Appointment of a Temporary Substitute (PGS) Vice President Legal for Indonesian Tourism Development Company.

Miranti Nasti Rendranti
Vice President Quality Assurance & Compliance

Menjabat Sejak Serving Since	09 September 2022 September 9, 2022
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	51 Tahun per 2023 51 years old per 2023
Domisili Domicile	Jawa Barat West Java
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	18 September 2017 September 18, 2017
Riwayat Pendidikan Education Background	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Faculty of Law of Gadjah Mada University
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK No. 031/SK/ITDC.01/IX/2022 tentang Alih Tugas Pegawai PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Decree No. 031/SK/ITDC.01/IX/2022 concerning Transfer of Duties of Indonesian Tourism Development Company Employees

Rachmat Ruchandi
Vice President Product Development & Asset Optimization
Plt Vice President Sales

Menjabat Sejak Serving Since	15 Agustus 2023 August 15, 2023
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	54 Tahun per 2023 54 years old per 2023
Domisili Domicile	Jakarta
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	01 April 2021 April 1, 2021
Riwayat Pendidikan Education Background	Elektronik dan Komunikasi Universitas Trisakti Electronic and Communication of Trisakti University
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK No. 038.4/SK/ITDC.01/VII/2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Decree No. 038.4/SK/ITDC.01/VII/2023 concerning Nomenclature of Employee Positions at Indonesian Tourism Development Company

Lutfi Rachman
Vice President Project Management Office (PMO)
Plt Destination Management Operatorship (DMO)

Menjabat Sejak Serving Since	09 September 2022 September 9, 2022
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	51 Tahun per 2023 51 years old per 2023
Domisili Domicile	Jakarta
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	02 Januari 2019 January 2, 2019
Riwayat Pendidikan Education Background	Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan Architecture of Parahyangan Catholic University
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK No. 029/SK/ITDC.01/IX/2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Decree No. 029/SK/ITDC.01/IX/2022 concerning Nomenclature of Employee Positions at Indonesian Tourism Development Company



Achmad Hussein Slamet Vice President Marketing & Activation	
Menjabat Sejak Serving Since	15 Agustus 2023 August 15, 2023
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	45 Tahun per 2023 45 years old per 2023
Domisili Domicile	Jakarta
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	21 Maret 2021 March 21, 2021
Riwayat Pendidikan Education Background	Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Faculty of Economy of Pancasila University
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK No. 038.4/SK/ITDC.01/VII/2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Decree No. 038.4/SK/ITDC.01/VII/2023 concerning Nomenclature of Employee Positions at Indonesian Tourism Development Company

I Gusti Ngurah Ardita General Manager The Nusa Dua	
Menjabat Sejak Serving Since	01 Februari 2019 February 1, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	61 Tahun per 2023 61 years old per 2023
Domisili Domicile	Bali
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	01 Februari 2019 February 1, 2019
Riwayat Pendidikan Education Background	Ilmu Hukum Universitas Mahasaraswati Law of Mahasaraswati University
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	Kontrak No. 001/Kontrak/ITDC.01/I/2023 tentang Surat Perjanjian Kerja General Manager The Nusa Dua PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Contract No. 001/Kontrak/ITDC.01/I/2023 concerning Employment Agreement Letter for General Manager of The Nusa Dua Indonesian Tourism Development Company

Molin Duwanno General Manager The Mandalika	
Menjabat Sejak Serving Since	19 Desember 2022 December 19, 2022
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	48 Tahun per 2023 48 years old per 2023
Domisili Domicile	Jakarta
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	19 Desember 2022 December 19, 2022
Riwayat Pendidikan Education Background	Finance University of Central Oklahoma Master of Business Administration University of Central Oklahoma
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	011/KONTRAK/ITDC.01/XI/2022 tentang Surat Perjanjian Kerja General Manager The Mandalika PT Pengembangan Pariwisata Indonesia 011/KONTRAK/ITDC.01/XI/2022 concerning Employment Agreement Letter for General Manager of The Mandalika Indonesian Tourism Development Company

I Made Agus Dwiatmika General Manager The Golo Mori

Menjabat Sejak Serving Since	15 Agustus 2023 August 15, 2023
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	51 Tahun per 2023 51 years old per 2023
Domisili Domicile	Jakarta
Bergabung di ITDC Join Date in ITDC	02 Mei 2016 May 2, 2016
Riwayat Pendidikan Education Background	Sarjana Psikologi, Universitas Gadjah Mada Bachelor of Psychology of Gadjah Mada University
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK No.038.2/SK/ITDC.01/VII/2023 tentang Penetapan General Manager The Golo Mori. Decree No.038.2/SK/ITDC.01/VII/2023 concerning the Appointment of the General Manager of The Golo Mori

Demografi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Employees Demographics and Competency Development

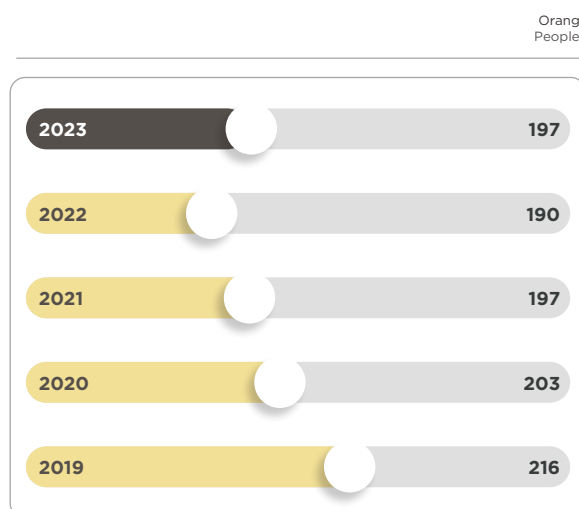
Demografi Karyawan

Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan Perusahaan mencapai 197 orang, mengalami kenaikan sebesar 3,7% dibandingkan jumlah karyawan tahun 2022 yang sebanyak 190 orang. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh rekrutmen karyawan baru.

Employees Demographics

As of December 31, 2023, the Company had 197 employees, an increase of 3.7% compared to 190 employees in 2022. This increase was mainly due to the recruitment of new employees.

Pergerakan Jumlah Karyawan Tahun 2019-2023 Total Employee Movement in 2019-2023





Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Kelompok Jabatan

Employee Demographics Based on Organizational Level/Position Group

(orang)
(people)

Level Organisasi Organizational Level	2023				2022			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)
Kepala Divisi Division Head	16	5	21	11%	13	4	17	8,95%
Kepala Bagian Department Head	19	10	29	15%	20	11	31	16,32%
Kepala Seksi Section Head	30	10	40	20%	23	10	32	16,84%
Staf Staff	70	37	107	54%	73	37	110	57,89%
Jumlah Total	135	62	197	100%	129	61	190	100,00%

L = Laki-laki/P = Perempuan
M= Male / F=Female

Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Demographics Based on Education Level

(orang)
(people)

Tingkat Pendidikan Education Level	2023				2022			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)
Sarjana dan Pascasarjana Undergraduate and Postgraduate	91	49	140	71%	84	48	132	69,47%
Diploma	10	13	23	12%	9	13	22	11,58%
SMA dan Sederajat High School and Equivalent	34	0	34	17%	36	0	36	18,95%
SMP dan Sederajat Junior High School and Equivalent	0	0	0	0%	0	0	-	-
SD dan Sederajat Elementary School and Equivalent	0	0	0	0%	0	0	-	-
Jumlah Total	135	62	197	100,00%	129	61	190	100,00%

L = Laki-laki/P = Perempuan
M= Male / F=Female

Demografi Karyawan Berdasarkan Unit Kerja

Employee Demographics by Work Unit

(orang)
(people)

Unit Kerja Work Unit	2023				2022			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)
Direktorat Utama President Directorate	10	11	21	11%	10	7	17	8,95%
Direktorat Keuangan, Strategi & Manajemen Risiko Directorate of Finance, Strategy & Risk Management	15	10	25	13%	15	10	25	13,16%

Demografi Karyawan Berdasarkan Unit Kerja

Employee Demographics by Work Unit

(orang)
(people)

Unit Kerja Work Unit	2023				2022			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)
Direktorat Operasi Directorate of Operations	5	4	9	5%	11	11	22	11,58%
Direktorat Pengembangan Bisnis Directorate of Business Development	15	14	29	15%	18	11	29	15,26%
Direktorat SDM & Legal Compliance Directorate of HR & Legal Compliance	26	9	35	18%	20	8	28	14,74%
SBU - The Mandalika	17	9	26	13%	10	9	19	10,00%
SBU - The Nusa Dua	45	5	50	25%	45	5	50	26,32%
SBU - The Golo Mori	2	0	2	1%	-	-	-	-
Jumlah Total	135	62	197	100%	129	61	190	100,00%

L = Laki-laki/P = Perempuan
M= Male / F=Female

Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Employee Demographics by Age

(orang)
(people)

Rentang Usia Age Range	2023				2022			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)
> 51 Tahun years old	22	2	24	12%	10	3	13	6,84%
> 46-50 Tahun years old	15	2	17	9%	18	2	20	10,53%
> 41-45 Tahun years old	14	1	15	8%	14	1	15	7,89%
> 36-40 Tahun years old	19	10	29	15%	21	7	28	14,74%
> 31-35 Tahun years old	52	28	80	41%	48	27	75	39,47%
> 25-30 Tahun years old	13	19	32	16%	18	21	39	20,53%
Jumlah Total	135	62	197	100%	129	61	190	100,00%

L = Laki-laki/P = Perempuan
M= Male / F=Female

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Demographics by Employment Status

(orang)
(people)

Status Kepegawaian Employment Status	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)
Pegawai Tetap Permanent Employee	176	22%	177	27,27%
Pegawai Kontrak Contract Employee	21	2,5%	13	2,00%
Tenaga Alih Daya Outsource	604	75,5%	459	70,72%
Jumlah Total	801	100%	649	100,00%



Demografi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin

Employee Demographics by Gender

(orang)
(people)

Jenis Kelamin Gender	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)
Laki-laki Male	135	68,5%	129	67,89%
Perempuan Female	62	31,5%	61	32,11%
Jumlah Total	197	100%	190	100,00%

Pengembangan Kompetensi Karyawan

ITDC percaya bahwa seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi, keahlian, dan kesempatan yang tersedia. Perusahaan senantiasa memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan agar dapat meningkatkan kompetensinya agar lebih kompetitif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan kondisi yang dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja.

Perusahaan senantiasa memperhatikan kualitas, profesionalitas, dan efektivitas kinerja karyawan dalam menjaga, serta menumbuhkan loyalitas dan produktivitas SDM. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk Insan Perusahaan sampai dengan level terbawah dengan mengacu pada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan bagi seluruh SDM.

Pada tahun 2023, Perusahaan telah melakukan pengembangan kompetensi untuk seluruh jabatan, mulai dari *Vice President* hingga *Officer* dengan jumlah peserta sebanyak 798 orang. Pengembangan kompetensi Perusahaan dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu pelatihan manajerial, pengembangan kompetensi (*technical* dan *soft skill*), seminar, dan *workshop*. Adapun rincian pengembangan kompetensi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Employee Competency Development

ITDC believes that all employees have the same opportunity to advance and develop according to their potential, skills, and opportunities. The Company always provides opportunities for all employees to improve their competencies, in order to be more competitive in facing changes and developments, and also to increase performance effectiveness and productivity.

The Company always pays attention to the quality, professionalism, and effectiveness of employee performance in maintaining and growing HR loyalty and productivity. This commitment is proven by providing training and competency development for Company Personnel down to the lowest level by referring to a training and development framework that covers all aspects and development methods for all human resources.

In 2023, the Company has carried out competency development for all positions, from Vice President to Officer with a total number of participants 798 people. Company competency development is divided into 4 (four) types, namely managerial training, competency development (technical and soft skills), seminars, and workshops. The details of competency development carried out by the Company in 2023 are as follows:

No.	Level Organisasi Organizational Level	Jenis Pelatihan Type of Training	Jumlah Peserta Total Participants	Komposisi Peserta Composition of Participants	
				Berdasarkan Jenis Kelamin Based on Gender	
				Laki-laki Male	Perempuan Female
1.	BOC	Manajerial	1	1	0
		Technical	3	3	0
		Workshop	20	12	8
		Seminar	0	0	0
2.	BOD	Manajerial	10	9	1
		Technical	7	5	2
		Workshop	5	4	1
		Seminar	3	0	3
3.	BOD-1	Manajerial	1	0	1
		Technical	30	24	6
		Workshop	55	34	21
		Seminar	6	3	3
4.	BOD-2	Manajerial	0	0	0
		Technical	47	29	18
		Workshop	79	52	27
		Seminar	11	6	5
5.	BOD-3	Manajerial	0	0	0
		Technical	39	24	15
		Workshop	87	61	26
		Seminar	15	8	7
6.	BOD-4	Manajerial	0	0	0
		Technical	160	102	58
		Workshop	183	89	94
		Seminar	36	11	25
Total Peserta Pelatihan Total Training Participants				798	

Biaya Pengembangan Kompetensi

Dalam mengoptimalkan potensi dan kinerja terbaik para Insan Perusahaan, ITDC telah menyediakan anggaran investasi pada program pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Di tahun 2023, realisasi biaya pengembangan kompetensi karyawan tercatat sebesar Rp867,36 juta, mengalami peningkatan 246% atau setara dengan Rp616,65 juta dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp256,61 juta.

Competency Development Costs

In optimizing the potential and best performance of Company Personnel, ITDC has provided an investment budget for sustainable employee competency development programs. In 2023, the realization of employee competency development costs was recorded at Rp867.36 million, an increase of 246% or equivalent to Rp616.65 million compared to 2022 which amounted to Rp256.61 million.

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Competency Development Cost

Uraian Description	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Difference	Persentase (%) Percentage (%)
Pengembangan Kompetensi Competency Development	867.369.836	250.711.531	616.658.305	246%



Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

Komposisi Kepemilikan Saham

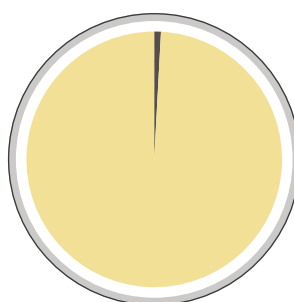
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia merupakan bagian dari Holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebanyak 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebanyak 2.147.659 lembar saham Seri B. Adapun komposisi kepemilikan saham ITDC per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Share Ownership Composition

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia is part of SOEs Holding in the aviation and tourism sector in Indonesia whose shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs with 1 Series A Dwiwarna share and PT Aviasi Wisata Indonesia (Persero) with 2,147,659 Series B shares. The composition of ITDC share ownership as of December 31, 2023, is as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Fully Placed and Issued Capital	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000/lembar saham Nominal Value of Shares = Rp1,000,000/share			
Pemerintah Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	1	1.000.000	0,00005%
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	2.147.659	2.147.659.000.000	99,99995%
Jumlah Total	2.147.660	2.147.660.000.000	100,00000%

Komposisi Pemegang Saham ITDC Per 31 Desember 2023
 Composition of ITDC Shareholders as of December 31, 2023



● 0,00005%

Pemerintah Republik Indonesia
The Government of the Republic of Indonesia

● 99,99995%

PT Aviasi Pariwisata Indonesia

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Pada 18 Januari 2023, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dilakukan penambahan penyertaan modal ke modal saham PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sebesar 2.147.659 lembar saham seri B.

Information about Major/Controlling Shareholders

On January 18, 2023, the Government issued Government Regulation no. 3 of 2023 concerning Additional Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). To strengthen the capital structure and increase the business capacity of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), additional capital investment was made to the share capital of PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) from the transfer of all series B shares belonging to the Republic of Indonesia to PT Pengembangan Pariwisata Indonesia amounting to 2,147,659 series B shares.

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

Gedung Sarinah Lantai 14
Jl. M. H. Thamrin No. 11
Kota Jakarta Pusat, 10350
E-mail: info@injourney.id

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

ITDC merupakan bagian dari Holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata di Indonesia dengan kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebanyak 2.147.659 lembar saham Seri B atau setara dengan 99,99995%.

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Sampai dengan akhir tahun 2023, ITDC merupakan bagian dari Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata di Indonesia dengan kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) selaku Induk Holding. Dengan demikian, komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perusahaan adalah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) selaku pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan, sebagaimana yang dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

Composition of the 20 Largest Shareholders

ITDC is part of the SOEs Holding in the aviation and tourism sector in Indonesia with the largest share ownership owned by PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) with 2,147,659 Series B shares or the equivalent of 99.99995%.

Shareholder Composition of 5% or More

Until the end of 2023, ITDC is part of the SOEs Holding in the aviation and tourism sector in Indonesia with the largest share ownership owned by PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) as the Parent Holding. Thus, the shareholder composition of 5% or more of the Company is PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) as the main and controlling shareholder of the Company, as explained in the description of shareholder composition.



Kelompok Pemegang Saham Kurang dari 5%

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2023, saham Seri A Dwiwarna ITDC sebanyak 1 lembar saham dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN. Perusahaan juga tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di bursa efek manapun. Dengan demikian, pemegang saham kurang dari 5% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Pegawai

ITDC tidak pernah menawarkan sahamnya kepada publik di bursa efek manapun. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki kebijakan Program Opsi Saham untuk Manajemen (*Management Stock Option Program/MSOP*) dan Program Opsi Saham untuk pegawai (*Employee Stock Option Program/ESOP*). Dengan demikian, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham ITDC.

Shareholder Group Less Than 5%

Along with the issuance of Government Regulation No. 3 of 2023, 1 Series A Dwiwarna ITDC share is owned by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs. The company has also never conducted an Initial Public Offering of Shares on any stock exchange. Thus, less than 5% of the shareholders are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Share Ownership by Management and/or Employees

ITDC has never offered its shares to the public on any stock exchange. Therefore, the Company does not have a Stock Option Program for Management (MSOP) and a Stock Option Program for employees (Employee Stock Option Program/ESOP) policy. Thus, there are no members of the Board of Commissioners or Board of Directors who own ITDC shares.

Transparansi Kepemilikan Saham ITDC oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai

Transparency of ITDC Shares Ownership by the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employee

Nama Name	Jabatan Position	2023		2022	
		Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Ricky Joseph Pesik	Komisaris Utama President Commissioner		Nihil None		Nihil None
H. Irzani, M.Pd, M.Si	Komisaris Commissioner		Nihil None		Nihil None
Ir. Zainal Mutaqin, MM	Komisaris Commissioner		Nihil None		Nihil None
Ulin Ni'am Yusron	Komisaris Independen Independent Commissioner		Nihil None		Nihil None

Transparansi Kepemilikan Saham ITDC oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai

Transparency of ITDC Shares Ownership by the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employee

Nama Name	Jabatan Position	2023		2022	
		Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
Direksi Board of Directors					
Ari Respati	Direktur Utama President Director		Nihil None		Nihil None
Ahmad Fajar	Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Strategy, and Risk Management		Nihil None		Nihil None
Wenda Ramadya Nabiel	Direktur Teknik dan SDM Director of Engineering and HR		Nihil None		Nihil None
Ema Widiastuti	Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development		Nihil None		Nihil None
Troy Reza Warokka	Direktur Operasi Director of Operations		Nihil None		Nihil None
Karyawan Employee					
Kepemilikan Saham oleh Pegawai Share Ownership by Employee			Nihil None		Nihil None



Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

List of Subsidiaries and Associated Entities

Entitas Anak

Anak Perusahaan ITDC telah mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN sesuai surat KBUMN No. S-303/MBU/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 dan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta pendirian oleh Notaris Arry Supratno di Jakarta sekaligus pengurusan SK Kemenkumham yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018. Anak Usaha ITDC yang dibentuk adalah PT ITDC Nusantara Properti dan PT ITDC Nusantara Utilitas.

Adapun struktur pengurus dan permodalan awal yang disetujui oleh pemegang saham adalah sebagai berikut:

PT ITDC Nusantara Utilitas

PT ITDC Nusantara Utilitas merupakan anak perusahaan dari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC yang tujuan pendiriannya adalah untuk meningkatkan unit usaha baru dalam rangka optimalisasi usaha BUMN. Pembentukan unit usaha baru ini juga sejalan dengan kebutuhan utama akan utilitas diantaranya kebutuhan energi, air bersih, pengelolaan limbah dan ICT di dalam Kawasan Pariwisata yang dikembangkan oleh ITDC. PT ITDC Nusantara Utilitas telah beroperasi di 3 area operasional dan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan ITDC NU juga melakukan kegiatan usaha di luar area operasional serta melakukan support atas event-event yang diselenggarakan oleh ITDC. Kegiatan usaha ITDC NU diuraikan sebagai berikut:

1. Kawasan The Nusa Dua
Kegiatan usaha ITDC NU di area The Nusa Dua yang telah beroperasi antara lain:
 - a. Pengelolaan Air Limbah dan Air Irigasi
 - b. Penyedia Layanan Information, Communication, Teknologi (ICT) The Nusa Dua (bermitra dengan Tower Bersama Group)
 - c. Penyedia layanan Solar VP di kawasan The Nusa Dua
2. Kawasan The Mandalika
Kegiatan usaha ITDC NU di area The Mandalika yang telah beroperasi antara lain:
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) The Mandalika

Subsidiaries

The ITDC subsidiary has received approval from the Minister of SOEs in accordance with KBUMN letter No. S-303/MBU/05/2018 date May 4, 2018, and was followed up with the signing of the Deed of Establishment by Notary Arry Supratno in Jakarta as well as processing the Ministry of Law and Human Rights Decree which was implemented on May 25, 2018. The ITDC subsidiaries established were PT ITDC Nusantara Properti and PT ITDC Nusantara Utilitas.

The management structure and initial capital approved by shareholders are as follows:

PT ITDC Nusantara Utilitas

PT ITDC Nusantara Utilitas is a subsidiary of Indonesian Tourism Development Company/ITDC with an objective to increase new business units in order to optimize SOEs businesses. The formation of this new business unit is also in line with the needs for utilities including the need for energy, clean water, waste management and ICT in the Tourism Area developed by ITDC. PT ITDC Nusantara Utilitas has been operating in 3 operational areas and also carries out business activities outside the operational area and supports events organized by ITDC. ITDC NU's business activities are described as follows:

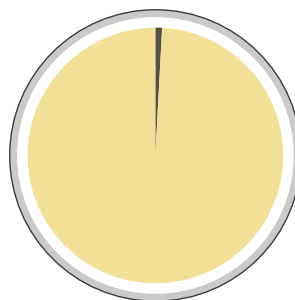
1. The Nusa Dua area
ITDC NU business activities operating in the Nusa Dua area include:
 - a. Wastewater and Irrigation Water Management
 - b. Information, Communication, Technology (ICT) Service Provider of The Nusa Dua (in partnership with Tower Bersama Group)
 - c. Diesel VP service provider in The Nusa Dua area
2. The Mandalika area
ITDC NU business activities operating in the Mandalika area include:
 - a. The Mandalika Gas Station (SPBU)

- b. Penyedia Layanan Information, Communication, Teknologi (ICT) The Mandalika (bermitra dengan PT Telkom (Persero))
- c. Penyediaan Air Bersih The Mandalika
- 3. Pekerjaan Jasa Lainnya
 - a. Pekerjaan Cleaning Service dan Waste Management (CSWM), event Pra Musim & MotoGP
 - b. Penyedia Toilet Portable, event Pra Musim & MotoGP
 - c. Jasa Pemilahan Sampah, event Pra Musim & MotoGP
 - d. Fleet Management Service, event Pra Musim, MotoGP & WSBK
 - e. Pengelola parkir, event Pra Musim, MotoGP & WSBK
 - f. Jasa Perencana wilayah kota, untuk pekerjaan Penataan Perencanaan Ruang - Jasa Perencana Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya
 - g. Jasa pelaksana pekerjaan Waste Water Treatment Plant (WWTP) pada proyek Infrastruktur Dasar Revitalisasi Kawasan GIBB di Sanur
- b. Information, Communication, Technology (ICT) Service Provider for The Mandalika (in partnership with PT Telkom (Persero))
- c. The Provision of Clean Water for The Mandalika
- 3. Other Service Jobs
 - a. Cleaning Service and Waste Management (CSWM) work, Pre-Season & MotoGP events
 - b. Portable Toilet Provider, Pre-Season & MotoGP events
 - c. Waste Sorting Services, Pre-Season & MotoGP events
 - d. Fleet Management Service, Pre-Season events, MotoGP & WSBK
 - e. Parking manager, Pre-Season, MotoGP & WSBK events
 - f. City Regional Planning Services, for Spatial Planning Work - Mamberamo Raya Regency Regional Planning Services
 - g. Waste Water Treatment Plant (WWTP) work services on the GIBB Area Revitalization Basic Infrastructure project in Sanur

Pada 2023, jumlah aset ITDC NU sebesar Rp30,45 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3,17 miliar atau turun sebesar 9,43% jika dibandingkan dengan jumlah aset tahun lalu sebesar Rp33.620.332.319. Penurunan jumlah aset ini disebabkan oleh adanya penurunan nilai aset karena depresiasi, dan penurunan nilai investasi penyertaan modal di tahun 2023.

In 2023, ITDC NU's total assets amounted to Rp30.45 billion. This amount decreased by Rp3.17 billion or decreased by 9.43% compared to last year's total assets of Rp33,620,332,319. This decrease in the number of assets was caused by a decrease in asset value due to depreciation and a decrease in the value of a capital investment in 2023.

Kepemilikan Saham PT ITDC Nusantara Utilitas Per 31 Desember 2023
 PT ITDC Nusantara Utilitas Shares Ownership as of December 31, 2023



● 0,12%

Koperasi Karyawan Nusajaya
Nusajaya Employee Cooperatives

● 99,88%

PT Pengembangan Pariwisata



Manajemen Kunci PT ITDC Nusantara Utilitas per 31 Desember 2021

PT ITDC Nusantara Utilitas Key Management as of December 31, 2021

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Troy Reza Warokka
Komisaris Commissioner	Ema Widiastuti
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	A. A. Istri Ratna Dewi
Direktur Director	Hari Wibisono

PT ITDC Nusantara Properti

PT ITDC Nusantara Properti atau disingkat dengan ITDCNP merupakan anak perusahaan dari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC yang didirikan dalam rangka untuk mendukung salah satu pilar bisnis dari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia / ITDC yaitu sebagai Investor aset produktif di kawasan-kawasan pariwisata yang dikelola ITDC. Unit usaha baru ini juga merupakan strategi peningkatan laba dan manajemen risiko dari ITDC.

Tujuan pendirian perusahaan adalah untuk meningkatkan laba perusahaan dan mengembangkan unit usaha baru sesuai dengan arahan pemegang saham dalam rangka optimalisasi usaha BUMN. Pembentukan unit usaha baru ini juga sejalan dengan rencana pengembangan Hotel Pullman dan MGPA.

PT ITDC Nusantara Properti telah beroperasi, bergerak di bidang pengelolaan aset ITDC serta penunjang bisnis lainnya.

Pada 2023, jumlah aset ITDC Nusantara Properti sebesar Rp176.750 juta naik 19% dari aset tahun lalu sebesar Rp148.904 juta. Peningkatan aset ini disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas dan piutang usaha pada Tahun 2023.

PT ITDC Nusantara Properti

PT ITDC Nusantara Properti or abbreviated as ITDCNP is a subsidiary of Indonesian Tourism Development Company/ITDC which was established to support one of the business pillars of Indonesian Tourism Development Company/ITDC namely as an investor in productive assets in tourist areas managed by ITDC. This new business unit is also a strategy to increase profits and risk management from ITDC.

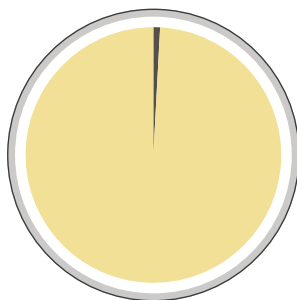
The objection of establishing the company is to increase company profits and develop new business units in accordance with shareholder directions in order to optimize SOEs businesses. The establishment of this new business unit is also in line with the Pullman Hotel and MGPA development plans.

PT ITDC Nusantara Properti has been operating and engaging in ITDC asset management and other business support.

In 2023, the total assets of ITDC Nusantara Properti amounted to Rp176.750 million, an increase of 19% compared to the previous year of Rp148.904 million. This increase in assets was caused by increased cash and cash equivalents and trade receivables in 2023.

Kepemilikan Saham PT ITDC Nusantara Properti Per 31 Desember 2023

PT ITDC Nusantara Properti Share Ownership as of December 31, 2023



● 0,04%

Koperasi Karyawan Nusajaya
Nusajaya Employee Cooperatives

● 99,96%

PT Pengembangan Pariwisata

Manajemen Kunci PT ITDC Nusantara Properti per 31 Desember 2023

PT ITDC Nusantara Properti Key Management as of December 31, 2023

Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Komisaris Utama
President Commissioner

Ahmad Fajar

Komisaris
Commissioner

Wenda Ramadya Nabiel

Direksi
Board of Directors
Direktur Utama
President Director

Jo Eddy Raspati

Direktur
Director

Wahyuaji Munarwiyanto



Entitas Asosiasi

PT Garuda Adhimatra Indonesia

PT Garuda Adhimatra Indonesia didirikan berdasarkan akta notaris No. 66 tanggal 14 Desember 1993 dari Wiratni Ahmadi, S.H. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5391. HT.01.01.TH 1995 tanggal 2 Mei 1995, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1995, Tambahan No. 10183. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 42 tanggal 8 Maret 2012 dari Aryanti Artisari, SH., notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan menyesuaikan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan ini merupakan patungan antara ITDC dan PT Alam Sutera Realty, Tbk dengan kepemilikan saham ITDC sebanyak 9,71% atau 4.500 lembar saham.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah pembangunan dan operator kawasan pariwisata. Perusahaan juga memiliki tanah proyek di lokasi tersebut. Saat ini PT Garuda Adhimatra Indonesia menjadi pengelola objek wisata Garuda Wisnu Kencana yang berlokasi di Jalan Raya Uluwatu, Ungasan, Kuta Selatan, Badung Bali.

PT Jasa Marga Bali Tol

PT Jasa Marga Bali Tol berkedudukan di Denpasar, Bali, didirikan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, Sarjana Hukum dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01TH 2011 tanggal 25 November 2018 mengenai perubahan susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0268707 tanggal 28 November 2018. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah

Association Entities

PT Garuda Adhimatra Indonesia

PT Garuda Adhimatra Indonesia was established based on notarial deed No. 66 dated December 14, 1993, from Wiratni Ahmadi, S.H. The deed of establishment has received approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. C2-5391. HT.01.01.TH 1995 dated May 2, 1995, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 99 dated December 12, 1995, Supplement No. 10183. The Company's Articles of Association have undergone changes, most recently with deed No. 42 dated March 8, 2012, from Aryanti Artisari, SH., notary in Jakarta, in connection with changes to the Company's Articles of Association to adapt Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This company is a joint venture between ITDC and PT Alam Sutera Realty, Tbk with ITDC share ownership of 9.71% or 4,500 shares.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is the development and operator of tourism areas. The company also owns project land at the location. Currently PT Garuda Adhimatra Indonesia manages the Garuda Wisnu Kencana tourist attraction in Jalan Raya Uluwatu, Ungasan, South Kuta, Badung Bali.

PT Jasa Marga Bali Tol

PT Jasa Marga Bali Tol is located in Denpasar, Bali, established based on Deed No. 02 dated August 22, 2011, which was made in the presence of Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, Bachelor of Laws and was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-57740.AH.01.01TH 2011 dated November 25, 2018, concerning changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors. This deed has received approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AH-AH.01.03-0268707 dated November 28, 2018. Based on Article 3 of the Articles of Association, the company's aims and objectives are to operate in the Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Jasamarga Bali Tol telah menyampaikan Surat Kolektif Saham ITDC di PT Jasamarga Bali Tol dengan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp745.434.000.000,- terbagi atas 745.434 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1% dari keseluruhan saham. ITDC memiliki surat Kolektif Saham yang mewakili 7.454 lembar saham berupa Saham Biasa dengan No. 000720091 s/d 000727544.

PT Peninsula Bali Resort

PT Peninsula Bali Resort adalah perusahaan patungan antara ITDC dengan PT Griya Kartika Nusantara, yang mengelola sebuah hotel yang bernama Hotel Courtyard by Marriott yang terletak di Lot SW-1 Kawasan Pariwisata The Nusa Dua Bali, dan mulai beroperasi pada bulan Februari Tahun 2011 dengan jumlah 250 kamar. Adapun tujuan dan alasan pendirian perusahaan patungan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan Hotel Bualu yang semula berfungsi sebagai hotel pendidikan dan pelatihan (BPLP) sekarang Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) The Nusa Dua, melalui pembaharuan produk dari hotel pendidikan/pelatihan menjadi hotel bintang 4, dengan bekerja sama dengan mitra usaha yang telah disetujui oleh Menteri BUMN melalui surat No. S-114/M-MBU/2003 tanggal 5 Juni 2003. Adapun komposisi ITDC saat ini sebagai Pemegang Saham 16,76% atau Rp28,5 miliar dan PT GKN 83,24% atau Rp141.500 miliar di PT Peninsula Bali Resort. PT GKN berencana untuk menambah ekuitas untuk menutupi kekurangan biaya operasional Hotel.

PT Bali Griya Santhi

PT Bali Griya Santhi adalah perusahaan patungan (joint venture) antara ITDC dengan PT Jakarta Kyoai Medical Centre (PT JKMC), yang mengelola lahan seluas lebih kurang 70.000 m² dan diperuntukkan untuk pengembangan Hotel Mercure The Nusa Dua. Adapun komposisi ITDC saat ini sebagai Pemegang Saham 40% dan PT JKMC 40% dari modal dasar sebesar Rp100 miliar.

toll road business sector, which includes funding, engineering planning, construction implementation, operation and maintenance of the toll road, as well as other businesses in accordance with applicable laws and regulations. PT Jasamarga Bali Tol has submitted an ITDC Collective Share Letter to PT Jasamarga Bali Tol with the Company's Authorized Capital amounting to Rp745,434,000,000,- divided into 745,434 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) or 1% of the total share. ITDC has a Collective Share certificate representing 7,454 shares in the form of Ordinary Shares with No. 000720091 to 000727544.

PT Peninsula Bali Resort

PT Peninsula Bali Resort is a joint venture between ITDC and PT Griya Kartika Nusantara, which manages a hotel called Hotel Courtyard by Marriott located in Lot SW-1 of The Nusa Dua Bali Tourism Area, and began operating in February 2011 with a total of 250 room. The aim and objective for establishing the joint venture is as an effort to improve the Bualu Hotel, which originally functioned as an education and training hotel (BPLP) now called The Nusa Dua Tourism College (STP), through product renewal from an education/training hotel to a 4 star hotel, with collaborate with business partners who have been approved by the Minister of SOEs through letter No. S-114/M-MBU/2003 dated June 5, 2003. The current composition of ITDC is as a shareholder of 16.76% or Rp28.5 billion and PT GKN with 83.24% or Rp141,500 billion in PT Peninsula Bali Resort. PT GKN plans to increase equity to cover the shortfall in hotel operational costs.

PT Bali Griya Santhi

PT Bali Griya Santhi is a joint venture between ITDC and PT Jakarta Kyoai Medical Center (PT JKMC), which manages land covering an area of approximately 70,000 m² and is intended for the development of the Mercure The Nusa Dua Hotel. The current composition of ITDC is as a 40% shareholder and PT JKMC 40% of the authorized capital of Rp100 billion.



Entitas Cucu

PT ITDC Nusantara Xplorin

PT ITDC Nusantara Xplorin suatu perseroan terbatas didirikan berdasarkan Akta Nomor 167 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat Keputusannya No. AHU-0013334.AH.01.01 tanggal 20 Maret 2017, yang mana anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana perubahan anggaran dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 5 Juli 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Arry Supratno S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dan dilaporkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0426781 tanggal 8 Juli 2021.

Pada 2023, jumlah aset Xplorin sebesar Rp11,08 miliar, jumlah tersebut menurun 43% dari aset tahun lalu sebesar Rp19,29 miliar. Penurunan aset ini disebabkan oleh piutang usaha yang sudah tertagihkan dan penggunaan kas dan setara kas untuk kebutuhan operasional.

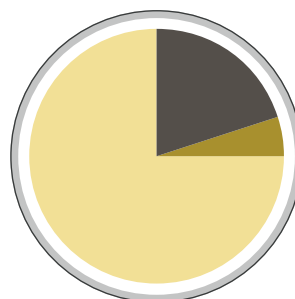
Sub-subsidiaries Entity

PT ITDC Nusantara Xplorin

PT ITDC Nusantara Xplorin a limited liability company was established based on Deed No. 167 dated March 17, 2017 made before Netty Maria Machdar, S.H., Notary in Jakarta, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights as in his Decree No. AHU-0013334.AH.01.01 dated March 20, 2017, which the articles of association have been amended several times, as amended by the latest amendment to the articles of association amended by Deed No. 5 dated July 5, 2021 made by and before Notary Arry Supratno S.H., Notary in Jakarta, which has been recorded and reported in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as in the letter of acceptance of notification of amendment to the articles of association No. AHU-AH.01.03-0426781 dated July 8, 2021.

In 2023, Xplorin's total assets were Rp11.08 billion, this amount is a 43% decrease from last year's assets of Rp19.29 billion, caused by accounts receivable that had been collected and the use of cash and cash equivalents for operational needs.

Kepemilikan Saham PT ITDC Nusantara Xplorin Per 31 Desember 2023
PT ITDC Nusantara Xplorin Shares Ownership as of December 31, 2023



● 20,00%
PT Amerta Arta Anugrah

● 5,00%
PT Gamatechno Indonesia

● 75,00%
PT ITDC Nusantara Properti

Manajemen Kunci PT ITDC Nusantara Xplorin per 31 Desember 2023

PT ITDN Nusantara Xplorin Key Management as of December 31, 2023

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Herdi Ranu Wibowo
Komisaris Commissioner	Wing Bharoto Wibowo
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Gemma Iskandar
Direktur Director	Vicky Ganda Saputra

PT MGPA Nusantara Jaya

PT Kuta Mandalika Nusantara (Nama Perseroan saat pendirian) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 173 tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Saharjo, S.H., M.Kn., MH. Notaris di Kabupaten Lombok Tengah, Praya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003282.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 21 Januari 2019. Adapun akta perubahan anggaran dasar Nomor 40 tanggal 22 November 2019, yang dibuat dihadapan Saharjo, S.H., M.Kn., MH. Notaris di Kabupaten Lombok Tengah, Praya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0101604.AH01.02.TAHUN 2019 tanggal 5 Desember 2019.

Di tahun 2023, jumlah aset MGPA sebesar Rp121,34 miliar, naik 71% dari aset tahun lalu sebesar Rp71,13 miliar. Peningkatan aset ini disebabkan oleh adanya kenaikan piutang usaha sebesar 187% dari Rp22,93 miliar di tahun 2022 menjadi Rp65,88 miliar di tahun 2023. Peningkatan piutang ini imbas dari kenaikan penjualan sebesar 67% dari Rp94,62 miliar di tahun 2022 menjadi Rp157,63 miliar di tahun 2023.

PT MGPA Nusantara Jaya

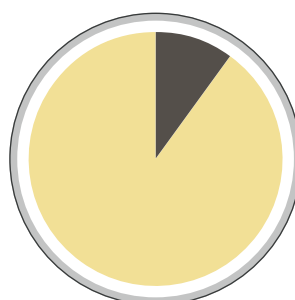
PT Kuta Mandalika Nusantara (Company name at the time of establishment) was established based on Deed of Establishment Number 173 dated January 21, 2019, made in the presence of Saharjo, S.H., M.Kn., MH. Notary in Central Lombok Regency, Praya who has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0003282.AH.01.01.TAHUN 2019 dated January 21, 2019. The deed of amendment to the articles of association Number 40 dated November 22, 2019, was made in the presence of Saharjo, S.H., M.Kn., MH. Notary in Central Lombok Regency, Praya who has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0101604.AH01.02.TAHUN 2019 dated December 5, 2019.

In 2023, MGPA's total assets were Rp121.34 billion, an increase of 71% from last year's assets of Rp71.13 billion. This increase in assets was caused by an increase in trade receivables of 187% from Rp22.93 billion in 2022 to IDR65.88 billion in 2023. This increase in receivables was the result of an increase in sales of 67% from Rp94.62 billion in 2022 to Rp157.63 billion in 2023.



Kepemilikan Saham PT MGPA Nusantara Jaya Per 31 Desember 2023

PT MGPA Nusantara Jaya Shares Ownership as of December 31, 2023



● 10,14% PT ITDC Nusantara Utilitas

● 89,86% PT ITDC Nusantara Properti

Manajemen Kunci PT MGPA Nusantara Jaya per 31 Desember 2023

PT MGPA Nusantara Jaya Key Management as of December 31, 2023

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Troy Reza Warokka
Komisaris Commissioner	Wenda Ramadya Nabel
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Priandhi Satria
Direktur Director	Samsul Purba

PT Merese Mandalika Nusantara

PT Merese Mandalika Nusantara yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 174 tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Saharjo, S.H., M.Kn., MH. Notaris di Kabupaten Lombok Tengah, Praya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010237.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Januari 2019. Adapun akta perubahan data perseroan Nomor 30 tanggal 26 April 2021, yang dibuat di hadapan Arry Supratno S.H. Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan

PT Merese Mandalika Nusantara

PT Merese Mandalika Nusantara was established based on Deed of Establishment Number 174 dated January 21, 2019, was made in the presence of Saharjo, S.H., M.Kn., MH. Notary in Central Lombok Regency, Praya who has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0010237.AH.01.11.TAHUN 2019 dated January 21, 2019. The deed of change to company data Number 30 dated April 26, 2021, made in the presence of Arry Supratno S.H. Notary in Central Jakarta who has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU0092507.AH.01.11.TAHUN 2021 dated

No. AHU0092507.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 25 Mei 2021. Bidang usaha utama perusahaan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum (hotel maupun villa) dan saat ini perusahaan mendapat penugasan sebagai Owner Representative Hotel Pullman Lombok Mandalika yang dimiliki oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Modal dasar perseroan sebesar Rp20.000.000.000 dan modal yang telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp5.000.000.000.

Pada 2023, jumlah aset PT Merese Mandalika Nusantara sebesar Rp47,80 miliar turun dari aset tahun lalu sebesar Rp61,13 miliar. Jumlah liabilitas tahun 2023 sebesar Rp98,31 miliar atau meningkat dari jumlah liabilitas tahun 2022 sebesar Rp92,61 miliar. Sedangkan jumlah ekuitas mengalami kenaikan yaitu dari minus Rp31,48 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp50,51 miliar di tahun 2023.

Jumlah pendapatan usaha tahun 2023 adalah sebesar Rp58,93 miliar, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 pendapatan sebesar Rp6,25 juta. Perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp19,03 miliar di tahun 2023, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi sebesar Rp33,30 miliar.

Sebagai owner representative Hotel Pullman, Perusahaan tidak mencatatkan pendapatan hotel di pembukuan perusahaan, namun membukukan seluruh biaya operasional hotel.

May 25, 2021. The Company main business field is providing accommodation and food and beverages (hotels and villas) and currently the company has been assigned as Owner Representative of the Pullman Lombok Mandalika Hotel which is owned by PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. The company's authorized capital is equal to Rp20,000,000,000 with the capital that has been placed and paid up is Rp5,000,000,000.

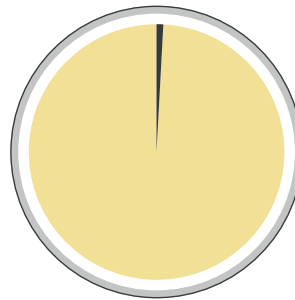
In 2023, PT Merese Mandalika Nusantara's total assets were Rp47.80 billion, down from last year's assets of Rp61.13 billion. Total liabilities in 2023 amounted to Rp98.31 billion or an increase from total liabilities in 2022 of Rp92.61 billion. Meanwhile, total equity has increased, from minus Rp31.48 billion in 2022 to Rp50.51 billion in 2023.

Total operating income in 2023 was Rp58.93 billion, an increase compared to 2022 income of Rp6.25 million. The company recorded a net profit of Rp19.03 billion in 2023, a decrease compared to the previous year when it recorded a loss of Rp33.30 billion.

As owner representative of the Pullman Hotel, the Company does not record hotel revenues in the company's books, but records all hotel operational costs.



Kepemilikan Saham PT Merese Mandalika Nusantara Per 31 Desember 2023
PT ITDC Nusantara Properti Shares Ownership per December 31, 2023



● 1,00%
KSU Mutiara Mandalika Madani

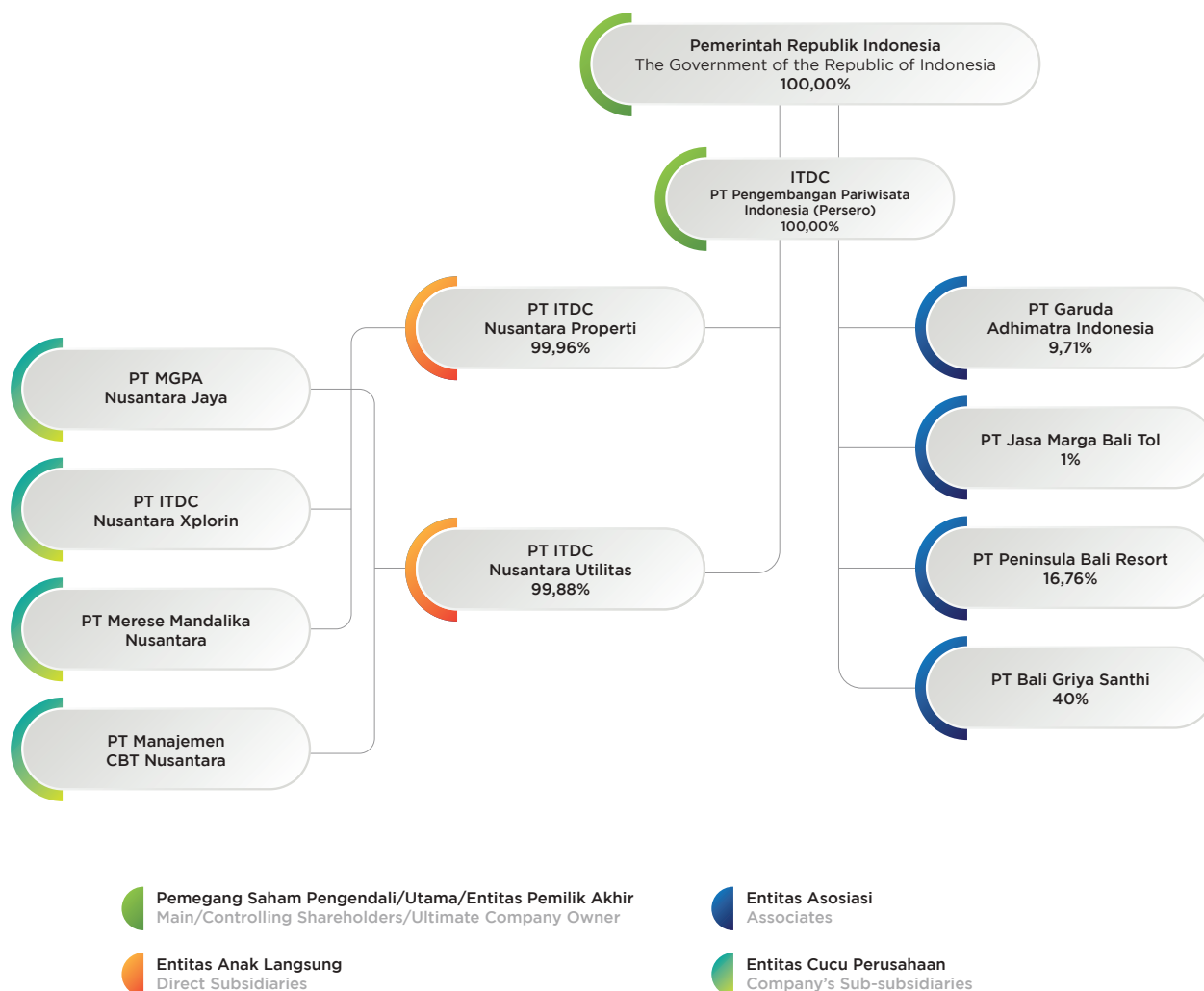
● 99,00%
PT ITDC Nusantara Properti

Manajemen Kunci PT Merese Mandalika Nusantara per 31 Desember 2023
PT Merese Mandalika Nusantara Key Management as of December 31, 2023

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Ari Respati
Komisaris Commissioner	-
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Dewa Sutarsa Jiwa
Direktur Director	-

Struktur Grup

Group Structure





Kronologi Penerbitan Saham

Chronology of Share Issuance

Sampai dengan 31 Desember 2023, ITDC tidak melakukan perdagangan saham kepada publik dan pencatatan saham di bursa efek baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham mencakup tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan nama bursa di mana saham dicatatkan.

Until December 31, 2023, ITDC did not trade shares with the public or list shares on stock exchanges either in Indonesia or abroad. Therefore, there is no information regarding share trading including the year of share issuance, number of shares, nominal value of shares, and share offering price for each corporate action; number of registered shares after each corporate action; and the name of the exchange where the shares are listed.

Kronologi Penerbitan atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance or Other Securities Listing

Per 31 Desember 2021, ITDC tidak menerbitkan efek seperti obligasi, sukuk, obligasi konversi atau efek lainnya di bursa efek baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of December 31, 2021, ITDC did not issue securities such as bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities on stock exchanges either in Indonesia or abroad. Thus, there is no information regarding the name of other securities, year of issuance of other securities, interest rate/yield on other securities, and maturity date of other securities; value of other securities offerings; the name of the exchange where the other securities are listed; and effect ratings.

Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Institutions and Professionals

Daftar Lembaga dan Profesi Penunjang

List of Supporting Institutions and Professionals

Nama Name	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Form of Services	Biaya Fees	Periode Penugasan Assignment Period
Kantor Akuntan Publik Public Accountant				
Kantor Akuntan Publik Public Accountant Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	RSM Indonesia, Plaza Asia Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 Indonesia	Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Financial Report Audit for the 2023 Financial Year	Rp1.023.000.000	2023

Daftar Lembaga dan Profesi Penunjang

List of Supporting Institutions and Professionals

Nama Name	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Form of Services	Biaya Fees	Periode Penugasan Assignment Period
Konsultan Hukum Legal Consultant				
Sandiva Legal Network	Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950	1. Penyusunan Kajian Skema Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupate/Kota Terkait Penyelenggaraan Event International	Rp734.000.000	2023
		1. Preparing a Study of Provincial and Regency/ City Regional Government Cooperation Schemes Related to Organizing International Events		
		2. Penyusunan Kajian Pembayaran BPHTB Golo Mori Pendampingan Hukum Sehubungan Penataan Anak Dan Cucu Perusahaan	Rp421.000.000	
		2. Preparation the BPHTB of Golo Mori Payment Review Legal Assistance Regarding Company Arrangement of Subsidiaries and Sub- subsidiaries		
GBP Associates & Counselors	Permata Mediterania Cluster Emerald No. ER19, RT. 002 RW009, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1. Penyusunan Kajian Skema Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupate/Kota Terkait Penyelenggaraan Event International	Rp734.000.000	2023
		1. Preparing a Study for Provincial and Regency/ City Regional Government Cooperation Schemes Related to Organizing International Events		
		2. Penyusunan Kajian Pembayaran BPHTB Golo Mori	Rp421.000.000	
		2. Preparation of BPHTB Golo Mori Payment Study		
Reggie Tentero	Plaza Asia lantai 3 suite 3 D, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190	Pendampingan Hukum Sehubungan Penataan Anak Dan Cucu Perusahaan Legal Assistance Regarding Company Arrangements for Subsidiaries and Sub- subsidiaries	Rp515.000.000	2023



Daftar Lembaga dan Profesi Penunjang

List of Supporting Institutions and Professionals

Nama Name	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Form of Services	Biaya Fees	Periode Penugasan Assignment Period
Konsultan Hukum Hendra Soenardi & Partner	Lt. 38 Menara Pertiwi Jl. Mega Kuningan Barat III No. 3 Jakarta Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950	Jasa Penyusunan Novasi Perjanjian Sewa Untuk Infrastruktur Mekanikal dan Elektrikal Pit Building serta Dokumen Pendukung Lainnya Services for Preparing Lease Agreement Novations for Pit Building Mechanical and Electrical Infrastructure and Other Supporting Documents	Rp96.050.000	2023
Budidjaja International Lawyers	Sahid Sudirman Centre Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220	Pendampingan ITDC dalam Sengketa Arbitrase di SIAC ITDC Assistance in Arbitration Disputes at SIAC	Rp400.000.000	2023
Fazki Consultant Partners	Jl. Al-Hikmah No. 34, RT. 002/RW. 002 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Tangerang 15520	Jasa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pendaftaran Merek The Golo Mori managed by ITDC dan Golo Mori Convention Center & Logo Intellectual Property Rights Consultant Services for Brand Registration of The Golo Mori managed by ITDC and Golo Mori Convention Center & Logo	Rp62.857.143	2023
GHP Law Firm	World Trade Center 3, Level 27 Jl. Jend Sudirman No. RT. 8, Karet Kuningan Kav. 29-31, Jakarta 12920	Jasa Penyusunan Kajian Terkait Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan antara ITDC dgn PT NII dan Pemprov Bali Study Preparation Services Related to Land Use Cooperation Agreement between ITDC with PT NII and Bali Provincial Government	Rp60.000.000	2023
		Jasa Penyusunan Legal Memorandum Tentang Analisis Legal atas Penyesuaian Harga Dan Klaim Kontraktor Berdasarkan Kontrak Konstruksi dari ITDC Legal Memorandum Preparation Services Concerning Legal Analysis of Price Adjustments and Contractor Claims Based on Construction Contracts from ITDC	Rp125.000.000	

Daftar Lembaga dan Profesi Penunjang

List of Supporting Institutions and Professionals

Nama Name	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Form of Services	Biaya Fees	Periode Penugasan Assignment Period
Notaris Notary				
Desman, S.H., M.Hum	Jl. Walet Indah 5 No. 11-A, RT/RW 014/006, Kel/Desa Kapuk Muara, Kec Penjaringan, Jakarta Utara, Prov DKI Jakarta	Jasa Notaris Pengurusan Akta Pernyataan KPPS ITDC Notary Services for Processing KPPS ITDC Statement Deeds	Rp7.800.000	2023
Jasa Penilai Appraiser Service				
Padma KKA Riana dan Rekan Padma KKA Riana and Partners	District 8, Treasury Tower, Lantai 6 N, SCBD, Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta District 8, Treasury Tower, 6th Floor N, SCBD, Senayan Kebayoran Baru, South Jakarta, DKI Jakarta	Perhitungan Aktuaria Kewajiban diestimasi Imbalan Pasca-Kerja PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atas valuasi per 31 Desember 2023 Actuarial Calculation of Post-Employment Benefits Estimated Liability of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia on valuation as of December 31, 2023	Rp52.156.500	Desember 2023 2023 December

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan 6 (enam) Tahun Terakhir 2018-2023

List of Public Accountant and Accountant in the Past 6 Years (2018-2023)

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Opini Opinion	Biaya Fees
2023	Chairul Wismoyo	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp1.023.000.000
2022	Chairul Wismoyo	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp900.000.000
2021	Muhammad Kurniawan	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp603.487.500
2020	Muhammad Kurniawan	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp574.750.000
2019	Muhammad Kurniawan	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp763.400.000
2018	Muhammad Kurniawan	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp875.930.000



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certification

Penghargaan yang Diperoleh Perusahaan di Tahun 2023

Awards Received by the Company in 2023

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Award	Diberikan oleh Awarded by
27 Oktober 2023 October 27, 2023	Digital 5.0 KIP BUMN Awards 2023 - The Most Popular & Active BUMN by Audience	BUMN Track
8 Desember 2023 December 8, 2023	BUMN CSR Award - Gold Award Grade 200	BALI CSR Award

Sertifikasi yang Masih Berlaku Hingga Tahun 2023

Certificate Valid until 2023

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Issuance Date	Jenis Sertifikat Type of Certificate	Dikeluarkan oleh Issued by	Masa Berlaku Hingga Validity Period
8 Desember 2020 December 8, 2020	Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Certificate of Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001:2016	Garuda Sertifikasi Indonesia Garuda Indonesia Certification	7 Desember 2023 December 7, 2023
26 September 2019 September 26, 2019	Sertifikat Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Sustainable Tourism Destination Certificate	Lembaga Sertifikasi Dewan Kepariwisata Berkelanjutan Indonesia (Ls-Pro ISTC) Indonesia Sustainable Tourism Council Certification Institute (Ls- Pro ISTC)	10 September 2025 September 10, 2025

Daftar Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, serta Informasi tentang Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

List of Addresses of Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and Information on Branches and Representative Offices

Kantor Pusat

Head Office

Nama Perusahaan Company Name	Alamat Address
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	Menara BCA lantai 39 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, 10310 Indonesia Tel: +62-21 80642791 Email: info@itdc.co.id Situs Web: www.itdc.co.id
Kantor Nusa Dua Nusa Dua Office	Kawasan Pariwisata Nusa Dua P.O Box 3 Nusa Dua Badung, 80361 Bali, Indonesia Tel: +62-361 771010 Fax: +62-361 771014
Kantor Mandalika Mandalika Office	Komplek Masjid Nurul Bilad Jl. Pariwisata Pantai Kuta Kuta, Pujut, Lombok Tengah, 83573 Nusa Tenggara Barat, Indonesia Tel: +62-370 6502777
Kantor Golo Mori Golo Mori Office	The Golo Mori Kawasan MICE Golo Mori, Desa Golo Mori Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, 86763 Tel: 0385-2381 000, 0385-2381 029 Email : info.golomori@itdc.co.id

Entitas Anak

Subsidiaries

Nama Perusahaan Company Name	Alamat Address
PT ITDC Nusantara Properti	Menara BCA Lantai 39 Jl. M.H. Thamrin No. 1 (Kantor ITDC), Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10310 Indonesia Tel: +62-21 80642791
PT ITDC Nusantara Utilitas	Menara BCA Lantai 39 Jl. M.H. Thamrin No. 1 (Kantor ITDC), Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Indonesia Tel: +62-21 80642791



Entitas Asosiasi Associated Entity

Nama Perusahaan Company Name	Alamat Address
PT Bali Griya Shanti	Lot. SW3. Jalan Terompong Nusa Dua, Lingkungan Peminge Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali Tel: +62-361 8467000
PT Peninsula Bali Resort	Kawasan Pariwisata Lot. SW1 Nusa Dua, Badung, Bali Tel: +62-361 3003888
PT Jasa Marga Bali Tol	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 88X Pemogan, Denpasar Selatan Kota Denpasar, Bali 80361 Tel: +62-361 725326
PT Garuda Adi Matra	Jl. Raya Uluwatu, Ungasan Kuta Selatan, Badung 80364 PO BOX 139 Nusa Dua, Bali Tel: +62-361 703603 Fax: +62-361 703626

Entitas Cucu Sub-subsidiaries

Nama Perusahaan Company Name	Alamat Address
PT ITDC Nusantara Xplorin	Menara BCA Lantai 39 Jl. M.H. Thamrin No. 1 (Kantor ITDC), Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Indonesia Tel: +62-21 80642791
PT Merese Mandalika Nusantara	Komplek Masjid Nurul Bilad Jl. Pariwisata Pantai Kuta Kuta Pujut, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Indonesia Tel: (0370) 65027777
PT MGPA Nusantara Jaya	Menara BCA Lantai 39 Jl. M.H. Thamrin No. 1 (Kantor ITDC), Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Indonesia Tel: +62-21 80642791

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on the Company Website

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan yang salah satunya dapat diakses melalui situs web yang beralamat di www.itdc.co.id sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dalam upaya membentuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Semua informasi yang disajikan dalam situs web Perusahaan senantiasa diperbaharui secara berkala untuk memberikan informasi terupdate bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

Selain itu, situs resmi Perusahaan menyajikan Informasi dalam dua Bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2015, seperti:

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia provides information to stakeholders, one of which can be accessed via the website located at www.itdc.co.id as part of the principle of openness to establish Good Corporate Governance. All information presented on the Company's website is updated regularly to provide the most up-to-date information for all stakeholders and the general public.

In addition, the Company's official website presents information in two languages, namely Indonesian and English and has fulfilled the information that must be published in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.4/2015 concerning Issuer or Public Company Websites which were stipulated on June 25, 2015, such as:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Note
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Shareholder information down to the individual final owner	✓	https://itdc.co.id/about-us
Isi Kode Etik Content of Code of Conduct	✓	https://itdc.co.id/good-corporate-governance
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes agenda items discussed at the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the invitation to the GMS, the date of the GMS, the date the summary of the minutes of the GMS was announced.	✓	Belum diungkapkan pada web Perusahaan dan akan segera ditindaklanjuti Has not been disclosed on the Company's website and will be followed up soon.
Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir) Annual Financial Report (last 5 years)	✓	https://itdc.co.id/annual-report
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	https://itdc.co.id/directors-andmanagements
Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Satuan Kerja Audit Internal Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Working Unit	✓	https://itdc.co.id/good-corporategovernance

v = tersedia pada situs web Perusahaan | Available at the Company website

x = belum tersedia pada situs web Perusahaan | Unavailable at the Company website



Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Education and/or Training for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal di sepanjang tahun 2023.

The following is information about the competency improvement program for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit throughout 2023.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material for Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Ricky Joseph Pesik	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
Irzani	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Pelatihan Manajerial Managerial Training	Komisaris Profesional : Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab Professional Commissioner: Become a Competent and Responsible Commissioner	Hotel Mulia Senayan Jakarta 25 - 26 Oktober 2023 October 25-26, 2023	PT Inti Pesan
	Workshop	Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi Strengthening Integrity and Anti-Corruption Culture	Hybrid 12 Desember 2023 December 12, 2023	DJKN Bali Nusra dan KPK
Zainal Mutaqin	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Teknikal Training & Certification for Technical Competention	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification	Hotel Neo Tendean 15-17 November 2023 November 15-17, 2023	CRMS Indonesia
Ulin Ni'am Yusron	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material for Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Direksi Board of Directors				
Ari Respati	Pelatihan Manajerial Managerial Training	Finance Essentials for High Level Executive 2023	Hotel Sari Pacific Jakarta 07-09 Maret 2023 March 7-9, 2023	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) & IPMI International Business School
	Pelatihan Kompetensi Teknikal Technical Competention Training	Investment Opportunity in Mandalika : Investment Guidance & Regulation	Online Based Training 20 Maret 2023 March 20, 2023	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Pelatihan Manajerial Managerial Training	One Day Outing (ORE) Workshop : Focusing on Developing & Aligning Service Mindset	Auditorium Gedung 600, Kantor Pusat Angkasa Pura 30 Maret 2023 March 30, 2023	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
Ahmad Fajar	Pelatihan Manajerial Managerial Training	One Day Outing (ORE) Workshop : Focusing on Developing & Aligning Service Mindset	Auditorium Gedung 600, Kantor Pusat Angkasa Pura 30 Maret 2023 March 30, 2023	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
	Pelatihan Manajerial Managerial Training	Risk Forum Jenjang 7 : Perbankan Indonesia dalam Mendukung Indonesia Menuju Low Carbon Economy Risk Forum Level 7: Indonesian Banking in Supporting Indonesia Towards a Low Carbon Economy	Online Based Training 07 Desember 2023 December 7, 2023	BARa Risk Forum Online
	Workshop	Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi Strengthening Integrity and Anti-Corruption Culture	Hybrid 12 Desember 2023 December 12, 2023	DJKN Bali Nusra dan KPK
	Pelatihan Kompetensi Teknikal Technical Competention Training	Refreshment Workshop : Treasury and Risk Management	Hybrid 14-15 Desember 2023 December 14-15, 2023	PT Synergy Daya Utama



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material for Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Wenda R. Nabel	Pelatihan Manajerial Managerial Training	Finance Essentials for High Level Executive 2023	Hotel Sari Pacific Jakarta 07-09 Maret 2023 March 7-9, 2023	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) & IPMI International Business School
	Pelatihan Kompetensi Teknikal Technical Competention Training	Investment Opportunity in Mandalika : Investment Guidance & Regulation	Online Based On Training 20 Maret 2023 March 20, 2023	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Pelatihan Manajerial Managerial Training	One Day Outing (ORE) Workshop : Focusing on Developing & Aligning Service Mindset	Auditorium Gedung 600, Kantor Pusat Angkasa Pura 30 Maret 2023 March 30, 2023	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
	Pelatihan Kompetensi Teknikal Technical Competention Training	Refreshment Workshop : Treasury and Risk Management	Hybrid 14-15 Desember 2023 December 14-15, 2023	PT Synergy Daya Utama

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material for Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Ema Widiastuti	Pelatihan Manajerial Managerial Training	Finance Essentials for High Level Executive 2023	Hotel Sari Pacific Jakarta 07-09 Maret 2023 March 7-9, 2023	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) & IPMI International Business School
	Pelatihan Kompetensi Teknikal Technical Competention Training	Investment Opportunity in Mandalika : Investment Guidance & Regulation	Online Based On Training 20 Maret 2023 March 20, 2023	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Pelatihan Kompetensi Teknikal Technical Competention Training	Pelatihan tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan Tim Sales ITDC agar lebih profesional dan mencapai target Perusahaan Training on the attitudes, knowledge and skills of the ITDC Sales Team to be more professional and achieve Company targets	Wantilan Kantor ITDC The Nusa Dua 20-21 Juni 2023 June 20-21, 2023	PT Komunika Cipta Performa
	Seminar	Pengembangan Potensi Kearifan Lokal Nusantara Sebagai Solusi dan Inspirasi dalam Era Resiliensi Global Developing the Potential of Local Wisdom as a Solution and Inspiration in the Era of Global Resilience	Komplek Keraton Ratu Boko (TWC) 27 Juli 2023 July 27, 2023	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
	Seminar	Seminar Nasional Dies Natalis XXXIX (Ke-39) ISI Yogyakarta (Menuju Indonesia Emas Akselerasi SDM Kreatif dan Inovatif) ISI Yogyakarta XXXIX (39th) Anniversary National Seminar (Towards a Golden Indonesia Accelerating Creative and Innovative Human Resources)	Kampus ISI Yogyakarta 23 Agustus 2023 August 23, 2023	Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta
	Seminar	8th Tourism Hotel Investment & Networking Conference	Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 06-07 September 2023 September 6-7, 2023	THINC Indonesia



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material for Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Troy Reza Warokka	Pelatihan Manajerial Managerial Training	Finance Essentials for High Level Executive 2023	Hotel Sari Pacific Jakarta 07-09 Maret 2023 March 7-9, 2023	PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) & IPMI International Business School
	Workshop	In-House Training (IHT) Sosialisasi Fasilitas dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika In-House Training (IHT) Socialization of Facilities in the Mandalika Special Economic Zone (KEK).	Royal Hall Paddock Sirkuit Mandalika 09 Februari 2023 February 9, 2023	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Bea Cukai, dan Dewan KEK Nasional
	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Seminar	NextDev Summit Business Matching and Investors Meet-Up	Mbloc Space Jakarta 07 Juni 2023 June 7, 2023	Telkomsel
	Pelatihan Manajerial Managerial Training	One Day Outing (ORE) Workshop : Focusing on Developing & Aligning Service Mindset	Auditorium Gedung 600, Kantor Pusat Angkasa Pura 30 Maret 2023 March 30, 2023	PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)
Komite Audit Audit Committee				
Dayan Hakim Natigor S.	Workshop	Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi Strengthening Integrity and Anti-Corruption Culture	Hybrid 12 Desember 2023 December 12, 2023	DJKN Bali Nusra dan KPK
Taufik Hidayat	Workshop	Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi Strengthening Integrity and Anti-Corruption Culture	Hybrid 12 Desember 2023 December 12, 2023	DJKN Bali Nusra dan KPK
Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee				
Ricky Joseph Pesik	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material for Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Irzani	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Pelatihan Manajerial Managerial Training	Komisaris Profesional: Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab Professional Commissioner: Become a Competent and Responsible Commissioner	Hotel Mulia Senayan Jakarta 25-26 Oktober 2023 October 25-26, 2023	PT Inti Pesan
	Workshop	Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi Strengthening Integrity and Anti-Corruption Culture	Hybrid 12 Desember 2023 December 12, 2023	DJKN Bali Nusra dan KPK
Zainal Mutaqin	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Teknikal Training & Certification for Technical Competention	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification	Hotel Neo Tendean 15-17 November 2023 November 15-17, 2023	CRMS Indonesia
Ulin Ni'am Yusron	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee				
Rachman Gifar	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Workshop	Audit Sistem Manajemen ISO 19011 : 2018 ISO 19011 Management System Audit: 2018	Online Based Training 19 Mei 2023 May 19, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Teknikal Training & Certification for Technical Competention	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification for Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Hotel Neo Tendean 15-17 November 2023 November 15-17, 2023	CRMS Indonesia



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material for Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
	Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Teknikal Training & Certification for Technical Competention	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMPA) Training and Certification for Certified Risk Management Professional (CRMPA)	Online Based Training 09-10 Oktober 2023 October 9-10, 2023	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) & Dilatih.Co
	Workshop	Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi Strengthening Integrity and Anti-Corruption Culture	Hybrid 12 Desember 2023 December 12, 2023	DJKN Bali Nusra dan KPK
Irfani Fithria Ummul Muzayanah	Workshop	Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi Strengthening Integrity and Anti-Corruption Culture	Hybrid 12 Desember 2023 December 12, 2023	DJKN Bali Nusra dan KPK
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary				
	Seminar	Parents Role in Child Development Process	Online Base Training 24 Januari 2023 January 24, 2023	RS Bunda Morula Nusa Dua
	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Workshop	Audit Sistem Manajemen ISO 19011 : 2018 ISO 19011 Management System Audit: 2018	Online Based Training 19 Mei 2023 May 19, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
Hanna Loise M. Pandjaitan	Workshop	Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi Strengthening Integrity and Anti-Corruption Culture	Hybrid 12 Desember 2023 December 12, 2023	DJKN Bali Nusra dan KPK
	Pelatihan Kompetensi Teknikal Technical Competention Training	Refreshment Workshop : Treasury and Risk Management	Hybrid 14-15 Desember 2023 December 14-15, 2023	PT Synergy Daya Utama

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material for Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Kepala Audit Internal Head of Internal Audit				
Muhammad Slamet Umarjadikusumah	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknikal Training & Certification for Technical Competention	Certified Internal Audit Executive (CIAE) Batch VII	Online Based Training dan Hotel Aryaduta Menteng 06 Februari – 14 Maret 2024 February 6-March 14, 2024	LSM Pusdiklatwas BPKP
	Workshop	Pencegahan Korupsi Terintegrasi oleh KPK Integrated Corruption Prevention by KPK	Online Based Training 03 Februari 2024 February 3, 2024	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
	Workshop	Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System SNI ISO 37001: 2016	Online Based Training 17 Mei 2023 May 17, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Workshop	Audit Sistem Manajemen ISO 19011 : 2018 ISO 19011 Management System Audit: 2018	Online Based Training 19 Mei 2023 May 19, 2023	PT Bintang Mas Management Consulting
	Pelatihan Kompetensi Teknikal Technical Competention Training	Business Judgement Rule Pengadaan Barang/Jasa sesuai Omnibus Law BUMN Business Judgment Rules for Procurement of Goods/Services in accordance with the SOEs Omnibus Law	Hotel Sunlake Sunter, Jakarta Utara 01-02 November 2023 November 1-2, 2023	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)



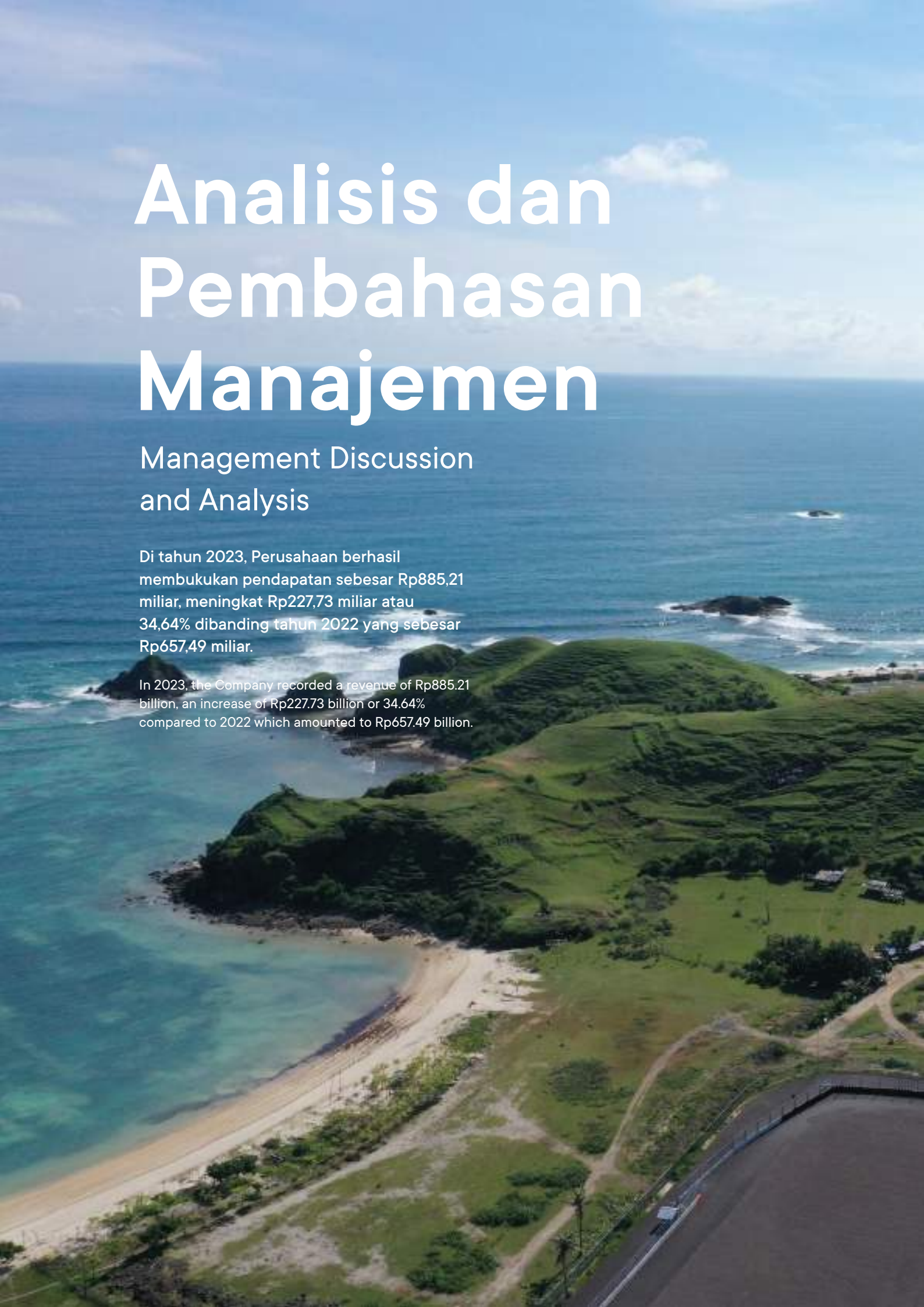
Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Material for Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
	Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Teknikal Training & Certification for Technical Competention	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMPA) Training and Certification for Certified Risk Management Professional (CRMPA)	Online Based Training 09-10 Oktober 2023 October 9-10, 2023	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) & Dilatih.Co
	Pelatihan Kompetensi Teknikal Technical Competention Training	Refreshment Workshop : Treasury and Risk Management	Hybrid 14-15 Desember 2023 December 14-15, 2023	PT Synergy Daya Utama
	Pelatihan Kompetensi Teknikal Technical Competention Training	Audit Internal Berbasis Risiko serta Melakukan Auditing atas Laporan Keuangan Risk-Based Internal Audit and Auditing of Financial Reports	Hotel Oasis Amir 20 -21 Desember 2023 December 20-21, 2023	Lembaga Berantas Korupsi Indonesia (LBKI)

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Di tahun 2023, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp885,21 miliar, meningkat Rp227,73 miliar atau 34,64% dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp657,49 miliar.

In 2023, the Company recorded a revenue of Rp885.21 billion, an increase of Rp227.73 billion or 34.64% compared to 2022 which amounted to Rp657.49 billion.





04

Tinjauan Perekonomian dan Industri

Economic and Industrial Overview



Analisis Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian global di tahun 2023 masih menunjukkan perlambatan seiring dengan masih berlanjutnya dampak dari ketegangan geopolitik global. Dikutip dari Laporan Perekonomian Bank Indonesia tahun 2023, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan terus melambat dari tahun 2022 sebesar 3,5% menjadi 3,0% di tahun 2023, dan akan terus melambat menjadi 2,8% di tahun 2024. Sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global, inflasi di berbagai negara-negara dunia masih tercatat cukup tinggi, yakni sebesar 6,8% atau terbilang cukup jauh dari sasaran inflasi yang ingin dicapai, khususnya bagi negara-negara maju, yang sebesar 2%.

Untuk meredam tingkat inflasi yang cukup tinggi, sejumlah negara terus mempertahankan suku bunganya pada tingkat yang cukup tinggi untuk waktu yang lama (*higher for longer*). Kebijakan ini juga diterapkan oleh bank sentral negara-negara besar, termasuk Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed). The Fed menerapkan

Global and National Economic Analysis

Global economic conditions in 2023 was still show a slowdown in line with the continuing impact of global geopolitical tensions. Quoted from the 2023 Bank Indonesia Economic Report, global economic growth expected to continue to slow from 3.5% to 3.0% in 2023, and will continue to slow to 2.8% in 2024. In line with weakening growth global economy, inflation in various countries in the world is still recorded as quite high, namely 6.8% or quite far from the inflation target to be achieved, especially for developed countries, which is 2%.

To reduce the relatively high level of inflation, a number of countries continue to maintain their interest rates at a fairly high level for a long time (*higher for longer*). This policy is also implemented by central banks of big countries, including the Central Bank of the United States, the Federal Reserve (The Fed). The Fed implemented this policy



kebijakan tersebut dengan menjaga tingkat suku bunga Fed Funds Rate (FFR) pada Desember 2023 untuk berada di level 5,25%-5,50%. Kebijakan ini ditujukan agar The Fed dapat memicu aliran keluar modal asing dari negara berkembang ke negara maju, serta mendorong penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap berbagai mata uang dunia.

Meski menghadapi kondisi yang cukup menantang, dari dalam negeri Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terjaga di level 5,04%. Meski sedikit lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang sebesar 5,31%, namun kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil didukung oleh berbagai komponen pada sektor lapangan usaha. BPS mencatatkan bahwa dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang sebesar 13,96%. Sementara, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

Bank Indonesia juga mencatatkan bahwa tingkat inflasi di dalam negeri berhasil dikendalikan secara baik sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah yang tetap terjaga. BI juga berhasil mengendalikan tingkat inflasi untuk berada pada level 2,61% atau mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tingkat inflasi tahun 2022 yang sebesar 5,51%. Keberhasilan ini juga kemudian mendorong BI untuk terus memperkuat bauran kebijakan moneter dengan meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna memastikan tingkat inflasi tetap stabil, yakni pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2024 dan 2025.

Analisis Segmen Industri

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh optimisme bagi industri pariwisata nasional seiring dengan kembali normalnya kondisi pascapandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir. Kembali dibukanya destinasi wisata berhasil menarik kunjungan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. BPS mencatatkan bahwa pada Desember 2023, kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia adalah sebesar 1,14 juta kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 20,17% dibanding tahun 2022. Berdasarkan data dari

by maintaining the Fed Funds Rate (FFR) interest rate in December 2023 at 5.25%-5.50%. This policy is intended so that the Fed can trigger an outflow of foreign capital from developing countries to developed countries, as well as encourage the strengthening of the United States (US) dollar against various world currencies.

Despite facing quite challenging conditions, domestically the Statistics Indonesia (BPS) recorded that Indonesia's economic growth was maintained at the level of 5.04%. Although slightly lower than the 2022 achievement of 5.31%, this condition shows that Indonesia's economic growth is relatively stable, supported by various components in the business sector. BPS noted that in terms of production, the highest growth occurred in the transportation and warehousing business sector, which amounted to 13.96%. Meanwhile, in terms of expenditure, the highest growth was achieved by the Consumption Expenditure of Nonprofit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) at 9.83%.

Bank Indonesia also noted that the domestic inflation rate was successfully controlled in line with the stability of the Rupiah exchange rate which was maintained. BI also succeeded in controlling the inflation rate to 2.61% or experienced a significant decline compared to the inflation rate in 2022 which was 5.51%. This success has also encouraged BI to continue to strengthen the monetary policy mix by increasing synergy between the Central and Regional Governments to ensure that the inflation rate remains stable, namely in the range of $2.5 \pm 1\%$ in 2024 and 2025.

Industry Segment Analysis

2023 is a year full of optimism for the national tourism industry as conditions return to normal after the Covid-19 pandemic that has occurred in the last few years. Reopening of tourist destinations has succeeded in attracting foreign tourists to visit Indonesia. BPS recorded that in December 2023, foreign tourist arrivals in Indonesia were 1.14 million visits or an increase of 20.17% compared to 2022. Based on data from BPS, the number of foreign tourists coming to Indonesia was dominated by Malaysian tourists (18.45%), then Singapore (16.41%)

BPS, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia didominasi oleh wisatawan Malaysia (18,45%), kemudian Singapura (16,41%) dan Australia (11,87%). Secara kumulatif, BPS mencatatkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2023 meningkat hingga 98,30% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama tercatat pada pintu Bandara Ngurah Rai, Bali dan Soekarno-Hatta, Tangerang, di mana masing-masing bandara mengalami peningkatan hingga 143,64% dan 108,95%.

Perbaikan kondisi yang terjadi di industri pariwisata ini juga tercermin dari peningkatan tingkat penghunian kamar (TPK) di hotel. Berdasarkan data dari BPS, TPK di hotel bintang pada Desember 2023 mencapai 59,74%, naik 2,84 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sejalan dengan TPK hotel bintang, TPK hotel non bintang pada Desember 2023 tercatat mencapai 28,67%, naik 2,22 poin dari tahun sebelumnya. Meski demikian, rata-rata lama tamu menginap di hotel berbintang mengalami penurunan sebesar 0,05 poin dibandingkan tahun lalu, yaitu mencapai 1,57 hari.

Melihat tren industri pariwisata yang positif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menilai bahwa seluruh capaian tersebut berhasil melebihi target batas atas kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2023 yang sebesar 8,5 juta kunjungan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam di seluruh penjuru negeri, Pemerintah melalui Kemenparekraf melihat peluang tersebut dengan merancang kunjungan ke beberapa negara untuk semakin menyemarakkan upaya industri untuk terus berpromosi, sehingga nanti pada akhirnya kita mampu untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun-tahun mendatang.

and Australia (11.87%). Cumulatively, BPS recorded that foreign tourist visits throughout 2023 increased by 98.30% compared to 2022. This increase was mainly recorded at the airport gate. Ngurah Rai, Bali and Soekarno-Hatta, Tangerang, where each airport experienced an increase of up to 143.64% and 108.95%.

The improvement in conditions occurring in the tourism industry is also reflected in the increase in room occupancy rates (TPK) in hotels. Based on data from BPS, the TPK in Bintang hotels in December 2023 reached 59.74%, an increase of 2.84 points compared to 2022. In line with the TPK for star hotels, the TPK for non-star hotels in December 2023 was recorded at 28.67%, an increase 2.22 points from the previous year. However, the average length of stay for guests at star-rated hotels decreased by 0.05 points compared to last year, reaching 1.57 days.

Seeing positive tourism industry trends, the Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf) assesses that all these achievements have succeeded in exceeding the target limit for foreign tourist visits in 2023, which is 8.5 million visits. Indonesia as a country that is rich in culture and natural resources throughout the country, the Government through the Minister of Tourism and Creative Economy sees this opportunity by planning visits to several countries to further enliven the industry's efforts to continue to promote, hence in the end we will be able to continue to increase foreign tourist visits in future years.



Tinjauan Operasional

Operational Overview

Strategi Perusahaan

Pada awal tahun 2023, ITDC telah menyusun dan menetapkan rencana strategis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagaimana tertuang pada RKAP 2023, bahwa kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan RKAP Tahun 2023 adalah berfokus pada Sewa lahan, Optimalisasi aset, Collection, Event. Keempat fokus tersebut menjadi dasar acuan setiap direktorat dalam menyusun strategi yang akan diterapkan di tahun 2023 Berikut. Disampaikan fokus strategi tiap direktorat antara lain:

1. Direktorat Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko:

Pada tahun 2023, Direktorat Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko sehingga tercipta ketahanan kas Perusahaan dalam menghadapi krisis akibat Pandemi Covid-19, serta Perusahaan juga harus menjaga beberapa parameter keuangan yang menjadi covenant dalam pengajuan proses pendanaan pihak ketiga.

2. Direktorat Pengembangan Bisnis:

Pada tahun 2023 diasumsikan 100% tagihan sesuai dengan LUDA dengan asumsi tenant beroperasi normal dengan strategi-strategi pemulihan yang dilakukan masing-masing tenant. Selain itu, Direktorat Pengembangan Bisnis akan berfokus pada pencarian investor baru untuk lahan di The Mandalika dan memaksimalkan aset produktif perusahaan melalui departemen komersial masing-masing wilayah kerja.

3. Direktorat Operasi

Pada tahun 2023, Direktorat Operasi akan berfokus pada pengembangan inovasi bisnis *non-core* melalui pengembangan wisata event dan diharapkan akan meningkatkan branding perusahaan. Selain itu, Direktorat Operasi dan Bisnis Inovasi akan mengembangkan bisnis DMO yang saat ini telah ada beberapa kawasan wisata yang telah MoU dengan ITDC, serta akan memaksimalkan kinerja SBU untuk dapat meningkatkan pendapatan.

4. Direktorat SDM & Legal Compliance

Pada tahun 2023, Direktorat SDM & Legal Compliance akan berfokus pada pengembangan SDM untuk memenuhi formasi jabatan sesuai

Company Strategy

At the beginning of 2023, ITDC has prepared and established strategic plan for conducting its business activities. As stated in the 2023 RKAP, the policy implemented in preparing the 2023 RKAP is to focus on land rental, asset optimization, collections, events. These four focuses are the basis of reference for each directorate in developing strategies that were implemented in 2023. The following are strategic focuses for each directorate, including:

1. Directorate of Finance, Strategy and Risk Management

In 2023, the Directorate of Finance, Strategy and Risk Management has created cash resilience for the Company in facing the crisis caused by the Covid-19 Pandemic, and the Company also maintained several financial parameters which were covenants in the application for third party funding processes.

2. Business Development Directorate:

In 2023, it is assumed that 100% of bills were in accordance with LUDA, assuming tenants operate normally with recovery strategies carried out by each tenant. In addition, the Business Development Directorate will focus on finding new investors for land in The Mandalika and maximizing the company's productive assets through the commercial departments of each work area.

3. Operations Directorate

In 2023, the Operations Directorate was focused on developing non-core business innovation through developing event tourism and is expected to improve company branding. Apart from that, the Directorate of Operations and Innovation Business will develop the DMO business, which currently has several tourist areas that have MoUs with ITDC, and will maximize SBU performance to increase revenue.

4. HR & Legal Compliance Directorate

In 2023, the HR & Legal Compliance Directorate was focused on developing human resources to fulfill position formation according to needs to

dengan kebutuhan untuk penguatan kinerja perusahaan. Selain itu dengan fungsi baru terkait pengelolaan aset akan meningkatkan pemantauan seluruh aset Perusahaan.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

Membaiknya kondisi industri pariwisata pasca pandemi Covid-19 turut memberikan dampak yang positif bagi kinerja Perusahaan. Perbaikan ini juga berhasil membawa Perusahaan untuk terus meningkatkan citra positif pada *brand identity* dan memiliki *positioning* yang lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, ITDC berupaya untuk mengembangkan bisnis dan nilainya dengan menjalin kerja sama dengan para pelaku industri pariwisata lainnya, Pemerintah Daerah, dan UMKM. Selain itu, ITDC selaku anggota holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata senantiasa melakukan sinergi dengan holding. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang merupakan landasan tata kelola terintegrasi yang berkesinambungan dalam setiap program kerja dan investasi.

Adapun kegiatan pemasaran yang dilaksanakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan aktivasi-aktivasi baru pada 3 destinasi, baik yang digagas langsung oleh ITDC maupun bekerjasama dengan pihak lain. Dimana aktivasi atau kegiatan tersebut memberikan keuntungan Brand Exposure maupun Commercial Value kepada ITDC. Aktivasi yang dimaksud antara lain:
 - a. TGIF by Univlox yang diselenggarakan pada 4 Maret 2023 dan 14-16 Juli 2023 di Pulau Peninsula, The Nusa Dua.
 - b. Joyland Festival yang diselenggarakan pada 17-19 Maret 2023 di Peninsula, The Nusa Dua
 - c. L'etape 2023 yang diselenggarakan pada 27-28 Mei 2023 di The Mandalika.
 - d. Dream Machine 2023 yang diselenggarakan pada 9-11 Juni 2023 di Peninsula, The Nusa Dua
 - e. Shell Eco Marathon yang diselenggarakan pada 6 Juli 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit.
 - f. Pekan Raya Mandalika yang diselenggarakan pada 12-13 Agustus 2023 di Bazaar Mandalika.

strengthen company performance. In addition, new functions related to asset management will improve monitoring of all Company assets.

Marketing Aspect

Marketing Strategy

The improving conditions of the tourism industry after the Covid-19 pandemic have also had positive impact on the Company's performance. This improvement also succeeded in bringing the Company to continue to improve its positive image in brand identity and have stronger positioning compared to previous years. To ensure that this goal is achieved, ITDC strives to develop its business and value by collaborating with other tourism industry players, regional governments and MSMEs. Apart from that, ITDC as a member of the SOEs holding in the aviation and tourism sector always synergizes with the holding. The Company also always pays attention to Environmental, Social and Governance (ESG) aspects, which are the basis for sustainable integrated governance in every work and investment program.

Marketing activities in 2023 are as follows:

1. Organizing new activations in 3 destinations, either initiated directly by ITDC or in collaboration with other parties. Where the activation or activity provides Brand Exposure and Commercial Value benefits to ITDC. The activations in question include:
 - a. TGIF by Univlox which was held on March 4, 2023 and July 14-16, 2023 at Peninsula Island, The Nusa Dua.
 - b. Joyland Festival held on March 17-19, 2023 at Peninsula Island, The Nusa Dua.
 - c. L'etape 2023 held on May 27-28, 2023 at The Mandalika.
 - d. Dream Machine 2023 held on June 9-11, 2023 at Peninsula Island The Nusa Dua.
 - e. Shell Eco Marathon held on July 6, 2023 at Pertamina Mandalika International Circuit.
 - f. Mandalika Fair held on August 12-13, 2023 at Mandalika Bazaar.



- g. Bazaar Mandalika Seru yang diselenggarakan pada 12-15 Oktober 2023 di Bazaar The Mandalika dan Kuta Lane.
- h. Porsche Sprint Challenge yang diselenggarakan pada 8-10 Desember 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit.
2. Mengikuti Kegiatan Exhibition/Pameran dimana merupakan sebuah fasilitas ideal untuk menjalin hubungan bisnis dengan mitra potensial, calon investor, maupun perwakilan industri terkait. Kegiatan Pameran/Exhibition yang diikuti pada tahun 2023 yaitu:
 - Asian Tourism Forum yang diselenggarakan pada 2-5 Februari 2023 di Yogya Expo Centre, Yogyakarta.
3. Penyelenggaraan Event International di mana dimaksudkan untuk menambah Brand Value serta merambah kepercayaan investor asing selain daripada investor lokal terhadap destinasi-destinasi yang dimiliki oleh ITDC. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang diselenggarakan ITDC sebagai langkah awal dalam mempromosikan destinasi-destinasi tersebut, antara lain:
 - a. World Superbike (WSBK) yang diselenggarakan pada 2-5 Maret 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit.
 - b. Asian Road Racing Championship (ARRC) yang diselenggarakan pada 11-13 Agustus 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit.
 - c. MotoGP yang diselenggarakan pada 13-15 Oktober 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit.
- g. Mandalika Seru Bazaar held on October 12-15, 2023 at The Mandalika Bazaar and Kuta Lane.
- h. Porsche Sprint Challenge held on December 8-10, 2023 at Pertamina Mandalika International Circuit.
2. Participating in Exhibition activities which is an ideal facility to establish business relationships with potential partners, potential investors, and related industry representatives. Exhibition/Exhibition activities followed in 2023 are:
 - Asian Tourism Forum held on February 2-5, 2023 at Yogya Expo Center, Yogyakarta.
3. Organizing International Events to increase Brand Value and gain the trust of foreign investors in addition to local investors in the destinations owned by ITDC. These activities are activities organized by ITDC as a first step in promoting these destinations, including:
 - a. World Superbike (WSBK) held on March 2-5, 2023 at Pertamina Mandalika International Circuit.
 - b. Asian Road Racing Championship (ARRC) held on August 11-13, 2023 at Pertamina Mandalika International Circuit.
 - c. MotoGP held on October 13-15, 2023 at Pertamina Mandalika International Circuit.

Pangsa Pasar

Berdasarkan perkembangan 10 besar market The Nusa Dua, dapat dilihat bahwa yang selalu berada di peringkat pertama adalah Domestik, Australia dan USA. Meski demikian, adanya dampak COVID-19 telah terjadi penurunan dan perubahan signifikan terhadap top 10 market The Nusa Dua, baik di tahun 2023 maupun di periode yang sama tahun 2022.

Adapun perkembangan 10 Besar pangsa pasar kunjungan wisatawan The Nusa Dua Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Market Share

Based on the development of the top 10 markets in The Nusa Dua, it can be seen that those always in first place are Domestic, Australia and the USA. However, due to the impact of COVID-19 there has been significant decline and change in the top 10 markets of The Nusa Dua, both in 2023 and in the same period in 2022.

The development of the Top 10 market shares for tourist visits to The Nusa Dua in 2023 can be seen as follows:

Peringkat di 2023 Rank in 2023	Pasar Market	2023		2022		Peringkat di 2022 Rank in 2022
		Jumlah Total	Pangsa Pasar Market Share (%)	Jumlah Total	Pangsa Pasar Market Share (%)	
I	Domestik Domestic	263.658	30.12	266.636	46.00	I
II	Rusia Russia	28.715	3.2	17.451	3.01	II
III	USA	60.672	6.9	38.008	6.5	III
IV	Jepang Japan	20.064	2.2	6.586	1.13	IV
V	UK	43.309	4.9	13.098	3.7	V
VI	Malaysia	15.239.	1.7	7.391	1.27	VI
VII	Jerman Germany	33.570.	3.8	20.546	3.54	VII
VIII	Australia	200.403	22.8	101.843	17.57	VIII
IX	Singapore	34.535	3.9	18.663	3.21	IX
X	India	37.956	4.3	17.077	2.94	X
Jumlah Tamu Total Guests		738.121	84.33	516.006	89.02	
Negara Lainnya Other Countries		137.069	15.6%	63.595	16,04	
Total Tamu Total Guests		875.190	100,00	579.601	100,00	

Saat ini, ITDC telah mengembangkan kawasan the Mandalika di mana hanya terdapat 1 hotel bintang 4/5 yang beroperasi yaitu Novotel The Mandalika dan salah satu hotel milik ITDC adalah hotel Pullman The Mandalika yang mulai efektif beroperasi pada bulan Januari 2022. Adapun perkembangan 10 Besar pangsa pasar kunjungan wisatawan di The Mandalika sebagai berikut:

Currently, ITDC has developed the Mandalika area where there is only 1 4/5 star hotel operating, namely Novotel The Mandalika and one of ITDC's hotels is the Pullman The Mandalika hotel which start operating effectively in January 2022. The development of the Top 10 market share for tourist visit at The Mandalika is as follows:

Peringkat di 2023 Rank in 2023	Pasar Market	2023		2022	
		Jumlah Total	Pangsa Pasar Market Share (%)	Jumlah Total	Pangsa Pasar Market Share (%)
I	Domestik Domestic	33.258	51,76%	22.577	568,12
II	Italia Italy	3.243	5,05%	2.919	73,45
III	Australia	5.107	7,95%	2.382	59,94
IV	France	2.841	4,42%	1.622	40,82
V	Spain	1.726	2,69%	1.290	32,46
VI	UK	2.939	4,57%	1.229	30,93
VII	USA	1.265	1,97%	778	19,58
VIII	Belanda Netherlands	1.489	2,32%	731	18,39
IX	Singapura Singapore	1.453	2,26%	406	10,22
X	Switzerland	705	1,10%	311	7,83
XI	Malaysia	913	1,42%	304	7,65
XII	Jepang Japan	805	1,25%	284	7,15



Peringkat di 2023 Rank in 2023	Pasar Market	2023		2022	
		Jumlah Total	Pangsa Pasar Market Share (%)	Jumlah Total	Pangsa Pasar Market Share (%)
XIII	Canada	394	0,61%	199	5,01
XIV	Korea Selatan South Korea	345	0,54%	146	3,67
XV	Selandia Baru New Zealand	627	0,98%	124	0,31
XVI	Rusia Russia	260	0,40%	106	2,67
XVII	China	619	0,96%	105	2,64
XVIII	India	228	0,35%	104	2,62
XIX	Middle East	115	0,18%	99	2,49
Negara Lainnya Other Countries		5.926	9,22%	3.974	10,01
Jumlah Total		64.258	100,00	39.690	905,95

Prospek Usaha

Kondisi konflik geopolitik yang terus berkepanjangan masih menjadi faktor yang cukup signifikan atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* yang dirilis pada Januari 2024, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun 2024 akan melambat, yakni berada pada level 2,9%. Meski demikian, kebijakan moneter yang ketat di sejumlah negara diperkirakan akan membuahkan hasil positif dengan berhasil menurunkan tingkat inflasi menjadi 4,1% di tahun 2024. IMF juga memperkirakan suku bunga kebijakan global akan mencapai 5,2% pada tahun 2024, naik dari 3,5% pada tahun 2022.

Perbaikan kondisi secara bertahap yang terjadi di sepanjang tahun 2024 juga memberikan dampak positif bagi industri pariwisata. Sejak pulihnya kondisi pascapandemi Covid-19, sektor pariwisata menjadi salah satu industri dengan prospek yang cukup cerah. Tingginya kunjungan wisatawan mancanegara di sepanjang tahun 2023 menjadikan Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan capaian yang ada pada tahun mendatang.

Berdasarkan laporan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikeluarkan oleh Menparekraf menargetkan dapat menarik sebanyak 9,5-14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Nilai devisa pariwisata tahun 2024 diperkirakan mampu mencapai USD7,38-USD13,08 miliar di mana kontribusi PDB pariwisata akan mencapai 4,5%. Perbaikan kunjungan ini juga diharapkan dapat diimbangi dengan ikut meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata di tahun 2024 yang diproyeksikan

Business Prospects

The ongoing condition of geopolitical conflict is still a significant factor in the slowdown in global economic growth in 2024. Based on the *World Economic Outlook* report released in January 2024, the International Monetary Fund (IMF) projects that global economic growth throughout 2024 will slow down at the level of 2.9%. However, tight monetary policy in a number of countries is expected to produce positive results by successfully reducing the inflation rate to 4.1% in 2024. The IMF also estimates that global policy interest rates will reach 5.2% in 2024, up from 3.5% in 2022.

The gradual improvement in conditions that will occur throughout 2024 will also have positive impact on the tourism industry. Since conditions have recovered after the Covid-19 pandemic, the tourism sector has become an industry with quite bright prospects. The high number of foreign tourist visits throughout 2023 means that the Government is striving to continue to improve existing achievements in the coming year.

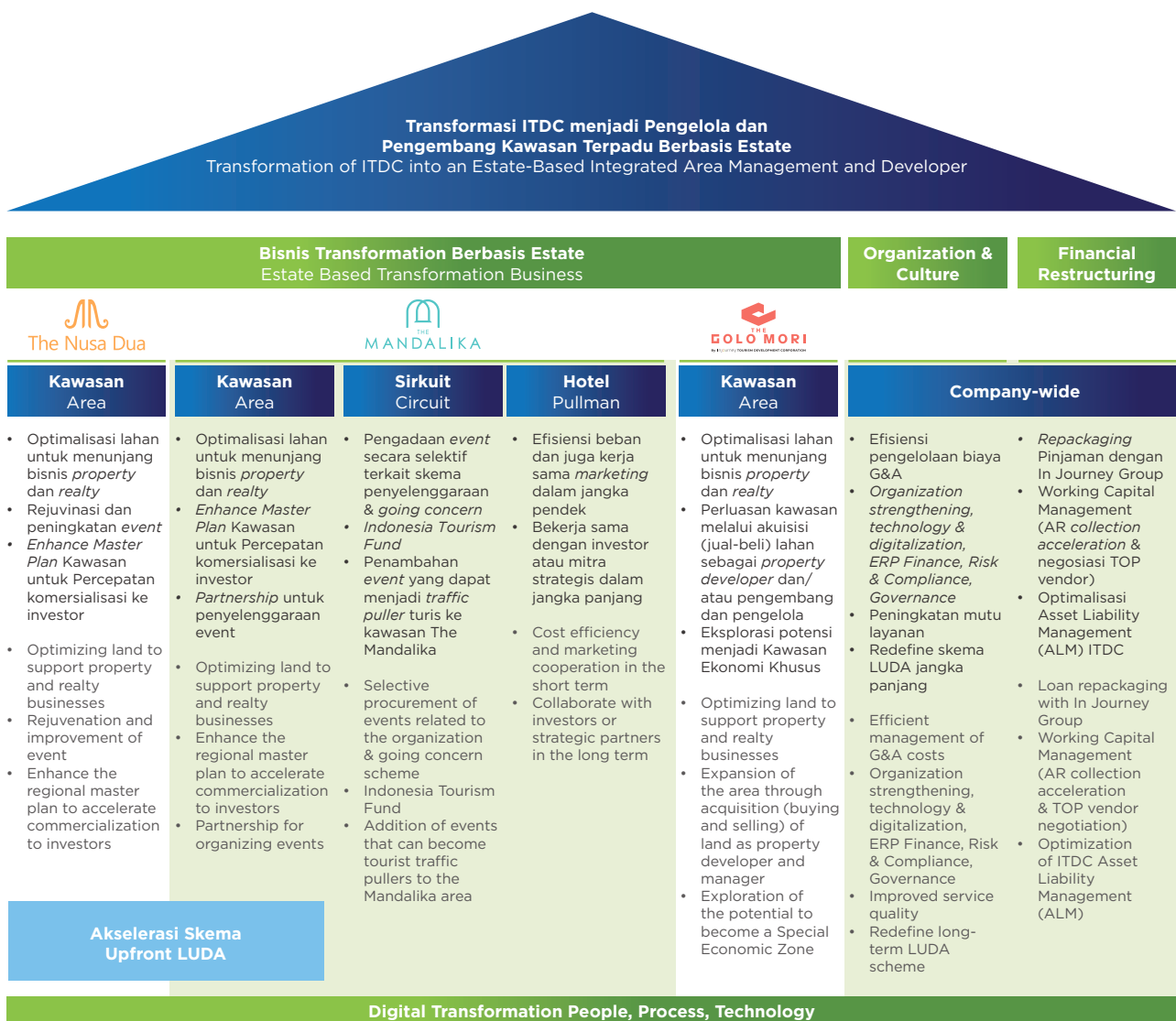
Based on the Tourism and Creative Economy Outlook report issued by the Minister of Tourism and Creative Economy, the target is to attract 9.5-14.3 million visits from foreign tourists. Foreign exchange value of tourism in 2024 is estimated to reach USD7.38-USD13.08 billion, where the contribution of tourism GDP will reach 4.5%. It is also expected that this increase in visit can be offset by the increase in the number of tourism workers in 2024, which is projected to reach 22.08 million people. Thus,

dapat mencapai 22,08 juta orang. Dengan demikian, Menparekraf optimis bahwa sektor pariwisata akan terus tumbuh dengan baik dan pulih seperti semula pada tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis. Pada tahun 2024, perusahaan akan mengedepankan tema *Reinforcing The Key Business Fundamentals to Expedite Recovery*. Hal ini sejalan dengan tema utama yang digunakan oleh PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dalam penyusunan RKAP Tahun 2024 dimana para anggota *holding*, diharapkan menguatkan lini bisnis utama Perusahaan untuk mempercepat pemulihan kondisi keuangan Perusahaan. Holding juga mengharapkan kedepannya lebih tercipta kolaborasi antar anggota untuk sehingga pertumbuhan bisnis ke arah yang positif.

the Minister of Tourism and Creative Economy is optimistic that the tourism sector will continue to grow well and recover to normal in 2025.

Based on the description above, the Company has prepared various strategic policies. In 2024, the Company will prioritize the theme Reinforcing The Key Business Fundamentals to Expedite Recovery. This is in line with the main theme used by PT Aviassi Wisata Indonesia (Persero) in preparing the 2024 RKAP where holding members are expected to strengthen the Company's main business lines to accelerate the recovery of the Company's financial condition. Holding also expect that in the future there will be more collaboration between members to ensure business growth in a positive direction.





Di tahun 2024, ITDC akan bertransformasi menjadi pengelola dan pengembang Kawasan pariwisata. Hal ini menjadi strategi utama yang akan diterapkan dalam pengembangan bisnis Perusahaan di tahun 2024. Strategi Utama tersebut dipilih untuk mendukung upaya pemulihan dan penyehatan keuangan dengan mengedepankan prinsip *financial sustainability* dan memperhatikan kecukupan likuiditas keuangan perusahaan. Terlebih, sumber pendapatan sebagian besar masih berasal dari sewa lahan di The Nusa Dua.

Untuk saat ini The Mandalika dan The Golo Mori masih belum menghasilkan pendapatan yang signifikan dari sisi sewa lahan, dan hanya bersumber pada pendapatan penyelenggaraan event serta pendapatan dari Hotel Pullman yang memiliki margin kecil apabila dibandingkan dengan biaya produksi. Dengan adanya keterbatasan tersebut serta dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi keuangan perusahaan, maka ditetapkan beberapa strategi yang bertujuan untuk menciptakan penyehatan keuangan perusahaan, antara lain:

1. Bisnis Transformation Berbasis Estate

- *Business Transformation* dibutuhkan agar perusahaan lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya disesuaikan dengan persaingan bisnis saat ini. Hal ini sejalan dengan misi penyehatan keuangan Perusahaan dimana fokus bisnis Perusahaan akan difokuskan pada bisnis estate atau sebagai pengembang kawasan. Sedangkan bisnis penunjang akan diserahkan kepada anak usaha.
- Selain itu, bentuk lain dari transformasi berbasis estate adalah dengan mengkaji pelepasan aset Perusahaan dengan mengkaji skema perubahan HPL menjadi HGB untuk beberapa lahan yang dimiliki Perusahaan. Nantinya kajian ini akan menjadi dasar pelaksanaan proses divestasi aset yang dalam jangka panjang dapat menjadi sumber pendapatan baru perusahaan.
- Pengembangan masing-masing SBU menjadi entitas yang lebih otonom perlu diinisiasi. Kedepannya, SBU diharapkan lebih mandiri dalam menjalankan bisnisnya berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.

Berikut disampaikan inisiasi strategi yang dapat dilakukan setiap SBU di tahun 2024, antara lain:

In 2024, ITDC will transform into management and developer of tourism areas. This is the main strategy that will be implemented in developing the Company's business in 2024. This Main Strategy was chosen to support efforts for recovery and financial health by prioritizing the principles of financial sustainability and paying attention to the adequacy of the company's financial liquidity. Moreover, most of the source of income still comes from renting land at The Nusa Dua.

Currently, The Mandalika and The Golo Mori still do not generate significant income from the land rental side, and only source it from event organizing income and income from the Pullman Hotel which has a small margin when compared to production costs. Given these limitations and in order to accelerate the recovery of the company's financial condition, several strategies have been established which aim to create financial soundness for the company, including:

1. Estate Based Transformation Business

- Business Transformation is needed so that company can focus more on running the business in line with current business competition. This is in line with the Company's financial restructuring mission where the Company's business focus will be focused on the estate business or as an area developer. Meanwhile, supporting businesses will be handed over to subsidiaries.
- Apart from that, another form of estate-based transformation is reviewing the disposal of the Company's assets by reviewing the scheme for changing HPL to HGB for several lands owned by the Company. Later, this study will become the basis for implementing the asset divestment process which in the long term can become a new source of income for the company.
- The development of each SBU into a more autonomous entity needs to be initiated. In the future, SBU is expected to be more independent in running its business based on the characteristics of each region.

The following is a strategy initiation that can be carried out by each SBU in 2024, including:

The Nusa Dua

- Optimalisasi *unutilized & unperforming lot* di The Nusa Dua.
- Optimalisasi dan Rejuvenasi The Nusa Dua.
- Rejuvenasi dan peningkatan event.

The Mandalika

- *Refinement* Master Plan Kawasan untuk optimalisasi dan peningkatan kerjasama LUDA ke investor. Dapat juga menerapkan skema *partnership* untuk pemasaran LUDA dan event.
- Memaksimalkan aset sirkuit melalui pengadaan event secara selektif terkait skema penyelenggaraan & *going concern* serta penambahan event yang dapat menjadi *traffic puller* turis ke kawasan The Mandalika.
- Untuk Hotel Pullman, dapat menerapkan efisiensi beban dan juga kerjasama marketing dalam jangka pendek dengan cara bekerjasama dengan investor atau mitra strategis dalam jangka panjang.

The Golomori

- Melakukan divestasi aset dan peninjauan jual-beli lahan sebagai *property developer*.
- Optimalisasi MICE dan Beach Club eksisting.

2. Financial Restructuring

Saat ini perusahaan memiliki hutang kepada bank, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Hutang tersebut bertujuan untuk ekspansi bisnis perusahaan seperti pembangunan The Mandalika maupun untuk keperluan operasional perusahaan yang sempat mengalami kesulitan likuiditas pada saat pandemi Covid-19. Beberapa strategi yang akan diterapkan di tahun 2024 untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan antara lain:

- *Repackaging* Pinjaman dengan InJourney Group melalui *Group Financing*
- *Renegotiate terms* Fasilitas Kredit AIIB untuk relaksasi *grace period* hingga 2029
- *Working Capital Management* (AR Collection *acceleration* & negosiasi TOP vendor)

3. Operation Excellence

Penerapan kinerja operasional yang ekselen tentu akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi perusahaan yang meningkat. Beberapa strategi *Operation Excellence* yang akan diterapkan di tahun 2024, antara lain:

The Nusa Dua

- Optimization of *unutilized & unperforming lots* at The Nusa Dua.
- Optimization and Rejuvenation of The Nusa Dua.
- Rejuvenation and enhancement event.

The Mandalika

- Refinement of the Regional Master Plan to optimize and increase LUDA's cooperation with investors. Can also apply partnership schemes for LUDA marketing and events.
- Maximizing circuit assets through selective event procurement related to the implementation & going concern scheme as well as adding events that can become tourist traffic pullers to the Mandalika area.
- For Pullman Hotels, they can implement load efficiency and also marketing collaboration in the short term by collaborating with investors or strategic partners in the long term.

The Golomori

- Divesting assets and exploring buying and selling land as a property developer.
- Optimization of existing MICE and Beach Club.

2. Financial Restructuring

Currently the company has debts to banks, both short term and long term. The debt is aimed at expanding the company's business, such as the construction of The Mandalika, as well as for the company's operational needs which experienced liquidity difficulties during the Covid-19 pandemic. Several strategies that will be implemented in 2024 to strengthen the company's financial structure include:

- Loan repackaging with InJourney Group through Group Financing
- Renegotiate the terms of the AIIB Credit Facility to relax the grace period until 2029
- Working Capital Management (AR Collection *acceleration* & TOP vendor negotiation)

3. Operational Excellence

Implementing excellent operational performance will certainly have an impact on increasing company effectiveness and efficiency. Several Operation Excellence strategies that will be implemented in 2024 include:



- **Optimalisasi Portofolio ITDC**
Penataan bisnis anak dan cucu perusahaan mutlak diperlukan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas bagi anak dan cucu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Bisnis model anak dan cucu perusahaan akan direviu. Penguatan bisnis anak dan cucu perusahaan akan dilakukan agar mampu memberikan nilai tambah bagi ITDC Group dimana fokus untuk masing-masing anak cucu diharapkan:

- ITDCNP: Developer dan jual beli properti;
- ITDCNU: Utilitas dan bisnis turunan ITDC;
- MGPA: Operator sirkuit Mandalika serta akan diakuisisi menjadi anak usaha;
- Likuidasi cucu usaha, antara lain: PT MMN dan PT INX.

- *Rightsizing & Remapping SDM*
SDM perusahaan merupakan aset yang potensial bagi kemajuan perusahaan. Penataan dan pengelolaan SDM akan dilkaukan untuk mengifisiensikan operasional perusahaan. Di tahun 2024 juga akan direncanakan program pensiun dini yang akan ditawarkan kepada karyawan.

- *Organization Strengthening*
Penguatan organisasi dapat dilakukan dengan penerapan *technology & digitalization* di beberapa lini proses bisnis, antara lain: *ERP Finance, Risk & Compliance, Governance*

- **Efisiensi Pengelolaan Biaya Umum**
Efisiensi yang akan diterapkan untuk menekan biaya umum perusahaan pada tahun 2024 adalah dengan merelokasi kantor Jakarta. Ukuran kantor akan diminimalisir dan direncanakan menjadi kantor perwakilan.

4. Optimalisasi Bisnis

Fokus pengembangan saat ini lebih berfokus pada optimalisasi bisnis yang ada, antara lain dengan cara:

- **ITDC Portfolio Optimization**
Structuring the business of the company's subsidiaries and sub-subsidiaries is absolutely necessary to create efficiency and effectiveness for the company's children and grandchildren in running their business. The business models of the company's subsidiaries and sub-subsidiaries will be reviewed. Strengthening the business of the company's subsidiaries and sub-subsidiaries will be carried out in order to be able to provide added value to the ITDC Group where the focus for each of the company's subsidiaries and sub-subsidiaries is expected to:

- ITDCNP: Property developer and buying and selling;
- ITDCNU: ITDC utilities and derivative businesses;
- MGPA: Mandalika circuit operator and will be acquired as a subsidiary;
- Liquidation of subsidiary businesses, including: PT MMN and PT INX.

- **HR Rightsizing & Remapping**
Company human resources are potential asset for the company's progress. HR structuring and management will be carried out to streamline company operations. In 2024, an early retirement program will also be planned to be offered to employees.

- **Organization Strengthening**
Organizational strengthening can be done by implementing technology & digitalization in several business process lines, including: ERP Finance, Risk & Compliance, Governance

- **General Cost Management Efficiency**
Efficiency that will be implemented to reduce the company's general costs in 2024 is by relocating the Jakarta office. The size of the office will be minimized and planned to become representative office.

4. Business Optimization

The current development focus is more focused on optimizing existing businesses, including by:

- a. Penagihan piutang tenant eksisting secara intensif bahkan hingga tahap somasi/hukum.
- b. Mendorong skema *upfront payment* baik untuk LUDA baru maupun perpanjangan.
- c. *Refinement Masterplan* The Mandalika untuk *re-alignment* strategi *land use* dan *sellable area* sesuai dengan trend investasi dan market pasca Covid.

5. Divestasi Aset

Terdapat potensi pendapatan dengan melakukan divestasi aset. Namun opsi ini harus dilakukan sesuai dengan perturan yang berlaku, mengingat aset yang dimiliki perusahaan termasuk ke dalam aset negara. Untuk itu prosesnya harus mengikut prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Beberapa potensi divestasi aset yang ada, antara lain:

- a. Potensi di The Nusa Dua: Lot RA6, dsb.
- b. Potensi di Golo Mori: Lahan eksisting dan Jual Beli lahan lainnya (selain *convention centre* dan *beach club*).

6. Optimalisasi Aset Eksisting

Aset eksisting perusahaan saat ini cukup banyak dan beragam. Terlebih telah selesainya beberapa proyek investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Menyebabkan beban penyusutan atas aset yang telah selesai dalam pengerjaan bertambah. Aset-aset tersebut perlu dioptimalisasi untuk dapat menjadi *new revenue generator* bagi perusahaan.

- a. Optimalisasi Golo Mori Convention Center dan Hotel Pullman
- b. Optimalisasi sirkuit dan fasilitas pendukung melalui event selain WSBK & MotoGP (Mandalika Xperience)
- c. Optimalisasi Bazaar Mandalika
- d. Optimalisasi Waterblow Nusa Dua

- a. Intensive collection of existing tenants' receivables, even to the subpoena/legal stage.
- b. Encourage upfront payment schemes for both new and extended LUDA.
- c. Refinement of the Mandalika Masterplan to re-align land use and sellable area strategies in accordance with post-Covid investment and market trends.

5. Asset Divestment

There is potential income from divesting assets. However, this option must be carried out in accordance with applicable regulations, considering that the assets owned by the company are included in state assets. For this reason, the process must follow the principles of good corporate governance (GCG). Some of the potential divestment of existing assets include:

- a. Potential in The Nusa Dua: Lot RA6, etc.
- b. Potential in Golo Mori: Existing land and buying and selling other land (apart from the convention center and beach club).

6. Optimization of Existing Assets

The Company's existing assets are currently quite numerous and varied. Moreover, several investment projects carried out by the company have been completed. Causes the depreciation expense on assets that have been completed under construction to increase. These assets need to be optimized to become new revenue generators for the company.

- a. Optimization of Golo Mori Convention Center and Pullman Hotel
- b. Optimization of circuits and supporting facilities through events other than WSBK & MotoGP (Mandalika Xperience)
- c. Optimization of Mandalika Bazaar
- d. Nusa Dua Waterblow Optimization



Tinjauan per Segmen Usaha

Overview per Business Segment

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ITDC melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 tentang Segmen Operasi. Untuk dapat menggambarkan segmen usaha, Perusahaan menggolongkan unit usahanya berdasarkan produk dan jasa yang terdiri dari 3 (tiga) segmen operasi, yakni Lahan, Event dan Hotel, serta Utilitas. Informasi mengenai masing-masing segmen usaha ITDC diuraikan sebagai berikut.

Based on the Company's Articles of Association, ITDC conduct business activities in the tourism sector and optimizes the use of its resources to produce goods and services of high quality and strong competitiveness to gain profits in order to increase the value of the Company by apply the principles of Limited Liability Companies.

Until the end of 2023, the Company has implemented Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 concerning Operating Segments. To be able to describe business segments, the Company classifies its business units based on products and services which consist of 3 (three) operating segments, namely Land, Events and Hotels, and Utilities. Information regarding each ITDC business segment is described as follows.



Lahan
Land



Event dan Hotel
Events and Hotels



Utilitas
Utilities

Penjelasan Segmen

Lahan

Segmen lahan berhubungan dengan aktivitas penyewaan lahan oleh tenants di kawasan pariwisata yang dikelola Perusahaan dan entitas anaknya. ITDC selaku pemilik destinasi memiliki produk utama berupa penyewaan lahan yang terdiri dari sumber-sumber pendapatan yang terdiri atas:

1. Kompensasi minimum, yaitu pendapatan kompensasi yang diterima Perusahaan atas sewa tanah yang ditagihkan setiap triwulan selama masa sewa berdasarkan *Land Utilization and Development Agreement* (LUDA);
2. Kompensasi persentase, yaitu tambahan pendapatan yang diterima Perusahaan dalam masa operasi yang didasarkan atas persentase tertentu dari hasil penjualan kotor dari masing-masing lot yang disewa oleh investor;
3. Kompensasi sekaligus, yaitu sumber pendapatan sewa lahan yang dibayarkan sekaligus di awal untuk beberapa tahun ke depan; dan

Segment Description

Land

The land segment relates to land leasing activities by tenants in tourism areas managed by the Company and its subsidiaries. ITDC as the destination owner has main product in the form of land leasing which consists of income sources consisting of:

1. Minimum compensation, namely compensation income received by the Company for land lease which is billed every quarter during the lease period based on the Land Utilization and Development Agreement (LUDA);
2. Percentage compensation, namely additional income received by the Company during the operating period which is based on a certain percentage of the gross sales proceeds from each lot leased by investors;
3. Lump sum compensation, namely a source of land lease income that is paid all at once in advance for the next few years; and

4. Kompensasi lainnya, yaitu sumber pendapatan sewa tanah dengan ukuran yang lebih kecil dan peruntukannya sebagai infrastruktur penunjang.

Pada tahun 2023, Perusahaan telah memiliki 3 (tiga) produk destinasi utama, yakni The Nusa Dua, The Mandalika, dan The Golo Mori.

The Nusa Dua

Kawasan The Nusa Dua merupakan *Integrated Resort* yang didukung oleh *amenities, accessibility, attraction* yang lengkap dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan positioning The Nusa Dua sebagai *luxurious beautiful peaceful and charming resort*. The Nusa Dua dikelola dengan konsep Tri Hita Karana yang dapat mewujudkan *Sustainable Tourism Destination*.

The Mandalika

The Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata. The Mandalika terletak di bagian Selatan Pulau Lombok, dengan luas area sebesar 1.035,67 ha dan menghadap Samudera Hindia. The Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial. The Mandalika menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang memukau.

The Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata yang selalu berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat. Saat ini, The Mandalika diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia.

The Golo Mori

ITDC kembali mendapat penugasan yang ketiga oleh Pemerintah melalui Penyerahan Modal Negara (PMN) tahun 2021 untuk pembangunan dan pengembangan kawasan The Golo Mori di Desa Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Terletak di 45 menit dari pusat kota Labuan Bajo, The Golo Mori menyuguhkan konsep kawasan yang benar-benar mengagumkan. Destinasi pariwisata

4. Other compensation, namely sources of income from land lease with a smaller size and its use as supporting infrastructure.

In 2023, the Company has 3 (three) main destination products, namely The Nusa Dua, The Mandalika, and The Golo Mori.

The Nusa Dua

The Nusa Dua area is Integrated Resort which is supported by complete and integrated amenities, accessibility, attractions, hence it can increase the positioning of The Nusa Dua as luxurious, beautiful, peaceful, and charming resort. The Nusa Dua is managed with the Tri Hita Karana concept which can create a Sustainable Tourism Destination.

The Mandalika

The Mandalika was designated through Government Regulation No. 52 of 2014 to become Special Economic Zone in Tourism. The Mandalika is located in the southern part of Lombok Island, with an area of 1,035.67 ha and facing the Indian Ocean. The Mandalika is expected to accelerate the tourism sector of West Nusa Tenggara Province which has great potential. The Mandalika offers marine tourism with stunning beach and underwater charm.

The Mandalika has the concept of developing environmentally friendly tourism by building tourist objects and tourist attractions that are always oriented towards preserving the value and quality of the environment in society. Currently, The Mandalika is expected to become a world-class tourist destination.

The Golo Mori

ITDC has received its third assignment by the Government through State Capital Participation (PMN) in 2021 for the construction and development of The Golo Mori area in Golo Mori Village, West Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT). Located 45 minutes from the city center of Labuan Bajo, The Golo Mori presents a truly amazing area concept. This 20 ha tourism destination has been equipped



seluas 20 ha ini telah dilengkapi dengan Golo Mori Convention Center (GMCC), sebuah convention center kelas dunia yang memiliki pemandangan memukau yang menghadap langsung ke Pulau Rinca dan telah menjadi rangkaian event KTT ASEAN.

Utilitas

Segmen utilitas merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan berkaitan dengan aktivitas penyediaan Utilitas terpadu. Perusahaan menjamin komitmen dalam *sustainable development* melalui penyediaan utilitas terpadu yang ramah lingkungan dalam mewujudkan pariwisata yang eksklusif dan berkelanjutan.

Dalam Perkembangannya ITDC NU mengerjakan project dalam 3 segmen yaitu Air, Energi, dan ICT & Platform Digital. Untuk detail dari penjelasan 3 segmen tersebut sebagai berikut:

1. Segmen Air (Sistem Pengelolaan Air)

Perusahaan melakukan perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan penyediaan air bersih, air limbah, air irigasi dan air minum untuk Kawasan terintegrasi.

2. Segmen Energi (Pengelolaan Energi)

Perusahaan melakukan perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan penyediaan energi dan energi terbarukan. Melalui penyediaan Listrik, Gas dan penyediaan BBM.

3. Segmen ICT dan Digital Platform

Perusahaan melakukan perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan penyediaan yang berhubungan dengan Teknologi, Komunikasi dan Informasi serta Platform digital dalam mendukung Kawasan terintegrasi.

Dalam menjalankan bisnis utilitas, Perusahaan memberikan layanan dan produk di antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan Sistem Utilitas Terintegrasi
Merencanakan sistem utilitas mulai dari sarana air, limbah, gas, listrik, energi terbarukan, dan ICT dengan konsep Pengembangan berkelanjutan.
2. Pengembangan Sarana Utilitas/Utilitas provider
Mengembangkan Investasi di bidang utilitas dengan skema bisnis tertentu.

with the Golo Mori Convention Center (GMCC), a world-class convention center which has stunning views overlooking Rinca Island and has become a series of ASEAN Summit events.

Utility

The utility segment is a business activity carried out by the Company related to the provision of integrated utilities. The company guarantees commitment to sustainable development through the provision of integrated utilities that are environmentally friendly in realizing exclusive and sustainable tourism.

In its development, ITDC NU works on projects in 3 segments, namely Water, Energy, and ICT & Digital Platforms. For details of the explanation of the 3 segments as follows:

1. Water Segment (Water Management System)

The Company conducts planning, management, treatment and supply of clean water, wastewater, irrigation water and drinking water for the integrated area.

2. Energy Segment (Energy Management)

The Company conducts planning, management, processing and supply of energy and renewable energy. Through the provision of electricity, gas and fuel supply.

3. ICT and Digital Platform Segment

The Company carries out planning, management, processing and provision related to Technology, Communication and Information and digital platforms in supporting integrated areas.

In running the utility business, the Company provides services and products as follows:

1. Integrated Utility System Planning
Planning utility systems ranging from water, waste, gas, electricity, renewable energy, and ICT facilities with the concept of sustainable development.
2. Development of Utility Facilities/Utility providers
Developing Investment in utilities with certain business schemes.

3. Pengelola Utilitas di Kawasan Terpadu
Mengelola sistem utilitas di Kawasan terpadu dengan SDM yang berpengalaman dan *standar operating procedure* yang baik.
4. Penyedia Produk Utilitas
Menyediakan peralatan dan sistem yang ramah lingkungan seperti lampu, *water system*, pipa dll.

3. Utility Manager in Integrated Area
Managing utility systems in integrated areas with experienced human resources and good standard operating procedures.
4. Utility Product Provider
Providing environmentally friendly equipment and systems such as lights, water systems, pipes etc.

Produktivitas Segmen

Produk utama Perusahaan yang dihasilkan berasal dari penyewaan lahan. Pendapatan yang berasal dari penyewaan lahan Perusahaan terdiri dari kompensasi minimum, kompensasi presentasi, kompensasi sekaligus, dan kompensasi lainnya. Adapun perbandingan jumlah pencapaian kinerja produk utama Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Nusa Dua

Di tahun 2023, The Nusa Dua masih menjadi pilihan para turis nasional maupun mancanegara. Hal tersebut terlihat dari realisasi statistik pendapatan kamar hotel yang mengalami peningkatan sebesar USD3.789.384.090,67 atau 4715,21 % dari realisasi tahun 2022 yang sebesar USD78.695.982,65. Adapun realisasi statistik kamar hotel di The Nusa Dua dapat dilihat sebagai berikut:

Segment Productivity

The Company's main product comes from land leasing. Income derived from leasing the Company's land consists of minimum compensation, presentation compensation, lump sum compensation and other compensation. The comparison of the number of performance achievements of the Company's main products is as follows:

The Nusa Dua

In 2023, The Nusa Dua is still the choice of national and foreign tourists. This can be seen from the statistical realization of hotel room revenue which has increased by USD3,789,384,090.67 or 4715.21% from the realization in 2022 which amounted to USD78,695,982.65. The statistical realization of hotel rooms at The Nusa Dua can be seen as follows:

Uraian Description	Realisasi 2023 2023 Realization	Realisasi 2022 2022 Realization	Pertumbuhan Growth (YoY)
Room Available	5.480	4.524	21,13%
Roomnight Avail.	1.912.309	1.174.940	62,76%
Room Night Sold	1.309.245	527.887	148,02%
% Occupancy	68,48	44,93	52,41%
Guest Night Sold	2.767.170	1.112.253	148,79%
Double Occupancy (%)	113,36	110,70	2,40%
Total Number of Guest	1.028.415	419.905	144,92%
Average Length of Stay	2,69	2,65	1,51%
Average Room Rate (USD)	185,04	113,77	62,64%
Room Revenue (USD)	3.789.384.090,67	78.695.982,65	4.715,22%



Sementara itu, data occupancy The Nusa Dua menunjukkan kenaikan 34,70%, yaitu sebesar 68.40% dibandingkan occupancy selama tahun 2022 sebesar 50,78%. Capaian atas occupancy ini disebabkan oleh adanya event MICE, *music festival*, dan event corporate. Adapun data occupancy The Nusa Dua pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Meanwhile, The Nusa Dua's occupancy data shows an increase of 34.70%, namely 68.40% compared to occupancy during 2022 of 50.78%. This achievement in occupancy was due to MICE events, music festivals, and corporate events. The occupancy data for The Nusa Dua in 2023 can be seen as follows:

Bulan Month	Occupancy (%)
Januari January	61.06
Februari February	54.62
Maret March	60.76
April April	62.89
Mei May	63.19
Juni June	73.20
Juli July	80.00
Agustus August	78.67
September September	80.79
Oktober October	73.32
November November	63.11
Desember December	69.13
Total Rata-Rata Average Total	68.40

Di samping itu, realisasi kompensasi minimum, kompensasi persentase, kompensasi sekaligus, dan kompensasi lainnya The Nusa Dua selama tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

In addition, the realization of minimum compensation, percentage compensation, lump sum compensation, and other compensation for The Nusa Dua during 2023 can be seen as follows:

Tabel Perbandingan Jumlah Pencapaian Lot The Nusa Dua 2023

Table of Comparison of Number of Lot Achievements for The Nusa Dua 2023

Uraian Description	Realisasi 2023 2023 Realization (Lot)	Rencana 2023 2023 Plan (Lot)	Realisasi 2022 2022 Realization (Lot)	Pencapaian Realisasi terhadap Rencana 2023 Achievement of Realization of the 2023 Plan (%)
Kompensasi Minimum Minimum Compensation	37	40	38	92,5%
Kompensasi Persentase Percentage Compensation	9	9	2	100%
Kompensasi Sekaligus Lump Sump Compensation	9	7	7	128,6%
Kompensasi Lainnya Other Compensation	8	7	9	114,3%
Total	63	63	56	100%

Kompensasi Minimum

- Untuk Kompensasi Minimum di tahun 2023 mengalami penurunan di Nusa Dua dikarenakan terdapat pengakhiran LUDA untuk Lot C1 dengan PT Agung Panorama Propertindo. Dan terdapat tenant yang tidak melaksanakan pembayaran yakni Lot IC1 Mandalika dan Lot H3 Mandalika. Atas 2 lot di Mandalika tersebut saat ini telah masuk ke arbitrase di SIAC Singapore.

Minimum Compensation

- Minimum Compensation in 2023 was decreased in Nusa Dua due to the termination of LUDA for Lot C1 with PT Agung Panorama Propertindo. And there are tenants who do not make payments, namely Lot IC1 Mandalika and Lot H3 Mandalika. The 2 lots in Mandalika have now entered arbitration at SIAC Singapore.

Kompensasi Persentasi

- Untuk Kompensasi Persentasi, mengingat dimana umumnya LUDA di Nusa Dua dengan ITDC menggunakan skema kompensasi WEIH (Whichever is Higher), yakni dimana Kompensasi Persentasi dibayar atas nilai yang melampaui nilai Kompensasi Minimum, sehingga hanya beberapa tenant yang membayarkan Kompensasi Persentasi. Atas hal tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - Di tahun 2022 masih terpengaruhi oleh Pandemi COVID-19.
 - Di tahun 2023 merupakan masa pemulihan pasca-Pandemi COVID-19.
- Pendapatan Kompensasi Persentase 2023 meningkat signifikan dibandingkan 2022, hal ini karena pada tahun 2023 pada masa pasca pandemi, tenant memiliki kemampuan untuk pembayaran Kompensasi Persentase dalam skema WEIH.

Percentage Compensation

- For Percentage Compensation, considering that generally LUDA in Nusa Dua with ITDC uses the WEIH (Whichever is Higher) compensation scheme, namely where Percentage Compensation is paid for a value that exceeds the Minimum Compensation value, hence only a few tenants pay Percentage Compensation. Regarding this, we can convey the following:
 - In 2022 it was still be affected by the Pandemic.
 - 2023 was the post-Pandemic recovery period.
- Percentage Compensation Income for 2023 has increased significantly compared to 2022, this is because in 2023 in the post-pandemic period, tenants have the ability to pay Percentage Compensation under the WEIH scheme.



Kompensasi Sekaligus

- Untuk Kompensasi Sekaligus di tahun 2023 untuk Nusa Dua, terdapat pengalihan LUDA/perjanjian di Lot S5 dari PT Narendra Interpacific Indonesia menjadi dengan PT Nusa Dua Mahajaya dan PT Bali Destinasi Lestari. Untuk Kompensasi Sekaligus di Mandalika, terdapat LUDA/perjanjian baru di Lot KQ2-3 dengan PT Arcshouse Wisata Indonesia di akhir tahun 2023.

Kompensasi Lainnya

- Untuk Kompensasi Lainnya di tahun 2023 untuk Nusa Dua, terdapat pengakhiran kerjasama utilitas dengan Biznet dan Indosat M2 Fiber Optik dan perjanjian baru dengan Telkom.

The Mandalika

Semakin terbukanya penerbangan dan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia serta adanya event-event besar yang dilakukan di The Mandalika berhasil memberikan dampak positif bagi kunjungan wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan tamu, tingkat hunian kamar, lama tinggal dan harga rata-rata kamar (ARR) di The Mandalika.

Pada tahun 2023, Perusahaan telah mengembangkan kawasan The Mandalika yang hanya memiliki 1 hotel bintang 4/5 yang beroperasi, yaitu Novotel The Mandalika dan salah satu hotel Milik ITDC yakni Pullman The Mandalika yang sudah beroperasi. Sementara itu, jumlah pencapaian lot The Mandalika sepanjang tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pencapaian Lot The Mandalika 2023

Table of Lot Achievement for The Mandalika 2023

No.	Nama Perusahaan Company Name	Lot	Status	Tanggal Date	Luas Wide (m2)
1.	PT Perusahaan Air Indonesia Amerika	IC1	LUDA	26-04-16	20.000
2.	PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika	H3	LUDA	26-04-16	60.503
3.	PT Elmar Mitra Perkasa	H2 / sebagian lot BK14 some part of BK14 lot	LUDA	30-12-16	34.780
4.	PT Alam Hijau Mandalika	KCH1	LUDA	15-12-17	6.949

Lump Sum Compensation

- For lump sum compensation in 2023 for Nusa Dua, there is a transfer of LUDA/agreement on Lot S5 from PT Narendra Interpacific Indonesia to PT Nusa Dua Mahajaya and PT Bali Destinasi Lestari. For lump sum compensation in Mandalika, there is a new LUDA/agreement on Lot KQ2-3 with PT Arcshouse Wisata Indonesia at the end of 2023.

Other Compensation

- For other compensation in 2023 for Nusa Dua, there was an end to the utility collaboration with Biznet and Indosat M2 Fiber Optik and new agreement with Telkom.

The Mandalika

The increasing opening of flights and visits by foreign tourists to Indonesia as well as the large events held at The Mandalika have succeeded in having positive impact on tourist visit. This can be seen from guest visit, room occupancy rate, length of stay and average room price (ARR) at The Mandalika.

In 2023, the Company has developed The Mandalika area which only has 1 4/5 star hotel operating, namely Novotel The Mandalika and one of ITDC's hotels, namely Pullman The Mandalika, which is already operational. Meanwhile, the number of achievements for The Mandalika lots throughout 2023 can be seen as follows:

No.	Nama Perusahaan Company Name	Lot	Status	Tanggal Date	Luas Wide (m2)
5.	PT Elmar Mitra Perkasa	C5/ sebagian lot BK14 C5/ some part of BK14 lot	LUDA	09-03-18	9.373
6.	PT Palamarta Kuta Permai	BKC1	LUDA	03-07-18	2.842
7.	PT Mahkota Permata Mandalika	KCH2	LUDA	21-12-18	19.306
8.	PT Mandalika Jaya Bersama	MCA1	LUDA	02-10-19	4.635
9.	PT Rancang Selaras Mandalika	KGH3	LUDA	17-12-19	7.835
10.	PT ITDC Nusantara Utilitas	SC1-A	LUDA	21-07-20	9.116
11.	PT Kuta Paradise Mandalika	BKC2-3	LUDA	23-02-21	6.858
12.	PT Sinar Tiga Pilar	Jalan Akses Raja Hotel Access Road	LUDA	05-03-21	58,4 m1
13.	PT Sinar Tiga Pilar	Jalur Listrik Raja Hotel Raja Hotel Electricity Route	LUDA	24-06-21	1.286
14.	PT Kuta Baru Paradise	KGC5	LUDA	22-11-22	225
15.	PT Bumi Mandalika Lombok	BKC4	LUDA	13-12-22	1.751
16.	PT ITDC Nusantara Utilitas	ICT Jalan Kawasan Khusus ICT of Special Area Road	PKS	19-12-22	10.115 m1 & 314 m2
17.	PT Jelamin Mona Hotel	KQ4	LUDA	28-11-23	2.106
18.	PT Arcshouse Wisata Indonesia	KQ2-3	LUDA	06-12-23	16.689



The Golo Mori

Sepanjang tahun 2023, The Golo Mori dilengkapi dengan *Convention Hall* dengan kapasitas 400 pax, *VVIP Lobby* 400 pax, *VVIP Lounge* 29 pax, *VIP Room* 12 pax, *Media Center* 50 pax, dan *Amphitheater* dengan kapasitas 500 pax.

The Golo Mori

Throughout 2023, The Golo Mori is equipped with *Convention Hall* with a capacity of 400 pax, *VVIP Lobby* 400 pax, *VVIP Lounge* 29 pax, *VIP Room* 12 pax, *Media Center* 50 pax, and *Amphitheater* with a capacity of 500 pax.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Segment Revenue and Profitability

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Revenue	885.214	657.488	227.726	34,64%
Lahan Land	395.703	313.410	82.293	26,26%
Event dan Hotel Event and Hotel	398.376	249.802	148.574	59,48%
Utilitas Utility	91.690	105.179	(13.489)	-12,82%
Eliminasi Elimination	(556)	(10.903)	10.347	-94,90%
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(279.072)	(177.541)	101.531	57,19%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	(278.417)	(209.966)	68.451	32,60%

Per 31 Desember 2023, pendapatan masing-masing segmen menunjukkan capaian positif. Untuk segmen lahan terjadi peningkatan dari kompensasi persentase karena mulai membaiknya tingkat hunian kamar di Kawasan The Nusa Dua pasca Covid-19. Pada tahun 2023 tingkat hunian kamar mencapai 68,40%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 50,78% untuk segmen event dan hotel karena hotel sudah beroperasi penuh pada tahun 2023 selama setahun sedangkan pada tahun 2022 baru beroperasi mulai Oktober dan peningkatan pendapatan dari penyelenggaraan event.

As of December 31, 2023, the revenue of each segment showed positive result. For the land segment, there was an increase in percentage compensation due to the improvement in room occupancy rates in the Nusa Dua area after Covid-19. In 2023, the room occupancy rate has reached 68.40%, meanwhile in 2022 of 50.78% for the event and hotel segment because the hotel will be fully operational in 2023 for a year, while in 2022 it will only start operating from October and increase revenue from organizing events.

Tinjauan Keuangan

Financial Overview

Penyusunan analisa dan pembahasan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta peraturan-peraturan yang berlaku.

The arrangement of the analysis and discussion of financial performance in this Annual Report refers to the Consolidated Financial Statements of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia which has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan with a fair opinion in all material respects for the years ending December 31, 2023 and 2022. The Company's Consolidated Financial Statements are audited in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) generally accepted in Indonesia, which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Standards Board Financial Accounting-Indonesian Accountants Association (DSAK-IAI), as well as applicable regulations.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statement of Financial Positions

Tabel Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2022-2023
Table of Consolidated Financial Positions for 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Total Aset Total Assets	7.296.356	6.859.408	436.948	6,37%
Total Liabilitas Total Liabilities	5.431.903	4.718.162	713.741	15,13%
Ekuitas Equity	1.864.454	2.141.246	(276.792)	-12,93%
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	7.296.356	6.859.408	436.948	6,37%

Sepanjang tahun 2023, kinerja posisi keuangan konsolidasian ITDC secara umum mencatatkan kinerja yang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya total aset Perusahaan sebesar 6,37%. Meski demikian, liabilitas Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 15,13% dan jumlah ekuitas Perusahaan yang mengalami penurunan sebesar 12,93%. Uraian masing-masing kinerja posisi keuangan ITDC untuk tahun 2022 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

Throughout 2023, ITDC's consolidated financial positions generally recorded quite good performance. This is shown by the increase in the Company's total assets by 6.37%. However, the Company's liabilities increased by 15.13% and the Company's total equity decreased by 12.93%. A description of each ITDC's financial position performance for 2022 and 2023 is described as follows.



Aset

Assets

Tabel Aset Tahun 2022-2023
Table of Assets 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Aset Lancar Current Assets	947.119	1.012.162	(65.043)	-6,43%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	6.349.237	5.847.246	501.991	8,59%
Total Aset Total Assets	7.296.356	6.859.408	436.948	6,37%

Per 31 Desember 2023, Perusahaan berhasil membukukan total aset sebesar Rp7,30 triliun, mengalami peningkatan Rp436,95 miliar atau 6,37% dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp6,86 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan aset tetap karena adanya penambahan investasi yang dilakukan di The Mandalika dan The Golo Mori.

As of December 31, 2023, the Company managed to record total assets of Rp7.30 trillion, an increase of Rp436.95 billion or 6.37% compared to 2022 which amounted to Rp6.86 trillion. This was caused by an increase in fixed assets due to additional investments made in The Mandalika and The Golomori.

Aset Lancar

Current Assets

Tabel Aset Lancar Tahun 2022-2023
Table of Current Assets 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	219.006	64.564	154.442	239,21%
Dana di Lembaga Keuangan yang Dibatasi Pergunaannya Restricted Use of Funds in Financial Institutions	354.745	627.804	(273.059)	-43,49%
Deposito Berjangka Time Deposit	-	11.540	(11.540)	-100,00%
Piutang Usaha Accounts Receivable				
Pihak Ketiga-Neto Third Party-Net	259.632	222.738	36.894	16,56%
Pihak Berelasi-Neto Related Party-Net	91.995	41.222	50.773	123,17%
Piutang Lain-lain Other Receivables				
Pihak Ketiga-Neto Third Party-Net	2.609	729	1.880	257,89%

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Pihak Berelasi-Neto Related Party-Net	-	-	-	-
Persediaan Inventory	5.355	592	4.763	804,56%
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Fees	1.081	108	973	900,93%
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	9.469	35.436	(25.967)	-73,28%
Uang Muka Down Payment	3.227	7.429	(4.202)	-56,56%
Total Aset Lancar Total Current Assets	947.119	1.012.162	(65.043)	-6,43%

Di tahun 2023, total aset lancar Perusahaan tercatat sebesar Rp947,12 miliar, menurun Rp65,04 miliar atau 6,43% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,01 triliun. Hal ini dikarenakan penurunan dana di lembaga keuangan yang dibatasi penggunaannya yang telah digunakan pada tahun 2023 untuk pembayaran investasi di The Mandalika dan The Golo Mori. Peningkatan piutang usaha pada 2023 dari tahun 2022 disebabkan adanya piutang dari PT Pertamina (Persero) sebesar Rp45,17 miliar atas *naming right* sirkuit Mandalika yang baru dibayarkan pada Januari 2024. Peningkatan persediaan pada tahun 2023 dari tahun 2022 disebabkan karena pada tahun 2023 perusahaan mereklasifikasi tanah di The Golo Mori dari aset tetap menjadi persediaan. Reklasifikasi dilakukan karena manajemen berencana menjual kembali lahan tersebut. Pada tahun 2023 terjadi penurunan pajak dibayar dimuka karena pada tahun 2023 perusahaan telah mengkreditkan PPN lebih bayar tahun 2022.

In 2023, the Company's total current assets was recorded at Rp947.12 billion, a decrease of Rp65.04 billion or 6.43% compared to the previous year which amounted to Rp1.01 trillion. This is due to a decrease in funds in financial institutions whose use is restricted which were used in 2023 to pay for investments in Mandalika and Golomori. The increase in trade receivables in 2023 from 2022 was due to receivables from PT Pertamina (Persero) amounting to Rp45.17 billion for the naming rights of the Mandalika circuit which were only paid in January 2024. The increase in inventories in 2023 from 2022 was due to the company reclassifying land in 2023 in Golomori from fixed assets to inventory. The reclassification was carried out because management plans to resell the land. In 2023 there was a decrease in prepaid taxes because in 2023 the company has credited the 2022 VAT overpayment.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Tabel Aset Tidak Lancar Tahun 2022-2023

Table of Non-Current Assets 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Aset Hak Guna Right to Use Assets	179.469	198.623	(19.154)	-9,64%
Properti Investasi Investment Property	628.277	628.331	(54)	-0,01%



Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Aset Tetap Fixed Assets	5.481.444	4.964.568	516.876	10,41%
Investasi pada Surat Berharga Investment in Securities	2.820	2.964	(144)	-4,86%
Penyertaan Saham Stock Investment				
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associated Entities	-	-	-	-
Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income	50.245	46.473	3.772	8,12%
Aset tak Berwujud Intangible Assets	2.272	2.193	79	3,60%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	2.563	1.946	617	31,71%
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	2.147	2.147	-	-
Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	6.349.237	5.847.246	501.991	8,59%

Total aset tidak lancar Perusahaan di tahun 2023 adalah sebesar Rp6,35 triliun, mengalami peningkatan Rp501,99 miliar atau 8,59% dibanding tahun 2022 sebesar Rp5,85 triliun. Hal ini terutama karena adanya peningkatan aset tetap karena adanya investasi infrastruktur dasar di The Mandalika dan bangunan MICE serta jalan di The Golo Mori.

The Company's total non-current assets in 2023 was Rp6.35 trillion, an increase of Rp501.99 billion or 8.59% compared to 2022 of Rp5.85 trillion. This is mainly due to an increase in fixed assets due to investment in basic infrastructure in The Mandalika and MICE buildings and roads in The Golomori.

Liabilitas

Liabilities

Tabel Liabilitas Tahun 2022-2023
Table of Liabilities 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	1.984.797	2.545.096	(560.299)	-22,01%
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	3.447.106	2.173.066	1.274.040	58,63%
Total Liabilitas Total Liabilities	5.431.903	4.718.162	713.741	15,13%

Total liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp5,43 triliun di tahun 2023, meningkat Rp713,74 miliar atau 15,13% dari tahun 2022 sebesar Rp4,72 triliun. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pinjaman kepada

The Company's total liabilities was Rp5.43 trillion in 2023, an increase of Rp713.74 billion or 15.13% from 2022 of Rp4.72 trillion. This was due to an increase in loan to related parties amounting to Rp125 billion,

pihak berelasi sebesar Rp125 miliar, peningkatan utang usaha dan peningkatan biaya yang masih harus dibayar atas *Hosting Fee* MotoGP 2023.

an increase in accounts payable and an increase in accrued expenses for the 2023 MotoGP Hosting Fee.

Liabilitas Jangka Pendek

Short-Term Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2022-2023
Table of Short-Term Liabilities 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Utang Usaha Accounts Payable				
Pihak Berelasi Related Parties	266.725	172.128	94.597	54,96%
Pihak Ketiga Third Parties	156.514	144.907	11.607	8,01%
Utang Pajak Tax Payable	32.777	13.379	19.398	144,99%
Biaya yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	814.270	674.404	139.866	20,74%
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short-Term Bank Loans	199.642	136.356	63.286	46,41%
Pinjaman Pihak Berelasi Related Party Loans	125.000	-	125.000	100,00%
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun: Long-Term Liabilities Mature Within One Year:				
Utang Lain-lain Other Payables	56.962	49.530	7.432	15,01%
Liabilitas Sewa Lease Liability	179.305	185.210	(5.905)	-3,19%
Liabilitas Kontrak Contract Liabilities	57.707	34.142	23.565	69,02%
Pinjaman Bank Jangka Panjang Long-Term Bank Loans	95.893	1.135.037	(1.039.144)	-91,55%
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	1.984.797	2.545.096	(560.299)	-22,01%

Total liabilitas jangka pendek di tahun 2023 tercatat sebesar Rp1,98 triliun, menurun Rp560,30 miliar atau 22,01% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,54 triliun. Hal ini terutama disebabkan karena pada tahun 2023 Perusahaan telah mendapatkan surat waiver dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) atas tidak terpenuhinya batasan kresit DSCR minimal 1.1 kali. Hal ini berdampak pada tahun 2023 perusahaan mereklasifikasi kembali pinjaman LPEI menjadi pinjaman jangka panjang. Pada tahun 2023 perusahaan melakukan accrued atas biaya *Hosting Fee* MotoGP 2023 yang akan dibayarkan Januari 2024 sebesar Rp174 miliar.

Total short-term liabilities in 2023 was Rp1.98 trillion, a decrease of Rp560.30 billion or 22.01% compared to the previous year which reached Rp2.54 trillion. This is mainly because in 2023 the Company has received a waiver letter from the Export-Import Financing Institution (LPEI) for not meeting the DSCR credit limit of at least 1.1 times. This has impact that in 2023 the company was reclassified LPEI loans into long-term loans. In 2023 the company was accrued the 2023 MotoGP Hosting Fee which will be paid in January 2024 amounting to Rp174 billion.



Liabilitas Jangka Panjang

Long-Term Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2022-2023
Table of Long-Term Liabilities 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun: Long-Term Liabilities After Deducting the Maturity Within One Year:				
Utang Lain-lain Other Payables	3.268	3.465	(197)	-5,69%
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	4.701	5.670	(969)	-17,09%
Liabilitas Kontrak Contract Liabilities	159.772	82.966	76.806	92,58%
Pinjaman Bank Jangka Panjang Long-Term Bank Loans	3.239.928	2.046.866	1.193.062	58,29%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liability	39.436	34.097	5.339	15,66%
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	3.447.106	2.173.066	1.274.040	58,63%

Di tahun 2023, total liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp1,27 triliun atau setara dengan 58,63% dari Rp2,17 triliun di tahun 2022 menjadi Rp3,45 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya reklasifikasi pinjaman LPEI dari pinjaman jangka panjang porsi jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang karena pada tahun 2023 perusahaan telah menerima surat *waiver*. Selain itu peningkatan pinjaman jangka panjang juga disebabkan karena perusahaan telah menerima pendapatan diterima dimuka untuk pendapatan sampai dengan tahun 2029 dari PT Nusa Dua Mahajaya.

In 2023, total long-term liabilities increased by Rp1.27 trillion or the equivalent of 58.63% from Rp2.17 trillion in 2022 to Rp3.45 trillion. This increase was caused by the reclassification of LPEI loans from long-term loans of short-term portion to long-term loans because in 2023 the company received a waiver letter. Apart from that, the increase in long-term loans was also due to the company having received unearned income for income up to 2029 from PT Nusa Dua Mahajaya.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas Tahun 2022-2023
Table of Equity 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Modal Saham Share Capital	3.500.000	3.500.000	-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	2.147.660	2.147.660	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	148	148	-	-

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income				
Keuntungan yang Belum Direalisasi dari Aset Keuangan pada Nilai Wajar – Neto Unrealized Gains from Financial Assets at Fair Value – Net	9.328	5.642	3.686	65,33%
Keuntungan Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti – Neto Remeasurement Gains on Defined Benefit Plans – Net	5.336	7.398	(2.062)	-27,87%
Saldo Laba Retained Earnings	(295.666)	(17.699)	277.967	1.570,52%
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Equity Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	1.866.807	2.143.150	(276.343)	-12,89%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	(2.353)	(1.904)	449	23,58%
Total Ekuitas Total Equity	1.864.454	2.141.246	(276.792)	-12,93%

Per 31 Desember 2023, total ekuitas Perusahaan adalah sebesar Rp1,86 triliun, mengalami penurunan Rp276,79 miliar atau 12,93% dibanding tahun 2022 yang mencapai Rp2,14 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kerugian yang dibukukan Perusahaan pada tahun 2023.

As of December 31, 2023, the Company's total equity was Rp1.86 trillion, a decrease of Rp276.79 billion or 12.93% compared to 2022 which reached Rp2.14 trillion. This was mainly caused by losses recorded by the Company in 2023.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Statement of Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2022-2023
Table of Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Revenues	885.214	657.488	227.726	34,64%
Beban Usaha Operating Expenses	(539.001)	(359.701)	179.300	49,85%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(427.478)	(317.449)	110.029	34,66%
Pendapatan Lain-lain Other Revenues	14.286	18.561	(4.275)	-23,03%
Beban Lain-lain Other Expenses	(32.518)	(107.555)	(75.037)	-69,77%
Pendapatan Keuangan Financial Income	3.549	10.707	(7.158)	-66,85%
Pajak Final atas Pendapatan Keuangan Final Tax on Financial Income	(710)	(2.141)	(1.431)	-66,84%



Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2022-2023
Table of Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Beban Keuangan Financial Expenses	(132.696)	(79.593)	53.103	66,72%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Final Tax and Income Tax	(229.355)	(179.683)	49.672	27,64%
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(49.717)	(30.467)	19.250	63,18%
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax Expense	(279.072)	(210.150)	68.922	32,80%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefits (Expenses)	655	184	471	255,98%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Current Year Profit (Loss)	(278.417)	(209.966)	68.451	32,60%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	1.625	13.559	(11.934)	-88,02%
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit (Loss) for the Current Year	(276.793)	(196.407)	80.386	40,93%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Current Year Profit attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	(277.968)	(209.888)	68.080	32,44%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	(450)	(78)	372	476,92%
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Current Year Comprehensive Profit (Loss) Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	(276.343)	(196.329)	80.014	40,76%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	(450)	(78)	372	476,92%
Laba (Rugi) per Saham (Rupiah penuh) Earnings (Loss) per Share (full Rupiah)	(129.638)	(99.340)	30.298	30,50%

Pendapatan

Di tahun 2023, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp885,21 miliar, meningkat Rp227,73 miliar atau 34,64% dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp657,49 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan kompensasi lahan, peningkatan pendapatan event dan peningkatan pendapatan dari Hotel.

Beban Usaha

Beban usaha di tahun 2023 tercatat sebesar Rp539,00 miliar, meningkat Rp179,30 atau 49,85% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp359,70 miliar. Hal tersebut dikarenakan peningkatan beban pokok pendapatan karena pada tahun 2023 perusahaan

Revenues

In 2023, the Company managed to record revenues of Rp885.21 billion, an increase of Rp227.73 billion or 34.64% compared to 2022 which amounted to Rp657.49 billion. This increase was caused by an increase in land compensation income, an increase in event income, and increase in income from hotels.

Operating Expenses

Operating expenses in 2023 recorded at Rp539.00 billion, an increase of Rp179.30 or 49.85% from the previous year which amounted to Rp359.70 billion. This is due to an increase in the cost of revenue because in 2023 the company will bear hosting

menanggung beban *hosting fee* atas WSBK dan MotoGP dan peningkatan beban penyusutan akibat peningkatan aset yang dimiliki perusahaan.

Lab a (Rugi) Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan

Rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan Perusahaan tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp49,67 miliar atau 27,64% dari Rp179,68 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp229,35 miliar di tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan dan beban penyusutan.

Beban Pajak Final

Beban pajak final Perusahaan di tahun 2023 sebesar Rp49,72 miliar, meningkat Rp19,25 miliar atau 63,18% jika dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp30,47 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan atas kompensasi lahan.

Lab a (Rugi) Tahun Berjalan

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp278,42 miliar, mengalami peningkatan Rp68,45 miliar atau 32,60% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp209,97 miliar. Peningkatan ini terutama dikarenakan adanya peningkatan beban pokok pendapatan, penyusutan dan beban bunga pinjaman.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain di tahun 2023 tercatat sebesar Rp1,62 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp11,93 miliar atau 88,02% dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp13,56 miliar. Penurunan ini dikarenakan pada tahun 2023 Perusahaan menderita kerugian pengukuran kembali program manfaat pasti sebesar Rp2,11 miliar sedangkan pada tahun 2022 mencatatkan keuntungan sebesar Rp12,01 miliar.

Lab a (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Perusahaan mencatatkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp276,79 miliar, mengalami peningkatan Rp80,39 miliar atau 40,93% jika

fees for WSBK and MotoGP and an increase in depreciation expenses due to the increase in assets owned by the company.

Profit (Loss) Before Final Tax and Income Tax

The Company's loss before final tax and income tax was recorded to have increased by Rp49.67 billion or 27.64% from Rp179.68 billion in 2022 to Rp229.35 billion in 2023. This was mainly due to an increase in cost of revenue and depreciation expense.

Final Tax Expense

The Company's final tax expense in 2023 was Rp49.72 billion, an increase of Rp19.25 billion or 63.18% compared to 2022 which was Rp30.47 billion. This is caused by an increase in income from land compensation.

Current Year Profit (Loss)

As of December 31, 2023, the Company recorded a current year loss of Rp278.42 billion, an increase of Rp68.45 billion or 32.60% compared to the previous year which amounted to Rp209.97 billion. This increase was mainly due to an increase in the cost of revenues, depreciation, and loan interest expenses.

Other Comprehensive Income (Expenses)

Other comprehensive income in 2023 was recorded at Rp1.62 billion, a decrease of Rp11.93 billion or 88.02% compared to 2022 which amounted to Rp13.56 billion. This decrease was because in 2023 the Company suffered a loss on the remeasurement of the defined mandate program of Rp2.11 billion, whereas in 2022 it recorded a profit of Rp12.01 billion.

Current Year Comprehensive Profit (Loss)

The Company recorded current year comprehensive loss of Rp276.79 billion, an increase of Rp80.39 billion or 40.93% compared to 2022 which amounted



dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp196,41 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan, beban penyusutan, beban bunga pinjaman, dan kerugian atas pengukuran kembali program manfaat pasti.

to Rp196.41 billion. This was caused by an increase in the cost of revenues, depreciation expense, loan interest expense, and losses from remeasurement of the defined benefit program.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statements of Cash Flows

Tabel Arus Kas Konsolidasian Tahun 2022-2023
Table of Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	88.788	137.255	(48.467)	-35,31%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	(432.918)	(889.413)	(456.495)	-51,33%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	498.002	766.144	(268.142)	-35,00%
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash and Cash Equivalents	153.872	13.987	139.885	1.000,11%
Dampak Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas Impact of Changes in Exchange Rates on Cash and Cash Equivalents	570	(2.658)	3.228	121,44%
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents Balance at the Beginning of the Year	64.564	53.236	11.328	21,28%
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents Balance at the End of the Year	219.006	64.564	154.442	239,21%

Per 31 Desember 2023, saldo kas dan setara kas pada akhir tahun tercatat sebesar Rp219,01 miliar, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp154,44 miliar atau 239,21% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp64,56 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh pada tahun 2023 Perusahaan membayar Hosting Fee WSBK 2023 serta melakukan penundaan pembayaran atas Hosting Fee MotoGP 2023 dan baru dibayarkan pada Januari 2024.

As of December 31, 2023, the balance of cash and cash equivalents at the end of the year was recorded at Rp219.01 billion, a significant increase of Rp154.44 billion or 239.21% compared to 2022 which was Rp64.56 billion. This was mainly due to the Company paid the 2023 WSBK Hosting Fee in 2023 and delaying payment of the 2023 MotoGP Hosting Fee and only paying it in January 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flow from Operating Activities

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022-2023
Table of Cash Flow from Operating Activities 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers	891.571	672.682	218.889	32,54%
Penerimaan Bunga Interest Receipts	6.006	10.384	(4.378)	-42,16%
Pembayaran kepada Pemasok Payment to Suppliers	(534.037)	(350.570)	183.467	52,33%
Pembayaran Pajak Tax Payment	(49.062)	(32.608)	16.454	50,46%
Pembayaran Beban Gaji dan Tunjangan Payment of Salary and Benefits	(108.815)	(106.294)	2.521	2,37%
Penerimaan Operasional Lainnya Other Operational Receipts	20.624	29.269	(8.645)	-29,54%
Pembayaran untuk Biaya Operasional Lainnya Payment for Other Operating Expenses	(5.219)	(9.650)	(4.431)	-45,92%
Pembayaran Bunga Pinjaman Jangka Panjang Long-Term Loan Interest Payment	(72.717)	(63.005)	9.712	15,41%
Pembayaran Bunga Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loan Interest Payment	(59.563)	(12.951)	46.612	359,91%
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Flows Obtained from (Used for) Operating Activities	88.788	137.255	(48.467)	-35,31%

Arus kas dari aktivitas operasi di tahun 2023 tercatat sebesar Rp88,79 miliar, mengalami penurunan Rp48,47 miliar atau 35,31% dibanding tahun 2022 yang mencapai Rp137,25 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh pada tahun 2023 Perusahaan membayar Hosting Fee WSBK 2023 serta melakukan penundaan pembayaran atas Hosting Fee MotoGP 2023 dan baru dibayarkan pada Januari 2024.

Cash flow from operating activities in 2023 was recorded at Rp88.79 billion, a decrease of Rp48.47 billion or 35.31% compared to 2022 which reached Rp137.25 billion. This was because in 2023 the Company paid the 2023 WSBK Hosting Fee and postpone the payment of the 2023 MotoGP Hosting Fee and only paying it in January 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flow from Investment Activities

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022-2023
Table of Cash Flow from Investment Activities 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
(Penempatan)/Pencairan Deposito Berjangka Disbursement (Placement) of Time Deposit	11.540	(11.540)	23.080	200,00%
Pencairan Investasi Surat Berharga Disbursement of Investment in Securities	-	198	(198)	-100,00%
Penambahan Aset Tetap Addition of Fixed Assets	(443.891)	(876.208)	(432.317)	-49,34%



Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Penambahan Aset Takberwujud Addition of Intangible Assets	(567)	(1.863)	(1.296)	-69,57%
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Flow Obtained from (Used for) Investment Activities	(432.918)	(889.413)	(456.495)	-51,33%

Di tahun 2023, arus kas digunakan untuk aktivitas investasi tercatat sebesar Rp432,92 miliar, menurun Rp456,49 miliar atau 51,33% jika dibanding tahun 2022 yang mencapai Rp889,41 miliar. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 perusahaan menunda pelaksanaan investasi dengan menggunakan dana AIIB yang diakibatkan masih dilakukan penyesuaian masteplan The Mandalika.

In 2023, cash flow used for investment activities was recorded at Rp432.92 billion, a decrease of Rp456.49 billion or 51.33% compared to 2022 which reached Rp889.41 billion. This was because in 2023 the company postponed the implementation of investment using AIIB funds due to The Mandalika masterplant still being adjusted.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Financing Activities

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022-2023
Table of Cash Flow from Financing Activities 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Penerimaan Pinjaman Pihak Berelasi Loans Receipt from Related Parties	125.000	-	125.000	100,00%
Penerimaan dari Pinjaman Bank Receipts from Bank Loans	273.869	608.658	(334.789)	-55,00%
Pembayaran Pinjaman Bank Payment of Bank Loans	(166.635)	(22.998)	143.637	624,56%
Kenaikan pada Dana yang Dibatasi Penggunaannya Increase in Restricted Funds	273.059	205.627	67.432	32,79%
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liabilities	(7.290)	(25.143)	(17.853)	-71,01%
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Flow Obtained from (Used for) Financing Activities	498.002	766.144	(268.142)	-35,00%

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp498,00 miliar, menurun Rp268,14 miliar atau 35,00% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp766,14 miliar. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2022 perusahaan menarik pinjaman dari AIIB sedangkan tahun 2023 perusahaan tidak melakukan penarikan pinjaman dari AIIB.

Cash flow from financing activities in 2023 was Rp498.00 billion, a decrease of Rp268.14 billion or 35.00% compared to the previous year which reached Rp766.14 billion. This was because in 2022 the company withdrew loans from AIIB, while in 2023 the company did not withdraw loans from AIIB.

Rasio Keuangan Utama

Key Financial Ratios

Tabel Rasio Keuangan Utama Tahun 2022-2023
Table of Key Financial Ratios 2022-2023

(dalam %)
(in %)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022- 2023 (%)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio						
Rasio Kas (x) Cash Ratio (x)	0,29	0,28	0,40	3,42	0,69	4,52%
Rasio Lancar (x) Current Ratio (x)	0,48	0,40	0,53	4,06	1,00	19,99%
Rasio Aktivitas Activity Ratio						
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	2,18	0,32	0,97	-	-	572,99%
Perputaran Piutang (kali) Receivables Turnover (times)	2,88	2,50	1,60	2,24	4,27	14,95%
Rasio Leverage Leverage Ratio						
Rasio Utang terhadap Total Ekuitas Debt to Total Equity Ratio	2,91	2,20	1,45	0,45	0,31	32,22%
Time Interest Earned (kali/ times)	(0,73)	(1,26)	(4,79)	-	-	-42,08%
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio						
Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset Ratio of profit (loss) to total assets	-3,82	-3,06	-3,13	0,77	2,16	-24,66%
Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas Profit (loss) to equity ratio	-14,93	-9,81	-7,68	1,12	2,84	-52,29%
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan Profit (loss) to revenue/sales ratio	-31,45	-31,93	-55,59	9,50	13,73	1,51%

Kemampuan Membayar Utang Tingkat Kolektibilitas Piutang

Perusahaan mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Sementara, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka panjang.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Perusahaan mengukur kemampuannya dalam membayar utang jangka pendek dengan menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari rasio kas, dan rasio lancar. Informasi terkait rasio likuiditas Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

Ability to Pay Debts and Collectibility Level of Receivables

The Company measure their ability to fulfill obligations using liquidity ratio and solvency ratio. The liquidity ratio is used to measure the Company's ability to pay short-term payables. Meanwhile, the solvency ratio is used to measure the company's ability to pay long-term payables.

Ability to Pay Short-Term Payables (Liquidity)

The Company measures its ability to pay short-term payables using liquidity ratio which consists of the cash ratio and current ratio. Information related to the Company's liquidity ratio can be seen as follows:



Uraian Description	2023	2022	Perubahan Change (%)
Rasio Kas (x) Cash Ratio (x)	0,29	0,28	4,52%
Rasio Lancar (x) Current Ratio (x)	0,48	0,40	19,99%

Di tahun 2023, rasio kas Perusahaan tercatat sebesar 0,29x, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,28x. Sementara, rasio lancar tercatat sebesar 0,48x atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar 0,40x. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang jangka pendek Perusahaan pada tahun 2023 lebih baik dari pada tahun 2022.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Kemampuan membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek Perusahaan terlihat dari rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio liabilitas terhadap ekuitas dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset. Informasi rasio solvabilitas Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

In 2023, the Company's cash ratio was recorded at 0.29x, an increase from the previous year which was 0.28x. Meanwhile, the current ratio was recorded at 0.48x or an increase compared to 2022 which was 0.40x. This shows that the Company's ability to pay short-term debt in 2023 is better than in 2022.

Ability to Pay Long-Term Payables (Solvency)

The Company's ability to pay long-term and short-term payables can be seen from the solvency ratio. The solvency ratio consists of the liabilities to equity ratio and the liabilities to total assets ratio. Information on the Company's solvency ratio can be seen as follows:

Uraian Description	2023	2022	Perubahan Change (%)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) (x) Liability to Equity Ratio (DER) (x)	2,91	2,20	0,71
Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) (x) Liabilities to Assets Ratio (DAR) (x)	0,74	0,69	0,06

Di tahun 2023, Perusahaan mencatatkan DER sebesar 2,91x, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,20x. Sementara, DAR tercatat sebesar 0,74x atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar 0,69x. Hal tersebut menunjukkan bahwa liabilitas Perusahaan pada tahun 2023 mengalami peningkatan baik dibandingkan aset maupun ekuitas.

In 2023, the Company recorded a DER of 2.91x, an increase from the previous year of 2.20x. Meanwhile, DAR was recorded at 0.74x or an increase compared to 2022 which was 0.69x. This shows that the Company's liabilities in 2023 was increased both compared to assets and equity.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Dalam mengukur tingkat kolektibilitas piutang, Perusahaan menggunakan indikator *Collection Period*. Indikator ini digunakan untuk mengukur

Collectibility Level of Receivables

In measuring the collectibility level of receivables, the Company use the Collection Period indicator. This indicator is used to measure the average

periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu.

period required to collect receivables (in days). This indicator can be used to measure the Company's ability to collect the amount of receivables within a certain period of time.

Uraian Description	2023	2022	Perubahan Change (%)
Rasio Kolektibilitas Piutang (hari) Receivables Collectibility Ratio (days)	2,88	2,50	14,95%

Sementara, jumlah piutang usaha berdasarkan umur dapat dilihat sebagai berikut:

Meanwhile, the amount of account receivables based on age can be seen as follows:

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal	Persentase Percentage (%)
Lancar dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai Current and Does Not Decrease in Value	43.913	-	43.913	100,00%
<30 hari/ days	80.528	2.228	78.300	3.514,36%
30-60 hari/ days	59.733	120.311	(60.578)	-50,35%
61-91 hari/ days	776	44.848	(44.072)	-98,27%
91-120 hari/ days	-	-	-	-
>120 hari/ days	229.677	151.395	78.282	51,71%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(63.000)	(54.823)	8.177	14,92%
Jumlah Piutang Usaha Neto Total Net Account Receivables	351.627	263.960	87.667	33,21%

Di tahun 2023, jumlah piutang usaha tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp87,67 miliar atau setara dengan 33,21% dari Rp263,96 miliar di tahun 2022 menjadi Rp351,63 pada tahun 2023. Jumlah piutang berdasarkan umur terbesar berkontribusi oleh piutang usaha yang berumur kurang dari 30 hari.

Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Kinerja Perusahaan

Di tahun 2023, Perseroan tidak mengalami dampak perubahan harga terhadap pendapatan seiring dengan mulai kembali menggeliatnya sektor aviasi

In 2023, the amount of account receivables was recorded to have increased by Rp87.67 billion or equivalent of 33.21% from Rp263.96 billion in 2022 to Rp351.63 in 2023. The largest amount of receivables based on age was contributed by account receivables that were less mature than 30 days.

Impact of Price Changes on Company Revenues and Performance

In 2023, the Company did not experience the impact of price changes on revenue as the aviation and tourism sector begins to revive in Indonesia after



dan pariwisata di Indonesia pasca selesainya kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait dampak perubahan harga terhadap pendapatan dan kinerja Perusahaan.

the end of pandemic in Indonesia. Thus, there is no information regarding the impact of price changes on the Company's revenue and performance.

Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko

Capital Structure and Risk Management Practices

Rincian Struktur Modal

Capital Structure Details

Komposisi struktur modal Perusahaan pada tahun 2023 terdiri dari Liabilitas
Composition of the Company's capital structure in 2023 consists of Liabilities

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	Kontribusi Contribution (%)	Nominal	Kontribusi Contribution (%)	Nominal	Persentase Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	1.984.797	27,20%	2.545.096	37,10%	(560.299)	-22,01%
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	3.447.106	47,24%	2.173.066	31,68%	1.274.040	58,63%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	5.431.903	74,45%	4.718.162	68,78%	713.741	15,13%
Ekuitas Equity	1.864.454	25,55%	2.141.246	31,22%	(276.792)	-12,93%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	7.296.356	100,00%	6.859.408	100,00%	436.948	6,37%

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Demi menjaga kelangsungan usaha, Perusahaan mengelola permodalannya dengan memaksimalkan manfaat bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal. Selain itu, Perusahaan juga melakukan telaah dan mengelola struktur modal secara rutin, hal itu dilakukan untuk memastikan struktur modal tetap optimal dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham. Hal ini juga merupakan pertimbangan utama manajemen untuk meminta restrukturisasi keuangan kepada para krediturnya.

Management Policy on Capital Structure

In order to maintain business continuity, the Company manages its capital by maximizing benefits for Shareholders and other stakeholders and maintaining an optimal capital structure. Apart from that, the Company also reviews and manages its capital structure regularly to ensure that the capital structure remains optimal and provides optimal added value for shareholders. This is also management's main consideration in requesting financial restructuring from its creditors.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki adanya ikatan yang material untuk investasi barang modal. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Material Commitment for Capital Goods Investment

Throughout 2023, the Company has no material commitment for investment in capital goods. Thus, no information regarding this subject could be presented in this Annual Report.

Realisasi Investasi Barang Modal

Investasi Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk melakukan pembelian sejumlah aset, maupun perbaikan terhadap aset sehingga dapat memberikan nilai tambah di kemudian hari. Adapun rincian investasi barang modal yang direalisasikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Realization of Capital Goods Investment

Capital Goods Investment (*Capital Expenditure*) is a cost incurred by the Company to purchase a number of assets, as well as repairs to assets so that they can provide added value in the future. The details of capital goods investment realized by the Company are as follows:

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Investasi Barang Modal Capital Goods Investment	Tujuan Investasi Investment Objectives	Nilai Value
Pengembangan The Nusa Dua Nusa Dua Development	Pemeliharaan Kawasan Area Maintenance	6.799,36
Pengembangan The Mandalika Mandalika Development	Pembangunan Infrastruktur Infrastructure Construction	525.600,50
Pengembangan The Golomori Golomori Development	Pembangunan MICE MICE Construction	105.916,03
Lainnya Others	Investasi Lainnya Others Investment	1.909,00
Jumlah Total		640.224,89

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

1. Berdasarkan Surat No.S-46/MBU/01/2024 tertanggal 25 Januari 2024, Kementerian BUMN menyetujui penambahan modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata kepada Perusahaan sebesar Rp872.090.000.000 yang bersumber dari Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2023.
2. Perusahaan telah membayar tagihan kepada Dorna Sports, S.L sebesar EUR9,450,000 pada 12 Januari 2024; tagihan kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, JV PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Bunga Raya Lestari sebesar Rp18.811.614.706 pada 18 Januari 2024; dan tagihan kepada PT Hutama Karya (Persero) JO PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp54.010.644.980 pada 19 Februari 2024.

Information and Material Facts that Occured After the Date of the Accountant's Report

1. Based on Letter No.S-46/MBU/01/2024 dated January 25, 2024, the Ministry of SOEs approved additional capital of the Company (Persero) PT Aviassi Pariwisata to the Company in the amount of Rp872,090,000,000 sourced from the Additional Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Aviassi Pariwisata of Fiscal Year 2023 based on Government Regulation No. 65 of 2023.
2. The Company has paid the invoice to Dorna Sports, S.L amounting to EUR9,450,000 on January 12, 2024; bill to PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, JV PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Bunga Raya Lestari amounting to Rp18,811,614,706 on January 18, 2024; and bill to PT Hutama Karya (Persero) JO PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounting to Rp54,010,644,980 on February 19, 2024.

Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Perbandingan Target dan Realisasi

Pada awal tahun buku 2023, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023. Perbandingan

Comparison between Target and Realization and Projection for the Year

Comparison of Target and Realization

At the beginning of the 2023 fiscal year, the Company has set a number of targets to be achieved which are outlined in the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP). Comparison of the achievement



pencapaian beberapa target yang ditetapkan dengan realisasi tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

of several targets that have been set with the realization for the 2021 fiscal year is as follows:

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023
Comparison of Target and Realization in 2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	Target 2023 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Realisasi terhadap Target Achievement of Target Realization (%)
Posisi Keuangan Financial Positions			
Aset Assets	7.380.272	7.296.356	98,86%
Liabilitas Liabilities	4.524.203	5.431.903	120,06%
Ekuitas Equity	2.856.069	1.864.454	65,28%
Laba (Rugi) Profit (Loss)			
Pendapatan Revenues	1.114.834	885.214	79,40%
Beban Expenses	(332.602)	(539.001)	162,06%
Laba Tahun Berjalan Current Year Profit	(34.580)	(278.417)	805,14%
Dividen Dividend	-	-	-
Rasio Keuangan Financial Ratios			
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Liability to Equity Ratio (%)	1,58	2,91	183,92%
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%) Liabilities to Assets Ratio (%)	0,61	0,74	121,44%
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset (%) Profit to Total Assets Ratio (%)	-0,47%	-3,82%	814,41%
Rasio Laba terhadap Jumlah Ekuitas (%) Profit to Total Equity Ratio (%)	-1,21%	-14,93%	1.233,37%
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	-3,10%	-31,45%	1.014,00%

Posisi Keuangan

Aset Perusahaan pada tahun 2023 mencapai 98,86% dari anggaran dikarenakan perusahaan menunda investasi di Mandalika menggunakan dana AIIB karena masih dalam tahap perubahan masterplan kawasan sementara, liabilitas Perusahaan mencapai 120,06% dari anggaran yang disebabkan karena pada tahun 2023 diasumsikan perusahaan telah mendapatkan PMN untuk membiayai infrastruktur di Mandalika, namun sampai dengan akhir tahun perusahaan belum menerima PMN sehingga perusahaan belum bisa membaya tagihan dari vendor.

Financial Positions

The Company's assets in 2023 reached 98.86% of the budget because the company postponed investment in Mandalika using AIIB funds because it is still in the temporary regional master plan change stage, the Company's liabilities reached 120.06% of the budget because in 2023 it was assumed that the company will have received PMN to finance infrastructure in Mandalika, but until the end of the year the company had not received PMN so the company had not been able to pay bills from vendors.

Laba (Rugi)

Perusahaan mencatatkan pendapatan Rp885,21 miliar atau mencapai 79,40% dari anggaran dikarenakan target penjualan lahan yang diproyeksikan pada tahun 2023 sebesar Rp134,4 miliar belum dapat direalisasikan. Sementara, rugi tahun berjalan yang dicatatkan Perusahaan pada tahun 2023 adalah sebesar 805,14% dari anggaran rugi sebesar Rp34,58 miliar.

Rasio Keuangan

Pada tahun 2023, realisasi rasio keuangan Perusahaan menunjukkan rasio yang lebih baik dari anggaran.

Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Memasuki tahun 2024, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2024, antara lain:

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Comparison of Target and Realization in 2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2024 2024 Projection	Realisasi 2023 2023 Realization	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%)
Posisi Keuangan Financial Positions			
Aset Assets	7.095.595	7.296.356	-2,75%
Liabilitas Liabilities	4.659.130	5.431.903	-14,23%
Ekuitas Equity	2.436.465	1.864.454	30,68%
Laba (Rugi) Profit (Loss)			
Pendapatan Revenues	1.198.589	885.214	35,40%
Beban Expenses	(491.924)	(539.001)	26,50%
Laba Tahun Berjalan Current Year Profit	(215.499)	(278.417)	22,60%
Dividen Dividend	-	-	-
Rasio Keuangan Financial Ratios			
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Liability to Equity Ratio (%)	1,91	2,91	-34,36%
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%) Liabilities to Assets Ratio (%)	0,66	0,74	-11,80%

Profit (Loss)

The Company recorded revenue of Rp885.21 billion or reached 79.40% of the budget because the projected land sales target in 2023 of Rp134.4 billion could not be realized. Meanwhile, current year loss recorded by the Company in 2023 was 805.14% of the loss budget of Rp34.58 billion.

Financial Ratios

In 2023, the Company's realized financial ratios show ratios that are better than the budget.

Projection for the Year

Entering 2024, the Company has set a number of targets as outlined in the 2024 RKAP, including:



Uraian Description	Proyeksi 2024 2024 Projection	Realisasi 2023 2023 Realization	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%)
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset (%) Profit to Total Assets Ratio (%)	-3,04%	-3,82%	-20,41%
Rasio Laba terhadap Jumlah Ekuitas (%) Profit to Total Equity Ratio (%)	-8,84%	-14,93%	-40,77%
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	-17,98%	-31,45%	-42,84%

Posisi Keuangan

Aset Perusahaan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp7,09 triliun, turun 2,75% dari realisasi tahun 2023. Penurunan ini dikarenakan Perusahaan pada tahun 2024 membayarkan utang vendor menggunakan dana yang dibatasi penggunaannya. Sementara, jumlah liabilitas di tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp4,66 triliun, menurun 14,23% dari realisasi tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh Perusahaan telah mendapatkan PMN dan melunasi utang usaha.

Laba (Rugi)

Di tahun 2024, Perusahaan memproyeksikan jumlah pendapatan mampu tumbuh menjadi Rp1,20 triliun, mengalami peningkatan dari sebesar 35,40%. Hal ini disebabkan adanya pendapatan dari penjualan lahan.

Financial Positions

The Company's assets in 2024 projected to be Rp7.09 trillion, down 2.75% from the realization in 2023. This decrease is due to the Company paying vendor debts in 2024 using restricted funds. Meanwhile, total liabilities in 2023 was projected of Rp4.66 trillion, decreased by 14.23% from the realization in 2023. This decrease was caused by the Company having received PMN and paid off business debts.

Profit (Loss)

In 2024, the Company projects total revenue to grow to Rp1.20 trillion, an increase of 35.40%. This is due to income from land sales.

Tinjauan Keuangan Lainnya

Other Financial Overview

Kebijakan Dividen dan Informasi tentang Pembagiannya

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Kebijakan mengenai pembagian dividen di Perusahaan mengacu pada Anggaran Dasar yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2023, Perusahaan memutuskan untuk membagikan/tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2022.

Pembagian Dividen Tahun 2023 dan Kronologis Pembagian Dividen

Kronologis pembagian dan pembayaran dividen di tahun buku 2018 yang dibagikan di tahun 2019 hingga tahun buku 2022 yang dibagikan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tahun Pembagian Distribution Year	Tahun Dividen Dividend Year	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan Distributed Cash Dividends (Rp)
2023	2022	26 Juni 2023 June 26, 2023	-	-
2022	2021	30 Juni 2022 June 30, 2022	-	-
2021	2020	29 Juni 2021 June 29, 2021	-	-
2020	2019	3 Juli 2020 July 3, 2020	13 Juni 2019 June 13, 2019	7.304.060.000
2019	2018	28 Mei 2019 May 28, 2019	31 Mei 2018 May 31, 2018	6.319.177.264

Kontribusi terhadap Negara

Selain melakukan pembagian dividen, Perusahaan juga berkontribusi kepada Negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan baik Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, maupun Pajak Pertambahan Nilai. Di tahun 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran pajak dan retribusi sebesar Rp36.756.339.190, adapun rincian pembayaran pajak dan retribusi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Dividend Policy and Information on Distribution

Basic Policy on Dividend Distribution

The policy regarding dividend distribution in the Company refers to the Articles of Association, the amount of which is determined at the General Meeting of Shareholders (GMS). Based on the Annual GMS held on June 26, 2023, the Company decided to distribute/not distribute dividends for the 2022 fiscal year.

Dividend Distribution in 2023 and Chronology of Dividend Distribution

Chronology of dividend distribution and payments in the 2018 fiscal year which were distributed in 2019 to the 2022 fiscal year which were distributed in 2023 is as follows:

Contribution to the State

Apart from distributing dividends, the Company also contributes to the State by fulfilling tax obligations, including Income Tax, Land, and Building Tax, and Value Added Tax. In 2023, the Company has paid tax and retribution amounting to Rp36,756,339,190, the details of the tax and retribution payments can be seen as follows:



Jenis Pajak Type of Tax	2023	2022
PPH Pasal 21 Income Tax Article 21	13.049.847.381	10.413.787.653
PPH Pasal 22 Income Tax Article 22	174.225.568	113.599.790
PPH Pasal 23 Income Tax Article 23	5.192.586.028	4.951.697.246
PPH Pasal 26 Income Tax Article 26	5.416.126.902	1.025.485.191
PPH Pasal 4 Ayat 2 Income Tax Article 4 Paragraph 2	10.924.157.179	18.743.204.366
PPH Badan Corporate Income Tax	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Land and Building Tax	1.999.396.132	1.998.968.256
Jumlah Total	36.756.339.190	37.246.742.502

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Hingga 31 Desember 2023, ITDC tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dan tidak menerbitkan obligasi yang mewajibkan Perusahaan untuk melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Until December 31 2023, ITDC has never conducted an Initial Public Offering (IPO) and has not issued bonds that require the Company to report the use of proceeds from the public offering. Thus, there is no information regarding the actual use of proceeds from the public offering that can be presented in this Annual Report.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

Policy on Related Parties

The Company has transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 regarding "Related Party Disclosures." Related party is a person or entity related to the reporting entity:

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Perseroan jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Perseroan;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan; atau
 - c. Merupakan personil manajemen kunci dari Perseroan ataupun entitas induk.

1. A person or their immediate family member is said to have a relationship with the Company if that person:
 - a. Having control or joint control over the Company;
 - b. Has significant influence on the Company; or
 - c. Are key management personnel of the Company or parent entity.

2. Sedangkan suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
 - a. Entitas tersebut dan Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perseroan (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha tersebut);
 - b. Entitas tersebut dan Perseroan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - c. Satu entitas yang merupakan ventura bersama dari Perseroan dan entitas lain yang merupakan entitas asosiasi dari Perseroan;
 - d. Merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan. Jika Perseroan adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perseroan;
 - e. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (b) di atas;
 - f. Orang yang diidentifikasi dalam angka (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personel manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas);
 - g. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.
2. Meanwhile, an entity is said to have relationship with the Company if it fulfills one of the following:
 - a. The entity and the Company are members of the same business group, are an associated entity or joint venture of the Company (or the associated entity or joint venture is member of a business group in which the Company is a member of the business group);
 - b. The entity and the Company are joint ventures of the same third party;
 - c. One entity which is a joint venture of the Company and another entity which is associated entity of the Company;
 - d. It is a post-employment benefits program for employee benefits from the Company or entities related to the Company. If the Company is the organizer of the program, then the sponsoring entity is also related to the Company;
 - e. Entities controlled or jointly controlled by the person identified in (b) above;
 - f. The person identified in the figure (i) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity);
 - g. The entity, or member of a group of which the entity is part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity.

Nama Pihak Bertransaksi, Sifat Hubungan Afiliasi, Sifat Transaksi, serta Alasan Dilakukannya Transaksi

Name of the Transaction Party, Nature of the Affiliate Relationship, Nature of the Transaction, and Reason for the Transaction

Pihak Berelasi Related Party	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Jenis Transaksi Transaction Type
Pemerintah Republik Indonesia Government of Republic of Indonesia	Pemegang saham Shareholder	Setoran dalam bentuk aset/tanah, hak pengelolaan dan hibah lahan Deposits in the form of assets/land, management rights and land grants
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Penempatan dalam giro, deposito dan pinjaman Placement in current accounts, deposits and loans



Pihak Berelasi Related Party	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Jenis Transaksi Transaction Type
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Penempatan dalam giro, deposito dan pinjaman Placement in current accounts, deposits and loans
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Penempatan dalam giro, deposito dan pinjaman Placement in current accounts, deposits and loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Penempatan dalam giro, deposito dan pinjaman Placement in current accounts, deposits and loans
PT Asuransi Jiwa IFG (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Pengelolaan investasi Investment management
PT Hotel Indonesia Natour	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sewa lahan dan penyewaan Gedung Land and building leasing
PT Hotel Indonesia Properti	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sewa lahan Land lease
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Penyertaan saham pada entitas lain Investment in shares in other entities
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sewa lahan Land lease
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Biaya konstruksi Construction costs
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Biaya konstruksi Construction costs
PT Bank Mandiri Taspen	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Penempatan dalam giro dan deposito Placement in current accounts and deposits
PT Bali Griya Shanti	Entitas asosiasi Associated entity	Penyertaan saham dan sewa lahan Investment in shares and land lease
PT Peninsula Bali Resort	Entitas investasi Investment entity	Penyertaan saham dan sewa lahan Investment in shares and land lease
PT Garuda Adhimatra Indonesia	Entitas investasi Investment entity	Penyertaan saham Investment in shares
PT Jasa Marga Bali Tol	Entitas investasi Investment entity	Penyertaan saham Investment in shares
PT Pertamina (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sponsor Event Event Sponsorship
PT Pindad (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sponsor Event Event Sponsorship
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Jasa konsultansi Consultancy services

Pihak Berelasi Related Party	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Jenis Transaksi Transaction Type
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Penempatan dalam giro dan deposito, utang pembiayaan Placement in current accounts and deposits, debt financing
Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Pelepasan aset Asset disposal
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Biaya konstruksi, sponsor event Construction costs, event sponsorship
PT Angkasa Pura Supports	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Jasa kebersihan Cleaning services
PT Telekomunikasi Selular	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sponsor Event Event Sponsorship
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sewa booth Booth rental
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sponsor Event Event Sponsorship
PT Kimia Farma Diagnostika	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sewa booth Booth rental
PT Bukit Asam Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sewa booth Booth rental
PT Taspen (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sewa booth Booth rental
PT Angkasa Pura I	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sewa booth Booth rental
PT Aero Group Indonesia	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sewa booth Booth rental
PT Angkasa Pura Hotel	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sewa booth Booth rental
PT Sarinah	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Sewa booth Booth rental
PT Hutama Karya (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Biaya konstruksi Construction costs
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Pendapatan konsultasi Consulting income
KSO PT Nindya Karya - Lestari	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Biaya konstruksi Construction costs



Pihak Berelasi Related Party	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Jenis Transaksi Transaction Type
PT Utama Karya (Persero) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk, JO	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Biaya konstruksi Construction costs
KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - KSO PT Wijaya Karya (Persero) - PT Bunga Raya Lestari	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Biaya konstruksi Construction costs
PT Superintending Company of Indonesia	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Biaya konstruksi Construction costs
PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Biaya event Event costs
KSO PT Yodia Karya (Persero) - PT Parama Karya Mandiri	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Biaya konstruksi Construction costs
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Pendapatan konsultasi Consulting income
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Pendapatan konsultasi Consulting income
PT Jaminan Kredit Indonesia	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Pendapatan konsultasi Consulting income
PT Permodalan Nasional Madani	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Pendapatan konsultasi Consulting income
PT Asuransi Kredit Indonesia	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah Company under Government control	Pendapatan konsultasi Consulting income

Penjelasan mengenai Kewajaran Transaksi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh Perusahaan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal. Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, transaksi Perusahaan dengan pihak berelasi. Transaksi antar pihak yang berelasi juga didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian antar pihak yang pada umumnya mengacu kepada harga pasar dengan margin keuntungan tertentu.

Explanation regarding the Fairness of Transactions

Substantially all transactions with related parties carried out by the Company have been fulfilled under normal requirements. The fairness of all transactions by the Company with related parties has been disclosed in the financial statements, and is in accordance with PSAK 7 standards (revised 2014) concerning "Related Party Disclosures". Like transactions with third parties, the Company's transactions are with related parties. Transactions between related parties are also based on agreements between parties which generally refer to market prices with a certain profit margin.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2023
Realization of Related Party Transactions in 2023

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Persentase terhadap Jumlah Terkait Percentage of Related Amount (%)	Jumlah Total	Persentase terhadap Jumlah Terkait Percentage of Related Amount (%)	Nominal	Persentase Percentage (%)
Aset Assets						
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	213.939	2,93	59.030	0,85	154.909	262,42%
Dana di Lembaga Keuangan yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Use of Funds in Financial Institutions	354.745	4,87	627.804	9,15	(273.059)	-43,49%
Deposito Berjangka Time Deposits	-	-	11.540	100,00	(11.540)	-100,00%
Investasi pada Surat berharga Investment in Securities	2.820	0,04	2.964	0,04	(144)	-4,86%
Piutang Usaha Account Receivables	100.534	1,36	43.944	0,59	56.590	128,78%
Liabilitas Liabilities						
Utang Usaha Accounts Payable	266.725	4,91	172.128	2,98	94.597	54,96%
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short Term Bank Loans	199.642	1,00	136.356	2,88	63.286	46,41%
Pinjaman Bank Jangka Panjang Long Term Bank Loans	1.547.956	28,49	1.505.539	31,92	42.417	2,82%
Pinjaman Pihak Berelasi Related Party Loans	125.000	100,00	-	-	125.000	100,00%
Pendapatan Usaha Operating Revenues						
Pendapatan Usaha Operating Revenues	488.209	55,14	336.952	51,23	151.257	44,89%
Pembelian Purchasing						
Pembelian Purchasing	333.149	28,21	333.149	48,81	-	-



Kebijakan Perusahaan terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses review dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal.

Dalam melakukan transaksi afiliasi, Direksi memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi tersebut telah melalui prosedur yang memadai dan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Perusahaan melalui Dewan Komisaris serta Komite Audit dan Risiko, juga telah melakukan review untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). Mekanisme review atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi terkait transaksi afiliasi, dilakukan melalui proses audit oleh Komite Audit dan Risiko yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Selama tahun 2023, tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Company Policy regarding Transaction Review Mechanism

The Company carries out transactions with related parties in accordance with PSAK No. 7 concerning Disclosures of Related Parties. The fairness of transactions and compliance with regulations on related party transactions have gone through a review and audit process by internal and external auditors.

In carrying out affiliate transactions, the Board of Directors ensures that all transaction activities have gone through adequate procedures and are in accordance with the arm's length principle. The Company, through the Board of Commissioners and the Audit and Risk Committee, has also carried out review to ensure that affiliate transactions are fulfilled in accordance with generally accepted business practices and comply with the arm's-length principle. Review mechanism for transactions with related parties on affiliated transactions is carried out through audit process by the Audit and Risk Committee, the results of which are then reported to the Board of Commissioners.

Fulfillment of Related Regulations and Provisions

Compliance with related regulations and provisions, namely Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, is carried out through efforts to disclose PSAK 7 concerning "Related Party Disclosures" in the Company's 2023 financial statements which have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

During 2023, there is no financial information containing extraordinary or rare events. Thus, no information regarding this matter can be presented in this Annual Report.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2023, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan. Adapun perubahan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berdampak terhadap kinerja Perusahaan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Changes in Laws and Regulations that Affected the Company in the Last Fiscal Year

In 2023, there were changes in laws and regulations that has significant impact on the Company. The changes in regulations and/or laws that has impacted the Company's performance in 2023 are as follows:

Perubahan Peraturan Changes in Regulation	Penjelasan Description	Dampak terhadap Perusahaan Impact for Company
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia.	Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero). Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud tersebut berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pengembangan Pariwisata Bali. Penambahan penyertaan modal negara sebanyak 2.147.659 lembar saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh negara.	Penambahan penyertaan modal negara tersebut mengakibatkan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia berubah menjadi Perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia menjadi pemegang saham PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.
Regulation of the Republic of Indonesia Government Number 3 of 2023 concerning the Addition of the State Capital of the Republic of Indonesia to the Company Share Capital of PT Aviassi Pariwisata Indonesia.	The Republic of Indonesia has made additional capital participation into the share capital of PT Aviassi Pariwisata Indonesia with a Persero status. The additional state capital participation comes from the transfer of all Series B shares belonging to the Republic of Indonesia to the Company (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia which was established based on Government Regulation Number 27 of 1972 concerning State Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Limited Liability Companies (PERSERO) Pengembangan Pariwisata Bali. The additional state capital participation was made of 2,147,659 Series B shares in PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, which has been placed and fully paid up by the state.	The additional state capital participation resulted in the change of status of Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero to a limited liability company which is fully subject to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. Therefore, PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) becomes the shareholder of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.



Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2023, Perusahaan telah menyusun kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Adapun amandemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

1. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
2. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Panjang atau Jangka Pendek;
3. Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
4. Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
5. Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal; dan
6. Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

Changes in Accounting Policies Implemented by the Company in the Last Fiscal Year

In 2023, the Company has prepared accounting policies in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) which have been issued by the Financial Accounting Standards Board-Indonesian Accountants Association (DSAK-IAI) which were effective for the fiscal year starting on January 1, 2023 to December 31, 2023. As for amendments and adjustments to standards that are effective for the period starting on or after January 1, 2023, with early implementation permitted, namely:

1. Amendment to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
2. Amendment to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Long Term or Short Term;
3. Amendment to PSAK 16: Fixed Assets regarding Results Before Intended Use;
4. Amendment to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding the Definition of Accounting Estimates;
5. Amendment to PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Taxes Related to Assets and Liabilities Arising from Single Transactions; and
6. Revision of PSAK 107: Ijarah Accounting.

Implementation of these standards did not have material impact on the amount reported in the current or previous periods.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha ITDC pada Tahun Buku Terakhir

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan, baik pada tahun buku maupun di tahun-tahun mendatang.

Assessment Manajemen atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, Manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya.

Dalam mengukur serta menilai hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha dengan menggunakan beberapa parameter, seperti analisis kekuatan kondisi keuangan maupun non keuangan. Sementara, sebagai bagian dari upaya mitigasi atas risiko yang mungkin dihadapi, Perusahaan telah menetapkan sistem manajemen risiko yang baik, berupa penetapan sejumlah risiko utama beserta upaya mitigasinya.

Asumsi yang Digunakan oleh Manajemen untuk Melakukan Assessment

Selain aspek keuangan dan non keuangan, Manajemen juga mengambil beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha untuk tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Subjects that have the Potential to Have Significant Influence on ITDC's Business Continuity in the Last Fiscal Year

Throughout 2023, there were no significant factors influencing on the Company's business continuity, both in the fiscal year and in the years to come.

Management Assessment of Subjects that Have Significant Influence on Business Continuity

Management has assessed the Company's ability to continue its business continuity and believes that the Company has resources to continue its business in the future. In addition, Management does not see any material uncertainty that could raise significant doubt about the Company's ability to continue its business.

In measuring and assessing things that have the potential to have significant impact on business continuity using several parameters, such as analysis of the strength of financial and non-financial conditions. Meanwhile, as part of mitigation efforts for risks that may be faced, the Company has established good risk management system, in the form of determining a number of main risks and their mitigation efforts.

Assumptions Used by Management to Conduct Assessment

Apart from financial and non-financial aspects, Management also took several factors into consideration when assessing business continuity for 2023, as stated in the following table:



Asumsi Makro Macro Assumptions	Nominal
Nilai Tukar Rupiah Rupiah Exchange Rate	Rp14.750/USD
Produk Domestik Bruto Gross Domestic Products	5,3%
Inflasi Inflation	3,3%
Tingkat Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) State Treasury Notes (SPN) Interest Rate	7,9%
Harga Minyak Mentah Indonesia Indonesian Crude Oil Prices	90 USD/Barrel

Berdasarkan kondisi dan asumsi di atas, Perusahaan diharapkan mampu untuk lebih adaptif dalam merespon perkembangan dan perubahan lingkungan yang semakin dinamis.

Based on the conditions and assumptions above, the Company is expected to be able to be more adaptive in responding to developments and changes in an increasingly dynamic environment.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Soundness Level

Perusahaan senantiasa mengukur tingkat kesehatan yang mengacu pada kriteria penilaian tingkat kesehatan perusahaan dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Di tahun 2023, Perusahaan berhasil memperoleh skor tingkat kesehatan Perusahaan sebesar 59,00 dengan kategori “Kurang Sehat” dan klasifikasi “BBB”.

Adapun rincian realisasi pencapaian skor tingkat kesehatan Perusahaan untuk tahun 2023 terhadap target dapat dilihat sebagai berikut:

A. Aspek Keuangan

No.	Indikator Indicator	Bobot Weight	Rasio Ratio (%)	Nilai Score
1.	Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return to Shareholders (ROE)	20,00	-1,21	0,00
2.	Imbalan Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	15,00	9,58	7,50
3.	Rasio Kas Cash Ratio	5,00	27,76	4,00
4.	Rasio Lancar Current Ratio	5,00	74,01	0,00
5.	Collection Period	5,00	4,50	4,50
6.	Perputaran Persediaan Inventory Turnover	5,00	0,21	5,00
7.	Perputaran Total Asset (TATO) Total Asset Turnover (TATO)	5,00	37,92	4,00
8.	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva Ratio of Owner's Equity to Total Assets	10,00	38,70	10,00
Total		70,00		35,00

B. Aspek Operasional

No.	Indikator Indicator	Bobot Weight	Rasio Ratio (%)	Nilai Score
1.	Aspek Operasional Operational Aspects			
	% Progress Infrastruktur Dasar Mandalika % of Basic Infrastructure Progress of Mandalika	4,00	100	4,00

The Company always measures the level of soundness which refers to criteria for assessing the level of company's soundness in the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. Kep-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning Assessment of the Soundness Level of State-Owned Enterprises. In 2023, the Company succeeded in obtaining Company soundness level score of 59.00 in the “Less Sound” category and “BBB” classification.

Details of the realization of achieving the Company's soundness level score for 2023 against the target can be seen as follows:

A. Financial Aspects

B. Operational Aspects



No.	Indikator Indicator	Bobot Weight	Rasio Ratio (%)	Nilai Score
2.	Aspek Dinamis Dynamic Aspects			
	Research and Development	2,00	100	2,00
	Peningkatan Kualitas SDM Human Resources Quality Improvement	4,00	100	4,00
	Pelayanan kepada Pelanggan Service to Customers	5,00	100	5,00
Total		15,00		15,00

C. Aspek Administrasi**C. Administration Aspects**

No.	Indikator Indicator	Bobot Weight	Rasio Ratio (%)	Nilai Score
1.	Penyampaian Laporan Audit Submission of Audit Report	3,00	< 4 Bulan	3,00
2.	Waktu Penyampaian RKAP RKAP Submission Time	3,00	< 2 Bulan	3,00
3.	Laporan Periodik Periodic Report	3,00	< 1 Bulan	3,00
4.	Kinerja PUKK PUKK Performance			
	Efektivitas Penyaluran Dana Effectiveness of Fund Distribution	3,00	100,00	0,00
	Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Dana Collectibility Level of Fund Distribution	3,00	70,86	0,00
Total		15,00		9,00

D. Total Nilai**D. Total Score**

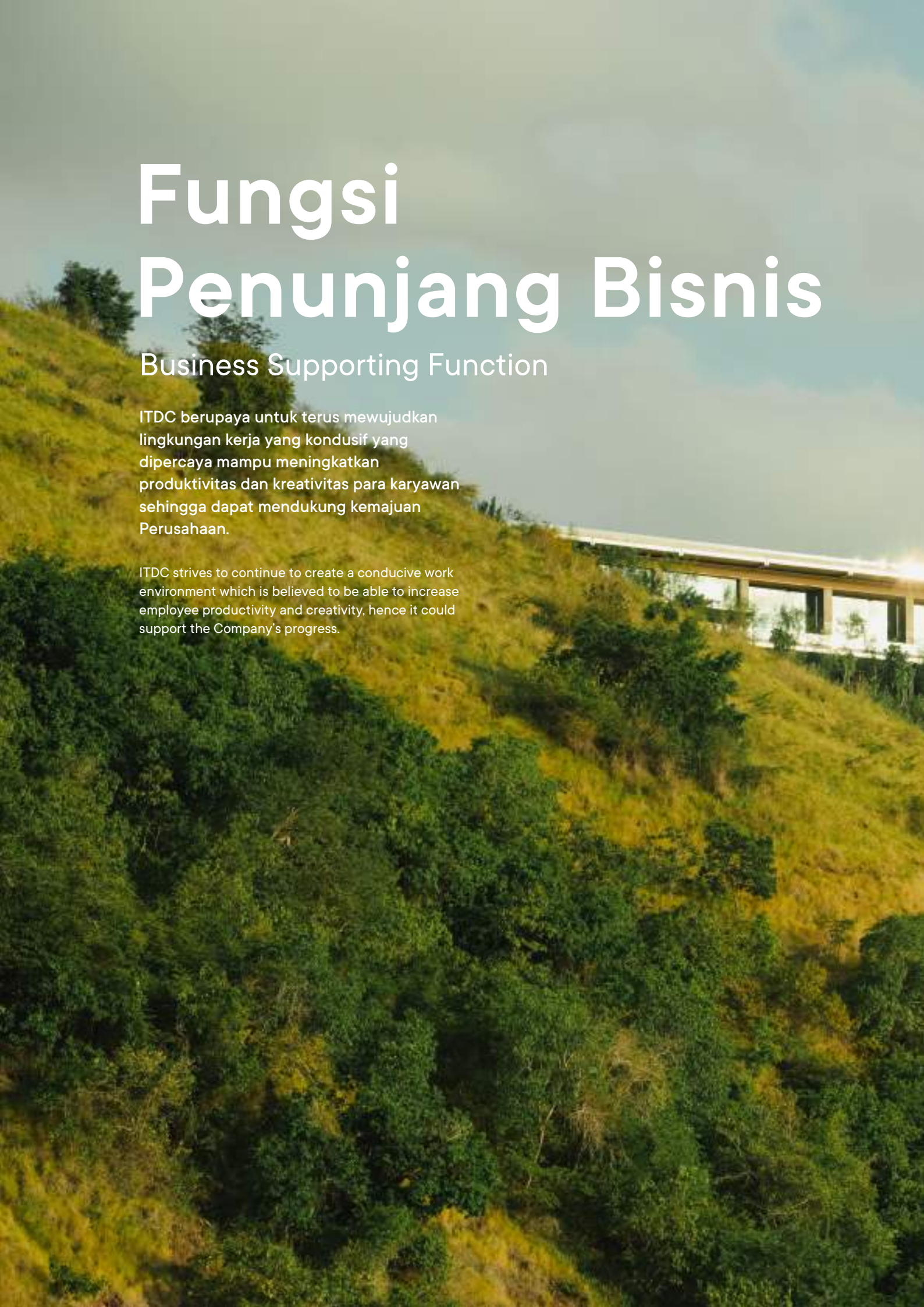
No.	Indikator Indicator	Nilai Score
1.	Aspek Keuangan Financial Aspects	35,00
2.	Aspek Operasional Operational Aspects	15,00
3.	Aspek Administrasi Administration Aspects	9,00
Total		59,00
	Tingkat Kesehatan Soundness Level	BBB (Kurang Sehat) BBB (Less Sound)

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Supporting Function

ITDC berupaya untuk terus mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif yang dipercaya mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas para karyawan sehingga dapat mendukung kemajuan Perusahaan.

ITDC strives to continue to create a conducive work environment which is believed to be able to increase employee productivity and creativity, hence it could support the Company's progress.





05

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Resources Management

Perusahaan memahami bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dalam menghadapi berbagai tantangan menjadi hal yang sangat krusial. Bagi ITDC, karyawan merupakan mitra strategis yang dapat mendorong Perusahaan memastikan keberlangsungan bisnis, serta pencapaian atas visi, misi, maupun target-target lain yang telah diterapkan oleh Manajemen dan/atau Pemegang Saham.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perusahaan telah menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan SDM yang bertujuan untuk mengembangkan kapabilitas karyawan. Perusahaan juga senantiasa menanamkan nilai-nilai AKHLAK agar seluruh Insan Perusahaan dapat mengimplementasikan nilai tersebut pada seluruh aktivitasnya. Perusahaan senantiasa berinovasi dalam melakukan pengelolaan SDM serta mendukung terciptanya keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan (*work-life balance*) dan kesejahteraan karyawan. ITDC percaya dengan mengimplementasikan langkah strategis tersebut, seluruh Insan Perusahaan dapat menjadi individu yang unggul, andal, loyal, berkompeten, dan memiliki kapabilitas tinggi.

Sekilas Perkembangan Demografi Karyawan

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan memiliki jumlah karyawan sebanyak 197 orang, mengalami peningkatan sebanyak 7 orang atau setara dengan 3,7% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 190 orang. Adapun demografi karyawan hingga akhir tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

The Company understands that reliable Human Resources (HR) is very crucial in facing various challenges. For ITDC, employees are strategic partners who can encourage the Company to ensure business continuity, as well as in achieving its vision, mission, and other targets that have been implemented by Management and/or Shareholders.

To realize this goal, the Company has developed and implemented HR management policies aimed at developing employee capabilities. The Company also always instills AKHLAK values so that all Company Personnel can implement these values in all their activities. The Company continues to innovate in managing human resources and supports the creation of work-life balance and employee welfare. ITDC believes that by implementing these strategic steps, all Company Personnel can become individuals who are excellent, reliable, loyal, competent, and have high capabilities.

Overview of Employee Demographic Development

Throughout 2023, the Company has a total of 197 employees, an increase of 7 people or the equivalent of 3.7% compared to 2022 which was 190 people. The employee demographics until the end of 2023 can be seen as follows:


Komposisi Karyawan berdasarkan Level Organisasi

Employee Composition based on Organizational Level

Level Organisasi Organizational Level	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
BOD-1	21	11%	17	8,95%
BOD-2	29	15%	31	16,32%
BOD-3	40	20%	32	16,84%
BOD-4/Officer	107	54%	110	57,89%
Jumlah Total	197	100,00%	190	100,00%

Demografi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition based on Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Sarjana dan Pascasarjana Undergraduate and Postgraduate	140	71%	132	69,47%
Diploma	23	12%	22	11,58%
SMA dan Sederajat High School or Equivalent	34	17%	36	18,95%
SMP dan Sederajat Junior High School or Equivalent	0	0%	-	-
SD dan Sederajat Elementary School or Equivalent	0	0%	-	-
Jumlah Total	197	100,00%	190	100,00%

Komposisi Karyawan berdasarkan Unit Kerja

Employee Composition based on Work Unit

Unit Kerja Work Unit	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Direktorat Utama President Directorate	21	11%	17	8,95%
Direktorat Keuangan, Strategi & Manajemen Risiko Directorate of Finance, Strategy & Risk Management	25	13%	25	13,16%
Direktorat Operasi Directorate of Operations	9	5%	22	11,58%
Direktorat Pengembangan Bisnis Directorate of Business Development	29	15%	29	15,26%

Unit Kerja Work Unit	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Direktorat SDM & Legal Compliance Directorate of HR & Legal Compliance	35	18%	28	14,74%
SBU-The Mandalika	26	13%	19	10,00%
SBU-The Nusa Dua	50	25%	50	26,32%
SBU-The Golo Mori	2	1%		
Jumlah Total	197	100,00%	190	100,00%

Komposisi Karyawan berdasarkan Usia Employee Composition based on Age

Rentang Usia Age Range	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
> 51 Tahun/ years old	24	12%	13	6,84%
> 46-50 Tahun/ years old	17	9%	20	10,53%
> 41-45 Tahun/ years old	15	8%	15	7,89%
> 36-40 Tahun/ years old	29	15%	28	14,74%
> 31-35 Tahun/ years old	80	41%	75	39,47%
> 25-30 Tahun/ years old	32	16%	39	20,53%
Jumlah Total	197	100,00%	190	100,00%

Demografi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin Employee Composition based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Laki-laki Male	135	69%	129	67,89%
Perempuan Female	62	31%	61	32,11%
Jumlah Total	197	100,00%	190	100,00%



Komposisi Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Pegawai Tetap Permanent Employee	176	22%	177	27,27%
Pegawai Kontrak Non Permanent Employee	21	2,5%	13	2,00%
Tenaga Alih Daya Outsource	604	75,5%	459	70,72%
Jumlah Total	801	100,00%	649	100,00%

Jumlah Pegawai Perusahaan sampai tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 801 orang, yang terdiri dari 176 orang pegawai tetap dan 21 orang pegawai kontrak. Selain pegawai tetap dan pegawai kontrak, Perusahaan juga memiliki tenaga alih daya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Di tahun 2023, jumlah tenaga alih daya Perusahaan adalah sebanyak 604 orang, mengalami peningkatan sebesar 31% dari 459 tenaga ahli daya di tahun 2022.

The number of Company employees as of December 31, 2023 is 801 people, consisting of 176 permanent employees and 21 contract employees. Apart from permanent employees and contract employees, the Company also has outsourced staff to carry out its operational activities. In 2023, the number of Company outsource workers was 604 people, an increase of 31% from 459 outsources in 2022.

Strategi Pengelolaan SDM

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, ITDC senantiasa menerapkan berbagai strategi, salah satunya strategi pengelolaan SDM. Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan SDM secara komprehensif mulai dari penerimaan, penilaian kinerja, remunerasi, hingga pengembangan karier bagi seluruh karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik.

Pengelolaan SDM ITDC dijalankan oleh Divisi Human Capital dan Divisi General Affair melalui Bagian Human Capital. Perusahaan berupaya untuk senantiasa menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan sistem pengelolaan SDM yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui program pengelolaan SDM yang unggul diharapkan mampu membentuk karyawan yang tangguh, unggul dan produktif sehingga dapat mendukung Perusahaan dalam meningkatkan posisinya di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian.

HR Management Strategy

In conducting its business activities, ITDC always implement various strategies, one of which is HR management strategy. The Company is committed to carrying out comprehensive HR management starting from recruitment, performance assessment, remuneration, to career development for all employees without distinction of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.

ITDC HR management is carried out by the Human Capital Division and the General Affairs Division through the Human Capital Section. The Company strives to always implement the principles of good corporate governance by implementing HR management system that is transparent, measurable, and accountable. Through excellent HR management program, it is hoped that we will be able to form employees who are tough, superior, and productive so that they can support the Company in improving its position amidst conditions full of uncertainty.

Bagian Human Capital berfungsi sebagai *strategic partner* Perusahaan melalui optimalisasi pengelolaan *business process* di bidang sumber daya manusia. Meskipun saat ini wilayah kerja Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) wilayah yaitu Jakarta, Nusa Dua dan Mandalika, namun kebijakan pengelolaan SDM yang diterapkan oleh Bagian Human Capital bersifat terpusat (*Corporate Function*). Secara strategis, Bagian Human Capital bertanggungjawab untuk:

1. Menyiapkan SDM berkompetensi tinggi
2. Meningkatkan produktivitas pegawai
3. Meningkatkan engagement Pegawai
4. Meningkatkan daya saing melalui implementasi sistem manajemen SDM yang terintegrasi

Rekrutmen

Bagi ITDC, proses rekrutmen yang dijalankan oleh Bagian Human Capital merupakan kunci utama guna memperoleh talenta terbaik sesuai dengan kebutuhan guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Perusahaan memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh calon karyawan untuk mengikuti proses rekrutmen selama memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, dan posisi yang dibutuhkan. Selain itu, kebijakan program rekrutmen ini dilakukan tanpa ada diskriminasi dan transparansi.

Dalam menjalankan proses ini, Perusahaan senantiasa mengimbangi pemenuhan kebutuhan SDM baik yang sudah berpengalaman maupun fresh graduate agar selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Perekrutan SDM di lingkungan Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan karyawan untuk tahun berjalan serta mengacu kepada standar kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan memegang teguh Nilai-nilai Perusahaan.

Di tahun 2023, strategi pelaksanaan rekrutmen pegawai telah diselaraskan dengan program kerja Kementerian BUMN melalui Program Rekrutmen Bersama BUMN serta melakukan pemutakhiran proses rekrutmen Prohire. Adapun jumlah rekrutmen karyawan yang dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Human Capital Department functions as strategic partner for the Company by optimizing business process management in the field of human resources. Even though currently the Company's work area consists of 3 (three) regions, namely Jakarta, Nusa Dua, and Mandalika, the HR management policy implemented by the Human Capital Section is centralized (Corporate Function). Strategically, the Human Capital Department is responsible for:

1. Prepare highly competent human resources
2. Increase employee productivity
3. Increase employee engagement
4. Increase competitiveness through implementing an integrated HR management system

Recruitment

For ITDC, the recruitment process of the Human Capital Department is the main key to obtaining the best talent according to the needs to realize the Company's vision and mission. The Company provides ample opportunities for all prospective employees to take part in the recruitment process as long as they meet the administrative, competency, and position requirements required. Apart from that, this recruitment program policy is carried out without discrimination and transparency.

In carrying out this process, the Company always balances meeting the needs of human resources, both experienced and fresh graduates, hence they are in line with the development and growth of the Company's business. HR recruitment within the Company is carried out with reference to projected employee needs for the current year and refers to competency standards as stated in the Company's Articles of Association while upholding the Company's Values.

In 2023, the strategy for implementing employee recruitment has been aligned with the work program of the Ministry of SOEs through the SOEs Joint Recruitment Program as well as updating the Prohire recruitment process. The number of employee recruitments carried out in 2023 is as follows:



Jumlah Rekrutmen berdasarkan Pengalaman Number of Recruitments based on Experience

Keterangan Description	2023	2022
Lulusan Baru New Graduate	1	5
Berpengalaman Experienced	16	4
Jumlah Total	17	9

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengembangan talenta karyawan, di mana setiap karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan secara berjenjang. KPI tersebut ditinjau dan dirumuskan setiap tahun berdasarkan konsep Balance Scorecard untuk memenuhi rencana jangka panjang yang telah ditetapkan untuk mencapai visi Perusahaan. Program penilaian kinerja ini berlaku untuk semua level karyawan agar dapat memberikan kinerja yang optimal bagi setiap unit kerja. Adapun tahapan penilaian kinerja di Perusahaan terdiri dari:

1. Perencanaan dengan menetapkan poin-poin penilaian
Pada tahap perencanaan, target kinerja Pegawai ditetapkan berdasarkan target organisasi yang diturunkan ke unit kerja masing-masing, hingga ke level individu.
2. Pengawasan dan kajian secara berkala terhadap hasil pencapaian target per periode
Pada tahap pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan hasil pencapaian target yang dilaksanakan setiap tengah tahun dan akhir tahun.
3. Penilaian terhadap hasil pencapaian kinerja dalam satu tahun
Pada tahap ini bertujuan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan kinerja setiap pegawai sehingga poin-poin penilaian yang hasilnya belum memuaskan dapat diperbaiki dan target yang direncanakan bisa tercapai.

Dengan penilaian kinerja ini, Perusahaan dapat memiliki profil terhadap pencapaian kinerja pada setiap karyawan. Proses penilaian kinerja juga disertai dengan proses *coaching and mentoring*

Performance Assessment

Performance assessment is part of the employee talent development process, where each employee carries their duties and responsibilities in accordance with the Key Performance Indicators (KPI) that have been determined in stages. These KPIs are reviewed and formulated every year based on the Balance Scorecard concept to fulfill long-term plans that have been set to achieve the Company's vision. This performance assessment program applies to all levels of employees in order to provide optimal performance for each work unit. The stages of performance assessment in the Company consist of:

1. Planning by setting assessment points
At the planning stage, employee performance targets are determined based on organizational targets that are passed down to each work unit, down to the individual level.
2. Regular monitoring and review of the results of target achievement per period
This monitoring stage is conducted through checking the results of target achievement which is carried out every mid-year and at the end of the year.
3. Assessment of performance achievement in one year
At this stage the aim is to map the performance strengths and weaknesses of each employee so that assessment points whose results are not satisfactory can be corrected and the planned targets can be achieved.

With this performance assessment, the Company can have profile of the performance achievement of each employee. The performance assessment process is also accompanied by coaching and

yang diharapkan dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Hasil penilaian kinerja merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk penetapan *reward* dan *punishment*, penentuan kategori talenta, *upgrading*, dan promosi jabatan.

Pengembangan Karier, Promosi, dan Mutasi

Perusahaan senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan untuk meningkatkan kariernya. Pengembangan karier ini dapat dilakukan apabila karyawan memiliki kinerja yang baik dengan tetap memperhatikan beberapa faktor, seperti kebutuhan Perusahaan itu sendiri, job family atas jabatan, kemampuan, tingkat kinerja, *talent classification*, *job grade* maupun *individual grade*, dan beberapa persyaratan lainnya.

Pengembangan karier di Perusahaan terdiri beberapa jenis, yaitu promosi dan mutasi/rotasi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman menyeluruh kepada setiap karyawan atas keseluruhan operasional dan bisnis yang dikembangkan. Melalui pengembangan karier ini, diharapkan Insan Perusahaan dapat memahami prosedur, sistem, dan kebijakan yang perlu diterapkan dalam kegiatan sehari-hari guna mencapai visi Perusahaan. Adapun promosi dan mutasi yang dilakukan oleh Perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Promosi dan Mutasi Karyawan

Employee Promotion and Transfer

Hasil Review Review Result	2023	2022
Promosi Promotion	10	17
Mutasi/Rotasi Transfer/ Rotation	33	82
Demosi (Penurunan Jabatan) Demotion	0	0

Pelatihan dan Pengembangan Talenta SDM

ITDC memandang bahwa SDM merupakan salah satu aset terbesar sekaligus fondasi pada pelaksanaan strategis sesuai dengan kebutuhan dan bisnis Perusahaan. Perusahaan juga menganggap pentingnya setiap karyawan untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi, keahlian, dan kesempatan yang tersedia. Atas dasar ini,

mentoring process which is expected to encourage employees to improve their performance in the following period. Results of the performance assessment are one of the factors used to determine rewards and punishment, determine talent categories, upgrading, and promotion.

Career Development, Promotion, and Transfer

The Company always provides equal opportunities for every employee to advance their career. This career development can be carried out if employees have good performance while still paying attention to several factors, such as the needs of the Company itself, job family for position, abilities, performance level, talent classification, job grade and individual grade, and several other requirements.

Career development in the Company consists of several types, namely promotion and transfer/rotation. This aims to provide comprehensive experience to each employee regarding entire operations and business being developed. Through this career development, it is hoped that Company Personnel can understand the procedures, systems, and policies that need to be implemented in daily activities to achieve the Company's vision. Promotion and transfer in the Company in the last 2 (two) years can be seen as follows:

HR Talent Training and Development

ITDC views that HR is one of the greatest assets and the foundation for strategic implementation in accordance with the Company's needs and business. The Company also considers it important for each employee to progress and develop according to the potential, skills, and opportunities available. On this basis, the Company encourages the development



Perusahaan mendorong pengembangan kapabilitas dan kompetensi karyawan menggunakan pendekatan terintegrasi yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan karyawan.

Bagian Human Capital senantiasa menyelaraskan strategi pengembangan kompetensi dengan kebijakan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien. Pengembangan kompetensi karyawan dilakukan melalui *in-house training*, pelatihan yang dilakukan oleh pihak ketiga, workshop, dan sebagainya.

of employee capabilities and competencies using an integrated approach designed with employee needs in mind.

The Human Capital Department always aligns competency development strategies with effective and efficient HR management policies. Employee competency development is carried out through in-house training, training conducted by third parties, workshop, and so on.

Biaya Pelatihan SDM Tahun 2023 HR Training Costs in 2023

Jenis Program Program Type	Jumlah Kelas Number of Classes	Total Biaya Total Cost (Rp)
Pelatihan Kompetensi Competency Training	32	322.101.415
Pelatihan Managerial Managerial Training	6	301.929.581
Seminar	10	24.750.000
Workshop	11	218.588.840
Jumlah Keseluruhan Total	59	867.369.836

Perbandingan Biaya Pelatihan SDM Comparison of HR Training Cost

Uraian Description	Anggaran 2023 2023 Budget (Rp)	Realisasi 2023 2023 Realization (Rp)	Anggaran 2022 2022 Budget (Rp)	Realisasi 2022 2022 Realization (Rp)
Biaya Pelatihan SDM HR Training Costs	687.800.000	867.369.836	697,500,000	250,711,531

Perbandingan Jumlah Jam Pelatihan Comparison of Number of Training Hours

2023	2022
6.690 jam/ hours	2.546 jam/ hours

Perbandingan Rata-Rata Jumlah Jam Pelatihan per Karyawan Comparison of Average Number of Training Hours per Employee

2023	2022
31,41 jam/ hours	12,2 jam/ hours

Penghargaan kepada Karyawan

ITDC yang menaruh perhatian penting kepada SDM yang dimiliki turut menganggap bahwa pemberian penghargaan kepada karyawan merupakan salah satu hal penting. Pemberian penghargaan juga menjadi salah satu simbol apresiasi dari Perusahaan kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan kinerja para karyawan. Kebijakan atas pemberian penghargaan (*reward*) ini telah diatur dalam SK Penghargaan Masa Kerja, selain Direksi juga memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dan memiliki performa yang cukup bagus. Adapun penghargaan yang diberikan kepada karyawan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Penghargaan kepada Karyawan Tahun 2023

Appreciation for Employees in 2023

No	Jenis Penghargaan Award Type	Jumlah Orang Number of Person	Bentuk Penghargaan Award Form
1.	Penghargaan Purna Bhakti Purna Bhakti Award	2 Orang/ People	Cincin Emas 22 Karat 10 Gram & Pelakat 22 Karat Gold Ring 10 Grams & Plaque
2.	Penghargaan Masa Kerja 25 Tahun Appreciation for 25 Years of Services	4 Orang/ People	Cincin Emas 22 Karat 10 Gram & Piagam 22 Karat Gold Ring 10 Grams & Charter

Pemenuhan Hak Karyawan

Dalam melakukan pengelolaan SDM, Perusahaan senantiasa memperhatikan hak-hak karyawan dan kesejahteraan karyawan dengan menyusun program remunerasi. Program remunerasi karyawan bertujuan untuk memberikan fasilitas peningkatan kinerja dari setiap karyawan sekaligus sebagai upaya untuk mempertahankan talenta terbaik yang dimiliki.

Remunerasi yang diberikan kepada karyawan juga merupakan bentuk keseriusan dan komitmen imbal jasa kepada karyawan mencakup imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang dan imbalan pascakerja, serta pesangon pemutusan kerja. Imbal jasa tersebut diberikan melalui gaji/honorarium, tunjangan, bonus, penghargaan masa kerja, hingga program kesehatan, dan program pensiun bagi karyawan.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan pemenuhan hak karyawan berupa program remunerasi yang kompetitif. Pemberian imbal jasa ini juga merupakan kebijakan pemenuhan

Appreciation to Employees

ITDC, which pays important attention to its human resources, also considers that giving appreciation to employees is important. Giving reward is also a symbol of appreciation from the Company to employees who have worked well. It is hoped to become a stimulus in improving employee performance. The policy for giving awards has been regulated in the Service Award Decree, apart from the Board of Directors also giving awards to employees who excel and have quite good performance. The awards given to employees in 2023 are as follows:

Fulfillment of Employee Rights

In managing human resources, the Company always pays attention to employee rights and employee welfare by preparing remuneration programs. The employee remuneration program aims to provide facilities to improve the performance of each employee as well as an effort to retain the best talent.

The remuneration given to employees is also a form of seriousness and commitment to employee compensation, including short-term, long-term and post-employment benefits, as well as severance pay for termination of employment. Remuneration for these services is provided through salary/honorarium, allowance, bonus, long service awards, health program, and pension program for employees.

The Company is committed to providing fulfillment of employee rights in the form of competitive remuneration program. Providing compensation for these services is also a policy of fulfilling employee



hak karyawan yang telah disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan agar dapat mengakomodir perubahan komposisi karyawan, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Perusahaan yang lebih baik.

rights which has been adjusted to the Company's capabilities in order to accommodate changes in employee composition, manage labor costs, and in order to encourage better achievement of the Company's business goals.

Jumlah Remunerasi yang Diberikan kepada Karyawan Total Remuneration Given to Employees

Tahun Year	Jumlah Remunerasi Total Remuneration (Rp)	Jumlah Penerima Remunerasi Total Remuneration Recipient (Orang/ People)
2023	69.774.768.934	197
2022	69.262.862.247	190

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah Ratio of Highest Salary and Lowest Salary

Rasio Ratio	Skala Perbandingan 2023 2023 Comparison Scale	Skala Perbandingan 2022 2022 Comparison Scale
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah Ratio of the highest and lowest employee salary	1 : 24	1 : 24
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Ratio of the highest and lowest salary for the Board of Directors	1 : 1,2	1 : 1,2
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah Ratio of the highest and lowest salary for the Board of Commissioners	1 : 1,1	1 : 1,1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi Ratio of the highest salary for the Board of Directors and the highest for employees	1 : 2	1 : 2

Klaim Kesehatan Medical Claim

Klaim yang Dibayarkan di 2023 Paid Claims in 2023

Rp 4.707.777.425

Program Pensiun Pegawai

Pengelolaan SDM yang dilakukan Perusahaan senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait ketenagakerjaan. Untuk itu, Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya pada Program Dana Pensiun yang terdiri dari 2 (dua) program, antara lain:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti Program Pensiun bagi Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Tetap sebelum tanggal 1 Januari 2005.

Employee Retirement Program

HR management carried out by the Company is always compliant with applicable laws and regulations, especially regarding employment. For this reason, the Company has included its employees in the Pension Fund Program which consists of 2 (two) programs:

1. Defined Benefit Pension Program Pension Program for Employees who were appointed as Permanent Employees before January 1, 2005.

2. Program Pensiun Iuran Pasti Program Pensiun bagi Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Tetap dari 1 Januari 2005 sampai sekarang.

Perusahaan juga memberikan Program Masa Persiapan Pensiun kepada karyawan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki usia pensiun. Program ini bertujuan untuk membentuk mental dan keahlian serta sebagai pembekalan kepada karyawan agar tetap produktif walaupun sudah tidak aktif lagi sebagai karyawan ITDC.

Pembentukan Lingkungan Kerja yang Kondusif

ITDC berupaya untuk terus mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif yang dipercaya mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas para karyawan sehingga dapat mendukung kemajuan Perusahaan. Upaya ini diwujudkan dengan menyediakan tempat ibadah, membuat komunitas olahraga, serta mengadakan acara-acara pada hari raya keagamaan. Selain itu, Perusahaan juga memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk mengembangkan dirinya melalui beragam kegiatan di luar tanggung jawab performa kinerja.

Kegiatan-kegiatan olahraga, keagamaan, maupun hobi lainnya yang disediakan oleh Perusahaan diharapkan dapat menjadi wadah bagi seluruh Insan Perusahaan untuk mengenal satu sama lain secara lebih personal. Dengan demikian, Perusahaan percaya bahwa hal tersebut dapat membentuk lingkungan kerja yang kondusif, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan dinamis, sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas kinerja para karyawan.

Hubungan Industrial dan Kebebasan Berorganisasi

Perusahaan senantiasa membangun dan memelihara hubungan industrial yang sehat dan harmonis yang berlandaskan pada asas saling menghormati untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Sebagai warga korporasi yang baik, Perusahaan memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ILO Convention 87 yang

2. Defined Contribution Pension Program Pension Program for Employees appointed as Permanent Employees from January 1, 2005 until now.

The Company also provides a Retirement Preparation Period Program to employees for a maximum period of 5 (five) years before entering retirement age. This program aims to shape mentality and skills as well as equip employees to remain productive even though they are no longer active as ITDC employees.

Establishment of Conducive Work Environment

ITDC strives to continue to create a conducive work environment which is believed to be able to increase employee productivity and creativity so that it can support the Company's progress. This effort is realized by providing places of worship, creating sports communities, and holding events on religious holidays. Apart from that, the Company also provides opportunities for all employees to develop themselves through various activities outside their performance responsibilities.

It is hoped that sporting, religious and other hobby activities provided by the Company can become a forum for all Company Personnel to get to know each other on a more personal level. Thus, the Company believes that this can form a conducive work environment, create harmonious and dynamic work relationships, hence it can increase employee loyalty and performance productivity.

Industrial Relations and Freedom of Union

The Company always builds and maintains healthy and harmonious industrial relations based on the principle of mutual respect to create balance between fulfilling rights and implementing obligations. As a good corporate citizen, the Company ensures that all employees have equal opportunities to organize as regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Employment and ILO Convention 87 which guarantees the freedom of employees to join workers' organizations has been



menjamin kebebasan karyawan untuk bergabung dalam organisasi pekerja telah diwujudkan Perusahaan melalui adanya Serikat Pekerja. Piagam ILO Convention juga mengatur bahwa organisasi pekerja berfungsi sebagai penghubung antara karyawan dan Perusahaan guna menciptakan hubungan harmonis yang saling menguntungkan semua pihak, dimana hal ini telah dilaksanakan melalui kesepakatan antara manajemen Perusahaan dan Serikat Pekerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mencakup seluruh karyawan Perusahaan.

Dalam PKB, Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh Serikat Pekerja dalam menjalankan kegiatan operasional. Manajemen juga memberikan waktu dispensasi kepada pengurus dan/atau anggota Serikat Pekerja yang harus menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan. Dalam PKB juga diatur ketentuan bahwa manajemen dilarang melakukan penekanan, diskriminasi, dan intimidasi kepada anggota dan Pengurus Serikat Pekerja.

Per 31 Desember 2023, jumlah kepesertaan anggota Serikat Pekerja ITDC adalah sebanyak 168 orang.

Survei Engagement Karyawan

Perusahaan membuat survei *engagement* karyawan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kebanggaan karyawan terhadap Perusahaan, mengetahui level performa karyawan terhadap Perusahaan, dan mengukur indeks *engagement level* karyawan terhadap organisasi. Secara umum, parameter yang menjadi tolak ukur dalam survei *engagement* karyawan, yaitu:

1. Kognitif: Mengukur efektivitas dalam bekerja;
2. Afektif: Mengukur kepuasan karyawan dan motivasi kerja;
3. *Behavior*: Mengukur loyalitas karyawan dan sikap positif terhadap organisasi.

Perkembangan Pengelolaan SDM ke Depan

Dalam rangka mendorong produktivitas karyawan dan membangun talenta internal yang baik, Bagian Human Capital telah merancang strategi pengelolaan SDM untuk tahun 2024 mendatang. Perusahaan berfokus untuk terus melakukan akselerasi kinerja melalui penciptaan talenta profesional yang unggul

realized by the Company through the existence of a Trade Union. The ILO Convention Charter also regulates that workers' organizations function as liaison between employees and the Company in order to create harmonious relationship that is mutually beneficial to all parties, where this has been implemented through agreement between the Company's management and the Trade Union as stated in the Collective Labor Agreement (PKB) which covers all employee.

In the PKB, the Company is required to provide facilities required by the Labor Union to carry out operational activities. Management also provides dispensation time to management and/or members of the Labor Union who must resolve employment issues. The PKB also stipulates that management is prohibited from exerting pressure, discrimination, and intimidation against members and officials of the Trade Union.

As of December 31, 2023, the total membership of the ITDC Trade Union was 168 people.

Employee Engagement Survey

The Company created employee engagement survey which aims to find out how proud employees are of the Company, determine the level of employee performance towards the Company, and measure the employee level engagement index towards the organization. In general, the parameters that are used as benchmarks in employee engagement surveys are:

1. Cognitive: Measuring effectiveness at work;
2. Affective: Measuring employee satisfaction and work motivation;
3. Behavior: Measures employee loyalty and positive attitudes towards the organization.

Future Development of Human Resource Management

In order to encourage employee productivity and develop good internal talent, the Human Capital Department has designed an HR management strategy for 2024. The Company focuses on continuing to accelerate performance through the creation of excellent and performance-oriented

dan berorientasi kinerja dengan mengedepankan kolaborasi dan harmonisasi dalam rangka meningkatkan motivasi dan keterikatan karyawan. Strategi pengembangan SDM ke depan yang telah disusun Perusahaan, antara lain:

Sasaran Kerja HC & GA Division

- Meningkatnya produktivitas pegawai melalui program pengembangan talenta hingga *retention program*.
- Culture value AKHLAK dapat terinternalisasi dengan optimal melalui *culture activation & innovation program*.
- Memberikan dukungan bagi Perusahaan khususnya terhadap kendala-kendala yang terjadi pada aktivitas bisnis Perusahaan.
- Meningkatkan pelayanan kerumahaan dan operasional kantor baik internal maupun eksternal sesuai *service level agreement*

Program Kerja Human Capital

a. People Aspect

Talent Acquisition

Pada tahun 2024 akan dilakukan pemenuhan kebutuhan *manpower* yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Talent Training and Development

Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan *training and development* yaitu meningkatkan kemampuan dan keahlian Pegawai sehingga efisiensi, efektivitas & produktivitas kerja dapat tercapai. Pada tahun 2024 akan dilakukan penyelarasan program antar member holding InJourney untuk memberikan standar kualitas program yang diberikan bagi para Pegawai serta dapat memberikan *learning experience* yang baru bagi pegawai.

Salah satu upaya peningkatan kompetensi Pegawai melalui program pelatihan, Human Capital merencanakan dan melaksanakan pelatihan untuk pegawai melalui media *Online Training* seperti webinar, In-house training, sertifikasi dan mengirim Pegawai ke lembaga pelatihan maupun dengan mengikuti program pelatihan yang ditetapkan KBUMN & Holding InJourney.

professional talent by prioritizing collaboration and harmonization in order to increase employee motivation and engagement. Future HR development strategies that have been prepared by the Company include:

HC & GA Division Work Targets

- Increasing employee productivity through talent development program and retention program.
- AKHLAK culture values can be internalized optimally through culture activation & innovation program.
- Provide support to the Company, especially regarding obstacles that occur in the Company's business activities.
- Improve housekeeping services and office operations both internally and externally according to the service level agreement

Human Capital Work Program

a. People Aspect

Talent Acquisition

In 2024, the need for qualified manpower was fulfilled according to the Company's needs.

Talent Training and Development

The aim and benefits of implementing training and development are improving employee abilities and skills so that work efficiency, effectiveness & productivity can be achieved. In 2024, programs were aligned between InJourney holding members to provide standards for the quality of the programs provided to employees and to provide new learning experiences for employees.

One of the efforts to increase employee competency through training programs, Human Capital plans and carries out training for employees through online training media such as webinars, in-house training, certification, and sending employees to training institutions or by following training programs determined by SOEs Ministry & Holding InJourney.



Program pelatihan yang menjadi fokus utama tahun 2024 adalah untuk peningkatan kompetensi dan wawasan baik *hard skill & soft skill* Pegawai melalui *Technical Skill & Soft Skill Training*, kompetensi kepemimpinan melalui *Leadership Training*, pemberian layanan prima melalui *Service Training for Frontliner*, serta peningkatan kompetensi kerja dan penambahan wawasan melalui program *Intern-Trip* antar member InJourney Group.

Rasio pelatihan (*Training Ratio*) yang ditargetkan adalah 2, di mana setiap pegawai dapat mengikuti kurang lebih sebanyak 2 pelatihan selama tahun 2024. Rasio pelatihan dicerminkan dengan jumlah peserta dibagi dengan jumlah Pegawai, Direksi, Dekom & Komite.

Talent Assessment

Talent Assessment yang akan dilaksanakan adalah untuk pemenuhan persyaratan submit Top Talent ke Kementerian BUMN pada level BOD-1, BOD-2 dan BOD-3. Selain itu, Talent Assessment juga dilakukan untuk pemenuhan skor Kompetensi EQS pada sistem Rinjani yang dimiliki oleh InJourney.

Talent Retention

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga dan mempertahankan pegawai. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan seperti: Penghargaan kepada Pegawai Purnabakti, Penghargaan kepada Pegawai dengan masa kerja tertentu, Perjalanan Suci Pegawai yang telah memenuhi ketentuan serta kegiatan lainnya.

Social Care Program

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian yang diberikan Perusahaan kepada Pegawai seperti: kedukaan pegawai, menjenguk pegawai sakit, pernikahan pegawai, *visit baby newborn* untuk pegawai yang memiliki bayi baru lahir, serta kegiatan umat beragama.

The training program which is the main focus in 2024 is to increase competency and insight into both hard skills & soft skills of employees through Technical Skill & Soft Skill Training, leadership competency through Leadership Training, providing excellent service through Service Training for Frontliners, as well as increasing work competency and additional insight through the Intern-Trip program between InJourney Group members.

The targeted training ratio is 2, where each employee can take part in approximately 2 trainings during 2024. The training ratio is reflected in the number of participants divided by the number of Employees, Board of Directors, Board of Commissioners & Committees.

Talent Assessment

The Talent Assessment that will be carried out is to fulfill the requirement for submitting Top Talent to the Ministry of SOEs at the BOD-1, BOD-2 and BOD-3 levels. Apart from that, Talent Assessment is also carried out to fulfill the EQS Competency score on the Rinjani system owned by InJourney.

Talent Retention

Activities carried out to maintain and retain employees. The activities that will be carried out include: Awards for Retired Employees, Awards for Employees with a certain period of service, Sacred Journey for Employees who have fulfilled the provisions and other activities.

Social Care Program

Activities carried out as a form of concern and attention given by the Company to employees include: employee bereavement, visiting sick employees, employee weddings, baby newborn visits for employees who have newborn babies, as well as religious activities.

Scholarship Program for Top Talent

Program ini merupakan program baru yang diselenggarakan dengan program InJourney. Program ini dilaksanakan dengan memberikan beasiswa kepada Top Talent di Perguruan Tinggi Dalam Negeri.

Rewards & Remuneration Alignment to InJourney

Pada tahun 2024 direncanakan akan dilakukan *alignment* dengan antar member holding InJourney. Proses *alignment* ini diharapkan akan memberikan standar *remuneration system* yang lebih komprehensif serta tentunya tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

b. Culture Aspect

Culture Cultivation with Culture Week Program

Program-program yang akan dilaksanakan untuk memperkuat *core value* AKHLAK yang telah ada sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap budaya Perusahaan.

Innovation Program

Program ini merupakan program yang diselenggarakan dengan program InJourney yaitu merealisasikan karya inovasi yang dinilai berdampak langsung pada bisnis Perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.

c. Organization Aspect

HC Masterplan Alignment to InJourney

Sebagai salah satu bagian dari member holding InJourney, ITDC Bersama dengan dengan member lainnya akan merumuskan Human Capital Masterplan sebagai standar baru acuan atau pedoman bagi Human Capital dalam membuat strategi ataupun program-program di internal Perusahaan.

Scholarship Program for Top Talent

This program is a new program that is aligned with the InJourney program. This program is implemented by providing scholarships to Top Talent at Domestic Universities.

Rewards & Remuneration Alignment to InJourney

In 2024, it is planned that alignment will be carried out between InJourney holding members. It is hoped that this alignment process will provide a more comprehensive standard remuneration system and of course still pay attention to the company's financial capabilities.

b. Culture Aspect

Culture Cultivation with Culture Week Program

The programs that will be implemented are to strengthen the existing AKHLAK core values so that they can have significant impact on the Company's culture.

Innovation Program

This program is a program that is aligned with the InJourney program, namely realizing innovation work that is considered to have direct impact on the Company's business in accordance with the Company's needs and capabilities.

c. Organizational Aspect

HC Masterplan Alignment to InJourney

As part of InJourney's holding members, ITDC together with other members will formulate a Human Capital Masterplan as new reference standard or guideline for Human Capital in creating strategies or programs within the Company.



HC Procedure & Policy Review

Beberapa peraturan/kebijakan yang ada saat ini diperlukan pembaharuan untuk menyesuaikan dengan kondisi perusahaan saat ini dan rencana strategi Perusahaan kedepan serta penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan aturan holding (InJourney).

Redefine ITDC Competency to InJourney

ITDC saat ini telah memiliki *soft competency* dan selanjutnya akan mendefinisikan untuk *technical competency* di mana erat kaitannya dengan proses talent mapping serta pergerakan dan pengembangan karir.

Business Partner Initiation

Business Partner merupakan fungsi Human Capital untuk dapat membantu lebih dekat dengan organisasi dan turut andil dalam memberikan ide dan nilai dalam membuat keputusan bisnis berdasarkan kajian-kajian bisnis yang dibuat. Adapun untuk fungsi ini untuk sementara tidak akan terpisah dari struktur Human Capital tetapi menitikberatkan kepada *enhancement* terhadap kemampuan sumber daya terkait melalui *learning & development* maupun pertemuan-pertemuan dengan pihak internal atau eksternal.

HC Procedure & Policy Review

Several existing regulations/policies require updating to adapt to the company's current conditions and the Company's future strategic plans as well as alignment with applicable laws and regulations, the Collective Work Agreement (PKB), and holding rules (InJourney).

Redefine ITDC Competency to InJourney

ITDC currently has soft competency and will further define technical competency which is closely related to the talent mapping process as well as career movement and development.

Business Partner Initiation

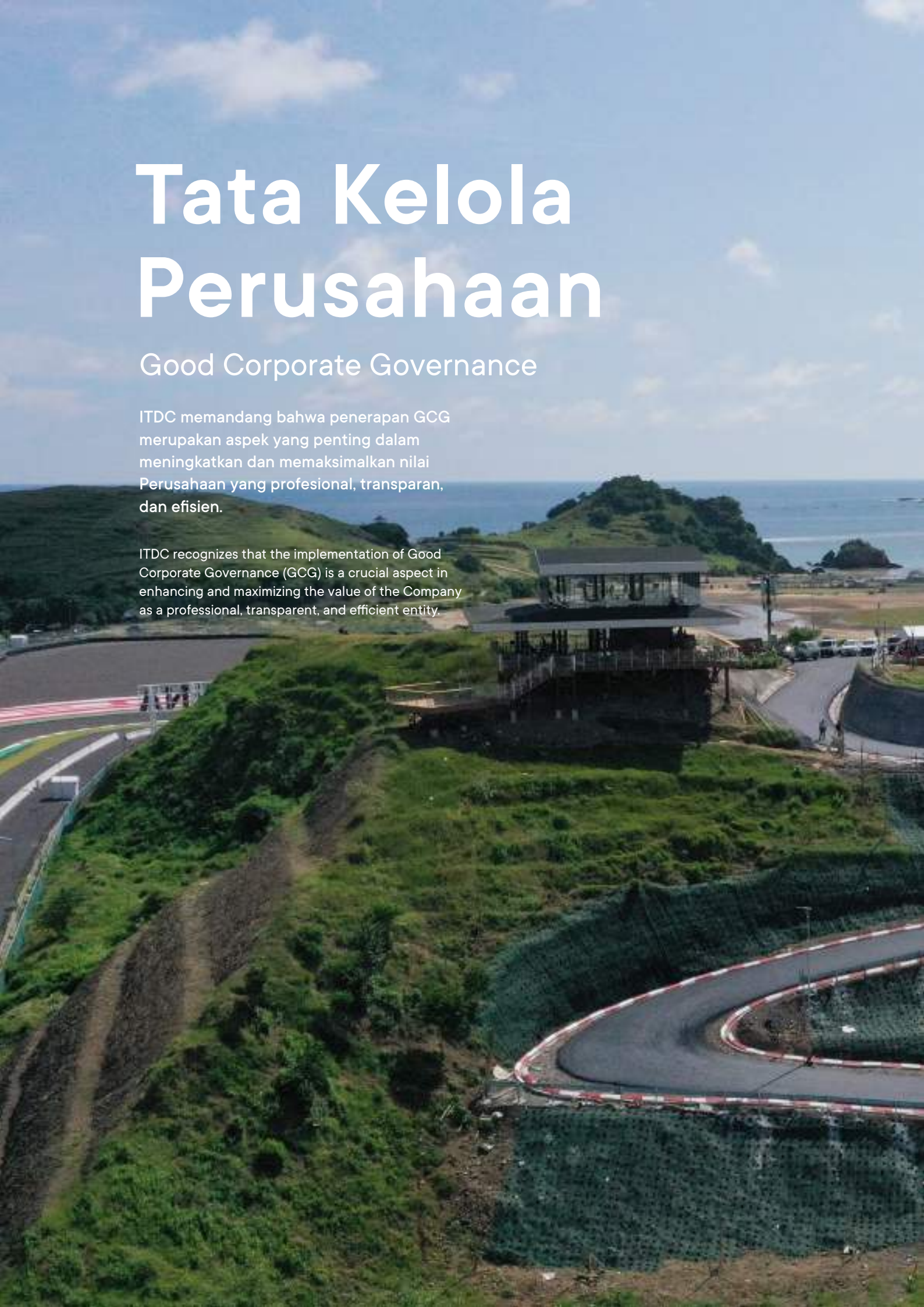
Business Partner is a function of Human Capital to be able to help get closer to the organization and take part in providing ideas and values in making business decisions based on the business studies made. Meanwhile, this function will not be separated from the Human Capital structure for the time being but will focus on enhancing the capabilities of related resources through learning & development and meetings with internal or external parties.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

ITDC memandang bahwa penerapan GCG merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien.

ITDC recognizes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a crucial aspect in enhancing and maximizing the value of the Company as a professional, transparent, and efficient entity.





06

Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik

General Principles of Good Corporate Governance

ITDC selaku anggota dari Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh kegiatan usaha yang dijalankan. Perusahaan meyakini bahwa penerapan tata kelola yang berlandaskan pada standar etika tertinggi mampu menjadikan Perusahaan berdaya saing tinggi dan tumbuh secara berkesinambungan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan pariwisata di Indonesia, ITDC berupaya untuk terus hadir dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negeri melalui produk dan jasa di sektor pariwisata. Untuk itu, ITDC senantiasa memperkuat komitmennya dalam menerapkan best practice GCG secara konsisten agar dapat berkontribusi secara positif bagi Perusahaan, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta meningkatkan kinerja dan citra perusahaan yang baik.

Pada pelaksanaannya, terdapat 2 (dua) hal penekanan, yaitu informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, serta kewajiban entitas usaha untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja entitas usaha, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, kehadiran GCG diharapkan mampu memberikan fondasi atas pengelolaan entitas usaha yang akuntabel.

Penerapan prinsip terbaik GCG juga dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Perusahaan senantiasa tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan GCG di ITDC telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

As a member of the State-Owned Enterprises (SOE) Holding in the aviation and tourism sector, ITDC is committed to consistently applying the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all its business activities. The Company believes that implementing governance based on the highest ethical standards can make the company highly competitive and promote sustainable growth.

As a company engaged in tourism development in Indonesia, ITDC strives to continually contribute to the country's economic growth through its products and services in the tourism sector. Therefore, ITDC consistently strengthens its commitment to implementing best practices in GCG to positively contribute to the Company, add value for stakeholders, and enhance performance and corporate image.

In practice, there are 2 (two) areas of emphasis, namely accurate and timely information, and the obligation of business entities to disclose performance information, ownership, and stakeholder details accurately, timely, and transparently. Thus, the presence of GCG is expected to provide a foundation for accountable management of business entities.

The implementation of the best GCG principles also ensures that all of the Company's business activities comply with the laws and regulations. The implementation of GCG at ITDC refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and No. PER-3/MBU/03/2023 on SOE Organs and Human Resources.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup ITDC

Implementation of Good Corporate Governance within ITDC

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tujuan Penerapan GCG di Lingkup ITDC

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, penerapan GCG Perusahaan terus mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Secara umum, tujuan penerapan GCG di Perusahaan, antara lain:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan.
3. Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional melalui kinerja optimal Perusahaan

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan

ITDC memandang bahwa penerapan GCG merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien untuk memenuhi kewajiban secara bertanggung jawab kepada pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, serta masyarakat pada umumnya. Hal tersebut merupakan faktor

Basis for the Implementation of Good Corporate Governance

Objectives of GCG Implementation within ITDC

In line with the development of the business world, the Company's GCG implementation has developed to include oversight and control systems that support work ethics and responsible decision-making, supporting integrity in financial reporting, proper risk management, as well as stakeholder and Company relations based on ethics. Generally, the objectives of GCG implementation in the company include:

1. Optimizing the Company's value to have strong competitiveness, both nationally and internationally, in order to sustain its existence and achieve the Company's goals and objectives.
2. Promoting professional, efficient, and effective Company management, empowering the function and enhancing the independence of the Company's organs.
3. Encouraging the Company's organs to make decisions and take actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibilities towards stakeholders and the surrounding environment.
4. Increasing the Company's contribution to the national economy.
5. Improving the investment climate through the company's optimal performance.

Commitment to Sustainable Corporate Governance Implementation

ITDC views the implementation of GCG as crucial for enhancing and maximizing the Company's value professionally, transparently, and efficiently, to responsibly fulfill obligations to shareholders, business partners, customers, and the general public. This is vital for strengthening ITDC's position in healthy business competition and

penting agar dapat memperkuat posisi ITDC dalam persaingan bisnis yang sehat serta pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Selain itu, ITDC juga meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG secara komprehensif akan mampu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Menyadari pentingnya penerapan GCG bagi pertumbuhan ke depan, Perusahaan menempatkan kebijakan GCG sebagai pedoman bagi Manajemen dan seluruh Insan ITDC dalam menjalankan seluruh kegiatan di lingkungan kerja. Perusahaan juga mengembangkan dan menyempurnakan implementasi GCG agar dapat membawa Perusahaan menghadapi berbagai tantangan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif.

Kebijakan GCG Perusahaan secara berkesinambungan memberikan standar terbaik dalam menjalin hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan guna menjaga pertumbuhan jangka panjang bagi Perusahaan. Komitmen penerapan GCG tersebut dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki, termasuk meningkatkan sistem dan prosedur bisnis dengan penerapan struktur tata kelola yang mendukung pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan.

Dasar Penerapan Perusahaan yang Baik

ITDC senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan agar mampu mendorong pertumbuhan perusahaan yang sehat, kuat, dan dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Penyempurnaan penerapan GCG juga turut dilakukan dengan melakukan pemutakhiran berbagai kebijakan, standar, pedoman, prosedur yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan lingkungan bisnis, dan juga perkembangan usaha dan kinerja Perusahaan.

Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman selama lebih dari 40 tahun, ITDC berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai integritas melalui optimalisasi penerapan prinsip-prinsip GCG. Selama

sustainable growth. Additionally, ITDC believes that comprehensive implementation of GCG principles will provide added value to stakeholders.

Recognizing the importance of GCG for future growth, the Company places GCG policies as guidelines for Management and all ITDC personnel in conducting all activities within the work environment. The Company also continuously develops and improves GCG implementation to meet various challenges and become a competitive business entity.

The Company's GCG policies provide the best standards for establishing harmonious relationships with stakeholders to ensure long-term growth for the Company. The commitment to GCG implementation is carried out by strengthening the existing infrastructure, including enhancing business systems and procedures with a governance structure that supports GCG implementation within the Company.

Basis for the Implementation of Good Corporate Governance

ITDC continuously strives to improve the quality of GCG implementation to promote healthy, strong company growth and create added value for all stakeholders. Enhancements in GCG implementation are also carried out by updating various policies, standards, guidelines, and procedures in line with changes in applicable regulations, business environment conditions, and the Company's business development and performance.

As a company with over 40 years of experience, ITDC is committed to maintaining integrity values through optimizing the implementation of GCG principles. These principles have been internalized



ini, prinsip-prinsip GCG telah terinternalisasi dalam sikap, perilaku, pola pikir, dan cara kerja manajemen dan karyawan Perusahaan. Penerapan GCG dalam Perusahaan mempunyai tujuan-tujuan strategis yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan secara lebih baik serta berkelanjutan.

Penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan dilandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar bisnis Perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan. Untuk itu, penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkup Perusahaan senantiasa mengacu pada ketentuan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan, dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut, prinsip-prinsip GCG di ITDC terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut di Perusahaan diuraikan sebagai berikut:

in the attitudes, behaviors, mindsets, and working methods of the Company's management and employees. The implementation of GCG in the Company aims to achieve the Company's vision, mission, and goals more effectively and sustainably.

The application of GCG principles within the Company is based on the highest ethical standards and is a mandatory requirement for sustainable business growth. Therefore, the implementation of GCG principles within the Company always refers to prevailing regulations, such as the Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Implementation Guidelines, and the Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI) developed by the National Governance Policy Committee (KNKG) in 2021.

Based on these regulations, GCG principles in ITDC consist of 5 (five) fundamental principles: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The implementation of these GCG principles in the company is outlined as follows:



Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Description	Penerapan di ITDC Implementation within ITDC
Transparansi	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan.	• Penetapan kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan, baik informasi publik maupun informasi rahasia Perusahaan; pihak-pihak yang berwenang memberikan dan/atau menyampaikan informasi kepada publik; dan prosedur pengungkapan informasi Perusahaan kepada pemangku kepentingan. • Penyediaan akses informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan sekaligus masyarakat secara tepat waktu dan berkala melalui situs web Perusahaan (www.itdc.co.id) dan situs web BUMN (www.bumn.go.id).
Transparency	Transparency in carrying out the decision-making process and transparency in presenting material and relevant information about the Company.	• Establishing policies on controlling company information, including public and confidential information; identifying the parties authorized to provide and/or deliver information to the public; and procedures for disclosing Company information to stakeholders. • Providing timely and periodic access to relevant, adequate, and reliable Company information for stakeholders and the public through the Company's website (www.itdc.co.id) and the SOEs website (www.bumn.go.id).
Akuntabilitas	Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.	• Penetapan struktur organisasi serta uraian tugas dan tanggung jawab sesuai Surat Keputusan (SK) Direksi No. Kep/Dir/50/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, menggantikan SK Struktur Organisasi No. Kep/Dir/14/II/2013 tanggal 12 Februari 2013, menggantikan SK Direksi No. 63/Kep/Dir/PT PPB/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Jabatan. • Penetapan kebijakan-kebijakan operasional dan standar operasional baku (SOP) terkait proses bisnis inti Perusahaan. • Penetapan mekanisme pengambilan keputusan Direksi.
Accountability	Clarity of functions, implementation, and accountability of the Company's organs to ensure effective management of the Company.	• Establishment of the organizational structure as well as the job descriptions and responsibilities according to the Board of Directors' Decree No. Kep/Dir/50/V/2013 dated May 21, 2013, replacing the Organizational Structure Decree No. Kep/Dir/14/II/2013 dated February 12, 2013, which replaced the Board of Directors' Decree No. 63/Kep/Dir/PT PPB/VIII/2011 dated August 8, 2011 concerning the Organizational Structure, Job Descriptions, and Positions. • Establishment of operational policies and standard operating procedures (SOPs) related to the Company's core business processes. • Establishment of the decision-making mechanism for the Board of Directors.



Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Description	Penerapan di ITDC Implementation within ITDC
Responsibilitas	Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.	• Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN dan No. KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJPP. • Penetapan Pedoman GCG, Pedoman Perilaku (Code of Conduct), Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) yang menjadi kesatuan dengan Pedoman GCG, kebijakan Whistleblowing System, kebijakan gratifikasi dan peraturan Perusahaan yang mengacu kepada peraturan/perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. • Penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku oleh seluruh insan Perusahaan. • Penetapan kebijakan Direksi mengenai jabatan dalam organisasi yang ditetapkan sebagai penyelenggara negara, sekaligus wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aturan mengenai pemberian sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian LHKPN.
Responsibility	Compliance in the management of the Company with applicable laws and regulations as well as sound corporate principles.	• Preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP) referring to the Minister of State-Owned Enterprises Decree No. KEP-101/MBU/2002 dated June 4, 2002, on the Preparation of the RKAP for SOEs, and No. KEP-102/MBU/2002 on the Preparation of the Company's Long Term Plan. • Establishment of GCG Guidelines, Code of Conduct, and the Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors, which are integrated with the GCG Guidelines, Whistleblowing System policy, gratuity policy, and Company regulations that refer to laws/regulations and sound corporate principles. • Signing a compliance statement with the Code of Conduct by all Company personnel. • Establishment of a Board of Directors policy regarding positions within the organization designated as state administrators, who are also required to submit the State Official Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK), as well as rules regarding sanctions for non-compliance with LHKPN submission.

Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Description	Penerapan di ITDC Implementation within ITDC
Independensi	Keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.	• Pemberlakuan kebijakan yang mengharuskan anggota Direksi menandatangani pakta integritas, untuk selanjutnya dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus memperoleh rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan pemegang saham. • Pemberlakuan kebijakan yang menangani benturan kepentingan bagi anggota Direksi, menandatangani pernyataan yang tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan. Selain itu, terdapat pula mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan manajer senior yang diatur dalam pedoman GCG. • Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. • Pelaksanaan penilaian serta uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Direksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal.
Independency	A situation where the Company is managed professionally without conflicts of interest and without influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles.	• Implementation of a policy requiring Board of Directors members to sign an integrity pact, which is to be included in the proposed actions by the Board of Directors that must receive recommendations from the Board of Commissioners and approval from the shareholders. • Implementation of a policy addressing conflicts of interest for Board of Directors members, requiring them to sign a statement confirming the absence of conflicts of interest between personal/family interests, other positions, or groups and the interests of the Company. Additionally, there is a mechanism to prevent personal gain for the Board of Directors and senior managers as outlined in the GCG guidelines. • The mechanism for appointing and dismissing members of the Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/02/2015 dated February 17, 2015, on the Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of SOEs. • Implementation of assessments and fit and proper tests for prospective members of the Board of Directors conducted by the Shareholders/General Meeting of Shareholders (GMS)/Owners of Capital.



Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Description	Penerapan di ITDC Implementation within ITDC
Kewajaran	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Kebijakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan/perundangan yang berlaku dan penyampaian informasi secara tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. - Kebijakan/pedoman mengenai manajemen karier. - Keberadaan unit/fungsi yang mengendalikan dan memastikan serta menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga, termasuk menelaah perubahan peraturan/perundang-undangan yang berlaku dan pengaruhnya terhadap Perusahaan, serta melakukan sosialisasi atas perubahan peraturan tersebut. - Pelaksanaan peraturan/perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga, melakukan kajian hukum atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku, dan mengevaluasi kajian risiko atas setiap rencana bisnis, kebijakan dan rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh Perusahaan. - Penetapan kebijakan hubungan dengan pelanggan yang mencakup hak-hak pelanggan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pelanggan; penyediaan kontak pelanggan untuk menerima umpan balik pelanggan dan menyelesaikan keluhan pelanggan. - Pelaksanaan survei berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. - Kepatuhan terhadap kewajiban kepada negara, baik berupa penyampaian dokumen perpajakan maupun pembayaran kewajiban perpajakan secara tepat waktu. - Penetapan kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan dan menyediakan sarana partisipasi melalui serikat pekerja. - Pelaksanaan survei kepuasan karyawan. - Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Fairness	Fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising from agreements and applicable laws and regulations.	- Information and communication disclosure policies in accordance with applicable laws and regulations, and timely delivery of information to the Board of Commissioners and Shareholders. - Policies/guidelines on career management. - The existence of a unit/function that controls, ensures, and maintains the Company's compliance with all agreements and commitments made with third parties, including reviewing changes in applicable laws and regulations and their impact on the Company, and conducting socialization of those regulatory changes. - Implementation of applicable laws and regulations and agreements with third parties, conducting legal reviews of planned actions and issues related to legal or regulatory compliance, and evaluating risk assessments for each business plan, policy, and cooperation plan to be undertaken by the Company. - Establishment of customer relationship policies that cover customer rights, security, safety, and health; provision of customer contact points to receive feedback and resolve customer complaints. - Conducting regular surveys to determine customer satisfaction levels. - Compliance with obligations to the state, including the timely submission of tax documents and payment of tax obligations. - Establishment of policies that encourage employee participation and provide means for participation through labor unions. - Conducting employee satisfaction surveys. - Implementation of corporate social responsibility.

Landasan Hukum

Perusahaan berkomitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu pada beberapa aturan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali;
4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0003766.AH.01.02 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas Perusahaan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development);
6. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. SK-198/MBU/10/2015 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia tanggal 22 Oktober 2015;
7. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. SK-61/MBU/03/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia tanggal 21 Maret 2016;
8. Pasal 11 Anggaran Dasar PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tentang Tugas dan Wewenang Direksi;

Legal Basis

The Company is fully committed to consistently upholding the implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on several regulations, including:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation No. 27 of 1972 concerning the Participation of the Republic of Indonesia's State Capital for the Establishment of State-Owned Enterprises (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali;
4. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
5. Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree No. AHU-0003766.AH.01.02 concerning the Approval of Changes to the Articles of Association of Limited Liability State-Owned Enterprises PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development);
6. Minister of State-Owned Enterprises Decision as the General Meeting of Shareholders of State-Owned Enterprises PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. SK-198/MBU/10/2015 concerning the Termination of Changes in Position Nomenclature and the Appointment of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dated October 22, 2015;
7. Minister of State-Owned Enterprises Decision as the General Meeting of Shareholders of State-Owned Enterprises PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. SK-61/MBU/03/2016 concerning the Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dated March 21, 2016;
8. Article 11 of the Articles of Association of PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) concerning the Duties and Authorities of the Board of Directors;



9. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Nomor 07/KEP/DEKOM/XII/2017 dan No. Kep/Dir/056-3/XII/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
 10. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 11. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
 12. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) dari Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Tahun 2021.
9. Joint Decision Letter of the Board of Commissioners and Directors of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 07/KEP/DEKOM/XII/2017 and No. Kep/Dir/056-3/XII/2017 concerning the Guidelines for Implementing Good Corporate Governance at PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
 10. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
 11. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises; and
 12. Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI) from the National Committee on Governance Policy (KNKG) Year 2021.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Structure and Mechanism of Good Corporate Governance

ITDC mewujudkan komitmen dalam menerapkan praktik terbaik GCG melalui pembentukan Kerangka Kerja Tata Kelola (*Governance Framework*) yang berfungsi sebagai fondasi utama penerapan GCG di Perusahaan. Kerangka kerja tersebut terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) dan Mekanisme/Proses Tata Kelola (*Governance Process*). Kedua aspek ini saling berhubungan satu sama lain yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) sesuai dengan yang diharapkan.

Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sementara,

ITDC realizes its commitment to implementing best GCG practices through the establishment of a Governance Framework, which serves as the primary foundation for the implementation of GCG in the Company. This framework consists of two main aspects, namely Governance Structure and Governance Process. These two aspects are interrelated and ultimately reflect the Governance Outcome as expected.

Governance Structure refers to the organs or devices owned by the Company, both those formed due to compliance with applicable regulations and laws, and those formed due to internal needs to enhance the implementation of GCG. Meanwhile, Governance Mechanism is a series of processes, habits, rules, and institutions that influence the

Mekanisme Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola Perusahaan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Perusahaan telah memiliki tiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Sementara, Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Ketiga organ Perusahaan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

overall management of the Company. Governance Process includes regulations and laws applicable to the Company, Standard Operating Procedures, Charters, documents, and regulations governing the relationship between organs or devices.

Corporate Governance Structure

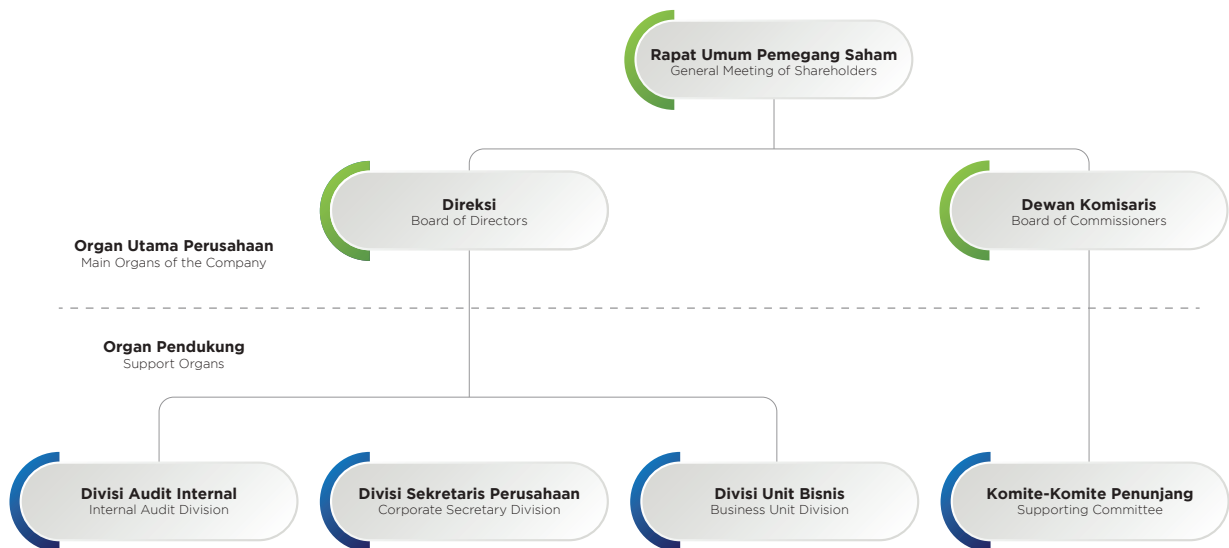
The Company's Governance Structure refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The management system of the Limited Liability Company adopts a two-tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors, which have clear authority and responsibilities according to their respective functions as mandated in regulations and laws.

The Company has these three main organs, namely the GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The GMS is the Company's organ with authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in regulations and/or the Articles of Association. The Board of Commissioners is the Company's organ responsible for general and/or specific supervision according to the Articles of Association and advising the Board of Directors. Meanwhile, the Board of Directors is the Company's organ authorized and fully responsible for managing the Company for the Company's interests, in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company, both inside and outside the court, in accordance with the provisions of the Articles of Association.

These three Company organs play a key role in the successful implementation of GCG. The Company organs perform their functions in accordance with legal provisions, the Articles of Association, and other provisions based on the principle that each organ has independence in carrying out its tasks, functions, and responsibilities for the Company's interests.



Bagan Struktur Tata Kelola ITDC
ITDC Governance Structure Chart



Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme Tata Kelola dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Dalam mekanismenya, Perusahaan telah menyusun perangkat kebijakan sebagai kerangka acuan dan standarisasi pelaksanaan tugas dari setiap organ GCG yang dimiliki Perusahaan serta seluruh insan ITDC. Dalam upaya menerapkan GCG secara konsisten di semua lini organisasi, Perusahaan membuat kebijakan sebagai berikut:

1. Perusahaan menempatkan kebijakan GCG sebagai pedoman bagi manajemen dan seluruh pegawai dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan.
2. Perusahaan telah menyusun panduan GCG (*GCG Manual*) sebagai panduan implementasi yang komprehensif atas penerapan GCG Perusahaan.

Selain itu, untuk memenuhi aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan senantiasa mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Corporate Governance Mechanism

Governance Mechanism can be understood as the rules of the game, procedures, and clear relationships between decision-makers and those who oversee these decisions. In its mechanism, the Company has formulated policy instruments as a reference framework and standardization of the implementation of tasks from each GCG organ owned by the Company as well as all ITDC personnel. In an effort to consistently apply GCG in all organizational lines, the Company has established the following policies:

1. The Company places GCG policies as guidelines for management and all employees in carrying out the Company's business and operational activities.
2. The Company has developed GCG guidelines (*GCG Manual*) as a comprehensive implementation guide for the application of the Company's GCG.

In addition, to fulfill the aspects of good corporate governance, the Company continuously refers to the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in

(*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. ITDC juga melakukan pemutakhiran terhadap Pedoman GCG ITDC dengan penetapan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 08/KEP/DEKOM/XII/2020 dan No. 002.1/SK/ITDC.01/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 07/KEP/DEKO/XII/2017 dan No. KEP/DIR/056-3/XII/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Lampiran Surat keputusan tersebut terdiri dari Pedoman Penerapan GCG, *Charter* Dewan Komisaris dan *Charter* Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Adapun beberapa kebijakan lain yang ditetapkan sebagai Kebijakan Pendukung penerapan GCG di ITDC, antara lain:

1. Surat Pernyataan Independensi Dewan Komisaris;
2. Surat Pernyataan Independensi Direksi;
3. Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai untuk melaksanakan pedoman GCG;
4. Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai untuk mematuhi Pedoman etika Usaha dan perilaku;
5. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 09/KEP/DEKOM/XII/2020 dan No.002.2/Kep/Dir/ITDC/XII/2020 tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Dewan Komisaris, Direksi & Pegawai PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero);
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP/DEKOM/IX/2016 tentang *Auditors Committee Charter* (Piagam Komite Audit);
7. Internal Audit Charter (Piagam Satuan Pengawasan Intern);

State-Owned Enterprises. ITDC also updates the ITDC GCG Guidelines with the determination of the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 08/KEP/DEKOM/XII/2020 and No. 002.1/SK/ITDC.01/XII/2020 concerning Amendments to the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 07/KEP/DEKO/XII/2017 and No. KEP/DIR/056-3/XII/2017 concerning Guidelines for the Implementation of Corporate Governance (*Code of Corporate Governance*) of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. The attachment to the decree consists of the Guidelines for the Application of GCG, the Board of Commissioners Charter, and the Board of Directors Charter of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Some other policies established as Supporting Policies for GCG implementation at ITDC include:

1. Declaration of Independence of the Board of Commissioners;
2. Declaration of Independence of the Board of Directors;
3. Commitment Statement of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees to implement GCG guidelines;
4. Commitment Statement of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees to comply with Business Ethics and Behavior Guidelines;
5. Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 09/KEP/DEKOM/XII/2020 and No.002.2/Kep/Dir/ITDC/XII/2020 concerning Business Ethics and Conduct Guidelines of the Board of Commissioners, Board of Directors & Employees of PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero);
6. Board of Commissioners Decree No. 07/KEP/DEKOM/IX/2016 concerning Auditors Committee Charter;
7. Internal Audit Charter;



8. Surat Keputusan Direksi No. 030/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 tentang Pedoman Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
9. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 10/KEP/DEKOM/XII/2020 dan No. 030.1/Dir/ITDC.01/XII/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
10. Surat Keputusan Direksi No: 031/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 tentang Pejabat Struktural PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
11. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. S-17A/KEP/DEKOM/X/2017 dan 050.I/KEP/DIR/ITDC/X/2017 tentang Kebijakan Teknologi Informasi di Lingkungan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
12. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 02/KEP/DEKOM.ITDC/11/2017 dan No. Kep/Dir-ITDC/16/11/2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Pengembangan Pariwisata Indonesia; dan Kebijakan dan SOP.
8. Board of Directors Decree No. 030/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 concerning Gratification Reporting and Control Guidelines in the Environment of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
9. Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 10/KEP/DEKOM/XII/2020 and No. 030.1/Dir/ITDC.01/XII/2020 concerning Violation Reporting System (*Whistleblowing System*) of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
10. Board of Directors Decree No: 031/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 concerning State Officials' Wealth Report (LHKPN) Officer of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia and the Procedures for Reporting State Officials' Wealth in the Environment of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
11. Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. S-17A/KEP/DEKOM/X/2017 and 050.I/KEP/DIR/ITDC/X/2017 concerning Information Technology Policy in the Environment of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
12. Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 02/KEP/DEKOM.ITDC/11/2017 and No. Kep/Dir-ITDC/16/11/2017 concerning Risk Management Application Guidelines of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia; and Policies and SOPs.

Seluruh aspek perangkat kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan standar prosedural dalam tata kelola organisasi serta menegaskan keberadaan setiap organ GCG yang telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bagi Insan Perusahaan. Dengan mematuhi perangkat kebijakan yang ada, seluruh organ GCG dan setiap Insan Perusahaan memiliki landasan yang kuat untuk berpikir dan bertindak demi kepentingan Perusahaan dan kepentingan pribadinya.

All aspects of these policy instruments aim to provide procedural standards in organizational governance and affirm the existence of each GCG organ regulated by prevailing laws and regulations, including for Company Personnel. By adhering to existing policy instruments, all GCG organs and every Company Personnel have a strong foundation to think and act in the interests of the Company and their own interests.

Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup ITDC

Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG (*assessment*) di lingkup Perusahaan setiap tahunnya. Perusahaan juga senantiasa menyempurnakan perkembangan GCG dengan melakukan perbaikan pedoman tata kelola, antara lain pada tahun 2012, 2015, 2017, dan 2020. Perbaikan ini diharapkan dapat membuat penerapan GCG Perusahaan dapat terus sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan perkembangan infrastruktur serta *soft structure* GCG yang dimiliki.

Adapun perkembangan *assessment* penerapan GCG dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian Description	2023*	2022	2021	2020	2019
Total Skor Score Total	-	87,591	86,934	88,058	84,92
Pelaksana Assessment Assessment Implementer	-	Self-Assessment	Assessment oleh BPKP Assessment by BPKP	Self-Assessment	Assessment oleh BPKP Assessment by BPKP

*) Belum dilakukan asesmen dikarenakan penerapan GCG yang mengacu kepada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN telah dicabut di tahun 2023, dan belum ada penggantinya

*) An assessment has not been carried out due to the implementation of GCG referring to the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs which has been revoked in 2023, with no replacement yet.

Sosialisasi Penerapan GCG

ITDC secara konsisten terus melakukan sosialisasi prinsip-prinsip GCG kepada seluruh Insan Perusahaan secara spesifik. Sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai aturan dan tujuan penerapan GCG Perusahaan. Pada pelaksanaannya, penerapan GCG di Perusahaan banyak menitikberatkan pada kegiatan operasional Perusahaan yang banyak melibatkan pihak-pihak terkait di dalamnya.

Upaya Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dengan melakukan pengukuran atas penerapan prinsip-prinsip tersebut secara berkala. Secara umum, pengukuran tersebut bertujuan untuk:

Development of GCG Implementation in ITDC

To ensure the implementation of GCG principles, the Company conducts GCG implementation assessments annually. The Company also continuously enhances GCG development by improving governance guidelines, notably in 2012, 2015, 2017, and 2020. These improvements aim to keep the Company's GCG practices aligned with business growth and the development of both infrastructure and GCG soft structures.

The progress of GCG implementation assessments over the past 5 (five) years is as follows:

Socialization of GCG

ITDC consistently conducts specific socialization of GCG principles to all Company personnel. This ongoing socialization aims to provide a deep understanding of the rules and objectives of the Company's GCG implementation. In practice, the Company's GCG implementation heavily focuses on the Company's operational activities, which involve many related parties.

Efforts to Improve Good Corporate Governance Implementation

The Company strives to continuously enhance the application of GCG principles by regularly measuring their implementation. In general, this measurement aims to:



1. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perusahaan, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG Perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dan penerapannya pada Perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di Perusahaan sejalan dengan best practices.
4. Memantau konsistensi penerapan GCG pada Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di Perusahaan.

Dasar dan Metode Penilaian

Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG dilakukan dengan merujuk pada standar minimal maupun rekomendasi yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri (Permen) BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Perusahaan melakukan pengukuran terhadap tata kelola sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan/*assessment* GCG dilakukan secara berkala oleh Perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh *assessor* eksternal, dengan diselingi oleh *self-assessment* yang dilakukan oleh *assessor* internal Perusahaan setiap tahun berikutnya.
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan governansi di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada poin pertama, meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

1. Testing and assessing the implementation of GCG in the Company through the elaboration of the conditions of GCG implementation and with the actual conditions applied to the Company, through the provision of scores for the implementation of GCG and the category of the quality of GCG implementation.
2. Identify the strengths and weaknesses of the Company's GCG implementation, and propose recommendations for improvement to reduce the gap between the GCG criteria and their application to the Company.
3. Provide recommendations for improvements to gaps found in the implementation of GCG in the Company in line with best practices.
4. Monitor the consistency of GCG implementation in the Company and obtain input for improvement and development of GCG policies in the Company.

Basis and Method of Assessment

The GCG implementation assessment is carried out by referring to the minimum standards and recommendations that must be met. According to Article 44 paragraph (1) of the SOE Ministerial Regulation (Permen) No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, regarding Amendments to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, the Company measures governance as follows:

1. Implementation of Good Corporate Governance/ GCG assessment is carried out periodically by the Company by external assessors, and does not rule out being interspersed with self-assessments conducted by the Company's internal assessors.
2. Evaluation (review), which is a program to describe the follow-up to the implementation and implementation of GCG in the Company which is carried out in the following year after the assessment as referred to in the first point, which includes evaluation of the results of the assessment and follow-up on recommendations for improvement.

Perusahaan mengukur penerapan GCG dengan mengacu kepada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu

The Company measures GCG implementation by referring to the Secretary of the Ministry of SOEs Decision No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, regarding Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs. This assessment and evaluation method is carried out using measurement tools consisting of 6 (six) aspects:

1

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

2

Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal

Shareholders and RPB/Capital Owners

3

**Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas**

Board of Commissioners/
Supervisory Board

4

Direksi

Board of Directors

5

Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Information Disclosure and
Transparency

6

Aspek Lainnya

Other Aspects

Namun demikian, dasar pengukuran tersebut kemudian dicabut melalui Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 Tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

However, this measurement basis was later revoked through the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 concerning the Revocation of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 Concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022: Hasil, Rekomendasi, dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2023

Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2022, dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh Tim Internal ITDC. Hasil self-assessment untuk tahun buku 2022 menunjukkan hasil dengan predikat “Sangat Baik ” yang mencapai skor sebesar 87,591.

Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022: Results, Recommendations and Follow-up in 2023

The GCG implementation assessment for the fiscal year 2022 was conducted independently (*self-assessment*) by ITDC's Internal Team. The self-assessment results for the fiscal year 2022 indicated an “Excellent” rating with a score of 87.591.



Jenis Penilaian Rating Type	: Self Assessment
Assessor/Penilai Assessor/Appraiser	: Tim Internal ITDC ITDC Internal Team
Periode Penerapan Application Period	: 1 Januari-31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022
Tahun Buku Fiscal Year	: 2022
Tempat Place	: Kantor ITDC di The Nusa Dua ITDC Office in The Nusa Dua
Waktu Pengukuran Measurement Time	: 12 Januari 2023 - 17 Maret 2023 January 12, 2023 - March 17, 2023
Waktu Terbit Laporan Report Issue Time	: 31 Maret 2023 March 31, 2023

Rincian hasil *self-assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

The results of the assessment of the implementation of GCG in the Company for the 2022 measuring year is as follows:

Aspek Pengujian Assessment Aspects	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2022 Achievement in 2022 Fiscal Year		
		Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)	Predikat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Predicate
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,000	6,182	88,31	Sangat Baik Very Good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,000	8,037	89,30	Sangat Baik Very Good
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	31,932	91,30	Sangat Baik Very Good
Direksi Board of Directors	35,000	31,732	90,66	Sangat Baik Very Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,000	8,458	93,98	Sangat Baik Very Good
Faktor Lainnya Other Factors	5,000	1,250	25,00	Sangat Baik Very Good
Skor Keseluruhan Overall Score	100,000	87,591	92,198	Sangat Baik Very Good

Berdasarkan *self-assessment* tersebut, terdapat 48 (empat puluh delapan) rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* (AoI) untuk dibuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaan yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait, guna meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices*, yakni sebagai berikut:

Based on the self-assessment, there are 48 (fourty eight) recommendations for areas needing improvement or Areas of Improvement (AoI). An action plan for these improvements will be created, supported by the commitment of all relevant parties, to enhance the implementation of GCG practices in line with best practices, as follows:

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Follow-up Form/Reason for Not Following Up
I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance		
1.	Agar melakukan pembahasan/kajian atas kebutuhan pemutakhiran Pedoman GCG, CoC, dan/atau pedoman lainnya yang dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali atau sesuai kebutuhan perubahan peraturan/kondisi yang signifikan To carry out discussions/studies on the need to update the GCG Guidelines, CoC, and/or other guidelines at least once every 3 (three) years or according to the need for significant changes in regulations/conditions	Pedoman ITDC sudah di draftkan, namun saat ini sedang menunggu finalisasi pedoman Injourney sebagai acuan. The ITDC guidelines have been drafted, but are currently waiting for the finalization of the Injourney guidelines as an accompaniment.
2.	Agar menyantumkan pencapaian penerapan GCG perusahaan sebagai salah satu KPI di dalam Kontrak Manajemen To include the achievement of the company's GCG implementation as one of the KPIs in the Management Contract	Sudah ditindaklanjuti. Pencapaian penerapan GCG di Perusahaan sudah masuk dalam KPI Kolegial Perusahaan Has been followed up. The achievement of GCG implementation in the Company is included in the Company's Collegial KPI
3.	HC sebagai administrator dalam pengelolaan LHKPN di ITDC agar lebih aktif dalam mensosialisasikan pelaporan LHKPN kepada Penyelenggara Negara (dalam hal ini pejabat yang wajib melaporkan LHKPN di ITDC) sehingga pelaporan tepat waktu dan seluruh pejabat yang ditetapkan melapor LHKPN HC as administrator in managing LHKPN at ITDC to be more active in socializing LHKPN reporting to State Administrators (officials required to report LHKPN at ITDC) for timely reporting and all officials report the LHKPN.	Sudah ditindaklanjuti. Laporan LHKPN sudah dilakukan 100% oleh pejabat yang wajib melakukan pelaporan. Has been followed up. The LHKPN report has been carried out 100% by officials who are required to carry out the reporting.
4.	Memberikan teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan. Give warnings/sanctions for State Administrators who have not/did not submit LHKPN in accordance with statutory regulations.	Sudah ditindaklanjuti. Laporan LHKPN sudah dilakukan 100% oleh pejabat yang wajib melakukan pelaporan sehingga tidak dikenakan sanksi. Has been followed up. The LHKPN report has been carried out 100% by officials who are required to carry out the reporting so they are not subject to sanctions.
5.	Lebih aktif mensosialisasikan kebijakan gratifikasi More active in socializing gratification policy	Sudah ditindaklanjuti. Sosialisasi kebijakan gratifikasi dilakukan oleh Tim UPG ITDC pada 9 April 2024 melalui email. Has been followed up. Socialization of the gratification policy was carried out by the UPG ITDC Team on April 9, 2024, via email.
6.	Mereview & memperbaharui Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai kebutuhan terutama jika terdapat perubahan yang signifikan Review & update the Gratification Control Unit as needed, especially if significant changes are found	Sudah ditindaklanjuti. Tim UPG telah diperbaharui sesuai SK nomor 026/SK/ITDC.01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Periode 2023 di Lingkungan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Has been followed up. The UPG Team has been updated in accordance with Decree number 026/SK/ITDC.01/V/2023 dated May 31, 2023, concerning the Establishment of a Gratification Control Unit for the 2023 Period within the Indonesian Tourism Development Company.



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Follow-up Form/Reason for Not Following Up
7.	Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan sarana <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) yang sudah berjalan Evaluate the effectiveness of the implementation and facilities of the Whistle Blowing System (WBS) that are already running	Sudah ditindaklanjuti Laporan evaluasi dan efektivitas WBS Semester I pada Nota Dinas 030/ND/ITDC.01.01/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023. Semester II pada Nota Dinas 006/ND/ITDC.01.01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024. The WBS evaluation and effectiveness report for Semester I has been followed up in Official Memorandum 030/ND/ITDC.01.01/X/2023 dated October 20, 2023. Semester II in Official Memorandum 006/ND/ITDC.01.01/III/2024 dated March 14, 2024.
II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners		
1.	Pemegang Saham agar dapat menyediakan data sesuai kebijakan Pemegang Saham terkait: 1. Penilaian calon anggota Direksi dan/atau Dekom 2. Pemberhentian Direksi dan/atau Dekom Shareholders are able to provide data in accordance with Shareholder policy regarding: 1. Evaluation of prospective members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners 2. Dismissal of Directors and/or Board of Commissioners	Hingga April 2024 belum ada pergantian Direksi/Dekom, sehingga tidak ada penilaian calon Anggota Direksi/Dekom. (N/A) Until April 2024, there were no changes to the Board of Directors/Board of Commissioners. Thus, there was no assessment of prospective members of the Board of Directors/Board of Commissioners. (N/A)
2.	Pemegang Saham agar mengesahkan rancangan RJPP tepat waktu selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP Shareholders must ratify the RJPP draft on time no later than 60 (sixty) days after receiving the RJPP draft	RJPP 2022-2026 telah disampaikan ke INJ. Penyampaian RJPP Cashcading 2022-2026 telah disampaikan ke INJ dengan nomor surat 118/Dir/ITDC.01/IV/2024. Sampai saat ini INJ belum menyampaikan Cashcading RJPP ITDC. The 2022-2026 RJPP has been submitted to INJ. The submission of RJPP Cashcading 2022-2026 has been submitted to INJ with letter number 118/Dir/ITDC.01/IV/2024. Until now INJ has not submitted Cashcading RJPP ITDC.
3.	Pemegang Saham agar memberikan persetujuan yang diberikan tepat waktu sesuai ketentuan (khususnya untuk persetujuan/keputusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 (tujuh) hari untuk pelepasan asset) Shareholders must provide approval on time in accordance with the provisions (especially for approval/decision within a maximum of 30 (thirty) days for KSO/BOT and a maximum of 7 (seven) days for asset disposal)	Hingga April 2024 belum ada pengajuan dan/persetujuan KSO/BOT kepada Pemegang Saham (N/A) Until April 2024 there was no KSO/BOT submission and/approval to Shareholders (N/A)
4.	Pemegang Saham agar memberikan penilaian kinerja dituangkan dalam risalah RUPS untuk Direksi (KPI Kolegial dan Individu) dan Dekom Shareholders are required to provide performance assessments as outlined in the minutes of the GMS for the Board of Directors (Collegial and Individual KPIs) and the Board of Commissioners	Penilaian KPI Kolegial Direksi sudah tercantum pada Pencapaian Kinerja Perusahaan di Risalah RUPS tahun buku 2022. Penilaian KPI Individu tidak dilakukan karena pada tahun 2022 belum memiliki KPI Individu Direksi. The Directors' Collegial KPI assessment has been included in the Company's Performance Achievements in the 2022 GMS Minutes. The Individual KPI assessment was not carried out due to no Individual Directors' KPI in 2022.

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Follow-up Form/Reason for Not Following Up
III Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board		
1.	Agar sekretaris dekom dan sekretaris perusahaan menyusun laporan kegiatan pelaksanaan pengenalan baik dalam bentuk risalah atau hasil Laporan kegiatan. The BOC secretary and company secretary shall prepare a report on the implementation of the introduction activities either in the form of minutes or the results of the activity report.	Hingga April 2024, belum ada pergantian anggota Dekom pada tahun 2022. Laporan kegiatan ini akan terpenuhi apabila terjadi pergantian Dekom (N/A) As of April 2024, there were no changes in Board of Commissioners members in 2022. This activity report will be fulfilled if there is a change in Board of Commissioners (N/A)
2.	Agar di dalam RKAP memuat anggaran yang mencantumkan pelatihan dekom secara eksplisit The RKAP shall include a budget that explicitly includes BOC training	Sudah ditindaklanjuti Dalam buku RKAP 2023 sudah dicantumkan anggaran pelatihan di ITDC untuk Karyawan, Direksi, Dekom dan Komite. Has been followed up. In the 2023 RKAP book, the training budget at ITDC for Employees, Directors, Board of Commissioners and Committees has been included.
3.	Agar dalam tanggapan Dekom terhadap rancangan RKAP ditambahkan ke simpulan bahwa rancangan RKAP telah selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP The Board of Commissioners' response to the draft RKAP shall be added to the conclusion that the draft RKAP is in line/not with the RJPP	Rancangan RJPP ITDC telah mendapatkan Tanggapan oleh Dekom melalui surat S-29/DEKOM. ITDC/IV/2024 namun tidak mencantumkan simpulan bahwa rancangan RKA The ITDC RJPP draft has received a response from the Board of Commissioners via letter S-29/DEKOM. ITDC/IV/2024 however it does not include a conclusion regarding the RKA draft
4.	Agar dibuatkan kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam bentuk SK Tata kelola Dekom To create policies/criteria determined by the Board of Commissioners/Supervisory Board regarding information on the business environment and problems with the possibility to have an impact on the company's business and company performance that need to receive the attention of the Board of Commissioners/Supervisory Board in the form of a Board of Commissioners Governance Decree.	Sudah ditindaklanjuti SK Tata Kelola Dekom telah disusun. Dokumen SK nomor 10/KEP/DEKOM/IX/2023 tanggal 11 Sept 2023 tentang Kebijakan Pemantauan Perubahan Lingkungan Bisnis Di Lingkup Dewan Komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Has been followed up. The Board of Commissioners' Governance Decree has been prepared. Decree document number 10/KEP/DEKOM/IX/2023 dated September 11, 2023, concerning Monitoring Policy for Changes in the Business Environment within the Board of Commissioners of PT Pembangunan Wisata Indonesia
5.	Agar di dalam pembahasan risalah rapat dapat dilengkapi dengan saran dan harapan The discussion of the minutes of the meeting shall be equipped with suggestions and expectations	Sudah ditindaklanjuti Telah disampaikan saran dan harapan pada risalah rapat. Has been followed up. Suggestions and expectations have been conveyed in the minutes of the meeting.
6.	Agar Dekom melakukan telaah evaluasi atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern. dan pelaksanaannya berikut simpulan serta hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan operasional/aktivitas The Board of Commissioners shall carry out an evaluation review of the policy/design of the internal control system and its implementation along with conclusions and evaluation results on the effectiveness of internal control at the entity and operational/activity levels	Sudah ditindaklanjuti Telah dituangkan pada Surat Keluar Dewan Komisaris No.S-08/DEKOM.ITDC/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 perihal Saran/Rekomendasi atas Evaluasi Pengendalian Intern ITDC periode 2021 - TW III 2022 Has been followed up. It has been stated in the Board of Commissioners' Outgoing Letter No.S-08/DEKOM. ITDC/III/2023 dated March 2, 2023, regarding Suggestions/Recommendations for the Evaluation of ITDC Internal Control for the period 2021 - QW III 2022



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Follow-up Form/Reason for Not Following Up
7.	Agar dibuatkan hasil telaah dan arahan kebijakan sistem teknologi informasi dan dalam pelaksanaannya ke direksi To provide the results of the review and direction of information technology system policies and their implementation to the Board of Directors	Sudah ditindaklanjuti Telah dituangkan pada Surat S-67/DEKOM.ITDC/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Saran/Rekomendasi Dewan Komisaris terkait Kebijakan Sistem Teknologi Informasi ITDC Has been followed up. It has been stated in Letter S-67/DEKOM.ITDC/XI/2023 dated November 7, 2023, on Suggestions/Recommendation on ITDC Information Technology System Policy.
8.	Agar dibuatkan kebijakan pengawasan atas kebijakan mutu dan pelayanan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) To create a monitoring policy on quality and service policies in the form of a Decree (SK)	Sekretaris Dekom akan berkoordinasi perihal SK Pengawasan atas Kebijakan Mutu dan Pelayanan kepada KMR The BOC Secretary will coordinate the Supervision Decree on Quality and Service Policy with KMR
9.	Agar dibuatkan laporan tugas pengawasan semesteran Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham To make a semi-annual supervisory report on the Board of Commissioners' duties to Shareholders	Sudah ditindaklanjuti Telah dilaksanakan berdasarkan surat dekom nomor S-30/DEKOM.ITDC/VII/2023 tentang Laporan atas Tanggapan Manajemen dan Laporan Tugas Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Semester I Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2023, serta Laporan Pengawasan Tahunan Dekom Has been followed up. It has been implemented based on Dekom letter number S-30/DEKOM.ITDC/VII/2023 concerning Reports on Management Responses and Reports on Supervisory Tasks and KPIs of the Board of Commissioners for Semester I 2022 dated July 5, 2023, as well as the Board of Commissioners' Annual Supervision Report
10.	Agar mencantumkan besaran honorarium/imbalan jasa untuk alasan pencalonan Auditor Eksternal kepada RUPS/ Pemilik Modal To include the amount of honorarium/remuneration for the reasons for nominating an External Auditor to the GMS/ Capital Owners	Pada surat no S-24/DEKOM.ITDC/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2022 (Audited) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, telah mencantumkan rekomendasi KAP namun TIDAK mencantumkan besaran honorarium pencalonan KAP. In letter no S-24/DEKOM.ITDC/VI/2023 dated June 14, 2023, regarding the Board of Commissioners' Response to the 2022 Financial Year Management Report (Audited) of PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero), it has included the KAP's recommendation but has NOT included the amount of the KAP nomination honorarium.
11.	Untuk memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Agar dibuatkan pembahas tentang: (1) efektivitas pemantauan TL hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; (4) rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI. To ensure that external audits and internal audits are carried out effectively and carry out reviews of complaints relating to SOEs received by the Board of Commissioners/ Supervisory Board. To discuss: (1) the effectiveness of TL monitoring as a result of SPI audits and external auditors; (2) conformity of audit implementation with internal audit standards; (3) completeness of findings attributes and quality of recommendations resulting from internal audits; (4) monitoring work plan and its implementation; (5) SPI function management.	Sudah ditindaklanjuti Telah dipaparkan pada Risalah Rapat Komite Audit nomor Ris-45/KA/ITDC/IX/2023 tanggal 25 September 2023 dengan agenda update Aol terkait SPI. Serta Risalah Dekom dan Direksi no. Ris-23/DEKOM/ITDC/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan agenda Laporan Internal Audit. Has been followed up. It has been presented in the Minutes of the Audit Committee Meeting number Ris-45/KA/ITDC/IX/2023 dated September 25, 2023, with the Aol update agenda regarding SPI. As well as Minutes of the Board of Commissioners and Directors no. Ris-23/DEKOM/ITDC/X/2023 dated October 11, 2023, with the agenda of the Internal Audit Report.

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Follow-up Form/Reason for Not Following Up
12.	Agar dibuatkan Penilaian Kolegal Kinerja Direksi sesuai SK Kementerian BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Operasional dan Administrasi. To make a Collegial Assessment of Directors' Performance in accordance with the Decree of the Ministry of SOEs No.KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002, which covers Financial, Operational and Administrative Aspects.	Sudah ditindaklanjuti Dokumen bersifat confidential namun dapat ditunjukkan apabila diperlukan. Penilaian dilakukan berdasarkan template yang diberikan oleh Pemegang Saham/Kementerian BUMN berdasarkan surat S-06/DEKOM.ITDC.02/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 It has been followed up. Documents are confidential but can be shown if necessary. The assessment is carried out based on the template provided by the Shareholders/Ministry of SOEs based on letter S-06/DEKOM.ITDC.02/II/2023 dated February 27, 2023
13.	Agar dibuatkan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi. To carry out a review of the proposed remuneration for the Directors in accordance with applicable regulations and an assessment of the performance of the Directors.	Sudah ditindaklanjuti Memo IM.03/KNR/ITDC/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Usulan Remunerasi Direksi It has been followed up on Memo IM.03/KNR/ITDC/VI/2023 dated June 14, 2023, concerning Proposed Remuneration for Director
14.	Agar dibuatkan Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/ Pemilik Modal, dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan (Pasangan dan anak) To create an Integrity Pact attached to the Board of Directors' Action Proposal which must obtain a recommendation from the Board of Commissioners and approval from the GMS/Capital Owners, and the Board of Commissioners/Supervisory Board must report to the company (Company Secretary) to be listed in the Special Register regarding their and/or family's share ownership at the company (Spouse and children)	1. Sekretaris Dekom akan berkoordinasi perihal SK Pengawasan atas Kebijakan Mutu dan Pelayanan kepada KMR 2. Daftar khusus kepemilikan saham Dekom dan keluarga telah dilampirkan. 1. The BOC Secretary will coordinate the Supervision Decree on Quality and Service Policy with KMR 2. A special list of BOC and family share ownership has been attached.
15.	Agar dibuatkan telaah atas pembahasan muatan GCG dalam laporan tahunan. To make a review of the discussion of GCG content in the annual report.	Sudah ditindaklanjuti Telah disampaikan melalui surat No. S-24/DEKOM. ITDC/VI/2023 Tanggapan Dekom atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2022 (Audited) tanggal 14 Juni 2023 poin 2 d It has been followed up and conveyed via letter No. S-24/DEKOM. ITDC/VI/2023 Board of Commissioners' Response to the 2022 Financial Year Management Report (Audited) dated June 14, 2023, point 2 d
16.	Agar dibuatkan penilaian kinerja komite komisaris, tentang evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota dewan komisaris, atas KPI Dekom dan komite dekom. To make an assessment of the performance of the commissioners committee, regarding the evaluation of the performance achievements of each member of the board of commissioners, on the KPIs of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners committees.	Sudah ditindaklanjuti Telah dilakukan penilaian kinerja komite komisaris melalui evaluasi kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Has been followed up. An assessment of the performance of the Commissioners committee has been carried out through evaluating the performance of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Follow-up Form/Reason for Not Following Up
17.	Agar melampirkan surat kuasa kepada anggota Komisaris lainnya, dengan mencantumkan alasan ketidakhadiran, serta di dalam pembuatan Risalah agar dicantumkan alasan ketidakhadiran. To attach a power of attorney to members of the Board of Commissioners, stating the reason for the absence, and in preparing the Minutes to include the reason for the absence.	Sudah ditindaklanjuti Telah tercantum alasan ketidakhadiran anggota Komisaris untuk rapat pada Surat Kuasa dan Risalah Rapat. It has been followed up. The reasons for the absence of Commissioners from the meeting have been stated in the Power of Attorney and Minutes of Meeting.
18.	Agar dalam setiap rapat Dekom, risalah rapat ditTD oleh Semua Anggota Dekom (Peserta Rapat). At every Board of Commissioners meeting, the minutes of the meeting must be signed by all Board of Commissioners Members (Meeting Participants).	Sudah ditindaklanjuti Risalah rapat Dekom telah di ttd oleh seluruh Anggota Dekom Has been followed up. The minutes of the Board of Commissioners' meeting have been signed by all members of the Board of Commissioners
IV Direksi Board of Directors		
1.	Direksi agar melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan dan membuat Laporan hasil mengikuti pelatihan. The Board of Directors must carry out training programs in order to improve the competency of members of the Board of Directors according to needs and prepare reports on the results of following the training.	Sudah ditindaklanjuti Direksi telah melaksanakan program pelatihan dan sudah dibuatkan laporan hasil pelatihan, dengan rincian pelatihan sebagai berikut: 1. Pelatihan SMAP yang dilaksanakan secara online tanggal 17 & 19 Mei 2023 (DZ DP DO DH) 2. Pelatihan Anti Korupsi yang dilaksanakan secara hybrid tgl 12 Des 2023 (DF). It has been followed up by the Board of Directors and has implemented a training program and a report on the results of the training has been prepared, with details of the training as follows: 1. SMAP training which was carried out online on May 17 and 19, 2023, (DZ DP DO DH) 2. Anti-Corruption Training which was carried out in a hybrid manner on December 12, 2023 (DF).
2.	Menetapkan tentang uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota Direksi dan untuk semua tingkat jabatan Determine the description of the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors and for all levels of position	Penyusunan Job Profile Direksi dan seluruh tingkat jabatan sedang difinalisasi oleh HC. Khusus Job Profile BOD menunggu Radir Direksi The preparation of the Job Profile for Directors and all levels of positions is being finalized by the HC. Specifically for the BOD Job Profile, waiting for Directors meeting
3.	Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala The Board of Directors reviews and refines SOPs periodically	Hingga saat ini sudah Final SOP sejumlah 120 dari 273 draft yang disampaikan. To date, there have been 120 Final SOPs out of the 273 drafts submitted.
4.	Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal The Board of Directors has a Long Term Plan (RJPP) which is approved by the GMS/Capital Owners	RJPP 2022-2026 telah disampaikan ke INJ. Penyapaian RJPP Cashcading 2022-2026 telah disampaikan ke INJ dengan nomor surat 118/Dir/ITDC.01/IV/2024. Sampai saat ini INJ belum menyampaikan Cashcading RJPP ITDC. The 2022-2026 RJPP has been submitted to INJ. The submission of RJPP Cashcading 2022-2026 has been submitted to INJ with letter number 118/Dir/ITDC.01/IV/2024. Until now INJ has not submitted Cashcading RJPP ITDC.

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Follow-up Form/Reason for Not Following Up
5.	Direksi agar menyusun pencapaian target kinerja anggota Direksi berdasarkan target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing The Board of Directors should prepare performance targets for members of the Board of Directors based on the targets and main performance indicators included in the individual Directors' management contracts with the realization of their respective achievements.	Sudah ditindaklanjuti Laporan Manajemen Triwulan 1 th 2023 Laporan Manajemen Semester 1 th 2023 Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2023 untuk pencapaian kolegal Direksi disampaikan melalui Laporan Manajemen yang disampaikan setiap triwulan tahun 2023, sedangkan untuk capaian KPI Direksi individu disampaikan pada akhir twulan IV th 2023/audited Telah disusun pencapaian KPI Individu Direksi. It has been followed up. Management Report for Quarter 1 of 2023 Management Report for Semester 1 of 2023 Management Report for Quarter III of 2023. The collegial achievements of the Board of Directors are submitted through a Management Report which is distributed every quarter in 2023, while the KPI achievements of individual Directors are submitted at the end of the fourth quarter of 2023/ audited. The Directors' Individual KPI achievements have been prepared.
6.	Direksi memiliki Information Technology Master Plan (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi The Board of Directors has an Information Technology Master Plan (ITMP) as a guideline for developing information technology	IT Masterplan sedang dilakukan penyesuaian atas usulan dari KA dan KPR. The IT Masterplan is being adjusted based on proposals from KA and KPR.
7.	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan The Board of Directors implements a system for improving product and service quality	INU tidak memperpanjang Sertifikasi Kebijakan Mutu ISO 9001:2015 terkait pengelolaan air limbah dan irigasi, INU does not extend ISO 9001:2015 Quality Policy Certification related to wastewater and irrigation management.
8.	Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan atas Kebijakan K3 The Board of Directors reviews and refines the OHS Policy	Kebijakan K3 (Pedoma dan SOP) telah disusun draftnya namun belum pada tahap persetujuan. The OHS Policy (Guidelines and SOP) has been drafted but is not yet at the approval stage.
9.	Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan perusahaan patungan The Board of Directors determines regulatory policies for subsidiaries (subsidiary governance) and joint ventures	Pedoman anak Perusahaan (subsidiary governance) sedang dalam proses penyesuaian PER 03/MBU/03/2023 oleh Tim Corsec. The subsidiary governance guidelines are in the process of being adjusted to PER 03/MBU/03/2023 by the Corsec Team.
10.	Direksi menetapkan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan secara tepat waktu The Board of Directors sets performance targets and realizes the performance of subsidiaries/joint ventures in a timely manner	1. RUPS RKAP INU Tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2023. 2. RUPS Tahunan/Kinerja INU Tahun buku 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 3. RUPS RKAP Tahun 2023 dan RUPS Tahunan/Kinerja INP Tahun buku 2023 belum terlaksana 1. The 2023 INU RKAP GMS was held on February 10, 2023. 2. The 2023 Annual GMS/INU Performance for the 2023 financial year was held on August 30, 2023 3. The 2023 RKAP GMS and the 2023 Annual GMS/INP Performance have not yet been implemented



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Follow-up Form/Reason for Not Following Up
11.	Agar tidak terjadi temuan berulang di unit yang sama oleh Eksternal atau Internal Audit To avoid repeated findings in the same unit by External or Internal Audit	Internal Audit belum memberikan data terkait dengan terjadinya temuan berulang di ITDC tahun 2023. Internal Audit has not provided data related to the occurrence of repeated findings at ITDC in 2023.
12.	Menindaklanjuti Hasil Survei Kepuasan Pelanggan dan dibuatkan laporan progres pelaksanaannya Follow up on Customer Satisfaction Survey Results and create implementation progress reports	Survey Kepuasan Pelanggan dilaksanakan oleh Tim SBU, namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti kembali terkait Hasilnya. The Customer Satisfaction Survey was carried out by the SBU Team, but until now there has been no follow-up regarding the results.
13.	Kreditur perusahaan dibayar tepat waktu/sesuai perjanjian. Tidak ada keterlambatan/penundaan pembayaran pinjaman kepada Bank/Kreditur Company creditors are paid on time/according to the agreement. There are no delays/delays in loan payments to Banks/Creditors	Terhadap kewajiban pembayaran kepada Pihak kreditur akan dibayarkan berdasarkan perjanjian. Tim keuangan sedang melakukan pemeriksaan terhadap pembayaran ke vendor atau kreditur. Payment obligations to creditors will be paid based on the agreement. The finance team is checking payments to vendors or creditors.
14.	Direksi menetapkan Kebijakan Metode Penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan melakukan pengukuran kepuasan karyawan secara berkala The Board of Directors establishes an Assessment Method Policy to measure employee satisfaction and periodically measures employee satisfaction	Sudah ditindaklanjuti Sudah terdapat SOP Employee Engagement Survey. Survey sudah dilaksanakan pada 17-31 Mei 2023, dan final report sudah disampaikan kepada Direksi. Has been followed up. There is an Employee Engagement Survey SOP. The survey was carried out on May 17-31, 2023, and the final report was submitted to the Board of Directors.
15.	Pimpinan Fungsi Audit Internal dan Staf Audit Internal memiliki Sertifikasi Profesi Auditor Internal The Head of the Internal Audit Function and Internal Audit Staff have Internal Auditor Professional Certification	Pada tahun 2023, Tim IA belum memiliki Sertifikasi Profesi Auditor Internal dan akan dilaksanakan Sertifikasi Profesi ini pada tahun 2024. In 2023, the IA Team did not have Internal Auditor Professional Certification and this Professional Certification will be implemented in 2024.
16.	Direksi mengevaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan The Board of Directors evaluates the implementation of the duties of the Corporate Secretary	Proses Performance Appraisal Sekper menunggu persetujuan Bapak DZ The Corporate Secretary Performance Appraisal process awaits Mr. DZ's approval
17.	Direksi menyelenggarakan RUPS (RJPP, RKAP & Laporan Tahunan) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan The Board of Directors holds a GMS (RJPP, RKAP & Annual Report) in accordance with the procedures stipulated in the Articles of Association and Legislative Regulations	Sudah ditindaklanjuti Hasil RUPS RKAP 2023 yang dilaksanakan pada 30 Januari 2023 dengan No. 001/Ris/ITDC.01/I/2023 Hasil RUPS Tahunan tahun buku 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 dengan No. 003/Ris/ITDC.01/VI/2023 Hasil RJPP- nihil The results of the 2023 RKAP GMS which were held on January 30, 2023, have been followed up with No. 001/Ris/ITDC.01/I/2023. The results of the 2022 Annual GMS have been held on June 26, 2023, with No. 003/Ris/ITDC.01/VI/2023 RJPP results- nil

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Follow-up Form/Reason for Not Following Up
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency		
1.	4. Melakukan <i>review</i> terhadap: 1. Tingkat kecukupan atas kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan. 2. Kemudahan akses dan pengunduhan (<i>download</i>) informasi yang dimuat dalam website perusahaan. Conducting review on: 1. The level of adequacy of the company's compliance with the company's information control policy. 2. Ease of access and downloading of information contained on the company website.	1. Corporate Communication akan menindaklanjuti tingkat kecukupan atas kepatuhan Perusahaan terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan dalam sebuah Laporan berdasarkan pada Pedoman Pengungkapan Informasi dan Dokumentasi 2. Corporate Communication akan menindaklanjuti dengan membuat laporan data jumlah akses ke website serta jumlah data yang bisa diakses dan didownload hingga TW IV tahun 2023 1. Corporate Communication will follow up on the level of adequacy of the Company's compliance with the Company's information control policy in a Report based on the Information Disclosure and Documentation Guidelines 2. Corporate Communication will follow up by making a data report on the number of accesses to the website and the amount of data that can be accessed and downloaded up to TW IV in 2023
2.	Laporan Tahunan agar memuat penjelasan/informasi terkait: a. Penjelasan Visi dan Misi Perusahaan b. Peningkatan dan/atau penurunan pendapatan perusahaan di dalam Laporan Tahunan c. Dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun. d. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang e. Payout Ratio f. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi, transaksi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal. g. Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi h. Aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan (2) Program pengembangan pendidikan (3) Program perbaikan kesehatan (4) Program pengembangan seni budaya (5) Biaya yang telah dikeluarkan.	Sudah ditindaklanjuti a. Belum ada penjelasan pada Annual Report (AR) 2022 dan akan ditindaklanjuti pada AR 2023 b. Sudah masuk pada AR tahun 2022 pada halaman 162 c. Tidak ada penjelasan pada AR karena perusahaan sudah memulai usaha sejak 50 tahun lalu d. Sudah masuk pada AR tahun 2022 pada halaman 171-174 e. Sudah masuk dalam AR ITDC Tahun 2022. Pada 2022 Pemegang Saham menyetujui tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum. Perseroan juga tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham. Untuk itu, informasi mengenai jumlah dividen, mekanisme pembagian serta payout ratio tidak tersedia dalam laporan ini. Penjelasan pada halaman 180. f. Sudah masuk pada AR tahun 2022 pada halaman 181 g. Sudah masuk pada AR tahun 2022 pada halaman 325 h. Belum ada penjelasan Aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan. Hal ini akan disampaikan pada AR 2023.



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022	Bentuk Tindak Lanjut/Alasan Belum Ditindaklanjuti Follow-up Form/Reason for Not Following Up
	The Annual Report must contain explanations/information related to: - Explanation of the Company's Vision and Mission - Increase and/or decrease in company revenue in the Annual Report - The impact of price changes on the company's sales or net income as well as the company's operating profit for 2 (two) years or since the company started its business, if it has only started its business for less than 2 (two) years. - Material information and facts that occur after the date of the accountant's report, including their impact on future business performance and risks - Payout Ratio - Transactions containing conflicts of interest and the nature of transactions with affiliated parties, material transactions, including investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring. - Independence of nomination and remuneration committee members - Activities and costs incurred are related to corporate social responsibility, especially regarding the "community development program" that has been carried out, including, among other things, information about: - Business Partners fostered by the Company - Educational development programs - Health improvement programs - Arts and culture development programs - Costs that have been incurred.	Has been followed up - There is no explanation yet in the 2022 Annual Report (AR) and will be followed up in AR 2023 - It has been included in AR in 2022 on page 162 - There is no explanation in AR because the company started the business 50 years ago - It has been included in AR in 2022 on pages 171-174 - It has been included in AR ITDC for 2022. In 2022, Shareholders agree that there will be no set aside from general reserve funds. The Company also does not distribute dividends to Shareholders. For this reason, information regarding the amount of dividends, distribution mechanism and payout ratio is not available in this report. Explanation on page 180. - It has been included in AR in 2022 on page 181 - It has been included in AR in 2022 on page 325 - There is no explanation of the activities and costs incurred in relation to corporate social responsibility, especially regarding the "community development program" that has been carried out. This will be presented in AR 2023.

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2023

Berdasarkan kajian di internal Perusahaan, ITDC meratifikasi beberapa Peraturan Menteri BUMN, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Nomor PER/2/MBU/03/2023. Adapun pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik masih menunggu indikator/parameter yang ditetapkan Deputy terkait, di mana hingga saat ini belum terdapat keputusan Deputy yang mengatur hal tersebut.

Namun demikian, sebagai wujud komitmen implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan self assessment Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan menyampaikan Laporan dimaksud kepada stakeholder terkait.

GCG Implementation Assessment for Fiscal Year 2023

Based on the Company's internal studies, ITDC ratified several SOEs Ministerial Regulations, one of which is Ministerial Regulation Number PER/2/MBU/03/2023. As for measuring the implementation and implementation of Good Corporate Governance, we are still waiting for the indicators/parameters determined by the relevant Deputy, where up to now there has been no Deputy decision regulating this matter.

However, as a form of commitment to implementing Good Corporate Governance, the Company is always committed to carrying out a Good Corporate Governance self-assessment and submitting the report to relevant stakeholders.

Struktur dan Organ Tata Kelola Perusahaan

Structure and Organs of Corporate Governance

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG yang memiliki hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS juga menjadi media komunikasi antara Pemegang Saham dengan Dewan Komisaris dan Direksi melalui forum untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas serta hasil kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham yang berlaku secara adil dan proporsional berdasarkan prinsip *one share, one vote*.

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Sampai dengan akhir tahun 2023, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia merupakan bagian dari Holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebanyak 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebanyak 2.147.659 lembar saham Seri B.

Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)

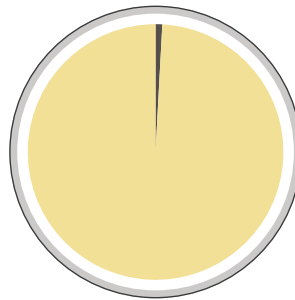
The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority within the GCG structure, possessing rights and powers not held by the Board of Commissioners and the Board of Directors within the limits defined by statutory regulations and the Company's Articles of Association. The GMS also serves as a communication medium between the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors through a forum to present accountability reports on the execution of duties and the Company's performance results to the Shareholders, in a fair and proportional manner based on the principle of one share, one vote.

Decisions made at the GMS must be based on the Company's long-term and short-term interests. The GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, without prejudice to the GMS's authority to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and statutory regulations; including the authority to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.

As of the end of 2023, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia is part of the SOE Holding in the aviation and tourism sector in Indonesia, with its shares owned by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs amounting to 1 Dwiwarna Series A share and PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) amounting to 2,147,659 Series B shares.



Komposisi Pemegang Saham ITDC Per 31 Desember 2023
Composition of ITDC Shareholders as of December 31, 2023



● **0,00005%**
Pemerintah Republik Indonesia
The Government of the Republic of
Indonesia

● **99,99995%**
PT Aviastar Pariwisata Indonesia

Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS.
2. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur.
3. Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.

Jenis-Jenis RUPS

ITDC memiliki 2 (dua) jenis RUPS, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sementara, RUPS Lainnya dapat dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham.

Perusahaan berupaya untuk terus memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan kepada Pemegang Saham, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Keputusan dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perusahaan. RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan.

Shareholders' Rights

Shareholders have the following rights:

1. The right to attend and vote in a GMS.
2. The right to obtain material information about the Company on a timely and regular basis.
3. The right to receive a share of the Company's profits in the form of dividends and other profit sharing.

Types of GMS

ITDC has 2 (two) types of GMS, namely the Annual GMS and other GMS. The Annual GMS must be held at least once a year, no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year. Other GMS can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the shareholders.

The Company strives to continuously provide all information related to the Company to the Shareholders, as long as it does not conflict with the interests of the Company and statutory regulations. Decisions made at the GMS are based on the interests of the Company. The GMS cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without prejudice to the GMS's authority to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and statutory regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham: Jenis, Fungsi, Wewenang, dan Mekanisme Pelaksanaannya

RUPS mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, menunjuk akuntan publik, dan menetapkan jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ tersebut saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Adapun materi laporan yang disampaikan dalam RUPS Tahunan sekurang-kurangnya mencakup:

1. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingannya dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
2. Laporan mengenai kegiatan Perusahaan.
3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, jika ada.
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7. Gaji dan tunjangan fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun baru lampau.
8. Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan.
9. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan.

General Meeting of Shareholders: Types, Functions, Authorities, and Implementation Mechanisms

The GMS has the authority to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, ratify amendments to the Articles of Association, give approval to the annual report, determine the allocation of the use of profits, appoint a public accountant, and determine the amount and type of compensation for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The three organs respect each other's duties, responsibilities and authorities following the laws and regulations and the Articles of Association.

The report material submitted at the Annual GMS shall at least include:

1. Financial statements consisting of at least a balance sheet at the end of the last financial year in comparison with the previous financial year, a profit and loss statement for the relevant financial year, a statement of cash flow and a statement of changes in equity, along with notes to the financial statements and a report on rights and obligations. The Company's rights that are not recorded in the books are among others as a result of write-off of receivables.
2. Reports on the Company's activities.
3. Report on the implementation of social and environmental responsibility, if any.
4. Details of problems that arose during the financial year that affected the Company's business activities.
5. Report on the supervisory duties that have been carried out by the Board of Commissioners during the last financial year.
6. Names of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
7. Salary and facilities allowances for members of the Board of Directors and honorarium and allowances/facilities for members of the Company's Board of Commissioners for the past new year.
8. Proposed use of the Company's net profit.
9. Other matters that need approval from the GMS for the benefit of the Company.



Hasil Keputusan RUPS Tahun 2022 dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Persetujuan RKAP Tahun 2022 dan RKA-TJSL Tahun 2022, serta RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021. Adapun rincian pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Results of the 2022 GMS Resolutions and Follow-up by Management

Throughout 2022, the Company held 2 (two) GMS, which are the GMS for the Approval of the 2022 RKAP and the 2022 RKA-TJSL, and the GMS for the Ratification of the Financial Statements for the Fiscal Year 2021. The details of the GMS conducted throughout 2022 are as follows:

RUPS Tahunan Persetujuan RKAP Tahun 2022 dan RKA-TJSL Tahun 2022

Annual General Meeting of Shareholders for the Approval of the 2022 RKAP and the 2022 RKA-TJSL

Waktu Pelaksanaan: Date of Implementation:	3 Februari 2022 February 3, 2022	
Tempat Pelaksanaan: Place of Implementation:	Online via Zoom	
Pihak yang Hadir: Attending Parties:	1. Pemegang Saham 2. Dewan Komisaris 3. Direksi	1. Shareholders 2. Board of Commissioners 3. Board of Directors
Agenda:	1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022. 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2022. 3. Penetapan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators/KPI) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2022. 4. Penetapan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators/KPI) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2022. 5. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Tahun 2022. 6. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.	
	1. Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Year 2022, including the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for the Year 2022. 2. Approval of the Work Plan and Budget of the Corporate Social Responsibility and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) for the Year 2022. 3. Establishment of Management Contracts (Key Performance Indicators/KPI) for the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders for the Year 2022. 4. Establishment of Management Contracts (Key Performance Indicators/KPI) between the Board of Commissioners and the Shareholders for the Year 2022. 5. Determination of Operational Aspect Indicators for Health Level Calculation for the Year 2022. 6. Approval for the delegation of authority to the Board of Commissioners to approve actions resulting in changes in investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program, as long as it does not change the total investment value.	

Hasil Keputusan Meeting Decision	Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented	Penjelasan/Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2022 Elaboration/Follow-up by Management Until End of 2022
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022 Realized in 2022
Approving the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Year 2022, including the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for the Year 2022.		
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2022, dengan Total Program Pendanaan Non PUMK sebesar Rp 500 Juta.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022 Realized in 2022
Approving the Work Plan and Budget of the Corporate Social Responsibility and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) for the Year 2022, with a Total Non-PUMK Program Funding of Rp 500 million.		
Menetapkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators/KPI) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2022, sebagaimana Lampiran I Risalah Rapat ini.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022 Realized in 2022
Establishing Management Contracts (Key Performance Indicators/KPI) for the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders for the Year 2022, as outlined in Appendix I of this Meeting Minutes.		
Menetapkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators/KPI) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2022, sebagaimana Lampiran II Risalah Rapat ini.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022 Realized in 2022
Establishing Management Contracts (Key Performance Indicators/KPI) between the Board of Commissioners and the Shareholders for the Year 2022, as outlined in Appendix II of this Meeting Minutes.		
Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Tahun 2022.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022 Realized in 2022
Establishing Operational Aspect Indicators for Health Level Calculation for the Year 2022.		
Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022 Realized in 2022
Approving the delegation of authority to the Board of Commissioners to approve actions resulting in changes in investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program, as long as it does not change the total investment value.		



RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021

Shareholders' General Meeting for Approval of Financial Statements for the Fiscal Year 2021

Waktu Pelaksanaan Date of Implementation	30 Juni 2022 June 30, 2022	
Tempat Pelaksanaan Place of Implementation	Online via Zoom	
Pihak yang Hadir Parties in Attendance	1. Pemegang Saham 2. Dewan Komisaris 3. Direksi	1. Shareholders 2. Board of Commissioners 3. Board of Directors
Agenda	- Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja (EY) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 01162/2.1032/AU.1/03/0240- 5/1/IV/2022 tanggal 29 April 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Penetapan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan karena Perusahaan mengalami Rugi Bersih Tahun Buku 2021. - Penetapan Insentif Kinerja Tahun Buku 2021, Gaji Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022, akan ditetapkan secara tersendiri. - Persetujuan penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja (EY) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022. - Menerima Laporan Realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2020 selama tahun buku 2021 dengan pengesahan akan ditetapkan secara tersendiri. - Menerima Laporan Realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2021 selama tahun buku 2021 dengan pengesahan akan ditetapkan secara tersendiri.	
	- Approval of the Annual Report for Fiscal Year 2021, including the Supervisory Board's Report for Fiscal Year 2021, and the endorsement of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2021, audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, and Surja (EY) as stated in their report Number: 01162/2.1032/AU.1/03/0240- 5/1/IV/2022 dated April 29, 2022, with an unqualified opinion on all material matters in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. - Determination of the Use of the Company's Consolidated Net Income as the Company Incurred a Net Loss for Fiscal Year 2021. - Setting Performance Incentives for Fiscal Year 2021, Director's Salaries and Honorarium for the Board of Commissioners, along with Facilities and Other Allowances for 2022, will be determined separately. - Approval of the reappointment of the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, and Surja (EY) as the Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements, Financial Statements, and Implementation of Micro and Small Business Financing Programs (PUMK) and other reports for Fiscal Year 2022. - Receipt of the Realization Report on the Use of Additional State Capital Participation Fund (PMN) for the 2020 Fiscal Year during the fiscal year 2021, with endorsement to be determined separately. - Receipt of the Realization Report on the Use of Additional State Capital Participation Fund (PMN) for the 2021 Fiscal Year during the fiscal year 2021, with endorsement to be determined separately.	

Hasil Keputusan Meeting Decision	Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented	Penjelasan/Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2022 Elaboration/Follow-up by Management Until End of 2022
- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja (EY) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 01162/2.1032/AU.1/03/0240- 5/1/IV/2022 tanggal 29 April 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Mengesahkan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor: 01259/2.1032/AU.2/03/0240-5/1/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2021.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022 Realized in 2022
- Approval of the Annual Report for Fiscal Year 2021, including the Supervisory Board's Report for Fiscal Year 2021, and endorsement of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2021, audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, and Surja (EY) as stated in their report Number: 01162/2.1032/AU.1/03/0240- 5/1/IV/2022 dated April 29, 2022, with an unqualified opinion on all material matters in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. - Approval of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) Report for Fiscal Year 2021, and endorsement of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) Report audited by Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm as per their report Number: 01259/2.1032/AU.2/03/0240-5/1/V/2022 dated May 24, 2022, with an unqualified opinion on all material matters in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. - Approval to grant full discharge and release (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the management and supervisory actions undertaken during Fiscal Year 2021, provided such actions are not criminal offenses and are reflected in the Annual Report, the Company's Consolidated Financial Statements, and the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) Report for Fiscal Year 2021.		
Menyetujui tidak ada penetapan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan karena Perusahaan mengalami Rugi Bersih Tahun Buku 2021.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022
Approval of not allocating the Consolidated Net Profit of the Company due to the Company experiencing a Net Loss for Fiscal Year 2021.		Realized in 2022
Menetapkan Insentif Kinerja Tahun Buku 2021, Gaji Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022, akan ditetapkan secara tersendiri.		Telah direalisasikan di tahun 2022
Establishment of Performance Incentives for Fiscal Year 2021, Directors' Salaries and Honorariums for the Board of Commissioners, including Facilities and Other Benefits for the year 2022, to be determined separately.	✓	Realized in 2022



Hasil Keputusan Meeting Decision	Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented	Penjelasan/Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2022 Elaboration/Follow-up by Management Until End of 2022
- Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja (EY) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perusahaan. - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menunjuk KAP pengganti dalam hal KAP tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022 Realized in 2022
- Agreeing to reappoint the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja (EY) as the Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements, Financial Statements, and Implementation of Micro and Small Business Financing (PUMK) Programs, as well as other reports for the Fiscal Year 2022. - Granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods during the Fiscal Year 2022 for the purposes and interests of the Company. - Empowering the Company's Board of Commissioners to determine the audit service fees and other requirements for the aforementioned Public Accounting Firm, and to appoint a replacement Public Accounting Firm if the aforementioned firm, for any reason, cannot complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements, Financial Statements, and Implementation of Micro and Small Business Financing (PUMK) Programs, as well as other reports for the Fiscal Year 2022, including determining the audit service fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022 Realized in 2022
Menerima Laporan Realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2020 selama tahun buku 2021 dengan pengesahan akan ditetapkan secara tersendiri. Receipt of the Report on the Utilization of Additional State Capital Participation Funds (PMN) Fiscal Year 2020 during the fiscal year 2021, with approval to be determined separately.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022 Realized in 2022
Menerima Laporan Realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2021 selama tahun buku 2021 dengan pengesahan akan ditetapkan secara tersendiri. Receipt of the Report on the Utilization of Additional State Capital Participation Funds (PMN) Fiscal Year 2021 during the fiscal year 2021, with approval to be determined separately.	✓	Telah direalisasikan di tahun 2022 Realized in 2022

Penyelenggaraan RUPS untuk Tahun Buku 2023

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan 2 kali RUPS, yaitu RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2023 dan RUPS Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Adapun rincian pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

GMS Implementation for the 2023

Financial Year Throughout 2023, the Company held 2 GMS, namely the 2023 RKAP and RKA TJSL GMS and the Annual Report and Financial Report GMS. The details of the GMS held throughout 2023 can be seen as follows:

RUPS RKAP dan RKA TJSL GMS RKAP and RKA TJSL	
Waktu Pelaksanaan: Date of Implementation:	Senin, 30 Januari 2023 Monday, January 30, 2023
Tempat Pelaksanaan: Place of Implementation:	Kantor Injourney InJourney Office, Gedung Sarinah Lt.14, Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat
Pihak yang Hadir: Attending Parties:	Kuasa Pemegang Saham Direktur SDM dan Digital PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) : Herdy Rosadi Harman Dewan Komisaris : - Komisaris Utama : Ricky Joseph Pesik - Komisaris : H Irzani, M.Pd, M.Si - Komisaris : Ir. Zainal Mutaqin, M.M - Komisaris Independen : Ulin Ni'am Yusron Direksi : - Direktur Utama : Ari Respati - Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko : Ahmad Fajar - Direktur SDM & Legal Compliance : Wenda Ramadya Nabel - Direktur Pengembangan Bisnis : Ema Widiastuti - Direktur Operasi : Troy Reza Warokka Pegawai dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Shareholder Power Director of HR and Digital Director of HR and Digital PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) : Herdy Rosadi Harman Board of Commissioners : - President Commissionera : Ricky Joseph Pesik - Commissioner : H Irzani, M.Pd, M.Si - Commissioner : Ir. Zainal Mutaqin, M.M - Independent Commissioner : Ulin Ni'am Yusron Board of Directors : - President Director : Ari Respati - Director of Finance, Strategy, and Risk Management : Ahmad Fajar - Director of HR & Legal Compliance : Wenda Ramadya Nabel - Director of Business Development : Ema Widiastuti - Director of Operation : Troy Reza Warokka Employees from PT Aviation Wisata Indonesia (Persero) and PT Indonesian Tourism Development (ITDC)



RUPS RKAP dan RKA TJSL
GMS RKAP and RKA TJSL

Agenda:

1. Agenda Pertama: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023 dan Termasuk Penetapan Klasifikasi Risiko.
 2. Agenda Kedua: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023.
 3. Agenda Ketiga: Penetapan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators/ KPI) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023.
 4. Agenda Keempat: Penetapan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators/KPI) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023.
 5. Agenda Kelima: Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Tahun 2023
 6. Agenda Keenam: Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakantindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.
1. First Agenda: Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 including the Board of Commissioners' Work Plan and Budget for 2023 and including Determination of Risk Classification.
 2. Second Agenda: Ratification of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) for 2023.
 3. Third Agenda: Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators/KPI) for the Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders for 2023.
 4. Fourth Agenda: Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators/KPI) between the Board of Commissioners and Shareholders in 2023.
 5. Fifth Agenda: Determination of Operational Aspect Indicators for Calculation of Health Levels in 2023
 6. Sixth Agenda: Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners for giving approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value.

Hasil Keputusan Meeting Decision	Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented
Keputusan Agenda 1 : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023 termasuk Penetapan Klasifikasi Risiko Sistemik A, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1.1 Asumsi-Asumsi pokok : a. Pertumbuhan Ekonomi : 5,3% b. Tingkat Inflasi : 3,6% c. Nilai tukar (Rp/USD) 1 USD : Rp14.800,- d. Suku Bunga Perbendaharaan (SPN) : 7,9% 1.2 Laporan Laba Rugi Konsolidasian Laba (rugi) setelah pajak Tahun 2023 ditargetkan rugi sebesar (Rp 35 Miliar) dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Usaha Rp1.115 Miliar b. Beban Usaha Rp946 Miliar c. Laba (Rugi) Usaha Rp169 Miliar d. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Rp0,07 Miliar e. Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Rp(35) Miliar 1.3 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Laporan Posisi Keuangan tahun 2023 dianggarkan ditutup dengan Total Asset sebesar Rp7.380 Miliar dengan rincian sebagai berikut: Aset a. Aset Lancar Rp415 Miliar b. Aset Tidak Lancar Rp6.965 Miliar c. Jumlah Aset Rp7.380 Miliar Liabilitas dan Ekuitas a. Liabilitas Jangka Pendek Rp560 Miliar b. Liabilitas Jangka Panjang Rp3.964 Miliar c. Ekuitas Rp2.856 Miliar d. Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Rp7.380 Miliar 1.4 Investasi Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.147 Miliar dengan perincian sebagai berikut: b. Rutin Rp46 Miliar c. Pengembangan Rp1.101 Miliar Total Rp1.147 Miliar	Keputusan Langsung Berlaku



Hasil Keputusan Meeting Decision	Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented
Agenda Decision 1: Ratifying the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 including the Board of Commissioners' Work Plan and Budget for 2023 including the Determination of Systemic Risk Classification A, with the following points: 1.1 Main assumptions: a. Economic Growth: 5.3% b. Inflation Rate: 3.6% c. Exchange rate (Rp/USD) 1 USD : Rp14,800,- d. Treasury Interest Rate (SPN): 7.9% 1.2 Consolidated Profit and Loss Statement Profit (loss) after tax in 2023 is targeted for a loss of (Rp. 35 billion) with the following details: a. Business Income Rp1,115 Billion b. Operating Expenses Rp946 Billion c. Business Profit (Loss) Rp169 Billion d. Profit (Loss) Before Tax Rp0.07 Billion e. Net Profit (Loss) for the Year Rp(35) Billion 1.3 Consolidated Financial Position Report The 2023 Financial Position Report is budgeted to close with Total Assets of Rp7,380 Billion with the following details: Assets a. Current Assets Rp415 Billion b. Non-Current Assets Rp6,965 Billion c. Total Assets Rp7,380 Billion Liabilities and Equity a. Current Liabilities Rp560 Billion b. Non-current Liabilities Rp3,964 Billion c. Equity Rp2,856 Billion d. Total Liabilities and Equity Rp7,380 Billion 1.4 Investment for 2023 is budgeted at Rp1,147 billion with the following details: b. Routine Rp46 Billion c. Development Rp1,101 Billion Total Rp1,147 Billion	Decision Effective Immediately

Hasil Keputusan Meeting Decision				Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented
Keputusan Agenda 2 : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) tahun 2023, sesuai dengan Risalah Rapat Pembahasan RKA TJSL Tahun 2023 PT Aviast Pariwisata Indonesia (Persero) nomor: RIS-37/DSI.MBU.B/1//2023 tanggal 10 Januari 2023, dengan program pendanaan: a. Non PUMK Sebesar Rp0,48 Miliar b. PUMK sebesar Rp2,10 Miliar Agenda 2 Decision: Approving the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) for 2023, in accordance with the Minutes of the 2023 RKA TJSL Discussion Meeting of PT Aviast Wisata Indonesia (Persero) number: RIS-37/DSI.MBU.B /1//2023 dated January 10, 2023, with funding program: a. Non-PUMK Rp0.48 Billion b. PUMK amounting to Rp2.10 billion				Keputusan Langsung Berlaku
Keputusan Agenda 3 : Menetapkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators/KPI) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023 Agenda Decision 3: Establishing Management Contracts (Key Performance Indicators/KPI) for the Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders in 2023				Keputusan Langsung Berlaku Decision Effective Immediately
Keputusan Agenda 4 : Menetapkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators/KPI) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023 Agenda Decision 4: Establishing Management Contracts (Key Performance Indicators/KPI) between the Board of Commissioners and Shareholders in 2023				Keputusan Langsung Berlaku Decision Effective Immediately
Keputusan Agenda 5 : Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Tahun 2023, sebagai berikut: Agenda Decision 5: Determining Operational Aspect Indicators for Calculating Soundness Levels in 2023, as follows:				Keputusan Langsung Berlaku Decision Effective Immediately
No.	Indikator Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target Target
1	Aspek Operasional Operational Aspect % Progress Infrastruktur Dasar Mandalika (MUTIP) % Progress of Mandalika Basic Infrastructure (MUTIP)	4,00	%	100
2	Aspek Dinamis Dyanmic Aspect • Research and Development • Peningkatan Kualitas SDM HR Quality Improvement • Pelayanan Kepada Pelanggan Service to Customer	2,00 4,00 5,00	% % %	100 100 100
Jumlah Total		15,00		



Hasil Keputusan Meeting Decision	Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented
Keputusan Agenda 6 : Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi. Agenda Decision 6: Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to provide approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value.	Keputusan Langsung Berlaku Decision Effective Immediately

RUPS Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan GMS Annual Report and Financial Report	
Waktu Pelaksanaan: Date of Implementation:	Senin, 26 Juni 2023 Monday, June 26, 2023
Tempat Pelaksanaan: Place of Implementation:	Ruang Rapat Mandalika, Mandalika Meeting Room Gedung Sarinah Lantai 14, Jl. MH Thamrin No.11 Jakarta
Pihak yang Hadir: Attending Parties:	1. Kuasa Pemegang Saham Direktur SDM dan Digital PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) : Herdy Rosadi Harman 2. Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Ricky Joseph Pesik Komisaris : H Irzani, M.Pd, M.Si Komisaris : Ir. Zainal Mutaqin, M.M Komisaris Independen : Ulin Ni'am Yusron 3. Direksi : Direktur Utama : Ari Respati Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko : Ahmad Fajar Direktur SDM & Legal Compliance : Wenda Ramadya Nabiel Direktur Pengembangan Bisnis : Ema Widiastuti Direktur Operasi : Troy Reza Warokka Pegawai dari PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)
	1. Shareholder Power Director of HR and Digital : Herdy Rosadi Harman 2. Board of Commissioner President Commissioner : Ricky Joseph Pesik Commissioner : H Irzani, M.Pd, M.Si Commissioner : Ir. Zainal Mutaqin, M.M Independent Commissioner : Ulin Ni'am Yusron 3. Board of Directors President Director: Ari Respati Director of Finance, Strategy, and Risk Management : Ahmad Fajar Director of HR and Legal Compliance : Wenda Ramadya Nabiel Director of Business Development : Ema Widiastuti Director of Operations : Troy Reza Warokka Employees from PT Aviation Wisata Indonesia (Persero) and PT Indonesian Tourism Development (ITDC)

RUPS Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
GMS Annual Report and Financial Report

Agenda:

1. Agenda Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022;
2. Agenda kedua : Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022
3. Agenda ketiga : Penetapan penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2022
4. Agenda keempat : Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2023 serta Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan
5. Agenda kelima : Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023
6. Agenda keenam : Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:
 - a. PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - c. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
1. First Agenda: Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, and the Social and Environmental Responsibility Implementation Report for the 2022 Financial Year as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the 2022 Financial Year;
2. Second agenda: Ratification of the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Financial Year
3. Third agenda: Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year
4. Fourth agenda: Determination of remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the Financial Year 2023 as well as Tantiem/Performance Incentives for the 2022 Financial Year for the Company's Directors and Board of Commissioners
5. Fifth agenda: Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and Micro and Small Business Funding Program Reports (PUMK) for the 2023 Financial Year
6. Sixth agenda: Confirmation of the Implementation of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number:
 - a. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises;
 - b. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and
 - c. PER-3/MBU/03/2023 Concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.



Hasil Keputusan Meeting Decision	Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented
Keputusan Agenda 1 :	
a. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) sesuai laporannya Nomor: 00649/2.1030/AU.1/03/1698-1/1/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".	Keputusan Langsung Berlaku
Adapun pokok-pokok laporan sebagai berikut:	
1. Perhitungan Laba/Rugi Rugi Bersih Tahun Buku 2022 sebesar Rp 209.966 Juta dengan rincian sebagai berikut:	
Agenda 1 Decision:	
a. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report which has been carried out by the Board of Commissioners for the 2022 Financial Year, the Social and Environmental Responsibility Implementation Report for the 2022 Financial Year, and ratified the Company's Consolidated Financial Report for the 2022 Financial Year, which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) according to their report Number: 00649/2.1030/AU.1/03/16981/1/V/2023 dated May 31, 2023, with the opinion "reasonable, in all material respects in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia".	Decision Effective Immediately
The main points of the report are as follows:	
1. Calculation of Net Profit/Loss for the 2022 Financial Year amounting to Rp209,966 million with the following details:	
Uraian Description	Juta Rupiah Million Rupiah
Pendapatan Usaha Operating Income	657.488
Harga Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(357.831)
Total Laba Kotor Total Gross Profit	299.657
Beban Administrasi dan Umum Administration and General Expenses	(317.449)
Beban Pemasaran Marketing Expenses	(1.870)
Pendapatan Lain-Lain Other Income	18.561
Beban Lain-Lain Other Expenses	(107.555)
Lab a (Rugi) Usaha Business Profit (Loss)	(108.656)
Pendapatan Keuangan Financial Income	10.707
Pajak Final atas Pendapatan Keuangan Final Tax on Financial Income	(2.141)
Beban Keuangan Financial Expenses	(79.593)
Lab a (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Profit (Loss) before Final Tax Expense and Income Tax Benefit (Expense)	(179.683)
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(30.467)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	184
Lab a (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Current Year	(209.966)

**Hasil Keputusan
Meeting Decision**

**Sudah/
Belum
Terlaksana
Implemented/
Not
Implemented**

2. Laporan Posisi Keuangan Total Aset atau Total Liabilitas dan Ekuitas Per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp 6.859.408 Juta dengan rincian sebagai berikut:
Financial Position Report Total Assets or Total Liabilities and Equity As of December 31, 2022, realized at Rp6,859,408 Million with the following details:

Uraian Description	Juta Rupiah Million Rupiah
Aset Assets	
Aset Lancar Current Asset	1.012.162
Aset Tidak Lancar Non-current Asset	5.847.246
Total Aset Total Assets	6.859.408
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.545.096
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	2.173.066
Ekuitas Equity	2.141.246
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	6.859.408

3. Laporan Arus Kas Saldo Kas Per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.565 Juta dengan rincian sebagai berikut:
Cash Flow Balance Report as of December 31, 2022, is Rp64,565 million with the following details:

Uraian Description	Juta Rupiah Million Rupiah
Kas dari Aktivitas Operasi Cash from Operating Activities	213.212
Kas dari Aktivitas Investasi Cash from Investment Activities	(889.413)
Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash from Financing Activities	690.188
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalent	13.987
Dampak dari perubahan Kurs terhadap Kas dan Setara Kas Effect of Foreign Exchange Rate	(2.658)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	53.236
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	64.565



Hasil Keputusan Meeting Decision		Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented
4. Kontrak Manajemen/Key Performance Indicators (KPI) Skor KPI Tahun 2022 tercapai sebesar 83,11 dengan rincian sebagai berikut: Management Contracts/Key Performance Indicators (KPI) The 2022 KPI score was achieved at 83.11 with the following details:		
Perspektif/Parameter Perspective/Parameter	Bobot Weight	Skor Score
A Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economy and Social Value for Indonesia	30,00	17,22
B Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	20,00	19,36
C Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	20,00	20,00
D Peningkatan Investasi Investment Increase	20,00	16,23
E Pengembangan Talenta Talent Development	10,00	10,30
Jumlah Total	100,00	83,11
5. Realisasi Investasi tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.462.114 Juta dengan rincian sebagai berikut: Investment Realization Investment in 2022 was realized at Rp1,462,114 million with the following details:		
No	Uraian Description	Juta Rupiah Million Rupiah
1	Replacement/Rutin Replacement/Routine	6.073
2	Development/Pengembangan Development	1.456.041
Jumlah Total		1.462.114
6. Sumber Daya Manusia Pada tahun 2022 sumber daya manusia sebanyak 719 karyawan dengan rincian sebagai berikut : Human Resources In 2022 had 719 employees with the following details:		
No	Uraian Description	Jumlah Total
1	Tetap Permanent	177
2	Kontrak Contract	542
Jumlah Total		719

Hasil Keputusan Meeting Decision	Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented

7. Tingkat Kesehatan Perusahaan Penilaian Tingkat Kesehatan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, dengan skor 52,10 termasuk dalam tingkatan BBB (Kurang Sehat):
Company Soundness Level The Soundness Level Assessment was carried out based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002, with a score of 52.10 included in the BBB (Less Healthy) level:

Keterangan Description	Realisasi Skor Score Realization
Aspek Keuangan Financial Aspect	23,00
Aspek Operasional Operational Aspect	14,10
Aspek Administrasi Administration Aspect	15,00
Total Skor Total Score	52,10

8. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/TJSL (Non-PUMK)
Social and Environmental Responsibility Program/TJSL (Non-PUMK)

Uraian Description	Juta Rupiah Million Rupiah
Penggunaan Dana Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Budget Utilization based on the Sustainable Development Goals (SDGs)	
- Pilar Sosial - Social Pillar	114
- Pilar Ekonomi - Economy Pillar	63
- Pilar Lingkungan - Environment Pillar	223
- Pilar Hukum dan Tata Kelola - Law and Governance Pillar	0
Total Penggunaan Dana Total Budget Use	400

- b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
Approved the granting of full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for management and supervision actions that have been carried out during the 2022 Financial Year, as long as these actions do not constitute criminal acts and these actions are reflected in the report books Company.



Hasil Keputusan Meeting Decision	Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented

Keputusan Agenda 2 :

- a. Mengesahkan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) sesuai laporannya No. 00594/2.1030/AU.2/12/1698-1/0/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan opini menyajikan secara "Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tanggal 31 Desember 2022, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia". Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK).

Keputusan
Langsung
Berlaku**Agenda 2 Decisions:**

- a. Ratifying the Micro and Small Business (PUMK) Funding Program Report for the 2022 Financial Year ending on December 31, 2022, which is part of the Social and Environmental Responsibility Report, which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan (RSM) according to its report No. 00594/2.1030/AU.2/12/16981/0/V/2023 dated May 19, 2023, with an opinion presenting in a "fair manner in all material respects, the financial position of the Social Responsibility unit and Environment as of December 31, 2022, as well as Financial Performance and Cash Flow for the Year Ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) in Indonesia." Micro and Small Business Funding Program (PUMK).

Decision
Effective
Immediately

Uraian Description	Juta Rupiah Million Rupiah
Dana Tersedia Available Fund	
Saldo Awal Dana PUMK PUMK Fund Initial Balance	1.528
Pengembalian pokok pinjaman Return of Principle Loan	1.326
Penerimaan lainnya Other Receivables	81
Total dana tersedia Total Fund Available	2.935
Penggunaan Dana Fund Used	
Penyaluran pinjaman PUMK Disbursement of PUMK Loan	0
Penyaluran pinjaman melalui Lembaga Penyalur Loan Disbursement by Institutions	0
Hibah kepada BUMN Khusus Grant to Special SOEs	2.665
Total Penggunaan Dana Total Fund Used	2.665
Sisa Dana yang Tersedia Remaining Available Fund	271

Hasil Keputusan Meeting Decision	Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented
a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan pada program pendanaan usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. Providing full repayment and release of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Directors for the actions of the management of the Company and the Board of Commissioners for the actions of the Company's supervision of the Micro and Small Business funding program which has been carried out in the 2022 Financial Year, as long as these actions are not criminal acts and has been reflected in the Company's report books.	
Keputusan Agenda 3 : Tidak ada penetapan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan karena Perusahaan mengalami Laba Minus/Rugi Bersih Tahun Buku 2022.	Keputusan Langsung Berlaku
Agenda Decision 3: There is no determination on the use of the Company's Consolidated Net Profit because the Company experienced Minus Profit/Net Loss for the 2022 Financial Year.	Decision Effective Immediately
Keputusan Agenda 4 : Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.	Keputusan Langsung Berlaku
Agenda Decision 4: Granting authority and power to the Most Series B Shareholders to determine the amount of tantiem/performance incentives/special incentives for performance in 2022, as well as determining salaries/honorariums, allowances and facilities for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the 2023 financial year, after consulting the Series A Dwiwarna Shareholders.	Decision Effective Immediately



Hasil Keputusan Meeting Decision	Sudah/ Belum Terlaksana Implemented/ Not Implemented
Keputusan Agenda 5 : - Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022; - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perusahaan; - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menunjuk KAP pengganti dalam hal KAP tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.	Keputusan Langsung Berlaku
Agenda 5 Decisions: - Approved to reappoint the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan (RSM) as the Public Accounting Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Report, Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and other reports for Fiscal Year 2022; - Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2022 Financial Year for the purposes and interests of the Company; - Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine fees for audit services and other requirements for the KAP, as well as appoint a replacement KAP if the KAP, for whatever reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements as well as Financial Reports and Implementation of the Micro and Business Funding Program Small Business (PUMK) and other reports for the 2022 Financial Year, including determining fees for audit services and other requirements for the replacement KAP.	Decision Effective Immediately
Keputusan Agenda 6 : Mengukuhkan dan menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: - PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; - PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan - PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, secara keseluruhan pada Perseroan. Peraturan Menteri dimaksud mulai berlaku sejak tanggal Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Tahun Buku 2022 ini.	Keputusan Langsung Berlaku
Agenda Decision 6: Confirming and establishing Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: - PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; - PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and - PER-3/MBU/03/2023 Concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, as a whole in the Company.	Decision Effective Immediately
The Ministerial Regulation in question will come into force as of the date of the GMS Minutes of Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Report of PT Pembangunan Wisata Indonesia for the 2022 Fiscal Year.	

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta anggaran dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Selain itu, tugas-tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan terkait.

Kualifikasi dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. SK-18/MBU/01/2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. SK-49/MBU/02/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;

Board of Commissioners

The Board of Commissioners is the Company's organ responsible to supervise and provide advice to the Board of Directors in carrying out the Company's management activities. The Board of Commissioners is a Company Organ tasked with carrying out general and/or specific supervision based on the articles of association and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners also supervises management policies, the course of management in general regarding the Company, and the Company's business carried out by the Board of Directors, and provides advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the RJPP, RKAP as well as the articles of association and GMS Resolutions, as well as applicable laws and regulations, for the interests of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company. In addition, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are regulated in the articles of association and related laws and regulations.

Qualification and Appointment of the Board of Commissioners

Regulated in:

- Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
- Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Indonesian Tourism Development Company (Persero) No. SK-18/MBU/01/2020 concerning Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Indonesian Tourism Development Company (Persero) Indonesia;
- Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. SK-49/MBU/02/2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;



- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. SK-319/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. SK-364/MBU/11/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
- Anggaran Dasar Perusahaan PT Pengembangan Pariwisata Bali (Indonesia Tourism Development) yang dimuat dalam Akta Nomor 52 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan DR. Evi Susanti Panjaitan, SH., MA, Notaris di Kuta, Kabupaten Badung, dengan perubahan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 02 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Desman, S.H., M.Hum., yang berkedudukan di Jakarta Utara.
- Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. SK-319/MBU/10/2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
- Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pembangunan Wisata Indonesia No. SK-364/MBU/11/2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
- Articles of Association of the Company PT Pengembangan Pariwisata Bali (Indonesia Tourism Development) contained in Deed Number 52 dated August 14, 2008, which was drawn up in the presence of DR. Evi Susanti Panjaitan, SH., MA, Notary in Kuta, Badung Regency, with the latest amendments in accordance with Deed Number 02 dated June 2, 2023 made before Notary Desman, S.H., M.Hum., domiciled in North Jakarta.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, yang ditetapkan oleh RUPS.
- Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
- Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal

Term of Office of the Board of Commissioners

- The term of office of members of the Board of Commissioners is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office, as determined by the GMS.
- A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his position by notifying the Company in writing of his intention with a copy to the Shareholders, other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of his resignation. If the resignation letter states that the effective date is less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, then it is considered that the effective date of resignation is not stated.
- If by the date requested by the relevant member of the Board of Commissioners or within 30 (thirty) days from the date the resignation request letter is received, if the effective date of resignation is not stated, there is no decision

efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

- Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - e. Termasuk namun tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
- Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
- Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
- Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal yang tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;

from the GMS, then the member of the Board of Commissioners will resign. automatically on the date requested above or with the expiration of 30 (thirty) days from the date the resignation request letter is received without requiring GMS approval.

- The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if:
 - a. Passed away;
 - b. His term of office ends;
 - c. Dismissed based on the GMS; and/or
 - d. No longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations.
 - e. Including but not limited to prohibited concurrent positions and resignation.
- For members of the Board of Commissioners who resign before or after their term of office ends, unless they resign due to death, the person concerned remains responsible for their actions for which the GMS has not accepted responsibility.
- A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his position by notifying the Company in writing of his intention with a copy to the Shareholders, other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of resignation stated that the effective date is less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is deemed not to mention the effective date of resignation.
- If by the date requested by the member of the Board of Commissioners concerned or within 30 (thirty) days from the date the resignation request is received in cases where the effective date of resignation is not stated, there is no decision from the GMS, then the member of the Board of Commissioners resign automatically on the date requested above or with the expiration of 30 (thirty) days from the date the resignation request letter is received without requiring GMS approval.
- The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if:
 - a. Passed away;
 - b. His term of office ends;



- c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Rangkap jabatan yang dilarang; dan/atau
- f. Pengunduran diri.
- Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

- c. Dismissed based on the GMS;
- d. No longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on these Articles of Association and other laws and regulations.
- e. Prohibited concurrent positions; and/or
- f. Resignation.
- For members of the Board of Commissioners who resign before or after their term of office ends, unless they resign due to death, the person concerned remains responsible for their actions for which the GMS has not accepted responsibility.

Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, susunan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengalami perubahan. Susunan Dewan Komisaris untuk periode jabatan 2020-2025 terdiri atas 4 (empat) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners in 2023

Throughout the year 2023, there were no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners. The composition of the Board of Commissioners for the term 2020-2025 consists of 4 (four) members with the following composition:

Susunan Dewan Komisaris Per 31 Desember 2023

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Work Period
Ricky Joseph Pesik	Komisaris Utama	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-364/MBU/11/2020 tanggal 13 November 2020	13 November 2020–RUPS Tahun 2025	Ke-1
	President Commissioner	Minister of SOEs Decree No. SK-364/MBU/11/2020 November 13, 2020	November 13, 2020–GMS Year 2025	1st
H. Irzani, M.Pd, M.Si	Komisaris	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-49/MBU/02/2020 tanggal 14 Februari 2020	14 Februari 2020–RUPS Tahun 2025	Ke-1
	Commissioner	Minister of SOEs Decree No. SK-49/MBU/02/2020 dated February 14, 2020	February 14, 2020–GMS Year 2025	1st
Ir. Zainal Mutaqin, MM	Komisaris	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-18/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020	9 Januari 2020–RUPS Tahun 2025	Ke-1
	Commissioner	Minister of SOEs Decree No. SK-18/MBU/01/2020 dated January 9, 2020	January 9, 2020–GMS Year 2025	1st
Ulin Ni'am Yusron	Komisaris Independen	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-319/MBU/10/2020 tanggal 28 Oktober 2020	28 Oktober 2020–RUPS Tahun 2025	Ke-1
	Independent Commissioner	Decree of the Minister of SOEs No. SK-319/MBU/10/2020 dated October 28, 2020	October 28, 2020–GMS Year 2025	1st

Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pedoman Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 05.1/KEP/DEKOM/VIII/2021 tentang Piagam Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Piagam ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan dinamika bisnis dan kebutuhan Perusahaan, serta perubahan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur berbagai hal sebagai berikut:

1. Pembentukan, Organisasi dan Masa Kerja;
2. Tugas dan Tanggung jawab dan Kewenangan Dewan Komisaris;
3. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi; dan
4. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Secara umum, Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan yang pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dilaporkan kepada RUPS. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan meliputi:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan Perusahaan oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (yang sekurang-kurangnya terdiri dari proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, serta proyeksi perubahan ekuitas, termasuk rencana transaksi materiil Perusahaan), dan rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

A brief profile of each member of the Board of Commissioners can be found in the Profile section of the Board of Commissioners, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Board of Commissioners Guidelines

The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities based on the Board of Commissioners Charter, which has been updated according to Board of Commissioners Decree No. 05.1/KEP/DEKOM/VIII/2021 regarding the Board of Commissioners Charter of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. This charter serves as a guide for effective, efficient, and responsible performance of duties and responsibilities. The guidelines are periodically evaluated to align with business dynamics, company needs, and changes in applicable regulations. The Board of Commissioners' working guidelines govern various aspects such as:

1. Formation, Organization, and Tenure;
2. Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Commissioners;
3. Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors; and
4. Evaluation of the Performance of the Board of Commissioners.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Commissioners

In general, the Board of Commissioners is tasked with overseeing and advising the Board of Directors as the managers of the Company, whose execution of duties, responsibilities, and authorities is reported to the General Meeting of Shareholders (RUPS). The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are based on applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association, including:

1. Supervising the management of the Company by the Board of Directors and approving the Company's development plans, Long-Term Corporate Plans (RJPP), Company Work Plans and Budgets (which consist of at least balance sheet projections and profit and loss projections, cash flow projections, and equity change projections, including plans for material transactions of the Company), and other plans related to the Company's business activities and the implementation of the Company's Articles of Association and decisions of the General Meeting of Shareholders as well as applicable laws and regulations;



2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
3. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS, dan ketentuan peraturan perundangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
4. Melakukan tindakan untuk kepentingan Perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS;
5. Menunjuk penilai (*assessor*) independen dalam proses *assessment* penerapan GCG di Perusahaan melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang bilamana diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya;
6. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
7. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu;
8. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
9. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, serta memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan;
2. Carrying out specific duties as assigned to them according to the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, and/or based on decisions of the General Meeting of Shareholders;
3. Carrying out duties, authorities, and responsibilities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, decisions of the General Meeting of Shareholders, and provisions of laws and regulations, and shall carry out the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness;
4. Taking actions for the interests of the Company and being accountable to the General Meeting of Shareholders;
5. Appointing an independent assessor in the process of assessing the implementation of GCG in the Company through a process according to the procurement of goods and services regulations which, if necessary, can request the assistance of the Board of Directors in the appointment process;
6. Providing opinions and advice relevant to the oversight duties of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders regarding any other matters deemed important for the management of the Company;
7. Each member of the Board of Commissioners shall act in good faith, prudence, and be responsible in carrying out oversight and advisory duties to the Board of Directors for the interests of the Company and in accordance with the purpose and objectives of the Company, and not intended for the interests of specific parties or groups;
8. Monitoring the Company's activities and promptly reporting to the General Meeting of Shareholders if the Company shows significant signs of decline, accompanied by recommendations for corrective actions to be taken;
9. Reviewing and examining the annual reports prepared by the Directors and signing the reports, and ensuring that the Company's Annual Report includes information on identities, main occupations, positions of the Board of Commissioners in other companies, including meetings held within a fiscal year (internal meetings or joint meetings with the Board of Directors), as well as remuneration, facilities, and/or other benefits received from the Company;

10. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan pada setiap waktu yang diperlukan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham tepat pada waktunya;
11. Memberikan persetujuan atas usulan Direksi tentang Kepala Satuan Pengawas Intern yang telah melalui mekanisme internal Perusahaan;
12. Memberikan persetujuan atas usulan Direksi tentang Sekretaris Perusahaan yang telah melalui mekanisme internal Perusahaan
13. Memantau efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal Perusahaan secara periodik;
14. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
15. Memantau efektivitas pelaksanaan tata kelola teknologi informasi Perusahaan secara periodik;
16. Melaksanakan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya, serta menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbai jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut;
17. Berkoordinasi dan melakukan evaluasi Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perusahaan, untuk kemudian diajukan sebagai usulan kepada RUPS;
18. Memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan komite audit serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perusahaan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
19. Menentukan sistem nominasi, evaluasi kinerja, remunerasi yang transparan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS serta melaksanakannya untuk internal Dewan Komisaris;
20. Menentukan dan menyampaikan kepada Direksi, sistem dan prosedur untuk mengisi jabatan senior manajemen satu tingkat di bawah Direksi
10. Providing feedback on the Directors' periodic reports (quarterly, annually) and whenever necessary regarding the Company's developments at any time required and reporting the results of their duties to the Shareholders in a timely manner;
11. Approving the Board of Directors' proposal for the appointment of the Head of the Internal Audit Unit who has gone through the Company's internal mechanisms;
12. Approving the Board of Directors' proposal for the Company Secretary who has gone through the Company's internal mechanisms;
13. Monitoring the effectiveness of the Company's internal control functions periodically;
14. Carrying out other supervisory tasks determined by the General Meeting of Shareholders;
15. Monitoring the effectiveness of the Company's information technology governance periodically;
16. Carrying out the process of appointing external auditor candidates in accordance with the procurement of goods and services regulations in the Company and legal provisions, and if necessary, can request the assistance of the Board of Directors in the appointment process, and conveying to the General Meeting of Shareholders regarding the reasons for the nomination and the proposed fees/remuneration for the external auditor;
17. Coordinating and evaluating Public Accountants who will audit the Company's books, to then be proposed to the General Meeting of Shareholders;
18. Ensuring that the external auditor, internal auditor, and audit committees as well as other committees if any, have access to accounting records, supporting data, and information about the Company, as necessary to carry out their duties;
19. Determining transparent nomination, performance evaluation, and remuneration systems for the Board of Commissioners and the Board of Directors for subsequent approval by the General Meeting of Shareholders and implementing them internally for the Board of Commissioners;
20. Determining and submitting to the Board of Directors, systems and procedures for filling senior management positions one level



sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Manajemen berdasarkan hasil kajian Dewan Komisaris;

21. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya secara berkesinambungan untuk menjalankan fungsi sebagai Dewan Komisaris secara profesional;
22. Melaksanakan tugas khusus sebagai tindak lanjut pengawasan;
23. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
24. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
25. Tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris atas kepailitan karena kesalahan dan kelalaian dalam pengawasan terhadap Direksi;
26. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang telah mengakibatkan kepailitan;
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kepailitan tersebut;
 - d. Kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Di samping itu, berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun wewenang Dewan Komisaris, antara lain:

1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk tindakan Direksi dalam hal:
 - a. Mengagunkan aset tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;

below the Directors in accordance with the mechanisms regulated in the Company's Corporate Governance Policy and Management Policy based on the results of the Board of Commissioners' review;

21. Enhancing competence and knowledge continuously to perform duties as a Commissioner professionally;
22. Carrying out special tasks as follow-up to supervision;
23. Each member of the Board of Commissioners cannot act individually, but based on decisions of the Board of Commissioners;
24. Each member of the Board of Commissioners is jointly responsible for losses to the Company if they are at fault or negligent in carrying out their duties;
25. Joint responsibility applies to each member of the Board of Commissioners for bankruptcy due to errors and negligence in overseeing the Directors;
26. Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for losses if they can prove that:
 - a. They have supervised in good faith and prudence for the Company's interests and in accordance with the purpose and objectives of the Company;
 - b. They do not have personal interests, either directly or indirectly, in management actions by the Directors that have led to bankruptcy;
 - c. They have provided advice to the Directors to prevent the occurrence or continuation of bankruptcy;
 - d. Bankruptcy is not due to their fault or negligence.

In addition, based on the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is authorized to approve certain legal actions by the Board of Directors. The authorities of the Board of Commissioners include:

1. The Board of Commissioners provides written approval to the Board of Directors for actions such as:
 - a. Pledging fixed assets for short-term credit withdrawals;

- b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer-BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer-BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate-BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
 - e. Melepaskan aset tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - f. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - g. Dalam anggaran dasar Perusahaan diatur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya secara lengkap permohonan atau penjelasan dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan sebagaimana permohonan Direksi tersebut di atas, namun dari ketentuan GCG pemberian persetujuan tersebut harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterima secara lengkap, dan keputusan Dewan Komisaris harus disampaikan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diputuskan.
 2. Melaksanakan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya, serta menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbil jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut;
 3. Melaksanakan proses penunjukan penilai (*assessor*) independen sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya;
- b. Entering into partnerships with other entities or parties, such as licensing agreements, management contracts, asset leasing, Joint Operations (JO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO), and other partnerships with specified values or durations determined by the General Meeting of Shareholders;
 - c. Accepting or providing medium/long-term loans, except for business transaction-related loans (receivables or payables), and loans provided to the Company's subsidiaries, with the condition that loans to the Company's subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
 - d. Writing off bad debts and obsolete inventory;
 - e. Disposing of movable fixed assets with a normal economic life span in the industry generally up to 5 (five) years;
 - f. Establishing the organizational structure up to 1 (one) level below the Board of Directors;
 - g. As per the Company's Articles of Association, within 30 (thirty) days of receiving a complete request or explanation from the Board of Directors, the Board of Commissioners must make a decision as requested by the Board of Directors. However, based on GCG provisions, approval must be provided no later than 14 (fourteen) calendar days after receiving the complete request, and the decision of the Board of Commissioners must be communicated to the Board of Directors no later than 7 (seven) days after being decided.
 2. Appointing an external auditor based on the Company's procurement regulations and legal provisions, and, if necessary, seeking assistance from the Board of Directors in the appointment process, and presenting to the General Meeting of Shareholders (RUPS) the reasons for the nomination and the proposed fee for the external auditor;
 3. Appointing an independent assessor according to the Company's procurement regulations, and, if necessary, seeking assistance from the Board of Directors in the appointment process;



4. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
5. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
6. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya;
7. Berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perusahaan;
8. Melalui rapat Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, dan selanjutnya pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut;
9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal;
4. Undertaking Company management actions under certain circumstances for a specified period, based on the Company's Articles of Association and the decisions of the General Meeting of Shareholders (RUPS);
5. Providing responses to regular reports from the Board of Directors and whenever necessary regarding the Company's progress, and reporting the results of their duties to shareholders as stipulated in the Company's Articles of Association;
6. Having the right, individually or collectively during working hours, to enter the Company's buildings, premises, or other places used or controlled by the Company, and to examine all records, documents, and other evidence, inventory, verify cash conditions (for verification purposes), and other securities, and the right to be informed of all actions taken by the Board of Directors. In such cases, the Board of Directors and each member of the Board of Directors must provide explanations regarding any inquiries made by the members of the Board of Commissioners or their assisting experts;
7. Having the right to request the assistance of experts in carrying out their duties for a limited period at the Company's expense;
8. Through a Board of Commissioners meeting, temporarily suspend one or more members of the Board of Directors from their positions if they act contrary to the Company's Articles of Association and applicable laws or neglect their duties or if there are urgent reasons for the Company. Subsequently, the temporary suspension must be communicated to the concerned party with reasons for such action;
9. In the event that a member of the Board of Directors is temporarily suspended by the Board of Commissioners, the Company must convene a General Meeting of Shareholders (RUPS) no later than 45 (forty-five) days after the date of temporary suspension. If the RUPS cannot make a decision or if the RUPS is not held after the specified period, the temporary suspension of the member of the Board of Directors becomes void;

10. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Intern oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan;
 11. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan;
 12. Menyelenggarakan RUPS, apabila Direksi dalam jangka waktu tertentu tidak menyelenggarakannya;
 13. Menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri;
 14. Menentukan sistem nominasi, evaluasi kinerja, remunerasi yang transparan bagi Dewan Komisaris dan Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS serta melaksanakannya untuk internal Dewan Komisaris;
 15. Menentukan sistem yang transparan untuk mengangkat, menentukan remunerasi, dan menilai kinerja para pejabat senior yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Dewan Komisaris;
 16. Menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Utusan;
 17. Menentukan bahwa mekanisme kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi, antara Komite dengan Tim/Internal Auditor dan dengan eksternal auditor harus mengikuti prosedur kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku yang secara umum tergambar dalam lampiran Pedoman Kerja (Charter).
10. Approving the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit Unit by the President Director based on the Company's internal mechanisms;
 11. Approving the appointment and dismissal of the Corporate Secretary by the President Director based on the Company's internal mechanisms;
 12. Organizing General Meetings of Shareholders if the Board of Directors fails to do so within a certain period;
 13. Holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders to decide whether the temporarily suspended member(s) of the Board of Directors will be permanently dismissed or reinstated, with the temporarily suspended member(s) given the opportunity to attend to defend themselves;
 14. Establishing a transparent system for nominating, evaluating performance, and remunerating the Board of Commissioners and the Board of Directors after considering the results of the Board of Commissioners' assessments and then submitting them for approval to the GMS and implementing them internally for the Board of Commissioners;
 15. Establishing a transparent system for appointing, determining remuneration, and evaluating the performance of senior officials who do not serve as Board of Directors members after considering the results of the Board of Commissioners' assessments;
 16. Appointing a member of the Board of Commissioners as the Commissioner Delegate;
 17. Determining that the working mechanism between the Board of Commissioners and the Board of Directors, between the Committees and the Internal Audit Team, and with the external auditor must follow the working procedures according to the applicable regulations, as generally outlined in the appendix of this (Charter).

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dalam anggaran dasar Perusahaan menyebutkan bahwa pembagian kerja masing-masing Dewan Komisaris diatur oleh para anggota Dewan Komisaris sendiri yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 11/KEP/DEKOM/IX/2023 tentang

Division of Duties and Authorities Between the Members of the Board of Commissioners

The Company's articles of association state that the division of work for each Board of Commissioners is regulated by the members of the Board of Commissioners themselves as determined in the Board of Commissioners Decree. Based on the Decree of the Board of Commissioners Number 11/



Pembagian Kerja Dewan Komisaris, pembagian kerja anggota-anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

KEP/DEKOM/IX/2023 concerning the Division of Work of the Board of Commissioners, the division of work of the members of the Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervision Duty
Ricky Joseph Pesik	Komisaris Utama President Commissioner	Mengoordinasi seluruh tugas dan fungsi para Anggota Dewan Komisaris dengan fokus pada <i>general tourism</i> dan sumber daya manusia serta membidangi segala aspek yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan nominasi dan remunerasi. Coordinating all duties and functions of the Members of the Board of Commissioners with a focus on general tourism and human resources as well as overseeing all aspects related to nomination and remuneration strategies and policies.
H. Irzani, M.Pd, M.Si	Komisaris Commissioner	Membidangi segala aspek yang berkaitan dengan sosial masyarakat dan pengembangan pariwisata. In charge of all aspects related to social society and tourism development.
Ir. Zainal Mutaqin, MM	Komisaris Commissioner	Membidangi segala aspek yang berkaitan dengan manajemen risiko dan GCG. In charge of all aspects related to finance.
Ulin Ni'am Yusron	Komisaris Independen Independent Commissioner	Membidangi segala aspek yang berkaitan dengan keuangan. In charge of all aspects related to risk management and GCG.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya di Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya guna menjamin independensi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau dengan pemegang saham atau hubungan lainnya dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sikap independensi Dewan Komisaris dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang memuat bahwa dalam pengambilan keputusan, tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk manfaat diri sendiri, keluarga, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*Conflict of Interest Rule*).

Independence of the Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners act independently and are free from intervention from any party. the Board of Commissioners is also required to report to the Company regarding their share ownership and or their families in the Company and other companies, including any changes to ensure the independence of all members of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners does not have management relationships, share ownership and/or relationships with other members of the Board of Commissioners and/or with shareholders or other relationships with the Company that could affect its ability to act independently. The independent attitude of the Board of Commissioners is stated in a statement letter made by all members of the Board of Commissioners which states that in making decisions, they do not have personal interests or aims to benefit themselves, their families, or benefit parties related to themselves, or affiliated parties, and does not have a position that contains a potential conflict of interest (*Conflict of Interest Rule*).

Program Pengenalan Perusahaan

Beragamnya latar belakang anggota Dewan Komisaris memungkinkan para anggota belum mengenal Perusahaan secara mendetail. Oleh karena itu, Perusahaan menjalankan program pengenalan Perusahaan dengan tujuan agar anggota Dewan Komisaris dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja ITDC. Program pengenalan ini meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya; dan
3. Audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

Program ini dapat dilakukan dalam bentuk presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan di mana program tersebut dilaksanakan. Tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan ini dipegang oleh Sekretaris Perusahaan.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Perusahaan senantiasa memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia mulai dari level teratas hingga bawah sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Informasi terkait kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2023

Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan,

Company Introduction Program

With the diverse backgrounds of members of the Board of Commissioners, it is possible that they do not know the Company in detail. Therefore, it is very important to carry out an introduction program regarding the Company with the aim that members of the Board of Commissioners can immediately contribute to the Company's performance. The Introduction Program includes:

1. The implementation of the GCG Principles;
2. Description of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, internal control and other strategic issues; and
3. Internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.

The Company Introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company where the program is implemented. The responsibility for conducting the introduction program rests with the Corporate Secretary.

Board of Commissioners Competency Improvement

The Company always facilitates the implementation of human resource development programs from the top to the bottom as a form of the Company's commitment to creating superior and competitive human resources. Regarding the competency improvement activities participated in by the Board of Commissioners throughout 2023, see the Company Profile chapter in this Annual Report.

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2023

The Board of Commissioners is committed to continuously carrying out its duties and responsibilities in a professional and independent manner. Throughout 2023, the Board of Commissioners has fulfilled its duties and responsibilities in overseeing the company's operations, including the formulation of the



penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan penerapan *Good Corporate Governance* dengan memberikan beberapa tanggapan dan masukan terhadap usulan Direksi, antara lain:

company's strategic plans, the preparation and implementation of business plans, performance monitoring, as well as the application of risk management and Good Corporate Governance. The Board has provided several responses and inputs on the proposals of the Board of Directors, including:

No	Nomor Surat/Tanggal Letter No./Date	Perihal Concern
1	S-01/DEKOM.ITDC/I/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasi Rapat BOD-BOC Bulan Desember 2022 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2022 December BOD-BOC Meeting
2	S-03/DEKOM.ITDC/II/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasi Rapat BOD-BOC Bulan Januari 2023 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2023 January BOD-BOC Meeting
3	S-04.1/DEKOM.ITDC/II/2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Tambahan PMN TA 2023 terkait Penyelesaian Restrukturisasi Perusahaan The Board of Commissioners' response to the 2023 FY 2023 Additional PMN Request regarding Saving Corporate Restructuring
4	S-05/DEKOM.ITDC/II/2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pejabat Vice President Corporate Secretary PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development (ITDC) Response of the Board of Commissioners to the Proposal of the Vice President Corporate Secretary of PT Indonesian Tourism Development (Persero)/ITDC
5	S-07/DEKOM.ITDC/III/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasi Rapat BOD-BOC Bulan Februari 2023 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2023 February BOD-BOC Meeting
6	S-08/DEKOM.ITDC/III/2023	Saran/Rekomendasi atas Evaluasi Pengendalian Intern ITDC Periode 2021-TW III 2022 Suggestions/Recommendations for the Evaluation of ITDC Internal Control for the 2021TW III 2022 Period
7	S-09/DEKOM.ITDC/III/2023	Saran/Rekomendasi atas visi, misi, dan rencana jangka panjang ITDC Suggestions/Recommendations on ITDC's vision, mission and long-term plans
8	S-10/DEKOM.ITDC/III/2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Izin Rencana Tambahan Fasilitas terkait Pembiayaan Promotor Fee/Hosting Fee Event World Superbike (WSBK) Tahun 2023 di KEK Mandalika Response from the Board of Commissioners to the Request for Permit for Additional Facility Plans related to Financing the Promotor Fee/Hosting Fee for the 2023 World Superbike (WSBK) Event in the Mandalika SEZ
9	S-13/DEKOM.ITDC/IV/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasi Rapat BOD-BOC Bulan Maret 2023 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2023 March BOD-BOC Meeting
10	S-15/DEKOM.ITDC/IV/2023	Tanggapan atas Permohonan Ijin Cuti Direktur Utama ITDC Response to Request for Leave for ITDC President Director
11	S-16/DEKOM.ITDC/IV/2023	Tanggapan atas Permohonan Izin Cuti Direktur Pengembangan Bisnis Response to Request for Leave for Business Development Director
12	S-17/DEKOM.ITDC/IV/2023	Laporan Realisasi Kinerja Dekom Periode Triwulan I Tahun 2023 (untuk Lap Manajemen) Dekom Performance Realization Report for the First Quarter of 2023 (for Management Report)
13	S-19/DEKOM.ITDC/V/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasil Rapat BOD-BOC Bulan April 2023 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2023 April BOD-BOC Meeting
14	S-20/DEKOM.ITDC/V/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasil Rapat BOD-BOC Bulan Mei 2023 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2023 May BOD-BOC Meeting

No	Nomor Surat/Tanggal Letter No./Date	Perihal Concern
15	S-21/DEKOM.ITDC/VI/2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Penyampaian Skor Evaluasi Mandiri Good Corporate Governance PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC Tahun 2022 The Board of Commissioners' Response to the Submission of Good Corporate Governance Independent Evaluation Scores of PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero)/ITDC for 2022
16	S-22/DEKOM.ITDC/VI/2023	Saran/Rekomendasi atas PMN Tahun 2023 Suggestion/Recommendation for PMN in 2023
17	S-23/DEKOM.ITDC/VI/2023	Tanggapan Dekom atas Capaian Kinerja Audited Tahun Buku 2022 Board of Commissioners' Response to Audited Performance Achievements for Fiscal Year 2022
18	S-25/DEKOM.ITDC/VI/2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Terkait Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Response of the Board of Commissioners to the Request for Approval of the Board of Commissioners Regarding the Export Working Capital Credit Facility (KMKE) for Special Export Assignments (PKE)
19	S-26/DEKOM.ITDC/VI/2023	Surat Persetujuan Dewan Komisaris Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Letter of Approval from the Board of Commissioners for Export Working Capital Credit Facility (KMKE) Special Export Assignment (PKE)
20	S-27/DEKOM.ITDC/VII/2023	Tanggapan Dekom terkait penyesuaian RAB awal Tranche E dan Perpanjangan Jangka Waktu Penarikan (Availability Period) atas fasilitas kredit investasi ekspor (KIE) tahun 2020 BOC's response regarding the adjustment of the initial RAB for Tranche E and the extension of the Availability Period for the 2020 export investment credit facility (KIE).
21	S-27.1/DEKOM.ITDC/VII/2023	Surat persetujuan dekom ttd bersama Tanggapan Dekom terkait penyesuaian RAB awal Tranche E dan Perpanjangan Jangka Waktu Penarikan (Availability Period) atas fasilitas kredit investasi ekspor (KIE) tahun 2020 BOC's response regarding the adjustment of the initial RAB for Tranche E and the extension of the Availability Period for the 2020 export investment credit facility (KIE).
22	S-28/DEKOM.ITDC/VII/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasi Rapat BOD-BOC Bulan Juni 2023 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2023 June BOD-BOC Meeting
23	S-31/DEKOM.ITDC/VII/2023	Laporan Realisasi Kinerja Dekom Periode Semester I Tahun 2023 Report on the Realization of the Performance of the Board of Commissioners for the First Semester Period of 2023
24	S-32/DEKOM.ITDC/VII/2023	Saran/Rekomendasi atas Atas Laporan Kegiatan IA Tahun 2022 Suggestions/Recommendations on the 2022 IA Activity Report
25	S-33/DEKOM.ITDC/VII/2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Permohonan Persetujuan Tanggapan atas Nilai Tambahan dan Obyek Baru pada PMN Tahun Anggaran 2023. Response of the Board of Commissioners to the Request for Approval Response to Additional Value and New Objects in PMN for Fiscal Year 2023.
26	S-34/DEKOM.ITDC/VII/2023	Saran/Rekomendasi Dewan Komisaris atas Temuan Audit terkait Pengelolaan Aset Tetap Suggestions/Recommendations from the Board of Commissioners regarding Audit Findings related to Fixed Asset Management
27	S-35/DEKOM.ITDC/VII/2023	Saran/Rekomendasi Dewan Komisaris atas Temuan Audit terkait Strategi Mempertahankan Keberlangsungan Usaha Perusahaan dan Entitas Anaknya Suggestions/Recommendations from the Board of Commissioners regarding Audit Findings related to the Strategy for Maintaining Business Sustainability of the Company and its Subsidiaries



No	Nomor Surat/Tanggal Letter No./Date	Perihal Concern
28	S-36/DEKOM.ITDC/VII/2023	Saran/Rekomendasi Dewan Komisaris atas Temuan Audit Terkait Upaya Tindak Lanjut Terhadap Tenant yang Belum Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan Suggestions/Recommendations from the Board of Commissioners regarding Audit Findings Regarding Follow-up Efforts for Tenants Who Have Not Submitted Audited Financial Reports
29	S-37/DEKOM.ITDC/VII/2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Pemberitahuan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Vice President Corporate Secretary The Board of Commissioners' response to the Notification of the Temporary Replacement Officer (PGS) of the Vice President Corporate Secretary
30	S-39/DEKOM.ITDC/VII/2023	Tanggapan atas Permohonan Izin Cuti Direktur Pengembangan Bisnis Response to Request for Leave for Business Development Director
31	S-39.1/DEKOM.ITDC/VII/2023	Saran/Rekomendasi atas Laporan Realisasi Kegiatan Internal audit (IA) Triwulan II Tahun 2023 Suggestions/Recommendations on the Report on the Realization of Internal Audit (IA) Activities for the Second Quarter of 2023
32	S-42.1/DEKOM.ITDC/VII/2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Penyampaian Usulan Revisi RKAP Tahun 2023 The Board of Commissioners' Response to the Submission of the 2023 RKAP Revision Proposal
33	S-43/DEKOM.ITDC/VII/2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Response of the Board of Commissioners to the Request for Approval of Changes to the Organizational Structure of PT Pembangunan Wisata Indonesia
34	S-44/DEKOM.ITDC/VIII/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasil Rapat BOD-BOC Bulan Juli 2023 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2023 July BOD-BOC Meeting
35	S-46/DEKOM.ITDC/VIII/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasil Rapat BOD-BOC Bulan Agustus 2023 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2023 March BOD-BOC Meeting
36	S-48/DEKOM.ITDC/VIII/2023	Saran/Rekomendasi atas Kaji Ulang Kinerja Internal Audit Suggestions/Recommendations for Internal Audit Performance Review
37	S-49/DEKOM.ITDC/VIII/2023	Permintaan Laporan Direksi terkait dengan Sumber Daya Manusia PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Request for Directors' Report related to Human Resources of PT Indonesian Tourism Development
38	S-50/DEKOM.ITDC/IX/2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Penambahan Skema Kerjasama dengan Mitra Response of the Board of Commissioners to the Request for Approval of Additional Collaboration Schemes with Partners
39	S-51/DEKOM.ITDC/IX/2023	Tanggapan atas Permohonan Izin Cuti Direktur Pengembangan Bisnis Response to Request for Leave for Business Development Director
40	S-53/DEKOM.ITDC/IX/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasil Rapat BOD-BOC Bulan September 2023 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2023 September BOD-BOC Meeting
41	S-55/DEKOM.ITDC/IX/2023	Laporan Realisasi Kinerja Dekom Periode Triwulan III tahun 2023 Board of Commissioner's Performance Realization Report for the Third Quarter Period of 2023
42	S-61/DEKOM.ITDC/X/2023	Tanggapan Dewan Komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atas Permohonan Review dan Persetujuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Jumlah dan Nilai Tertentu Penunjukan Langsung Response of the Board of Commissioners of PT Pembangunan Wisata Indonesia to the Request for Review and Approval of Guidelines for Procurement of Goods and Services (PBJ) as well as the Specific Amount and Value of Direct Appointments
43	S-62/DEKOM.ITDC/X/2023	Tanggapan atas Penyampaian Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2023 Response to the Submission of the Management Report for the Third Quarter of 2023

No	Nomor Surat/Tanggal Letter No./Date	Perihal Concern
44	S-64/DEKOM.ITDC/X/2023	Tanggapan atas Permohonan Izin Cuti Direktur Keuangan Response to the Finance Director's Leave Request
45	S-67/DEKOM.ITDC/XI/2023	Saran/Rekomendasi Dewan Komisaris terkait Kebijakan Sistem Teknologi Informasi ITDC Suggestions/Recommendations from the Board of Commissioners regarding ITDC Information Technology System Policy
46	S-68/DEKOM.ITDC/X/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi BOD-BOC Bulan Oktober 2023 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2023 October BOD-BOC Meeting
47	S-69/DEKOM.ITDC/X/2023	Tanggapan atas Permohonan Izin Cuti Direktur Utama Response to the President Director's Leave Permit Request
48	S-71/DEKOM.ITDC/XII/2023	Highlight Saran/Rekomendasi Hasil Rapat BOD-BOC Bulan November 2023 Highlights of Suggestions/Recommendations from the Results of the 2023 November BOD-BOC Meeting
49	S-72/DEKOM.ITDC/XII/2023	Tanggapan atas Permohonan Izin Cuti Direktur SDM dan Legal Compliance Response to the Request for Leave Permission for the Director of HR and Legal Compliance
50	S-73/DEKOM.ITDC/XII/2023	Saran/Rekomendasi Dewan Komisaris terkait Kebijakan Sistem Teknologi Informasi ITDC Suggestions/Recommendations from the Board of Commissioners regarding ITDC Information Technology System Policy
51	S-74/DEKOM.ITDC/XII/2023	Saran/Rekomendasi Dekom terkait Tanggapan Pemegang Saham atas Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tambahan PMN TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 ITDC Board of Commissioners' suggestions/recommendations regarding Shareholders' Responses to the Submission of Reports on the Realization of Use of Additional PMN Funds for FY 2021 to Quarter III 2023 ITDC
52	S-75/DEKOM.ITDC/XII/2023	Saran/Rekomendasi Dekom terkait Tanggapan Pemegang Saham atas Penyampaian Laporan Manajemen s.d. Triwulan III 2023 Board of Commissioners' Suggestions/Recommendations regarding Shareholders' Responses to the Submission of Management Reports until Quarter III 2023
53	S-76/DEKOM.ITDC/XII/2023	Tanggapan atas Permohonan Izin Cuti Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko Response to Request for Leave for the Director of Finance, Strategy and Risk Management

Penilaian Kinerja Organ dan Komite Pendukung di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya dengan dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris selaku organ pendukung Dewan Komisaris. Dewan Komisaris membentuk Komite Pendukung di bawah Dewan Komisaris, antara lain Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko untuk membantu melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan.

Performance Assessment of Supporting Organs and Committees Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners carries out its duties with the assistance of the Secretary to the Board of Commissioners, who acts as a supporting organ. The Board of Commissioners has established supporting committees under the Board, including the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Committee, to help in executing the company's oversight duties.



Dasar Penilaian atas Kinerja Komite

Penilaian kinerja organ pendukung dan Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan kriteria berupa pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Sekretaris Dewan Komisaris dan komite di bawah Dewan Komisaris. Uraian lebih lanjut mengenai penilaian kinerja organ pendukung dan Komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dalam bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan Pemegang Saham minoritas.

Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Per 31 Desember 2023, Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang di mana 1 (satu) orang adalah Komisaris Utama dan 3 (tiga) lainnya adalah Anggota Komisaris. ITDC memiliki Komisaris Independen yaitu Ulin Ni'am Yusron sesuai dengan SK-319/MBU/10/2020 tanggal 28 Oktober 2020.

Direksi

Direksi merupakan organ utama dalam struktur GCG yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar serta berbagai peraturan yang berlaku. Direksi

Basis for Evaluation of Committee Performance

The performance evaluation of supporting organs and committees under the Board of Commissioners is conducted by considering criteria such as the achievement of targets set in the Annual Work Plan of the Secretary to the Board of Commissioners and the committees under the Board. Further details regarding the performance evaluation of supporting organs and committees under the Board of Commissioners can be found in the sections on the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit and Risk Committee, and the Nomination and Remuneration Committee in the Corporate Governance chapter of this Annual Report

Independent Commissioner

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who does not have financial, managerial, shareholding, and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders or with the company itself that may hinder or obstruct their position from acting independently in accordance with GCG (Good Corporate Governance) principles. The Independent Commissioner is responsible for overseeing and representing the interests of minority shareholders.

The appointment of the Independent Commissioner is regulated by the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. As of December 31, 2023, the Board of Commissioners consists of 4 (four) members: 1 (one) President Commissioner and 3 (three) other Commissioners. ITDC has an Independent Commissioner, Ulin Ni'am Yusron, appointed in accordance with SK-319/MBU/10/2020 dated October 28, 2020.

Board of Directors

The Board of Directors is the main organ within the GCG structure, bearing full responsibility for managing the Company in accordance with the Articles of Association and various applicable

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara kolektif dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta memastikan kelangsungan operasional Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS sebagai perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kualifikasi dan Pengangkatan Direksi

Kriteria dan pengangkatan Direksi Perusahaan merujuk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah pertama berdasar Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-06/MBU/2012, dan perubahan kedua berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-16/MBU/2012.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, kualifikasi anggota Direksi antara lain:

1. Anggota Direksi dipilih dan diangkat oleh RUPS;
2. Dapat berasal dari eksternal maupun jajaran manajemen Perusahaan yang dianggap memenuhi syarat; dan
3. Telah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Pemegang Saham

Daftar nominasi diajukan oleh Dewan Komisaris, selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk dimintai persetujuan. Anggota Direksi Perusahaan diangkat secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian, integritas, kepemimpinan, rekam jejak, pengalaman, serta perilaku dan dedikasi terhadap negara dan Perusahaan.

Masa Jabatan Direksi

1. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu terhitung 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

regulations. The Board of Directors performs its duties and responsibilities collectively with the aim of creating added value for stakeholders and ensuring the continuity of the Company's operations. In carrying out its duties, the Board of Directors is accountable to the General Meeting of Shareholders (GMS) as a manifestation of the accountability for overseeing the management of the Company in accordance with GCG principles.

Qualification and Appointment of Directors

The criteria and appointment of the Company's Board of Directors refer to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2012 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises as first amended based on Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-06/MBU/2012, and the second amendment based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-16/MBU/2012.

Based on these regulations, the qualifications for the Board of Directors are:

1. Members of the Board of Directors are elected and appointed by the GMS
2. May come from external parties or the management of the Company who are deemed to meet the requirements; and
3. Has passed the fit and proper test conducted by the Shareholders.

The nomination list is submitted by the Board of Commissioners and then presented to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval. Members of the Company's Board of Directors are appointed professionally, taking into consideration their competence, expertise, integrity, leadership, track record, experience, as well as their behavior and dedication to the country and the Company.

Board of Directors Term of Office

1. The term of office of members of the Board of Directors is for a period of 5 (five) years starting from the date determined by the GMS that appointed them, however this does not reduce the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Directors at any time before their term of office ends in accordance with provisions of the Company's Articles of Association;



2. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 3. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia dalam masa jabatannya;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 4. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya tersebut dalam RUPS berikutnya;
 5. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir apabila anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap; atau
 - h. mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
 6. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada nomor e.1 sampai dengan nomor e.4 dapat dilakukan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
2. After the term of office ends, the member of the Board of Directors may be reappointed by the GMS for 1 (one) term of office;
 3. The term of office of a member of the Board of Directors ends if:
 - a. The term of office ends;
 - b. Resign in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;
 - c. No longer meets applicable statutory requirements;
 - d. Passed away during his term of office;
 - e. Dismissed based on GMS decision.
 4. A member of the Board of Directors has the right to resign from his position by notifying the Company in writing of his intention with a copy to the Board of Commissioners and other members of the Company's Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of his resignation and to the member of the Board of Directors who resigns can be asked to be held accountable from the appointment of the person concerned until the date of his/her resignation at the next GMS;
 5. Members of the Board of Directors can be dismissed at any time by the GMS before their term of office ends if the member concerned includes:
 - a. unable to fulfill its obligations agreed in the management contract;
 - b. unable to carry out their duties properly;
 - c. does not implement the provisions of laws and/or provisions
 - d. Company Articles of Association;
 - e. involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
 - f. declared guilty by a court decision that has legal force
 - g. still; or
 - h. resign in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
 6. Dismissal of members of the Board of Directors as referred to in numbers e.1 to number e.4 can be carried out after the relevant members of the Board of Directors are given the opportunity to attend the GMS to defend themselves. Such dismissal takes effect from the closing of the GMS which decides on the dismissal, unless otherwise determined by the GMS.

Komposisi Direksi Tahun 2023

Di tahun 2023, komposisi Direksi Perusahaan tidak mengalami perubahan. Adapun komposisi Direksi Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

Susunan Direksi Per 31 Desember 2023

Composition of the Board of Directors as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Work Period
Ari Respati	Direktur Utama President Director	SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-169/MBU/08/2022 Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-169/MBU/08/2022	8 Agustus 2022-RUPS Tahun 2027 August 8, 2022-GMS Year 2027	Ke-1 1st
Ahmad Fajar	Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko Finance, Strategy and Risk Management Director	SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-169/MBU/08/2022 Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-169/MBU/08/2022	8 Agustus 2022-RUPS Tahun 2027 August 8, 2022-GMS Year 2027	Ke-1 1st
Wenda Ramadya Nabel	Direktur SDM dan Legal Compliance Human Resource and Legal Compliance Director	SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-169/MBU/08/2022 Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-169/MBU/08/2022	8 Agustus 2022-RUPS Tahun 2027 August 8, 2022-GMS Year 2027	Ke-1 1st
Ema Widiastuti	Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director	SK Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-363/MBU/11/2020 Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-363/MBU/11/2020	13 November 2020-RUPS Tahun 2025 November 13, 2020-GMS Year 2027	Ke-1 1st
Troy Reza Warokka	Direktur Operasi Operations Director	SK Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-169/MBU/08/2022 Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-169/MBU/08/2022	8 Agustus 2022-RUPS Tahun 2027 August 8, 2022-GMS Year 2027	Ke-1 1st

Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pedoman Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa mengacu pada Pedoman Kerja Direksi (*Board of Directors Charter*) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No: 002.3/SK/ITDC.01/I/2024 tentang Pedoman Kerja (Charter) Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Pedoman tersebut berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Composition of the Board of Directors in 2023

In 2023, the composition of the Company's Board of Directors did not undergo any changes. The composition of the Company's Board of Directors can be seen as follows:

A brief profile of each member of the Board of Directors can be seen in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Board of Directors Work Guidelines

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors always refers to the Board of Directors Charter, established through the Board of Directors Decree No: 002.3/SK/ITDC.01/I/2024 on the Charter of the Board of Directors of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. This guideline serves as a reference for performing tasks and responsibilities effectively, efficiently, and responsibly.



ITDC senantiasa melakukan evaluasi pedoman tersebut secara berkala yang disesuaikan dengan dinamika bisnis dan kebutuhan Perusahaan, serta perubahan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Adapun pedoman kerja Dewan Direksi mengatur berbagai hal sebagai berikut:

1. Pembentukan, Organisasi dan Masa Kerja;
2. Tugas dan Tanggung jawab dan Kewenangan Direksi;
3. Hubungan Direksi dengan Direksi.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab

Secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan;
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan serta menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan;
3. Melaksanakan prinsip pengelolaan GCG di mana salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan;
4. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan perubahannya serta menyampaikan dan menjelaskan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
5. Membantu Dewan Komisaris apabila diperlukan dalam proses penunjukan penilai (assessor) independen dalam proses *assessment* penerapan GCG di Perusahaan dan apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung;
6. Menyelenggarakan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan;

ITDC regularly evaluates these guidelines to align with the business dynamics and needs of the Company, as well as changes in applicable laws and regulations. The Board of Directors' working guidelines cover the following areas:

1. Formation, Organization, and Term of Office;
2. Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors;
3. Relationship among Directors.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors

Duties and Responsibilities

In general, the duties and responsibilities of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and statutory regulations are:

1. Leading, managing and controlling the Company in accordance with the Company's objectives and always trying to improve the Company's efficiency and effectiveness;
2. Control, maintain and manage the Company's assets and determine company management policies;
3. Implementing GCG management principles where one member of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors Meeting as the person responsible for implementing and monitoring GCG in the Company;
4. Prepare on time the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget and any amendments as well as submit and explain to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain approval from the GMS;
5. Assist the Board of Commissioners if necessary in the process of appointing an independent assessor in the process of assessing the implementation of GCG in the Company and if deemed more effective and efficient, the assessment can be carried out using the services of a Government Agency that is competent in the field of GCG, whose appointment is carried out by the Board of Directors through direct appointment;
6. Organizing an effective internal control system to safeguard the Company's investments and assets;

7. Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima Perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Perseroan yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan;
 9. Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib:
 - a. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi,
 - b. Membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan,
 - c. Memelihara seluruh Daftar, Risalah, dan Dokumen Keuangan Perusahaan dan dokumen lainnya,
 - d. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen lainnya;
 10. Mengelola Perusahaan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham/pemilik modal;
 11. Mempertimbangkan risiko-risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan;
 12. Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. Pelaksanaan program manajemen risiko dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi;
 13. Menangani risiko-risiko tersebut dengan menggunakan strategi pengendalian dan pengelolaan risiko perusahaan yang meliputi:
 - a. Identifikasi dan Penetapan Risiko (*Identify and Define*)
 - b. Penilaian dan Pengukuran Risiko (*Assess and Measure*)
7. Carry out its duties in good faith for the interests of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company, and ensure that the Company carries out its social responsibilities and pays attention to the interests of various Stakeholders in accordance with the provisions of statutory regulations;
 8. Convey information regarding the identity, main jobs, position of the Board of Commissioners in subsidiaries/joint companies and/or other companies, including meetings held in one financial year (internal meetings or joint meetings with the Board of Commissioners), as well as salaries, facilities and/or other benefits received by the Company concerned and its subsidiaries/joint companies concerned, to be included in the Company's Annual Report;
 9. To fulfill the requirements for accountability, openness and orderly administration, the Board of Directors must:
 - a. Make a Shareholder List, Special List, Minutes of GMS and Minutes of Directors' Meetings,
 - b. Making Annual Reports and Company Financial Documents,
 - c. Maintain all Company Registers, Minutes and Financial Documents and other documents,
 - d. Store at the Company's domicile all registers, minutes, Company financial documents and other documents;
 10. Manage the Company and must be accountable for the implementation of its duties to shareholders/capital owners;
 11. Consider business risks in every decision/action made;
 12. Develop and implement an integrated corporate risk management program which is part of the implementation of the GCG program. Implementation of the risk management program is carried out by establishing a separate work unit under the Board of Directors;
 13. Handle these risks by using company risk control and management strategies which include:
 - a. Risk Identification and Determination (Identify and Define)
 - b. Risk Assessment and Measurement (Assess and Measure)



c. Pengelolaan dan Penanganan risiko (<i>Treatment and Manage</i>) d. Pemantauan dan Pelaporan Risiko (<i>Monitor and Report</i>) 14. Menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan; 15. Menyelenggarakan pengawasan intern, yakni dengan membentuk Satuan Pengawasan Intern dan Membuat Piagam Pengawasan Intern (<i>Charter Internal Audit</i>); 16. Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris; 17. Menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>) serta menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan; 18. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di Perusahaan serta secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern di Perusahaan kepada Dewan Komisaris; 19. Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif, menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di Perusahaan, serta secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi kepada Dewan Komisaris; 20. Apabila diperlukan atau diminta oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Direksi membantu Dewan Komisaris dalam proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perusahaan; 21. Bersama-sama dengan Dewan Komisaris memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite penunjang lainnya, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perusahaan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya; 22. Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan;	c. Risk management and handling (<i>Treatment and Manage</i>) d. Risk Monitoring and Reporting (<i>Monitor and Report</i>) 14. Submit risk management profile reports and their handling together with the Company's periodic reports; 15. Carrying out internal supervision, namely by establishing an Internal Audit Unit and creating an Internal Audit Charter; 16. The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners; 17. Carrying out the functions of the Corporate Secretary and maintaining and evaluating the quality of the Corporate Secretary's functions; 18. Maintain and evaluate the quality of the internal supervision function in the Company and periodically submit reports on the implementation of the internal supervision function in the Company to the Board of Commissioners; 19. Establish effective information technology governance, maintain and evaluate the quality of the information technology governance function in the Company, and periodically submit reports on the implementation of information technology governance to the Board of Commissioners; 20. If necessary or requested by the Board of Commissioners through the Audit Committee, the Board of Directors assists the Board of Commissioners in the process of appointing prospective external auditors in accordance with the Company's provisions for procurement of goods and services; 21. Together with the Board of Commissioners, ensure that external auditors, internal auditors and the Audit Committee, as well as other supporting committees, have access to accounting records, supporting data and information regarding the Company, as long as necessary to carry out their duties; 22. Ensure that the Company's assets and business locations and other facilities comply with statutory regulations relating to occupational health and safety and environmental preservation;

23. Mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
24. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang;
25. Direksi Sebagai Komite Talenta.
 - a. Komite adalah lembaga yang dibentuk oleh Direksi untuk membantu kelancaran tugas-tugas Direksi.
 - b. Organisasi, keanggotaan, tugas, wewenang, tanggung jawab dan mekanisme kerja komite diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri.
 - c. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite adalah sah dan mengikat perseroan, sebagaimana halnya keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa Rapat Direksi berhak untuk mengkaji ulang, mengubah keputusan baik sebagian maupun seluruhnya atau membatalkan keputusan Rapat Komite.
23. Hiring, determining salary levels, providing training, determining career paths, and determining other work requirements, without taking into account a person's ethnic background, religion, gender, age, physical disability, or other special circumstances
24. Provide a work environment that is free from all forms of pressure (harassment) that may arise as a result of differences in a person's character, personal circumstances and cultural background;
25. Board of Directors as Talent Committee.
 - a. Committees are institutions formed by the Board of Directors to assist the smooth running of the Board of Directors' duties.
 - b. The organization, membership, duties, authority, responsibilities and working mechanisms of the committee are regulated in a separate Board of Directors Decree.
 - c. Decisions taken at a Committee Meeting are valid and binding on the company, as are decisions taken at a Board of Directors Meeting provided that the Board of Directors Meeting has the right to review, change the decision in whole or in part or cancel the decision of the Committee Meeting.

Wewenang

1. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai bidang kepengurusannya, masing-masing anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Perseroan lainnya;
3. Untuk melakukan tindakan tertentu, Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;

Authority

1. The President Director has the right and authority to and on behalf of the Board of Directors to represent the Company both inside and outside the court regarding all matters and in all events, bind the Company with other parties and other parties with the Company, and carry out all actions, both regarding management as well as ownership, with restrictions stipulated in the Company's Articles of Association and taking into account the applicable laws and regulations in the Capital Market sector in Indonesia;
2. In order to carry out their duties, authority and responsibilities in accordance with their field of management, each member of the Board of Directors has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company both inside and outside the court while still observing the provisions of applicable laws and regulations, the Articles Company Basics and other Company provisions;
3. To take certain actions, the Board of Directors must first obtain written approval from the Board of Commissioners;



4. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal yang membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris adalah:
 - a. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Mengadakan perjanjian atau kerjasama lisensi, atau perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
 - c. Melepaskan, menghapuskan dan menyewakan aktiva tetap Perusahaan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perusahaan baik yang belum ada maupun yang telah ada penyertaan Perusahaan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;
 - e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perusahaan dalam Perusahaan atau badan lain;
 - f. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - g. Untuk tidak menagih lagi atau menghapusbukukan dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - h. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang jumlahnya kurang dari apa yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - i. Mengadakan perjanjian kontrak penjualan dengan badan usaha atau pihak lain yang nilainya atau yang mempunyai dampak keuangan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari total nilai aset (harta kekayaan) Perseroan.
4. Unless otherwise determined by applicable rules and regulations, several things that requiring approval from the Board of Commissioners are:
 - a. Receive medium/long term loans and provide medium/long term loans as well as short term non-operational loans that exceed a certain amount determined by the Board of Commissioners Meeting;
 - b. Enter into licensing agreements or cooperation, or similar agreements with business entities or other parties;
 - c. Releasing, writing off and leasing the Company's fixed assets with an economic life that is generally applicable in the industry in general is more than 5 (five) years which exceeds a certain amount determined by the Board of Commissioners Meeting;
 - d. Taking part, either in whole or in part, or taking part in a Company whether it does not yet exist or has already been included in a Company or other entity or organizing a new company;
 - e. Releasing part or all of the Company's participation in a Company or other entity;
 - f. Binding the Company as a guarantor (borg or avalist) which has financial consequences exceeding a certain amount determined by the Board of Commissioners Meeting;
 - g. Not to charge or write off another accounts receivable from the books and write off inventory of goods that exceeds a certain amount determined by the Board of Commissioners Meeting;
 - h. Transfer, relinquish rights or pledge the Company's assets in an amount less than what is stipulated in the Company's Articles of Association;
 - i. Conduct a sales contract agreement with a business entity or other party whose value or financial impact is more than 25% (twenty five percent) of the total value of the Company's assets.

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi

Direksi memiliki pembagian tugas berdasarkan nama jabatan sebagaimana ditetapkan dalam pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. Adapun pembagian tugas masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:

Division of Duties Among the Directors

The Board of Directors has a division of duties based on job titles as stipulated in the appointment of members of the Board of Directors by the RUPS. The division of duties among the Directors is as follows:

Jabatan Title	Tugas Duties
Direktur Utama	1. Memimpin, mengatur, dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan (visi) Perusahaan dengan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar Perseroan, Charter Direksi, dan Keputusan RUPS. 2. Menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 3. Memastikan Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan tercapai sesuai target Pemegang Saham. 4. Bertanggung jawab atas Penyusunan dan monitoring RKAP di Direktorat Utama. 5. Menetapkan strategi bisnis demi tercapainya tujuan Perusahaan. 6. Mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan/aktivitas perusahaan sesuai dengan RJPP dan RKAP. 7. Menetapkan budaya kerja Perusahaan. 8. Menyelaraskan seluruh inisiatif internal Perusahaan serta memastikan terjadinya peningkatan daya saing Perusahaan. 9. Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Manajemen Perusahaan. 10. Melakukan upaya guna memastikan pemulihan indikator kesehatan Perusahaan. 11. Bertanggung jawab atas Laporan Hasil Audit Tahunan Perusahaan. 12. Bertanggung jawab terhadap manajemen risiko Perusahaan. 13. Bertanggung jawab terhadap optimalisasi aset Perusahaan. 14. Menunjuk Anggota Direksi lain dan/atau Pejabat Perusahaan untuk bertindak atas nama Direksi sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa. 15. Sebagai perwakilan Perusahaan dalam hubungannya dengan Pihak Luar. 16. Mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. 17. Mendorong semua sistem serta proses kerja dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). 18. Mengevaluasi secara berkala seluruh kegiatan/aktivitas Perusahaan dan Direktorat Utama 19. Menetapkan pengembangan kompetensi bawahan untuk memastikan pencapaian kinerja individu dan pengembangan kompetensi bawahan.
President Director	1. Lead, manage, and control the Company in accordance with the Company's goals (vision) by continuously improving the efficiency and effectiveness of the Company as stipulated in the Articles of Association, Directors' Charter, and RUPS Resolutions. 2. Prepare the Company's Long-Term Work Plan (RJPP), and the Company's Work Plan and Budget (RKAP). 3. Ensure the Company's Key Performance Indicators (KPIs) are achieved according to the Shareholders' targets. 4. Responsible for the preparation and monitoring of the RKAP in the Main Directorate. 5. Establish business strategies to achieve the Company's goals. 6. Supervise and ensure all company activities align with the Company's Long-Term Work Plan and Company's Work Plan and Budget. 7. Establish the Company's work culture. 8. Align all internal Company initiatives and ensure an increase in the Company's competitiveness. 9. Authorize Directors' Decisions on Company Management Policies. 10. Take measures to ensure the recovery of the Company's health indicators. 11. Responsible for the Company's Annual Audit Report. 12. Responsible for the Company's risk management. 13. Responsible for the optimization of the Company's assets. 14. Appoint other Board Members and/or Company Officials to act on behalf of the Board of Directors as outlined in the Power of Attorney. 15. Act as the Company's representative in its relations with External Parties. 16. Represent the Company in and out of court according to the laws, Articles of Association, and/or RUPS Resolutions. 17. Encourage all systems and work processes to be carried out according to the applicable Standard Operating Procedure (SOP) and Good Corporate Governance (GCG) principles. 18. Periodically evaluate all activities of the Company and the Main Directorate. 19. Determine the competency development of subordinates to ensure individual performance achievement and subordinate competency development.



Jabatan Title	Tugas Duties
Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko	1. Mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan/aktivitas di bidang Keuangan, Pendanaan, Manajemen Risiko, dan Procurement yang ada di Kantor Pusat, SBU serta konsolidasi Anak/Cucu/Perusahaan Afiliasi sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. (AD/ART) Perseroan, <i>Charter</i> Direksi, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Bersama-sama dengan direktorat lain, menyiapkan penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 3. Memastikan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Perusahaan tercapai sesuai target Pemegang Saham. 4. Bertanggung jawab atas Penyusunan dan monitoring RKAP di Direktorat Finance, Strategy & Risk Management. 5. Memastikan penerapan manajemen risiko (identifikasi, evaluasi, mitigasi dan monitoring) secara berkesinambungan terhadap risiko-risiko yang mempunyai prioritas tinggi/risiko signifikan demi kelangsungan Perusahaan. 6. Merencanakan, mencari, dan memastikan ketersediaan dana untuk pengembangan Perusahaan sesuai dengan rencana strategis Perusahaan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan usaha Perusahaan. 7. Mengelola Portofolio Investasi keuangan (jika ada) untuk memperoleh nilai imbal hasil yang optimum. 8. Memastikan proses pelaksanaan di bidang Procurement agar terlaksana sesuai dengan peraturan maupun pedoman yang berlaku serta penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). 9. Merumuskan dan menetapkan profil risiko serta mitigasinya terhadap aktivitas/kegiatan di Direktorat Finance, Strategy & Risk Management. 10. Mendorong semua sistem serta proses kerja di Direktorat Finance, Strategy & Risk Management dilakukan sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang berlaku dan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). 11. Mengevaluasi secara berkala seluruh kegiatan/aktivitas di bidang Keuangan, Pendanaan, Manajemen Risiko, dan Procurement yang ada di Kantor Pusat, SBU serta konsolidasi Anak/Cucu/Perusahaan Afiliasi. 12. Mengarahkan Penyusunan Annual Report Perusahaan dan <i>me-review</i> Annual Report terkait Direktorat Finance, Strategy & Risk Management. 13. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit baik internal maupun eksternal. 14. Sebagai perwakilan Perusahaan dalam hubungannya dengan Pihak Luar. 15. Menetapkan pengembangan kompetensi bawahan untuk memastikan pencapaian kinerja individu dan pengembangan kompetensi bawahan.
Director of Finance, Strategy, and Risk Management	1. Supervise and ensure all activities in the fields of Finance, Funding, Management Risks and Procurement at the Head Office, SBU, and consolidation of Subsidiaries/Sub-subsidiaries/Companies. Affiliates as regulated in the Company's Articles of Association and Bylaws (AD/ART), Board of Directors Charter, and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS). 2. Together with other directorates, prepare a Long Term Work Plan Company (RJPP) and Company Work Plan and Budget (RKAP). 3. Ensure the Company's Key Performance Indicators (KPIs) are achieved according to Shareholders' targets. 4. Responsible for the preparation and monitoring of the RKAP in the Directorate of Finance, Strategy & Risk Management. 5. Ensure the continuous implementation of risk management (identification, evaluation, mitigation, and monitoring) for high-priority/significant risks to ensure the Company's continuity. 6. Plan, seek, and ensure the availability of funds for the Company's development in accordance with the Company's strategic plan, considering the Company's financial and business conditions. 7. Manage the financial investment portfolio (if any) to achieve optimal returns. 8. Ensure that procurement processes are carried out in accordance with applicable regulations and guidelines, and the principles of Good Corporate Governance (GCG). 9. Formulate and establish risk profiles and mitigation measures for activities in the Directorate of Finance, Strategy & Risk Management. 10. Encourage all systems and work processes in the Directorate of Finance, Strategy & Risk Management to be carried out in accordance with the applicable Standard Operating Procedure (SOP) and principles of Good Corporate Governance (GCG). 11. Periodically evaluate all activities in the areas of Finance, Funding, Risk Management, and Procurement at the Head Office, Strategic Business Units (SBUs), and consolidated Subsidiaries/Affiliated Companies. 12. Direct the preparation of the Company's Annual Report and review the Annual Report related to the Directorate of Finance, Strategy & Risk Management. 13. Supervise the follow-up of audit findings, both internal and external. 14. Act as the Company's representative in its relations with External Parties. 15. Determine the competency development of subordinates to ensure individual performance achievement and subordinate competency development.

Jabatan Title	Tugas Duties
Direktur SDM dan Legal Compliance	1. Mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan/aktivitas di bidang Human Capital & General Affair, Legal, dan Quality Assurance & Compliance sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar Perseroan, Charter Direksi, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 3. Memastikan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Perusahaan tercapai sesuai target Pemegang Saham. 4. Bertanggung jawab atas Penyusunan dan pengendalian RKAP di Direktorat Human Capital & Legal Compliance. 5. Menetapkan dan mengarahkan strategi pengelolaan di bidang Human Capital & General Affair agar sejalan dengan tujuan (visi) dan strategi Perusahaan. 6. Memastikan proses pelaksanaan di bidang Quality Assurance & Compliance agar terlaksana sesuai dengan peraturan maupun pedoman yang berlaku serta penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). 7. Mengarahkan kebijakan penyelesaian permasalahan hukum yang ada di Perusahaan baik pidana maupun perdata (termasuk permasalahan lahan) berdasarkan pertimbangan yang diputuskan bersama di BOD. 8. Bertanggung jawab atas optimalisasi dan management aset Perusahaan serta proses Land Acquisitions. 9. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan pengelolaan Technology di Perusahaan. 10. Merumuskan profil risiko serta mitigasinya terhadap aktivitas/kegiatan di Direktorat Human Human Capital & General Affair, Legal, Quality Assurance & Compliance. Mengevaluasi secara berkala seluruh kegiatan/aktivitas di bidang Human Capital & General Affair, Legal, Quality Assurance & Compliance. 11. Mendorong semua sistem serta proses kerja di Direktorat Human Capital & Legal Compliance dilakukan sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang berlaku dan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). 12. Mengevaluasi secara berkala seluruh kegiatan/aktivitas di bidang Human Capital & General Affair, Legal, Quality Assurance & Compliance, serta Technology. 13. Mengarahkan Penyusunan Annual Report Perusahaan dan <i>me-review</i> Annual Report terkait Direktorat Human Capital & Legal Compliance. 14. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit baik internal maupun eksternal. 15. Sebagai perwakilan Perusahaan dalam hubungannya dengan Pihak Luar. 16. Menetapkan pengembangan kompetensi bawahan untuk memastikan pencapaian kinerja individu dan pengembangan kompetensi bawahan.



Jabatan Title	Tugas Duties
Director of Human Resources and Legal Compliance	1. Supervise and ensure all activities in the fields of Human Capital & General Affairs, Legal, and Quality Assurance & Compliance as regulated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors' Charter, and the General Meeting of Shareholders Resolutions. 2. Prepare the Company's Long-Term Work Plan and the Company's Work Plan and Budget. 3. Ensure the Company's Key Performance Indicators (KPIs) are achieved according to Shareholders' targets. 4. Responsible for the preparation and control of the RKAP in the Directorate of Human Capital & Legal Compliance. 5. Establish and direct management strategies in the fields of Human Capital & General Affairs to align with the Company's goals (vision) and strategy. 6. Ensure that Quality Assurance & Compliance processes are carried out in accordance with applicable regulations and guidelines, and the principles of Good Corporate Governance (GCG). 7. Direct policies for resolving legal issues in the Company, both criminal and civil (including land issues), based on considerations decided jointly in the BOD. 8. Responsible for the optimization and management of the Company's assets and the process of Land Acquisitions. 9. Formulate risk profiles and mitigation measures for activities in the Directorate of Human Capital & Legal Compliance. 10. Encourage all systems and work processes in the Directorate of Human Capital & Legal Compliance to be carried out in accordance with the applicable Standard Operating Procedure (SOP) and principles of Good Corporate Governance (GCG). 11. Periodically evaluate all activities in the fields of Human Capital & General Affairs, Legal, Quality Assurance & Compliance. 12. Direct the preparation of the Company's Annual Report and review the Annual Report related to the Directorate of Human Capital & Legal Compliance. 13. Supervise the follow-up of audit findings, both internal and external. 14. Act as the Company's representative in its relations with External Parties. 15. Determine the competency development of subordinates to ensure individual performance achievement and subordinate competency development. 16. Responsible for the implementation and monitoring of good corporate governance.

Jabatan Title	Tugas Duties
Direktur Pengembangan Bisnis	1. Mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan/aktivitas di bidang Business Development dan Sales & Marketing sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar Perseroan, Charter Direksi, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 3. Memastikan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Perusahaan tercapai sesuai target Pemegang Saham. 4. Bertanggung jawab atas Penyusunan dan monitoring RKAP di Direktorat Business Development. 5. Mengarahkan dan memastikan kebijakan perencanaan dan pengembangan usaha Perusahaan melalui kerjasama pemanfaatan lahan sesuai dengan tujuan (visi) Perusahaan. 6. Mengarahkan dan mereviu pembuatan kajian rencana pemasaran lahan terkait investor Pitching. 7. Melakukan upaya untuk mendapatkan Investor untuk berinvestasi di Perusahaan. 8. Melakukan komunikasi kepada Investor agar memenuhi kewajiban dan melakukan tindak lanjut sesuai LUDA. 9. Memastikan proses Due Diligence terhadap Calon Investor dan Calon Mitra Kerjasama. 10. Mengawasi proses penyelesaian LUDA dengan investor. 11. Mengawasi dan memastikan pelaksanaan design review bersama dengan Design Committee. 12. Mengawasi kegiatan monitoring pasca LUDA di The Mandalika dan Destinasi lain yang ditunjuk 13. Mengawasi dan memastikan kegiatan perencanaan, pengembangan dan riset terkait destinasi wisata baru & eksisting. 14. Memastikan fungsi collecting untuk meningkatkan kolektibilitas piutang. 15. Menetapkan profil risiko serta mitigasinya terhadap kegiatan/aktivitas di Direktorat Business Development. 16. Mendorong semua sistem serta proses kerja dilakukan sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang berlaku dan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). 17. Mengevaluasi secara berkala seluruh kegiatan/aktivitas di bidang Business Development. 18. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit baik internal maupun eksternal. 19. Sebagai perwakilan Perusahaan dalam hubungannya dengan Pihak Luar. 20. Menetapkan pengembangan kompetensi bawahan untuk memastikan pencapaian kinerja individu dan pengembangan kompetensi bawahan.
Director of Business Development	1. Supervise and ensure all activities in the fields of Business Development and Sales & Marketing as regulated in the Company's Articles of Association, the Directors' Charter, and the General Meeting of Shareholders (RUPS) Resolutions. 2. Prepare the Company's Long-Term Work Plan and the Company's Work Plan and Budget. 3. Ensure the Company's Key Performance Indicators (KPIs) are achieved according to Shareholders' targets. 4. Responsible for the preparation and monitoring of the RKAP in the Business Development Directorate. 5. Direct and ensure the policies for planning and developing the Company's business through land utilization cooperation in accordance with the Company's goals (vision). 6. Direct and review the creation of land marketing plan studies related to investor pitching. 7. Take measures to attract investors to invest in the Company. 8. Communicate with investors to fulfill obligations and follow up in accordance with LUDA. 9. Ensure the due diligence process for potential investors and cooperation partners. 10. Supervise the LUDA resolution process with investors. 11. Supervise and ensure the implementation of design reviews together with the Design Committee. 12. Supervise post-LUDA monitoring activities in The Mandalika and other designated destinations. 13. Supervise and ensure planning, development, and research activities related to new and existing tourist destinations. 14. Ensure the collection function to improve receivables collectibility. 15. Determine the risk profile and its mitigation measures for activities in the Business Development Directorate. 16. Encourage all systems and work processes to be carried out in accordance with the applicable Standard Operating Procedure (SOP) and principles of Good Corporate Governance (GCG). 17. Periodically evaluate all activities in the field of Business Development. 18. Supervise the follow-up of audit findings, both internal and external. 19. Act as the Company's representative in its relations with External Parties. 20. Determine the competency development of subordinates to ensure individual performance achievement and subordinate competency development.



Jabatan Title	Tugas Duties
Direktur Operasi	1. Mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan/aktivitas di bidang Project Management Office (PMO), Marketing & Technology, dan Strategic Business Unit (SBU) The Nusa Dua dan The Mandalika serta operasional destinasi lainnya sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar Perseroan, Charter Direksi, dan Keputusan Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 3. Memastikan Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan tercapai sesuai target Pemegang Saham. 4. Bertanggung jawab atas Penyusunan dan monitoring RKAP di Direktorat Operasi. 5. Mengarahkan dan memastikan pelaksanaan event berskala internasional di kawasan yang dikelola oleh Perusahaan. 6. Menyusun dan memastikan fungsi strategi marketing untuk aktivasi Kawasan. 7. Menyetujui Project Charter & Project Management Plan. 8. Mengawasi fungsi dukungan teknis terkait pengembangan Kawasan baru, persiapan pembuatan Detail Engineering Design (DED) infrastruktur dasar kawasan/destinasi dan untuk melengkapi/upgrade design infrastruktur Kawasan yang telah beroperasi. 9. Mengarahkan dan menetapkan penyusunan pedoman, kebijakan dan monitoring sistem operasional kawasan & Health, Safety and Environment (HSE). 10. Memastikan seluruh aktivitas kerja dilakukan sesuai standar HSE/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 11. Melakukan kontrol terhadap Investasi Perusahaan, meliputi kontrol terhadap <i>budget</i>, <i>time delivery</i>, dan <i>product quality</i> termasuk melakukan upaya penyelesaian masalah tanah. 12. Menetapkan profil risiko serta mitigasinya terhadap aktivitas/kegiatan di Direktorat Operation. 13. Menentukan semua sistem serta proses kerja di Direktorat Operasi dilakukan sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang berlaku dan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). 14. Mengevaluasi secara berkala seluruh kegiatan/aktivitas di bidang Project Management Office (PMO), Marketing & Technology, dan Strategic Business Unit (SBU) The Nusa Dua dan The Mandalika, dan the Golo Mori. 15. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit baik internal maupun eksternal. 16. Sebagai perwakilan Perusahaan dalam hubungannya dengan Pihak Luar. 17. Menetapkan pengembangan kompetensi bawahan untuk memastikan pencapaian kinerja individu dan pengembangan kompetensi bawahan.
Director of Operations	1. Supervise and ensure all activities in the fields of Project Management Office (PMO), Marketing & Technology, and the Strategic Business Units (SBU) of The Nusa Dua and The Mandalika, as well as other destination operations as regulated in the Company's Articles of Association, the Directors' Charter, and the General Meeting of Shareholders (RUPS) Resolutions. 2. Prepare the Company's Long-Term Work Plan and the Company's Work Plan and Budget. 3. Ensure the Company's Key Performance Indicators (KPIs) are achieved according to Shareholders' targets. 4. Responsible for the preparation and monitoring of the RKAP in the Operations Directorate. 5. Direct and ensure the implementation of international-scale events in the areas managed by the Company. 6. Develop and ensure the marketing strategy function for area activation. 7. Approve the Project Charter & Project Management Plan. 8. Supervise technical support functions related to the development of new areas, the preparation of Detailed Engineering Design (DED) for basic infrastructure in areas/destinations, and to complete/upgrade infrastructure design for areas that are already operational. 9. Direct and establish the guidelines, policies, and monitoring systems for area operations & Health, Safety, and Environment (HSE). 10. Ensure all work activities are carried out according to HSE/Occupational Health and Safety (OHS) standards. 11. Control the Company's investments, including budget control, time delivery, and product quality, including efforts to resolve land issues. 12. Determine the risk profile and its mitigation measures for activities in the Operations Directorate. 13. Encourage all systems and work processes in the Operations Directorate to be carried out in accordance with the applicable Standard Operating Procedure (SOP) and principles of Good Corporate Governance (GCG). 14. Periodically evaluate all activities in the fields of Project Management Office (PMO), Marketing & Technology, and the Strategic Business Units (SBU) of The Nusa Dua and The Mandalika, dan the Golo Mori. 15. Supervise the follow-up of audit findings, both internal and external. 16. Act as the Company's representative in its relations with External Parties. 17. Determine the competency development of subordinates to ensure individual performance achievement and subordinate competency development.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Direksi memiliki tugas untuk melakukan penyusunan dan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sementara, RKAP adalah penjabaran dari RJPP Perusahaan dengan format yang merujuk pada ketentuan penyusunan RKAP dari Kementerian BUMN dan/atau berdasarkan Keputusan RUPS.

RKAP dan RJPP yang disusun oleh Direksi kemudian akan ditandatangani bersama-sama dengan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Direksi wajib menyusun RKAP untuk setiap tahun buku yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh RUPS Tahunan. Direksi juga wajib menyusun RJPP tepat pada waktunya dan menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS untuk disahkan.

Program Pengenalan Perusahaan

Setiap anggota Direksi baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai ITDC dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan. Program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh ITDC;
2. Gambaran mengenai ITDC berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, internal audit dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Unit/Unit Bisnis ITDC dan proyek serta pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengenal ITDC, Anak Perusahaan.

Preparation of the Company's Work Plan and Budget and the Company's Long-term Plan

The Board of Directors has the duty to prepare and propose the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP). The RJPP is a strategic plan that outlines the company's goals and objectives to be achieved over a period of 5 (five) years. Meanwhile, the RKAP is a detailed breakdown of the RJPP, formatted according to the guidelines for RKAP preparation from the Ministry of State-Owned Enterprises and/or based on the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

The RKAP and RJPP prepared by the Board of Directors will then be jointly signed with the Board of Commissioners to be submitted to the Shareholders through the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is required to prepare the RKAP for each fiscal year, which is subsequently approved and determined by the Annual GMS. The Board of Directors is also obliged to prepare the RJPP in a timely manner and present the draft RJPP to the GMS for approval.

Company Introduction Program

The first-time appointed member of the Board of Directors must be given an introduction program regarding ITDC and the responsibility for holding this introduction program lies with the Corporate Secretary or anyone who carries out the function of Corporate Secretary. The induction program includes:

1. Implementation of GCG principles by ITDC;
2. An overview of ITDC relating to the objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee.

Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors as well as things that are not permitted. The Company's introduction program can take the form of presentations, meetings, visits to ITDC Business Units and projects and document review or other programs deemed relevant to the need to understand the ITDC and subsidiaries.



Peningkatan Kompetensi Direksi

Perusahaan merancang program untuk memberikan wawasan baru bagi Direksi untuk meningkatkan kapasitas Perusahaan dalam lingkungan usaha yang kompetitif, serta memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Informasi terkait kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan melalui berbagai keputusan dalam bentuk Keputusan Direksi, Peraturan Direksi, Surat Edaran, dan Instruksi Direksi.

Uraian Description	Jumlah Total
Keputusan Direksi Decisions of the Board of Directors	42
<i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA)	-
Kontrak Contract	8
MoU	1

Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung di bawah Direksi

Dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, Direksi memiliki organ-organ pendukung, seperti Sekretariat Perusahaan dan *Internal Audit Division* dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Penilaian Kinerja Sekretariat Perusahaan

Evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan dengan berdasarkan KPI (*Key Performance Indicator*) setiap akhir semester dilaporkan dan dinilai oleh President Director. Dengan detail KPI yaitu:

1. Implementasi Nilai Budaya Perusahaan (Innovation & Teamwork): Group Project Assignment (GPA);
2. Mengelola brand dan citra positif perusahaan;

Board of Directors Competency Improvement

The Company designed a program to provide new insights for the Board of Directors to increase the Company's capacity in a competitive business environment, and provide opportunities to build networks to empower existing resources within the organization to make the Company a high-performing organization. Information regarding competency improvement activities participated in by the Board of Directors throughout 2023 can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2023

Throughout the year 2023, the Board of Directors has fulfilled its duties and responsibilities in managing the Company through various decisions in the form of Board Resolutions, Board Regulations, Circulars, and Board Instructions.

Assessment of Supporting Organs under the Directorate

In carrying out its duties in managing the Company, the Directorate has supporting organs, such as the Corporate Secretariat and the Internal Audit Division, with the assessment results as follows:

Assessment of Corporate Secretariat Performance

The performance evaluation of the Corporate Secretary is carried out based on KPI (*Key Performance Indicator*) at the end of each semester reported and assessed by the President Director. With KPI details, namely:

1. Implementation of Corporate Culture Values (Innovation & Teamwork): Group Project Assignment (GPA);
2. Managing the brand and positive image of the company;

3. Mengelola hubungan baik dengan *stakeholder* dan *stakeholder*;
4. Pencapaian nilai GCG yang baik;
5. Memastikan arsip/dokumen perusahaan terkelola dengan baik;
6. Mengelola penyerapan dana TJSL untuk mitra binaan dan bantuan sosial;
7. Memastikan terlaksananya kegiatan TJSL; dan
8. Memastikan aspek hukum dari pengelolaan kesekretariatan perusahaan.

Penilaian Kinerja Internal Audit Division

Evaluasi kinerja Divisi Internal Audit dilakukan dengan berdasarkan KPI (*Key Performance Indicator*) setiap akhir semester dilaporkan dan dinilai oleh Direktur Utama. Dalam penilaian kinerja terdiri dari beberapa indikator penilaian, yaitu: KPI dan Kompetensi. Mengacu pada pedoman penentuan KPI pada BUMN No: S08.SMBU/2013: Pencapaian Nilai Prestasi per masing-masing KPI maksimal adalah 120%. Skala penilaian kinerja IAD adalah: (<2): *Below Performer/Kurang*, ($2 \leq x < 3$): *Fair Performer/Cukup*, ($3 \leq x < 4$): *Good Performer/Baik*, ($4 \leq x < 4.5$): *Very Good Performer/Baik Sekali* dan ($x \leq 4.5$): *Excellent Performer/Istimewa*. IAD akan terus meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia agar dapat menjadi Smart Partner bagi manajemen dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Transparansi Informasi terkait Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi selaku organ utama Perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Untuk itu, penilaian (*assessment*) untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan anak usaha dari BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Perusahaan melakukan evaluasi dan pemantauan Hasil Tata Kelola, melalui mekanisme *assessment* atau penilaian penerapan GCG secara periodik.

3. Managing good relations with shareholders and stakeholders;
4. Achieving good GCG values;
5. Ensuring that company archives/documents are well managed;
6. Managing the absorption of TJSL funds for fostered partners and social assistance;
7. Ensuring the implementation of TJSL activities; and
8. Ensuring the legal aspects of company secretarial management.

Assessment of Internal Audit Division Performance

Performance evaluation of the Internal Audit Division is carried out based on KPI (*Key Performance Indicator*) at the end of each semester reported and assessed by the President Director. The performance assessment consists of several assessment indicators, namely: KPI and Competence. Referring to the guidelines for determining KPIs in SOEs No. S08.SMBU/2013: S08.SMBU/2013: The maximum achievement score per each KPI is 120%. The IAD performance assessment scale is: (<2): *Below Performer/Lack*, ($2 \leq x < 3$): *Fair Performer/Sufficient*, ($3 \leq x < 4$): *Good Performer/Good*, ($4 \leq x < 4.5$): *Very Good Performer/Excellent* and ($x \leq 4.5$): *Excellent Performer/Special*. IAD will continue to improve the quality and skills of human resources in order to become a Smart Partner for management and can provide added value to the company.

Transparency of Information Regarding the Board of Commissioners and Board of Directors

Assessment of GCG Implementation for the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors, as the main organs of the Company, play a crucial role in ensuring the sustainability of the Company's business. Therefore, the assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is essential, especially since the Company is a subsidiary of a state-owned enterprise (SOEs) directed to apply GCG principles to SOEs standards and to assess their implementation.

The Company conducts evaluation and monitoring of Governance Results through periodic GCG implementation assessments. The GCG



Penilaian penerapan GCG di lingkup Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada Salinan Keputusan Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN yang mencakup aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun informasi mengenai metode, proses, dan hasil penilaian terkait penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi, dapat dilihat pada bagian “Upaya Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik” dalam bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Evaluasi dan Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan telah mengatur mengenai evaluasi dan penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pedoman Kerja (*Charter*). Berdasarkan *Charter* tersebut, penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi diukur berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan melalui RUPS. Dewan Komisaris dan Direksi mengusulkan KPI kepada RUPS yang kemudian ditetapkan dalam RUPS sebagai ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada pelaksanaannya, evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya selama setahun sekali. Dewan Komisaris dan Direksi juga mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing kepada pemegang saham melalui RUPS.

Di tahun 2023, KPI Dewan Komisaris tercatat memperoleh skor 145, sementara KPI Direksi mencapai skor 83,84. Adapun rincian terkait KPI Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

implementation assessment within the Company is conducted by referring to the Copy of the Decision of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs, which includes aspects of the Board of Commissioners and the Directorate. Information regarding the methods, processes, and results of the assessment related to GCG implementation for the Board of Commissioners and the Directorate can be found in the “Efforts to Improve the Implementation of Good Corporate Governance” section in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Evaluation and Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors' Performance

The Company has established guidelines for the evaluation and performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors in its Work Guidelines (*Charter*). According to the Charter, the performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is measured based on Key Performance Indicators (KPIs) set through the General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Commissioners and the Board of Directors propose KPIs to the GMS, which are then approved in the GMS as the benchmarks for evaluating the success of the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities.

In practice, the performance evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted periodically, at least once a year. The Board of Commissioners and the Board of Directors also report their performance achievements in fulfilling their duties and responsibilities to the shareholders through the GMS.

In 2023, the KPI score for the Board of Commissioners was recorded as 145, while the KPI score for the Board of Directors reached 83.84. Detailed information regarding the KPI scores of the Board of Commissioners and the Board of Directors for 2023 can be seen as follows:

KPI Kinerja dan Penilaian Dewan Komisaris Tahun 2023

KPI Performance and Assessment of the Board of Commissioners for 2023

No	Aspek dan Parameter Aspect and Parameter	Periode	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Rencana Output Output Plan	Realisasi Realization	Nilai Score
I. Aspek Perencanaan Planning Aspect							
1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2023 Prepare Work Plan and Budget as well as KPI for the Board of Commissioners 2023	Tahunan Annual	Dokumen Document	10	1	1	10
Sub Total I				10	10		
II. Aspek Pengawasan dan Nasihat Supervision and Advice Aspects							
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Provide responses/recommendations to Shareholders regarding:						
	a. RKAP 2022 2022 RKAP	Tahunan Annual	Surat Letter	4	1	1	4
	b. Laporan Tahunan Annual Report	Tahunan Annual	Surat Letter	4	1	1	4
	c. Analisis kinerja triwulanan Quarterly Performance Analysis	Triwulanan Quarterly	Surat Letter	4	2	2	4
	d. Evaluasi RJPP RJPP Evaluation	Setahun Annually	Surat Letter	4	1	-	-
2.	Memberi nasihat kepada Direksi sesuai tugas Dewan Komisaris. Provide advice to the Board of Directors as a responsibility of the Board of Commissioners	Setahun	Surat/ Risalah Letter	12	12	12	12
3.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners meeting						
	a. Jumlah rapat Number of meetings	Bulanan Monthly	Kali Times	9	12	13	10
	b. Kehadiran Rapat Meeting attendance	Bulanan Monthly	%	5	100	100	5
	a. Penyelesaian risalah rapat Completion of minutes of meeting	Bulanan Monthly	Risalah Minutes of Meeting	5	12	13	5
4.	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Unit Terkait Board of Commissioners Committee Meeting with related parties	Setahun Annually	Risalah Minutes of Meeting	6	12	67	33
5.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Working Visit	Setahun Annually	Kunjungan Visit	4	2	12	24
6.	Realisasi rencana kerja Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committee Work Plan Realization	Setahun Annually	%	3	100	100	3
Sub Total II				60	106		
III. Aspek Pelaporan Reporting Aspect							
1.	Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on KPI implementation realization by Board of Commissioners	Triwulanan Quarterly	Laporan Report	5	3	3	5
2.	Laporan pengawasan Dewan Komisaris tahunan Annual Board of Commissioners supervision report	Tahunan Annually	Laporan Report	10	1	1	10
Sub Total III				15	15		



No	Aspek dan Parameter Aspect and Parameter	Periode	Satuan Output Output Unit	Bobot Weight	Rencana Output Output Plan	Realisasi Realization	Nilai Score
IV. Aspek Dinamis Dynamic Aspect							
1	Pengusulan Auditor Eksternal kepada Pemegang Saham Proposal of External Auditor to Shareholders	Tahunan Annually	Surat Letter	3	1	1	3
2	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop dll Competency Improvement through seminar, workshop, etc	Setahun Annually	Kali Times	3	3	3	3
3	Hasil assessment GCG Dewan Komisaris (self-assessment/Konsultan Independen) Results of the Board of Commissioners' GCG assessment (self-assessment/Independent Consultant)	Tahunan Annually	Skor Score	3	25	32	4
4	Program Pengenalan bagi Komisaris baru Introduction Program for new Commissioner	Setahun Annually	Kali Times	2	1	-	-
5	Pembagian Tugas Dewan Komisaris Board of Commissioners Division of Duties	Setahun Annually	Kali Times	2	1	1	2
6	Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor Eksternal Response to Follow-up on External Auditor Findings	Setahun Annually	Surat Letter	2	1	1	2
Sub Total IV				15		14	
TOTAL (I+II+ III+IV)				100		145	

KPI Kinerja dan Penilaian Dewan Komisaris Tahun 2023

Board of Commissioners Performance KPI and Assessment in 2023

No	KPI	Satuan Unit	Target	ESG/C	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Realisasi Realization	
							Realisasi Realization	Skor Score
I	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Social and Economic Value for Indonesia							
FINANSIAL FINANCIAL								
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	272,38	C	Maximize	4	92,73	1,36
2	ROIC ≥ WACC	%	-3,88	C	Maximize	4	-8,81	0,04
3	IBD to EBITDA	kali times	14,43	G	Minimize	4	38,12	0,04
4	IBD to Invested Capital	%	57,91	G	Minimize	4	66,21	0,04
OPERASIONAL OPERATIONAL								
5	Skor Customer Satisfaction Index Customer Satisfaction Index Score	Skala Likert	4,00	C	Maximize	4	5,00	4,40
SOSIAL SOCIAL								
6	Penyelenggaraan Program Pariwisata atau Event International Implementation of Tourism Program or International Event	Jumlah Event Total Event	2	C	Maximize	5	3,00	5,50

7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Increasing the Use of Domestic Products (P3DN)	%	100	S	Maximize	5	100,00	5,00
II Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation								
8	Kerjasama pengembangan amenities baru untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan Collaboration in developing new amenities to support company business development	Kerjasama Cooperation	2	C	Maximize	5	3	5,50
9	Persentasi pendapatan divestasi aset terhadap total pendapatan operasi konsolidasi Percentage of asset divestment income to total consolidated operating income	%	13,45	C	Maximize	5	2,31	0,86
10	Penyelesaian Transformasi PT ITDC Completion of PT ITDC Transformation	%	100	G	Maximize	5	80	4,00
11	Kerjasama dengan ekosistem Injourney untuk pengembangan customer-centric experience retail di Nusa Dua Collaboration with the Injourney ecosystem to develop a customer-centric retail experience in Nusa Dua	Rp Juta Rp Million	180,54	C	Maximize	5	300	5,50
III Pengembangan Teknologi Technology Development								
12	Jumlah layanan TI yang terintegrasi Number of Integrated IT Services	Jumlah Layanan Number of Services	2	G	Maximize	7	2	7,00
13	IT Maturity Assesment (Likert)	Skor Score	2,5	C	Maximize	6	2,83	6,60
14	Integrasi Aplikasi dengan Tourism Super Platform/Tourism Collaborative Platform Application Integration with Tourism Super Platform/Tourism Collaborative Platform	%	100	G	Maximize	7	100	7,00
IV Peningkatan Investasi Investment Improvement								
15	Pembangunan Infrastruktur Dasar The Mandalika (MUTIP AIIB) Basic Infrastructure Development of The Mandalika (MUTIP AIIB)	%	100	G	Maximize	7	100	7,00
16	Realisasi Operasional Fasilitas MICE di Tanamori Realization of MICE Operational Facilities at Tanamori	%	100	C	Maximize	8	100	8,00
V Pengembangan Talenta Talent Development								
18	Rasio Milenial dalam Nominated Talent Millennial Ratio at Nominated Talent	%	50	S	Maximize	5	50	5,00
19	Rasio Perempuan dalam Nominated Talent Women Ratio at Nominated Talent	%	50	S	Maximize	5	100	5,50
20	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio	%	30	S	Maximize	5	45	5,50
TOTAL						100	83,84	



Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi merupakan imbal jasa yang diberikan Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja yang telah ditunjukkan. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Besaran gaji/honorarium dan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui keputusan RUPS. Prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat sebagai berikut:

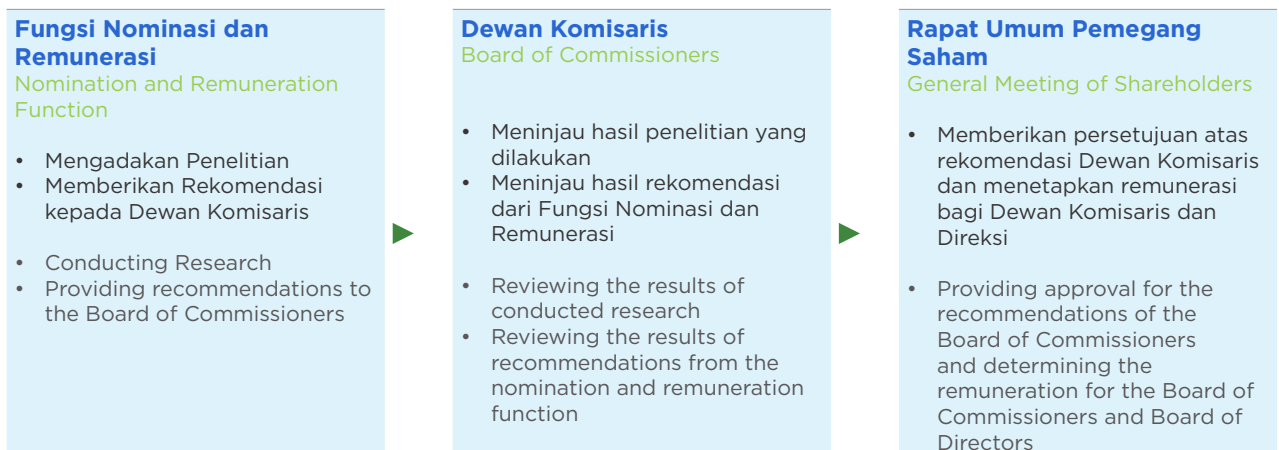
Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Procedure for Proposing to Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration is compensation given by the Company to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the performance they have demonstrated. The determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The amount of salary/honorarium and bonuses for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined through a resolution of the GMS. The procedure for determining remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors can be seen as follows:

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedure for Determining the Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors



ITDC juga telah menetapkan prosedur penetapan remunerasi dalam *Charter* Dewan Komisaris dan Direksi serta Keputusan RUPS dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang besarnya honorarium dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS berdasarkan usulan

ITDC has also established procedures for determining remuneration in the Charter of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as in the resolutions of the GMS, with the following details:

1. Provisions regarding the amount of honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners are determined by the GMS

Dewan Komisaris yang mendapatkan masukan dari fungsi nominasi dan remunerasi.

2. Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan dapat terdiri dari: honorarium, tunjangan, fasilitas; dan tantiem/insentif kinerja.
3. Penetapan penghasilan Dewan Komisaris berupa honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan.
4. Perusahaan, tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penetapan penghasilan yang berupa tunjangan dan tantiem bersifat variabel, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*) yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.
6. Dalam hal perhitungan honorarium dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan honorarium lebih rendah daripada tahun sebelumnya, maka honorarium yang dipakai adalah sama dengan honorarium tahun sebelumnya.

Pengungkapan Indikator untuk Penetapan Remunerasi Direktur Utama dan Perhitungan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa mempertimbangkan beberapa indikator sebagai variabel utama, antara lain:

1. Faktor Skala Usaha;
2. Faktor Kompleksitas Usaha;
3. Tingkat Inflasi;
4. Kondisi dan Kemampuan Keuangan Perusahaan; dan
5. Faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

based on the recommendation of the Board of Commissioners which obtain input from the nomination and remuneration functions.

2. The income of the Company's Board of Commissioners may consist of: honorarium, allowances, facilities; and profit sharing bonus/ performance incentives.
3. Determination of the income of the Board of Commissioners in the form of honorarium, allowances, and facilities that are permanent in nature by considering income factors, assets, financial conditions and capabilities.
4. Company, inflation rate and other relevant factors, and do not conflict with the laws and regulations.
5. Determination of income in the form of allowances and bonuses is variable, considering the factors of achieving the target, level of health, and financial ability, and other relevant factors (*merit system*) that are generally accepted in similar industries.
6. In terms of calculating the honorarium by considering the factors that caused the honorarium to be lower than the previous year, the honorarium used is the same as the honorarium of the previous year.

Disclosure of Indicators for Determining the Remuneration of the President Director and Calculation of Remuneration for the Board of Commissioners and Other Members of the Board of Directors

Based on the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, regarding the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises, the determination of the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors always takes into account several indicators as main variables, including:

1. Business Scale Factors;
2. Business Complexity Factors;
3. Inflation Rate;
4. Company's Financial Condition and Capability; and
5. Factors that are relevant and do not conflict with the laws and regulations.



Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan santunan/premi purna jabatan;
2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, Tantiem/Insentif Kinerja atau bentuk yang dipersamakan dengan itu.

Remuneration Structure for the Board of Directors and Board of Commissioners

The remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners is given by considering the applicable remuneration provisions, namely in the form of:

1. Fixed remuneration, namely remuneration that is not related to performance and risks, including salary/honorarium, facilities, housing allowance, health allowance, holiday allowance, and post employment compensation/premium;
2. Variable remuneration, namely remuneration related to performance and risk, including Bonuses, Profit sharing bonuses/Performance Incentives or an equivalent form thereof.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Table of Remuneration Structure for the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2023

No.	Jenis Remunerasi Remuneration Type	Ketentuan Provision	
		Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners
1.	Gaji/Honorarium Salary/Honorarium	8.342	3.156
2.	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	1.650	-
3.	Asuransi Purna Jabatan Post-Service Insurance	2.085	789
4.	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	695	263
5.	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	10	-
6.	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	-	631
7.	Fasilitas Kesehatan Medical Facility	541	108
8.	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	1.013	-
9.	Bantuan Hukum Legal Aid	-	-
10.	Tantiem/Insentif Kerja Profit Sharing Bonus/Work Incentives	334	239

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Total Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

Uraian Description	Jumlah (Rp juta) Total (Rp million)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	5.188
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	14.673
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors	19.861

Adapun remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors in one year which is grouped in the range of income levels is as follows:

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Table of Total Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

Jumlah Remunerasi Remuneration Amount	Jumlah Orang Total of People	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	-	5
Di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar Above Rp1 billion-Rp2 billion	4	-
Di atas Rp500 Juta-Rp1 miliar Above Rp500 Million-Rp1 billion	-	-
Rp500 juta ke bawah Rp500 million and below	-	-

Informasi tentang Rasio Gaji di Lingkup Perusahaan

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Information About Salary Ratio in Company Scope

Information regarding the salary ratio of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the Company is as follows:

Perbandingan Ratio	2023	2022	2021
Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Director	1:1,2	1:1,2	1:1,2
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to the Member of the Board of Commissioners	1:1,1	1:1,1	1:1,1
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1:2,2	1:2,2	1:2,2
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi President Director to the Highest Employee	1:2	1:2	1:2
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah President Director to the Lowest Employee	1:49	1:49	1:49
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest Employee to the Lowest Employee	1:24	1:24	1:24
Karyawan Terendah terhadap UMP Lowest Employee to UMP	1:1	1:1	1:1



Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun. Perusahaan juga tidak memberlakukan pemberian opsi saham kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi bonus non kinerja dan opsi saham Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Kerja (*Charter*) Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 05.1/KEP/DEKOM/VIII/2021 tentang Piagam Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Charter*) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, pelaksanaan rapat Dewan Komisaris harus memenuhi sejumlah ketentuan, seperti:

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari rapat Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat di mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi;
2. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Komisaris Utama disampaikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan agenda rapat yang akan dibicarakan;
3. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di wilayah RI yang disepakati baik secara daring maupun luring, dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
4. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, atau jika berhalangan dapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk

Non-Performance Bonuses and Stock Options for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Throughout 2023, the Company did not conduct an Initial Public Offering (IPO) and did not list its shares on any stock exchange. The Company also did not provide stock options to the Board of Commissioners and the Board of Directors. Therefore, there is no information on non-performance bonuses and stock options for the Board of Commissioners and the Board of Directors that can be presented in this Annual Report.

Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Rapat Dewan Komisaris

The Board of Commissioners meeting policy is outlined in the Board of Commissioners Charter, established by the Decision of the Board of Commissioners No. 05.1/KEP/DEKOM/VIII/2021 regarding the Charter of the Board of Commissioners (Board of Commissioner Charter) of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. According to these rules, the implementation of the Board of Commissioners meetings must adhere to several provisions, such as:

1. Meetings of the Board of Commissioners are held at least once a month or whenever deemed necessary by the President Commissioner or by 1/3 (one-third) of the members of the Board of Commissioners, or upon written request from the Board of Directors meeting or at the request of 1 (one) or more shareholders who own at least 1/10 (one-tenth) of all shares with valid voting rights, in which the Board of Commissioners can invite the Board of Directors;
2. Meeting invitations are issued by the President Commissioner at least 14 (fourteen) days and, in urgent cases, at least 3 (three) days before the meeting date, specifying the day, date, time, place, and agenda of the meeting;
3. Meetings are held at the Company's domicile or another agreed location within the territory of Indonesia, either online or offline, and such meetings are authorized to make legitimate and binding decisions;
4. The meeting is chaired by the President Commissioner, or if unavailable, by another member of the Board of Commissioners

oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang tertua masa jabatannya atau yang tertua usianya;

5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa khusus. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu anggota Dewan Komisaris lainnya;
6. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri atau diwakili secara sah oleh minimal lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili;
7. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bilamana keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan bersama, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili;
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat memberikan suaranya dalam rapat yang membahas suatu agenda yang memiliki benturan kepentingan terhadap dirinya baik langsung maupun tidak langsung;
9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris mempunyai suara yang menentukan, kecuali dalam Rapat di mana hanya hadir dan/atau diwakili 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau di mana hanya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang dapat mengeluarkan suara yang sah dalam rapat, maka ketua Rapat tidak mempunyai suara yang menentukan usul yang bersangkutan dianggap ditolak;
10. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
12. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir atau yang diwakili harus memberikan atau mengeluarkan suara. Dalam hal tidak memberikan suara (abstain) maka yang bersangkutan mengikuti dan turut bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat;

appointed by the President Commissioner. If no appointment is made, the meeting is chaired by the longest-serving or oldest member of the Board of Commissioners;

5. A member of the Board of Commissioners can only be represented in a meeting by another member of the Board of Commissioners based on a special power of attorney. A member can only represent one other member;
6. The meeting is valid and authorized to make legitimate and binding decisions if attended or duly represented by more than half of the members of the Board of Commissioners;
7. Decisions must be made based on deliberation for consensus. If consensus is not achieved, decisions are made by a vote based on the majority of more than $\frac{1}{2}$ (half) of the Board of Commissioners members present and/or represented;
8. Members of the Board of Commissioners cannot vote on matters where they have a conflict of interest, either directly or indirectly;
9. If there is a tie in votes, the chair of the meeting has the deciding vote, except when only 2 (two) members of the Board of Commissioners are present and/or represented, or only 2 (two) members can cast valid votes, then the chair does not have the deciding vote, and the proposal is considered rejected;
10. Each member of the Board of Commissioners present has one vote and an additional vote for another member they represent;
11. Voting on individuals is conducted by closed ballot without signatures, while other matters are voted on orally unless the chair decides otherwise without objection by the majority present;
12. Each member of the Board of Commissioners present or represented must cast a vote. In case of abstention, the member is considered to agree and shares responsibility for the meeting's decisions;



13. Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris apabila ada. Risalah Rapat merupakan bukti yang sah, baik untuk para Anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang pengesahannya ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat;
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah mengetahui usul keputusan yang dimaksud secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis terhadap usul yang dimaksud serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris;
15. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan atau dilakukan melalui media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Semua orang yang ikut serta dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan. Risalah dari rapat yang diadakan dengan menggunakan hubungan media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk diperiksa dan disetujui;
16. Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris dalam ketentuan tersendiri;
17. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris;
18. Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disimpan oleh Perusahaan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
19. Jumlah rapat Dewan Komisaris serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan.
13. Each meeting of the Board of Commissioners must have minutes documenting opinions, supporting or dissenting opinions, decisions/conclusions, and reasons for any member's absence. The minutes serve as valid evidence for members and third parties about the Board of Commissioners' decisions and must be signed by all attending members;
14. The Board of Commissioners can also make legitimate decisions without holding a meeting if all members are aware of the proposed decision in writing, agree to it in writing, and sign the agreement. Such decisions are as binding as those made in meetings;
15. Meetings of the Board of Commissioners can be held via video conferencing or other electronic media allowing all participants to see and hear each other directly and participate. All participants are considered present for quorum and voting requirements. The minutes of such meetings must be documented in writing and distributed to all members for review and approval;
16. The Board of Commissioners must establish its meeting rules separately;
17. Each member of the Board of Commissioners has the right to receive a copy of the minutes, even if they did not attend the meeting of the Board of Commissioners;
18. The original minutes must be kept by the Company and made available upon request to any member of the Board of Commissioners or the Board of Directors;
19. The number of meetings and attendance of each member of the Board of Commissioners must be included in the Annual Report.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali rapat internal dengan kehadiran sebagai berikut:

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absenteeism	% Kehadiran % of Attendance
Ricky Joseph Pesik	21	21	0	100%
H. Irzani, M.Pd, M.Si	21	21	0	100%
Ir. Zainal Mutaqin, MM	21	21	0	100%
Ulin Ni'am Yusron	21	21	0	100%

During 2023, the Board of Commissioners held a total of 21 (twenty one) internal meetings with the following attendance:

Recapitulation of Board of Commissioners Attendance in Internal Meetings

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris

Minutes of Internal Meeting of the Board of Commissioners

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Senin, 30 Januari 2023 Monday, January 30, 2023	Online	1. Pending Matters; 2. Konsolidasi keuangan bulan Des 2022 3. Pembebasan Lahan; 4. Update Tana Mori; 5. Update Mandalika 6. Persiapan WSBK; 7. Lain-lain. 1. Pending Matters; 2. Financial consolidation in Dec 2022 3. Land Acquisition; 4. Tana Mori Update; 5. Mandalika Update 6. WSBK Preparation; 7. Others.	100%	-
Senin, 27 Februari 2023 Monday, February 27, 2023	Online	1. Pending Matters; 2. Konsolidasi keuangan bulan Des 2022; 3. Pembebasan Lahan; 4. Update Tana Mori; 5. Update Mandalika 6. Persiapan WSBK; 7. Lain-lain. 1. Pending Matters; 2. Financial consolidation in December 2022; 3. Land Acquisition; 4. Tana Mori Update; 5. Mandalika Update 6. WSBK Preparation; 7. Others.	100%	-



Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Senin, 13 Maret 2023 Monday, March 13, 2023	Online	tanggapan surat Direktur Utama ITDC Nomor 080.2/DIR/ITDC.01/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 Perihal permohonan izin sehubungan rencana tambahan fasilitas terkait pembiayaan promotor fee/hosting fee event world superbike (WSBK) tahun 2023 di KEK Mandalika Response to letter from the President Director of ITDC Number 080.2/DIR/ITDC.01/II/ 2023 dated February 28, 2023, regarding the request for permission on plans for additional facilities related to financing promoter fees/hosting fees for the 2023 World Superbike (WSBK) event in KEK Mandalika	100%	-
Kamis, 30 Maret 2023 Thursday, March 30, 2023	Online	1. Pending Matters; 2. Pembebasan Lahan; 3. Persiapan WSBK; 4. Progress Pullman; 5. Audit Eksternal Tahun Buku 2022; 6. Lain-lain. 1. Pending Matters; 2. Land Acquisition; 3. WSBK preparation; 4. Progress on Pullman; 5. External Audit for Financial Year 2022; 6. Others.	100%	-
Kamis, 27 April 2023 Thursday, April 27, 2023	Online	1. Pending Matters; 2. Evaluasi WSBK; 3. Audit Eksternal Tahun Buku 2022; 4. The Golo Mori; 5. Konsolidasi Keuangan Bulan Maret 2023 (Lap Manajemen TW I); 6. Lain-lain. 1. Pending Matters; 2. WSBK Evaluation; 3. External Audit for Financial Year 2022; 4. The Golo Mori; 5. Financial Consolidation in March 2023 (Q1 Management Report); 6. Others.	100%	-

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Kamis, 25 Mei 2023 Thursday, May 25, 2023	Online	1. Pending Matters; 2. Update Progres Inklusi; 3. Financial Performance sd bulan April 2023; 4. Progres pendanaan TA 2023; 5. Update Progres Investor; 6. Persiapan MotoGP; 7. Evaluasi event KTT ASEAN di Golo Mori; 8. Lain-lain. 1. Pending Matters; 2. Inclusion Progress Update; 3. Financial Performance until April 2023; 4. FY 2023 funding progress; 5. Investor Progress Update; 6. MotoGP preparation; 7. Evaluation of the ASEAN Summit event in Golo Mori; 8. Others.	100%	-
Senin, 26 Juni 2023 Monday, June 26, 2023	Online	1. Pending Matters; 2. Performance keuangan sampai dengan bulan Mei 3. Progres pendanaan 4. update progress kelanjutan perisapan MotoGP 5. Progress restrukturisasi sebagai tindak lanjut FGD 1. Pending Matters; 2. Financial performance until May 3. Funding progress 4. Update on progress in continuing preparations for MotoGP 5. Progress in restructuring as a follow-up to FGD	100%	-



Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Rabu 26 Juli 2023 Wednesday, July 26, 2023	Online	1. Evaluasi rapat sebelumnya 2. Revisi RKAP 2023 3. Laporan keuangan s.d. semester I 2023 konsolidasian 4. Update rencana penyehatan perusahaan s.d. semester I 2023 5. Persiapan MotoGP 2023, skema kerja sama ITDC-MGPA-Fasen, ITDC-INP-MGPA, dan MGPA-Xplorin 6. Progres divestasi aset 7. Progress investor The Golomori, The Mandalika, dan The Nusa Dua periode s.d. semester I 2023. 8. PSA 62 dan management letter sebagai temuan dari audit eksternal RSM tahun buku 2022.	100%	-
Senin, 31 Juli 2023 Monday, July 31, 2023	Online	Penjelasan atas surat permohonan persetujuan struktur organisasi ITDC tahun 2023 Explanation of the 2023 ITDC organizational structure application letter	100%	-
Rabu, 02 Agustus 2023 Wednesday, August 2, 2023	Online	Usulan Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. Proposal in Changes to the Company's Organizational Structure.	100%	-

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Minggu, 27 Agustus 2023 Sunday, August 27, 2023	Online	1. Evaluasi rapat sebelumnya. 2. Update persiapan event MotoGP 2023. 3. Update cashflow projection. 4. Update operasional dan pembangunan Hotel Pullman. 5. Risk management and legal update. 6. Inventarisasi aset. 7. Update procurement dan kebijakan mutu layanan. 8. Lain-lain.	100%	-
Senin, 5 September 2023 Monday, September 5, 2023	Online	Permintaan Klarifikasi Anggota Komite Manajemen Risiko a.n. Vera Diyanty Request for Clarification from Risk Management Committee Members Vera Diyanty	100%	-
Senin, 25 September 2023 Monday, September 25, 2023	Online	1. Evaluasi rapat sebelumnya/pending matters. 2. Laporan internal audit. 3. Kinerja keuangan s.d. bulan Agustus 2023. 4. Update persiapan MotoGP. 5. Update tanah enclave di Sirkuit Mandalika. 6. Update investor. 7. Lain-lain.	100%	-
Selasa, 02 Oktober 2023 Tuesday, October 2, 2023	Hybrid	Interview Calon Komite Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko Interview Candidate Committee Members of the Audit Committee and Risk Management Committee	100%	-
Jumat, 20 Oktober 2023 Friday, October 20, 2023	Hybrid	Pembahasan <i>pending matters</i> komite audit dan komite manajemen risiko Discussion of pending matters on the audit committee and risk management committee	100%	-
Jumat, 20 Oktober 2023 Friday, October 20, 2023	Hybrid	Pengenalan anggota komite baru, arahan system kerja dan concern kegiatan komite Introduction of new committee members, direction of the work system and concerns of committee activities	100%	-



Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Jumat, 20 Oktober 2023 Friday, October 20, 2023	Hybrid	Pengenalan anggota komite audit dan komite manajemen risiko ke Manajemen Introduction of audit committee and risk management committee members to Management	100%	-
Selasa, 24 Oktober 2023 Tuesday, October 24, 2023	Online	Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Triwulan III 2023 Discussion of the Board of Commissioners' Response to the Third Quarter 2023 Report	100%	-
Senin, 30 Oktober 2024 Monday, October 30, 2023	Online	1. Evaluasi rapat sebelumnya/pending matters. 2. Event MotoGP. 3. Kinerja Keuangan s.d. triwulan III tahun 2023. 4. Aol dan persiapan <i>assessment</i> GCG. 5. Dana PMN. 6. Lain-lain. 1. Pending matters. 2. MotoGP events. 3. Financial Performance until third quarter of 2023. 4. Aol and preparation for GCG assessment. 5. PMN funds. 6. Others.	100%	-
Rabu, 29 November 2024 Wednesday, November 29, 2023	Offline di Nusa Dua in Nusa Dua	1. Evaluasi rapat sebelumnya/pending matters. 2. Telaah RKAP 2024. 3. Kinerja Keuangan s.d. bulan Oktober tahun 2023. 4. Laporan PMN TA 2021: pengembangan Kawasan The Golo Mori. 5. Laporan hasil audit SPI November 2023. 6. Top risk & legal update. 7. Lain-lain. 1. Pending matters. 2. Review RKAP 2024. 3. Financial Performance up to October 2023. 4. FY 2021 PMN Report: development of The Golo Mori Area. 5. SPI audit results report November 2023. 6. Top risk & legal update. 7. Others.	100%	-
Selasa, 30 Desember 2023 Tuesday, December 30, 2023	Online	1. Evaluasi rapat sebelumnya/Pending matters 2. Target RMI perusahaan 3. Program Rencana kerja SPI 2024 dan piagam SPI 4. Progres audit laporan keuangan tahun 2023 5. Tindak lanjut rekomendasi BPK, BPKP, dan KAP (Management Letter dan PSA 62) 6. Lain-lain 1. Pending matters 2. Company RMI target 3. SPI 2024 work plan and SPI charter 4. Progress of 2023 financial report audit 5. Follow up on BPK, BPKP and KAP recommendations (Management Letter and PSA 62) 6. Others	100%	-

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Selain menyelenggarakan rapat internal, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan dengan Direksi. Pada pelaksanaannya, Dewan Komisaris mengundang Direksi dan meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat gabungan dengan Direksi. Adapun rincian frekuensi kehadiran dan pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Board of Commissioners Meetings with the Board of Directors

In addition to conducting internal meetings, the Board of Commissioners also holds joint meetings with the Board of Directors. In practice, the Board of Commissioners invites the Board of Directors and requests the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors, with the knowledge of the Board of Directors, to attend the Board of Commissioners Meeting.

Throughout the year 2023, the Board of Commissioners held 13 (thirteen) joint meetings with the Board of Directors. The details of the frequency of attendance and the conduct of joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2023 are as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan

Recapitulation of Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Joint Meetings

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absenteeism	% Kehadiran % of Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Ricky Joseph Pesik	13	13	0	100%
H. Irzani, M.Pd, M.Si	13	13	0	100%
Ir. Zainal Mutaqin, MM	13	13	0	100%
Ulin Ni'am Yusron	12	12	1	92%
Rata-Rata Kehadiran Dewan Komisaris Average Attendance of the Board of Commissioners				98%
Direksi Board of Directors				
Ari Respati	13	13	0	100%
Ahmad Fajar	13	13	0	100%
Wenda Ramadya Nabel	13	13	0	100%
Ema Widiastuti	13	12	1	92%
Troy Reza Warokka	13	11	2	85%
Rata-Rata Kehadiran Direksi Average Attendance of the Board of Directors				95%


Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Selasa, 31 Januari 2023 Tuesday, January 31, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	1. Evaluasi Rapat Sebelumnya 2. Konsolidasian Keuangan Bulan Desember 2022 3. Update Tana Mori 4. Update Mandalika 5. Penagihan Piutang Tenant 6. Persiapan WSBK 7. Lain-lain 1. Evaluation of Previous Meeting 2. Financial Consolidation for December 2022 3. Tana Mori Update 4. Mandalika Update 5. Tenant Receivables Collection 6. WSBK Preparation 7. Others	89%	DO tidak dapat menghadiri Rakor karena ada tugas lain. DO unable to attend the meeting due to another duty
Selasa, 28 Februari 2023 Tuesday, February 28, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	1. Evaluasi Rapat Sebelumnya 2. Konsolidasian Keuangan Bulan Januari 2023 3. Persiapan KTT dan Penamaan di Golo Mori 4. Update Mandalika 5. Penagihan Piutang Tenant 6. Persiapan WSBK 7. Lain-lain 1. Evaluation of Previous Meeting 2. Financial Consolidation in January 2023 3. Preparation for the Summit and Naming at Golo Mori 4. Mandalika Update 5. Tenant Receivables Collection 6. WSBK Preparation 7. Others	100%	-
Jumat, 31 Maret 2023 Friday, March 31, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	1. Evaluasi Rapat Sebelumnya 2. Pending Matters 3. Evaluasi WSBK 4. Audit Eksternal Tahun Buku 2022 5. Struktur Grup ITDC 6. Konsolidasian Keuangan Bulan Februari 2023 7. Lain-lain 1. Evaluation of Previous Meetings 2. Pending Matters 3. WSBK Evaluation 4. External Audit for Fiscal Year 2022 5. ITDC Group Structure 6. Financial Consolidation for February 2023 7. Others	100%	-

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Jumat, 28 April 2023 Friday, April 28, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	1. Evaluasi rapat sebelumnya 2. Persiapan Motogp 3. Progress Kuta kruak 4. Update Persiapan Operasional Golo Mori 5. Financial Performance sd TW 1 6. Progress Investor sd TW 1 7. Progress PMN TA 2023 8. lain - lain 1. Evaluation of previous meetings 2. MotoGP preparations 3. Kuta Kruak Progress 4. Update on Golo Mori Operational Preparations 5. Financial Performance up to TW 1 6. Investor Progress up to TW 1 7. PMN Progress FY 2023 8. others	100%	-
Jumat, 26 Mei 2023 Friday, May 26, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	1. Evaluasi Rapat Sebelumnya 2. Progres Audit Laporan Keuangan 3. Financial Performance s.d bulan April 2023 4. Lain-lain 1. Evaluation of Previous Meeting 2. Financial Report Audit Progress 3. Financial Performance until April 2023 4. Others	100%	-
Selasa, 27 Juni 2023 Tuesday, June 27, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	1. Evaluasi rapat sebelumnya 2. Performance Keuangan Sampai bulan Mei 3. Progress Pendanaan 4. Update Progress Kelanjutan Persiapan MotoGP 5. Progress Restrukturisasi sebagai tindak lanjut FGD 6. lain - lain 1. Evaluation of previous meeting 2. Financial Performance Until May 3. Funding Progress 4. Update on Progress Continuing MotoGP Preparations 5. Restructuring Progress as a follow-up to FGD 6. Others	100%	-



Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Kamis, 27 Juli 2023 Thursday, July 27, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	1. Evaluasi rapat sebelumnya 2. Laporan Keuangan Semester 1 2023 Konsolidasian 3. Update Rencana Penyehatan Perusahaan sd Semester 1 2023 4. Persiapan MotoGP 2023 5. Progress dr Divestasi Aset 6. Progress Investor The Golo Mori, The Mandalika, dan The Nusa Dua periode Semester 1 2023 7. Evaluation of previous meetings	100%	-
Senin, 28 Agustus 2023 Monday, August 28, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	1. Evaluasi Rapat Sebelumnya 2. Kinerja Keuangan sampai dengan Juli 2023 3. Strategi Penyehatan Perusahaan 4. Update Persiapan MotoGP 2023 & Update Hosting Fee 5. Update SBU The Nusa Dua 6. Progress Investor 7. lain-lain 1. Evaluation of Previous Meeting 2. Financial Performance up to July 2023 3. Company Restructuring Strategy 4. Update on MotoGP 2023 Preparations & Hosting Fee Update 5. Update on The Nusa Dua SBU 6. Investor Progress 7. others	100%	-
Selasa, 26 September 2023 Tuesday, September 26, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	1. Evaluasi rapat sebelumnya; 2. Laporan internal audit; 3. Kinerja keuangan s.d. bulan Agustus 2023; 4. Update persiapan MotoGP 2023; 5. Update tanah enclave di Sirkuit Mandalika; 6. Lain-lain. 1. Evaluate previous meetings; 2. Internal audit report; 3. Financial performance up to August 2023; 4. Update on preparations for MotoGP 2023; 5. Update the enclave land in the Mandalika Circuit; 6. Others.	78%	DP tidak dapat hadir dan Ulin Ni'am Yusron berhalangan hadir dikarenakan sedang ada tugas lain, berdasarkan surat kuasa no. SK-02/DEKOM.ITDC/IX/2023 DP and Ulin Ni'am Yusron were unable to attend the meeting due to another duty, based on power of attorney no. SK-02/ DEKOM.ITDC/ IX/2023

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Rabu, 11 Oktober 2023 Wednesday, October 11, 2023	Kantor ITDC Mandalika ITDC Office Mandalika	1. Laporan internal audit; 2. Update tanah enclave di Sirkuit Mandalika; 3. Lain-lain 1. Internal audit report; 2. Update on the enclave land in the Mandalika Circuit; 3. Others	100%	-
Selasa, 31 Oktober 2023 Tuesday, October 31, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	1. Evaluasi rapat sebelumnya; 2. RKAP 2024; 3. Konsolidasi keuangan s.d Sept 2023 4. Laporan pelaksanaan MotoGP 2023, termasuk co-promotor; 5. Lain-lain 1. Evaluate previous meetings; 2. RKAP 2024; 3. Financial consolidation until Sept 2023 4. Report on the implementation of MotoGP 2023, including co-promoters; 5. Others	100%	-
Kamis, 30 November 2023 Thursday, November 30, 2023	Kantor ITDC Nusa Dua ITDC Office Nusa Dua	1. Evaluasi rapat sebelumnya 2. Konsolidasi keuangan s.d Oktober 2023 3. Update Investor 4. Lain-lain. 1. Evaluation of previous meetings 2. Financial consolidation until October 2023 3. Investor Update 4. Others.	89%	DO tidak hadir dan diwakili dalam bentuk surat kuasa yang dilimpahkan kepada DP DO was not present and was represented in the form of a power of attorney delegated to DP
Rabu, 27 Desember 2023 Wednesday, December 27, 2023	Video Conference	1. Evaluasi rapat sebelumnya 2. Laporan keuangan unaudited tahun 2023 3. Progres audit eksternal 4. Laporan multiplier effect MotoGP 2023 5. Skema hosting fee 2024 6. Lain-lain. 1. Evaluation of previous meetings 2. Unaudited financial report for 2023 3. Progress of external audit 4. MotoGP multiplier effect report 2023 5. Hosting fee scheme 2024 6. Others.	100%	-

Rapat Direksi

Berdasarkan Pedoman Kerja (*Charter*) Direksi, rapat Direksi dapat diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan operasional Perusahaan. Pada pelaksanaannya, Direksi memiliki 2 (dua) mekanisme utama dalam pengambilan keputusan, yaitu melalui rapat Direksi maupun dengan menerbitkan Keputusan Sirkuler.

Keputusan Sirkuler adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan melalui rapat formal, apabila seluruh anggota Direksi telah memberikan persetujuan atas usul yang diajukan

Board of Directors Meetings

Based on the Board of Directors Charter, board meetings can be held at least once a month with the purpose of evaluating the company's operational activities. In practice, the Board of Directors has two main mechanisms for decision-making, namely through board meetings or by issuing Circular Decisions.

Circular Decisions are valid and have the same force as decisions made through formal meetings if all members of the Board of Directors have given written approval to the proposed motion and signed



secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah sesuai ketentuan.

Selama tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan

the approval. Board meetings are valid and have the authority to make binding decisions if attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of directors or their authorized representatives as stipulated.

During the year 2023, the Board of Directors held meetings 13 (thirteen) times with the attendance details as follows:

Recapitulation of Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Joint Meetings

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absenteeism	% Kehadiran % of Attendance
Ari Respati	12	13	0	100%
Ahmad Fajar	12	13	0	100%
Wenda Ramadya Nabel	12	13	0	100%
Ema Widiastuti	12	12	1	92%
Troy Reza Warokka	12	11	2	85%

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners or Board of Directors Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Selasa, 31 Januari 2023 Tuesday, January 31, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	- Evaluasi Rapat Sebelumnya - Konsolidasian Keuangan Bulan Desember 2022 - Update Tana Mori - Update Mandalika - Penagihan Piutang Tenant - Persiapan WSBK - Lain-lain - Evaluation of Previous Meetings - Financial Consolidation for December 2022 - Tana Mori Update - Mandalika Update - Tenant Receivables Collection - WSBK Preparation - Others	89%	DO tidak dapat menghadiri Rakor karena ada tugas lain. DO was unable to attend the Coordination Meeting due to other duties.

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners or Board of Directors Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Selasa, 28 Februari 2023 Tuesday, February 28, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	• Evaluasi Rapat Sebelumnya • Konsolidasian Keuangan Bulan Januari 2023 • Persiapan KTT dan Penamaan di Golo Mori • Update Mandalika • Penagihan Piutang Tenant • Persiapan WSBK • Lain-lain • Evaluation of the Previous Meeting • Financial Consolidation for January 2023 • Preparation for the Summit and Naming at Golo Mori • Mandalika Update • Collection of Tenant Receivables • Preparation for WSBK • Others	100%	-
Jumat, 31 Maret 2023 Friday, March 31, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	• Evaluasi Rapat Sebelumnya • Pending Matters • Evaluasi WSBK • Audit Eksternal Tahun Buku 2022 • Struktur Grup ITDC • Konsolidasian Keuangan Bulan Februari 2023 • Lain-lain • Evaluation of Previous Meetings • Pending Matters • WSBK Evaluation • External Audit for Fiscal Year 2022 • ITDC Group Structure • Financial Consolidation for February 2023 • Others	100%	-
Jumat, 28 April 2023 Friday, April 28, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	• evaluasi rapat sebelumnya • persiapan Motogp • Progress Kuta kruak • Update Persiapan Operasional Golo Mori • Financial Performance sd TW 1 • Progress Investor sd TW 1 • Progress PMN TA 2023 • lain - lain • Evaluation of previous meetings • MotoGP preparations • Kuta Kruak Progress • Update on Golo Mori Operational Preparations • Financial Performance up to TW 1 • Investor Progress up to TW 1 • PMN Progress FY 2023 • Others	100%	-
Jumat, 26 Mei 2023 Friday, May 26, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	• Evaluasi Rapat Sebelumnya • Progres Audit Laporan Keuangan • Financial Performance s.d bulan April 2023 • Lain-lain • Evaluation of Previous Meetings • Financial Report Audit Progress • Financial Performance until April 2023 • Others	100%	-



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners or Board of Directors Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Selasa, 27 Juni 2023 Tuesday, July 27, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	- Evaluasi rapat sebelumnya - Performance Keuangan Sampai bulan Mei - Progress Pendanaan - Update Progress Kelanjutan Persiapan MotoGP - Progress Restrukturisasi sebagai tindak lanjut FGD - lain - lain - Evaluation of previous meetings - Financial performance until May - Funding progress - Update on progress continuing MotoGP preparations - Restructuring progress as a follow-up to FGD - Others	100%	-
Kamis, 27 Juli 2023 Thursday, July 27, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	- Evaluasi rapat sebelumnya - Laporan Keuangan Semester 1 2023 Konsolidasian - Update Rencana Penyehatan Perusahaan sd Semester 1 2023 - Persiapan MotoGP 2023 - Progress dr Divestasi Aset - Progress Investor The Golo Mori, The Mandalika, dan The Nusa Dua - periode Semester 1 2023 - Evaluation of previous meetings - Consolidated Financial Report for Semester 1 2023 - Update on Company Restructuring Plan up to Semester 1 2023 - Preparation for MotoGP 2023 - Progress on Asset Divestment - Progress of Investors The Golo Mori, The Mandalika, and The Nusa Dua - Semester 1 2023 period - Others	100%	-
Senin, 28 Agustus 2023 Monday, August 28, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	- Evaluasi Rapat Sebelumnya - Kinerja Keuangan sampai dengan Juli 2023 - Strategi Penyehatan Perusahaan - Update Persiapan MotoGP 2023 & Update Hosting Fee - Update SBU The Nusa Dua - Progress Investor - lain-lain - Evaluation of Previous Meetings - Financial Performance up to July 2023 - Company Restructuring Strategy - Update on MotoGP 2023 Preparations & Hosting Fee Update - Update on SBU The Nusa Dua - Investor Progress - Others	100%	-

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners or Board of Directors Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Selasa, 26 September 2023 Tuesday, September 26, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	- Evaluasi rapat sebelumnya; - Laporan internal audit; - Kinerja keuangan s.d. bulan Agustus 2023; - Update persiapan MotoGP 2023; - Update tanah enclave di Sirkuit Mandalika; - Lain-lain. - Evaluation of previous meetings; - Internal audit report; - Financial performance up to. August 2023; - Update on preparations for MotoGP 2023; - Update on enclave land in the Mandalika Circuit; - Others	78%	DP tidak dapat hadir dan Ulin Ni'am Yusron berhalangan hadir dikarenakan sedang ada tugas lain, berdasarkan surat kuasa no. SK-02/DEKOM.ITDC/IX/2023 DP and Ulin Ni'am Yusron were unable to attend due to other duties, based on power of attorney no. SK-02/DEKOM.ITDC/IX/2023
Rabu, 11 Oktober 2023 Wednesday, October 11, 2023	Kantor ITDC Mandalika ITDC Office Mandalika	- Laporan internal audit; - Update tanah enclave di Sirkuit Mandalika; - Lain-lain - Internal audit report; - Update on enclave land in the Mandalika Circuit; - Others	100%	-
Selasa, 31 Oktober 2023 Tuesday, October 31, 2023	Kantor ITDC Jakarta ITDC Office Jakarta	- Evaluasi rapat sebelumnya; - RKAP 2024; - Konsolidasi keuangan s.d Sept 2023 - Laporan pelaksanaan MotoGP 2023, termasuk co-promotor; - Lain-lain - Evaluation of previous meetings; - RKAP 2024; - Financial consolidation until Sept 2023 - Report on the implementation of MotoGP 2023, including co-promoters; - Others	100%	-
Kamis, 30 November 2023 Thursday, November 30, 2023	Kantor ITDC Nusa Dua ITDC Office Nusa Dua	- Evaluasi rapat sebelumnya - Konsolidasi keuangan s.d Oktober 2023 - Update Investor - Lain-lain. - Evaluation of previous meetings - Financial consolidation until October 2023 - Investor Update - Others.	89%	DO tidak hadir dan diwakili dalam bentuk surat kuasa yang dilimpahkan kepada DP DO was unable to attend the meeting and represented in the form of a power of attorney delegated to DP



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir dalam Rapat, dan Alasan Ketidakhadiran Board of Commissioners or Board of Directors Not Attending the Meeting, and Reasons for Absence
Rabu, 27 Desember 2023 Wednesday, December 27, 2023	Video Conference	• Evaluasi rapat sebelumnya • Laporan keuangan unaudited tahun 2023 • Progres audit eksternal • Laporan multiplier effect MotoGP 2023 • Skema hosting fee 2024 • Lain-lain. • Evaluation of previous meetings • Unaudited financial report for 2023 • External audit progress • 2023 MotoGP multiplier effect report • 2024 hosting fee scheme • Others.	100%	-

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pada tahun 2023, pemegang saham utama/pengendali ITDC adalah PT Aviastar Indonesia (Persero) dengan kepemilikan saham Seri B sebesar 2.147.659 lembar saham atau setara dengan 99,99995%. Hal tersebut sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviastar Indonesia (Persero). Dengan demikian, ITDC menjadi bagian dari holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata di Indonesia dengan kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT Aviastar Indonesia (Persero).

Transparansi Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antar Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memastikan pengelolaan Perusahaan yang bebas

Disclosure of Affiliated Relationship Between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Main and/or Controlling Shareholders

Information of Main/Controlling Shareholders

In 2023, the main/controlling shareholder of ITDC was PT Aviastar Indonesia (Persero) with ownership of Series B shares totaling 2,147,659 shares or equivalent to 99.99995%. This is in line with the issuance of Government Regulation No. 3 of 2023 concerning the Addition of State Capital Participation into the Share Capital of PT Aviastar Indonesia (Persero). Thus, ITDC became part of the state-owned enterprise aviation and tourism sector holding in Indonesia, with the largest share ownership held by PT Aviastar Indonesia (Persero).

Transparency of Business Relations and Affiliation Relations Among the Board of Commissioners, Directors, or with the Main/Controlling Shareholders

The Company is committed to complying with all applicable laws and regulations, including ensuring that the management of the company is free from conflicts of interest. For this purpose, the Company

dari benturan kepentingan. Untuk itu, Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hubungan afiliasi antar Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. Bentuk hubungan afiliasi termasuk di antaranya hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda, atau hubungan istimewa yang muncul sebagai akibat dari hubungan pihak berelasi.

Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat sebagai berikut:

has a policy regarding affiliate relationships among the Board of Commissioners, Directors, or with the Main/Controlling Shareholders. Forms of affiliate relationships include family relationships up to the third degree, both in the direct line and collateral lines or relationships by marriage, or special relationships that arise as a result of related party relationships.

Affiliate relationships of members of the Board of Commissioners with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors as well as Main/Controlling Shareholders can be seen as follows:

Nama dan Jabatan Name and Title	Hubungan Afiliasi Affiliation		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/Pengendali Main/Controlling Shareholders
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Ricky Joseph Pesik Komisaris Utama President Commissioner	x	x	x
H. Irzani, M.Pd, M.Si Komisaris Commissioner	x	x	x
Ir. Zainal Mutaqin, MM Komisaris Commissioner	x	x	x
Ulin Ni'am Yusron Komisaris Independen Independent Commissioner	x	x	x
Direksi Board of Directors			
Ari Respati Direktur Utama President Director	x	x	x
Ahmad Fajar Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko Finance, Strategy, and Risk Management Director	x	x	x
Wenda Ramadya Nabel Direktur SDM dan Legal Compliance Human Resources and Legal Compliance Director	x	x	x
Ema Widiastuti Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director	x	x	x
Troy Reza Warokka Direktur Operasi Operations Director	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = there is a relationship | x = there is no relationship



Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut disampaikan hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain di luar Perusahaan sepanjang tahun 2023.

Disclosure of Concurrent Position of the Board of Commissioners and Board of Directors

The management relationships of members of the Board of Commissioners and Board of Directors in other companies outside the Company throughout the year 2023.

Nama dan Jabatan Name and Title	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management at Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Board of Directors	Jabatan pada Institusi Lain yang Memiliki Hubungan Afiliasi Positions in Other Institutions that have Affiliation
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Ricky Joseph Pesik Komisaris Utama President Commissioner	x	x	x
H. Irzani, M.Pd, M.Si Komisaris Commissioner	x	x	x
Ir. Zainal Mutaqin, MM Komisaris Commissioner	x	x	x
Ulin Ni'am Yusron Komisaris Independen Independent Commissioner	x	x	x
Direksi Board of Directors			
Ari Respati Direktur Utama President Director	x	x	x
Ahmad Fajar Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko Finance, Strategy, and Risk Management Director	x	x	x
Wenda Ramadya Nabel Direktur SDM dan Legal Compliance Human Resources and Legal Compliance Director	x	x	x
Ema Widiastuti Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director	x	x	x
Troy Reza Warokka Direktur Operasi Operations Director	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = there is a relationship | x = there is no relationship

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi merupakan salah satu bentuk transparansi Perusahaan. Adapun informasi terkait kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi di Perusahaan maupun Emiten/Perusahaan Publik lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Disclosure of Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors

Disclosure of share ownership by the Board of Commissioners and Directors is one form of transparency for the Company. Information related to share ownership by the Board of Commissioners and Directors in the Company as well as other Issuers/Public Companies can be seen in the following table:

Nama dan Jabatan Name and Title	Saham ITDC ITDC Shares		Saham Perusahaan Lain (>5%) Other Company Shares (>5%)	
	Nilai (Rp) Value (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)	Nilai (Rp) Value (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Ricky Joseph Pesik Komisaris Utama President Commissioner	Nihil None	-	Nihil None	-
H. Irzani, M.Pd, M.Si Komisaris Commissioner	Nihil None	-	Nihil None	-
Ir. Zainal Mutaqin, MM Komisaris Commissioner	Nihil None	-	Nihil None	-
Ulin Ni'am Yusron Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	-	Nihil None	-
Direksi Board of Directors				
Ari Respati Direktur Utama President Director	Nihil None	-	Nihil None	-
Ahmad Fajar Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko Finance, Strategy, and Risk Management Director	Nihil None	-	Nihil None	-
Wenda Ramadya Nabel Direktur SDM dan Legal Compliance Human Resources and Legal Compliance Director	Nihil None	-	Nihil None	-
Ema Widiastuti Direktur Pengembangan Bisnis Business Development Director	Nihil None	-	Nihil None	-
Troy Reza Warokka Direktur Operasi Operations Director	Nihil None	-	Nihil None	-



Hingga akhir tahun 2023, ITDC tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dan tidak memiliki kebijakan kepemilikan saham oleh manajemen. Oleh karena itu, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

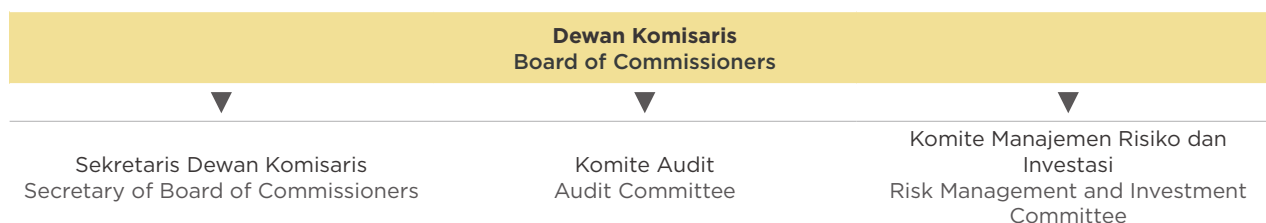
Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan, pemberian saran maupun rekomendasi atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dengan dibantu oleh Organ dan Komite Pendukung di bawah Dewan Komisaris. Di tahun 2023, Dewan Komisaris telah memiliki Organ Pendukung, yakni Sekretaris Dewan Komisaris, maupun Komite di bawah Dewan Komisaris, yakni Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko dan Investasi.

Until the end of 2023, ITDC has never conducted an Initial Public Offering (IPO) and does not have a management share ownership policy. Therefore, there are no members of the Board of Commissioners and Directors who own shares in the Company that can be presented in this Annual Report.

Supporting Organs of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities in supervising, providing advice, and making recommendations on the management of the Company carried out by the Board of Directors, assisted by Supporting Bodies and Committees under the Board of Commissioners. In 2023, the Board of Commissioners had Supporting Bodies, namely the Secretary of the Board of Commissioners, as well as Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee and the Risk Management and Investment Committee.



Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsinya terkait pengawasan pengelolaan Perusahaan dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas untuk membantu memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris juga memiliki peran penting dalam memastikan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secretary of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners performs its supervisory function over the management of the Company with the assistance of a Secretary to the Board of Commissioners, whose duty is to provide administrative and secretarial support to the Board of Commissioners to facilitate the execution of their tasks. The Secretary to the Board of Commissioners also plays a crucial role in ensuring that the Board of Commissioners applies GCG principles in accordance with best practices and applicable laws and regulations.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Di tahun 2023, Perusahaan telah menunjuk Annisa Siswanti sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris 08/DEKOM/Kep/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

In 2023, the Company appointed Annisa Siswanti as Secretary of the Board of Commissioners based on Board of Commissioners Decree 08/DEKOM/Kep/XII/2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 15/KEP/DEKOM/X/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisaris 08/DEKOM/Kep/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia tanggal 31 Oktober 2023.

of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dated December 1, 2021, as amended by the Board Decree Commissioner Number 15/KEP/DEKOM/X/2023 concerning Amendments to the Decree of the Board of Commissioners 08/DEKOM/Kep/XII/2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia on October 31, 2023.

Annisa Siswanti
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tanggal Lahir Date of Birth	Jakarta, 8 Agustus 1990 Jakarta, August 8, 1990
Usia Age	33 tahun 33 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris 08/DEKOM/Kep/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia tanggal 1 Desember 2021 Board of Commissioners' Decree 08/DEKOM/Kep/XII/2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dated December 1, 2021
Riwayat Pendidikan Education Background	• Sarjana Hukum – Universitas Padjadjaran (2013) • Magister Hukum – Universitas Gadjah Mada (2018) • Bachelor of Law, Padjadjaran University (2013) • Master of Laws, Gadjah Mada University (2018)
Pengalaman Kerja Working Experience	• Sekretaris Dewan Komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Desember 2021-sekarang) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (November 2020-November 2021) • Staf Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk (November 2017-November 2020) • Analis Hukum pada Biro Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Maret 2015-Juni 2020) • Subkoordinator Hukum pada Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Juni 2020-sekarang) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (December 2021-present) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (November 2020-November 2021) • Staff of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk (November 2017-November 2020) • Legal Analyst at the Legal Bureau of the Ministry of State-Owned Enterprises (March 2015-June 2020) • Legal Sub-Coordinator at the Public Relations and Strategic Support Facilitation Bureau of the Ministry of State-Owned Enterprises (June 2020-present)



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/KEP/DEKOM/VII/2022 tentang Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
8. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
9. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain;
10. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Sekretaris Dewan Komisaris untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat membantu tugasnya dalam mendukung Dewan Komisaris. Namun demikian, di tahun 2023,

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

Based on the Regulation of the Minister of SOEs Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises and Decree of the Board of Commissioners Number 02/KEP/DEKOM/VII/2022 concerning Functions, Duties, Authority and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners of PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), the duties and responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners are as follows:

1. Preparing meetings, including briefing sheets of the Board of Commissioners;
2. Make minutes of the meeting of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
3. Administering the documents of the Board of Commissioners, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare the Draft for the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
5. Prepare the Draft for the Reports of the Board of Commissioners;
6. Ensure that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies GCG principles;
7. Provide information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
8. Coordinate the members of the Committee, if necessary, in order to streamline the duties of the Board of Commissioners;
9. As a liaison of the Board of Commissioners with other parties;
10. Carry out other duties of the Board of Commissioners.

Competency Development of the Secretary of the Board of Commissioners

The Company facilitates a competency development program for the Secretary of the Board of Commissioners to increase insight and knowledge to help in their duties in supporting the Board of Commissioners. However, in 2023, the

Sekretaris Dewan Komisaris tidak melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi melalui agenda Perusahaan. Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi dilakukan secara mandiri sesuai dengan skill dan bidang industri terkait.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Selama tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk penyusunan Surat Dewan Komisaris, yakni sebagai berikut:

Secretary to the Board of Commissioners did not carry out training and competency development activities through the Company's agenda. Training and competency development activities are carried out independently according to skills and related industrial fields.

Report on Task Implementation in 2023

Throughout 2023, the Secretary to the Board of Commissioners has carried out their duties and responsibilities in the form of drafting Board of Commissioners' Letters, as follows:

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
1	IM.01/KA/I/2023	7 Maret March 7	Telaah KA Aspek Keuangan Laporan Manajemen Tahun 2022 Unaudited KA Review of Financial Aspects of 2022 Unaudited Management Report
2	S-01/KA/ITDC/II/2023	15 Februari February 15	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Triwulan IV Tahun 2022 Submission of Audit Committee Duties Implementation Report for Quarter IV 2022
3	S-02/KA/ITDC/II/2023	15 Februari February 15	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2022 Submission of Audit Committee Duties Implementation Report for 2022
4	S-03/KA/ITDC/II/2023	15 Februari February 15	Laporan Visitasi Mandalika Mandalika Visit Report
5	IM.01/KA/III/2023	1 Maret March 1	Telaah KA Evaluasi Pengendalian Intern Periode 2021-TW III 2022 10 Mar 2023 Review KA Internal Control Evaluation Period 2021-TW III 2022 March 10, 2023
6	IM.02/KA/III/2023	13 Maret March 13	Telaah atas Permohonan Direksi Sehubungan Rencana Tambahan Fasilitas Terkait Pembiayaan Hosting Fee WSBK 2023 Review of the Board of Directors' Application Regarding Plans for Additional Facilities Related to WSBK Hosting Fee Financing 2023
7	IM.03/KA/IV/2023	6 April April 6	Telaah KA Progress Golo Mori dan Rekomposisi PMN 2021 Study of the KA Golo Mori Progress and 2021 PMN Recomposition
8	S-04/KA/ITDC/IV/2023	28 April April 28	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Triwulan I Tahun 2023 Submission of Audit Committee Duties Implementation Report for Quarter I 2023
9	IM.04/KA/IV/2023	29 April April 29	Aspek keuangan TW1 TW 1 Financial Aspect
10	IM.05/KA/V/2023	31 Mei May 31	Telaah KA Tentang PMN 2023 ITDC KA Review About PMN 2023 ITDC
11	IM.07/KA/V/2023	31 Mei May 31	Telaah KA Atas Laporan Kegiatan IA Tahun 2022 KA's Review of the 2022 IA Activity Report



No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
12	S-05/KA/ITDC/VI/2023	12 Juni June 12	Rekomendasi Komite Audit atas penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasian ITDC dan Laporan Keuangan PUMK ITDC tahun buku 2023 Recommendation of the Audit Committee on the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the ITDC Consolidated Financial Report and ITDC PUMK Financial Report for the 2023 financial year
13	IM.08/KA/VI/2023	14 Juni June 14	Telaah KA tentang laporan keuangan konsolidasian auditan ITDC tahun buku 2022 KA's review of ITDC's audited consolidated financial statements for the 2022 financial year
14	IM.09/KA/VII/2023	23 Juni June 23	Telaah KA tentang Pengajuan Penyesuaian RAB dan Perpanjangan Jangka Waktu Penarikan KIE NIA Tranche E KA's review of the Submission of RAB Adjustments and Extension of the KIE NIA Tranche E Withdrawal Period
15	IM.10/KA/VII/2023	13 Juli July 13	Telaah KA tentang pengelolaan aset tetap ITDC KA review of ITDC fixed asset management
16	IM.11/KA/VII/2023	13 Juli July 13	Telaah KA tentang keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan tenant KA's review of delays in submitting tenant audited financial reports
17	IM.12/KA/VII/2023	13 Juli July 13	Telaah KA tentang keberlangsungan usaha (going concern) ITDC KA's review of ITDC's business continuity (going concern).
18	IM.13/KA/VII/2023	13 Juli July 13	Telaah KA Tentang Reviu Tambahan PMN Tahun Anggaran 2023 ITDC KA Review of Additional PMN Review for Fiscal Year 2023 ITDC
19	IM.14/KA/VII/2023	24 Juli July 24	Telaah KA Atas Laporan Realisasi Kegiatan Internal Audit (IA) Triwulan II Tahun 2023 KA Review of the Report on the Realization of Internal Audit (IA) Activities for the Second Quarter of 2023
20	IM.15/KA/VII/2023	31 Juli July 31	Telaah KA tentang aspek keuangan laporan manajemen semester I 2023 ITDC KA's review of the financial aspects of ITDC's first semester 2023 management report
21	IM.16/KA/VII/2023	31 Juli July 31	Revisi RKAP RKAP Revision
22	S-06/KA/ITDC/VIII/2023	31 Agustus August 31	Rekomendasi Komite Audit atas Kaji Ulang Kinerja SPI Audit Committee Recommendations for SPI Performance Review
23	S-07/KA/ITDC/VIII/2023	31 Agustus August 31	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Triwulan II Tahun 2023 Submission of Audit Committee Duties Implementation Report for Quarter II 2023
24	IM.17/KA/IX/2023	5 Oktober October 5	Telaah Kunjungan KA ke The Mandalika 6-7 September 2023 KA Visit Study to The Mandalika September 6-7, 2023
24	IM.17/KA/X/2023	5 Oktober October 5	Telaah Kunjungan KA ke The Mandalika 6-7 September 2023 KA Visit Study to The Mandalika September 6-7, 2023
25	IM.18/KA/X/2023	12 Oktober October 12	Telaah Kunjungan KA ke The Nusa Dua 29 September 2023 KA Visit Study to The Nusa Dua September 29, 2023

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
26	IM.19/KA/X/2023	19 Oktober October 19	Telaah Kunjungan KA ke The Golo Mori 30 September 2023 KA Visit Study to The Golo Mori, September 30, 2023
27	IM.20/KA/X/2023	26 Oktober October 26	Telaah Kebijakan Sistem Teknologi Informasi Information Technology System Policy review
28	IM.21/KA/X/2023	24 Oktober October 24	Telaah Komite Audit atas Laporan Manajemen Triwulan III 2023 Audit Committee review of Management Report for Quarter III 2023
29	IM.22/KA/XI/2023	7 November November 7	Telaah Komite Audit atas RKAP tahun 2024 Audit Committee Review of 2024 RKAP
30	IM.23/KA/XII/2023	15 Desember December 15	Telaah Komite Audit atas Kinerja SPI tahun 2023 Audit Committee Review of SPI Performance in 2023

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris

Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Komite Manajemen Risiko dan Investasi didasarkan atas komitmen pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris.

Performance Evaluation and Assessment of the Secretary of the Board of Commissioners by the Board of Commissioners

The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Risk and Investment Management Committee is based on the commitment to the implementation of the duties of the Secretary of the Board of Commissioners.



Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi untuk memastikan bahwa Perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika Perusahaan. Komite Audit juga bertugas untuk memeriksa laporan dari fungsi Audit Internal dan memberikan argumen mendasar terkait pengendalian internal yang dijalankan di seluruh unit Perusahaan, menelaah laporan kepada pihak luar, serta mengevaluasi sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Komitmen Komite Audit dijalankan dengan fokus pada efektivitas corporate governance, pengendalian internal, *risks assessment*, dan pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan.

Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta tanggal 14-8-2008 Nomor 52 yang dibuat di hadapan Dr. Evi Susanti Panjaitan, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Badung, yang mana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta tanggal 2-6-2023 Nomor 02 dibuat di hadapan Desman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Kriteria dan Pengangkatan Anggota Komite Audit

Komite Audit diangkat berdasarkan persyaratan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Komite Audit diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee

The Audit Committee is a supporting body of the Board of Commissioners tasked with assisting the Board in overseeing the implementation of the duties and functions of the Board of Directors to ensure that the Company is managed with sound management in accordance with GCG principles, inspired by the Company's values and ethics. The Audit Committee is also responsible for reviewing reports from the Internal Audit function and providing fundamental arguments related to internal controls implemented across all Company units, examining reports to external parties, and evaluating the whistleblowing system. The Audit Committee's commitment is carried out with a focus on the effectiveness of corporate governance, internal controls, risk assessment, and overall Company management.

The establishment of the Audit Committee refers to applicable laws and regulations, such as:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
4. Company Articles of Association with Deed dated 14-8-2008 Number 52 made in the presence of Dr. Evi Susanti Panjaitan, Bachelor of Laws, Notary in Badung Regency, which has undergone several changes, the latest with Deed dated 2-6-2023 Number 02 made before Desman, Bachelor of Laws, Master of Humanities, Notary domiciled in the Administrative City of North Jakarta.

Criteria and Appointment of Audit Committee Members

The Audit Committee is appointed based on the competency requirements and the needs of the Company by referring to the applicable laws and regulations, and the Company's Articles of Association. The Audit Committee is appointed by and directly reports to the Board of Commissioners.

Masa Jabatan Komite Audit

Anggota Komite Audit yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan sesuai dengan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS. Sementara, masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang (1) satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan Keanggotaan dan Profil Anggota Komite Audit

Per 31 Desember 2023, komposisi Komite Audit Perusahaan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang juga merupakan Komisaris Independen Perusahaan, dan 2 (dua) orang anggota Komite. Adapun susunan dan komposisi anggota Komite Audit dapat dilihat sebagai berikut:

Audit Committee Term of Office

Audit Committee members who also serve as members of the Board of Commissioners have a term of office corresponding to their appointment as members of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the term of office for Audit Committee members who are not from the Board of Commissioners is 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Membership Structure and Profile of Audit Committee Members

As of December 31, 2023, the composition of the Company's Audit Committee consisted of 3 (three) people consisting of 1 (one) Chairman who is also an Independent Commissioner of the Company, and 2 (two) Committee members. The composition of the Audit Committee members can be seen as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Work Period
Ulin Ni'am Yusron	Ketua Chair	Keputusan Dewan Komisaris No. 14.1/KEP/DEKOM/X/2023 Board of Commissioners Decree No. 14.1/KEP/DEKOM/X/2023	2023 - masa jabatan Kom. Independen berakhir 2023 - end of Independent Commissioner term of office	Ke-1 First
Selvy Monalisa	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No.07/Kep/DEKOM/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Board of Commissioners Decree No.07/Kep/DEKOM/X/2021 dated October 1, 2021	2021- Okt 2023 2021-Oct 2023	Ke-2 Second
Soniwell	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No.07/Kep/DEKOM/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Board of Commissioners Decree No.07/Kep/DEKOM/X/2021 dated October 1, 2021	2021- Okt 2023 2021-Oct 2023	Ke-2 Second
Dayan Hakim N.S	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP/DEKOM/X/2023 Board of Commissioners Decree No. 13/KEP/DEKOM/X/2023	Okt 2023 - 2026 Oct 2023-2026	Ke-1 First
Taufik Hidayat	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP/DEKOM/X/2023 Board of Commissioners Decree No. 13/KEP/DEKOM/X/2023	Okt 2023 - 2026 Oct 2023-2026	Ke-1 First



Ulin Ni'am Yusron
Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil Ulin Ni'am Yusron selaku Ketua Komite Audit dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Ulin Ni'am Yusron as the Chairman of the Audit Committee can be found in the Profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Selvy Monalisa
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tanggal Lahir Date of Birth	Jakarta, 6 September 1974 Jakarta, September 6, 1974
Usia Age	49 tahun 49 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/Kep/DEKOM/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Board of Commissioners' Decree No. 05/Kep/DEKOM/X/2021 dated October 1, 2021
Riwayat Pendidikan Education Background	- Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia (Scholarships dari SANWA Bank, Japan dan Supersemar Foundation) (1993-1997) - Center for Japanese Studies - Nanzan University Nagoya, Japan (Full Scholarships dari TOKAI Bank, Tokyo, Japan) (1997-1998) - Master of Business Administration (MBA) - Melbourne Business School (Full Scholarships from AusAID/Australian Agency for International Development) (2001-2002) - Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (Scholarships from SANWA Bank, Japan and Supersemar Foundation) (1993-1997) - Center for Japanese Studies, Nanzan University Nagoya, Japan (Full Scholarships from TOKAI Bank, Tokyo, Japan) (1997-1998) - Master of Business Administration (MBA), Melbourne Business School (Full Scholarships from AusAID/Australian Agency for International Development) (2001-2002)

Pengalaman Kerja
 Working Experience

- Wakil Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan (CFO), Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI) (September 2021-sekarang)
- Komite Audit ITDC (Oktober 2018-sekarang)
- Dosen di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (September 1998-sekarang)
- Trainer audit dan akunting untuk PPA FEB UI, PT Sinergi Solusi Bisnis, BCA, Experd Consultant, Millenium Challenge Account Indonesia, Indosurya Inti Finance, PT Djarum (Mei 2009-sekarang)
- Co-owner, Director of Finance & General Affairs PT Global One Solusindo (Mei 2009-sekarang)
- Training Instructor, BRI (Juli 2018-sekarang)
- Training Instructor of CPA, The Indonesia Capital Market Institute (Januari 2013-2019)
- Training Instructor, BNI (Januari 2011-2019)
- Co-Owner, Managing Director PT Qosakata Ibunda (Mei 2009-Agustus 2017)
- CEO PT Salemba Emban Patria (Maret 2003-April 2009)
- Internal Auditor, FEB UI (Juli 2000-Januari 2001)
- Auditor, Ernst and Young Indonesia (September 1998-Juni 2000)
- Deputy Head of Administration and Finance (CFO), Economic and Community Investigation Institute (LPEM FEB UI) (September 2021-present)
- ITDC Audit Committee (October 2018-present)
- Lecturer in the Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (September 1998-present)
- Audit and accounting trainer for PPA FEB UI, PT Synergy Business Solutions, BCA, Experd Consultant, Millenium Challenge Account Indonesia, Indosurya Inti Finance, PT Djarum (May 2009-present)
- Co-owner, Director of Finance & General Affairs PT Global One Solusindo (May 2009-present)
- Training Instructor, BRI (July 2018-present)
- Training Instructor of CPA, The Indonesia Capital Market Institute (January 2013-2019)
- Training Instructor, BNI (January 2011-2019)
- Co-owner, Managing Director of PT Qosakata Ibunda (May 2009-August 2017)
- CEO of PT Salemba Emban Patria (March 2003-April 2009)
- Internal Auditor, FEB UI (July 2000-January 2001)
- Auditor, Ernst and Young Indonesia (September 1998-June 2000)

Sertifikasi yang Dimiliki
 Certifications Owned

-

Soniwell
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tanggal Lahir Date of Birth	Jakarta, 11 Mei 1988 Jakarta, May 11, 1988
Usia Age	34 tahun 34 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07/Kep/DEKOM/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Board of Commissioners' Decree No. 05/Kep/DEKOM/X/2021 dated October 1, 2021
Riwayat Pendidikan Education Background	• Sarjana Ekonomi, Akuntansi - Universitas Indonesia (2010) • Master of Management, Finance - Universitas Indonesia (2012) • Bachelor of Economics, Accounting, University of Indonesia (2010) • Master of Management, Finance, University of Indonesia (2012)



Pengalaman Kerja Working Experience	• Komite Audit ITDC (Oktober 2018-sekarang) • Consultant, AJ Capital Advisory (November 2016-sekarang) • Senior Consultant, Digital Transformation, Pinnacle Digital Consulting (Januari 2016-November 2016) • Consultant, IRBA Group (Juli 2012-Desember 2015) • ITDC Audit Committee (October 2018-present) • Consultant, AJ Capital Advisory (Nov 2, 2016-present) • Senior Consultant, Digital Transformation, Pinnacle Digital Consulting (January 4, 2016-November 1, 2016) • Consultant, IRBA Group (July 24, 2012-December 19, 2015)
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications Owned	-

Dayan Hakim Natigor S
Anggota Komite Audit Sejak 16 Oktober 2023
Member of Audit Committee since October 16, 2023

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tanggal Lahir Date of Birth	Jakarta, 19 Agustus 1967 Jakarta, August 19, 1967
Usia Age	56 tahun 56 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP/DEKOM/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Board of Commissioners Decree Board of Commissioners Decree No. 13/KEP/DEKOM/X/2023 dated October 16, 2023
Riwayat Pendidikan Education Background	• (2010) : S3 Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Padjadjaran • 1997 : S2 Konsentrasi Manajemen Keuangan, FEB Universitas Indonesia • 1995 : S1 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Program Ekstension, Universitas Indonesia • 1989 : Diploma III Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) • (2010) : Doctoral Degree in Management Science, Padjadjaran University • • 1997 : Masters Degree in Financial Management Concentration, FEB University of Indonesia • 1995 : Bachelor Degree in Management, Faculty of Economics Extension Program, University of Indonesia • 1989 : Diploma III in Accounting, State College of Accountancy (STAN)

Dayan Hakim Natigor S

Anggota Komite Audit Sejak 16 Oktober 2023

Member of Audit Committee since October 16, 2023

Pengalaman Kerja
Working Experience

- 2022-sekarang : Kepala Satuan Penjaminan Mutu Universitas Indonesia Membangun (INABA)
- 2011-sekarang : Dosen Tetap untuk Program MM Universitas Indonesia Membangun (INABA) NIDN 041908670005
- 2021 - 2022 : Head Internal Audit pada Group PT ANTAREA TIGRIS PRATAMA, Jakarta
- 2019 - 2021 : Finance Director pada PT DHARMA LAUTAN NUSANTARA, subsidiary of PT DJAKARTA LLOYD (Persero)
- 2018 - 2019 : GM Finance and Administration pada PT PANN MARITIME FINANCE, subsidiary of PT PANN (Persero)
- 2017 - 2017 : Director of Finance and Administration PT BRINGIN INDOTAMA SEJAHTERA FINANCE (BRIngin Finance) subsidiary of PT Bank BRI (Persero)
- 2016 - 2017 : Director pada PT DAYA LAUT UTAMA, subsidiary PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)
- 2013 - 2016 : Head Internal Audit pada PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)
- 1989 - 2013 : Fungsional Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 2022-present : Head of Quality Assurance Unit, University of Indonesia Developing (INABA)
- 2011-present : Permanent Lecturer for MM Program, University of Indonesia Developing (INABA) NIDN 041908670005
- 2021 - 2022 : Head of Internal Audit at PT ANTAREA TIGRIS PRATAMA Group, Jakarta
- 2019 - 2021 : Finance Director at PT DHARMA LAUTAN NUSANTARA, subsidiary of PT DJAKARTA LLOYD (Persero)
- 2018 - 2019 : GM Finance and Administration at PT PANN MARITIME FINANCE, subsidiary of PT PANN (Persero)
- 2017 - 2017 : Director of Finance and Administration PT BRINGIN INDOTAMA SEJAHTERA FINANCE (BRIngin Finance) subsidiary of PT Bank BRI (Persero) •
- 2016 - 2017 : Director at PT DAYA LAUT UTAMA, subsidiary PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)
- 2013 - 2016 : Head of Internal Audit at PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)
- 1989 - 2013: Functional Auditor at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)

Sertifikasi yang Dimiliki
Certifications Owned

Certified in Financial Risk Management by American Academy of Financial Management
 Business Continuity Management Certified Professional - Training
 Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
 Certified in Financial Risk Management by American Academy of Financial Management
 Business Continuity Management Certified Professional - Training
 Chartered Accountant from Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Taufik Hidayat

Anggota Komite Audit Sejak 16 Oktober 2023

Member of Audit Committee since October 16, 2023

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia

Tanggal Lahir
Date of BirthPadang, 26 Juni 1975
Padang, June 26, 1975**Usia**
Age49 tahun
49 years old**Domisili**
Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Penunjukan
Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 13/KEP/DEKOM/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023
 Board of Commissioners Decree No. 13/KEP/DEKOM/X/2023 dated October 16, 2023



Riwayat Pendidikan Education Background	• (1995) : S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia • (2002) : S2 Konsentrasi Pasar Modal, Magister Manajemen FEB UI. • (2011) : S3 Ilmu Akuntansi, Pasasarjana Ilmu Akuntansi FEB UI. • (1995) : Bachelor's degree in Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia • (2002) : Master's degree in Capital Markets, Master of Management FEB UI. • (2011) : Doctoral Degree in Accounting Science, Graduate School of Accounting Science, FEB UI.
Pengalaman Kerja Working Experience	• (1999-2001) : Auditor pada Deloitte Touche & Tohmatsu International • (2002-sekarang) : Dosen Tetap FEB UI • (2007-2009) : Kepala Laboratorium Akuntansi FEB UI. • (2009-2010) : Kepala Divisi Konsultasi Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI. • (2013-2021) : Komite Audit pada PT Asuransi Bintang Tbk. • (2014-2019) : Komite Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia – Tim Teknis • (2016-2023) : Komite Audit pada PT Ekadharma International Tbk. • (2018-2023) : Komite Audit pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. • (2023-sekarang) : Komite Audit pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia / ITDC • (1999-2001) : Auditor at Deloitte Touche & Tohmatsu International • (2002-present) : Permanent Lecturer at FEB UI • (2007-2009) : Head of the FEB UI Accounting Laboratory. • (2009-2010) : Head of the Consultation Division of the Accounting Development Center (PPA) FEB UI. • (2013-2021) : Audit Committee at PT Asuransi Bintang Tbk. • (2014-2019) : Bank Indonesia Financial Accounting Policy Committee – Technical Team • (2016-2023) : Audit Committee at PT Ekadharma International Tbk. • (2018-2023) : Audit Committee at PT Adhi Karya (Persero) Tbk. • (2023-present) : Audit Committee at PT Indonesian Tourism Development / ITDC
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications Owned	• 2015 Sertifikasi Dosen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. • 2013 Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) • 2015 Lecturer Certification from the Indonesian Ministry of Education and Culture. • 2013 Chartered Accountant from the Indonesian Accountants Association (IAI)

Pedoman Kerja Komite Audit

Dewan Komisaris telah menetapkan Pedoman Kerja/ Piagam Komite Audit yang secara berkala ditinjau dan diperbarui sesuai dengan perkembangan skala bisnis dan organisasi Perusahaan. Piagam Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KEP/DEKOM/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditandatangani oleh Komisaris Utama. Piagam tersebut yang mengatur diantaranya sebagai berikut:

1. Visi dan Misi
2. Fungsi
3. Tanggung Jawab
4. Tugas Komite Audit
5. Hubungan dengan Pihak Terkait
6. Keanggotaan Komite Audit
7. Persyaratan Anggota
8. Rapat
9. Remunerasi dan Anggaran
10. Kode Etik
11. Pelaporan
12. Evaluasi Kinerja

Audit Committee Work Guidelines

The Board of Commissioners has established Audit Committee Work Guidelines/Charter which are regularly reviewed and updated in accordance with developments in the Company's business scale and organization. The Audit Committee Charter was established through Board of Commissioners Decree No. 03/KEP/DEKOM/VIII/2021 dated August 5, 2021, concerning the Audit Committee Charter signed by the President Commissioner. The charter regulates the following:

1. Vision and Mission
2. Functions
3. Responsibilities
4. Audit Committee Duties
5. Relationship with Related Parties
6. Audit Committee Membership
7. Member Requirements
8. Meetings
9. Remuneration and Budget
10. Code of Ethics
11. Reporting
12. Performance Evaluation

Tugas Pokok, Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas secara objektif dan profesional berdasarkan arahan Dewan Komisaris. Tugas pokok Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit, antara lain:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Menelaah pengaduan whistleblowing Perusahaan;
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas Dewan Komisaris lainnya;
7. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi Laporan Keuangan tahunan Perusahaan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Terkait Laporan Keuangan
 - a. Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku;
 - b. Melakukan *review* atas kepatuhan laporan keuangan terhadap standar dan kebijakan akuntansi serta konsistensi informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan;
 - c. Melakukan pengawasan atas kegiatan audit eksternal, termasuk melakukan *assessment* mengenai kualitas jasa audit yang dilakukan dan merekomendasikan kewajaran *fee* yang

Main Duties, Roles, and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee performs its duties objectively and professionally based on the directions of the Board of Commissioners. The main tasks of the Audit Committee, as outlined in the Audit Committee Charter, include the following:

1. Assisting the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of internal auditors and external auditors;
2. Assessing the implementation of activities and results of audits carried out by the Internal Audit Unit (SPI) and external auditors;
3. Provide recommendations regarding the improvement of the implementation of the internal control system;
4. Ensure adequate procedures to assess all information issued by the Company,
5. Reviewing the Company's whistleblowing complaint;
6. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners;
7. Assisting the Board of Commissioners in providing input to improve the quality of transparency of the Company's annual Financial Statements; and
8. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners as long as it is within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners.

The Roles and Responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. Related to Financial Statements
 - a. Supervise the process of making financial reports focused on compliance with applicable accounting standards and policies;
 - b. Reviewing the compliance of financial reports with accounting standards and policies, and the consistency of information issued by the Company;
 - c. Supervise external audit activities, including providing an assessment of the quality of audit services and recommending the reasonableness of service fees charged by



dibebankan auditor eksternal, serta meminta laporan-laporan yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- Laporan keuangan tahunan, semesteran, dan triwulanan;
- Laporan kinerja operasional tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan;
- Laporan ikhtisar aktivitas audit internal, termasuk temuan signifikan yang diidentifikasi dalam penugasan audit internal;

2. Terkait Manajemen Pengendalian Perusahaan
 - a. Melakukan evaluasi atas pengendalian Perusahaan, guna memperkecil kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap cakupan audit internal dan audit eksternal dalam rangka memastikan bahwa semua risiko utama dan bentuk pengendaliannya telah dipertimbangkan secara seksama oleh para auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal.
 - c. Melakukan pengawasan proses manajemen risiko dan evaluasi pengendalian internal Perusahaan untuk meminimalkan potensi terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap cakupan audit internal dan audit eksternal untuk memastikan bahwa semua risiko utama dan bentuk pengendaliannya telah dipertimbangkan secara saksama oleh para auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal;
 - e. Memastikan bahwa jajaran manajemen telah melaksanakan pengendalian risiko sesuai dengan rekomendasi dari para auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal;
3. Terkait dengan GCG
 - a. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan nilai dan sasaran perusahaan dan mensosialisasikannya kepada para pemangku kepentingan;
 - b. Memastikan terpenuhinya aspek akuntabilitas pada setiap proses bisnis Perusahaan;

external auditors; and request reports that include but not limited to:

- Annual, semi-annual, and quarterly financial reports;
- Annual operational performance reports, semiannual, quarterly and monthly;
- Summary report of internal audit activity, including the identified significant findings in internal audit assignments;

2. Related to Company Control Management
 - a. Evaluate the Company's control, in order to minimize the risk of and the resulting impacts;
 - b. Carry out monitoring of coverage internal audit and external audit in order to ensure that all major risks and forms control has been carefully considered carefully by auditors, both internal auditors as well as external auditors.
 - c. Supervise the risk management process and evaluation of the Company's internal control to minimize the potential risk and impact;
 - d. Monitor the scope of the audit internal and external audits to ensure that all major risks and forms control has been carefully considered carefully by the auditors, both internal auditors as well as external auditors;
 - e. Ensure that management has carried out risk control in accordance with recommendations from auditors, both internal auditors as well as external auditors;
3. Related to GCG
 - a. Ensure that the Board of Directors has determined the values and company goals and socialize them to stakeholders;
 - b. Ensure the fulfillment of accountability aspects in each of the Company's business processes;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap proses dan implementasi GCG di Perusahaan;
 - d. Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan GCG di Perusahaan; dan
 - e. Memonitor kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku bagi Perusahaan
4. Terkait dengan *whistleblowing system* Perusahaan Dewan Komisaris dapat menugaskan Komite Audit untuk menindaklanjuti pengaduan yang berasal dari dalam dan luar Perusahaan.

Informasi Tentang Pembagian Tugas antar anggota Komite Audit

Tugas-tugas Komite Audit dilaksanakan bersama-sama (kolektif) tanpa ada pembagian tugas Komite Audit.

Independensi Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional dan independen, bertindak berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi anggota Komite Audit diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yakni:

1. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan;
2. Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi asal anggota Komite tersebut tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan; serta
3. Anggota Komite yang berasal dari luar perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan.

Seluruh anggota Komite Audit Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut.

- c. Carry out monitoring of the process and implementation of GCG in the Company;
- d. Monitor compliance with GCG policies in Company; and
- e. Monitor compliance with regulations laws and other regulations that apply to the Company.

4. Related to the Company's whistleblowing system the Board of Commissioners may assign the Audit Committee to follow up on complaints originating from inside and outside the Company.

Information on the Division of Duties Between Members of the Audit Committee

The duties of the Audit Committee are carried out together (collectively) without any division of duties of the Audit Committee.

Audit Committee Independence

The Audit Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, acting in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. The independence of the Audit Committee members is regulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, namely:

1. Do not have any personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company;
2. If any member of the Committee comes from a certain institution, the institution from which the member of the Committee is from may not provide services to of SOEs concerned; and
3. Committee members who come from outside the Company are prohibited from having blood family relations and by marriage to the third degree, either in a straight line or sideways with members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board and members of the Board of Directors of the Company.

All members of the Company's Audit Committee have met the independence requirements as referred to in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises.



Transparansi Hubungan Afiliasi Komite Audit

Transparency of Audit Committee Affiliation

Hubungan Afiliasi Affiliation	Ulin Ni'am Yusron (Ketua) (Chairman)	Selvy Monalisa (Anggota) (Member)	Soniwell (Anggota) (Member)
Dengan Anggota Dewan Komisaris With Members of the Board of Commissioners	x	x	x
Dengan Direksi With the Board of Directors	x	x	x
Dengan Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali With Indonesian Government as Main/ Controlling Shareholders	x	x	x

Program Peningkatan Kompetensi

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Komite Audit untuk menambah wawasan serta pengetahuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi Komite Audit dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Improvement Program

The Company facilitates a competency development program for the Audit Committee to enhance their knowledge and skills in carrying out their duties and responsibilities. Information regarding the Audit Committee's training and competency development activities can be found in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu bulan sekali atau sesuai ketentuan rapat minimal Dewan Komisaris. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota di mana hasil keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee holds meetings at least once a month or as determined by the minimum meeting provisions of the Board of Commissioners. Audit Committee meetings may be held if attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of members, where decisions are taken by consensus.

Di tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan 60 kali rapat internal maupun rapat yang diselenggarakan bersama Komite Manajemen Risiko dan Investasi. Informasi mengenai risalah rapat Komite Audit bersama Komite Manajemen Risiko dan Investasi, serta rekapitulasi kehadiran Komite Audit dalam rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

In 2023, the Audit Committee held 60 internal meetings and meetings held together with the Risk and Investment Management Committee. Information on the minutes of the Audit Committee meetings together with the Risk and Investment Management Committee, and a recapitulation of the attendance of the Audit Committee in these meetings is as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit Tahun 2023

Recapitulation of the Attendance of the Audit Committee in 2023

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absenteeism	% Kehadiran % of Attendance
Ulin Ni'am Yusron (Ketua) Chairman	60	60	0	100
Selvy Monalisa (Anggota) Member	46	46	0	100
Soniwell (Anggota) Member	46	46	0	100
Dayan Hakim NS (Anggota sejak 1 Oktober 2023) Member since October 1, 2023	13	13	0	100
Taufik Hidayat (Anggota sejak 1 Oktober 2023) Member since October 1, 2023	13	13	0	100
Rata-Rata Kehadiran Average Attendance				100

Risalah Rapat Komite Audit Tahun 2023

Minutes of Audit Committee Meetings in 2023

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda
Rabu 11 Jan 2023 09:00 WIB Wednesday, January 11, 2023 09:00 WIB	Online	Progress Audit Eksternal Tahun Buku 2022 Induk Progress of External Audit for Main Financial Year 2022
Jumat 13 Jan 2023 09:00 WIB Friday, January 13, 2023 09:00 WIB	Online	Rapat Komite Audit (audit AIIB) Committee Audit Meeting (AIIB audit)
Jumat 20 Jan 2023 09:00 WIB Friday, January 20, 2023 09:00 WIB	Online	Kolektibilitas Piutang ITDC ITDC Receivables Collectibility
Jumat 20 Jan 2023 14:00 WIB Friday, January 20, 2023 14:00 WIB	Online	Pemenuhan Target LUDA 2022 LUDA 2022 Target Fulfillment
Rabu 25 Jan 2023 14:00 WIB Wednesday, January 25, 2023 14:00 WIB	Online	Monitoring Tindak Lanjut Follow-up Monitoring
Rabu 25 Jan 2023 09:00 WIB Wednesday, January 25, 2023 09:00 WIB	Online	Progress dan Evaluasi World Superbike 2023 Progress and Evaluation of 2023 World Superbike
Kamis 26 Jan 2023 08:00 WIB Thursday, January 26, 2023 08:00 WIB	Online	Update Top Ten Risk
Selasa, 7 Februari 2023 Tuesday, February 7, 2023	Online	Update Top Risk dan Improvement of Assessment
Kamis, 9 Februari 2023 Thursday, February 9, 2023	Online	Update Pembayaran Ganti Rugi HPL oleh Pemprov NTB Update on HPL Compensation Payments by the NTB Provincial Government



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda
Jumat 10 Februari 2023 Friday, February 10, 2023	Online	Progress Audit RSM Progress Audit RSM
Senin, 20 Februari 2023 Monday, February 20, 2023	Online	Progress dan Persiapan WSBK dan Pullman Progress and Preparation for WSBK and Pullman
Selasa, 21 Februari 2023 Tuesday, February 21, 2023	Online	Meeting Komite dengan MMN Committee Meeting with MMN
Selasa 7 Maret 2023 Tuesday, March 7, 2023	Online	Closing meeting audit eksternal thn buku 2022 Closing Meeting External Audit on 2022 Financial Year
Jumat 10 Maret 2023 Friday, March 10, 2023	Online	Update progres pembangunan Golo Mori Update progress on Golo Mori development
Selasa 14 Maret 2023 Tuesday, March 14, 2023	Online	Agenda 1: Progress Pendanaan (PMN, Bank Himbara, AIIB, LPEI, PPA, dan risiko yang melekat) Agenda 1: Financing Process (PMN, Himbara Bank, AIIB, LPEI, PPA, and inherent risks)
Senin 27 Maret 2023 Monday, March 27, 2023	Online	Evaluasi WSBK 2023 2023 WSBK evaluation
Selasa 4 April 2023 Tuesday, April 4, 2023	Online	Progress Audit Laporan Keuangan Progress on Financial Report Audit
Kamis 6 April 2023 Thursday, April 6, 2023	Online	Risk Management and Legal Update Risk Management and Legal Update
Rabu 12 April 2023 Wednesday, April 12, 2023	Online	Pembahasan Lanjutan WSBK 2023: Pencatatan Revenue dari DORNA Discussion Update on 2023 WSBK: Revenue from DORNA
Rabu 12 April 2023 Wednesday, April 12, 2023	Online	Pembahasan AOI Assessment GCG & Tindak Lanjutnya AOI Assessment GCG Discussion and Follow-up
Jumat, 14 April 2023 Friday, April 14, 2023	Online	Pemaparan PKPT Internal Audit 2023 PKPT 2023 Internal Audit Explanation
Senin, 17 April 2023 Monday, April 17, 2023	Online	Kinerja Keuangan Q1 2023 dan Proyeksi Arus Kas 2023 2023 Q1 Financial Performance and 2023 Cash Flow Projection
Jumat 5 Mei 2023 Friday, May 5, 2023	Online	Progress Audit Eksternal Tahun Buku 2022 Progress on External Audit in the 2022 Financial Year
Jumat 12 Mei 2023 Friday, May 12, 2023	Online	Kinerja keuangan dan operasi INP Q1 2023 Financial Performance and INP operational in 2023 Q1
Selasa 16 Mei 2023 Tuesday, May 16, 2023	Online	Kinerja keuangan dan operasi INU Q1 2023 Financial Performance and INU operational in 2023 Q1
Kamis, 25 Mei 2023 Thursday, May 25, 2023	Online	Rapat Komite tentang PMN 2023 Committee Meeting on 2023 PMN
Kamis, 25 Mei 2023 Thursday, May 25, 2023	Online	Kickup Meeting Audit AUP dan AIIB AUP and AIIB Audit Kickup Meeting
Rabu, 7 Juni 2023 Wednesday, June 7, 2023	Online	Update PKS Kuta Keruak Update on PKS Kuta Keruak
Senin, 12 Juni 2023 Monday, June 12, 2023	Online	Update GCG Terintegrasi Permen BUMN 2023 termasuk IT Governance Update on GCG integrated with 2023 SOEs Minister including IT Governance
Selasa 13 Juni 2023 Thursday, June 13, 2023	Online	Update PSA 62 Audit 2022 Update on PSA 62 Audit 2022
Jumat 16 Juni 2023 Friday, June 16, 2023	Online	Agenda Pembahasan Utang Perusahaan per Mei 2023 serta agingnya Agenda for discussion of company debt as of May 2023 and its maturity
Jumat, 7 Juli 2023 Friday, July 7, 2023	Online	Review progress tindak lanjut IA thd Management Letter dan PSA62 audit 2022 Review on IA follow-up progress on Management Letter and PSA 62 2022 Audit

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda
Senin, 17 Juli 2023 Monday, July 17, 2023	Offline	agenda 1: Review PKPT IA Semester 1/2023 (termasuk tindak lanjut temuan BPK, BPKP) agenda 2: Evaluasi persiapan IA untuk penyiapan dokumen terkait penunjukan KAP tahun 2023 agenda 1: PKPT IA Semester 1/2023 review (exclude follow up on BPK, BPKP findings) agenda 2: IA preparation evaluation for document preparation related to KAP appointment in 2023
Kamis, 20 Juli 2023 Thursday, July 20, 2023	Online	Update Progress Persiapan MotoGP 2023, pengembalian dana talangan ITDC oleh MGPA, skema bisnis MGPA-ITDC dalam pengelolaan sirkuit Mandalika Update progress on 2023 MotoGP preparation, refund of ITDC bailout by MGPA, MGPA-ITDC business scheme in Mandalika circuit management
Senin, 24 Juli 2023 Monday, July 24, 2023	Online	Tindak lanjut restrukturisasi anak dan cucu usaha (Xplorin) Follow-up on subsidiaries and sub-subsidiaries restructuring (Xplorin)
Rabu, 26 Juli 2023 Wednesday, July 26, 2023	Online	Evaluasi realisasi kinerja Semester 1 dibandingkan dengan RKAP dan proforma laporan keuangan sd TW3 Semester 1 performance evaluation compared with RKAP and financial report performance up to TW3
Jumat, 11 Agustus 2023 Friday, August 11, 2023	Online	Update Operasional dan Konstruksi Hotel Pullman Update Operational and Construction of Pullman Hotel
Rabu, 16 Agustus 2023 Wednesday, August 16, 2023	Online	Update Cashflow Projection Update Cashflow projection
Senin, 21 Agustus 2023 Monday, August 21, 2023	Online	Update Persiapan MotoGP Update MotoGP preparation
Rabu, 23 Agustus 2023 Wednesday, August 23, 2023	Online	Update Procurement dan Kebijakan Mutu&Pelayanan Update procurement and quality and service policy
Kamis, 24 Agustus 2023 Thursday, August 24, 2023	Online	Top Risks dan Legal Update Top Risks and Legal Update
Rabu, 13 September 2023 Wednesday, September 13, 2023	Online	Progress Persiapan MotoGP 2023 Progress of 2023 MotoGP Preparation
Rabu, 20 September 2023 Wednesday, September 20, 2023	Online	Update The Golo Mori Update The Golo Mori
Senin, 25 September 2023 Monday, September 25, 2023	Online	meeting RKAP dgn Divisi Finance RKAP meeting with Finance Division
Senin, 25 September 2023 Monday, September 25, 2023	Online	Update Top 10 Risks, Kasus Hukum dan Asset Management Update Top 10 Risks, Legal Cases, and Asset Management
Senin, 25 September 2023 Monday, September 25, 2023	Online	Update AOI Terkait SPI AOI Update related to SPI
	Online	Top Risks dan Legal Update Top Risks and Legal Update
Senin, 23 Oktober 2023 Monday, October 23, 2023	Online	Evaluasi Event MotoGP 2023 MotoGP 2023 Evaluation
Senin, 23 Oktober 2023 Monday, October 23, 2023	Online	Update Tindaklanjuti AOI GCG dan Persiapan GCG Assessment 2023 Update on AOI GCG follow-up and preparation on GCG 2023 Assessment
Kamis, 26 Oktober 2023 Thursday, October 26, 2023	Online	Pembahasan Laporan Keu s.d Sept 2023 dengan Komite Discussing Financial Report up to September 2023 with Committee
Rabu, 8 November 2023 Wednesday, November 8, 2023	Online	Telaah RKAP ITDC 2024 2024 ITDC RKAP Review



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda
Rabu, 15 November 2023 Wednesday, November 15, 2023	Online	Laporan Hasil Audit SPI bulan Oktober 2023 Report on SPI Audit on October 2023
Rabu, 15 November 2023 Wednesday, November 15, 2023	Online	Kinerja Keuangan Oktober 2023 October 2023 Financial Performance
Rabu, 22 November 2023 Wednesday, November 22, 2023	Online	Pembahasan Laporan PMN TA 2021 (Laporan hasil revidi BPKP dan persiapan post audit BPK) Discussion of the 2021 FY PMN Report (Report on BPKP review results and BPK post audit preparation)
Rabu, 22 November 2023 Wednesday, November 22, 2023	Online	Rencana Kerja KA 2024 KA 2024 Work Plan
Rabu, 13 Desember 2023 Wednesday, December 13, 2023	Online	Progress Tindak Lanjut atas Management Letter 2022, PSA 62 dan Rekomendasi BPK dan BPKP Progress of Follow-up on Management Letter 2022, PSA 62 and BPK and BPKP Recommendations
Kamis, 14 Desember 2023 Thursday, December 14, 2023	Online	Update Golomori Golomori Update
Selasa, 19 Desember 2023 Tuesday, December 19, 2023	Online	Kinerja Keuangan Bulanan (posisi 30 November) 2023 Monthly Financial Performance (November 30) 2023
Rabu, 20 Desember 2023 Wednesday, December 20, 2023	Online	Laporan Progres Audit Laporan Keuangan 2023 2023 Financial Report Audit Progress Report
Jumat, 22 Desember 2023 Friday, December 22, 2023	Online	Laporan Bulanan SPI : Rencana Kerja 2024 dan Revisi Piagam SPI SPI Monthly Report: 2024 Work Plan and Revision of the SPI Charter

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memberikan telaahan, tanggapan, pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, meliputi:

Performance Report for the Year 2023

Throughout 2023, the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities by providing reviews, responses, opinions, and recommendations to the Board of Commissioners, including:

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
1	IM.01/KA/I/2023	7 Maret March 7	Telaah KA Aspek Keuangan Laporan Manajemen Tahun 2022 Unaudited Study on KA on Management Financial Report in 2022 Unaudited
2	S-01/KA/ITDC/II/2023	15 Februari February 15	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Triwulan IV Tahun 2022 Delivery on Implementation Task of Audit Committee Q4 2022
3	S-02/KA/ITDC/II/2023	15 Februari February 15	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2022 Delivery on Implementation Task of Audit Committee 2022
4	S-03/KA/ITDC/II/2023	15 Februari February 15	Laporan Visitasi Mandalika Mandalika Visitation Report
5	IM.01/KA/III/2023	1 Maret March 1	Telaah KA Evaluasi Pengendalian Intern Periode 2021-TW III 2022 10 Mar 2023 Study on KA Evaluation in Intern Control in 2021-Q3 2022 Period (March 10, 2023)
6	IM.02/KA/III/2023	13 Maret March 13	Telaah atas Permohonan Direksi Sehubungan Rencana Tambahan Fasilitas Terkait Pembiayaan Hosting Fee WSBK 2023 Study on KA Evaluation in Intern Control in 2021-Q3 2022 Period (March 10, 2023)

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
7	IM.03/KA/IV/2023	6 April April 6	Telaah KA Progress Golo Mori dan Rekomposisi PMN 2021 Study on Golo Mori Progress and 2021 PMN Recomposition
8	S-04/KA/ITDC/IV/2023	28 April April 28	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Triwulan I Tahun 2023 Delivery on Audit Committee Task Report on 2023 Q1
9	IM.04/KA/IV/2023	29 April April 29	Aspek keuangan TW1 Q1 Financial Aspect
10	IM.05/KA/V/2023	31 Mei May 31	Telaah KA Tentang PMN 2023 ITDC Study on ITDC 2023 PMN KA
11	IM.07/KA/V/2023	31 Mei May 31	Telaah KA Atas Laporan Kegiatan IA Tahun 2022 KA's Review of the 2022 IA Activity Report
12	S-05/KA/ITDC/VI/2023	12 Juni June 12	Rekomendasi Komite Audit atas penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasian ITDC dan Laporan Keuangan PUMK ITDC tahun buku 2023 Recommendation from Audit Committee on the appointment of KAP to audit ITDC consolidated financial report and ITDC PUMK Financial Report for the 2023 Financial Year
13	IM.08/KA/VI/2023	14 Juni June 14	Telaah KA tentang laporan keuangan konsolidasian auditan ITDC tahun buku 2022 Study on ITDC consolidated financial report audit on the 2022 Financial Year
14	IM.09/KA/VII/2023	23 Juni June 23	Telaah KA tentang Pengajuan Penyesuaian RAB dan Perpanjangan Jangka Waktu Penarikan KIE NIA Tranche E Study of the Submission of RAB Adjustments and Extension of the KIE NIA Tranche E Withdrawal Period
15	IM.10/KA/VII/2023	13 Juli July 13	Telaah KA tentang pengelolaan aset tetap ITDC KA review on ITDC fixed asset utilization
16	IM.11/KA/VII/2023	13 Juli July 13	Telaah KA tentang keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan tenant KA review on late submission of tenant financial report audit
17	IM.12/KA/VII/2023	13 Juli July 13	Telaah KA tentang keberlangsungan usaha (going concern) ITDC KA review on ITDC ongoing concern
18	IM.13/KA/VII/2023	13 Juli July 13	Telaah KA Tentang Reviu Tambahan PMN Tahun Anggaran 2023 ITDC KA review on ITDC PMN additional review on the 2023 Financial Budget
19	IM.14/KA/VII/2023	24 Juli July 24	Telaah KA Atas Laporan Realisasi Kegiatan Internal Audit (IA) Triwulan II Tahun 2023 KA review on Internal Audit Activity Realization Report on 2023 Q2
20	IM.15/KA/VII/2023	31 Juli July 31	Telaah KA tentang aspek keuangan laporan manajemen semester I 2023 ITDC KA's review of the financial aspects of ITDC's first semester 2023 management report
21	IM.16/KA/VII/2023	31 Juli July 31	Revisi RKAP RKAP review
22	S-06/KA/ITDC/VIII/2023	31 Agustus August 31	Rekomendasi Komite Audit atas Kaji Ulang Kinerja SPI Audit Committee Recommendation on SPI performance review
23	S-07/KA/ITDC/VIII/2023	31 Agustus August 31	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Triwulan II Tahun 2023 Report Submission of Audit Committee Duty Implementation for 2023 Q2
24	IM.17/KA/IX/2023	5 Oktober October 5	Telaah Kunjungan KA ke The Mandalika 6-7 September 2023 KA review on visit to the Mandalika September 6-7, 2023
24	IM.17/KA/X/2023	5 Oktober October 5	Telaah Kunjungan KA ke The Mandalika 6-7 September 2023 KA review on visit to the Mandalika September 6-7, 2023



No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
25	IM.18/KA/X/2023	12 Oktober October 12	Telaah Kunjungan KA ke The Nusa Dua 29 September 2023 KA review on visit to the Nusa Dua September 29, 2023
26	IM.19/KA/X/2023	19 Oktober October 19	Telaah Kunjungan KA ke The Golo Mori 30 September 2023 KA review on visit to the Golo Mori on September 30, 2023
27	IM.20/KA/X/2023	26 Oktober October 26	Telaah Kebijakan Sistem Teknologi Informasi Review on Information Technology Policy
28	IM.21/KA/X/2023	24 Oktober October 24	Telaah Komite Audit atas Laporan Manajemen Triwulan III 2023 Audit Committee review on Management Report 2023 Q3
29	IM.22/KA/XI/2023	7 November November 7	Telaah Komite Audit atas RKAP tahun 2024 Audit Committee review on 2024 RKAP
30	IM.23/KA/XII/2023	15 Desember December 15	Telaah Komite Audit atas Kinerja SPI tahun 2023 Audit Committee review on SPI performance in 2023

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite Audit oleh Dewan Komisaris

Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Komite Audit didasarkan atas komitmen kehadiran dalam rapat dan keaktifan dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dasar penilaian dan metode sesuai dengan yang tercantum pada Piagam Komite Manajemen Audit antara lain tingkat efektivitas Komite Audit dalam menjalankan fungsinya, tingkat kehadiran dalam rapat Komite Audit, tingkat pemahaman anggota Komite Audit atas berbagai permasalahan di perusahaan, Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit paling sedikit satu tahun sekali dan evaluasi Komite Audit dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggung jawab Komite Audit yang tercakup dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Audit.

Audit Committee Performance Evaluation and Assessment by the Board of Commissioners

The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Audit Committee is based on a commitment to attendance at meetings and activeness in providing input and recommendations to the Board of Commissioners following their duties and functions. The basis of the assessment and methods are as stated in the Audit Management Committee Charter, including the level of effectiveness of the Audit Committee in carrying out its functions, the level of attendance at the Audit Committee meetings, the level of understanding of the members of the Audit Committee on various problems in the Company, the Board of Commissioners assesses the Audit Committee's performance at least once a year and the evaluation of the Audit Committee is carried out by comparing the actual performance of the roles and responsibilities of the Audit Committee which are included.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris dan keseluruhan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Kriteria dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat berdasarkan persyaratan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan sesuai dengan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.

Susunan Keanggotaan dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2023, komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 3 (tiga) orang anggota Komite. Adapun susunan dan komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee

The Board of Commissioners has established a Nomination and Remuneration Committee to assist in carrying out the supervisory responsibility for the implementation of the nomination and remuneration policy for the Board of Commissioners, the Board of Directors, members of the Committee at the Board of Commissioners level, and all employees in accordance with applicable regulations.

The establishment of the Audit Committee is based on applicable laws and regulations, including:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (LLCs)
2. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises

Criteria and Appointment of Nomination and Remuneration Committee Members

The Nomination and Remuneration Committee is appointed based on competency requirements and the needs of the Company, with reference to applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association. The Nomination and Remuneration Committee is appointed by and directly accountable to the Board of Commissioners.

Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

Members of the Nomination and Remuneration Committee who also serve as members of the Board of Commissioners have a term of office in accordance with their appointment as members of the Board of Commissioners as determined by the General Meeting of Shareholders.

Composition and Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

In 2023, the Company's Nomination and Remuneration Committee consisted of 4 (four) people, comprising 1 (one) Chairperson and 3 (three) Committee members. The composition and profile of the Nomination and Remuneration Committee members can be seen as follows:



Nama Name	Jabatan Title	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ricky Joseph Pesik	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP/DEKOM/VIII/2022 Board of Commissioners' Decree No. 04/KEP/DEKOM/VIII/2022
H. Irzani, M.Pd, M.Si	Sekretaris Secretary	Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP/DEKOM/VIII/2022 Board of Commissioners' Decree No. 04/KEP/DEKOM/VIII/2022
Ir. Zainal Mutaqin, MM	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP/DEKOM/VIII/2022 Board of Commissioners' Decree No. 04/KEP/DEKOM/VIII/2022
Ulin Ni'am Yusron	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP/DEKOM/VIII/2022 Board of Commissioners' Decree No. 04/KEP/DEKOM/VIII/2022

Ricky Joseph Pesik
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Ricky Joseph Pesik selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Ricky Joseph Pesik as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee can be found in the Board of Commissioners Profile section of the Company Profile chapter of this Annual Report.

H. Irzani, M.Pd, M.Si
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil H. Irzani, M.Pd, M.Si selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of H. Irzani, M.Pd, M.Si as a Member of the Nomination and Remuneration Committee can be found in the Board of Commissioners Profile section of the Company Profile chapter of this Annual Report.

Ir. Zainal Mutaqin, MM
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Ir. Zainal Mutaqin, MM selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Ir. Zainal Mutaqin, MM as a Member of the Nomination and Remuneration Committee can be found in the Board of Commissioners Profile section of the Company Profile chapter of this Annual Report.

Ulin Ni'am Yusron
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Ulin Ni'am Yusron selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Ulin Ni'am Yusron as a Member of the Nomination and Remuneration Committee can be found in the Board of Commissioners Profile section of the Company Profile chapter of this Annual Report.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ITDC ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KEP/DEKOM/VII/2022 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditandatangani oleh Komisaris Utama tanggal 28 Juli 2022. Piagam tersebut mengatur tentang:

1. Visi dan Misi
2. Organisasi dan Masa Tugas KNR
3. Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab serta Wewenang
4. Hubungan dengan Pihak Terkait
5. Rapat
6. Anggaran
7. Kode Etik
8. Pelaporan
9. Evaluasi Kinerja

Tugas, Peran, serta Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

KNR memiliki tugas, antara lain:

1. Terkait dengan remunerasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
2. Terkait dengan nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*);
 - ii. sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*);
 - iii. talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
 - iv. calon wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
 - b. Mengevaluasi usulan Key Performance Indicators Individu anggota Direksi dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee Work Guidelines

The ITDC Nomination and Remuneration Committee Charter was stipulated in Board of Commissioners Decree No. 03/KEP/DEKOM/VII/2022 concerning the Nomination and Remuneration Committee Charter which was signed by the President Commissioner on July 28, 2022. The Charter regulates:

1. Vision and Mission
2. Organization and Term of Service of KNR
3. Functions, Duties, Responsibilities and Authorities
4. Relations with Related Parties
5. Meetings
6. Budget
7. Code of Ethics
8. Reporting
9. Performance Evaluation

The Duties, Roles, and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee has duties among other:

1. Regarding remuneration, providing recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policies for employees which require approval/response from the Board of Commissioners.
2. Regarding nominations:
 - a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - i. Talent Management system (*Talent Management System*);
 - ii. Talent Classification systems and procedures;
 - iii. talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (*Selected Talent*), to produce a list of Talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Minister (*Nominated Talent*);
 - iv. prospective Company representatives who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiary companies, before being submitted to the GMS/Minister;
 - b. Evaluate the proposed Key Performance Indicators for individual members of the Board of Directors and submit them to the Board of Commissioners.



- c. Menyampaikan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- d. Menyampaikan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- e. Mengevaluasi usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris khusus terkait dengan ruang lingkup penyusunan dan pelaksanaan sistem/kebijakan Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.

Wewenang dan Tanggung Jawab KNR memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

1. Memastikan dan memonitoring penyusunan sistem dan kebijakan terkait dengan proses nominasi dan di lingkungan Perseroan dan Anak Perusahaan khususnya Direksi/Dewan Komisaris dan pejabat satu level di bawah Direksi termasuk Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit.
2. Memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan atau seleksi calon-calon Direksi serta pejabat satu tingkat di bawah Direksi di lingkungan Perseroan dan Anak Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.
3. Membuat kajian untuk usulan perbaikan remunerasi berupa gaji dan benefit lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta mengajukan besaran tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.
4. Membuat kajian/rekomendasi terkait struktur organisasi Perusahaan.
5. Melakukan monitoring terhadap gaji, tunjangan, dan fasilitas karyawan yang bersifat tetap, maupun berupa bonus, fasilitas dan insentif kerja bagi pegawai perusahaan.
6. Membuat laporan tugas pengawasan komite secara berkala.

- c. Submit a proposal for an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners
- d. Submit development program proposals for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners.
- e. Evaluate the Board of Directors' proposals regarding the company's organizational structure and submit them to the Board of Commissioners.
- f. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners specifically related to the scope of preparation and implementation of the Company's Nomination and Remuneration system/policy.

KNR has Authority and Responsibilities as the following:

1. Ensure and monitor the preparation of systems and policies related to the nomination process and within the Company and Subsidiaries, especially the Directors/Board of Commissioners and officials one level below the Directors, including the Corporate Secretary and Internal Audit.
2. Ensure that the selection or selection of candidates for Directors and officials one level below the Directors within the Company and Subsidiaries is carried out in accordance with applicable rules and regulations and submitted to the Board of Commissioners.
3. Make studies to propose improvements to remuneration in the form of salaries and other benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners and propose tantiem amounts for the Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with applicable rules and regulations.
4. Make studies/recommendations regarding the Company's organizational structure.
5. Monitor permanent employees salaries, allowances and facilities, as well as bonuses, facilities and work incentives for company employees.
6. Make periodic reports on the committee's supervisory duties.

7. Melaksanakan rapat sesuai kebutuhan, yang dapat dihadiri oleh anggota KNR bersama pihak terkait dari manajemen, unit kerja, atau pihak-pihak lainnya dan menyampaikan risalah rapat tersebut kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, KNR dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab KNR memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan tugasnya, KNR dapat bekerjasama dengan Organ Dewan Komisaris, Divisi Human Capital dan Divisi lainnya yang terkait.
2. Anggota KNR wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
3. KNR dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
 - a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. prestasi kerja individual;
 - c. kewajaran dengan peer group;
 - d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan; dan
 - e. peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sebelum tahun buku berjalan, KNR wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan KNR tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
5. KNR wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

7. Hold meetings as needed, which can be attended by KNR members together with related parties from management, work units or other parties and submit the minutes of the meeting to the Board of Commissioners.

Based on written assignments from the Board of Commissioners, KNR can access records or information about employees, funds, assets and other company resources related to the implementation of their duties. The Committee is obliged to report in writing the results of the assignment to the Board of Commissioners.

In implementing its authority and responsibilities, KNR has the following rights and obligations:

1. To carry out its duties, KNR can collaborate with the Board of Commissioners, Human Capital Division and other related divisions.
2. KNR members are obliged to carry out their duties properly and maintain the confidentiality of all Company documents, data and information, both from internal and external parties and are only used for the purposes of carrying out the Committee's duties.
3. KNR in carrying out its duties and responsibilities related to remuneration policies must pay attention to at least:
 - a. financial performance and fulfillment of reserves as regulated in applicable laws;
 - b. individual work performance;
 - c. fairness with peer groups;
 - d. consideration of the Company's long-term goals and strategies; and
 - e. applicable laws and regulations.
4. Before the current financial year, KNR is obliged to prepare and submit an annual work plan and budget to the Board of Commissioners for approval, a copy of which is submitted by the Board of Commissioners to the Board of Directors for information. The implementation of the KNR work plan and annual budget is reported to the Board of Commissioners.
5. KNR is obliged to make and submit a report on the implementation of its duties and responsibilities to the Board of Commissioners.



Informasi tentang Pembagian Tugas antar Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional dan independen, bertindak berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yakni:

1. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan;
2. Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi asal anggota Komite tersebut tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan; serta
3. Anggota Komite yang berasal dari luar perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan.

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi yang dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut.

Information on the Division of Duties within the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is a Committee that works collectively in performing its duties to assist the Board of Commissioners.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, acting based on the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. The independence of the members of the Nomination and Remuneration Committee is regulated by the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organ and Human Resources of State-Owned Enterprises, namely:

1. Have no personal interests/connections that could create negative impacts and conflicts of interest with the company;
2. If a member of the Committee is from a particular institution, the original institution of the Committee member must not provide services to the respective SOE; and
3. Committee members from outside the company are prohibited from having blood or marriage relationships up to the third degree, both in a direct line or a collateral line, with members of the Board of Commissioners/Supervisory Board and members of the Company's Board of Directors.

All members of the Company's Nomination and Remuneration Committee have met the independence requirements as specified in the Minister of SOEs Regulation.

Transparansi Hubungan Afiliasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Transparency of Affiliation Relationships within the Nomination and Remuneration Committee

Hubungan Afiliasi Affiliation	Ricky Joseph Pesik (Ketua) (Chairman)	H. Irzani, M.Pd, M.Si (Sekretaris) (Secretary)	Ir. Zainal Mutaqin, MM (Anggota) (Member)	Ulin Ni'am Yusron (Anggota) (Member)
Dengan Anggota Dewan Komisaris With Members of the Board of Commissioners	x	x	x	X
Dengan Direksi With the Board of Directors	x	x	x	X
Dengan Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali With the Indonesian Government as Main/Controlling Shareholder	x	x	x	X

Program Peningkatan Kompetensi

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menambah wawasan serta pengetahuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi Risiko dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu bulan sekali atau sesuai ketentuan rapat minimal Dewan Komisaris. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 4 kali rapat internal maupun rapat yang diselenggarakan bersama organ Perusahaan lainnya. Informasi mengenai risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi beserta rekapitulasi kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat-rapat tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Competency Improvement Program

The Company facilitates competency development programs for the Nomination and Remuneration Committee to enhance their insights and knowledge in carrying out their duties and responsibilities. Information regarding training activities and competency improvements for the Nomination and Remuneration Committee can be found in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Nomination and Remuneration Committee Meetings

The Nomination and Remuneration Committee holds meetings at least once a month or in accordance with the minimum meeting requirements of the Board of Commissioners. Each Committee meeting is documented in minutes signed by all attending Committee members.

During 2023, the Nomination and Remuneration Committee held a total of 4 internal meetings as well as meetings organized with other Company bodies. Information regarding the minutes of the Nomination and Remuneration Committee meetings and the attendance summary of the Committee members at these meetings can be seen as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

Recapitulation of the Attendance of Nomination and Remuneration Committee in 2023

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absenteeism	% Kehadiran % of Attendance
Ricky Joseph Pesik (Ketua) (Chairman)	4	4	0	100
H. Irzani, M.Pd, M.Si (Sekretaris) (Secretary)	4	4	0	100
Ir. Zainal Mutaqin, MM (Anggota) (Member)	4	4	0	100
Ulin Ni'am Yusron (Anggota) (Member)	4	4	0	100
Rata-Rata Kehadiran Average Attendance				100



Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

Minutes of the 2023 Nomination and Remuneration Committee Meeting

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda
22 Februari 2023 February 22, 2023	Online	Rapat Komite Nominasi Remunerasi VP Corpsec VP Corpsec Nomination and Remuneration Committee Meeting
27 Februari 2023 February 27, 2023	Online	Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi Talent Pool Dan Penilaian Direksi Nomination and Remuneration Committee Meeting on Talent Pool and Board of Directors Assessment
16 Agustus 2023 August 16, 2023	Online	Rapat Komite NR NR Committee Meeting
29 September 2023 September 29, 2023	Online	Rapat KNR Rekrutmen Anggota Komite KNR Committee Member Recruitment Meeting

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dalam bentuk kajian, rekomendasi, masukan, maupun pendapat terhadap permasalahan tertentu, meliputi:

Report on Task Implementation for 2023

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities efficiently, effectively, transparently, competently, independently, and accountably, in accordance with applicable laws and regulations. The execution of the Nomination and Remuneration Committee's duties was conducted in the form of studies, recommendations, inputs, and opinions on specific issues, including:

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
1.	S-01/KNR/ITDC/I/2023	9 Januari 2023 January 9, 2023	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Triwulan IV Tahun 2022 Submission of Report on the Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee for Quarter IV 2022
2.	S-02/KNR/ITDC/I/2023	9 Januari 2023 January 9, 2023	Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022 Submission of Annual Report on the Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee for Quarter 1 2023
3.	IM.01/KNR/ITDC/II/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023	Pergantian VP corpsec Change in Corporate Secretary VP
4.	IM.02/KNR/ITDC/II/2023	27 Februari 2023 February 27, 2023	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Triwulan I Tahun 2023 Submission of Report on the Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee for Quarter 1 2023
5.	S-03/KNR/ITDC/IV/2023	10 April 2023 April 10, 2023	Usulan Remunerasi Direksi Tahun 2023 Board of Directors Remuneration Suggestion in 2023
6.	IM.03/KNR/ITDC/VI/2022	14 Juni 2023 June 14, 2023	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Triwulan II Tahun 2023 Submission of Report on the Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee for Quarter II 2023

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
7.	S-04/KNR/ITDC/VII/2023	18 Juli 2023 July 18, 2024	Usulan KNR kepada Dewan Komisaris terkait Kepegawaian Perusahaan KNR Suggestion to the Board of Commissioners on the Company's employment
8.	IM.05/KNR/ITDC/VIII/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Rekrutmen Bakal Calon Anggota Komite ITDC Recruitment on Prospective ITDC Committee
9.	IM.06/KNR/ITDC/IX/2023	29 September 2023 September 29, 2023	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Triwulan III Tahun 2023 Submission of Report on the Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee for Quarter III 2023
10.	S-05/KNR/ITDC/X/2023	1 Oktober 2023 October 1, 2023	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Triwulan II Tahun 2023 Submission of Report on the Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee for Quarter II 2023

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris

Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan atas komitmen kehadiran dalam rapat dan keaktifan dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dasar penilaian dan metode sesuai dengan yang tercantum pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain tingkat efektivitas Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsinya, tingkat kehadiran dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, tingkat pemahaman anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atas berbagai permasalahan di Perusahaan.

Performance Evaluation and Assessment of the Nomination and Remuneration Committee by the Board of Commissioners

The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Nomination and Remuneration Committee is based on commitment to attend meetings and activeness in providing input and recommendations to the Board of Commissioners in accordance with its duties and functions. The basis for assessment and methods are in accordance with those stated in the Nomination and Remuneration Committee Charter, including the level of effectiveness of the Nomination and Remuneration Committee in carrying out its functions, the level of attendance at Nomination and Remuneration Committee meetings, and the level of understanding of the Nomination and Remuneration Committee members regarding various problems in the Company.



Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan organ pendukung yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen Perusahaan, khususnya dalam aspek pengelolaan manajemen risiko dan investasi, sehingga dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Kriteria dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Manajemen Risiko diangkat berdasarkan persyaratan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Komite Manajemen Risiko diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan sesuai dengan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS. Sementara, masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang (1) satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan Keanggotaan dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Sampai dengan akhir tahun 2023, komposisi Komite Manajemen Risiko Perusahaan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 2 (dua) orang anggota Komite. Adapun susunan dan komposisi anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is a supporting body responsible for assisting the Board of Commissioners in overseeing the Company's management, particularly in the aspects of risk management and investment, to ensure they align with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

The formation of the Audit Committee refers to prevailing laws and regulations, such as:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organ and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Criteria and Appointment of Risk Monitoring Committee Members

The Risk Management Committee is appointed based on the Company's competency requirements and needs, referring to applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association. The Risk Management Committee is appointed by and directly responsible to the Board of Commissioners

Term of Office of the Risk Monitoring Committee

Members of the Risk Monitoring Committee who also serve as members of the Board of Commissioners have a term of office that aligns with their appointment as members of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the term of office for Risk Management Committee members who are not from the Board of Commissioners is three (3) years and can be extended once for a two (2) year term, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time

Composition and Profile of Risk Monitoring Committee Members

As of the end of 2023, the composition of the Company's Risk Management Committee consists of three (3) members: one (1) Chairperson and two (2) Committee members. The structure and composition of the Risk Monitoring Committee members are as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Working Period
Ir. Zainal Mutaqin, MM	Ketua	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/Kep/DEKOM/I/2020 Tanggal 30 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPMR PT ITDC	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris	Ke-1
	Chairman	Board of Commissioners Decision Number 02/Kep/DEKOM/I/2020 Dated January 30, 2020, regarding the Dismissal and Appointment of the Chairperson of the Risk Management Committee of PT ITDC	Following the term of office of the Board of Commissioners	1st
Vera Diyanty	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/Kep/DEKOM/I/2021 Tanggal 19 Januari 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT ITDC	2021-2023	Ke-1
	Member	Board of Commissioners Decision Number 02/Kep/DEKOM/I/2021 Dated January 19, 2021, regarding the Appointment of Members of the Risk Management Committee of PT ITDC		1st
Rachman Gifar	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/Kep/DEKOM/I/2021 Tanggal 19 Januari 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT ITDC	2021-2023	Ke-1
	Member	Board of Commissioners Decision Number 02/Kep/DEKOM/I/2021 Dated January 19, 2021, regarding the Appointment of Members of the Risk Management Committee of PT ITDC		1st
Irfani Fithria Ummul M	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 14/KEP/DEKOM/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT ITDC	Okt 2023-2025	Ke-1
	Member	Board of Commissioners Decree Number 14/KEP/DEKOM/X/2023 dated October 16, 2023, concerning the Appointment of Members of the PT ITDC Risk Management Committee		1st

Ir. Zainal Mutaqin, MM
Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil Ir. Zainal Mutaqin, MM selaku Ketua Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

The profile of Ir. Zainal Mutaqin as the Chairman of the Risk Monitoring Committee can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section, in the Company Profile chapter of this Annual Report

Vera Diyanty
Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tanggal Lahir Date of Birth	2 Juli 1974 July 2, 1974
Usia Age	49 tahun 49 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia



Vera Diyanty
Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/Kep/DEKOM/I/2021 Tanggal 19 Januari 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT ITDC Board of Commissioners' Decree Number 02/Kep/DEKOM/I/2021 Dated January 19, 2021, regarding the Appointment of Members of the Risk Management Committee of PT ITDC
Riwayat Pendidikan Education Background	• Sarjana Akuntansi FEB - Universitas Indonesia • Magister Manajemen, Keuangan dan Perbankan - Universitas Indonesia • Doktor Akuntansi, Program Pascasarjana FEB Universitas Indonesia • Bachelor of Accounting FEB - University of Indonesia • Master of Management, Finance, and Banking - University of Indonesia • PhD in Accounting, Postgraduate Program FEB University of Indonesia
Pengalaman Kerja Working Experience	• Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Mei 2018- sekarang) • Kepala Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Februari 2014-Mei 2018) • Anggota Komite Audit PT Pupuk Indonesia (Persero) (Oktober 2017-Oktober 2020) • Anggota Komite Audit PLN Batam (Maret 2017-Februari 2018) • Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga Tbk (Maret 2016-Maret 2017) • Anggota Komite Audit PT PLN Tarakan (September 2010-Desember 2016) • Konsultan Senior PPA FEB UI (Juli 2007-Agustus 2009) • Head of the Accounting Development Center, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (May 2018-present) • Head of Accounting Undergraduate Program, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (February 2014-May 2018) • Member of the Audit Committee of PT Pupuk Indonesia (Persero) (October 2017-October 2020) • Member of the PLN Batam Audit Committee (March 2017-Feb 2018) • Member of the Nomination, Remuneration and Risk Committee of PT Jasa Marga Tbk (March 2016-March 2017) • Member of the Audit Committee of PT PLN Tarakan (September 2010-December 2016) • Senior Consultant PPA FEB UI (July 2007-August 2009)

Rachman Gifar
Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tanggal Lahir Date of Birth	3 Desember 1988 December 3, 1988
Usia Age	35 tahun 35 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/Kep/DEKOM/I/2021 Tanggal 19 Januari 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT ITDC Board of Commissioners' Decree Number 02/Kep/DEKOM/I/2021 Dated January 19, 2021, regarding the Appointment of Members of the Risk Management Committee of PT ITDC

Rachman Gifar
Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Riwayat Pendidikan Education Background	• Sarjana Ekonomi, Akuntansi - Universitas Indonesia (2010) • Master of Forensic Accounting - University of Wollongong New South Wales, Australia (2015) • Bachelor of Economics, Accounting - University of Indonesia (2010) • Master of Forensic Accounting - University of Wollongong New South Wales, Australia (2015)
Pengalaman Kerja Working Experience	• KAP GIFAR & AMBRI, Pro Reliant Consulting, Managing Partner (September 2018-sekarang) • KAP RAZIKUN TARKOSUNARYO, MUC Consulting Group, Partner (Januari 2017-September 2018) • KAP RAZIKUN TARKOSUNARYO, MUC Consulting Group, Manager (Oktober 2015-Januari 2017) • KAP GIFAR & AMBRI, ProReliant Consulting, Managing Partner (September 2018-present) • KAP RAZIKUN TARKOSUNARYO, MUC Consulting Group, Partner (January 2017-September 2018) • KAP RAZIKUN TARKOSUNARYO, MUC Consulting Group, Manager (October 2015-January 2017)
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications Owned	SNI ISO 37001:2016

Irfani Fithria Ummul M
Anggota Komite Pemantau Risiko sejak 16 Oktober 2023
Member of the Risk Monitoring Committee since October 16, 2023

Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Indonesia
Riwayat Pendidikan Education Background	Jakarta, 15 Januari 1984 January 15, 1984
Pengalaman Kerja Working Experience	40 tahun 40 years old
Sertifikasi yang dimiliki Certifications owned	DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 14/KEP/DEKOM/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT ITDC Board of Commissioners Decree Number 14/KEP/DEKOM/X/2023 dated October 16, 2023, concerning the Appointment of Members of the PT ITDC Risk Management Committee
Riwayat Pendidikan Education Background	• Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (2015-2020) PhD in Economics • Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (2007-2009) Master in Economics • Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (2002-2006) Undergraduate in Economics


Irfani Fithria Ummul M
Anggota Komite Pemantau Risiko sejak 16 Oktober 2023
Member of the Risk Monitoring Committee since October 16, 2023
Pengalaman Kerja
 Working Experience

October 2020 – Now Head of the Office of Student Affairs FEB UI
 November 2021 – ongoing Team Leader: Kemitraan Indonesia & Kementerian Dalam Negeri
 January 2022 – June 2022 Principal Investigator: Tobacco Research at Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) UI
 January 2021 – December 2021 Principal Investigator: Tobacco Research at Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) UI
 2020 – Now Researcher at Research Cluster of Economic Modelling & Regional Economy Analysis (RCMEA)
 March 2019 – March 2020 Curriculum Developer SDG Academy Indonesia with UNDP
 June 2014 – September 2020 Economist Staff at Research and Society Engagement (RPM FEB UI)
 October 2010- 2014 Junior Economist, Komite Ekonomi Nasional (KEN), Republic of Indonesia

Sertifikasi yang Dimiliki
 Certifications Owned

Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris telah menetapkan Pedoman Kerja/Piagam Komite Pemantau Risiko agar Komite Manajemen Risiko dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Piagam ini senantiasa ditinjau secara berkala dan diperbarui sesuai dengan perkembangan skala bisnis dan organisasi Perusahaan. Piagam tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KEP/DEKOM/II/2023 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee Charter).

Piagam Komite Pemantau Risiko berisi pedoman kerja yang mencakup visi dan misi, fungsi, peran dan tanggung jawab, tugas, hubungan dengan pihak terkait, keanggotaan, persyaratan keanggotaan rapat, remunerasi dan anggaran, kode etik, pelaporan dan evaluasi kerja Komite Manajemen Risiko.

Tugas, Peran serta Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Secara umum, Komite Pemantau Risiko mendukung peran pengawasan terhadap Manajemen Perusahaan, khususnya dalam hal pengelolaan risiko dan investasi, sebagai mitra kerja pengawasan bagi Unit *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam proses analisis pengelolaan risiko dan investasi, serta memastikan ketersediaan SOP atau mekanisme kerja dan analisis berkala mengenai pengelolaan risiko oleh Manajemen Perusahaan, terutama dalam perspektif tantangan ke depan bagi Perusahaan.

Risk Monitoring Committee Work Guidelines

The Board of Commissioners has established the Risk Monitoring Committee's Work Guidelines/ Charter to ensure the Risk Monitoring Committee can perform its duties effectively. This Charter is regularly reviewed and updated in accordance with the development of the Company's business scale and organization. The Charter was enacted based on the Board of Commissioners' Decree No. 06/KEP/DEKOM/II/2023, regarding the Risk Management Committee Charter.

The Risk Monitoring Committee Charter contains work guidelines that encompass the vision and mission, functions, roles and responsibilities, duties, relationships with related parties, membership, meeting requirements, remuneration and budget, code of ethics, reporting, and performance evaluation of the Risk Management Committee.

Duties, Roles and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

In general, the Risk Monitoring Committee supports the oversight role of the Company's Management, particularly in risk and investment management. It acts as a supervisory partner for the Enterprise Risk Management (ERM) Unit in the process of analyzing risk and investment management, and ensures the availability of SOPs or working mechanisms and periodic analysis regarding risk management by the Company's Management, especially in view of future challenges for the Company.

Adapun tugas pokok Komite Pemantau Risiko sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Mendapat pemahaman atas manajemen risiko Perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian internal Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi, dan infrastruktur;
2. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut;
3. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi atas implementasi dan pengawasan masing-masing komponen dan *Enterprises Risk Management* (ERM) dalam Perusahaan;
5. Menerima dan memberikan umpan balik terhadap laporan berkala yang diberikan oleh manajemen perusahaan, mengenai pengelolaan risiko dan investasi;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
7. Menyusun laporan catatan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Komisaris secara periodik.

Sementara, peran dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain:

1. Terkait Manajemen Pengendalian dan Risiko
 - a. Melakukan pengawasan proses manajemen risiko dan evaluasi pengendalian Perusahaan, guna memperkecil kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan;
 - b. Meyakini bahwa Manajemen telah melaksanakan pengendalian risiko; dan
 - c. Mengutip prinsip-prinsip ERM.
2. Terkait dengan *Good Corporate Governance*
 - a. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan nilai dan sasaran Perusahaan dan mensosialisasikan nilai dan sasaran tersebut kepada Pemangku Kepentingan;
 - b. Memastikan terpenuhinya aspek akuntabilitas pada setiap *business process* Perusahaan;

The main duties of the Risk Monitoring Committee as outlined in the Risk Monitoring Committee Charter include:

1. Gain an understanding of the Company's risk management which includes various risks faced by the Company, strategies, systems and policies of the Company's risk management, the Company's internal control, including policies, methodologies, and infrastructure;
2. Evaluate various risk measurement models used by the Company and provide recommendations for further improvement;
3. Monitoring the conformity of various policies and implementation of the Company's risk management;
4. Coordinate and evaluate the implementation and supervision of each component and Enterprises Risk Management (ERM) within the Company;
5. Receive and provide feedback on periodic reports provided by the company's management, regarding risk and investment management;
6. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners based on statutory provisions; and
7. Prepare periodic reports on the implementation of duties and functions to the Board of Commissioners.

While the roles and responsibilities of the Risk Monitoring Committee include:

1. Related to Control and Risk Management
 - a. Supervise the risk management process and evaluate the Company's control, to minimize the possibility of risks and impacts;
 - b. Convinced that Management has implemented risk control; and
 - c. Citing ERM principles.
2. Related to Good Corporate Governance
 - a. Ensure that the Board of Directors has determined the values and goals of the Company and disseminated these values and targets to the Stakeholders;
 - b. Ensuring the fulfillment of accountability aspects in each of the Company's business



- c. Melaksanakan pengawasan terhadap proses dan implementasi GCG di Perusahaan;
- d. Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan GCG di Perusahaan;
- e. Memonitor kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan/perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku bagi Perusahaan.

Hubungan dengan Pihak Terkait Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Hubungan dengan fungsi ERM Perusahaan
 - a. Melakukan review atas kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan;
 - b. Melakukan review rencana kerja tahunan dari fungsi ERM Perusahaan;
 - c. Memastikan bahwa ERM Perusahaan memiliki metodologi, alat bantu, dan sumber daya yang memadai dan berkompeten sehingga dapat menyelesaikan rencana tahunan ERM Perusahaan; dan
 - d. Melakukan pembahasan laporan hasil review fungsi ERM Perusahaan sekaligus memantau tindak lanjut hasil review.
2. Hubungan dengan Jajaran Manajemen
 - a. Mempertimbangan beberapa permasalahan yang secara spesifik didelegasikan oleh Dewan Komisaris terkait manajemen risiko dan pengendaliannya; dan
 - b. Mendiskusikan secara teratur dan terbuka dengan Jajaran Manajemen terkait permasalahan yang dapat mempengaruhi Perusahaan baik dalam bidang keuangan maupun non keuangan.

Informasi Tentang Pembagian Tugas antar Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional dan independen, bertindak berdasarkan Anggaran

processes;

- c. Supervise the process and implementation of GCG in the Company;
- d. Monitor compliance with GCG policies in the Company;
- e. Monitor compliance with regulations/laws and other regulations that apply to the Company.

Relationship with Related Parties Risk Monitoring Committee is as follows:

1. Relationship with the ERM function of the Company
 - a. Conducting reviews of the Company's Risk Management policy;
 - b. Conducting annual work plan reviews of the Company's ERM function;
 - c. Ensure that the Company's ERM has adequate and competent methodologies, tools and resources so as to complete the Company's ERM annual plan; and
 - d. Conduct the discussion of the review results report of the ERM function of the Company while monitoring the follow-up of the review results.
2. Relationship with the Management Structure
 - a. Consider several issues that are specifically delegated by the Board of Commissioners related to risk management and control; and
 - b. Discuss regularly and openly with the Management regarding issues that may affect the Company both in the financial and non-financial fields.

Information on the Division of Duties Between the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee works collectively in performing its duties to assist the Board of Commissioners. The Risk Monitoring Committee is independent both in the execution of its duties and in its reporting and is directly responsible to the Board of Commissioners.

Independence of the Risk Monitoring and Investment Committee

The Risk Monitoring Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, acting in accordance with the

Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yakni:

1. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan;
2. Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi asal anggota Komite tersebut tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan; serta
3. Anggota Komite yang berasal dari luar perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan.

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi yang dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut.

Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. The independence of the members of the Risk Monitoring Committee is regulated by the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organ and Human Resources of State-Owned Enterprises, namely:

1. Have no personal interests/connections that could create negative impacts and conflicts of interest with the company;
2. If a Committee member comes from a particular institution, the original institution of the Committee member must not provide services to the respective SOE; and
3. Committee members from outside the company are prohibited from having blood or marriage relationships up to the third degree, both in a direct line or collateral line, with members of the Board of Commissioners/Supervisory Board and members of the Company's Board of Directors.

All members of the Company's Risk Management Committee have met the independence requirements as specified in the Minister of SOEs Regulation.

Transparansi Hubungan Afiliasi Komite Pemantau Risiko

Transparency of Affiliation Relationships within the Risk Monitoring Committee

Hubungan Afiliasi Affiliation	Ir. Zainal Mutaqin, MM (Ketua) (Chairman)	Vera Diyanty (Anggota) (Member)	Rachman Gifar (Anggota) (Member)
Dengan Anggota Dewan Komisaris With Members of the Board of Commissioners	x	x	x
Dengan Direksi With the Board of Directors	x	x	x
Dengan Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali With the Indonesian Government as Main/Controlling Shareholder	x	x	x

Program Peningkatan Kompetensi

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Komite Pemantau Risiko untuk menambah wawasan serta pengetahuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Improvement Program

The Company facilitates competency development programs for the Risk Monitoring Committee to enhance their insights and knowledge in carrying out their duties and responsibilities. Information regarding training activities and competency improvements for the Risk Management Committee can be found in the Company Profile chapter of this Annual Report.



Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu bulan sekali atau sesuai ketentuan rapat minimal Dewan Komisaris. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.

Pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan sebanyak 52 kali rapat internal maupun rapat yang diselenggarakan bersama organ Perusahaan lainnya. Informasi mengenai risalah rapat Komite Pemantau Risiko beserta rekapitulasi kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam rapat-rapat tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Meetings

The Risk Monitoring Committee holds meetings at least once a month or in accordance with the minimum meeting requirements of the Board of Commissioners. Each Committee meeting is documented in minutes signed by all attending Committee members.

In 2023, the Risk Monitoring Committee held a total of 52 times internal meetings as well as meetings organized with other Company bodies. Information regarding the minutes of the Risk Monitoring Committee meetings and the attendance summary of the Committee members at these meetings can be seen as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Recapitulation of Attendance of the Risk Monitoring Committee in 2023

Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absenteeism	% Kehadiran % of Attendance
Ir. Zainal Muttaqin, MM (Ketua) (Chairman)	52	52	0	100
Vera Diyanty (Anggota) (Member)	37	37	0	100
Rachman Gifar (Anggota) (Member)	52	52	0	100
Irfani Fithria Ummul M* (Anggota) (Member)	11	11	0	100
Rata-Rata Kehadiran Average Attendance				100

*) Baru menjabat per 16 Oktober 2023
*) Serving since October 16, 2023

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Minutes of the Risk Monitoring Committee Meeting

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda
Rabu 11 Jan 2023 09:00 WIB Wednesday, January 11, 2023 09.00 WIB	Online	Progress Audit Eksternal Tahun Buku 2022 Induk Progress of External Audit for Main Financial Year 2022
Waktu: Jumat 20 Jan 2023 09:00 WIB Friday, January 20, 2023 09.00 WIB	Online	Kolektibilitas Piutang ITDC ITDC Receivables Collectibility

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda
Jumat 20 Jan 2023 14:00 WIB Friday, January 20, 2023 14.00 WIB	Online	Pemenuhan Target LUDA 2022 LUDA 2022 Target Fulfillment
Rabu 25 Jan 2023 14:00 WIB Wednesday, January 25, 2023 14.00 WIB	Online	Monitoring Tindak Lanjut Follow-up Monitoring
Rabu 25 Jan 2023 09:00 WIB Wednesday, January 25, 2023 09.00 WIB	Online	Progress dan Evaluasi World Superbike 2023 Progress and Evaluation of 2023 World Superbike
Kamis 26 Jan 2023 08:00 WIB Thursday, January 26, 2023 08.00 WIB	Online	Update Top Ten Risk Update Top Ten Risk
Selasa, 7 Februari 2023 jam 13.00 WIB (online) Tuesday, February 7, 2023 13.00 WIB (online)	Online	Update Top Risk dan Improvement of Assessment Update Top Risk and Improvement of Assessment
Kamis, 9 Februari jam 08.00 WIB (online) Thursday, February 9, 2023 08.00 WIB (online)	Online	Update Pembayaran Ganti Rugi HPL oleh Pemprov NTB Update on HPL Compensation Payments by the NTB Provincial Government
Senin, 20 Februari 2023 jam 08.00 WIB Monday, February 20, 2023 08.00 WIB	Online	Progress dan Persiapan WSBK dan Pullman Progress and Preparation for WSBK and Pullman
Selasa, Februari 21, 2023 16:00 WIB Jakarta Tuesday, February 21, 2023 16.00 WIB Jakarta	Online	Meeting Komite dengan MMN Committee Meeting with MMN
Jumat 10 Maret 2023 Friday, March 10, 2023	Online	Update progres pembangunan Golo Mori (PIC: Selvy) Closing Meeting External Audit on 2022 Financial Year
Selasa 14 Maret 2023 Tuesday, March 14, 2023	Online	Agenda 1: Progress Pendanaan (PMN, Bank Himbara, AIIIB, LPEI, PPA, dan risiko yang melekat) (PIC: Selvy) Agenda 1: Financing Process (PMN, Himbara Bank, AIIIB, LPEI, PPA, and inherent risks)
Senin 27 Maret 2023 Monday, March 27, 2023	Online	Evaluasi WSBK 2023 2023 WSBK evaluation
Kamis 6 April 2023 Thursday, April 6, 2023	Online	Risk Management and Legal Update Risk Management and Legal Update
Rabu 12 April 2023 Wednesday, April 12, 2023	Online	Pembahasan Lanjutan WBSK 2023: Pencatatan Revenue dari DORNA Discussion Update on 2023 WSBK: Revenue from DORNA
Rabu 12 April 2023 Wednesday, April 12, 2023	Online	Pembahasan AOI Assessment GCG & Tindak Lanjutnya AOI Assessment GCG Discussion and Follow-up
Senin, 17 April 2023 Monday, April 17, 2023	Online	Kinerja Keuangan Q1 2023 dan Proyeksi Arus Kas 2023 2023 Q1 Financial Performance and 2023 Cash Flow Projection
Jumat 5 Mei 2023 Friday, May 5, 2023	Online	Progress Audit Eksternal Tahun Buku 2022 Progress on External Audit in the 2022 Financial Year
Jumat 12 Mei 2023 Friday, May 12, 2023	Online	Update Top Ten Risk Update Top Ten Risk
Jumat 12 Mei 2023 Friday, May 12, 2023	Online	Kinerja keuangan dan operasi INP Q1 2023 Financial Performance and INP operational in 2023 Q1
Selasa 16 Mei 2023 Tuesday, May 16, 2023	Online	Kinerja keuangan dan operasi INU Q1 2023 Financial Performance and INU operational in 2023 Q1



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda
Kamis, 25 Mei 2023 Thursday, May 25, 2023	Online	Kickup Meeting Audit AUP dan AIIB AUP and AIIB Audit Kickup Meeting
Rabu, 7 Juni 2023 Wednesday, June 7, 2023	Online	Update PKS Kuta Keruak Update on PKS Kuta Keruak
Senin, 12 Juni 2023 Monday, June 12, 2023	Online	Update GCG Terintegrasi Permen BUMN 2023 termasuk IT Governance Update on GCG integrated with 2023 SOEs Minister including IT Governance
Selasa 13 Juni 2023 Thursday, June 13, 2023	Online	Update PSA 62 Audit 2022 Update on PSA 62 Audit 2022
Jumat 16 Juni 2023 Friday, June 16, 2023	Online	Agenda Pembahasan Utang Perusahaan per Mei 2023 serta agingnya Agenda for discussion of company debt as of May 2023 and its maturity
Jumat, 23 Juni 2023 Friday, June 23, 2023	Online	Update Risk and Implementasi Risk Champion Update Risk and Implementasi Risk Champion
Jumat, 7 Juli 2023 Friday, July 7, 2023	Online	Review progress tindak lanjut IA thd Management Letter dan PSA62 audit 2022 Review on IA follow-up progress on Management Letter and PSA 62 2022 Audit
Kamis, 20 Juli 2023 Thursday, July 20, 2023	Online	Update Progress Persiapan MotoGP 2023, pengembalian dana talangan ITDC oleh MGPA, skema bisnis MGPA-ITDC dalam pengelolaan sirkuit Mandalika Update progress on 2023 MotoGP preparation, refund of ITDC bailout by MGPA, MGPA-ITDC business scheme in Mandalika circuit management
Jumat, 21 Juli 2023 Friday, July 21, 2023	Online	Update Top Ten Risks Update Top Ten Risks
Senin, 24 Juli 2023 Monday, July 24, 2023	Online	Tindak lanjut restrukturisasi anak dan cucu usaha (Xplorin) Follow-up on subsidiaries and sub-subsidiaries restructuring (Xplorin)
Rabu, 26 Juli 2023 Wednesday, July 26, 2023	Online	Evaluasi realisasi kinerja Semester 1 dibandingkan dengan RKAP dan performa laporan keuangan sd TW3 Semester 1 performance evaluation compared with RKAP and financial report performance up to TW3
Jumat, 11 Agustus 2023 Friday, August 11, 2023	Online	Update Operasional dan Konstruksi Hotel Pullman Update Operational and Construction of Pullman Hotel
Rabu, 16 Agustus 2023 Wednesday, August 16, 2023	Online	Update Cashflow Projection Update Cashflow projection
Senin, 21 Agustus 2023 Monday, August 21, 2023	Online	Update Persiapan MotoGP Update MotoGP preparation
Rabu, 23 Agustus 2023 Wednesday, August 23, 2023	Online	Update Procurement dan Kebijakan Mutu&Pelayanan Update procurement and quality and service policy
Kamis, 24 Agustus 2023 Thursday, August 24, 2023	Online	Top Risks dan Legal Update Top Risks and Legal Update
Rabu, 13 September 2023 Wednesday, September 13, 2023	Online	Progress Persiapan MotoGP 2023 Progress of 2023 MotoGP Preparation
Senin, 25 September 2023 Monday, September 25, 2023	Online	meeting RKAP dgn Divisi Finance RKAP meeting with Finance Division
Senin, 25 September 2023 Monday, September 25, 2023	Online	Update Top 10 Risks, Kasus Hukum dan Asset Management Update Top 10 Risks, Legal Cases, and Asset Management
Rabu, 20 September 2023 Wednesday, September 20, 2023	Online	Update The Golo Mori Update The Golo Mori

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agenda
Senin, 23 Oktober 2023 Monday, October 23, 2023	Online	Top Risks dan Legal Update Top Risks dan Legal Update
Senin, 23 Oktober 2023 Monday, October 23, 2023	Online	Evaluasi Event MotoGP 2023 MotoGP 2023 evaluation
Senin, 23 Oktober 2023 Monday, October 23, 2023	Online	Update Tindakanlanjutan AOI GCG dan Persiapan GCG Assessment 2023 Update on AOI GCG follow-up and preparation for 2023 GCG Assessment
Kamis, 26 Oktober 2023 Thursday, October 26, 2023	Online	Pembahasan Laporan Keuangan s.d Sept 2023 dengan Komite Discussion on Financial Report until September 2023 with the Committee
Rabu, 15 November 2023 Wednesday, November 15, 2023	Online	Kinerja Keuangan Oktober 2023 Financial Performance in October 2023
Selasa, 21 November 2023 Tuesday, November 21, 2023	Online	Top Risks dan Legal Update Top Risks and Legal Update
Rabu, 22 November 2023 Wednesday, November 22, 2023	Online	Pembahasan Laporan PMN TA 2021 (Laporan hasil review BPKP dan persiapan post audit BPK) Discussion on PMN FY 2021 Report (Report on BPKP review and preparation for BPK Post Audit)
Rabu, 13 Desember 2023 Wednesday, December 13, 2023	Online	Progress Tindak Lanjut atas Management Letter 2022, PSA 62 dan Rekomendasi BPK dan BPKP Progress on Follow-up of 2022 Management Letter, PSA 62, and BPK and BPKP recommendation
Rabu, 13 Desember 2023 Wednesday, December 13, 2023	Online	Top Risk & Legal Updates termasuk Inventarisasi Aset Top Risk & Legal Updates termasuk Inventarisasi Aset
Kamis, 14 Desember 2023 Thursday, December 14, 2023	Online	Update Golomori Update The Golo Mori
Selasa, 19 Desember 2023 Tuesday, December 19, 2023	Online	Kinerja Keuangan Bulanan (posisi 30 November) 2023 Monthly Financial Performance (as of November 30) 2023

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan kajian maupun memberikan rekomendasi, masukan, atau pendapat yang telah dibuat selama atas permasalahan-permasalahan tertentu berdasarkan penugasan Dewan Komisaris, meliputi:

Task Implementation Report for 2023

Throughout 2023, the Risk Monitoring Committee has carried out its duties and responsibilities by conducting studies and providing recommendations, inputs, or opinions on specific issues based on assignments from the Board of Commissioners, including:

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
1	IM.01/KMR/I/2023	31 Januari 2023 January 31, 2023	Belum Diaudit Unaudited
2	S-01/KMR/ITDC/I/2023	7 Februari 2023 February 7, 2023	Laporan TW IV KMR KMR Q4 Report
3	S-02/KMR/ITDC/I/2023	7 Februari 2023 February 7, 2023	Laporan Tahunan KMR KMR Annual Report
4	IM.02/KMR/III/2023	13 Maret 2023 March 13, 2023	Telaah Komite atas Rencana Tambahan Fasilitas Pinjaman Perusahaan terkait Pembiayaan Promoter Fee Event WSBK 2023 Committee Review of Plans for Additional Company Loan Facilities related to Financing the 2023 WSBK Promoter Fee Event



No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
5	S-03/KMR/ITDC/IV/2023	28 April 2023 April 28, 2023	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2023 Submission of Report on the Implementation of Duties of the Risk Management Committee for the First Quarter of 2023
6	IM.03/KMR/IV/2023	29 April 2023 April 29, 2023	Telaah KA Aspek Keuangan Laporan Manajemen TW I Tahun 2023 Audit Committee Review of Financial Aspects of Q1 2023 Management Report
7	IM.04/KMR/VI/2023	14 Juni 2023 June 14, 2023	Telaah KMR atas FS Audited 2023 KMR Review on Audited FS 2023
8	IM.05/KMR/VI/2023	23 Juni 2023 June 23, 2023	Telaah Komite atas Permohonan penyesuaian RAB Awal Tranche E dan Perpanjangan Jangka Waktu Penarikan (Availability Period) atas Fasilitas Kredit Investasi Ekspor (KIE) Tahun 2020 Committee Review of the Request for Adjustment of the Initial RAB for Tranche E and Extension of the Availability Period for the 2020 Export Investment Credit Facility (KIE)
9	IM.06/KMR/VII/2023	13 Juli 2023 July 13, 2023	Telaah Komite Manajemen Risiko terkait PSA 62 audit tahun 2022 Risk Management Committee review regarding PSA 62 audit in 2022
10	IM.07/KMR/VII/2023	13 Juli 2023 July 13, 2023	Telaah Komite Manajemen Risiko Atas Manajemen Aset Risk Management Committee Review of Asset Management
11	IM.08/KMR/VII/2023	13 Juli 2023 July 13, 2023	Telaah Komite Manajemen Risiko atas Strategi Mempertahankan kelangsungan Usaha dan Entitas Anaknya Risk Management Committee review of strategies to maintain business continuity and its subsidiaries
12	IM.09/KMR/VI/2023	13 Juli 2023 July 13, 2023	Telaah KMR Tentang Reviu Tambahan PMN Tahun Anggaran 2023 KMR Review of Additional PMN Review for Fiscal Year 2023
13	IM.10/KMR/VII/2023	31 Juli 2023 July 31, 2023	lap manajemen sem I Semester 1 Management Report
14	IM.11/KMR/VII/2023	31 Juli 2023 July 31, 2023	Revisi RKAP RKAP Revision
15	S-03/KMR/ITDC/IV/2023	31 Agustus 2023 August 31, 2023	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2023 Submission of Risk Management Committee Duties Implementation Report for Quarter II 2023
16	IM.12/KMR/VIII/2023	31 Agustus 2023 August 31, 2023	Telaah KMR atas Permohonan Persetujuan Penambahan Skema Kerjasama dengan Mitra KMR review on the Application for Approval of Additional Collaboration Schemes with Partners
17	IM.13/KMR/X/2023	12 Oktober 2023 October 12, 2023	Telaah Komite atas Review dan Persetujuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Jumlah dan Nilai Tertentu Penunjukan Langsung Committee Review on Review and Approval of Guidelines for Procurement of Goods and Services (PBJ) as well as Specific Amounts and Values of Direct Appointments
18	IM.14/KMR/X/2023	30 Oktober 2023 October 30, 2023	Telaah KMR atas Laporan Manajemen Triwulan III 2023 KMR Review of the Third Quarter 2023 Management Report
19	IM.15/KMR/XI/2023	08 November 2023 November 8, 2023	Telaah Revisi RKAP 2024 ITDC Study of ITDC's 2024 RKAP Revision

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris

Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Komite Pemantau Risiko didasarkan atas komitmen kehadiran dalam rapat dan keaktifan dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dasar penilaian dan metode sesuai dengan yang tercantum pada Piagam Komite Pemantau Risiko, antara lain tingkat efektivitas Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya, tingkat kehadiran dalam rapat Komite Pemantau Risiko, tingkat pemahaman anggota Komite Pemantau Risiko atas berbagai permasalahan di Perusahaan, Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Pemantau Risiko paling sedikit satu tahun sekali dan evaluasi Komite Pemantau Risiko dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.

Organ Pendukung Direksi

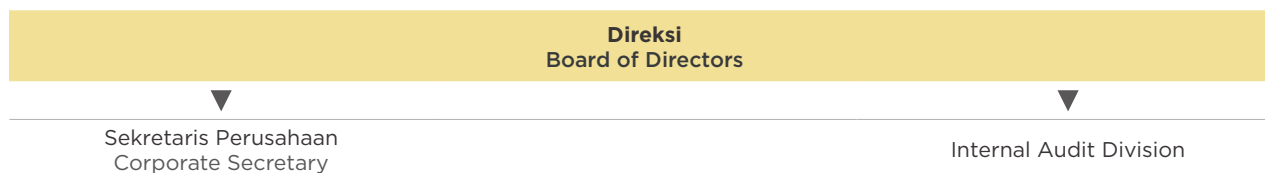
Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi bisnis, perencanaan, dan pengelolaan Perusahaan, Direksi telah membentuk organ pendukung Direksi, yakni Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit Division. Seluruh organ pendukung Direksi menjalankan fungsi perencanaan dan kontrol terhadap berbagai aspek pengelolaan bisnis Perusahaan.

Evaluation and Performance Assessment of the Risk Monitoring Committee by the Board of Commissioners

The Board of Commissioners' assessment of the Risk Monitoring Committee's performance is based on their commitment to attendance at meetings and their active participation in providing input and recommendations to the Board of Commissioners in accordance with their duties and functions. The basis and method of assessment, as outlined in the Risk Monitoring Committee Charter, include the effectiveness of the Risk Monitoring Committee in performing its functions, the attendance rate at Risk Monitoring Committee meetings, and the level of understanding of Risk Monitoring Committee members on various issues within the Company. The Board of Commissioners evaluates the performance of the Risk Monitoring Committee at least once a year, comparing actual performance against the roles and responsibilities of the Risk Monitoring Committee.

Supporting Organs of the Board of Directors

To support the implementation of business functions, planning, and management of the Company, the Board of Directors has established supporting bodies, namely the Corporate Secretary and the Internal Audit Division. All supporting bodies of the Board of Directors carry out planning and control functions over various aspects of the Company's business management.



Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang bertanggung jawab sebagai penghubung (*liaison officer*), melaksanakan kegiatan kesekretariatan, kebijakan legal Perusahaan, dan kebijakan komunikasi Perusahaan, baik secara internal antara organ Perusahaan maupun secara eksternal dengan

Corporate Secretary

The Corporate Secretary is a supporting body of the Board of Directors responsible for acting as a liaison officer, handling secretarial activities, corporate legal policies, and corporate communication policies, both internally between corporate organs and externally with stakeholders. The Corporate Secretary is also responsible for forming a positive and accurate image



pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab terhadap pembentukan citra positif Perusahaan secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan/perundang-undangan, serta aspek keterbukaan informasi dari Perusahaan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Keberadaan Sekretaris Perusahaan di Perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Board Manual Direksi yang dimiliki Perusahaan. Pejabat Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, sekaligus membantu tugas Direksi dalam memenuhi ketentuan GCG.

Pejabat Sekretaris Perusahaan dan Dasar Pengangkatan

Direksi telah menunjuk Hanna Loise M. Pandjaitan sebagai Pgs Vice *President Corporate Secretary* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 035.3/SK/ITDC.01/VII/2023.

of the Company for all stakeholders, ensuring the Company's compliance with laws/regulations, and ensuring transparency of the Company's information.

Appointment and Dismissal of the Corporate Secretary

The existence of the Corporate Secretary in the Company is regulated by Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) and the Company's Board Manual of Directors. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners. In carrying out their duties, the Corporate Secretary also reports directly to the President Director, assisting the Board of Directors in fulfilling GCG requirements.

Corporate Secretary and Basis of Appointment

The Board of Directors has appointed Hanna Loise M. Pandjaitan as Acting Vice President Corporate Secretary based on Directors' Decree No. 035.3/SK/ITDC.01/VII/2023.

Hanna Loise Marlyunita Pandjaitan Pgs Vice President Corporate Secretary

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tanggal Lahir Date of Birth	Denpasar, 23 Juni 1990 June 23, 1990
Usia Age	34 tahun 34 years old
Domisili Domicile	Badung, Bali
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No 035.3/SK/ITDC.01/VII/2023 Decree of the Board of Directors No 035.3/SK/ITDC.01/VII/2023
Riwayat Pendidikan Education Background	Sarjana Fakultas Ekonomi Akuntansi - Universitas Pelita Harapan Surabaya (2012) Bachelor of Economy (Accounting) - Pelita Harapan Surabaya University (2012)
Pengalaman Kerja Working Experience	- Budgeting Officer PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) (2013-2016) - Budget Controller Supervisor PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) (2016-2022) - Corporate Correspondence & Reporting Manager PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) (2022-sekarang) - Pgs Vice President Corporate Secretary PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) (July 3, 2023-June 3, 2024)

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

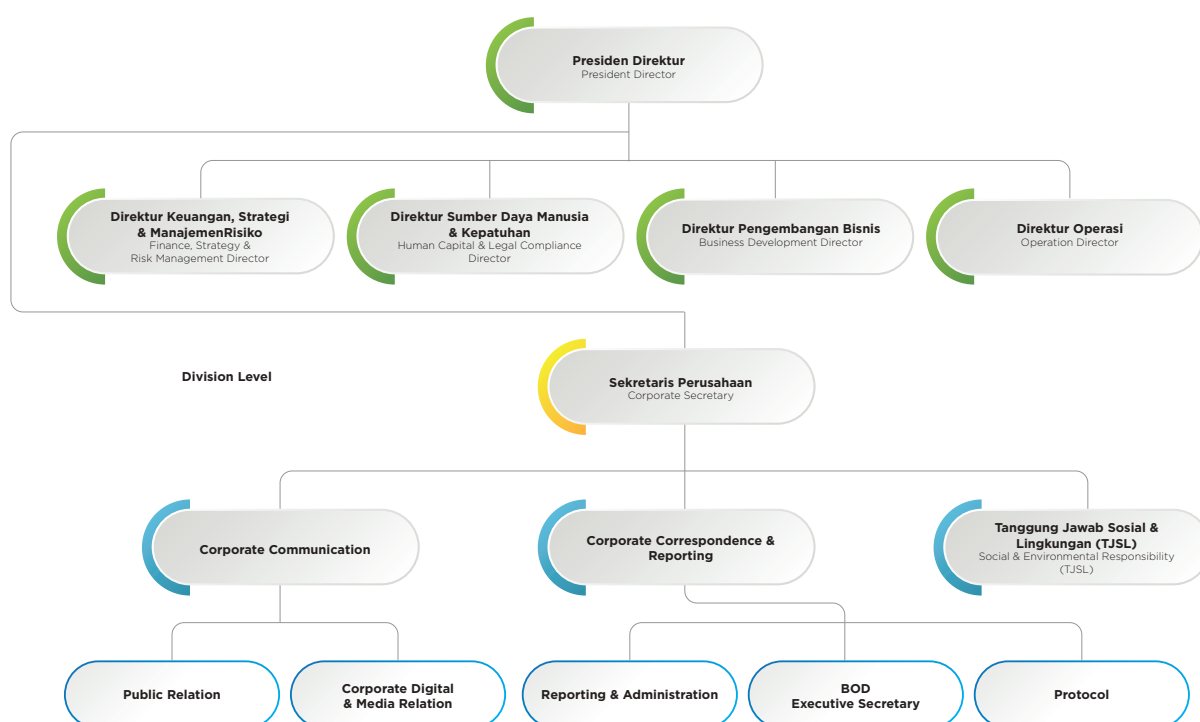
Sekretaris Perusahaan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta *Charter* Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam kedua pedoman tersebut, keberadaan Sekretaris Perusahaan telah diuraikan secara jelas.

Work Guidelines for the Corporate Secretary

The Corporate Secretary has work guidelines outlined in the Corporate Governance Guidelines as well as the Charter of the Board of Commissioners and the Board of Directors. In both guidelines, the role and existence of the Corporate Secretary are clearly described.

Struktur Organ Sekretaris Perusahaan

Organizational Structure of the Corporate Secretary



Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 028/SK/ITDC.01/IX/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Struktur Organisasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Pada tahun 2023, jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Sekretaris Perusahaan sebanyak 15 orang.

The organizational structure of the Corporate Secretary is established in accordance with the Board of Directors' Decree of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 028/SK/ITDC.01/IX/2022 dated September 9, 2022, concerning the Organizational Structure of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. In 2023, the number of employees in the Corporate Secretary unit was 15 people.



Jabatan Title	Nama Name
Pgs Vice President Corporate Secretary merangkap Corporate Correspondence & Reporting Manager	Hanna Loise M. Pandjaitan
Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Manager Social & Environmental Responsibility (TJSL) Manager	I Gusti Ngurah Agung Ramabayu Permana
Corporate Digital & Media Relation Senior Supervisor	I Gede Bagus Rinta Sanjaya
Reporting and Administration Officer	Ni Putu Ari Suarmini
Executive Secretary Supervisor	Ni Luh Putu Maykayani
Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Supervisor (PJ) Social & Environmental Responsibility (TJSL) Supervisor	Anak Agung Sagung Mas Ayu Anggraeni
Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Officer	I Made Wijaya Kusuma
Reporting & Administration Officer	Luh Putu Cahya Indrayani
Corporate Digital & Media Relation Officer	Redyta Natasia
Public Relations Officer	Putu Devi Chianti
Public Relations Officer	Ni Wayan Anggun Purbasari
Reporting & Administration Officer	I Made Telaga Teguh Diarsa
Reporting & Administration Officer	Aulia Bunga Yudena
Executive Secretary Officer	Intanta Abigail Manurung
Executive Secretary Officer	Alifia Heidinia

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Sebagai pejabat penghubung pejabat penghubung (*liaison officer*) antar Organ Perseroan maupun antara Perseroan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya serta sebagai penanggung jawab Sekretariat Perusahaan maupun Sekretariat Direksi untuk menata-usahakan dokumen-dokumen Perseroan;
2. Menjamin kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan termasuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala/ atau sewaktu-waktu apabila diminta;
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
5. Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi.

Roles and Responsibilities

The Corporate Secretary has the following main duties:

1. Acting as a liaison officer between corporate organs and between the company and other stakeholders, as well as being responsible for the Company's Secretariat and the Board Secretariat to organize company documents;
2. Ensuring compliance with laws and regulations, including ensuring that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance principles;
3. Providing required information to the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically or as requested;
4. Organizing and maintaining company documents, including but not limited to Shareholder Lists, Special Lists, and minutes of Board meetings, Board of Commissioners meetings, and General Meetings of Shareholders (GMS);
5. Carrying out the functions of organizing and documenting GMS and Board meetings.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk

1. Merekomendasikan RKAP unitnya sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)/*Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan.
2. Mengarahkan dan memastikan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui.
3. Mengarahkan jadwal dan tahap kegiatan menjelang RUPS/RUPSLB.
4. Mengarahkan jadwal, koordinasi dan proposal atas penerbitan *Annual Report*, *Management Report*, *Company Profile*, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan materi - materi produksi yang bersifat korporat.
5. Mengarahkan kegiatan inventarisasi semua dokumen dan arsip yang bersifat korporat yang bertaraf nasional/internasional (hubungan korespondensi melalui *Representative Office/Liaison Officer/Kantor cabang*).
6. Mengarahkan kegiatan *Review* proposal permintaan bantuan yang masuk.
7. Mengarahkan proses pengaturan perjalanan dinas, agenda/jadwal, penyiapan kelengkapan ruang kerja BOD.
8. Mengarahkan strategi komunikasi dan *Relationship Management* eksternal dan internal dalam membangun citra positif Perusahaan.
9. Mewakili Direksi/Perusahaan dalam hal rapat - rapat dengan instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sesuai arahan Direksi.
10. Memonitor permasalahan yang mengakibatkan ketidakpuasan/keluhan dari eksternal yang memiliki dampak terhadap perusahaan.
11. Merekomendasikan respon atau menyusun perencanaan skenario serta mengkomunikasikan respon terhadap informasi yang ada dalam multimedia, baik berupa surat kabar, majalah, berita radio/TV/*Audio Visual* lainnya yang memiliki dampak terhadap perusahaan.
12. Merekomendasikan *Press Release* dan sambutan atas setiap pernyataan sesuai arahan Direksi.
13. Memonitor *Press Release* dan sambutan dari Strategy Business Unit yang akan disampaikan ke media.
14. Mengarahkan kegiatan pembinaan terhadap Mitra Binaan secara berkala sesuai jadwal dan

Additionally, the Corporate Secretary is responsible for:

1. Recommend the unit's RKAP in accordance with the Company's Long Term Work Plan (RJPP)/ Company Key Performance Indicator (KPI).
2. Direct and ensure the implementation of the Work Plan and Budget in accordance with the approved Work Plan and Budget.
3. Direct the schedule and stages of activities ahead of RUPS/RUPSLB.
4. Directing the schedule, coordination and proposals for the publication of the Annual Report, Management Report, Company Profile, Public Information Disclosure (KIP) and corporate production materials.
5. Directs inventory activities of all corporate documents and archives at national/international level (correspondence relations via Representative Office/Liaison Officer/Branch Office).
6. Directing review activities for proposals for incoming assistance requests.
7. Direct the process of arranging official travel, agenda/schedule, preparing BOD work space equipment.
8. Directing external and internal communication and Relationship Management strategies in building a positive image of the Company.
9. Represent the Board of Directors/Company in meetings with government agencies and other institutions in accordance with the direction of the Board of Directors.
10. Monitor problems resulting in dissatisfaction/complaints from external sources that have an impact on the company.
11. Recommend responses or prepare scenario plans and communicate responses to information contained in multimedia, whether in the form of newspapers, magazines, radio/TV/other Audio Visual news that have an impact on the company.
12. Recommend Press Releases and comments on each statement according to the direction of the Board of Directors.
13. Monitor Press Releases and remarks from the Strategy Business Unit which will be conveyed to the media.
14. Direct coaching activities for Development Partners on a regular basis according to schedule



melaksanakan *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap Mitra Binaan yang macet.

15. Mengarahkan kegiatan pencatatan administrasi kegiatan pembinaan, transaksi piutang - piutang Mitra Binaan, dan pembukuan atas aktivitas PKBL.
16. Mengarahkan kegiatan penyusunan laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan PKBL, TJSL dan CSR untuk disampaikan kepada Pemegang saham dan Dewan Komisaris.
17. Mengidentifikasi kebutuhan jumlah sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung rencana usaha Perusahaan.
18. Menetapkan pengembangan kompetensi bawahan untuk memastikan pencapaian kinerja individu dan pengembangan kompetensi bawahan.
19. Mengusulkan pergerakan karir bawahnya.
20. Menyiapkan perencanaan suksesi pada unitnya.
21. Menyetujui permohonan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan kerja di unitnya serta pemenuhan dokumen teknis untuk permohonan pengadaan barang dan jasa untuk kemudian disampaikan kepada unit *Procurement*.
22. Melaporkan dan menetapkan laporan kegiatan unitnya secara berkala.
23. Mengidentifikasi profil risiko serta mitigasinya terhadap aktivitas/kegiatan di unitnya.
24. Mendorong semua sistem serta proses kerja dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
25. Memastikan seluruh aktivitas kerja dilakukan sesuai standar HSE/K3.
26. Memberi jawaban langsung dan/atau mereviu jawaban tertulis yang dipersiapkan atas pertanyaan auditor termasuk data-data yang diperlukan pada saat audit internal/eksternal berlangsung serta menindaklanjuti hasil temuan audit baik internal maupun eksternal.

Program Pengembangan Kompetensi

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Sekretaris Perusahaan untuk menambah wawasan serta pengetahuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

and carry out *Rescheduling* and *Reconditioning* for Development Partners who are stuck.

15. Directs administrative recording activities for coaching activities, transactions of receivables from Foster Partners, and bookkeeping for PKBL activities.
16. Directing activities to prepare regular reports regarding the implementation of PKBL, TJSL and CSR activities to be submitted to shareholders and the Board of Commissioners.
17. Identify the need for competent human resources to support Company business plan.
18. Determine the development of subordinate competencies to ensure the achievement of individual performance and the development of subordinate competencies.
19. Suggests career improvement for subordinates.
20. Prepare succession planning for the unit.
21. Approve requests for procurement of goods and services for work purposes and fulfill technical documents for requests for procurement of goods and services to then be submitted to the Procurement unit.
22. Report and determine unit activity reports periodically.
23. Identify risk profiles and their mitigation for activities in the unit.
24. Encourage all systems and work processes to be carried out in accordance with applicable Standard Operating Procedures (SOP) and Good Corporate Governance (GCG) principles.
25. Ensure that all work activities are carried out in accordance with HSE/K3 standards.
26. Provide direct answers and/or review prepared written answers to the auditor's questions, including the data required during the internal/external audit and follow up on the results of both internal and external audit findings.

Competency Development Program

The Company facilitates competency development programs for the Corporate Secretary to enhance their knowledge and capabilities in carrying out their duties and responsibilities. Information about training activities and competency enhancement for the Corporate Secretary can be found in the Company Profile section of this Annual Report.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melalui sejumlah aktivitas/kegiatan, antara lain:

A. Corporate Correspondence & Reporting Department

- Melaksanakan dan Update Tata Naskah Dinas Pada tahun 2023 direncanakan untuk meng-upgrade aplikasi e-Office serta dasar pelaksanaannya agar sesuai dengan kondisi saat ini.
- Korespondensi Perusahaan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat di perusahaan.
- Inventarisir Dokumen Perusahaan Pelaksanaan pendokumentasian arsip perusahaan.
- Pelaporan Perusahaan Secara rutin menyiapkan laporan manajemen dan laporan perusahaan lainnya dan melaporkan kepada para *stakeholder*.
- Keprotokoleran Direksi Pelaksanaan pendampingan kegiatan direksi yang berkaitan dengan aturan dalam acara formal atau non-formal.
- Perencanaan Digitalisasi Arsip Penyiapan SOP untuk proses digitalisasi arsip perusahaan.
- BOD Support Penyiapan segala kebutuhan Direksi.

B. Kegiatan Bagian Komunikasi Korporasi

- Secara konsisten memaksimalkan pemberitaan positif mengenai Perusahaan di media massa.
- Mengelola akun media sosial Perusahaan (Instagram, Facebook, Twitter), melalui pemuatan berita/informasi, activation, dan penanganan keluhan.
- Melakukan pemuatan berita di website Perusahaan secara regular, mencapai 157 berita mengenai kegiatan Korporasi, The Nusa Dua, The Mandalika, The Golo Mori dan anak serta cucu usaha ITDC sepanjang tahun 2023.
- Melakukan penerbitan media internal Perusahaan ITDC Update secara konsisten mencapai 18 penerbitan selama tahun 2023.

Brief Report on the Implementation of Corporate Secretary Duties and Responsibilities for the Year 2023

Throughout 2023, the Corporate Secretary has carried out duties and responsibilities through a number of activities, including:

A. Corporate Correspondence & Reporting Department

- Implementing and Updating Official Manuscripts In 2023 it is planned to upgrade the e-Office application and basic implementation in accordance with current condition
- Company Correspondence Implementation of correspondence activities in the company.
- Inventory of Company Documents Implementation of company archive documentation.
- Company Reporting Routinely prepare management reports and other company reports and report to stakeholders.
- Directors' protocol. Implementation of assistance to directors' activities related to regulations at formal or non-formal events.
- Archives Digitization Planning Preparation of SOP for the company archives digitization process
- BOD Support Preparation of all the directors' needs.

B. Activities of the Corporate Communications Department

- Consistently improve positive reporting about the Company in the mass media.
- Manage the Company's social media accounts (Instagram, Facebook, Twitter), by posting news/information, activation, and handling complaints.
- Posting news on the Company's website regularly, reaching 157 news stories regarding Corporate activities, The Nusa Dua, The Mandalika, The Golo Mori and ITDC's subsidiaries and sub-subsidiaries throughout 2023.
- Publishing the Company's internal media ITDC Update consistently reaching 18 publications throughout 2023.



- Membina hubungan baik dengan media massa (media relations) melalui pemenuhan permintaan data dan informasi, kerja sama, peringatan hari penting terkait media, serta penanganan isu yang berpotensi mengganggu reputasi perusahaan, sehingga dapat menghasilkan perimbangan berita di media-media terkait.
- Mengkoordinasikan penggunaan website oleh unit kerja lain untuk menginformasikan mengenai kegiatan lelang, undangan investasi, dan promosi, sebagai bagian dari keterbukaan informasi, sebanyak 53 kegiatan selama tahun 2023.
- Menangani administrasi penanganan LAPOR!-SP4N secara reguler dengan cara membuka portal LAPOR!-SP4N setiap 1 hari sekali untuk melihat apakah terdapat laporan publik yang ditujukan ke ITDC. Selama tahun 2023 mencapai NIHIL laporan.
- Melakukan komunikasi dengan stakeholders untuk pengaturan pertemuan, pemenuhan permintaan data dan informasi, serta dukungan penyiapan materi pertemuan, dalam upaya membina hubungan baik, dan meningkatkan dukungan stakeholders terhadap goodwill dan kegiatan-kegiatan Perusahaan.
- Sepanjang tahun 2023 terdapat 3 permintaan informasi publik yang telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari implementasi KIP.
- Fostering good relations with the mass media (media relations) through fulfilling requests for data and information, cooperation, commemorating important days related to the media, as well as handling issues that have the potential to harm the company's reputation, to produce balanced news in the relevant media.
- Coordinate the use of the website by other work units to provide information on auction activities, investment invitations and promotions, as part of information disclosure, totaling 53 activities during 2023.
- Handle the administration of LAPOR!-SP4N regularly by opening the LAPOR!-SP4N portal once a day to see any public reports addressed to ITDC. During 2023, the Company achieved ZERO reports.
- Communicate with stakeholders to arrange meetings, fulfill requests for data and information, as well as support in preparing meeting materials, to foster good relations, and increase stakeholder support for goodwill and the Company's activities.
- Throughout 2023 there were 3 requests for public information that have been followed up as part of KIP implementation.

C. Departemen Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Departemen Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan senantiasa melaksanakan program TJSL yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023, tanggal 26 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan juga peraturan lainnya yang masih berlaku.

Program TJSL ITDC berorientasi pada 4 (empat) pilar pembangunan meliputi pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar hukum tata kelola dengan memperhatikan prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) klaster BUMN jasa pariwisata dan pendukung.

C. The Department of Social & Environmental Responsibility

The Department of Social & Environmental Responsibility always implements the TJSL program in accordance to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/03/2023, dated March 26, 2023, concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Business Entities and also other regulations that still apply.

The ITDC TJSL program is oriented towards 4 (four) development pillars including social pillars, economic pillars, environmental pillars and legal pillars of governance by taking into account the priority sustainable development goals (SDGs) of the tourism and supporting SOEs services cluster.

Audit Internal

Profil Divisi, Struktur, dan Kedudukan

Perusahaan telah membentuk Divisi Audit Internal sebagai organ pendukung Direksi yang bertujuan untuk melakukan Audit Internal yang merupakan kegiatan *assurance* dan konsultasi (consultative management) yang independen dan objektif. Pembentukan Internal Audit Division senantiasa mengacu pada Pasal 67 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur bahwa di setiap BUMN wajib dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat pengawasan internal perusahaan.

Pada tanggal 17 Desember 2020, Perusahaan melakukan perubahan Divisi Audit, Compliance and Risk Management menjadi Internal Audit Division (IAD) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 025/KEP/DIR/ITDC/XII/2020.

Mekanisme dan Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Audit

VP Internal Audit, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Profil VP Internal Audit, serta Dasar Pengangkatan

Berdasarkan Surat Usulan Direksi No. 434.2/DIR/ITDC.01/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. S-41/DEKOM.ITDC/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, Direksi mengangkat Muhamad Slamet Umarjadikusumah sebagai Vice President Internal Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi 031/SK/ITDC.01/IX/2021 tanggal 09 September 2022.

Internal Audit

Division Profile, Structure, and Position

The Company has established the Internal Audit Division as a supporting organ of the Board of Directors aimed at conducting Internal Audits, which are independent and objective assurance and consultative management activities. The establishment of the Internal Audit Division always refers to Article 67 of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, which regulates that in every SOE, an Internal Supervisory Unit (SPI) must be formed, which is the internal supervisory apparatus of the company.

On December 17, 2020, the Company made changes to the Audit, Compliance, and Risk Management Division, renaming it the Internal Audit Division (IAD), as stipulated in Board of Directors' Decree No. 025/KEP/DIR/ITDC/XII/2020.

Mechanism and Parties Appointing and Dismissing the Head of the Audit Division

The VP Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners.

Profile of the VP Internal Audit, and Basis of Appointment

Based on the Board of Directors Proposal Letter No. 434.2/DIR/ITDC.01/XII/2021 dated December 22, 2021 and the Board of Commissioners Approval Letter No. S-41/DEKOM.ITDC/XII/2021 dated December 22, 2021, the Board of Directors appointed Muhamad Slamet Umarjadikusumah as Vice President Internal Audit as stipulated by Board of Directors Decree 031/SK/ITDC.01/IX/2021 dated September 09, 2022.

Muhamad Slamet Umarjadikusumah Vice President Internal Audit

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tanggal Lahir Date of Birth	18 Mei 1970 May 18, 1970
Usia Age	53 Tahun 53 years old
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat West Java


Muhamad Slamet Umarjadikusumah
Vice President Internal Audit

Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Keputusan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No : 031/SK/ITDC.01/IX/2021 tanggal 09 Setember 2022 tentang Alih Tugas Pegawai PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Decree of the Board of Directors of PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero) No: 031/SK/ITDC.01/IX/2021 dated September 9, 2022, concerning Transfer of Duties of Employees of PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero)
Riwayat Pendidikan Education Background	S 2 (Master Degree - Magister Management)
Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku Applicable Education and/or Professional Certification	• Certified Internal Audit Executive (CIAE) • Certified Risk Management Professional Advance / CRMPA • Pelatihan Audit Internal SNI ISO 37001:2016 Audit Internal Training SNI ISO 37001:2016 • Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 19011:2018 Anti-Bribery Management System based on ISO 19011:2018 • Joint Venture between SOE and Private Sector • BSE GRC Masterclass - Introduction to ESG & IFC Performance Standard • GRC Integrated Information for Supervisory Board • ESG For Boards - Governance of ESG • Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Maintain Productivity for Economic Transformation • Pelatihan Penyusunan Rencana Audit Tahunan Training on Preparing Annual Audit Plans • Masterclass Governance Risk Compliance
Pengalaman Kerja Working Experience	Kepala Divisi Internal Audit Al Ijarah Indonesia – Member of Bank Muamalat Head of Al Ijarah Indonesia Internal Audit Division

Jumlah, Komposisi dan Demografi SDM Internal Audit Division

Jumlah karyawan dalam lingkup Internal Audit Division pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 (empat) orang. Adapun komposisi dan kualifikasi karyawan dalam lingkup Internal Audit Division adalah sebagai berikut:

Number, Composition, and Demographics of Internal Audit Division Personnel

The number of employees within the scope of the Internal Audit Division in 2023 is 4 (four) people. The composition and qualifications of employees within the scope of the Internal Audit Division are as follows:

No.	Nama Anggota Name of Member	Jabatan Title	Pendidikan Terakhir Highest Education Level	Lembaga Pendidikan Institution Name	Tahun Lulus Year Graduated
1.	Muhamad Slamet Umarjadikusumah	Vice President Internal Audit	S1 Bachelor Degree	Universitas Pancasila	2002
2.	Irfan Egi Febrianto	Financial Audit Officer	S1 Bachelor Degree	Bina Nusantara University	2015
3.	Muhammad Ariq Fiantra	Financial Audit Officer	S1 Bachelor Degree	Bina Nusantara University	2020
4.	Zaenal Arifin	Operational Audit Officer	S1 Bachelor Degree	Universitas Islam Bandung	1993

Struktur Organisasi dan Kedudukan Internal Audit

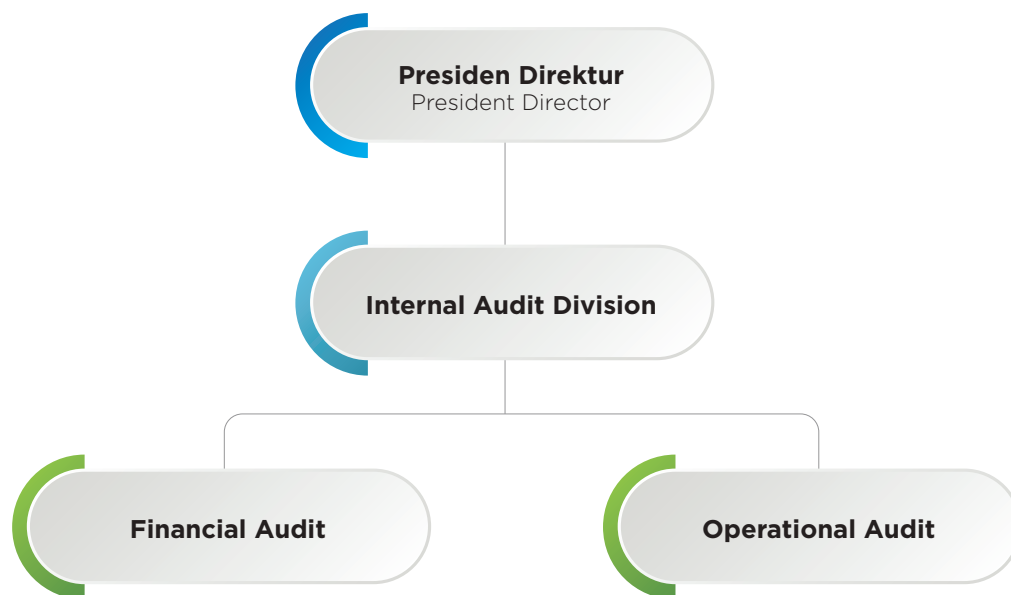
Secara struktural, IAD bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite

Organizational Structure and Position of Internal Audit

Structurally, the IAD reports to the President Director and has a functional relationship with the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 038.1/SK/ITDC.01/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Struktur Organisasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, struktur organisasi IAD adalah sebagai berikut:

Based on the Board of Directors' Decree of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 038.1/SK/ITDC.01/VII/2023 dated July 31, 2023, regarding the Organizational Structure of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, the organizational structure of the IAD is as follows:



Internal Audit Division (IAD) merupakan mitra kerja strategis bagi manajemen melalui sejumlah kegiatan, seperti:

1. Evaluasi berdasarkan audit berbasis risiko secara objektif;
2. Jasa konsultasi atau sebagai narasumber; dan
3. Memberikan keyakinan yang memadai terutama terkait dengan peningkatan dan penyempurnaan manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Memberikan keyakinan memadai yang objektif kepada Direksi dan Manajemen serta Dewan Komisaris atas tindakan pengelolaan pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan;
2. Pengamanan kekayaan perusahaan yaitu mencegah kemungkinan adanya kebocoran dan pemborosan;

The Internal Audit Division (IAD) is a strategic partner for management through various activities, such as:

1. Evaluation based on risk-based audits objectively;
2. Consultancy services or as a resource person; and
3. Providing adequate assurance, especially regarding the improvement and refinement of risk management, internal controls, and governance processes.

The expected outcomes of these activities include:

1. Providing objective adequate assurance to the Board of Directors, Management, and the Board of Commissioners regarding the actions of internal control management, risk management, and corporate governance;
2. Securing corporate assets by preventing potential leaks and wastage;



3. Peningkatan penghematan, pengeluaran tepat sasaran dan peningkatan daya guna serta hasil guna kegiatan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan;
4. Ketaatan Perusahaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melaksanakan pengendalian internal untuk kegiatan keuangan, kegiatan operasional, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta kegiatan lainnya; dan
6. Memperbaiki SOP yang diperlukan serta menyiapkan pedoman/panduan pelaksanaan audit.

Internal Audit Charter

Perusahaan telah memiliki Internal Audit Charter yang berfungsi sebagai Pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga IAD dapat menjadi unit yang mandiri, dan independen. Internal Audit Charter diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 26.3/SK/82/ITDC.01/IX/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Piagam Audit Internal. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, IAD juga berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Internal Audit Charter telah ditinjau dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern (SPAI), yang antara lain mengatur kewenangan Fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Internal Audit Charter adalah pengakuan atas keberadaan dan komitmen seluruh organ perusahaan, khususnya organ utama perusahaan atas fungsi IAD, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan auditor internal dan pelaksanaan peran IAD sebagai stratejik partner bagi organ perusahaan lainnya.

Internal Audit Charter menjelaskan tentang latar belakang dan definisi, visi dan misi serta strategi, organisasi IAD, pertanggungjawaban, kode etik, jaminan mutu (*quality assurance*), penutup. Dalam menjalankan fungsinya, IAD memerlukan dukungan berupa komitmen dari seluruh pihak yang dinyatakan dalam bentuk Internal Audit Charter. Visi IAD ITDC adalah “Sebagai ‘Smart Partner’ yang independen,

3. Increasing savings, targeted spending, and improving the efficiency and effectiveness of company activities in achieving corporate objectives;
4. Compliance of the Company with applicable laws and regulations;
5. Implementing internal controls for financial activities, operational activities, Partnership and Community Development Programs, and other activities; and
6. Improving necessary Standard Operating Procedures (SOP) and preparing guidelines for audit implementation.

Internal Audit Charter

The Company has an Internal Audit Charter which serves as a guideline for the execution of its core duties and functions so the Internal Audit Division (IAD) can operate as an independent and autonomous unit. The Internal Audit Charter was amended based on Board of Directors Decision No. 26.3/SK/82/ITDC.01/IX/2022 dated September 8, 2022, regarding the Internal Audit Charter. In carrying out its duties and responsibilities, the IAD also adheres to the Annual Audit Plan (AAP).

The Internal Audit Charter has been reviewed and adjusted in accordance with applicable provisions considering the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (SPAI), which, among other things, regulate the authority of the Internal Audit Function to access all records, personnel, and company assets necessary for the execution of its duties. The Internal Audit Charter is an acknowledgment of the existence and commitment of all company organs, especially the main organs of the company, to the function of the IAD, which is used as the basis for the implementation of internal auditor oversight tasks and the execution of the IAD's role as a strategic partner to other company organs.

The Internal Audit Charter explains the background and definition, vision and mission, as well as strategy, organization of the IAD, accountability, code of ethics, quality assurance, and conclusion. In carrying out its functions, the IAD requires support in the form of commitment from all parties as stated in the Internal Audit Charter. The vision of the ITDC IAD is “To be an independent, objective,

objektif, profesional, terpercaya dan tanggap bagi Direksi dan Manajemen dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan”. IAD mempunyai peran di dalam perusahaan, sebagai berikut:

1. Memastikan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan di perusahaan sehingga dapat memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) yang objektif kepada Direksi, Manajemen dan Dewan Komisaris.
2. Memberikan saran/rekomendasi kepada manajemen dalam rangka mengembangkan kerangka kerja.
3. Mendorong diimplementasikannya konsep-konsep praktik terbaik (*best practice*) terkini mengenai pengendalian intern, manajemen risiko dan pola tata kelola perusahaan oleh manajemen perusahaan.

Pedoman Kerja Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Piagam Internal yang dimiliki, Internal Audit Division memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja pengawasan yang meliputi penugasan/layanan pemastian dan konsultasi serta pengembangan kompetensi auditor;
2. Melaksanakan penugasan/layanan pemastian yang meliputi:
 - a. Audit operasional untuk memastikan bahwa seluruh prosedur operasional telah dilaksanakan dengan efisien, efektif dan ekonomis guna mengidentifikasi setiap potensi penghematan dan keefektifan biaya serta membuat rekomendasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keefektifan biaya; melaksanakan penugasan khusus dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite audit yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan di atas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan;
 - b. Audit ketaatan untuk memastikan ketaatan dan mengevaluasi ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta prosedur perusahaan yang berlaku;
 - c. Audit keuangan atas pos-pos tertentu untuk mendukung audit laporan keuangan oleh auditor eksternal guna mengevaluasi

professional, trustworthy, and responsive ‘Smart Partner’ for the Board of Directors and Management in achieving the Company’s goals.” The IAD has a role in the company as follows:

1. Ensuring the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance within the company to provide reasonable assurance that is objective to the Board of Directors, Management, and the Board of Commissioners.
2. Providing advice/recommendations to management to develop a framework.
3. Encouraging the implementation of current best practices in internal control, risk management, and corporate governance patterns by company management.

Work Guidelines (Charter) of Duties and Responsibilities

Based on the Internal Charter held, the Internal Audit Division has the following main duties:

1. Formulating a supervisory work program covering assurance and consulting assignments/services and auditor competency development;
2. Carrying out assurance assignments/services including:
 - a. Operational audits to ensure that all operational procedures have been efficiently, effectively, and economically implemented to identify any potential savings and cost effectiveness and to make recommendations to improve efficiency and cost effectiveness; Special assignments from the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or relevant audit committees within the scope of the above work, such as investigations and disclosures of deviations, fraud, and wastage;
 - b. Compliance audits to ensure compliance and evaluate compliance with laws, regulations, and company policies and procedures;
 - c. Financial audits of specific items to support the external audit of financial statements to evaluate whether financial, management, and



apakah informasi keuangan, manajemen dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu;

- d. Audit khusus terhadap permasalahan yang perlu diperdalam, menindaklanjuti whistleblower atau adanya indikasi kecurangan (*fraud*) atas instruksi Direktur Utama atau Dewan Komisaris dan permintaan manajemen yang disetujui oleh Direktur Utama;
 - e. Audit atas teknologi informasi (TI) di lingkungan perusahaan;
 - f. Evaluasi dan penilaian (*assessment*) atas keefektifan pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan guna meyakini bahwa pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan telah memadai dan berfungsi dengan baik.
3. Melaksanakan penugasan/layanan konsultasi (*consultative service*) sebagai konsekuensi atas tindak lanjut penugasan/layanan pemastian (*assurance*) atau aktivitas tersendiri yang diminta oleh klien (Divisi atau Bagian, termasuk perusahaan afiliasi perseroan) di mana sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati dengan pihak yang meminta konsultasi;
 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif sebagai hasil penugasan/layanan pemastian dan konsultasi pada semua tingkatan manajemen;
 5. Menilai kecukupan sarana untuk memelihara dan melindungi aset perusahaan, dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan aset;
 6. Membuat laporan hasil pelaksanaan penugasan dan menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern;
 9. Menyelenggarakan administrasi untuk mendukung tertib administrasi dan menyampaikan pelaporan kemajuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama.

operational information significant to the audit scope has been presented accurately, completely, reliably, and in a timely manner;

- d. Special audits on issues requiring further investigation, follow-up on whistleblower reports, or indications of fraud instructed by the President Director or Board of Commissioners and management requests approved by the President Director;
 - e. Information technology (IT) audits within the company's environment;
 - f. Evaluation and assessment of the effectiveness of internal control implementation, risk management, and corporate governance to ensure that risk management, internal controls, and corporate governance processes are adequate and functioning effectively.
3. Carrying out consulting assignments/services as a consequence of follow-up on assurance assignments or separate activities requested by clients (Divisions or Departments, including affiliate companies of the corporation) where the nature and scope of the assignment have been agreed upon with the requesting party;
 4. Providing objective improvement advice and information as a result of assurance and consulting assignments at all management levels;
 5. Assessing the adequacy of facilities to maintain and protect company assets, and verifying the existence of assets;
 6. Preparing reports on assignment implementation results and presenting them to the President Director and the Board of Commissioners;
 7. Monitoring, analyzing, and reporting on the implementation of recommended corrective actions;
 8. Developing programs to evaluate the quality of internal audit activities;
 9. Administering to support administrative orderliness and submitting progress reports on the implementation of duties and responsibilities to the President Director.

Selain itu, Internal Audit juga memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses, memverifikasi dan menguji kehandalan seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan (termasuk personel, areal, lokasi/tempat yang dinyatakan tertutup untuk kepentingan umum) terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi, pendekatan audit sesuai dengan standar-standar yang berlaku dalam aktivitas audit internal.
3. Berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit atas kehendak Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit tanpa persetujuan dari Direktur Utama.
4. Mengadakan atau menghadiri panggilan rapat secara berkala dan insidental dengan Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit tanpa persetujuan dari Direktur Utama.
5. Berkoordinasi dengan auditor eksternal berdasarkan penugasan dari Direktur Utama dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan.

Dalam pelaksanaannya auditor internal bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal pada masing-masing proses bisnis dalam Perusahaan;
2. Mengembangkan rencana audit tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang fleksibel dengan menggunakan metodologi pendekatan risiko;
3. Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), termasuk segala tugas-tugas lain yang diminta oleh Direktur Utama dan Komite Audit Dewan Komisaris melalui Direktur Utama;
4. Secara berkesinambungan mengembangkan kompetensi auditor dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai serta sertifikasi profesional;
5. Berperan aktif dalam pengawasan mekanisme pelaksanaan Code of Conduct serta pencegahan tindakan kecurangan;
6. Melakukan audit investigasi terhadap indikasi kecurangan di dalam organisasi dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama;

In addition, Internal Audit also has the authority to:

1. Access, verify, and test the reliability of all relevant information about the company (including personnel, areas, locations/places declared closed to the public) related to its duties and functions.
2. Determine the scope, methods, manners, techniques, strategies, and audit approaches in accordance with applicable standards in internal audit activities.
3. Communicate directly with the Board of Commissioners and/or the Audit Committee at the request of the Board of Commissioners and/or the Audit Committee without the President Director's approval.
4. Hold or attend regular and incidental meetings with the Board of Commissioners and/or the Audit Committee without the President Director's approval.
5. Coordinate with external auditors based on assignments from the President Director in connection with supervision tasks.

In its execution, internal auditors are responsible for:

1. Assessing the adequacy and effectiveness of internal controls in each business process within the Company;
2. Developing an annual audit plan embodied in the Annual Audit Plan (AAP) that is flexible using risk-based methodology;
3. Implementing the Annual Audit Plan (AAP), including any other tasks requested by the President Director and the Audit Committee of the Board of Commissioners through the President Director;
4. Continuously developing auditor competencies with adequate knowledge, skills, and experience as well as professional certifications;
5. Actively participating in supervising the implementation mechanisms of the Code of Conduct and fraud prevention;
6. Conducting investigative audits into indications of fraud within the organization and reporting the results to the President Director;



7. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit Dewan Komisaris mengenai rangkuman kegiatan audit;
8. Melaksanakan fungsi jasa konsultasi sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi dan objektivitas Satuan Pengawasan Internal dalam melakukan kegiatan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi objek konsultasi; dan
9. Melaporkan isu-isu penting yang berhubungan dengan proses pengendalian kegiatan Perusahaan, unit usaha dan afiliasinya.

Kriteria dan Persyaratan Internal Audit Division (IAD)

Berdasarkan Internal Audit Charter, kualifikasi dan persyaratan auditor internal di Perusahaan, meliputi:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangan terkait perusahaan;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan putusan pengadilan;
8. Memahami konsep/prinsip pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme secara terus menerus.

Kualifikasi dan Sertifikasi Profesi

Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas auditor internal untuk memahami

7. Submitting activity reports to the President Director with copies to the Audit Committee of the Board of Commissioners regarding audit activity summaries;
8. Carrying out consulting service functions in such a way as not to diminish the independence and objectivity of the Internal Audit Unit in providing reasonable assurance for consulting activities that are the object of consultation; and
9. Reporting important issues related to the company's activities control process, business units, and affiliates.

Criteria and Requirements of Internal Audit Division (IAD)

Based on the Internal Audit Charter, the qualifications and requirements for internal auditors in the Company include:

1. Having integrity and demonstrating professional, independent, honest, and objective behavior in the execution of their duties;
2. Possessing knowledge and experience in audit techniques and other relevant disciplines related to their field of duties;
3. Having knowledge of regulations related to the company;
4. Having the ability to interact and communicate effectively both orally and in writing;
5. Obligated to comply with the professional standards issued by the Internal Audit Association;
6. Obligated to adhere to the Internal Audit code of ethics;
7. Required to maintain the confidentiality of information and/or company data related to the execution of Internal Audit duties and responsibilities unless required by laws or court orders;
8. Understanding the concept/principles of internal control, risk management, and good corporate governance; and
9. Willing to continuously improve knowledge, skills, and professionalism.

Qualifications and Professional Certification

The Company strives to continually improve the quality of internal auditors to understand

perkembangan audit, khususnya kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri dengan menyelenggarakan sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi yang dimiliki oleh para pegawai Audit Internal hingga akhir tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Nama dan Jabatan Name and Title	Jenis Sertifikasi Type of Certification
Muhamad Slamet Umarjadikusumah	- Certified Internal Audit Executive (CIAE) - Certified Risk Management Professional Advance / CRMPA - Pelatihan Audit Internal SNI ISO 37001:2016 Internal Audit Training SNI ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 19011:2018 Anti-Bribery Management System based on ISO 19011:2018 - Joint Venture between SOE and Private Sector - BSE GRC Masterclass - Introduction to ESG & IFC Performance Standard - GRC Integrated Information for Supervisory Board - ESG For Boards - Governance of ESG - Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Maintain Productivity for Economic Transformation - Pelatihan Penyusunan Rencana Audit Tahunan Training on Preparing Annual Audit Plans - Masterclass Governance Risk Compliance
Irfan Egi Febrianto - Financial Audit Officer	Certified Risk Management Professional Advanced (CRMPA)
Muhammad Ariq Fiantra - Financial Audit Officer	Certified Risk Management Professional Advanced (CRMPA)
Zaenal Arifin - Operational Audit Officer	Certified Risk Management Professional Advanced (CRMPA)

Berdasarkan data tersebut, jumlah karyawan IAD yang memiliki sertifikasi Audit Internal adalah sebagai berikut:

Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Pemegang Sertifikasi Number of Certification Holder
Certified Internal Audit (CIA)	-
CRMPA	4 orang person

Program Pengembangan Kompetensi

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Internal Audit Division untuk menambah wawasan serta pengetahuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Kepala Internal Audit Division dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

audit developments, especially compliance with regulations and industry developments, by organizing professional certification. The professional certifications held by Internal Audit employees until the end of 2023 are as follows:

Based on the data, the number of IAD employees with Internal Audit certification is as follows:

Competency Development Program

The Company facilitates competency development programs for the Internal Audit Division to enhance their insights and knowledge in carrying out their duties and responsibilities. Information regarding training activities and competency enhancement participated by the Head of the Internal Audit Division can be found in the Company Profile section of this Annual Report.



Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab IAD Tahun 2023

Selama tahun 2023, IAD telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan melaksanakan sejumlah kegiatan, seperti:

1. Audit SMAP ISO 37001:2016
2. Evaluasi Manajemen Risiko
3. Audit Teknologi Informasi
4. Audit Operasional (Procurement)
5. Audit Finance and Accounting
6. Evaluasi Pengendalian Internal
7. Audit PT MGPA Nusantara Jaya
8. Evaluasi Whistle Blowing System
9. Audit Project Management Office (PMO)
10. Audit PT ITDC Nusantara Xplorin

Audit Eksternal/Akuntan Publik

Audit eksternal merupakan kegiatan audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik dari pihak independen. Auditor eksternal merupakan organ eksternal Perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas independen terhadap aspek keuangan Perusahaan serta memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Auditor Publik juga harus terbebas dari benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Auditor Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Prosedur audit eksternal dan standar audit yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Auditor Publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Berdasarkan PP tersebut, Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, di mana

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of IAD in 2023

Throughout 2023, the IAD has fulfilled its duties and responsibilities by conducting several activities, such as:

1. Audit of SMAP ISO 37001:2016
2. Evaluation of Risk Management
3. Audit of Information Technology
4. Audit of Operations (Procurement)
5. Audit of Finance and Accounting
6. Evaluation of Internal Control
7. Audit of PT MGPA Nusantara Jaya
8. Evaluation of Whistle Blowing System
9. Audit Project Management Office (PMO)
10. Audit PT ITDC Nusantara Xplorin

External Audit/Public Accountant

External audit is an auditing activity conducted by Public Accounting Firms independently. External auditors act as external organs of the Company functioning as independent supervisors of the Company's financial aspects and providing opinions regarding the conformity of the Company's financial statements presentation with the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.

External Audit Procedures and Audit Standards

The Company appoints Public Accounting Firms (KAP) as designated through the Annual General Meeting of Shareholders based on the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection process is carried out according to the procurement mechanism for goods and services in force. Public auditors must also be free from conflicts of interest with the Board of Commissioners, Directors, and other stakeholders in the Company, and the Company must provide all accounting records and supporting data required in the external audit process, enabling the Public Auditor to provide opinions on the fairness, compliance, and appropriateness of the Company's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards.

The procedures and standards applicable to external audits are as follows:

1. Appointment of Public Auditor refers to Government Regulation No. 20 of 2015 concerning the Practice of Public Accountants. Based on the PP, the Public Accountant is limited to a maximum of 5 (five) consecutive financial

Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

2. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan
3. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
4. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
5. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
6. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.

Pada praktiknya, Akuntan Publik melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Tahapan mekanisme penunjukan Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perusahaan.

years, in which the Public Accountant can provide audit services again after 2 (two) consecutive financial years of not providing audit services to the same Company.

2. The audit of the Company's financial statements is carried out following the professional standards of the Public Accountant which includes all audit procedures deemed necessary following the circumstances.
3. The audit includes testing and evaluation of the internal control system, and examining, on a test basis, the evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit will also include an assessment of the accounting presentation of the financial statements following the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI.
4. As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts questions and answers to management regarding management statements presented in the financial statements.
5. The audit contains an inherent risk that if there are material errors and irregularities. If this is the case, the KAP will report it to management.
6. Management approves KAP audit work papers on the Company to be reviewed by the relevant agency or authority.

In practice, Public Accountants conduct audits based on the Professional Standards for Public Accountants published by the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI). If the Indonesian Government provides financial assistance, the audit is conducted based on the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Indonesian Financial Audit Agency (BPK) RI.

Mechanism for Appointment of Public Accountants

The stages of the mechanism for appointing Public Accountants are as follows:

1. The Board of Commissioners through the Audit Committee conducts the process of appointing candidates for external auditors by requesting assistance from the Board of Directors in the appointment process following the provisions of the procurement of goods/services applicable in the Company.



2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
 3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.
 4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perusahaan.
 5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
 6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk auditor tersebut.
2. The Board of Commissioners may re-appoint the external auditor based on the evaluation results of the external auditor's performance to audit the financial statements.
 3. The Board of Commissioners submits the reasons for the nomination to the GMS and the amount of the proposed fee for the external auditor.
 4. The proposal to the GMS can be submitted through a separate letter which is part of the response letter from the Board of Commissioners on the Company's annual performance.
 5. The Board of Commissioners evaluates the performance of the external auditor through the Audit Committee following applicable regulations and standards.
 6. For the process of appointing a candidate for external auditor and/or reappointment of an external auditor conducted by the GMS, the Board of Commissioners is sufficient to authorize the GMS to determine the auditor.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik
Appointment Mechanism to Determination of Public Accountant



Akuntan Publik Tahun 2023

Dasar hukum pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) mengacu kepada Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-103/MBU/03/2021 tentang Kriteria KAP, Kantor Jasa Penilai Publik & Kantor Konsultan Aktuaria pada BUMN. Berdasarkan Keputusan RUPS dalam Risalah No. 002/Ris/ITDC.01/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 menetapkan:

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian periode Tahun 2023.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menunjuk KAP pengganti dalam hal KAP tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.

Public Accountants for 2023

The legal basis for the selection of Public Accounting Firms (KAP) refers to the Minister of State-Owned Enterprises Decision Number SK-103/MBU/03/2021 concerning Criteria for Public Accounting Firms, Public Appraisal Service Offices & Actuarial Consulting Offices at State-Owned Enterprises. Based on the Decision of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year No. 002/Ris/ITDC.01/VI/2023 dated June 26, 2023, it is determined:

1. Approved to reappoint the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan (RSM) as the Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Report, Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and other reports for the 2023 Financial Year.
2. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the period 2023.
3. Grant power to the Company's Board of Commissioners to determine fees for audit services and other requirements for the KAP, as well as appoint a replacement KAP in if the KAP, for whatever reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements.

Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	:	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Akuntan Accountant	:	Chairul Wismoyo
Tahun Audit Audit Year	:	2023
Periode Penugasan Appointment Period	:	Desember 2023 – April 2024 December 2023 – April 2024
Jasa Service	:	Jasa Audit atas Laporan Keuangan Kosolidasian Perseroan Audit Services on the Company's Consolidated Financial Statements
Jasa Lainnya Other Services	:	Audit Entitas Anak & Cucu Perusahaan, Audit PUMK, Audit KPI, AuP AIIB dan Audit AIIB Audit of Company Subsidiaries & Sub-subsidiaries, PUMK Audit, KPI Audit, AuP AIIB and AIIB Audit
Biaya Fees	:	Rp1.023.000.000



Daftar Akuntan Publik

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan menjalankan prinsip transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan biaya yang diberikan atas jasa audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk periode 6 (enam) tahun terakhir.

List of Public Accountants

As a commitment to transparency principles, the following is the list of Public Accounting Firms, Accountants, and fees provided for auditing the Company's Financial Statements for the last 6 (six) years.

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan 6 (enam) Tahun Terakhir 2018-2023

List of Public Accounting Firms and Accountants for the Last 6 (six) Years 2018-2023

Tahun Buku Financial Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Opini Opinion	Biaya Fees
2023	Chairul Wismoyo	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp1.023.000.000
2022	Chairul Wismoyo	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp900.000.000
2021	Muhammad Kurniawan	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp603.487.500
2020	Muhammad Kurniawan	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp574.750.000
2019	Muhammad Kurniawan	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp763.400.000
2018	Muhammad Kurniawan	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material respects	Rp875.930.000

Manajemen Risiko

Risk Management

Pengelolaan risiko dilakukan melalui sebuah pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang melingkupi operasi dan bisnis Perusahaan. Kegiatan pengelolaan atau manajemen risiko mencakup beberapa hal yang dapat memberikan jaminan kepastian bagi Perusahaan untuk dapat mengelola risiko yang ada, termasuk diantaranya penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki.

ITDC telah menerapkan Sistem Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000: 2009 sebagai landasan kerangka kerja manajemen risiko yang dilakukan terintegrasi sesuai dengan kondisi lingkungan dan proses bisnis Perusahaan. ITDC telah membuat Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko ITDC.

Mekanisme dan Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Manajemen Risiko

VP Corporate Planning, Performance & Risk Management diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Profil VP Corporate Planning, Performance & Risk Management serta Dasar Pengangkatan

Perusahaan menunjuk Fransiska Dita Novia Wardani sebagai Vice President Corporate Finance, Strategy & Risk Management berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 038.1/SK/ITDC.01/VII/2023.

Risk management is carried out through a structured approach to managing the uncertainties surrounding the Company's operations and business. Risk management activities include several aspects that can provide assurance for the Company to manage existing risks, including risk assessment, strategy development for managing them, and risk mitigation by leveraging available resources.

ITDC has implemented a Risk Management System based on SNI ISO 31000: 2009 as the foundation for its integrated risk management framework, tailored to the Company's business environment and processes. ITDC has established an ITDC Risk Management Implementation Policy.

Mechanism and Authority for Appointing and Dismissing the Head of the Risk Management Division

The VP Corporate Planning, Performance & Risk Management is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

Profile of VP Corporate Planning, Performance & Risk Management and Basis for Appointment

The company appointed Fransiska Dita Novia Wardani as Vice President Corporate Finance, Strategy & Risk Management based on Directors' Decree No. 038.1/SK/ITDC.01/VII/2023.

Fransiska Dita Novia Wardani Vice President Corporate Planning, Performance & Risk Management

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tanggal Lahir Date of Birth	Banjarmasin, 28 November 1989 November 28, 1989
Usia Age	34 tahun 34 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 038.1/SK/ITDC.01/VII/2023 Board of Directors Decree No. 038.1/SK/ITDC.01/VII/2023


Fransiska Dita Novia Wardani
Vice President Corporate Planning, Performance & Risk Management

Riwayat Pendidikan Education Background	S1 Teknik, Universitas Diponegoro Bachelor of Engineering of Diponegoro University
Pengalaman Kerja Working Experience	PT Sedaya Multi Investama - sub holding PT Astra Internasional Tbk (Astra Financial) : October 2020-December 2022 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) – Subsidiary of Finance Ministry - August 2019-February 2020 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk : May 2011-June 2019
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications Owned	CRMPA (Certified Risk Management Professional Advanced) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level III - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Sertifikasi Manajemen Risiko Level II - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level I - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Level III Banking Risk Management Certification - Banking Professional Certification Institute (LSPP) Level II Risk Management Certification - Risk Management Certification Agency (BSMR) Level I Banking Risk Management Certification - Banking Professional Certification Institute (LSPP)

Jumlah, Komposisi dan Demografi SDM Risk Management Division

Corporate Legal & Risk Management Division bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengelolaan risiko Perusahaan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 021/SK/ITDC.01/VI/2021 tentang Struktur Organisasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Secara umum, Corporate Legal & Risk Management Division bertanggung jawab untuk:

1. Penerapan manajemen risiko secara terintegrasi;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka kerja manajemen risiko;
3. Mengembangkan prosedur untuk identifikasi, analisis, evaluasi, dan pemantauan risiko; melakukan fasilitasi, pemantauan, pelaporan implementasi manajemen risiko;
4. Melakukan kajian terhadap usulan aktivitas/transaksi usaha tertentu atau yang bersifat strategis;
5. Monitoring efektifitas mitigasi yang direncanakan *Risk Owner* serta evaluasi atas hasil monitoring yang dilakukan;
6. Memastikan *Risk Owner* telah memiliki *contingency plan*/perlakuan lanjutan atas risiko yang telah teridentifikasi.

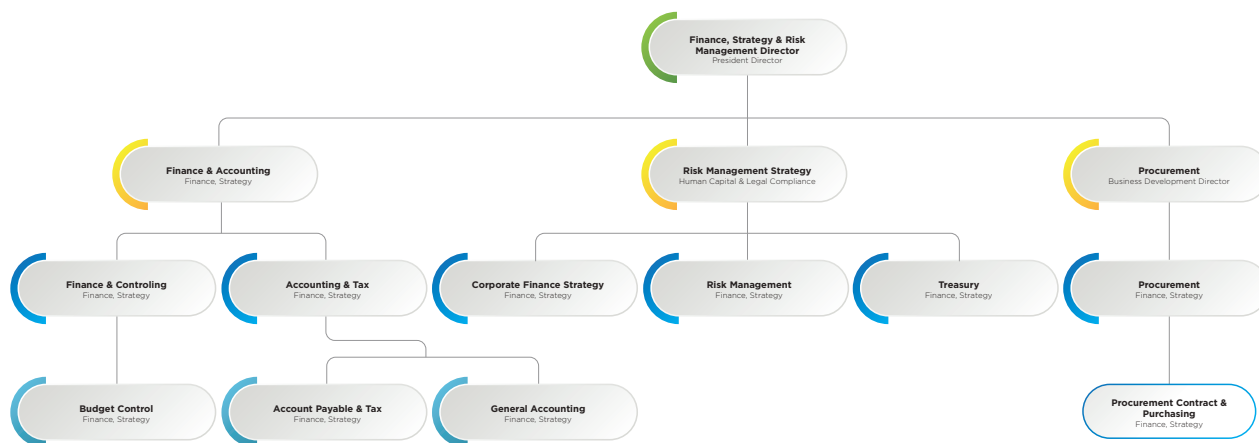
Number, Composition, and Demographics of HR in the Risk Management Division

The Corporate Legal & Risk Management Division is responsible for executing the Company's risk management functions as outlined in the Board of Directors' Decree No. 021/SK/ITDC.01/VI/2021 concerning the Organizational Structure of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Generally, the Corporate Legal & Risk Management Division is responsible for:

1. Implementing integrated risk management;
2. Providing input to the Board of Directors in formulating risk management policies, strategies, and frameworks;
3. Developing procedures for risk identification, analysis, evaluation, and monitoring; facilitating, monitoring, and reporting the implementation of risk management;
4. Conducting reviews of proposed business activities/transactions that are specific or strategic in nature;
5. Monitoring the effectiveness of the mitigation planned by the Risk Owner and evaluating the results of the monitoring carried out;
6. Ensure the Risk Owner has a contingency plan/ follow-up treatment for identified risks.

Struktur Corporate Legal & Risk Management Division

Structure of the Corporate Legal & Risk Management Division



Kualifikasi dan Sertifikasi Profesi

Perusahaan menganggap sertifikasi profesi sebagai sebuah aspek penting untuk meningkatkan kualitas personel Risk Management Unit untuk memahami perkembangan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri dengan menyelenggarakan sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi yang dimiliki oleh para personel Risk Management Unit hingga akhir tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Qualifications and Professional Certifications

The Company considers professional certification an essential aspect to enhance the quality of personnel in the Risk Management Unit. This ensures they understand risk developments and maintain compliance with regulations and industry advancements by organizing professional certifications. The professional certifications held by personnel in the Risk Management Unit as of the end of 2023 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Title	Jenis Sertifikasi Certification Type
Fransiska Dita Novia Wardani	1. Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level III - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level II - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) 3. Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level I - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) 4. CRMPA (Certified Risk Management Professional Advanced)
	1. Level III Banking Risk Management Certification - Banking Professional Certification Institute (LSPP) 2. Level II Risk Management Certification - Risk Management Certification Agency (BSMR) 3. Level I Banking Risk Management Certification - Banking Professional Certification Institute (LSPP) 4. CRMPA (Certified Risk Management Professional Advanced)
Made Sri Rahayu	1. BCMCP (Business Continuity Management Certified Professional) 2. ERMAP (Enterprise Risk Management Associate Professional) 3. CRMPA (Certified Risk Management Professional Advanced)
F. Susilto Wahyu Purnomo	1. BCMCP (Business Continuity Management Certified Professional) 2. CRMPA (Certified Risk Management Professional Advanced)
Eka Prawitasari	1. ERMAP (Enterprise Risk Management Associate Professional) 2. CRMPA (Certified Risk Management Professional Advanced)



Berdasarkan data tersebut, personel Corporate Legal & Risk Management Division yang memiliki sertifikasi profesi adalah sebagai berikut:

Based on the above data, the Risk Management Unit personnel that hold professional certificates are as follows:

Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Pemegang Sertifikasi Number of Certification Holders
ERMAP	2 orang person
BCMCP	2 orang person
CRMPA	4 orang person
BSMR Level I	1 orang person
LSPP Level I	1 orang person
LSPP Level II	1 orang person

Program Pengembangan Kompetensi

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Corporate Planning, Performance & Risk Management Division untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya. Adapun informasi pelatihan dan peningkatan kompetensi Corporate Legal & Risk Management Division dapat dilihat sebagai berikut:

Competency Development Program

The Company facilitates competency development programs for the Corporate Planning, Performance & Risk Management Division to enhance their insights and knowledge, which can aid in performing their duties. Information on training and competency enhancement for the Corporate Legal & Risk Management Division can be seen as follows:

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Workshop dan Webinar	1. Focus Group Discussion (FGD) Resource & Capability Analysis (RCA) InJourney Group.	Maret 2023	InJourney
	2. Strategi Efektif Penerapan Manajemen Risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023	14 September 2023	Deloitte Governance Forum
	3. Grand Launching Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik	26 September 2023	BPKP
	4. ESG for Boards – Governance of ESG	27 September 2023	Pelatihan BLMN GRC Masterclass 2023
	5. GRC Integrated Information For Supervisory Board	5 Oktober 2023	Pelatihan BLMN GRC Masterclass 2023
	6. CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	25 Oktober 2023	Pelatihan BLMN GRC Masterclass 2023
	7. Sosialisasi Petunjuk Teknis tentang Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	20 Desember 2023	Kementerian BUMN
	8. Workshop Refreshment Treasury and Risk Management (Hedging)	14 Desember 2023	PT Synergi Daya Utama
	9. Webinar Risk Assesment Technique with ISO 31010, diselenggarakan	3 Februari 2023	ARCAPLUS
	10. Bimbingan Teknis Terkait Risk Register dan Kualitas Pengelolaan Manajemen Risiko (KPMR) di Lingkungan InJourney Group InJourney, diselenggarakan oleh	7 Februari 2023	InJourney
	11. The Position of Bankruptcy Law in The Legal System of Indonesia & Mayasia oleh Pengacara Jamaslin James Purba	13 Februari 2023	Hen Kaur Law Firm

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
	12. Kick-Off Meeting Profesi Manajemen Risiko Sektor Publik 2023	5 April 2023	IRMAPA
	13. Enhancing Good Governance on Financial Systemic Risk oleh Muhammad Romli Founder Rumah Manajemen Risiko & Restrukturisasi	5 Mei 2023	LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
	14. Webinar Basic Concepts and Implementation of ISO 22301 to Ensure Business Continuity	14 Mei 2023	dilatih.co
	15. Webinar Fraud Risk Management	30 Juni 2023	dilatih.co
	16. Webinar "MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045 MELALUI MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL"	27 Juli 2023	IRMAPA
	17. Webinar : Pre IPO dan Post IPO	10 Agustus 2023	GRC MASTERCLASS PROGRAM 2023
	18. Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS)	10 Agustus 2023	KEMENTERIAN BUMN DAN BEI BUMN GRC
	19. Risk Management Effectiveness Evaluation diselenggarakan oleh	7 September 2023	BUMN GRC Masterclass 2023
	20. Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo	14 September 2023	BUMN GRC Masterclass 2023
	21. Strategi Efektif Penerapan Manajemen Risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023	14 September 2023	Deloitte Governance Forum
	22. Grand Launching Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik	26 September 2023	BPKP
	23. ESG for Boards – Governance of ESG	27 September 2023	Pelatihan GRC Masterclass 2023
	24. GRC Integrated Information For Supervisory Board dari	5 Oktober 2023	Pelatihan GRC Masterclass 2023
	25. GCG Methodology and Environmental and Social Management Systems	25 Oktober 2023	Pelatihan GRC Masterclass 2023
	26. Sosialisasi Petunjuk Teknis tentang Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	20 Desember 2023	Kementerian BUMN
	27. Memahami aspek hukum dan implementasi arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa	30 Maret 2023	Beranda Hukum
	28. Perizinan pertambangan dalam aspek hukumnya dikaitkan hukum agraria dan lingkungan, diselenggarakan oleh Beranda Hukum.	29 Maret 2023	Beranda Hukum
Workshop and Webinar	1. Effective Strategy on the Implementation of Risk Management based on SOEs Minister Regulation No PER-2/MBU/03/2023	March 2023	Injourney
	2. Grand Launching of Training and Certification of Public Sector Risk Management	September 14, 2023	Deloitte Governance Forum
	3. Grand Launching Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik	September 26, 2023	BPKP
	4. ESG for Boards – Governance of ESG	September 27, 2023	BLMN GRC Masterclass 2023 training



Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
	5. GRC Integrated Information For Supervisory Board	October 5, 2023	BLMN GRC Masterclass 2023 training
	6. CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	October 25, 2023	BLMN GRC Masterclass 2023 training
	7. Socialization of Technical Instructions regarding Risk Maturity Index Assessment in State-Owned Enterprises	December 20, 2023	SOEs Ministry
	8. Workshop Refreshment Treasury and Risk Management (Hedging)	December 14, 2023	PT Synergi Daya Utama
	9. Webinar Risk Assessment Technique with ISO 31010	February 3, 2023	ARCAPLUS
	10. Technical Guidance Regarding Risk Registers and Risk Management Quality (KPMR) in the InJourney Group InJourney Environment	February 7, 2023	InJourney
	11. The Position of Bankruptcy Law in The Legal System of Indonesia & Mayasia by Lawyer Jamaslin James Purba	April 5, 2023	Hen Kaur Law Firm
	12. 2023 Public Sector Risk Management Professional Kick-Off Meeting	May 5, 2023	IRMAPA
	13. Enhancing Good Governance on Financial Systemic Risk by Muhammad Romli Founder of Rumah Manajemen Risiko & Restrukturisasi	May 5, 2023	LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
	14. Webinar Basic Concepts and Implementation of ISO 22301 to Ensure Business Continuity	May 14, 2023	dilatih.co
	15. Webinar Fraud Risk Management	June 30, 2023	dilatih.co
	16. Webinar "WELCOMING A GOLDEN INDONESIA 2045 THROUGH NATIONAL DEVELOPMENT RISK MANAGEMENT"	July 27, 2023	IRMAPA
	17. Webinar : Pre IPO dan Post IPO	August 10, 2023	SOEs MINISTRY AND BEI
	18. Rating & Issuance of Debt Securities & Sukuk (EBUS)	September 7, 2023	BLMN GRC Masterclass 2023 training
	19. Risk Management Effectiveness Evaluation	September 14, 2023	BLMN GRC Masterclass 2023 training
	20. Socialization of Rating of SOEs & SOEs Subsidiaries by Pefindo	September 14, 2023	BLMN GRC Masterclass 2023 training
	21. Effective Strategy for Implementing Risk Management in accordance with Minister of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/03/ 2023	September 26, 2023	Deloitte Governance Forum
	22. Grand Launching of Public Sector Risk Management Training and Certification	September 27, 2023	BPKP
	23. ESG for Boards – Governance of ESG	October 5, 2023	BLMN GRC Masterclass 2023 training

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
	24. GRC Integrated Information For Supervisory Board	October 25, 2023	BLMN GRC Masterclass 2023 training
	25. GCG Methodology and Environmental and Social Management Systems	December 20, 2023	BLMN GRC Masterclass 2023 training
	26. Socialization of Technical Instructions on Risk Maturity Index Assessment (Risk Maturity Index) in the State-Owned Enterprise Environment	March 29, 2023	SOEs Ministry
	27. Understanding the legal aspects and implementation of arbitration as a means of resolving disputes	March 30, 2023	Beranda Hukum
	28. Mining licensing in its legal aspects is linked to agrarian and environmental law, organized by Beranda Law	March 29, 2023	Beranda Hukum

Pedoman Kerja, Tugas, dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dalam Pedoman Perilaku Perusahaan, tujuan penerapan manajemen risiko, meliputi:

1. Meningkatkan reputasi Perusahaan diperlukan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, di mana mereka dapat mengetahui bahwa Perusahaan mampu menangani risiko yang dihadapinya dengan baik.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, di mana semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Dalam konteks, manajemen risiko maka hal tersebut menjadi bagian yang menyatu dalam proses pengambilan keputusan (*decision making*).
3. Memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran Perusahaan karena kemampuan menangani risiko Perusahaan yang lebih baik, yang melekat dalam sendi-sendi tata kelola organisasi.
4. Membangun kompetensi dan budaya kerja yang sadar risiko secara berkelanjutan.

Fungsi dan tugas pokok Divisi Manajemen Risiko ITDC antara lain:

1. Melakukan identifikasi risiko, mencakup evaluasi yang melekat pada organisasi maupun regulatory yang terkait;
2. Melakukan pengukuran risiko, mencakup evaluasi berkala terhadap kesesuaian asumsi, data dan prosedur serta penyempurnaan sistem pengukuran;

Work Guidelines, Duties, and Responsibilities

In accordance with the guidelines established in the Company Code of Conduct, the objectives of implementing risk management include:

1. Enhancing the Company's reputation through good communication with stakeholders, enabling them to see that the Company can effectively handle the risks it faces.
2. Improving management effectiveness and efficiency by identifying and managing all risks that may hinder the organization's processes. In the context of risk management, this becomes an integral part of the decision-making process.
3. Providing reasonable assurance of achieving the Company's objectives due to better risk management capabilities inherent in the organization's governance structure.
4. Building competence and a risk-aware work culture continuously.

The main functions and duties of the ITDC Risk Management Division include:

1. Identifying risks, including evaluating those inherent in the organization and related regulations;
2. Measuring risks, involving periodic evaluations of the assumptions, data, and procedures, and refining the measurement system;



3. Melakukan penyusunan profil risiko yang mencakup risiko yang terjadi saat ini maupun potensial terjadi di masa mendatang sebagai alat atau sarana untuk peduli risiko;
 4. Melakukan pemantauan risiko yang meliputi kegiatan pemantauan terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan diukur pada tahap sebelumnya, dan menyempurnakan pada proses pelaporan;
 5. Seluruh investasi yang telah disahkan oleh Pemegang Saham pada RKAP 2017 dan telah dianalisis oleh masing-masing unit kerja, pada saat pelaksanaan investasi harus melalui Manajemen Risiko untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan atau tidak layaknya suatu investasi dengan dilengkapi *Feasibility Study*;
 6. Apabila diperlukan di dalam melakukan analisis investasi yang berkaitan dengan teknis pembangunan fisik dan hukum, maka manajemen risiko dapat menggunakan tenaga ahli.
3. Developing a risk profile that includes both current and potential future risks as a tool for risk awareness;
 4. Monitoring risks, which includes activities to monitor identified and measured risks and refining the reporting process;
 5. All investments approved by the Shareholders in the 2017 RKAP and analyzed by each work unit must go through Risk Management to obtain feasibility recommendations, complemented by a Feasibility Study;
 6. If necessary, for investment analysis related to physical construction and legal matters, risk management can utilize expert assistance.

Tata Kelola Manajemen Risiko ITDC

Perusahaan telah memiliki Pedoman Penerapan MR dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola manajemen risiko. Pedoman Penerapan MR di Perusahaan menggunakan pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*).

Lini pertama yaitu fungsi yang melakukan dan mengelola risiko di unit masing-masing (Risk Taking Unit). Lini kedua yaitu fungsi yang mengkoordinasi, memfasilitasi, serta memantau implementasi Manajemen Risiko secara terintegrasi. Sementara, lini ketiga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertugas untuk melaksanakan risk assurance dan melakukan *review* dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan, serta memastikan bahwa pertahanan lini pertama dan lini kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko

Perusahaan berupaya untuk senantiasa memperkuat tata kelola manajemen risiko melalui sejumlah kebijakan dan pedoman, di antaranya:

1. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 14.2/Kep/Dekom.ITDC/X/2023 dan No. 050/SK/ITDC.01/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penerapan Pedoman Umum Manajemen Risiko.
2. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, yang memuat:

ITDC Risk Management Governance

The Company has established Risk Management Implementation Guidelines to support the execution of risk management governance. These guidelines use the Three Lines of Defense approach.

The first line comprises functions that undertake and manage risks within their respective units (Risk Taking Units). The second line includes functions that coordinate, facilitate, and monitor the integrated implementation of Risk Management. The third line is conducted by the Internal Audit Unit (SPI), which performs risk assurance and reviews and evaluates the overall design and implementation of risk management, ensuring that the first and second lines of defense operate as expected.

Risk Management Policies and Guidelines

The Company continually strengthens its risk management governance through various policies and guidelines, including:

1. Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 14.2/Kep/Dekom.ITDC/X/2023 and No. 050/SK/ITDC.01/X/2023 dated October 24, 2023 on the Implementation of General Risk Management Guidelines.
2. Risk Management Implementation Guidelines, which include:

- a. Prinsip, framework, dan proses mengacu pada ISO 31000 Risk Management;
 - b. Batasan risiko dan tata kelola;
 - c. Proses, kategori risiko, kriteria risiko (*likelihood, consequence*);
3. SOP Penerapan Manajemen Risiko, yang memuat prosedur mulai proses penilaian risiko (*risk assessment*), perlakuan risiko, sampai dengan *monitoring* risiko.

Penetapan Sistem Manajemen Risiko ITDC

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dalam Pedoman Perilaku Perusahaan, penerapan manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Meningkatkan reputasi Perusahaan diperlukan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, di mana mereka dapat mengetahui bahwa Perusahaan mampu menangani risiko yang dihadapinya dengan baik.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, di mana semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Dalam konteks, manajemen risiko maka hal tersebut menjadi bagian yang menyatu dalam proses pengambilan keputusan (*decision making*).
3. Memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran Perusahaan karena kemampuan menangani risiko Perusahaan yang lebih baik, yang melekat dalam sendi-sendi tata kelola organisasi.
4. Membangun kompetensi dan budaya kerja yang sadar risiko secara berkelanjutan.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Untuk memastikan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, ITDC telah menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko korporat dengan mengadopsi standar sistem manajemen dan *best practice* melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 14.2/Kep/Dekom. ITDC/X/2023 dan No. 050/SK/ITDC.01/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penerapan Pedoman Umum Manajemen Risiko.

Sesuai prinsip-prinsip manajemen risiko, Perusahaan menetapkan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang menyatu dalam proses bisnis dan harus diinternalisasikan menjadi bagian dari budaya Perusahaan. Guna memastikan bahwa

- a. Principles, framework, and processes referring to ISO 31000 Risk Management;
 - b. Risk limits and governance;
 - c. Processes, risk categories, risk criteria (*likelihood, consequence*).
3. SOP for Risk Management Implementation, which details procedures from the risk assessment process, risk treatment, to risk monitoring.

Establishment of ITDC Risk Management System

In line with the guidelines set forth in the Company Code of Conduct, the implementation of risk management aims to:

1. Enhance the Company's reputation through effective communication with stakeholders, demonstrating the Company's capability to manage risks effectively.
2. Improve management effectiveness and efficiency by identifying and managing risks that may hinder the organization's processes, making risk management an integral part of decision-making.
3. Provide reasonable assurance of achieving the Company's objectives due to enhanced risk management capabilities inherent in the organization's governance.
4. Foster a culture of continuous risk awareness and competency development.

Risk Management Framework

To ensure the integrated implementation of risk management, ITDC has developed and established corporate risk management policies by adopting management system standards and best practices through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. 14.2/Kep/Dekom. ITDC/X/2023 dan No. 050/SK/ITDC.01/X/2023 dated October 24, 2023 on the Implementation of General Risk Management Guidelines.

In accordance with risk management principles, the Company stipulates that risk management must be an integral part of the business process and must be internalized as part of the Company's culture. To ensure that risk management is internalized within



pengelolaan risiko terinternalisasi dalam proses bisnis Perusahaan, maka mekanismenya diatur dalam sebuah kerangka kerja (*framework*) yang mengacu pada ISO 31000:2009 tentang *Enterprise Risk Management*.

the Company's business processes, the mechanism is regulated in a framework that refers to ISO 31000:2009 on Enterprise Risk Management.



Wujud mandat dan komitmen penerapan manajemen risiko korporat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, penjabaran tugas pokok dan tanggung jawab utama pengelolaan risiko di seluruh lingkungan perusahaan. Adapun pembagian tugas pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko di Perusahaan dilakukan sebagai berikut:

The mandate and commitment to implementing corporate risk management are realized based on principles, outlining the main tasks and key responsibilities of risk management across the entire company environment. The division of risk management oversight and management tasks within the Company is as follows:

Pengelola Overseer	Tanggung Jawab Utama Main Responsibilities
Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Melakukan fungsi pengawasan (supervisory) terhadap kebijakan dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direksi. - Memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
Komite Manajemen Risiko dan Investasi Risk and Investment Management Committee	- Performing a supervisory function on the risk management policies and framework established and implemented by the Board of Directors. - Providing improvement directions for the implementation of risk management policies.
Komite Audit Audit Committee	Mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kerangka kerja manajemen risiko. Supporting the Board of Commissioners in overseeing the implementation of risk management policies and framework.
	Mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan, melakukan koordinasi dengan SPI. Supporting the Board of Commissioners in performing supervisory duties and coordinating with the Internal Audit Unit (SPI).

Pengelola Overseer	Tanggung Jawab Utama Main Responsibilities
Direksi	• Menyusun dan menetapkan pedoman, prosedur, strategi, kerangka kerja pelaksanaan manajemen risiko. • Menyusun dan menetapkan risk appetite dan risk tolerance. • Memastikan keselarasan program manajemen risiko dengan strategi Perseroan, sekaligus menentukan ukuran kinerja pencapaian sasaran manajemen risiko. • Memberikan arahan strategis dalam penerapan manajemen risiko. • Alokasi sumber daya yang memadai terkait penerapan manajemen risiko.
Board of Directors	• Developing and establishing guidelines, procedures, strategies, and a risk management framework. • Developing and establishing risk appetite and risk tolerance. • Ensuring alignment of the risk management program with the Company's strategy, while also determining performance metrics for achieving risk management objectives. • Providing strategic direction in the implementation of risk management. • Allocating adequate resources related to the implementation of risk management.
Internal Auditor	• Melakukan evaluasi, memberikan keyakinan yang memadai (assurance) atas proses manajemen risiko. • Melakukan evaluasi serta monitoring terhadap kecukupan pengendalian intern dan rencana penanganan risiko. • Menerapkan pendekatan Risk-Based Audit dalam perencanaan dan pelaksanaan proses audit internal. • Memberikan masukan terhadap profil risiko yang disusun oleh Bagian Manajemen Risiko. • Conducting evaluations and providing reasonable assurance on the risk management process. • Conducting evaluations and monitoring the adequacy of internal controls and risk management plans. • Applying a Risk-Based Audit approach in the planning and execution of internal audit processes. • Providing input on the risk profile prepared by the Risk Management Unit.
Bagian Manajemen Risiko	• Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka kerja manajemen risiko. • Menyusun dan mengusulkan Risk Appetite dan Risk Tolerance yang digunakan sebagai ukuran kriteria level risiko. • Menyusun prosedur untuk identifikasi, analisis, evaluasi, pemantauan, dan perlakuan risiko. • Melakukan reviu secara berkala terhadap kerangka kerja, kebijakan, serta sistem dan prosedur manajemen risiko. • Melakukan fasilitasi, pemantauan, serta pelaporan implementasi manajemen risiko • Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko secara keseluruhan, antara lain dengan memastikan pelaksanaan proses identifikasi, pengelolaan dan pemantauan risiko di setiap unit kerja. • Melakukan kompilasi risiko setiap unit kerja menjadi profil risiko korporat Perseroan secara keseluruhan. • Melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan dan bersama dengan key person selaku Risk Champion dari masing-masing RTU untuk memantau pelaksanaan manajemen risiko pada tingkat divisi/unit kerja.
Risk Management Division	• Providing input to the Board of Directors in formulating risk management policies, strategies, and framework. • Developing and proposing Risk Appetite and Risk Tolerance to be used as criteria for risk level assessment. • Developing procedures for risk identification, analysis, evaluation, monitoring, and treatment. • Periodically reviewing the framework, policies, and risk management systems and procedures. • Facilitating, monitoring, and reporting on the implementation of risk management. • Being responsible for developing and monitoring the overall implementation of risk management, including ensuring the execution of risk identification, management, and monitoring processes in each work unit. • Compiling risks from each work unit into the Company's overall corporate risk profile. • Monitoring the Company's risk management implementation and collaborating with key persons acting as Risk Champions from each RTU to monitor the implementation of risk management at the division/unit level.



Penerapan Roadmap Pengembangan Manajemen Risiko ITDC

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko secara berkesinambungan sehubungan dengan semakin kompleksnya perkembangan bisnis ke depan. Implementasi manajemen risiko di Perusahaan bersumber dari budaya sadar risiko yang memberikan pemahaman atas peran dan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam menjalankan bisnisnya.

Perusahaan melakukan pengelolaan risiko kegiatan operasional dan risiko-risiko lainnya menyangkut bisnis penyewaan lahan industri dan layanan logistik kepada investor. Manajemen risiko mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk mengidentifikasi dan sekaligus mengurangi dampak dari kerugian yang telah diperkirakan (*expected loss*), kerugian yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*), maupun dari bencana/kerugian besar lainnya (*catastrophic loss*). ITDC percaya bahwa penerapan manajemen risiko yang baik dan menyeluruh dapat mengantisipasi serta menangani dengan baik risiko-risiko yang berpotensi merugikan Perusahaan.

Adapun proses implementasi Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

Implementation of ITDC Risk Management Development Roadmap

The Company is committed to continuously implementing risk management in light of the increasing complexity of future business developments. The implementation of risk management in the Company stems from a risk-aware culture that provides an understanding of the roles and responsibilities of each work unit in conducting its business.

The Company manages operational risks and other risks related to the business of leasing industrial land and logistics services to investors. Risk management has several objectives, namely to identify and simultaneously reduce the impact of expected loss, unexpected loss, and catastrophic loss. ITDC believes that the implementation of good and comprehensive risk management can effectively anticipate and handle risks that have the potential to harm the Company.

The process of implementing the Risk Management System in the Company can be seen as follows:



Taksonomi Risiko

Sebelum melakukan pengukuran risiko di tingkat korporat dan tingkat unit, dilakukan pengelompokan risiko dalam kategori dan sub-kategori sesuai proses bisnis Perusahaan yang disebut sebagai taksonomi risiko. Adapun taksonomi risiko Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

Risk Taxonomy

Before conducting risk measurement at the corporate and unit levels, risks are grouped into categories and subcategories according to the Company's business processes, referred to as risk taxonomy. The Company's risk taxonomy can be seen as follows:

No	Kategori Risiko Risk Category	Penjelasan Description
1	Fiskal Fiscal	Tidak Toleran Perusahaan berkomitmen memenuhi target pembayaran dividen kepada pemegang saham sesuai dengan target yang ditetapkan Konservatif Perusahaan mengerjakan penugasan pemerintah dalam bentuk proyek strategis nasional atau untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan ketentuan secara finansial fisibel atau apabila tidak fisibel secara finansial diberikan kompensasi/subsidi atau pembiayaan dari PMN untuk memperoleh margin yang wajar. Intolerant The company is committed to meeting the target of paying dividends to shareholders in accordance with the determined target Conservative The company carries out government assignments in the form of national strategic projects or to carry out public benefit functions provided that it is financially feasible or if it is not financially feasible it is given compensation/subsidies or financing from PMN to obtain a reasonable margin.
2	Kebijakan Policy	Tidak Toleran Perusahaan wajib menjalankan bisnis dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terintegrasi. Intolerant Companies are obliged to run their business by implementing good corporate governance and integrated risk management.
3	Komposisi Composition	Moderat Perusahaan wajib melakukan optimalisasi pengelolaan volatilitas pasar dan makro ekonomi dengan menerima kensekuensi beban secara terukur Strategis Perusahaan mengoptimalkan sumber daya idle atau yang belum memenuhi kapasitas usaha melalui berbagai upaya organik dan anorganik dengan menerima risiko bisnis yang wajar dan terukur Moderate Companies are required to optimize the management of market and macroeconomic volatility by accepting measurable burden consequences. Strategic Companies optimize idle resources or those that do not yet meet business capacity through various organic and inorganic efforts by accepting reasonable and measurable business risks
4	Struktur Structure	Strategis Perusahaan secara aktif dan dengan mempertimbangkan kalkulasi risiko yang matang untuk menciptakan nilai melalui inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio, dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek environmental, social dan governance (ESG) dengan menerima konsekuensi peningkatan penambahan biaya modal (CAPEX) dengan risiko yang wajar dan terukur serta sepadan dengan kemalian investasi. Strategic The Company is active and taking into account mature risk calculations to create value through business model innovation, exploration and development, optimizing portfolio management, and inorganic growth that considers environmental, social and governance (ESG) aspects by accepting the consequences of increasing additional capital costs (CAPEX) with reasonable and measurable risks and commensurate with the return on investment.



No	Kategori Risiko Risk Category	Penjelasan Description
5	Restrukturisasi & Reorganisasi Restructuring & Reorganization	Konservatif Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan. Conservative The Company fulfills its financial obligations and maintaining a healthy financial structure and maintaining sustainable business continuity.
6	Industri Umum General Industry	Tidak Toleran Perusahaan tidak memberikan ruang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk perusakan terhadap lingkungan dan kelalaian terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi Konservatif a. Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan b. Perusahaan berfokus menjalankan kegiatan bisnis utamanya secara tepat waktu, tepat sasaran dan menjalankan dengan itikad baik Intolerant The Company provides no room for violations of laws and regulations, including environmental damage and negligence regarding cyber security and personal data protection. Conservative a. The company fulfills its financial obligations and maintains a healthy financial structure and maintains sustainable business continuity b. The company focuses on carrying out its main business activities in a timely, targeted manner and in good faith
7	Industri Perbankan* Banking Industry*	Konservatif Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan. Conservative The Company fulfills its financial obligations and maintaining a healthy financial structure and maintaining sustainable business continuity.
8	Industri Asuransi* Insurance Industry*	Konservatif Perusahaan berfokus menjalankan kegiatan bisnis utamanya secara tepat waktu, tepat sasaran dan menjalankan dengan itikad baik Strategis Perusahaan secara aktif dan dengan mempeertimbangkan kalkulasi risiko yang matang untuk menciptakan nilai melalui inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio, dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek environmental, social dan governance (ESG) dengan menerima konsekuensi peningkatan penambahan biaya modal (CAPEX) dengan risiko yang wajar dan terukur serta sepadan dengan kemalian investasi. Conservative The Company focuses on carrying out its main business activities in a timely manner, on target and carrying out in good faith Strategic The Company actively and considering mature risk calculations to create value through business model innovation, exploration and development, optimizing portfolio structuring, and considering inorganic growth environmental, social and governance (ESG) aspects by accepting the consequences of increasing additional capital costs (CAPEX) with reasonable and measurable risks and commensurate with investment returns.

Penetapan Profil Risiko ITDC Tahun 2023

Profil risiko ITDC untuk tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan hasil *risk-assessment* yang dilakukan bersama seluruh divisi/unit kerja terkait. Penentuan profil risiko Perusahaan bertujuan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh Direksi, jajaran manajemen, dan karyawan Perusahaan sebagai *risk owner* untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengelola, serta menangani risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan.

Ringkasan Risiko Utama dan Mitigasinya di 2023

Berdasarkan hasil identifikasi profil risiko, Perusahaan menentukan strategi mitigasi atas masing-masing risiko yang dihadapi. Adapun risiko utama dan upaya mitigasi yang dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Determination of ITDC's Risk Profile for 2023

ITDC's risk profile for 2023 has been established based on the results of risk assessments conducted jointly with all relevant divisions/units. The determination of the Company's risk profile aims to be an effort undertaken by the Board of Directors, management, and employees of the Company as risk owners to identify, analyze, manage, and address risks that may affect the Company's objectives.

Summary of Key Risks and Mitigation Efforts in 2023

Based on the results of risk profile identification, the Company has determined mitigation strategies for each of the risks faced. The main risks and mitigation efforts undertaken in 2023 are as follows:

Risiko: Kegagalan pembayaran hutang perbankan Risk: Failure to pay bank debts	
Penyebab: 1. Proyeksi pendapatan yang tidak dapat mengcover pembayaran utang jangka pendek menjadi jangka Panjang 2. Tidak dapat diterbitkan fasilitas baru atas posisi keuangan Perusahaan yang defisit (DSCR minus)	Mitigasi: 1. Himbara masih on schedule kewajiban pokok dan bunga 2. PPA sudah diperpanjang sd Juni 24 3. LPEI masih on schedule 4. Dana talangan injourney on progress perpanjangan juga dan by verbal sudah memperoleh persetujuan Dirkeu Injourney
Causes: 1. Revenue projections cannot cover short-term debt payments into long-term 2. New facilities cannot be issued for the Company's deficit financial position (DSCR minus)	Mitigation: 1. Himbara is still on schedule for principal and interest obligations 2. PPA is in place extended until June 24 3. LPEI is still on schedule 4. Injourney bailout funds are in progress and the extension has also been verbally approved by the Director of Injourney
Risiko: Tingginya selisih nilai utang valas terhadap pendapatan piutang dalam bentuk Rupiah Risk: High difference between the value of foreign currency debt and receivable income in Rupiah	
Penyebab: 1. Pemilihan opsi pengembangan Valas yang kurang tepat 2. Peningkatan nilai Valas	Mitigasi: Pelatihan hedging oleh Barclays Bank & Deutsche Bank
Causes: 1. Inappropriate selection of foreign exchange development options. 2. Increase in foreign exchange value	Mitigation: Hedging training by Barclays Bank & Deutsche Bank



Risiko: Kegagalan menjaga arus kas positive
Risk: Failure in maintaining positive cashflow

Penyebab:

1. Konsep bisnis yang ditawarkan kepada calon investor belum optimal
2. Penurunan iklim investasi pada beberapa wilayah terkait issue tertentu (Politik, Regulasi, Karakter Masyarakat, dll)

Mitigasi:

1. Justifikasi Direksi atas pengeluaran kas yang sifatnya mendesak/ tidak ada anggarannya
2. Penerbitan SK Komite Keuangan dan Komite Manajemen Risiko
3. Penguatan tata kelola keuangan Perusahaan (penguatan peran business analysis & planning, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan secara prudent) melalui program sinergi transformasi Direktorat Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko Injourney

Causes:

1. The business concept offered to potential investors is not optimal
2. Declining investment climate in several areas related to certain issues (Politics, Regulation, Community Character, etc.)

Mitigation:

1. Directors' justification for cash disbursements that are urgent/no budget
2. Issuance of SKs from the Finance Committee and Risk Management Committee
3. Strengthening the Company's financial governance (strengthening the role of business analysis & planning, risk management and prudent financial management) through the transformation synergy program of Injourney's Directorate of Finance, Strategy and Risk Management

Risiko: Penurunan pendapatan perusahaan untuk jangka panjang atas kegiatan divestasi
Risk: Decreased long-term company income due to divestment activities

Penyebab:

Pelepasan aset produktif yang merupakan sumber pendapatan utama perusahaan

Mitigasi:

1. Dana hasil divestasi agar digunakan sesuai dengan rekomendasi Kajati serta Lembaga independent lainnya serta ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pemegang Saham
2. Proyeksi penggunaan dana hasil divestasi yang mendapat persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham serta merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari kajian Lembaga Independen/ Kajati, dll

Cause:

Disposal of productive assets which are the company's main source of income

Mitigation:

1. Funds from divestment must be used in accordance with recommendations from the Higher Prosecutor's Office (Kajati) and other independent institutions as well as provisions required by Shareholders
2. Projections on the use of funds from divestment that are approved by the Commissioner and Shareholders and is an inseparable attachment to the study of Independent Institutions/Kajati, etc

Risiko: Kesalahan dalam penyusunan proyeksi pengajuan dana PMN Tahun 2023
Risk: Errors in preparing projections for PMN funding applications in 2023

Penyebab:

1. Kesalahan penyajian materi laporan kelayakan pendanaan
2. Adanya hutang tersembunyi yang tidak terhitung dalam komposisi pengajuan sebagai upaya restrukturisasi hutang investasi

Mitigasi:

1. Dana PMN agar digunakan sesuai dengan persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham
2. Proyeksi penggunaan dana PMN yang mendapat persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham
3. Pemenuhan rekomendasi BPKP atas penyerapan dana PMN salah satunya penentuan dasar pembayaran barang dan jasa dengan dana PMN, clearing lahan yang akan dibangun menggunakan dana PMN, menggunakan dana PMN sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui Pemerintah, menginstruksikan vendor melakukan verifikasi TKDN kepada surveyor independent yang ditunjuk Pemerintah serta penertiban dokumen pekerjaan proyek GoloMori.

Causes:

1. Misrepresentation of funding feasibility report material
2. The existence of hidden debts that are not accounted for in the composition of the submission as an effort to restructure investment debt

Mitigation:

1. PMN funds must be used in accordance with the approval of the Commissioner and Shareholders
2. Projections for the use of PMN funds that have received approval Commissioners and Shareholders
3. Fulfillment of BPKP recommendations regarding the absorption of PMN funds, one of which is determining the basis for payment for goods and services with PMN funds, clearing land to be built using PMN funds, using PMN funds in accordance with the intended use approved by the Government, instructing vendors to carry out TKDN verification to independent surveyors appointed by the Government as well as controlling work documents for the GoloMori project.

Risiko: Penurunan Pendapatan Perusahaan Akibat Perubahan Skema Pembayaran Hutang Rajawali Group
Risk: Decrease in Company Income Due to Changes in the Rajawali Group Debt Payment Scheme

Penyebab:

Karena pembayaran hutang lama nya akan dilaksanakan dari uang holding mereka, jadi butuh waktu dan keringanan

Causes:

Since the payment of old debts will be carried out from their holding money, it may take time and relief.

Mitigasi:

1. Kajian kelayakan pemberian persetujuan penangguhan pembayaran hutang Rajawali Group berdasarkan :
2. Dampak nilai hutang sebelum tahun 2023 terhadap arus kas Perusahaan
3. Skema pembayaran hutang sebelum tahun 2023 yang akan dibagi pembayarannya pada setiap periode pembayaran kompensasi dari tahun 2024-2027
4. Penetapan denda dan penguncian kurs nilai hutang yang akan dilunasi pada periode tahun yang disepakati.

Mitigation:

1. Study of the feasibility of granting approval for a suspension of Rajawali Group's debt payments based on:
2. Impact of debt value before 2023 on the Company's cash flow
3. Payment scheme debt before 2023 which payments will be divided into each compensation payment period from 2024-2027
4. Determination of fines and exchange rate locking of the debt value which will be repaid in the agreed year period.



Risiko: Pemanfaatan dana upfront fee Zona A Lot S5 (s/d Tahun 2029) yang tidak optimal
Risk: Utilization of upfront fee funds for Zone A Lot S5 (until 2029) is not optimal

Penyebab:
 Rincian prioritas penggunaan dana kurang mendetail

Mitigasi:

1. Penyusunan proyeksi penggunaan dana upfront fee sehingga pendapatan dimaksud dapat optimal dan tepat guna dalam mengcover kebutuhan Perusahaan
2. Kajian penetapan skema upfront fee telah mempertimbangkan future value (fluktuasi kurs, peningkatan nilai kompensasi regular, dll)
3. Kajian pemenuhan ketentuan atas penetapan skema upfront fee mengingat lahan Lot S5 terdapat 3 pihak yang bersepakat (ITDC, NII dan PEMPROV)

Cause:
 The priority details for the use of funds are not very detailed.

Mitigation:

1. Preparing projections for the use of upfront fee funds so the income in question can be optimal and appropriate in covering the Company's needs.
2. Review of the determination of the upfront fee scheme has taken into account future value (exchange rate fluctuations, increases in the value of regular compensation, etc.)
3. Study of compliance with the provisions for determining the upfront fee scheme considering that on Lot S5 there are 3 parties to the agreement (ITDC, NII and the Provincial Government)

Risiko: Tidak berlanjutnya proses bisnis menuju agreement
Risk: No business continuation to agreement

Penyebab:
 1. Tidak tercapainya kesepakatan investasi
 2. Konflik Norma acuan pemilihan mitra kerjasama
 3. Indikasi fraud dalam proses pemilihan mitra
 4. Produk yang ditawarkan tidak memiliki nilai pengembalian investasi tinggi

Mitigasi:

1. Evaluasi atas tidak tercapainya proses bisnis (penetapan harga, penyediaan infrastruktur, lokasi lahan yang ditawarkan, jaminan keberlanjutan bisnis setelah investor melakukan pengembangan bisnis, dll)
2. Penyusunan list keistimewaan investasi pada KEK Mandalika (ketentuan perpajakan dan cukai, fasilitas pendukung dan event rutin di kawasan Mandalika)

Causes:
 1. Failure to reach an investment agreement
 2. Conflict in reference norms for selecting cooperation partners
 3. Indications of fraud in the partner selection process
 4. Products offered do not have a high return on investment

Mitigation:

1. Evaluation of failure to achieve business processes (pricing, supply infrastructure, location of land offered, guarantee of business continuity after investors carry out business development, etc.)
2. Preparation of a list of investment privileges in the Mandalika KEK (tax and excise provisions, supporting facilities and regular events in the Mandalika area)

Risiko: Ketidaksesuaian penetapan aset lelang dengan ketentuan serta kondisi aset
Risk: Inconsistency in determining auction assets with the terms and conditions of the assets

Penyebab:
 Pelaksanaan lelang aset tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mitigasi:

1. Inventarisasi aset yang akan di lelang
2. Penyusunan kebijakan dan flowchart proses lelang aset
3. Penguatan pernyataan kondisi aset sehingga layak untuk ditetapkan dalam program lelang
4. Penentuan mekanisme lelang sesuai ketentuan yang berlaku

Cause:
 The implementation of the asset auction is not in accordance with applicable regulations.

Mitigation:

1. Inventory of assets to be auctioned.
2. Preparation of policies and flowcharts for the asset auction process.
3. Strengthening the statement of asset condition so that it is suitable to be determined in the auction program.
4. Determining the auction mechanism in accordance with the applicable provision

Risiko: Ketidaksesuaian pencatatan inventarisasi sebelum dan pasca event pada site Sirkuit
Risk: Incompatibility of inventory records before and after the event at the Circuit site

Penyebab:

Kurang detailnya pencatatan saat inventarisasi aset dan belum ada divisi khusus aset yang memonitoring

Mitigasi:

Sedang dilakukan proses stock opname inventaris pada sirkuit maupun fasilitas pendukung sirkuit Mandalika
 Inventaris yang dibeli dari dana Dyandra dalam kegiatan MotoGP 2023 termasuk dalam proses stock opname yang dilakukan

Cause:

Lack of detailed recording during asset inventory and there is no special asset division to monitor it.

Mitigation:

An inventory stock-taking process is being carried out at the circuit and supporting facilities for the Mandalika circuit. Inventory purchased from Dyandra funds for MotoGP 2023 activities is included in the stock-taking process being carried out

Program Kerja dan Realisasi Kegiatan Divisi Manajemen Risiko tahun 2023

Untuk memastikan manajemen risiko di Perusahaan terlaksana secara baik, Corporate Planning, Performance & Risk Management Division telah melakukan sejumlah program kerja, seperti:

1. Checking Kerangka Kerja MR agar sesuai dengan konteks internal & eksternal Perusahaan Cek strategi risiko, khususnya bagaimana risiko di cascading dari RJP - RKAP - Strategi Operasi
2. Checking kelengkapan Prosedur Komunikasi Korporat (Corcom), agar berbasis risiko dan Jika perlu buat Prosedur mengenai hal ini.
3. Melakukan program akselerasi pemenuhan kualifikasi SDM GRC sesuai Permen-02 (dengan melakukan program akselerasi kualifikasi berupa inhouse training untuk persiapan sertifikasi)
4. Recheck penerapan SMAP/ ISO37001 (agar didiskusikan untuk dapat menemukan solusi agar potensi fraud bisa ditekan seminimal mungkin)
5. Penajaman Pedoman MR menjadi Pedoman MRT sesuai Permen-02 (Memberlakukan Strategi Risiko secara komprehensif dan lengkap dalam hal ini *risk capacity, risk tolerance, risk appetite, risk limit*)
6. Memastikan Risk Taxonomy yang dimiliki Perusahaan sudah sesuai dengan Permen-02 (agar dibuat Prosedur Internal Kontrol & Kepatuhan)
7. Memastikan Aplikasi Risk Note terimplementasi dengan baik oleh seluruh Tim Risk Champion dan dapat digunakan datanya secara valid oleh Direksi maupun pihak eksternal sebagai bahan audit

Work Program and Activity Realization of the Risk Management Division in 2023

To ensure effective risk management in the Company, the Corporate Legal & Risk Management Division has undertaken several work programs, such as:

1. Checking the MR Framework to suit the Company's internal & external context Checking the risk strategy, especially how risks are cascading from RJP - RKAP - Operational Strategy
2. Checking the completeness of the Corporate Communication Procedure (Corcom), to be risk-based and if necessary create a procedure regarding this matter.
3. Carry out an acceleration program to fulfill GRC HR qualifications in accordance with Permen-02 (by carrying out a qualification acceleration program in the form of in-house training to prepare for certification)
4. Recheck the implementation of SMAP/ISO37001 (to be discussed to find a solution for reducing potential fraud)
5. Refining MR Guidelines into MRT Guidelines in accordance with Permen-02 (Implementing Risk Strategy comprehensively and completely in this case risk capacity, risk tolerance, risk appetite, risk limit)
6. Ensure that the Company's Risk Taxonomy is in accordance with Permen-02 (to be made Internal Control & Compliance Procedures)
7. Ensure the proper implementation of Risk Note Application by the entire Risk Champion Team and the data can be used validly by the Board of Directors and external parties as audit material



Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko

ITDC berkomitmen terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan fungsi tata Kelola, manajemen risiko dan kepatuhan. Perusahaan telah mengelola ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran secara sistematis, terstruktur dan dalam batasan waktu yang jelas, budaya sadar risiko telah terlihat dalam aktivitas sehari-hari, dan manajemen risiko telah digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

Pada tahun 2023 telah dilakukan evaluasi atas kematangan penerapan manajemen risiko perusahaan yang dilakukan oleh Lembaga Eksternal melalui proses survey implementasi manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan pejabat serta BOD dan BOC perusahaan, kemudian wawancara dengan BOD, BOC dan BOD-1 serta dilakukan pula proses verifikasi dokumen sebagai bukti atas pengelolaan dan implementasi manajemen risiko di tahun 2023. Skor kematangan risiko yang diperoleh ada pada angka 3,26 yang pada profil RMI berada pada level Managed.

Dari hasil penilaian kematangan penerapan manajemen risiko perusahaan, terdapat beberapa point perbaikan yang harus dipenuhi untuk menjaga stabilitas dari konsistensi penerapan manajemen risiko selain dari upaya mempertahankan skor yang telah diperoleh sebelumnya karena hal ini berkaitan dengan indikator penilaian kesehatan perusahaan.

Terdapat beberapa perbaikan yang target pemenuhannya telah dicantumkan dalam KPI perusahaan, sehingga diharapkan terdapat peningkatan atas kesadaran risiko dari masing-masing Insan ITDC ke depannya termasuk Direksi dan Komisaris dalam menetapkan putusan atas suatu kegiatan bisnis.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

ITDC berkomitmen dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat dan memberikan nilai tambah yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui penerapan manajemen risiko yang sistematis, terstruktur

Evaluation of Risk Management Effectiveness

ITDC is committed to improving the quality of risk management implementation as part of strengthening governance, risk management and compliance functions. The Company has managed uncertainty regarding achieving targets systematically, structured and within clear time limits, a proven risk awareness culture in daily activities, and risk management has been used effectively and efficiently to improve the Company's performance.

In 2023, an evaluation of the maturity of the company's risk management implementation was carried out by an external agency through a risk management implementation survey process for all employees and officials as well as the company's BOD and BOC, then interviews with the BOD, BOC and BOD-1 and a document verification process was also carried out as evidence of the management and implementation of risk management in 2023. The risk maturity score obtained is 3.26, which in the RMI profile is at the Managed level.

From the results of the assessment of the maturity of the company's risk management implementation, several improvement points must be met to maintain the stability of the consistent implementation of risk management apart from efforts to maintain the scores previously obtained since it is related to the company's health assessment indicators.

There are several improvements whose fulfillment targets have been included in the company's KPI. An increase in risk awareness from each ITDC Personnel in the future is expected, including Directors and Commissioners, in making decisions regarding a business activity.

Statement from the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

ITDC is committed to conducting healthy business practices and providing value in line with stakeholders' expectations through systematic, structured, and comprehensive risk management implementation. To ensure this commitment, the

dan komprehensif. Untuk memastikan komitmen tersebut, Perusahaan melakukan evaluasi bersama dengan Komite Eksekutif yang beranggotakan seluruh jajaran Direksi dan Pejabat Eksekutif.

Hasil evaluasi manajemen risiko Perusahaan juga dibahas melalui Rapat Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama. Selain membahas atas laporan eksposur risiko setiap bulan, Direksi juga membahas hal-hal spesifik lainnya seperti pengukuran tingkat risiko, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, persetujuan atas limit risiko serta persetujuan metodologi yang digunakan dalam proses pengukuran risiko.

Sementara itu, Divisi Audit Internal selaku pelaksana atas pengendalian internal Perusahaan secara rutin melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kualitas dan proses tata kelola perusahaan. Di samping itu, evaluasi manajemen risiko secara independen juga diperoleh dari audit eksternal maupun pihak-pihak eksternal lainnya. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan selama tahun 2023, sistem manajemen risiko Perusahaan dinilai telah berjalan efektif.

Kebijakan Penghargaan/Kompensasi yang Memperhitungkan Kinerja Perusahaan Jangka Panjang

Sampai dengan 31 Desember 2023, ITDC merupakan bagian dari Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), serta tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Perusahaan juga tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (MSOP/ESOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan harga exercise saham yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Company conducts evaluations jointly with the Executive Committee comprising all Directors and Executive Officers.

The results of the Company's risk management evaluation are also discussed at Board Meetings chaired by the President Director. In addition to discussing monthly risk exposure reports, the Board also discusses other specific matters such as risk level measurement, approval of policies and procedures, approval of risk limits, and approval of methodologies used in the risk measurement process.

Meanwhile, the Internal Audit Division, as the executor of the Company's internal controls, routinely evaluates and recommends on the quality and process of corporate governance. In addition, independent evaluations of risk management are also obtained from external audits and other external parties. Based on the assessments conducted during 2023, the Company's risk management system is deemed to have been effectively implemented.

Policy for Long-term Performance-based Rewards/Compensation

As of December 31, 2023, ITDC is part of the Aviation and Tourism State-Owned Enterprises (SOEs) Holding whose shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia and PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), and has never conducted an Initial Public Offering (IPO). The Company also does not have Management and Employee Share Ownership Programs (MSOP/ESOP). Therefore, there is no information related to the number of ESOP/MSOP shares and their realization, duration, eligible employee and/or management requirements, and exercise stock prices that can be presented in this Annual Report.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem pengendalian internal adalah salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Kep-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, Direksi senantiasa berupaya untuk menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif dalam rangka mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Tujuan implementasi pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis
Pengendalian internal bertujuan mendorong terlaksananya strategi-strategi yang ditetapkan Perusahaan untuk mencapai visi dan misinya.
2. Tujuan Operasional
Pengendalian internal bertujuan mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan, termasuk mendorong pencapaian seluruh target kinerja Perusahaan.
3. Tujuan Pelaporan
Pengendalian Intern bertujuan mendorong kehandalan, ketepatan waktu dan transparansi pelaporan finansial dan non finansial untuk kebutuhan intern dan ekstern.
4. Tujuan Kepatuhan
Pengendalian Intern bertujuan mendorong terciptanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha Perusahaan.

Keempat tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil (*output*) dari suatu pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan proses dan unsur-unsur pengendalian internal untuk menghasilkan tujuan dan manfaat pengendalian internal yang baik. oleh karena itu, agar tujuan pengendalian internal tercapai maka perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian internal.

Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Perusahaan menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian internal berbasis risiko dengan mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Piagam Satuan Pengawasan

The internal control system is one of the main means to ensure that the Company's management has been carried out in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Kep-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, the Board of Directors always strives to establish an effective internal control system to safeguard the Company's investments and assets.

The objectives of implementing internal controls are as follows:

1. Strategic Objectives
Internal controls aim to facilitate the implementation of the Company's strategies to achieve its vision and mission.
2. Operational Objectives
Internal controls aim to promote the effectiveness and efficiency of the Company's operations, including achieving all performance targets.
3. Reporting Objectives
Internal controls aim to ensure the reliability, timeliness, and transparency of financial and non-financial reporting for internal and external needs.
4. Compliance Objectives
Internal controls aim to promote compliance with laws and regulations governing the Company's business activities.

These four objectives of internal control are the results (outputs) of good internal control, which can be achieved by considering the processes and elements of internal control to produce the objectives and benefits of good internal control. Therefore, to achieve the objectives of internal control, the company must consider the elements of internal control.

Comprehensive Internal Control System

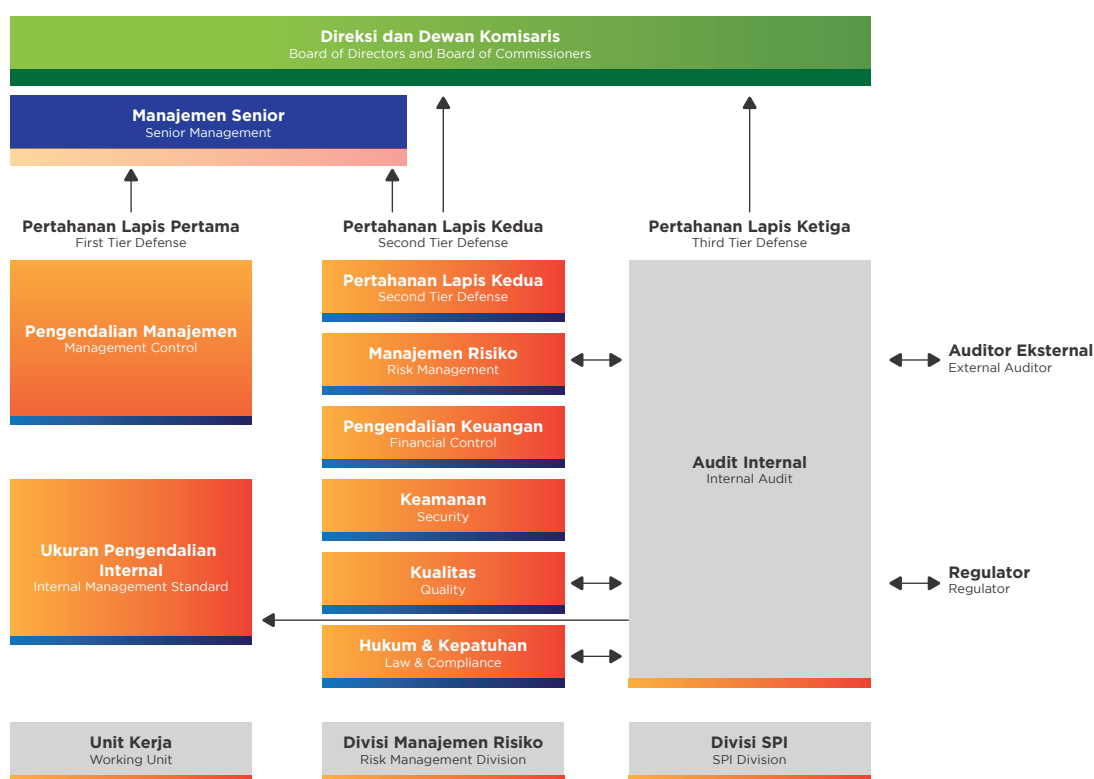
The Company implements a risk-based internal control and supervision system based on Financial Accounting Standards (PSAK) and the Internal Audit Charter (SPI Charter). In addition, the Company

Internal (*SPI Charter*). Selain itu, Perusahaan terus berupaya meningkatkan penerapan pengendalian internal melalui pengembangan sistem dan prosedur yang aplikatif serta mencegah terjadinya kecurangan.

Adapun skema sistem pengendalian internal yang diterapkan Perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut:

continues to strive to improve the implementation of internal controls through the development of applicable systems and procedures to prevent fraud.

The internal control system scheme implemented by the Company can be seen in the following diagram:



Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dengan Kerangka yang Diakui COSO

Sistem pengendalian internal ITDC senantiasa mengacu pada *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) dan tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi operasional, pelaporan dan kepatuhan. Penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan konsep COSO terdiri dari 5 (lima) komponen, antara lain:

Alignment of the Company's Internal Control System with the Recognized COSO Framework

ITDC's internal control system consistently refers to the Internal Control Integrated Framework developed by The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), and the objectives of internal control according to COSO include operational, reporting, and compliance. The implementation of the internal control system based on the COSO concept consists of 5 (five) components, including:



1. Lingkungan Pengendalian

Penilaian atas pelaksanaan lingkungan pengendalian perusahaan, dilakukan terhadap unsur-unsur sebagai berikut:

- Menilai kecukupan atas struktur organisasi dan uraian pekerjaan pada masing-masing level jabatan.
- Menilai kecukupan atas jumlah dan kompetensi masing-masing personel yang melaksanakan tugas tertentu.
- Menilai penerapan kode etik perusahaan pada masing-masing personel di unit kerja ITDC.
- Menilai kecukupan keberadaan atas kebijakan sistem maupun prosedur perusahaan yang dibutuhkan perusahaan pada masing-masing unit kerja.

2. Penilaian Risiko

Penilaian atas pengendalian risiko perusahaan, dilakukan terhadap unsur-unsur sebagai berikut:

- Menilai terhadap pelaksanaan identifikasi risiko dan pengendaliannya oleh masing-masing unit kerja.
- Menilai terhadap pelaksanaan evaluasi atas risiko-risiko di masing-masing unit kerja.
- Melakukan identifikasi risiko-risiko yang kemungkinan belum dilakukan identifikasi oleh masing-masing unit kerja.

3. Aktivitas Pengendalian

Penilaian atas pelaksanaan aktivitas pengendalian perusahaan, kami lakukan terhadap unsur-unsur sebagai berikut:

- Menilai kecukupan terhadap perencanaan program kerja yang dibuat oleh masing-masing unit kerja.
- Menilai kecukupan terhadap pelaksanaan program kerja perusahaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

1. Control Environment

Assessment of the implementation of the company's control environment is conducted on the following elements:

- Assessing the adequacy of the organizational structure and job descriptions at each level of position.
- Evaluating the sufficiency of the number and competency of personnel performing specific tasks.
- Assessing the implementation of the company's code of ethics among personnel in ITDC's units.
- Evaluating the adequacy of the presence of company policies, systems, and procedures needed for each unit of the company.

2. Risk Assessment

Assessment of the company's risk control is conducted on the following elements:

- Evaluating the implementation of risk identification and control by each unit.
- Assessing the evaluation of risks in each unit.
- Identifying risks that may not have been identified by each unit.

3. Control Activities

Assessment of the implementation of the company's control activities is conducted on the following elements:

- Assessing the adequacy of the planning of work programs created by each unit.
- Evaluating the adequacy of the implementation of the company's work programs within the designated time.

4. Sistem Informasi dan Komunikasi

Salah satu unsur penting dalam mendukung tercapainya sistem pengendalian internal yang efektif adalah pelaksanaan informasi dan komunikasi melalui berbagai media dan saluran komunikasi internal yaitu:

- a. Sistem pelaporan formal.
- b. Aplikasi sistem teknologi informasi.
- c. Program komunikasi manajemen antara lain melalui rapat Dewan komisaris, rapat Direksi, rapat Komite Audit, dan Komite.

5. Pemantauan

Perusahaan terus meningkatkan pemantauan penerapan sistem pengendalian internal, yang mencakup pengendalian keuangan maupun pengendalian operasional secara berkala. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk melihat, memastikan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal antara rencana dan realisasi. Pemantauan dilakukan melalui assessment oleh Divisi Manajemen Risiko serta assurance berkala oleh Satuan Pengawasan Internal.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan secara konsisten melakukan evaluasi atas implementasi sistem pengendalian internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG). ITDC senantiasa menitikberatkan pelaksanaan pemantauan terhadap risiko utama yang berfungsi sebagai bagian dari kegiatan usaha sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun Divisi Audit Internal.

Perusahaan juga memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan ITDC dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

4. Information and Communication Systems

One of the crucial elements in supporting the achievement of an effective internal control system is the implementation of information and communication through various media and internal communication channels, including:

- a. Formal reporting systems.
- b. Application of information technology systems.
- c. Management communication programs including meetings of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and Committees.

5. Monitoring

The company continues to improve monitoring of the implementation of internal control systems, including financial and operational controls on a regular basis. The purpose of this monitoring is to ensure the effectiveness of internal control implementation between planning and realization. Monitoring is conducted through assessments by the Risk Management Division and periodic assurance by the Internal Audit Unit.

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

The Company consistently evaluates the implementation of the internal control system as regulated in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG). ITDC emphasizes monitoring the main risks as part of daily business activities, including periodic evaluations, both by operational units and the Internal Audit Division.

The Company also continuously monitors and evaluates the adequacy of the internal control system in response to changes in internal and external conditions, and must enhance the capacity of the Internal Audit Unit to improve its effectiveness. Broadly, the steps taken by ITDC to ensure effective monitoring activities include:



1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi ITDC;
2. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal;
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perusahaan dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan SPI ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, management review dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/ penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi/*feedback* dalam format dan frekuensi yang tepat.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan senantiasa mengevaluasi keandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kendala laporan dan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan, serta keamanan kinerja keuangan Perusahaan. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Direksi didukung oleh Divisi Internal Audit, yang dalam implementasinya selalu berkoordinasi dengan Komite Audit, guna memberikan keyakinan bahwa penerapan pengendalian internal telah sesuai dengan tujuan dan sasaran Perusahaan.

Secara umum, hasil evaluasi atas pendekatan COSO menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal di Perusahaan telah memadai dan cukup efektif dalam mengendalikan operasi Perusahaan. Meski demikian, penerapan sistem pengendalian internal masih memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Adapun hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal di Perusahaan diuraikan sebagai berikut:

1. Ensuring that monitoring functions are clearly defined and well-structured within the ITDC organization;
2. Assigning units/personnel responsible for monitoring the effectiveness of internal controls;
3. Establishing the appropriate frequency for monitoring activities based on the inherent risks to the company and the nature/frequency of changes in operational activities;
4. Integrating the Internal Audit Unit into operational activities and providing routine reports such as journals, management reviews, and reports on approvals for exceptions/deviations from established policies and procedures (justification for irregularities), which are then reviewed;
5. Reviewing documentation and evaluation results from units/personnel assigned to monitoring;
6. Providing information/*feedback* in the appropriate format and frequency.

Statements by the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Company consistently evaluates the reliability and effectiveness of the internal control system regarding financial reporting and information, compliance with applicable laws and regulations, efficiency and effectiveness of the company's operational activities, and financial performance security. This evaluation is conducted by the Directors supported by the Internal Audit Division, which in its implementation always coordinates with the Audit Committee, to ensure that the implementation of internal controls is in line with the company's objectives and targets.

Generally, the results of the COSO approach evaluation indicate that the implementation of the internal control system in the company has been adequate and effective in controlling company operations. However, the implementation of the internal control system still has some aspects that need improvement. The evaluation results of the implementation of the internal control system in the company are outlined as follows:

1. Lingkungan Pengendalian

Yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian adalah segala sesuatu yang dimiliki dan mempengaruhi pencapaian Perusahaan untuk mencapai budaya sadar pengendalian, yang meliputi:

- a. Nilai integritas dan etika sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.
- b. Komitmen terhadap kompetensi, yang ditetapkan dalam kebijakan Human Capital untuk meningkatkan kompetensi SDM.
- c. Pengawasan terhadap manajemen dan Komite Audit, sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, *Internal Audit Charter* dan *Audit Committee Charter*.
- d. Filosofi manajemen dan gaya operasi, yang diatur lebih lanjut dalam kebijakan dan penerapan manajemen risiko.
- e. Struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

2. Penilaian Risiko

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia memiliki potensi risiko yang perlu terus diidentifikasi dan diukur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Penilaian risiko dilakukan melalui pelaksanaan asesmen tingkat kematangan manajemen risiko di seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dikelola dengan baik melalui tindakan mitigasi yang diperlukan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas sistem pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, melalui:

- a. Pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan fungsi dari masing-masing unit organisasi.
- b. Mempersiapkan sistem pencatatan data dan penyimpanan dokumen Perusahaan yang baik.
- c. Mempersiapkan sistem pengamanan data dan dokumen Perusahaan dengan baik.
- d. Manajemen SDM berbasis kompetensi.
- e. Komitmen penerapan manajemen risiko yang mengarah pada budaya sadar risiko.

1. Control Environment

The control environment refers to everything that affects the company's achievement of a control-conscious culture, including:

- a. Values of integrity and ethics as stipulated in the Business Ethics and Code of Conduct of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.
- b. Commitment to competency, as established in the Human Capital policy to enhance human resources competence.
- c. Oversight of management and the Audit Committee, as regulated in the Board Manual, Internal Audit Charter, and Audit Committee Charter.
- d. Management philosophy and operational style, further regulated in risk management policies and implementation.
- e. Organizational structure, delegation of authority, and responsibilities.

2. Risk Assessment

In conducting its business operations, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia has potential risks to be continuously identified and measured, influenced by various internal and external factors. Risk assessment is done through conducting risk management maturity assessments across all work units to ensure that existing risks are well managed through necessary mitigation actions.

3. Control Activities

Control activities of the internal control system are policies and procedures created by management to meet established objectives, including:

- a. Division of tasks, responsibilities, and authorities according to the functions of each organizational unit.
- b. Preparation of good data recording and document storage systems for the company.
- c. Preparation of good data and document security systems for the company.
- d. Competency-based HR management.
- e. Commitment to risk management implementation leading to a risk-conscious culture.



f. Melakukan penilaian atau pemeriksaan atas kinerja Perusahaan oleh pihak independen seperti oleh Kantor Akuntan Publik. 4. Sistem Informasi dan Komunikasi Salah satu unsur penting dalam mendukung tercapainya sistem pengendalian internal yang efektif adalah pelaksanaan informasi dan komunikasi melalui berbagai media dan saluran komunikasi internal yaitu: a. Sistem pelaporan formal. b. Aplikasi sistem teknologi informasi. c. Program komunikasi manajemen antara lain melalui rapat Dewan komisaris, rapat Direksi, rapat Komite Audit, dan Komite Manajemen Risiko dan Investasi. 5. Pemantauan Perusahaan terus meningkatkan pemantauan penerapan sistem pengendalian internal, yang mencakup pengendalian keuangan maupun pengendalian operasional secara berkala. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk melihat, memastikan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal antara rencana dan realisasi. Pemantauan dilakukan melalui <i>assessment</i> oleh Divisi Manajemen Risiko serta <i>assurance</i> berkala oleh Satuan Pengawasan Internal.	f. Assessment or examination of company performance by independent parties such as Public Accountant Offices. 4. Information and Communication Systems One of the essential elements in supporting the achievement of an effective internal control system is the implementation of information and communication through various media and internal communication channels, including: a. Formal reporting systems. b. Information technology system applications. c. Management communication programs, including meetings of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and Risk and Investment Management Committee. 5. Monitoring The Company continues to improve monitoring of the implementation of the internal control system, including financial and operational controls on a regular basis. The purpose of this monitoring is to observe, ensure the effectiveness of the implementation of internal controls between planning and realization. Monitoring is conducted through assessments by the Risk Management Division and periodic assurance by the Internal Audit Unit.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Governance of Information Technology

ITDC menganggap bahwa sistem Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu faktor penting yang harus dibangun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan serta efisiensi dalam kegiatan operasional Perusahaan. Penerapan sistem TI di era digitalisasi juga dinilai dapat berperan penting dalam menjaga kelangsungan bisnis Perusahaan karena dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja. Untuk itu, Perusahaan berupaya untuk meningkatkan penerapan sistem TI secara optimal untuk mendukung produktivitas kerja yang optimal serta memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada pemangku kepentingan.

Tata kelola TI Perusahaan senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2018 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan dilaksanakan untuk menyelaraskan (*alignment*) antara pengembangan teknologi informasi dengan bisnis, mengelola risiko-risiko bisnis dengan lebih baik, menyediakan layanan yang lebih baik, menekan biaya dan meningkatkan nilai (*value*) bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*), khususnya konsumen.

Perusahaan memandang perlu untuk melaksanakan semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi bagi para konsumen atau pelanggan. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan keamanan data yang terjamin, yang merupakan bagian dari tata kelola TI yang baik. Perusahaan juga telah melaksanakan IT Maturity Assessment sesuai dengan Surat No. INJ.05.01/23/08/2023/A.1285 dengan salah satu poin arahan yaitu:

"Anak Perusahaan wajib secara rutin melakukan Penilaian Indeks Kematangan IT (*IT Maturity Level*) paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun dengan penilaian dilakukan oleh penilai independen, dan menggunakan *framework* COBIT 2019 atau versi terbaru yang relevan dengan perkembangan tata kelola IT dengan target minimal 3".

ITDC considers that Information Technology (IT) systems are one of the critical factors that must be developed to realize the vision and mission of the Company while improving the quality of service and operational efficiency. The implementation of IT systems in the digital era is also considered to play a crucial role in maintaining business continuity as it can enhance the effectiveness and productivity of operations. Therefore, the Company strives to optimize the implementation of IT systems to support optimal work productivity and provide the best quality service to stakeholders.

The Company's IT governance always refers to the prevailing laws and regulations and in line with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/02/2018 regarding Guidelines for the Management of Information Technology of State-Owned Enterprises. The implementation of IT Governance in the Company is carried out to align IT development with business, better manage business risks, provide better services, reduce costs, and enhance value for stakeholders, especially consumers.

The company considers it necessary to implement all mechanisms to protect and minimize disruption to the confidentiality, integrity and availability of information for consumers or customers. This requires guaranteed data security management, which is part of good IT governance. The company has also carried out an IT Maturity Assessment in accordance with Letter No. INJ.05.01/23/08/2023/A.1285 with one of the guiding points, namely:

"Subsidiaries are required to routinely carry out an IT Maturity Level (*IT Maturity Level*) Assessment at least once every 2 (two) years with the assessment carried out by an assessor independent, and using the COBIT 2019 framework or the latest version that is relevant to the development of IT governance with a minimum target of 3".



Pelaksanaan IT Maturity Assessment ini bertujuan untuk memperoleh tingkat kematangan implementasi TI di Perusahaan dengan target nilai di tahun 2023 dari InJourney sebesar 2,5 (*managed*). Di tahun 2023, hasil pelaksanaan IT Maturity Assessment Level yang dilakukan Perusahaan memperoleh nilai 2,83 atau sudah melebihi target yang ditentukan oleh InJourney.

Selain melakukan asesmen, pada pekerjaan ini juga akan dilakukan penyusunan dan perbaikan dokumen tata kelola TI sesuai COBIT 2019.

Visi dan Misi Sistem Teknologi Informasi

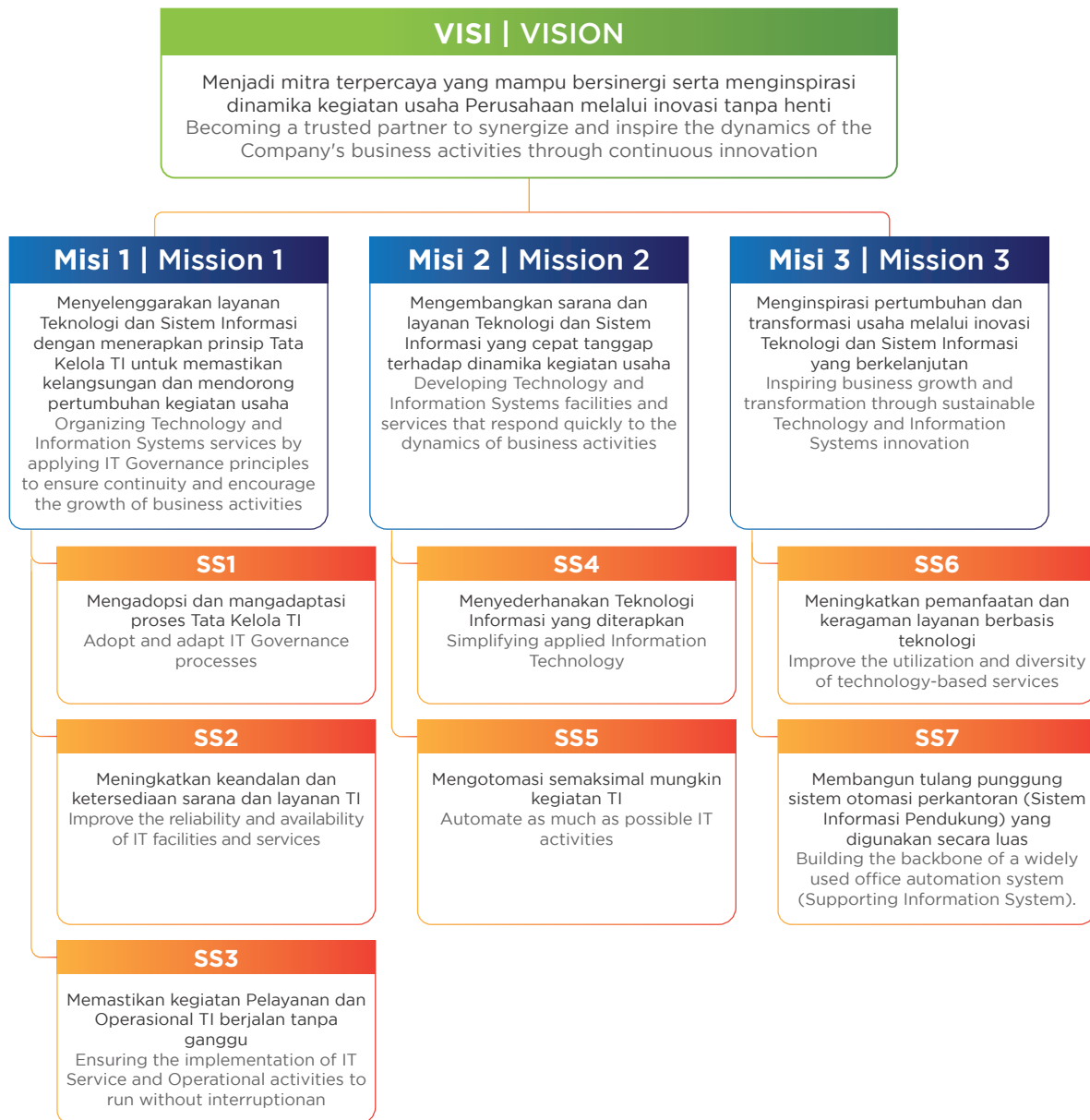
Dengan memperhatikan analisa keselarasan TI dengan bisnis, dibutuhkan penjabaran visi dan misi TI sebagai upaya perwujudan peran TI untuk memastikan kegiatan operasional Perusahaan berjalan tanpa gangguan, mendukung pertumbuhan usaha serta endorong transformasi usaha untuk menjadi *market leader*. Berikut ini merupakan visi dan misi TI eksisting sesuai MPTI 2017-2021.

The implementation of this IT Maturity Assessment aims to obtain the maturity level of IT implementation in the Company with a target value in 2023 from InJourney of 2.5 (managed). In 2023, the results of the implementation of the IT Maturity Assessment Level carried out by the Company obtained a score of 2.83 or has exceeded the target set by InJourney.

Apart from carrying out assessments, this work will also prepare and improve IT governance documents according to COBIT 2019.

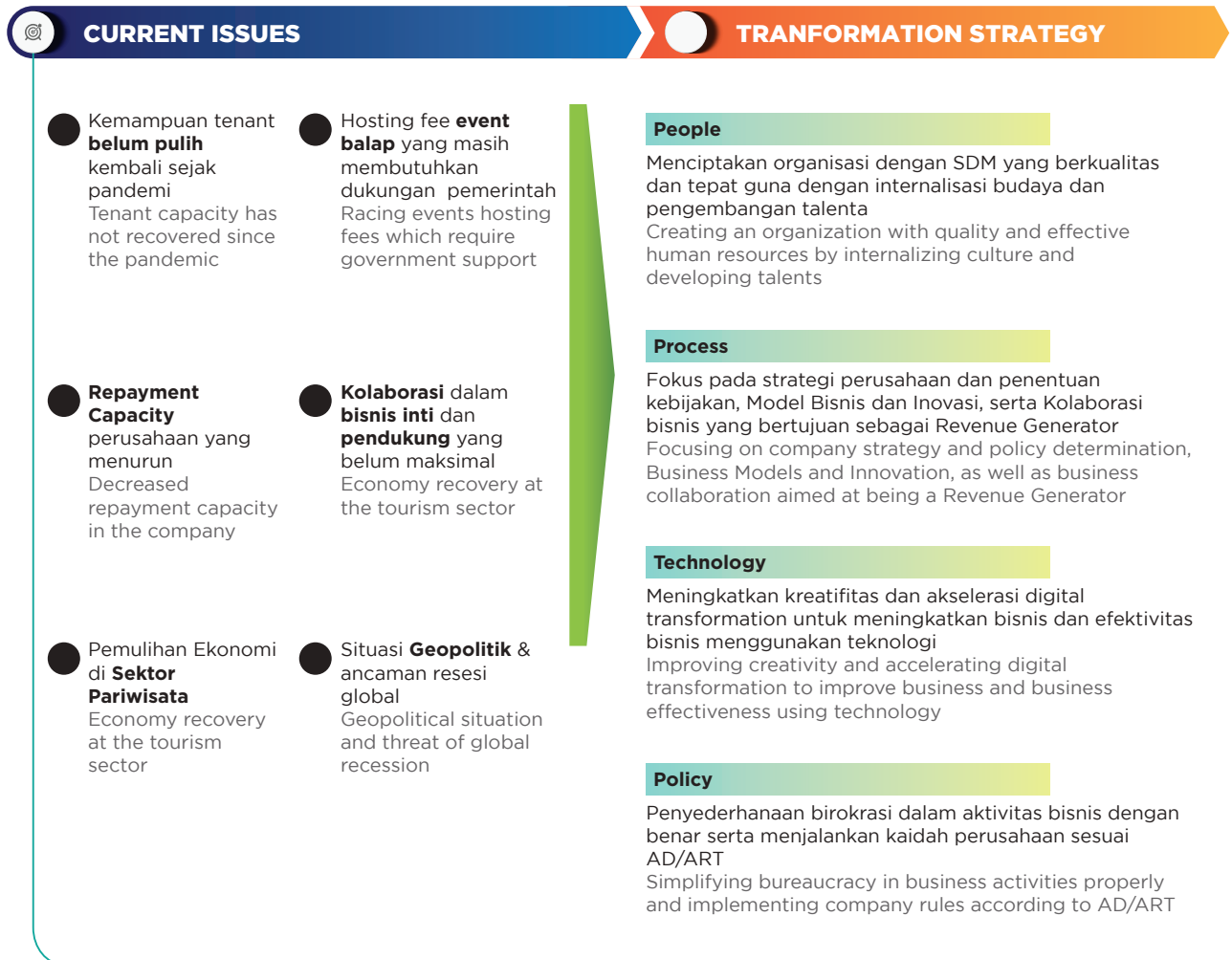
Vision and Mission of Information Technology System

By considering the analysis of the alignment of IT with business, it is necessary to explain the vision and mission of IT as an effort to realize the role of IT to ensure that the Company's operational activities run without interruption, support business growth and encourage business transformation to become a market leader. The following is the vision and mission of existing IT according to MPTI 2017-2021.



Dengan adanya RJPP ITDC 2022-2026, maka terdapat visi dan misi Perusahaan yang baru dalam mendukung pencapaian strategi bisnis ITDC, sehingga visi dan misi TI perlu dilakukan penyesuaian. Visi dan misi TI akan di-cascading dari visi dan misi Perusahaan, termasuk adanya *transformation strategy* yang tertuang dalam RJPP terkait dengan aspek Technology yang menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi perusahaan.

With the ITDC RJPP 2022-2026, there is a new Company vision and mission to support the achievement of ITDC's business strategy. Thus, IT vision and mission need to be adjusted. The IT vision and mission will be cascaded from the Company's vision and mission, including the transformation strategy contained in the RJPP related to the Technology aspect which is an inseparable part of the company's strategy.



Berikut ini merupakan usulan visi dan misi TI berdasarkan *transformation strategy* pada aspek Technology termasuk sasaran TI sebagai turunan visi dan misi tersebut yang akan dituangkan ke dalam MPTI yang akan disusun:

The following is a proposed IT vision and mission based on the transformation strategy in the Technology aspect including IT targets as a derivative of the vision and mission which will be outlined in the MPTI that will be prepared:

VISI | VISION

"Menjadi partner bisnis dalam mewujudkan Visi Perusahaan menjadi pengembang destinasi pariwisata kelas dunia"

"Becoming a business partner in realizing the Company's vision of becoming a world-class tourism destination developer"

MISI | MISSION

Menciptakan transformasi digital di lingkungan Perusahaan secara menyeluruh
Creating digital transformation in the Company's environment as a whole

Membangun budaya pengambilan Keputusan berdasarkan data dan informasi (data driven decision making)
Building a culture of decision making based on data and information (data driven decision making)

Meningkatkan SDM TI yang berkualitas
Improving quality IT human resources

Penerapan Tata Kelola TI dan keamanan informasi yang berkelanjutan
Implementation of sustainable IT Governance and information security

SASARAN TI | IT GOALS

- 1 Menciptakan transformasi digital di lingkungan Perusahaan secara menyeluruh
- 2 Membangun teknologi informasi dalam mendukung digital transformation di Perusahaan serta peningkatan efektivitas proses bisnis
- 3 Menyediakan kapabilitas data analytics untuk mendukung pengambilan keputusan strategis
- 4 Membangun tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* 4 serta dan menerapkan standar keamanan informasi sesuai *best practices*
- 5 Optimalisasi pemanfaatan dan Peningkatan sumber daya IT di ITDC
- 1 Realizing digital transformation in the Company's environment as a whole
- 2 Develop information technology to support digital transformation in the Company and increase the effectiveness of business processes
- 3 Provide data analytics capabilities to support strategic decision-making
- 4 Develop IT governance in accordance with stakeholder needs 4 and implement information security standards according to best practices
- 5 Optimizing utilization and increasing IT resources at ITDC

Penerapan Sistem Teknologi Informasi

Untuk dapat terus bersaing dan selaras dengan kemajuan TI yang semakin berkembang, Perusahaan diharuskan mampu beradaptasi dan mengimplementasikan teknologi informasi yang andal untuk dapat bersaing dalam industri pariwisata. Penerapan sistem TI yang diterapkan oleh Perusahaan dilakukan secara terintegrasi. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi program kerja di sepanjang tahun 2023 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Implementation of Information Technology Systems

To continue to compete and align with the advancing IT, the Company is required to adapt and implement reliable information technology to compete in the tourism industry. The implementation of IT systems by the Company is done in an integrated manner. This is done through the implementation of work programs throughout 2023, which can be outlined as follows:



IT Disruption

Perusahaan selalu berupaya melakukan optimalisasi proses bisnis di seluruh lini, salah satunya melalui *IT Disruption* untuk meningkatkan efisiensi proses. Inovasi TI yang dilaksanakan dalam rangka implementasi *IT Disruption* antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan layanan kolaborasi menggunakan teknologi Microsoft 365 serta melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada pengguna terkait fungsi dan manfaat teknologi.
2. Menjaga relevansi terhadap laju perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan *Business Process Owner* melalui pengembangan dan *enhancement* fitur seluruh aplikasi Perusahaan secara berkelanjutan.

Cyber Security

Program kerja peningkatan *Cyber Security* meliputi benchmarking dengan instansi dan member lainnya, bimbingan teknis terkait peningkatan awareness IT Security, integrasi sertifikat elektronik, dan lain sebagainya.

Sepanjang tahun 2023, realisasi program kerja ini antara lain:

1. Peremajaan infrastruktur TI terkait pengamanan data dengan meng-*upgrade* sistem informasi menggunakan teknologi terkini yang lebih *secure*.
2. Melaksanakan *penetration test* pada aplikasi Perusahaan.
3. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terkait penggunaan *Virtual Private Network (VPN)* di lingkungan Perusahaan.
4. Pembahasan rencana pengembangan *Security Operation Center (SOC)* bersama InJourney dan member holding lainnya.

Disaster Recovery

Saat ini data center perusahaan telah memenuhi standar yang ideal untuk memenuhi *availability* layanan TI. Pekerjaan Pengembangan Data Center Colocation telah dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu membuat sistem sentralisasi data di satu lokasi data center yang sesuai dengan pedoman tata kelola infrastruktur teknologi informasi.

IT Disruption

The company always strives to optimize business processes across all lines, one of which is through *IT Disruption* to increase process efficiency. IT innovations implemented in the context of implementing *IT Disruption* include:

1. Optimizing the use of collaboration services using Microsoft 365 technology and carrying out continuous outreach to users regarding the functions and benefits of technology.
2. Maintain relevance to the pace of technological development and meet the needs of the *Business Process Owner* through continuous development and enhancement of features for all Company applications.

Cyber Security

The *Cyber Security* improvement work program includes benchmarking with other agencies and members, technical guidance related to increasing IT Security awareness, integration of electronic certificates, and others.

Throughout 2023, the realization of this work program includes:

1. Rejuvenation of IT infrastructure related to data security by upgrading information systems using the latest, more secure technology.
2. Carry out penetration tests on Company applications.
3. Carry out continuous outreach regarding the use of *Virtual Private Network (VPN)* in the Company environment.
4. Discussion of plans to develop a *Security Operation Center (SOC)* with InJourney and other holding members.

Disaster Recovery

Currently, the company's data center has met ideal standards to meet the availability of IT services. Colocation Data Center Development work was carried out in 2019, namely creating a data centralization system in one data center location in accordance with information technology infrastructure governance guidelines.

Perusahaan memiliki *Data Recovery Center* (DRC) yang berlokasi di The Nusa Dua yang dilengkapi *redundant system, backup, replication* dan *failover-failback system* handal yang terhubung dengan Data Center Colocation. Selain itu DRC berfungsi sebagai server layanan TI di lingkup lokal The Nusa Dua utamanya sebagai server CCTV kawasan.

Road Map TI

Penetapan Road Map TI tertuang melalui beberapa inisiatif berdasarkan hasil analisis kebutuhan perusahaan dan arahan strategis dari InJourney. Technology Department telah merancang inisiatif di bidang Teknologi Informasi (TI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi bisnis serta perkembangan teknologi. Sesuai dengan RKAP pada tahun 2023, maka beberapa inisiatif TI yang dilaksanakan sesuai adalah sebagai berikut:

- A. Implementasi Tata Kelola TI
- B. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung ketersediaan layanan TI
- C. Pengembangan aplikasi dan sistem informasi yang mendukung proses bisnis perusahaan dan holding.

Kegiatan Inisiatif TI yang dilaksanakan Technology Department sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Implementasi Tata Kelola TI

Implementasi Tata Kelola TI pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

• Asesmen INDI 4.0

Sesuai Surat Dinas dan InJourney Nomor: INJ.11.02/23/08/2022/A.0402 perihal pelaksanaan Asesmen INDI 4.0 di lingkup InJourney Group, dimana salah satu poinnya adalah pelaksanaan asesmen INDI 4.0 untuk tahun 2022 akan dilaksanakan di PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia. Kegiatan assessment INDI 4.0 meliputi Kickoff & Sosialisasi, Edukasi & Diskusi Strategi Pelaksanaan, Bimbingan Teknis, *self assessment*, Review *self assessment*, asesmen ITDC sampai dengan penerbitan sertifikat.

The company has a Data Recovery Center (DRC) located in The Nusa Dua which is equipped with a reliable redundant system, backup, replication and failover-failback system which is connected to the Colocation Data Center. Furthermore, DRC functions as an IT service server in the local area of The Nusa Dua, especially as a regional CCTV server.

IT Roadmap

The IT Road Map is determined through several initiatives based on the results of an analysis of company needs and strategic direction from InJourney. The Technology Department has designed initiatives in the field of Information Technology (IT) that are tailored to the needs of business conditions and technological developments. In accordance with the RKAP in 2023, several IT initiatives implemented are as follows:

- A. Implementation of IT Governance
- B. Infrastructure development to support the availability of IT services
- C. Development of applications and information systems that support company and holding business processes.

The IT Initiative activities carried out by the Technology Department up to Quarter IV 2023 are as follows:

A. Implementation of IT Governance

Implementation of IT Governance in 2023 is as follows:

• INDI 4.0 Assessment

in accordance with Service and InJourney Letter Number: INJ.11.02/23/08/2022/A.0402 regarding the implementation of INDI 4.0 Assessment within the scope of the InJourney Group, where one of the points is that the INDI 4.0 assessment for 2022 was carried out at PT. Indonesian Tourism Development. INDI assessment activities 4.0 includes Kickoff & Socialization, Education & Implementation Strategy Discussion, Technical Guidance, self-assessment, self-assessment review, ITDC assessment up to the issuance of certificates.



Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, pelaksanaan Asesmen INDI 4.0 sedang dalam proses perencanaan dan berkoordinasi dengan pihak Holding InJourney.

- **IT Security**

Kegiatan IT Security meliputi *benchmarking* dengan instansi lainnya, bimbingan teknis terkait IT Security, pelaksanaan IT Maturity Assessment, Integrasi sertifikat elektronik, dll.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, kegiatan peningkatan IT Security meliputi bimbingan teknis dan upgrade infrastruktur TI menggunakan teknologi terkini serta pelaksanaan *pentest* aplikasi bekerja sama dengan penyedia aplikasi.

- **Master Plan TI 2023-2027**

Kegiatan implementasi Tata Kelola TI lainnya adalah melaksanakan penyusunan Masterplan TI 2023-2027 dikarenakan Masterplan TI ITDC sebelumnya yaitu Masterplan TI 2017-2021 perlu dilaksanakan penyesuaian kembali dengan tujuan dan target perusahaan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, pekerjaan penyusunan Masterplan TI 2023-2027 ITDC telah berkontrak dan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang diselaraskan dengan RJPP dan Master Plan TI Holding InJourney.

B. Pengembangan Infrastruktur untuk mendukung ketersediaan layanan TI

1. Pengadaan Hardware, Infrastruktur TI, Jaringan dan Lisensi Aplikasi End User

Saat ini data center perusahaan telah memenuhi standar data center yang ideal untuk memenuhi *availability* layanan TI. Pekerjaan Pengadaan Perangkat Server dan Jaringan untuk Colocation telah dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu membuat sistem sentralisasi data di satu lokasi *data center* dan membuat data center yang dilengkapi *redundant system*, *backup* dan *failover-failback system* yang handal dengan lokasi data center yang sesuai dengan pedoman tata kelola infrastruktur teknologi informasi.

As of Quarter IV 2023, the implementation of the INDI 4.0 Assessment is in the process of planning and coordinating with InJourney Holding.

- **IT Security**

IT Security activities include benchmarking with other agencies, technical guidance related to IT Security, implementation of IT Maturity Assessment, integration of electronic certificates, etc.

Until the fourth quarter of 2023, IT Security improvement activities include technical guidance and IT infrastructure upgrades using the latest technology as well as implementing application pentests in collaboration with application providers.

- **IT Master Plan 2023-2027**

Another IT Governance implementation activity is carrying out the preparation of the 2023-2027 IT Masterplan because the previous ITDC IT Masterplan, namely the 2017-2021 IT Masterplan, needs to be readjusted to the company's goals and targets. As of Quarter IV 2023, work on preparing the IT Masterplan 2023-2027 ITDC has been contracted and is currently in the process of implementing work which is aligned with the RJPP and IT Master Plan Holding InJourney.

B. Infrastructure Development to support the availability of IT services

1. Procurement of Hardware, IT Infrastructure, Network and End User Application Licenses

Currently, the company's data center has met ideal data center standards to fulfill the availability of IT services. Work on Procurement of Server and Network Equipment for Colocation was carried out in 2019, namely creating a data centralization system in one data center location and creating a data center equipped with a reliable redundant system, backup and failover failback system with a data center location that complies with infrastructure management guidelines information technology.

Pada tahun 2023, pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Lisensi dan Upgrade Infrastruktur TI dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan memastikan layanan TI tersedia selama 24 jam x 7 hari terutama layanan aplikasi perusahaan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, terdapat pekerjaan Pengadaan Lisensi dan Upgrade Infrastruktur TI yang sudah selesai dilaksanakan dengan progress 100%.

2. Pengembangan Infrastruktur TI Data Center The Nusa Dua (CCTV & Implementasi AI) dan The Mandalika

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan keamanan unit bisnis ITDC menggunakan teknologi terkini, terdapat rencana pekerjaan Pengembangan Infrastruktur TI Data Center The Nusa Dua (CCTV & Implementasi AI) dan The Mandalika.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, pekerjaan Pengembangan Infrastruktur TI Data Center The Nusa Dua (CCTV & Implementasi AI) dan The Mandalika sedang dalam proses perencanaan pekerjaan dan akan berlanjut dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi yang Mendukung Proses Bisnis Perusahaan dan Holding

1. Pengembangan Sistem Informasi

• Pengembangan Aplikasi e-Office dan Digital Signature

Menindaklanjuti perkembangan bisnis perusahaan, terdapat penyesuaian dan peningkatan kebutuhan terkait dengan aplikasi e-Office. Pengembangan aplikasi e-Office meliputi penyesuaian terhadap proses surat-menyurat internal/eksternal perusahaan yang aman, cepat dan terstruktur serta implementasi tanda tangan digital sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, terdapat pekerjaan Implementasi QR Code untuk surat keluar dan surat generic, penyesuaian aplikasi terkait perubahan

In 2023, the work carried out is License Procurement and Upgrade IT Infrastructure to ensure security and ensuring IT services are available 24 hours x 7 days, especially company application services.

As of Quarter IV 2023, work on License Procurement and IT Infrastructure Upgrades has been completed with 100% progress.

2. Development of The Nusa Dua Data Center IT Infrastructure (CCTV & AI Implementation) and The Mandalika

In order to improve the quality of service and security of the ITDC business unit using the latest technology, there is a work plan for The Nusa Dua Data Center IT Infrastructure Development (CCTV & AI Implementation) and The Mandalika.

As of Quarter IV 2023, work on the IT Infrastructure Development of The Nusa Dua Data Center (CCTV & AI Implementation) and The Mandalika is in the process of planning work and will continue to be implemented in 2024.

C. Application and Information System Development that Supports Company and Holding Business Processes

1. Information System Development

• Development of e-Office and Digital Signature Applications

Following up on company business developments, there are adjustments and increasing needs related to e-Office applications. Development of e-Office applications includes adjustments to the company's secure, fast and structured internal/external correspondence processes as well as the implementation of digital signatures in accordance with current technological developments.

Until the fourth quarter of 2023, the work on implementing QR Codes for outgoing letters and generic letters, adjusting applications related to changes in the



struktur organisasi perusahaan dan penambahan fitur penunjang lainnya di mana pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan dengan progress 100%.

- **Pengembangan Aplikasi IT Inventory Kawasan Pabean**

Sesuai dengan arahan dari Bea Cukai Mataram, bahwa ITDC diwajibkan menerapkan system IT Inventory di Kawasan Pabean terkait dengan kegiatan usaha di KEK Mandalika.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, pelaksanaan pengembangan aplikasi IT Inventory kawasan Pabean masih dalam proses perencanaan pekerjaan. Sebelumnya sudah dilaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan usaha di KEK Mandalika termasuk pengembangan IT Inventory. Selanjutnya akan dilaksanakan koordinasi lanjutan bersama dengan instansi terkait antara lain: dengan LNSW, Bea Cukai, DJP, dan Sekdenas KEK.

- **Kustomisasi Aplikasi**

Kustomisasi aplikasi menyesuaikan dengan kebutuhan *Business Process Owner (BPO)*. Pada Triwulan IV Tahun 2023, terdapat pekerjaan Pengembangan Aplikasi ERP dan Konsolidasi ITDC Group yang dibagi menjadi 2 pekerjaan yaitu Penyusunan Blueprint Aplikasi ERP dan Penyusunan Tata Kelola Keuangan ITDC Group.

Sesuai pembahasan bersama InJourney, terdapat rencana penggunaan ERP dalam satu platform bersama dengan InJourney member holding lainnya melalui skema *Shared Service Operation (SSO)* InJourney. Pengembangan Aplikasi ERP yang berlangsung saat ini adalah merupakan *Quickwin* pengembangan sebelum terintegrasi dengan aplikasi InJourney dan member holding.

company's organizational structure, and adding other supporting features had been 100% completed.

- **Development of an IT Inventory Application in the Customs Area**

In accordance with the direction from Mataram Customs and Excise, ITDC is required to implement an IT Inventory system in the Customs Area related to business activities in the Mandalika KEK.

As of Quarter IV 2023, the implementation of the IT Inventory application development for the Customs area is still in the work planning process. Previously, socialization had been carried out regarding the implementation of business activities in the Mandalika KEK, including the development of IT Inventory. Furthermore, coordination will be carried out together with related agencies, including: LNSW, Customs, DJP, and the KEK National Secretary.

- **Application Customization**

Application customization adjusts to the needs of the Business Process Owner (BPO). In Quarter IV 2023, there was work on ERP Application Development and ITDC Group Consolidation which is divided into 2 jobs, namely Preparing an ERP Application Blueprint and Preparing ITDC Group Financial Governance.

According to discussions with InJourney, there were plans to use ERP on one platform together with other InJourney holding members through the InJourney Shared Service Operation (SSO) scheme. The ERP application development currently underway is Quickwin development before being integrated with the InJourney and member holding applications

2. Pengembangan Aplikasi InJourney dan Member Holding

Menindaklanjuti perkembangan bisnis perusahaan, terdapat penyesuaian dan peningkatan kebutuhan terkait dengan aplikasi ERP. Ruang lingkup pekerjaan antara lain:

- **Implementasi SSO dan Pengembangan ERP InJourney dan Member Holding (Finance, HC, Procurement)**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, Implementasi SSO dan Pengembangan ERP InJourney dan Member Holding (Finance, HC, Procurement) masih dalam tahap perencanaan bersama InJourney dan member holding lainnya.

- **Pengembangan Executive Dashboard, Data Warehouse, API dan CR Aplikasi**

Sesuai dengan arahan direksi, perusahaan diharapkan memiliki aplikasi Executive Dashboard agar dapat melakukan pemantauan terkait rasio-rasio perusahaan secara *realtime*. Terdapat rencana penggabungan system dashboard monitoring bersama dengan InJourney dan member holding lainnya.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, pekerjaan Pengembangan Executive Dashboard sedang dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Ruang lingkup pengembangan dashboard direncanakan meliputi informasi okupansi tenant di Kawasan The Nusa Dua dan The Mandalika yang saat ini dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

- **Pengembangan Integrated HCIS**

Performance Management System, Team Based Project Grup InJourney, Integrasi Digital Employee Portal, ITMS (Rinjani), Strategic Workforce Planning, Exit Management, API Alligment ke cucu perusahaan, Integrasi data Dashboard (Advance), Employee Communication, Employee Loyalty Program, Culture

2. InJourney and Member Holding Application Development

Following up on the company's business development, there are adjustments and increasing needs related to ERP applications. The scope of work includes:

- **Implementation of SSO and ERP Development for InJourney and Member Holding (Finance, HC, Procurement)**

As of Quarter IV 2023, SSO Implementation and ERP Development for InJourney and Member Holding (Finance, HC, Procurement) is still in the planning stage with InJourney and other holding members.

- **Development of the Executive Dashboard, Data Warehouse, API and CR Application.**

In accordance with the directors' direction, the company is expected to have an Executive Dashboard application to monitor the company's ratios in real time. There are plans to merge the monitoring dashboard system together with InJourney and other holding members.

As of Quarter IV 2023, the Executive Dashboard Development work is in progress. The scope of dashboard development is planned to include information on tenant occupancy in The Nusa Dua and The Mandalika areas which are currently in the process of implementing work.

- **Development of Integrated HCIS**

Performance Management System, InJourney Group Team Based Project, Digital Employee Portal Integration, ITMS (Rinjani), Strategic Workforce Planning, Exit Management, API Alligment to subsidiary companies, Dashboard data integration (Advance), Employee Communication, Employee Loyalty



Evaluation, Working Space Arrangement, Employee Survey management, Integrasi HRIS dengan ERP.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, Pengembangan Integrated HCIS masih dalam tahap perencanaan bersama InJourney dan member holding lainnya.

- **Implementasi Asset Management**
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, Implementasi Asset Management masih dalam tahap perencanaan bersama InJourney dan member holding lainnya.
- **Implementasi Knowledge & Learning Management**
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, Implementasi Knowledge & Learning Management masih dalam tahap perencanaan.
- **Implementasi Corporate Social Responsibility Management System (TJSL)**
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, Implementasi Corporate Social Responsibility Management System (TJSL) masih dalam tahap perencanaan.

Program kerja yang telah dilaksanakan oleh Technology Department sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
Dalam hal ini Technology Department melakukan penyusunan implementasi rencana strategis (RKAP Technology Department), kebijakan dan prosedur serta menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk program Investasi.
2. Pengembangan
Technology Department melaksanakan pengembangan dan pembangunan sistem aplikasi dan infrastruktur TI, pengelolaan project, manajemen perubahan, aset TI serta pencatatan konfigurasi TI.

Program, Culture Evaluation, Working Space Arrangement, Employee Survey management, HRIS integration with ERP.

As of Quarter IV 2023, the development of Integrated HCIS is still in the planning stage with InJourney and other holding members.

- **Implementation of Asset Management**
As of Quarter IV 2023, Implementation of Asset Management is still in the planning stage with InJourney and other holding members.
- **Implementation of Knowledge & Learning Management**
As of Quarter IV 2023, Implementation of Knowledge & Learning Management is still in the planning stage.
- **Implementation of the Corporate Social Responsibility Management System (TJSL)**
As of Quarter IV 2023, Implementation of the Corporate Social Responsibility Management System (TJSL) is still in the planning stage.

The work program that has been implemented by the Technology Department up to the fourth quarter of 2023 is as follows:

1. Planning
In this case the Technology Department carries out implementation of strategic plans (RKAP Technology Department), policies and procedures and prepares the documents needed for the Investment program.
2. Development
Technology Department carries out development and construction of application systems and IT infrastructure, project management, change management, IT assets and recording IT configurations.

3. Operasional

Technology Department melaksanakan pelayanan pengguna, operasional dan pemeliharaan aplikasi dan infrastruktur TI. Tugas- tugas tersebut terdiri dari:

- *IT Administrator*
Sebagai *administrator* dan melakukan pengelolaan aplikasi, server dan jaringan.
- *IT Helpdesk/Support*
Melakukan perbaikan dan penanganan keluhan terkait dengan masalah koneksi internet, aplikasi dan perangkat keras seperti printer dan komputer serta memberikan informasi dan pelatihan jika terdapat gangguan ataupun perbaruan pada aplikasi yang digunakan oleh user. Selain itu Technology Department juga melakukan support untuk persiapan kegiatan *Video Conference* dan presentasi berdasarkan permintaan dari user. Technology Department kondisi saat ini telah menyiapkan *IT Helpdesk/Support* untuk 3 (tiga) Kantor ITDC yaitu Kantor Jakarta, Nusa Dua dan Mandalika dan penambahan untuk support TI di MICE Golomori.
- *IT Maintenance*
Pemeliharaan IT meliputi *corrective* dan *preventive maintenance* terhadap aplikasi dan perangkat keras yang menjadi asset perusahaan.

4. Monitoring, Evaluasi Serta Kepatuhan Tata Kelola TI

Technology Department Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait dengan semua proyek dan operasional TI dan dilaporkan setiap bulannya serta pelaksanaan audit TI yang efektif dan menyeluruh yang bekerjasama dengan bagian auditor internal perusahaan ataupun dengan auditor eksternal

3. Operational

Technology Department carries out user services, operations and maintenance of IT applications and infrastructure. These duties consist of:

- IT Administrator
As an administrator and managing applications, servers and networks.
- IT Helpdesk/Support
Repairs and handles complaints related to internet connection problems, applications and hardware such as printers and computers as well as providing information and training for problems or updates to the applications used by users. Apart from that, the Technology Department also provides support for preparations Video Conference and presentation activities based on requests from users. The Technology Department currently has prepared IT Helpdesk/Support for 3 (three) ITDC offices, namely Jakarta, Nusa Dua, and Mandalika offices and additional IT support at MICE Golomori.
- IT Maintenance
IT maintenance includes corrective and preventive maintenance of applications and hardware as company assets.

4. Monitoring, Evaluation and Compliance with IT Governance

Technology Department monitoring and supervising all IT projects and operations and reporting every month as well as carrying out effective and comprehensive IT audits in collaboration with the company's internal auditors or independent external auditors. The Technology Department also ensures



independen. Technology Department juga memastikan kepatuhan terhadap Tata Kelola TI yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023.

Technology Department melaksanakan evaluasi terhadap Survey Layanan TI di periode sebelumnya. Parameter yang disurvei adalah kecepatan dan ketepatan dalam melayani keluhan, kesopanan dan keramahan dalam melayani keluhan, memiliki pemahaman dan memberikan informasi yang memadai terkait layanan/masalah/solusi TI, ketersediaan layanan TI, metode komunikasi yang efektif, media/cara dalam memberikan sosialisasi layanan TI, menampung harapan pengguna layanan TI dan saran untuk perbaikan layanan TI. Untuk Survei Layanan TI tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan skor 4,58 dari skala 5.

compliance with good IT Governance in accordance with BUMN Ministerial Regulation PER-2/MBU/03/2023.

The Technology Department carried out an evaluation of the IT Service Survey in the previous period. The parameters surveyed were speed and accuracy in serving complaints, politeness and friendliness in serving complaints, having an understanding and providing adequate information regarding IT services/problems/solutions, availability of IT services, effective communication methods, media/ways in providing IT service outreach, accommodate the expectations of IT service users and suggestions for improving IT services. The 2023 IT Services Survey has been carried out with a score of 4.58 on a scale of 5.

Pengembangan Kompetensi SDM TI

ITDC berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi SDM di bidang TI agar dapat meningkatkan daya saing Perusahaan dengan memahami integrasi proses bisnis sesuai dengan perkembangan teknologi yang dinamis. Untuk menjawab hal tersebut, Perusahaan senantiasa mempersiapkan SDM yang andal dengan mengikutsertakan personel TI dalam kegiatan pelatihan-pelatihan secara internal maupun eksternal yang diharapkan mampu menunjang operasional bisnis Perusahaan ke depan.

Development of IT Human Resource Competencies

ITDC strives to continually improve the competencies of IT personnel to enhance the Company's competitiveness by understanding the integration of business processes according to dynamic technological developments. To address this, the Company consistently prepares reliable human resources by involving IT personnel in internal and external training activities expected to support the Company's business operations in the future.

No.	Program Pelatihan Training Program	Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer
1.	Qualified Risk Management Officer (QRMO)	Sertifikasi Certification	Lembaga Sertifikasi Profesi - MKS Professional Certification Institute - MKS
2.	Trend dan Pencegahan Gratifikasi serta Pelaporan <i>Whistleblowing System</i> di Lingkungan BUMN Trends and Prevention of Gratification and Whistleblowing System Reporting in the SOEs Environment	Seminar	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia
3.	Kemudahan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Ease of Facilities in the Mandalika Special Economic Zone	Seminar	Sekretariat Dewan Nasional KEK SEZ National Council Secretariat

Investasi Teknologi Informasi

Upaya Perusahaan dalam mewujudkan tujuan penerapan TI yang optimal turut dilakukan dengan melakukan investasi di bidang teknologi informasi secara berkesinambungan. Investasi pada bidang TI dilakukan dengan mengacu pada Masterplan TI 2022-2026. Informasi mengenai investasi TI yang dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Information Technology Investment

The Company's efforts to achieve optimal IT implementation goals also include continuous investment in information technology. Investments in the field of IT are made in accordance with the IT Masterplan 2022-2026. Information regarding the IT investments made by the Company throughout the year 2023 can be seen as follows:

No.	Deskripsi Description	Realisasi Realization
1.	Pengadaan Infrastruktur TI IT Infrastructure Procurement	1.065.709.868
2.	Pengembangan Aplikasi Application Development	813.582.713
Jumlah Total		1.879.292.581



Perkara Penting

Significant Cases

Permasalahan Hukum

Perkara hukum adalah permasalahan hukum perdata, pidana khusus, pidana dan tata usaha negara yang dihadapi ITDC selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan dalam periode 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Legal Cases

Legal issues encompass civil, special criminal, criminal, and administrative law matters faced by ITDC during the reporting period and have been submitted through legal processes. The legal issues encountered by the Company in the last 2 (two) years are as follows:

Permasalahan Hukum Legal Cases	2023			2022		
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Tata Usaha Negara State Administration	Perdata Civil	Pidana Criminal	Tata Usaha Negara State Administration
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	3	-	-	6	-	1
Dalam proses penyelesaian In the process of completion	1	-	1	2	-	1
Jumlah Total	4	-	1	8	-	2

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The details of the legal issues faced by the Company in 2023 are as follows:

Pihak yang Berperkara Litigation Party	Pokok Perkara Subject Matter	Status Perkara Case Status	Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominasi Tuntutan/Gugatan Risks Faced by the Company and the Nominal Value of the Claim/Lawsuit	Tindak Lanjut Follow-up
PERDATA A. PARA PIHAK 1. Penggugat : PT Jaya Makmur Bersama 2. Tergugat a. Tergugat: PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) - sekarang bernama ITDC b. Turut Tergugat: Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara	B. Objek Perkara: MOU antara ITDC dengan PT Jaya Makmur Bersama tanggal 19 September 2008 C. Pokok Gugatan: • Penggugat menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi karena mengakhiri sendiri Perjanjian / MOU yang merupakan perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan tergugat. • Tuntutan Tergugat untuk tetap melaksanakan penandatanganan LUDA (Land Utilization and Land Development Agreement), Menyatakan Deposit sebesar Rp. 1,5 Miliar tetap sebagai jaminan D. Pokok Jawaban: 1. Gugatan Penggugat dianggap premature karena obyek Gugatan MOU bukanlah perjanjian sebagai dasar perbuatan wanprestasi. 2. Tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak sehingga LUDA belum bisa ditandatangani. 3. Bahwa jangka waktu MOU telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.	Tingkat Pertama : Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya Tingkat Banding : Menguatkan putusan PN Denpasar Tingkat Kasasi : Menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi Tingkat PK : Menolak permohonan PK ITDC ITDC Kalah Saat ini rencana Pengajuan Upaya Hukum	Membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 10.000.000 per hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak berkekuatan hukum tetap Harga sewa tetap Rp. 58.699.999.999 selama 50 tahun, sedangkan untuk rate sewa sekarang ITDC berpotensi mendapat harga sewa yang lebih besar.	Pengajuan upaya Mediasi
CIVIL A. PARTIES 1. Plaintiff: PT Jaya Makmur Bersama 2. Defendant a. Defendant: PT Bali Tourism Development (Persero) - now ITDC b. Co Defendant: Government of the Republic of Indonesia Cq. Ministry of State-Owned Enterprises	B. Case Object: MOU between ITDC and PT Jaya Makmur Bersama dated September 19, 2008. C. Principal of the lawsuit: • The plaintiff stated that the defendant and co-defendant had committed a breach of contract because they terminated the agreement / MOU which is a binding agreement between the plaintiff and the defendant. • The Defendant's demand to continue signing the LUDA (Land Utilization and Land Development Agreement), stating a deposit of Rp. 1.5 billion remains as collateral D. Main Answers: 1. The Plaintiff's lawsuit is considered premature because the object of the MOU lawsuit is not the agreement as the basis for the breach of contract. 2. An agreement was not reached between the parties so that LUDA could not be signed. 3. That the term of the MOU has ended on December 31, 2008.	First Level: Granting the plaintiff's claim in its entirety Appeal Level: Upholding the decision of the Denpasar District Court Cassation Level: Rejecting the cassation petition Cassation Petitioner PK Level: Rejecting ITDC's PK application ITDC Loses Currently planning to submit legal action	Paying forced money (dwangsom) Rp. 10,000,000 per day of delay in implementing the decision since it becomes legally binding Fixed rental price Rp. 58,699,999,999 for 50 years, while for the current rental rate ITDC has the potential to get a higher rental price.	Proposal for Mediation



Pihak yang Berperkar Litigation Party	Pokok Perkara Subject Matter	Status Perkara Case Status	Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominasi Tuntutan/Gugatan Risks Faced by the Company and the Nominal Value of the Claim/Lawsuit	Tindak Lanjut Follow-up
PERDATA A. PARA PIHAK - Penggugat: Usin - Tergugat - Tergugat : ITDC - Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah	B. Objek Perkara: Tanah seluas 16.934 m2, SHM No. 178 tanggal 23 Mei 2009 an Usin, terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. C. Pokok Gugatan: - Bahwa Penggugat mengklaim menguasai lahan Objek Perkara, namun pada saat dilakukan pemecahan sertifikat, dinyatakan oleh Kantor Pertanahan terjadi indikasi overlapping dengan lahan milik Tergugat. - Tuntutan menyatakan SHM No 178 seluas 16.934 m2 sah milik penggugat dan menyatakan penggugat adalah satu-satunya pemilik pada lahan objek sengketa. D. Pokok Jawaban: - Telah terbit HPL 68 dan Tergugat tetap berpendirian bahwa tanah sertifikat tsb tidak terjadi overlapping dengan SHM 178.	Tingkat Pertama : Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Tingkat Banding : Menguatkan Putusan PN Tingkat Kasasi : Menolak permohonan Kasasi ITDC ITDC Kalah Rencana Pengajuan PK.	Potensi kerugian HPL 68 ITDC berkurang seluas overlapping dengan SHM 178 milik Usin.	Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Putusan PK dimenangkan oleh ITDC)
CIVIL A. PARTIES - Plaintiff: Usin - Defendant - Defendant: ITDC - Co Defendant: Head of the Central Lombok Regency Land Office	B. Case Object: Land covering an area of 16,934 m2, SHM No. 178 dated May 23, 2009, owned by Usin, located in Sukadana Village, Pujut District, Central Lombok Regency. C. Main points of the lawsuit: - The Plaintiff claims to control the land of the Case Object, but when the certificate was split, it was stated by the Land Office that there were indications of overlapping with the Defendant's land. - The lawsuit states that SHM No. 178 covering an area of 16,934 m2 legally belongs to the plaintiff and states that the plaintiff is the sole owner of the land subject to dispute. D. Main Answer: - HPL 68 has been issued and the Defendant remains of the opinion that the land certificate does not overlap with SHM 178.	On Progress First Level: Declaring that the Plaintiff's lawsuit is partially granted. Appeal Level: Upholding the District Court's Decision Cassation Level: Rejecting ITDC's Cassation Request ITDC Loses Plan to Submit PK. On Progress	The potential loss of ITDC's HPL 68 is reduced by overlapping with Usin's SHM 178.	Submission of Judicial Review (PK won by ITDC)

Pihak yang Berperkar Litigation Party	Pokok Perkara Subject Matter	Status Perkara Case Status	Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominasi Tuntutan/Gugatan Risks Faced by the Company and the Nominal Value of the Claim/Lawsuit	Tindak Lanjut Follow-up
PERDATA A. PARA PIHAK 1. Penggugat: ITDC 2. Tergugat a. Tergugat : Tl. PT Bali Nusa Indo Perkasa b. Turut Tergugat I : PT Bank Victoria. tbk c. Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	B. Objek Perkara: Perjanjian Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan / LUDA Lot NW 2-3, HGB Nomor 6580/Benoa. C. Pokok Gugatan: Menyatakan hukum : dibatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) NO. 6580 / Kel. Benoa atas nama Tergugat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Turut Tergugat II) berdasarkan LUDA. Selanjutnya Hak Guna Bangunan (HGB) NO. 6580 / Kel. Benoa atas nama Tergugat yang diterbitkan di atas Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3/ kelurahan Benoa atas nama Penggugat dihapus dalam pencatatannya atau dilepaskan dan dialihkan kembali kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Pengelolaan (HPL); Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Material yaitu Uang Kompensasi Dasar / Kompensasi Minimum / Uang Pemasukan Minimum dan Assement Fee sebesar \$353.507,65 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Dollar Amerika Serikat dan Enam Lima Cent) dan biaya Pengolahan Air Limbah sebesar Rp.515.698.104,00 (Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Rupiah).	Tingkat Pertama : Proses Persidangan (On going) First Level: Trial Process (Ongoing)	Kompensasi Minimum / Uang Pemasukan Minimum dan Assesment Fee sebesar \$353.507,65 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Dollar Amerika Serikat dan Enam Lima Cent) dan biaya Pengolahan Air Limbah sebesar Rp.515.698.104,00 (Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Rupiah) ;	Perdamaian dengan penandatanganan Akta Van Dading
CIVIL A. PARTIES 1. Plaintiff: ITDC 2. Defendant a. Defendant: PT Bali Nusa Indo Perkasa b. Co Defendant I: PT Bank Victoria. tbk c. Co Defendant II: Badung Regency Land Office.	B. Case Object: Land Use and Utilization Agreement/ LUDA Lot NW 2-3, HGB Number 6580/Benoa. C. Principal of the lawsuit: Stating the law: Building Use Rights (HGB) NO. 6580 / Ex. Benoa in the name of the Defendant which has been issued by the Badung Regency Land Office (Co-Defendant II) based on LUDA. Furthermore, Building Use Rights (HGB) NO. 6580 / Ex. Benoa in the name of the Defendant which was issued on Management Rights Certificate Number 3/ Benoa sub-district in the name of the Plaintiff was deleted from the records or released and transferred back to the Plaintiff as the Holder of Management Rights (HPL); Sentencing the Defendant to pay the Plaintiff material losses, namely Basic Compensation Money / Minimum Compensation / Minimum Income Money and Assessment Fee of \$353,507.65 (Three Hundred Fifty Three Thousand Five Hundred Seven United States Dollars and Six Five Cents) and Waste Water Treatment costs of Rp.515,698,104.00 (Five Hundred and Fifteen Million Six Hundred Ninety Eight Thousand One Hundred and Four Rupiah).		Minimum Compensation/ Minimum Income and Assessment Fee of \$353,507.65 (Three Hundred Fifty Three Thousand Five Hundred Seven United States Dollars and Six Five Cents) and Waste Water Treatment costs of Rp. 515,698,104.00 (Five Hundred and Fifteen Million Six Hundred Ninety Eight Thousand One Hundred Four Rupiah);	Peace with the signing of the van Dading Deed



Pihak yang Berperkara Litigation Party	Pokok Perkara Subject Matter	Status Perkara Case Status	Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominasi Tuntutan/Gugatan Risks Faced by the Company and the Nominal Value of the Claim/Lawsuit	Tindak Lanjut Follow-up
TATA USAHA NEGARA A. PARA PIHAK 1. Penggugat: ITDC 2. Tergugat: Kepala Kanwil BPN NTB	B. Objek Perkara: SK BPN No. 959/KEP-52/IX/2015 tentang Pembatalan HPL 8 dan 9 Kuta atas nama ITDC C. Pokok Gugatan: Penggugat menyatakan bahwa SK BPN terkait Pembatalan HPL 8 dan 9 Kuta tidak sah. Tuntutan agar mencabut SK BPN tentang Pembatalan HPL 8 dan 9 tersebut. D. Pokok Jawaban: Menyatakan bahwa tergugat melaksanakan pembatalan Objek sengketa dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. serta didasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat 3 PP 24 tahun 1997 & Pasal 125 Permen Agraria/BPN No.3 tahun 1997.	Tingkat Pertama : Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima Tingkat Banding : Menguatkan Putusan PTUN Mataram Tingkat Kasasi : Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon kasasi ITDC. Saat ini sedang mempersiapkan rencana Pengajuan Upaya Hukum On Progress	Potensi kerugian HPL 8 dan 9 ITDC dibatalkan dan berkurang seluas 30.240 m2	Persiapan Pengajuan Upaya Hukum On Progress
STATE ADMINISTRATION A. PARTIES 1. Plaintiff: ITDC 2. Defendant: Head of NTB BPN Regional Office	B. Case Object: BPN Decree No. 959/KEP-52/IX/2015 concerning Cancellation of HPL 8 and 9 Kuta in the name of ITDC C. Principal of the Claim: The Plaintiff states that the BPN Decree regarding the Cancellation of HPL 8 and 9 Kuta is invalid. Demand to revoke the BPN Decree regarding the Cancellation of HPL 8 and 9. D. Main Answer: States that the defendant carried out the cancellation of the object of dispute in order to implement a court decision which has permanent legal force. and is based on the provisions of Article 55 paragraph 3 PP 24 of 1997 & Article 125 of the Minister of Agrarian Affairs/BPN No.3 of 1997.	First Level: Declaring the plaintiff's claim unacceptable. Appeal Level: Upholding the Mataram PTUN Decision. Cassation Level: Rejecting the cassation request from the ITDC cassation applicant. Currently preparing a plan to Submit Legal Action On Progress	Potential losses from HPL 8 and 9 ITDC were canceled and reduced by 30,240 m2	Preparation for Submitting Legal Action

Pihak yang Berperkar Litigation Party	Pokok Perkara Subject Matter	Status Perkara Case Status	Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominasi Tuntutan/Gugatan Risks Faced by the Company and the Nominal Value of the Claim/Lawsuit	Tindak Lanjut Follow-up
PERDATA A. PARA PIHAK 1. Para Penggugat: Saye alias Amaq Maye 2. Tergugat a. Tergugat : Tl. Ka Kantor Pertanahan Kab Lombok Tengah, T2. Tergugat Intervensi : ITDC	B. Objek Perkara: Tanah seluas 7.889 m2 C. Pokok Gugatan: Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 7.889 m2 (hasil pengukuran seluas 9.705 m2)terletak di Dusun Songong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kab Lombok Tengah yang dinyatakan tidak pernah dipindahtangankan kepada pihak manapun.	Tingkat Pertama: Gugatan Penggugat Tidak Diterima ITDC Menang Tingkat Banding : Menguatkan putusan PTUN Mataram Tingkat Kasasi: Penggugat mengajukan Kasasi	tidak ada kerugian materiil	Proses Kasasi
CIVIL A. PARTIES 1. Plaintiffs: Saye alias Amaq Maye 2. Defendant a. Defendant: Head of Central Lombok District Land Office, T2. Intervening Defendant: ITDC	B. Object of the Case: Land covering an area of 7,889 m2 C. Principal of the Lawsuit: The Plaintiff argues that the Plaintiff owns land covering an area of 7,889 m2 (measured as an area of 9,705 m2) located in Songong Hamlet, Mertak Village, Pujut District, Central Lombok Regency which is stated to have never been transferred to any party.	First Level: Plaintiff's Claim Not Accepted ITDC Wins Appeal Level: Strengthens the decision of the Mataram PTUN Cassation Level: The plaintiff files a cassation	No material losses	Cassation Process

Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Non Litigasi) / Arbitrase

Settlement of Cases Outside of Court (Non Litigation) / Arbitration

Pihak yang Berperkar Litigation Party	Pokok Perkara Subject Matter	Status Perkara Case Status	Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominasi Tuntutan/Gugatan Risks Faced by the Company and the Nominal Value of the Claim/Lawsuit	Tindak Lanjut Follow-up
Arbitrase SIAC Claimant : PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika (PT PRIA) Respondent : ITDC	LUDA antara ITDC dengan PT PRIA tanggal 26 April 2026 Tuntutan PT PRIA menyampaikan bahwa lahan belum clean and clear, menuntut kerugian meliputi biaya Pengembangan, pembangunan dan operasi serta bunga dan ganti rugi estimasi USD 2jt	Proses Arbitrase di Singapore International Arbitration Center (SIAC)	Estimasi kerugian ITDC : US \$ 4,1 juta	Proses Arbitrase, rencana mediasi
SIAC Arbitration Claimant : PT Indonesian American Resort Company (PT PRIA) Respondent : ITDC	LUDA between ITDC and PT PRIA dated April 26, 2026. PT PRIA's claim stating the land is not yet clean and clear, demanding losses including development, construction and operation costs as well as interest and compensation estimated at USD 2 million	Arbitration Process at the Singapore International Arbitration Center (SIAC)	Losses estimation ITDC : US\$4,1 million	Arbitration Process, mediation plan



Pihak yang Berperkara Litigation Party	Pokok Perkara Subject Matter	Status Perkara Case Status	Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominasi Tuntutan/Gugatan Risks Faced by the Company and the Nominal Value of the Claim/Lawsuit	Tindak Lanjut Follow-up
Arbitrase SIAC Claimant : PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PT PAIA) Respondent : ITDC	LUDA antara ITDC dengan PT PAIA tanggal 26 April 2026 Tuntutan PAIA bahwa ITDC tidak menjalankan kewajiban untuk menyediakan kondisi investasi yang baik, pengurangan luas lahan, kerugian PAIA meliputi pembangunan, pengembangan dan operasi beserta bunga dan ganti rugi.	Proses Arbitrase di Siangapore International Arbitration Center (SIAC)	PT PAIA masih memiliki hutang kepada ITDC, sehingga PT PAIA harus membayar hutang tersebut sebesar Rp 6-7 M	Proses Arbitrase
SIAC Arbitration Claimant : PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PT PAIA) Respondent : ITDC	LUDA between ITDC and PT PAIA dated April 26 2026 PAIA's claim that ITDC does not carry out its obligations to provide good investment conditions, reduction in land area, PAIA's losses include construction, development and operations along with interest and compensation.	Arbitration Process at the Singapore International Arbitration Center (SIAC)	PT PAIA still has a debt to ITDC. PT PAIA must pay the debt amounting to Rp6-7 billion	Arbitration Process

Dampak Permasalahan Hukum terhadap Perusahaan

Seluruh perkara hukum yang dihadapi oleh Perusahaan di tahun 2023 tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan proses mitigasi yang tepat.

Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2023, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Di tahun 2023, tidak ada Anak Perusahaan ITDC, baik ITDC Nusantara Utilitas maupun ITDC Nusantara Properti yang memiliki permasalahan hukum perdata maupun pidana.

Impact of Legal Issues on the Company

All legal cases faced by the Company in 2023 did not have a significant impact on the Company due to the implementation of appropriate mitigation processes.

Disclosure of Legal Issues Faced by the Serving Board of Commissioners and Directors

Throughout 2023, no members of the Company's Board of Commissioners and Directors have legal issues, whether civil or criminal.

Disclosure of Legal Issues Faced by Subsidiaries

In 2023, neither of ITDC's subsidiaries, ITDC Nusantara Utilitas nor ITDC Nusantara Properti, faced civil or criminal legal issues.

Pengungkapan Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan sebagai organisasi, entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas terkait.

Perkara Penting di Luar Aspek Hukum

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan sebagai organisasi, entitas anak, Dewan Komisaris maupun Direksi.

Disclosure of Administrative Sanctions by Relevant Authorities

During 2023, there were no material administrative sanctions affecting the Company's business continuity. Additionally, no administrative sanctions were imposed on the Company as an organization, subsidiary entities, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners by the relevant authorities.

Significant Matters Beyond Legal Aspects

Until the end of 2023, the Company did not encounter any significant matters beyond legal aspects involving the Company as an organization, subsidiary entities, the Board of Commissioners, or the Board of Directors.



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dengan terus melakukan peningkatan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan ITDC. Selain melalui media cetak nasional, penyebaran informasi juga dilakukan melalui:

1. Situs resmi Perusahaan: www.itdc.co.id.
2. Media sosial: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube
3. Newsletter internal
4. Televisi/Radio
5. Mengikuti event pariwisata dan forum investasi nasional dan internasional
6. Forum-forum pengajian
7. Media komunikasi internal seperti intranet, TV
8. Town Hall Meeting
9. Portal BUMN
10. Kerja sama dengan Humas Kementerian BUMN untuk pemuatan berita ITDC di media sosial Kementerian
11. Kerja sama dengan Forum Humas BUMN untuk pemuatan berita ITDC di media sosial FH

Korespondensi dan Laporan Berkala

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:

1. Laporan Triwulan.
2. Penjelasan dan klarifikasi atas pemberitaan di media massa.
3. Keterbukaan informasi terkait *corporate action*.
4. Laporan Tahunan.

Adapun korespondensi yang dilakukan Perusahaan dengan pemegang saham sepanjang tahun 2023

The Company continuously facilitates stakeholders' access to information by consistently enhancing the principles of information transparency internally and externally, aiming to assist, maintain, and improve stakeholders' knowledge, understanding, and positive perception of ITDC's policies and activities. In addition to national print media, information dissemination is also conducted through:

1. Official Company website: www.itdc.co.id.
2. Social media platforms: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube
3. Internal newsletters
4. Television/Radio
5. Participation in national and international tourism events and investment forums
6. Religious forums
7. Internal communication media such as intranet, TV
8. Town Hall Meetings
9. State-Owned Enterprises (SOE) Portal
10. Collaboration with the Ministry of SOE Public Relations for featuring ITDC news on the Ministry's social media
11. Collaboration with the SOE Public Relations Forum for featuring ITDC news on the forum's social media

Correspondence and Periodic Reports

Financial and non-financial information from the Company has been compiled and reported transparently to shareholders, stakeholders, and other required institutions. Information is reported according to target timelines, presented completely and accurately, up-to-date, intact, and adequate as per the provisions regarding Company Financial Condition Transparency. Information is disclosed through reports such as:

1. Quarterly Reports.
2. Explanations and clarifications regarding media coverage.
3. Disclosure of information related to corporate actions.
4. Annual Reports.

The correspondence conducted by the Company with shareholders throughout 2023 consisted of

yaitu terdiri dari 1.396 kali Korespondensi dengan Kementerian BUMN, dan 975 kali Korespondensi dengan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero).

Situs Web Perusahaan

ITDC telah menyediakan situs web yang dapat diakses oleh publik sebagai sarana penyebarluasan informasi yang komprehensif bagi pemangku kepentingan pada alamat www.itdc.co.id. Informasi yang disampaikan melalui situs web tersebut, antara lain:

1. Korporasi
 - a. Tentang Kami
 - b. Visi & Misi
 - c. Nilai Perusahaan
 - d. Direktur & Manajemen
 - e. Laporan-laporan
 - f. Karir
 - g. MUTIP
 - h. Pengumuman Pengadaan
 - i. Struktur Organisasi
 - j. Pesan Direktur Utama
2. Media
 - a. Bulletin
 - b. Galeri
 - c. Siaran Pers
 - d. Keterbukaan Informasi Publik
3. Bidang Usaha
 - a. Pemilik Destinasi
 - b. Investor Aset Produktif
 - c. Pengembang dan Penyedia Utilitas
 - d. Pengelola Destinasi
 - e. Peluang Investasi
4. Keberlanjutan
 - a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 - b. Tata Kelola Perusahaan
 - c. Sistem Pelaporan Pelanggaran
5. Acara
6. Promosi
7. Hubungi Kami

Untuk memungkinkan adanya interaksi antara Perusahaan dan publik maka disediakan alamat info@itdc.co.id.

Media Internal

Selain bagi publik, ITDC juga membangun komunikasi dengan Insan Perusahaan melalui pengembangan media komunikasi internal yang digunakan sebagai sarana penyebaran data dan informasi Perusahaan, antara lain yaitu email, TV Wall, *newsletter* dan fasilitas *video conference*.

1,396 correspondences with the Ministry of SOEs, and 975 correspondences with PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero).

Company Website

ITDC has provided a publicly accessible website as a comprehensive information dissemination platform for stakeholders at www.itdc.co.id. Information conveyed through the website includes:

1. Corporate
 - a. About Us
 - b. Vision & Mission
 - c. Company Values
 - d. Board of Directors & Management
 - e. Reports
 - f. Careers
 - g. MUTIP
 - h. Procurement Announcements
 - i. Organizational Structure
 - j. President Director's Message
2. Media
 - a. Bulletin
 - b. Gallery
 - c. Press Releases
 - d. Public Information Disclosure
3. Business Fields
 - a. Destination Owners
 - b. Productive Asset Investors
 - c. Developers and Utility Providers
 - d. Destination Managers
 - e. Investment Opportunities
4. Sustainability
 - a. Corporate Social Responsibility
 - b. Corporate Governance
 - c. Violation Reporting System
5. Events
6. Promotions
7. Contact Us

To facilitate interaction between the Company and the public, the email address info@itdc.co.id is provided.

Internal Media

In addition to the public, ITDC also communicates with its employees through the development of internal communication media used as a means of disseminating Company data and information, including email, TV walls, newsletters, and video conference facilities. These media provide a platform



Media ini memberikan wadah bagi karyawan untuk mengetahui kondisi terkini dari Perusahaan, sekaligus menjadi media sosialisasi atas kebijakan yang diambil top management yang harus diketahui oleh karyawan Perusahaan.

Saluran Komunikasi Internal

Selain menggunakan media komunikasi untuk menyebarkan informasi mengenai Perusahaan, dikembangkan juga berbagai forum tatap muka untuk memfasilitasi komunikasi antara Direksi, manajemen dan pegawai.

Hubungan Media

Perusahaan melakukan hubungan media melalui Rilis Media (*Press Release*) maupun aktivitas hubungan dengan sejumlah media baik nasional maupun lokal, untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif. Berikut disampaikan informasi terkait hubungan media yang dilakukan oleh Perusahaan di sepanjang tahun 2023.

for employees to stay updated on the Company's current conditions and also serve as a medium for socializing policies adopted by top management that need to be known by Company employees.

Internal Communications Channel

In addition to using communication media to disseminate information about the Company, various face-to-face forums have been developed to facilitate communication between the Board of Directors, management, and employees.

Media Relations

The Company engages in media relations through Press Releases and activities involving various national and local media outlets to comprehensively convey information. The following information is provided regarding the media relations activities conducted by the Company throughout 2023.

Tanggal Rilis Release Date	Rilis Release
22-Jan-23	Pemulihan Pariwisata, Occupancy Rate The Nusa Dua Tahun 2022 Tumbuh 197 Persen Tourism Recovery, The Nusa Dua Occupancy rate in 2022 Grew 197 Percent
25-Jan-23	Pemasangan Utility Duct di Kawasan The Mandalika Utility Duct Installation at the Mandalika region
27-Jan-23	ITDC Latih Masyarakat Mengolah dan Mengemas Produk Hasil Kebun ITDC Trains the Community to Process, Pack Agriculture Product
28-Jan-23	Siapkan KTT Asean 2023, Sejumlah Menteri Tinjau Kawasan MICE di Golo Mori, NTT Preparing ASEAN Summit 2023, Ministers Review MICE Area at Golo Mori, NTT
03-Feb-23	ITDC Serahkan Bantuan CSR Untuk Tiga Desa Penyangga di Kelurahan Benoa ITDC Disburses CSR for 3 Supporting Villages in Benoa
04-Feb-23	ITDC Promosikan Destinasi Pariwisata Pada Asean Tourism Forum (ATF) 2023 ITDC Promotes Tourist Destination at 2023 ASEAN Tourism Forum
08-Feb-23	Pemasangan Box Culvert di Kawasan The Mandalika Installation of Box Culvert at the Mandalik
09-Feb-23	ITDC Dukung Peringatan Hari Pers Nasional di Labuan Bajo Manggarai Barat ITDC Supports National Press Day in Labuan Bajo, West Manggarai
10-Feb-23	MGPA dan APLOG Kerjasama Angkut Logistik Pembalap Jelang WSBK 2023 MGPA, APLOG Collaborate for Logistic ahead of 2023 WSBK
15-Feb-23	The Mandalika Jadi Lokasi Gelaran Malam Puncak Bau Nyale 2023 The Mandalika Hosts the 2023 Bau Nyale Celebration
14-Feb-23	Dukung Penyelesaian Klaim Lahan, Kementerian Bumn dan ITDC Serahkan Data Lahan Kepada Gubernur NTB ITDC tegaskan lahan yang masuk HPL ITDC berstatus clear and clean Supporting Land Dispute, SOEs Ministry and ITDC Hands Over Land Data to NTB Governor
14-Feb-23	Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat, ITDC Tandatangani Kesepakatan Bersama Dengan Pemkab Lombok Tengah Increasing Community Empowerment, ITDC Signs MoU with Central Lombok Government
15-Feb-23	Masjid Al-Hakim The Mandalika: Progres Pembangunan Fisik Capai 88,87% The Mandalika Al-Hakim Mosque Reaches 88,87% Completion
16-Feb-23	ITDC Ajak Investor Bangun Kawasan Pariwisata The Mandalika ITDC Invites Investors to Develop the Mandalika
19-Feb-23	Satu Bulan Pertama 2023, Tingkat Okupansi Kawasan The Nusa Dua Capai 64,61% First Month of 2023, The Nusa Occupancy Rate Grew 64,61%

Tanggal Rilis Release Date	Rilis Release
21-Feb-23	Dua Event Musik Bergengsi Siap Digelar di Pulau Peninsula The Nusa Dua Bali Peninsula The Nusa Dua to Host 2 Music Events
23-Feb-23	ITDC-MGPA Bersama Tujuh Sponsor Siap Sukseskan World Superbike Indonesian Round 2023 ITDC-MGPA, Seven Sponsors, to Succeed 2023 WSBK
28-Feb-23	Progres Pembangunan Ground Water Tank di The Mandalika Progress of Ground Water Tank Development at the Mandalika
02-Mar-23	Dukung Penyelenggaraan WSBK 2023, ITDC dan Bank Mandiri Tandatangani Perjanjian Kerjasama Naming Right Bale Mandiri Support 2023 WSBK, ITDC and Bank Mandiri Sign MoU on Bale Mandiri Naming Right
03-Mar-23	WSBK 2023, Penonton Disuguhi Sajian Menarik di Lombok Sumbawa Fair 2023 WSBK, Lombok Sumbawa Fair Presents Entertainment for Spectators
04-Mar-23	WSBK 2023, Lombok Sumbawa Fair Resmi Dibuka 2023 WSBK, Lombok Sumbawa Fair Officially Opened
05-Mar-23	Road To Thank God It's Festival (TGIF) by UNIVLOX Sukses Digelar Road to Thank God It's Festival (TGIF) by UNIVLOX Successfully Held
05-Mar-23	WSBK Indonesian Round 2023 Selesai Digelar 2023 WSBK Indonesian Round Successfully Held
10-Mar-23	Dorong Kunjungan Wisatawan, ITDC Hadirkan Kecak and Barong Dance Show di The Nusa Dua Boost Tourist Visits, ITDC Presents Kecak and Barong Dance Show at the Nusa Dua
13-Mar-23	ITDC Gelar Road to Ramadhan Kareem The Mandalika 2023 ITDC Holds Road to Ramadhan Kareem the Mandalika 2023
14-Mar-23	Sambut KTT Asean 2023, ITDC Terima Kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Golo Mori Ahead of 2023 ASEAN Summit, ITDC Welcomes President Joko Widodo at Golo Mori
15-Mar-23	Sambut Hari Raya Nyepi 2023 Tahun Baru Saka 1945, The Nusa Dua Siapkan Sejumlah Promo Menarik Ahead of 2023 Silence Day, The Nusa Dua Offers Some Promos
16-Mar-23	Joyland Festival Bali Hadir di Pulau Peninsula, The Nusa Dua Joyland Festival Arrives in Peninsula Island, The Nusa Dua
17-Mar-23	Tabligh Akbar & Festival Seni Islami Buka Road To Ramadhan Kareem The Mandalika 2023 Islamic Fest Opens Road to Ramadhan Kareem at The Mandalika
21-Mar-23	Masuki Low Season, Tingkat Okupansi Kawasan The Nusa Dua Februari 2023 Tetap Dekati 60% Occupancy at The Nusa Dua Reaches 60% during Low Season
29-Mar-23	ITDC-MGPA Tawarkan Fasilitas Deluxe Class Pertamina Mandalika International Circuit untuk Gelar Pertemuan ITDC MGPA Offers Deluxe Class Pertamina Mandalika Circuit for Meetings
31-Mar-23	ITDC Salurkan Bantuan Untuk Program Pencegahan Stunting di Desa Mertak ITDC Disburses Assistance for Stunting Prevention at Mertak Village
05-Apr-23	The Nusa Dua Siapkan Sejumlah Promo Menarik Selama Bulan Ramadan dan Libur Paskah The Nusa Dua Offers Promos during Ramadan, Easter Holiday
06-Apr-23	Masjid Nurul Bilad The Mandalika Selenggarakan Tausiyah Selama Bulan Ramadan The Mandalika's Nurul Bilad Mosque Holds Tausiyah during Ramadan
09-Apr-23	Puluhan Mobil Supercar Ikuti Track Day, Pembalap Kagumi Sirkuit Mandalika Racers Adore Mandalika Circuit during Track Day
11-Apr-23	ITDC Siap Menyambut Penyelenggaraan Event MICE di Kawasan The Golo Mori ITDC to Welcome MICE Event at the Golo Mori
13-Apr-23	Sambut Libur Lebaran 2023, ITDC Gelar Apel Kesiapan The Nusa Dua ITDC Holds Roll-Call to Check Readiness Ahead of Eid Holiday
18-Apr-23	Safari Ramadhan 2023, ITDC Salurkan Paket Sembako dan Santunan bagi Masyarakat Desa Sekitar The Mandalika ITDC Disburses Staple Goods, Assistance for Surrounding Community in The Mandalika
20-Apr-23	ITDC Siapkan Posko Lebaran Seru Sambut Libur Idul Fitri 1444H ITDC Opens Eid Post Ahead of Eid Holid
25-Apr-23	Libur Lebaran 2023, Tingkat Hunian Rata-Rata The Nusa Dua Capai 78,3% The Nusa Dua Occupancy Rate Reaches 78,3% on Eid Holiday
26-Apr-23	ITDC Gelar Simulasi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di The Nusa Dua ITDC Holds Earthquake, Tsunami Readiness Preparation at The Nusa Dua
27-Apr-23	Libur Lebaran 2023, The Mandalika Jadi Salah Satu Destinasi Pariwisata Pilihan Wisatawan di Lombok The Mandalika as One of Tourist Destinations in Lombok during Eid Holiday
05-May-23	ITDC Bersiap, Golo Mori Convention Center Jadi Venue Side Event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 Golo Mori to Host Side Event of 2023 ASEAN Summit



Tanggal Rilis Release Date	Rilis Release
08-May-23	Sambut Perhelatan Side Event KTT ke-42 ASEAN di Bali, ITDC Gelar Beach Clean Up di Pantai kawasan The Nusa Dua ITDC Conducts Beach Clean Up at The Nusa Dua Ahead of ASEAN Summit Side Event
12-May-23	ITDC Bersama BKKBN Berikan Sosialisasi Pencegahan Stunting Melalui Pengurangan Angka Pernikahan Dini ITDC, BKKBN Socialize Stunting Prevention by Early Marriage Reduction
23-May-23	April 2023, Tingkat Hunian The Nusa Dua Capai 68,87% The Nusa Dua Occupancy Rate Reaches 68,87% in April 2023
27-May-23	ASIA Media Summit (AMS) 2023 Sukses Digelar di The Nusa Dua, Bali ASIA Media Summit (AMS) 2023 Successfully Held at The Nusa Dua, Bali
01-Jun-23	Tingkatkan Promosi Kawasan, ITDC akan Menggelar Sejumlah Event di The Nusa Dua, The Mandalika & The Golo Mori ITDC Holds Events at The Nusa Dua, The Mandalika, The Golo Mori to Promote Regions
04-Jun-23	MGPA Gratiskan Masyarakat Nonton Track Day di Pertamina Mandalika International Circuit Free Track Day Ticket for the Public at Mandalika Circuit
09-Jun-23	ITDC Lawan Stunting Lewat Program Dapur Sehat di Desa Penyangga The Mandalika ITDC Eradicates Stunting with Healthy Kitchen at Mandalika Surrounding Community
13-Jun-23	Kawasan The Nusa Dua Sukses Jadi Venue Event Dream Machine Festival The Nusa Dua to Host Dream Machine Festival
15-Jun-23	Lebih dari 50 Tim Indonesia Siap Bertanding di Shell Eco-marathon Asia 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit More Than 50 Indonesian Teams to Compete at 2023 Shell-Eco Marathon Asia at Mandalika Circuit
16-Jun-23	Komitmen ITDC Dalam Pengembangan KEK Mandalika ITDC's Commitment in Developing Mandalika SEZ
17-Jun-23	The Nusa Dua Kembali Dipercaya Sebagai Lokasi Penyelenggaraan BBTF ke-9 Tahun 2023 The Nusa Dua to Host the 9th BBTF in 2023
19-Jun-23	Finnish Rute Three Island Journey di Pertamina Mandalika International Circuit Sukses di Gelar Mandalika Circuit Successfully Held Finish Route Three Island Journey
24-Jun-23	ITDC Berbagi Hewan Kurban Dalam Rangka Sambut Hari Raya Idul Adha 1444 H ITDC Distributes Sacrificial Animals for 1444H Eid al-Adha
26-Jun-23	Menjelang High Season, Tingkat Hunian The Nusa Dua Capai 63,22% Pada Mei 2023 The Nusa Dua Occupancy Rate Reaches 63,22% in May Ahead of High Season
28-Jun-23	ITDC dan Kimia Farma Laboratorium & Klinik Tandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kolaborasi Pelaksanaan Program-Program Bersama ITDC-Kimia Farma Sign MoU on Joint Programs Implementation
30-Jun-23	Kuta Lane, Landmark Baru di Kawasan The Mandalika Kuta Lane, New Landmark at The Mandalika
09-Jul-23	Erick Thohir Resmikan Tiga Proyek Baru di KEK Mandalika Erick Thohir Officiates Three New Projects at The Mandalika
10-Jul-23	Shell Eco-Marathon Asia-Pasifik dan Timur Tengah 2023 Kembali Hadir Untuk Kedua Kalinya di Pertamina Mandalika International Circuit Shell Eco-Marathon Asia Pacific and Middle East Arrived at Mandalika Circuit
11-Jul-23	Hospitality Training for Security ITDC di The Mandalika Hospitality Training for ITDC Security at The Mandalika
13-Jul-23	ITDC Kembali Tandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Tinggi Bali ITDC Signed Another MoU with Bali Higher Prosecutor Office
14-Jul-23	Thank God It's Festival (TGIF) by UNIVLOX Live 2023 Siap Digelar di Pulau Peninsula The Nusa Dua The Nusa Dua's Peninsula Island to Host Thank God It's Festival by UNIVLOX Live
17-Jul-23	Pertamina Enduro Mandalika Racing Series 2023 Putaran Kedua Sukses Digelar Pertamina Enduro Mandalika Racing Series 2023 Second Series Successfully Held
20-Jul-23	ITDC Berkomitmen Menjalankan Program TJSL Bagi Masyarakat dan Lingkungan Sekitar Kawasan Yang Dikelola ITDC Committed to Run TJSL Program for Community, Environment in Surrounding Area
24-Jul-23	Perayaan Hari Anak Nasional ke-39 di Kawasan The Mandalika The Mandalika Celebrate the 39th National Children Day
24-Jul-23	Mandalika Ev Experience, Kolaborasi ITDC, MGPA & PLN UIW NTB Dalam Mewujudkan Masa Depan Berkelanjutan Mandalika EV Experience, a Collaboration from ITDC, MGPA & PLN UIW NTB for a Sustainable Future
26-Jul-23	Pameran Multimedia di The Nusa Dua Multimedia Exhibition at The Nusa Dua

Tanggal Rilis Release Date	Rilis Release
28-Jul-23	International Tourism Investment Forum (ITIF) 2023 Digelar di The Nusa Dua The Nusa Dua to Host International Tourism Investment Forum (ITIF) 2023
30-Jul-23	Semester I 2023, Tingkat Hunian Kawasan The Nusa Dua Tumbuh 97,33% The Nusa Dua Occupancy Rate Grows 97,33% in 2023 First Semester
31-Jul-23	Progress Pembangunan Food Gallery di The Mandalika Progress of Food Gallery Development at The Mandalika
10-Aug-23	Pameran Multimedia Karya Mestro Lempad di The Nusa Dua Selesai Digelar Maestro Lempad Multimedia Exhibition at The Nusa Dua Successfully Held
11-Aug-23	Ajang Balap Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship 2023 Round 4 - Indonesia, Diikuti 101 Pembalap 101 Racers Participate at Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship 2023 Round 4
12-Aug-23	Idemitsu FIM ARRC 2023: Hari Kedua Pekan Balap Mandalika Diwarnai Gairah Kompetitif Para Peserta Idemitsu FIM ARRC 2023 Mandalika Successfully Held, Indonesian Riders Won Podium Position
13-Aug-23	Idemitsu FIM ARRC 2023 Mandalika Selesai Digelar, Pebalap Indonesia Raih Posisi Podium Idemitsu FIM ARRC 2023 Mandalika Successfully Held, Indonesian Riders Won Podium Position
17-Aug-23	Sentuhan Budaya Lokal ITDC menggelar Upacara Bendera Tematik Nusantara di Kawasan Kelolaannya ITDC Holds Flag Ceremony with Traditional Culture
22-Aug-23	Masuki Semester II, Tingkat Hunian The Nusa Dua Capai 84,05% Pada Bulan Juli 2023 The Nusa Dua Occupancy Rate Reaches 84.05% on July 2023
30-Aug-23	Optimalkan Keterampilan dan Keramahan Pelaku UMKM dan Pedagang Pantai di The Mandalika Melalui Pelatihan Kolaborasi InJourney & ITDC InJourney, ITDC Optimize MSMEs Skills at The Mandalika
05-Sep-23	ITDC Berkolaborasi dengan InJourney Menyelenggarakan Hospitality Training for Security The Nusa Dua ITDC, InJourney Conduct Hospitality Training for The Nusa Dua Security
07-Sep-23	The Nusa Dua Jadi Tuan Rumah Pameran Bali Interfood 2023 The Nusa Dua to Host 2023 Bali Interfood Exhibition
08-Sep-23	Mengawali Petualangan Culinary Terbaik di Alangen Beachfront Resto & Club Hop onto Culinary Adventure at Alangen Beachfront Resto & Club
09-Sep-23	Mandalika GP Hub Resmi Dibuka: Menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 dengan Antusiasme Mandalika GP Hub Officially Opened, Welcoming Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 with Enthusiasm
10-Sep-23	Kebangkitan Sport Tourism menuju Pentas Dunia Sport Tourism Revival to the Global Stage
14-Sep-23	Perekrutan Tenaga Volunteer Untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 Telah Dibuka! Volunteer Recruitment for Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 is Opened!
21-Sep-23	The Nusa Dua Jadi Tuan Rumah Event International Convention on Indonesia Upstream oil dan Gas 2023 (IOG 2023) The Nusa Dua to Host Indonesia Upstream Oil and Gas International Convention
21-Sep-23	ITDC Bentuk Paguyuban Bagi Pedagang Asongan di KEK Mandalika ITDC Establishes Association for Merchants at Mandalika SEZ
22-Sep-23	Tingkat Hunian The Nusa Dua Lampaui 80% Pada Agustus 2023 The Nusa Dua Occupancy Rate Reaches 80% in August 2023
27-Sep-23	ITDC Fokus Jdikan The Mandalika Sebagai Destinasi Utama Sport Tourism di Indonesia ITDC Aims to Establish The Mandalika as Major Sport Tourism in Indonesia
07-Oct-23	The Nusa Dua Bersiap Menyambut KTT AIS Forum 2023 The Nusa Dua to Host 2023 AIS Forum Summit
14-Oct-23	KTT AIS Forum 2023 Sukses Digelar, The Nusa Dua Bersiap Sambut Perhelatan 61st AALCO After Hosting 2023 AIS Forum Summit, The Nusa Dua Prepares to Host 61st AALCO
15-Oct-23	Tembus 103.000 Penonton, Indonesia GP 2023 Berjalan lebih lancar dan meriah dibandingkan tahun lalu Reaching 103.000 Spectators, 2023 Indonesia GP More Successful than Before
21-Oct-23	Road To Give 2023 Sukses Diselenggarakan di The Nusa Dua The Nusa Dua Successfully Held Road to Give 2023
23-Oct-23	Triwulan III 2023, Okupansi rata-rata The Nusa Dua 80,65% The Nusa Dua Occupancy Rate Reaches 80,65% in Quarter III
26-Oct-23	Sukses Menyelenggarakan Program IHH Batch 4 IHH Batch 4 Succesfully Held



Tanggal Rilis Release Date	Rilis Release
27-Oct-23	ITDC Kolaborasi dengan Korem 163/Wira Satya Gelar Latihan Lapangan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di The Nusa Dua ITDC Collaborates with Korem 163/Wira Satya to Hold Disaster Response Field Training for Earthquakes with Potential for Tsunami in The Nusa Dua
30-Oct-23	Final Round Balap Motor Sport Bike Pertamina Enduro Mandalika Racing Series (MRS) 2023 Final Round Motor Sport Bike Pertamina Enduro Mandalika Racing Series 2023
01-Nov-23	ITDC Jalin Kerjasama Dengan Tujuh Investor untuk Percepat Pengembangan KEK Pariwisata Mandalika ITDC Collaborates with 7 Investors to Accelerate SEZ Development at Mandalika
04-Nov-23	Awal November 2023, The Nusa Dua Jadi Tuan Rumah 2 Event Internasional Bergengsi The Nusa Dua to Host 2 Prestigious International Events in Early November 2023
14-Nov-23	Tahun Perjalanan ITDC Menjadi Pengembang dan Pengelola Kawasan Pariwisata Terintegrasi di Indonesia ITDC Road to Become Developer of Integrated Tourism Area in Indonesia
16-Nov-23	16 KK Warga Relokasi KEK Mandalika Menempati Hunian Tetap di Dusun Ngolang 16 Mandalika SEZ Relocated Family Occupy Permanent Housing in Ngolang Village
17-Nov-23	Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan ITDC MoU Signing Between ITDC and North Kalimantan Government
22-Nov-23	The Nusa Dua jadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO) ke-41 The Nusa to Host Conference of 41st ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO)
25-Nov-23	MGPA Sambut Kedatangan Porsche 911 GT3 Cup Pertama di Pertamina Mandalika International Circuit MGPA Welcomes the First Porsche 911 GT3 Cup at the Pertamina Mandalika International Circuit
26-Nov-23	Low Season, Okupansi The Nusa Dua bulan Oktober Stabil di Angka 76, Tingkat Okupansi 1-19 November 2023 Tercatat lebih dari 70% The Nusa Dua Occupancy Rate Stable at Low Season with 76, November 1-19 Occupancy Reaches 70%
30-Nov-23	Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023: Menyambut Ajang Balap Mobil Pertama di Mandalika Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023: First Car Racing Event at Mandalika
06-Dec-23	Erick Thohir Resmikan Golo Mori Convention Center, Magnet Baru Pariwisata di Indonesia Timur Erick Thohir Inaugurates Golo Mori Convention Center, New Tourism Magnet in Eastern Indonesia
07-Dec-23	Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023, Ajang Balap Mobil Pertama di Pertamina Mandalika International Circuit Porsche Sprint Challenge Indonesia Debut, Surprises from Side Events
09-Dec-23	Debut Gairah Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023 Tampil Perdana di Pertamina Mandalika International Circuit Serta Kejutan Seru dari Side Event! Passionate Debut from Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023 Makes First Appearance at Pertamina Mandalika International Circuit, More Exciting Surprise from Side Event!
10-Dec-23	Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023 Sukses Digelar di Pertamina Mandalika International Circuit Pertamina Mandalika International Circuit Successfully Held Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023
14-Dec-23	ITDC dan Guruji Gede Prama Kolaborasi Gelar "Bali Art of Harmony" di Pulau Nusa Dharma The Nusa Dua ITDC, Guruji Gede Prama Collaborate in Bali Art of Harmony at The Nusa Dua
15-Dec-23	The Nusa Dua Bali Siap Sambut Wisatawan Menikmati Libur Natal dan Tahun Baru The Nusa Dua Welcomes Tourists for Christmas, New Year Holiday
15-Dec-23	ITDC & Yayasan Gugah Nurani Indonesia Berkolaborasi membangun Kapasitas Pedagang Asongan di Kawasan The Mandalika Untuk Terbentuknya Asosiasi yang Kuat dan Mandiri TDC, Gugah Nurani Foundation Held Capacity Building for Merchant at The Mandalika
17-Dec-23	bLU cRU Yamaha Sunday Race Kembali Hadir di Pertamina Mandalika International Circuit bLU cRU Yamaha Sunday Race Returns to Pertamina Mandalika International Circuit
17-Dec-23	The Nusa Dua Bali Jadi Tuan Rumah Event Bali Championship The Dewata The Nusa Dua to Host Bali Championship the Dewata
22-Dec-23	ITDC Gelar Apel Kesiapsiagaan Natal & Tahun Baru di Kawasan yang Dikelola TDC Holds Roll-Call Ahead of Christmas, New Year Holiday
24-Dec-23	Libur Nataru, The Nusa Dua Targetkan Okupansi Capai 73% The Nusa Dua Targets Occupancy Above 73% for Christmas, New Year Holiday
27-Dec-23	Patuhi Rekomendasi Pihak Berwenang, ITDC Batalkan Penyelenggaraan Festival Mandalika Seru Following Authorities Recommendation, ITDC Cancels Mandalika Seru Festival
31-Dec-23	Kembang Api Spektakuler, ITDC: Meriahkan Setiap Sudut Kawasan Yang Dikelola! ITDC Enlivens Managed Areas with Fireworks

Akses Publik, Konsumen, dan Hubungan Investor

ITDC senantiasa memanfaatkan media komunikasi seperti telepon, website, faksimili, surat, dan surat elektronik untuk mendukung kemudahan dan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pelanggan. Selain itu, Perusahaan juga berupaya memanfaatkan media massa dan sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggan.

Pertemuan dengan Stakeholder

Selama tahun 2023, Perusahaan telah melakukan beberapa pertemuan dengan para *stakeholder* terkait, yaitu sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Jenis Pertemuan Type of Meeting	Jumlah Total
Media Republika Jakarta	Media Visit	1
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	<i>Mission AIIB ke -9 dan Mission AIIB ke-10</i>	2
Kompas Group Jakarta	Media Visit	1
Kementerian BUMN dan Kemenparekraf SOEs Ministry and Tourism and Creative Economy Ministry	Rakornas KEK dan Peresmian GMCC SEZ Coordinating Meeting and GMCC Inauguration	1

Ragam Media kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Perusahaan juga memiliki ragam media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih, di antaranya:

Kepada To	Bentuk-bentuk Media Media Types
Regulator Regulators	Surat Resmi, Portal BUMN Official Letter, SOE Portal
Pemegang Saham Shareholders	Surat Resmi, Portal BUMN Official Letter, SOE Portal
Investor Investors	Surat Resmi, Event Forum Investasi Nasional & Internasional Official Letter, National & International Investment Forum Event
Konsumen Consumers	Televisi, Radio, Media Sosial Television, Radio, Social Media
Karyawan Employees	Town Hall Meeting, Newsletter Internal, Intranet, Media Sosial Town Hall Meeting, Internal Newsletter, Intranet, Social Media
Mitra Kerja dan Rekanan Business Partners	Surat Resmi Official Letter
Masyarakat/Umum General Public	Surat Kabar, TV, Radio, Media Sosial Newsletter, TV, Radio, Social Media

Public, Consumer, and Investor Relations

ITDC consistently utilizes communication media such as telephone, website, facsimile, mail, and email to support ease and smoothness of communication between the Company and customers. Additionally, the Company also endeavors to utilize mass and social media to communicate with customers.

Meetings with Stakeholders

Throughout 2023, the Company has held several meetings with relevant stakeholders, as follows:

Various Media for Shareholders and Stakeholders

The Company also employs a variety of communication media to convey data and information related to operational activities, business processes, and performance achievements, including:

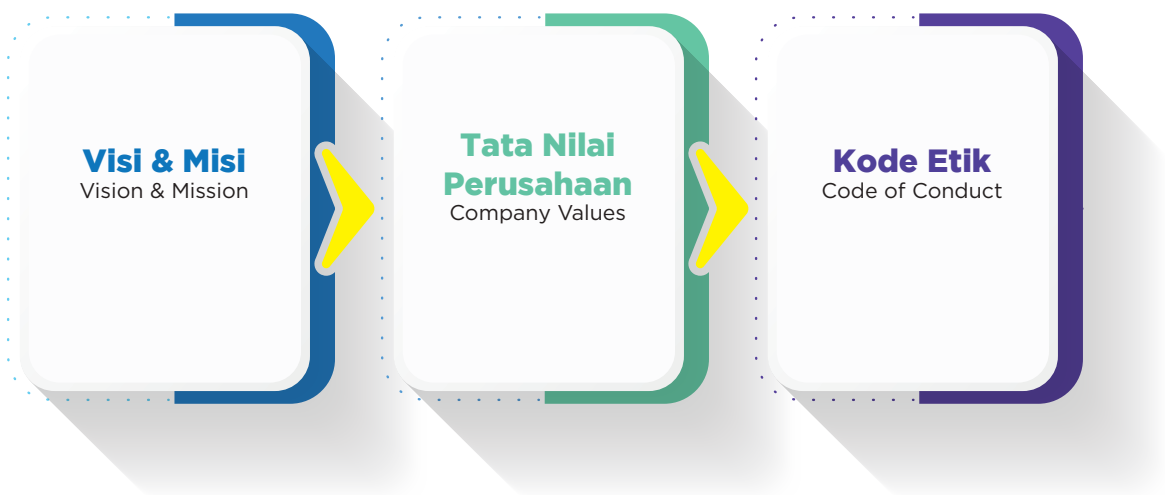


Kode Etik: Standar Etika Perusahaan

Code of Conduct: Company Ethical Standards

Dalam rangka mewujudkan penerapan GCG yang optimal dan komprehensif, ITDC telah membentuk Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai pedoman etika usaha dan tata perilaku yang harus diterapkan oleh Dewan Komisaris, Direksi, maupun seluruh Insan Perusahaan. Pembentukan Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan salah satu bentuk komitmen Insan Perusahaan dalam melaksanakan praktik-praktik pengelolaan GCG sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, serta memastikan penerapan visi, misi, dan nilai budaya Perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata.

In order to realize optimal and comprehensive implementation of GCG, ITDC has established a Code of Conduct and Behavior as a guideline for business ethics and codes of conduct that must be implemented by the Board of Commissioners, Board of Directors and all Company Personnel. The establishment of this Code of Conduct and Behavior is a form of commitment of Company Personnel in implementing GCG management practices as part of efforts to achieve the Company's vision and mission, as well as ensuring that the Company's vision, mission, and cultural values can be implemented more realistically.



Penyusunan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan dilandasi oleh sikap berikut:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
2. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme, serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Senantiasa sadar bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta tuntutan dari para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

The arrangement of the Code of Conduct is based on the following attitudes:

1. Always prioritize compliance with applicable laws and regulations and pay attention to the norms that apply in the society where the Company operates.
2. Always try to avoid actions or behaviours that can lead to conflicts of interest, corruption, collusion or nepotism, and always prioritize the interests of the Company above personal, family, group or class interests.
3. Always aware that the Company is required to grow and develop in accordance with market dynamics and developments as well as demands from stakeholders.

4. Senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi maksimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.
5. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.

Pokok-pokok Isi Kode Etik Perusahaan

Pedoman Etika dan Perilaku ITDC ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 09/KEP/DEKOM/XII/2020 dan No. 002.2/SK/ITDC.01/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 06/KEP/DEKOM/XII/2017 dan KEP/DIR/056-2/XII/2017 tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Pokok-pokok kode etik yang terdapat dalam Pedoman Etika dan Perilaku tersebut mengatur antara lain:

1. Standar Etika Usaha
 - a. Etika Perusahaan dengan Pekerja
 - b. Etika Perusahaan dengan Konsumen
 - c. Etika Perusahaan dengan Pesaing
 - d. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa
 - e. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja
 - f. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor
 - g. Etika Perusahaan dengan Pemerintah
 - h. Etika Perusahaan dengan Masyarakat
 - i. Etika Perusahaan dengan Media Massa
 - j. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi
2. Standar Tata Perilaku
 - a. Etika Kerjasama Sesama Insan ITDC
 - b. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan
 - c. Menjaga Harta Perusahaan
 - d. Menjaga Keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
 - e. Mencatat Data dan Pelaporan
 - f. Menghindari Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan
 - g. Menerima Hadiah/Cenderamata/Gratifikasi dan Entertainment

4. Always strive to be able to make a maximum contribution to improving the welfare of society, nation and state.
5. Always try to apply the principles of transparency, independence, accountability, responsibility and fairness in managing the Company.

Principles of the Code of Conduct of the Company

ITDC Ethics and Behavior Guidelines are established through Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 09/KEP/DEKOM/XII/2020 and No. 002.2/SK/ITDC.01/XII/2020 dated December 28, 2020 concerning Amendment to the Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero) No. 06/KEP/DEKOM/XII/2017 and KEP/DIR/056-2/XII/2017 concerning Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees of PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero). The main points of the code of conduct contained in the Ethics and Behavior Guidelines, among others:

1. Business Ethical Standards
 - a. Company Ethics with Employees
 - b. Company Ethics with Consumers
 - c. Company Ethics with Competitors
 - d. Company Ethics with Goods and Services Providers
 - e. Company Ethics with Work Partners
 - f. Company Ethics with Creditors/Investors
 - g. Company Ethics with the Government
 - h. Company Ethics with Society
 - i. Company Ethics with Mass Media
 - j. Company Ethics with Professional Organizations
2. Code of Conduct Standards
 - a. Ethics of Collaboration among ITDC Personnel
 - b. Maintain Confidentiality of Company Data and Information
 - c. Safeguarding Company Assets
 - d. Maintain Security and Safety, Occupational Health and Environmental Protection
 - e. Recording Data And Reporting
 - f. Avoiding Conflict of Interest and Abuse of Position
 - g. Receive Gifts/Souvenirs/Gratification and Entertainment



- h. Memberi Hadiah/Cenderamata dan Entertainment
- i. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (Miras)
- j. Aktivitas Politik

Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik

Seluruh Insan ITDC wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan ITDC untuk melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku yang diperbaharui setiap tahun. Perusahaan juga secara konsisten melakukan sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku agar kode etik Perusahaan agar dapat dipahami secara menyeluruh sehingga dapat menjadi pedoman perilaku yang diterapkan di seluruh aktivitas. Adapun mekanisme sosialisasi yang dilakukan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan bagi seluruh insan Perseroan.
2. Memberikan induksi pemahaman *Code of Conduct* kepada calon pegawai dan pegawai baru.
3. Memberikan buku saku *Code of Conduct*.
4. Melakukan survei pemahaman terhadap *Code of Conduct*.

Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam beberapa rangkap asli sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Unit Kerja/Bagian yang menangani bidang Sumber Daya Manusia, 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.

Sementara, Pakta Integritas Karyawan Perusahaan dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Divisi SDM & Umum, dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh Karyawan Perusahaan yang bersangkutan. Divisi SDM & Umum membuat rekapitulasi Karyawan Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas setiap tahunnya, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan pada setiap awal tahun.

- h. Giving Gifts/Souvenirs and Entertainment

- i. Abuse of Narcotics and Illegal Drugs and Alcohol

- j. Political Activity

Socialization and Internalization of the Code of Conduct

All ITDC Personnel are required to sign an Integrity Pact which is a commitment of ITDC Personnel to implement the Ethics and Behavior Guidelines which are updated every year. The Company also consistently disseminates the Ethics and Behavior Guidelines, hence the Company's code of conduct can be thoroughly understood so that it can become a behavioral guideline that is applied in all activities. The socialization mechanism carried out by the Company is as follows:

1. Signing of the Compliance Statement for all Company personnel.
2. Provide induction of understanding of the Code of Conduct to prospective employees and new employees.
3. Provide a Code of Conduct pocket book.
4. Conduct understanding survey of the Code of Conduct.

Integrity Pact for the Board of Commissioners and Board of Directors is drawn up and signed in several original copies according to the number of members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors. 1 (one) original copy submitted to the Work Unit/Section that handles Human Resources, 1 (one) original copy submitted to the Corporate Secretary and 1 (one) original copy is kept by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors concerned.

Meanwhile, the Company's Employee Integrity Pact is drawn up and signed in 2 (two) original copies, 1 (one) original copy is submitted to the HR & General Division, and 1 (one) original copy is kept by the Company Employee concerned. The HR & General Division prepares recapitulation of Company Employees who sign the Integrity Pact each year, which is then submitted to the Corporate Secretary at the beginning of each year.

Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Standar Etika Perusahaan

Dalam menegakkan Pedoman Etika dan Perilaku, setiap Insan Perusahaan wajib melaporkan setiap fakta penyimpangan kode etik kepada Komite selaku *Chief Compliance Officer* (CCO). CCO kemudian menindaklanjuti setiap laporan dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Hasil kajian CCO disampaikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

Selanjutnya, Direksi dan Dewan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin, dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di unit masing-masing, di mana bentuk pemberian sanksi akan diatur secara tersendiri. Insan Perusahaan yang melakukan penyimpangan kode etik mempunyai hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung, sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin diputuskan.

Adapun komitmen Insan Perusahaan dalam rangka menegakkan komitmen kode etik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Nama Baik Perusahaan;
2. Menjaga Hubungan Baik Antar Insan ITDC;
3. Menjaga Kerahasiaan Perusahaan;
4. Menjaga dan Menggunakan Aset Perusahaan;
5. Menjaga Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja;
6. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok;
7. Melakukan Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan;
8. Etika dalam Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Lainnya;
9. Tidak Memanfaatkan Posisi untuk Kepentingan Pribadi (Benturan Kepentingan);
10. Perusahaan menjamin seluruh Insan ITDC untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.

Enforcement and Sanctions for Violations of Company Ethical Standards

In enforcing the Ethics and Behavior Guidelines, every Company Personnel is obliged to report any facts of deviation from the code of conduct to the Committee as Chief Compliance Officer (CCO). The CCO then follows up on each report and guarantees the confidentiality of the reporter's identity. Result of CCO study submitted to the Board of Directors or Board of Commissioners in accordance with the scope of their responsibilities.

Furthermore, the Board of Directors and Board of Commissioners decide to provide coaching actions, disciplinary sanctions, and/or corrective and preventive actions that must be implemented by the direct superiors in their respective units, where the form of sanctions will be regulated separately. Company personnel who violate the code of conduct have right to have their explanations heard in the presence of their immediate superior, before decision is given to guidance or disciplinary action.

The commitment of Company Personnel in upholding the code of ethics commitment is as follows:

1. Maintain the Good Name of the Company;
2. Maintain Good Relations between ITDC Personnel;
3. Maintain Company Confidentiality;
4. Maintain and Use Company Assets;
5. Maintain Health, Safety and Work Environment;
6. Immoral Behaviour, Narcotics, Drugs, Gambling and Smoking;
7. Recording Company Data and Preparing Reports;
8. Ethics in Giving and Receiving Gifts, Bribes and Others;
9. Not Utilizing Position for Personal Interest (Conflict of Interest);
10. The Company guarantees all ITDC Personnel to be able to exercise their right to the opportunity to channel their political aspirations. The Company does not make political contributions and is not affiliated with any political party.



Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik yang merupakan tindakan indisipliner akan ditangani oleh Divisi SDM & Umum, sementara Divisi Audit Internal merupakan penanggung jawab implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan. Perusahaan juga mengajak seluruh Insan Perusahaan yang mengetahui terjadinya pelanggaran kode etik untuk melaporkan kepada Divisi Audit Internal atau Atasan Langsung.

Seluruh laporan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan harus dilakukan berdasarkan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah. Seluruh Insan Perusahaan dan pihak eksternal (pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum ITDC.

Perusahaan menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.

1. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan.
2. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
3. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
4. Perusahaan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perusahaan akan melindungi dan menjamin pelapor bahwa laporan yang diberikan tidak akan berakibat negatif atau mempengaruhi terhadap kesempatan karir.

Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka Insan ITDC wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:

1. Divisi SDM & Umum.
2. Satuan Pengawas Internal (SPI).
3. Kotak Pengaduan/*Whistleblowing System*.

Code of Conduct Violations Reporting Mechanism

Violation of the Code of Conduct is an disciplinary action and will be handled by the HR & General Affairs Division, the Internal Audit Division which is responsible for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Company. Every ITDC Personnel who is aware of a violation of the Code of Conduct reports it to the Internal Audit Division or Direct Supervisor.

All reports made by Company Personnel shall be made in good faith and not constitute personal complaint regarding a particular Company policy or be based on ill will/slander. All Company Personnel and external parties (customers, work partners and the public) can report violations of the code of conduct committed by ITDC individuals.

The Company follows up on reports that have the potential to cause material harm and can damage the Company's image, which among others are caused by irregularities, manipulation and so on.

1. The whistleblower must state his/her identity clearly in the report he/she made, accompanied by relevant supporting evidence.
2. The recipient of the report must keep the identity of the reporter confidential.
3. The Company is obliged to follow up on every report received according to the procedures and mechanisms in force.
4. The Company provides legal protection in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
5. The Company will protect and guarantee the whistleblower that the report provided will not have a negative impact or affect career opportunities.

If a violation or deviation occurs, ITDC Personnel are required to report the violation through:

1. HR & General Division.
2. Internal Supervisory Unit (SPI).
3. Complaint Box/*Whistleblowing System*.

Seluruh pelanggaran kode etik yang dilakukan akan ditindaklanjuti oleh IAD dan hasil kajiannya kemudian akan diberikan kepada manajemen puncak Perusahaan (Dewan Komisaris atau Direksi). Manajemen puncak akan memutuskan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung yang bersangkutan.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan. ITDC menghormati hak membela diri dari yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari Atasan Langsung yang bersangkutan dan telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham. Bagi mitra kerja atau pemangku kepentingan lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggaran *Code of Conduct* mulai dari teguran tertulis, pemberian surat peringatan, penurunan golongan upah sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Jumlah pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku yang terjadi di Perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

All violations of the code of conduct committed will be followed up by IAD and result of the study will then be provided to the Company's top management (Board of Commissioners or Board of Directors). Top management will decide on corrective or preventive actions that must be implemented by the direct superior concerned.

Sanctions for Violation of the Code of Conduct

Sanctions for violations committed will be given in accordance with the provisions of the Collective Labor Agreement and other provisions that apply in the Company. ITDC respects the right to defend oneself from those suspected of having committed a violation and to hear their explanations for consideration in determining the form of disciplinary consequences to be given. Sanctions for employees who commit violations are determined by the Board of Directors after receiving a report from the employee's direct supervisor and having gone through the process in accordance with applicable regulations.

The Board of Commissioners and the Board of Directors decide on the provision of coaching measures, disciplinary sanctions and/or other actions as well as prevention which must be carried out by the Direct Superiors in their respective environments. Sanctions for the Board of Directors and Board of Commissioners who commit violations are decided by the Shareholders. If the Partners or other Stakeholders commit violations, then the provisions as stated in the contract will be imposed. If it is related to a criminal act, it can be forwarded to the authorities. The sanctions given for violations of the Code of Conduct range from written warnings, issuance of warning letters, reduction in wage grades to termination of employment.

Number of Code of Conduct Violations

The number of violations of the Ethics and Behavior Guidelines that occurred in the Company in the last 2 (two) years can be seen as follows:



Sanksi Sanctions	2023	2022
Tindakan Disiplin Ringan Light Disciplinary Action	Nihil None	Nihil None
Tindakan Disiplin Sedang Moderate Disciplinary Action	Nihil None	Nihil None
Tindakan Disiplin Berat Severe Disciplinary Action	Nihil None	Nihil None
Jumlah Total	Nihil None	Nihil None

Penyimpangan Internal

Jumlah penyimpangan internal yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 beserta upaya penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Internal Deviation

The number of internal irregularities that occurred in 2022 and 2023 along with efforts to resolve them are as follows:

Tindak Lanjut Follow Up	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh Number of Cases Performed by					
	Manajemen Management		Pegawai Tetap Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap Non Permanent Employee	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Telah Diselesaikan Has Been Completed	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dalam Proses Penyelesaian Internal In Internal Settlement Process	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Belum Diupayakan Penyelesaiannya No solution has been attempted yet	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum Has been followed up through the legal process	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jumlah Total	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Kajian dan Evaluasi Manajemen

Manajemen Perusahaan secara konsisten melakukan kajian dalam rangka mengevaluasi kinerja Perusahaan, termasuk keterkaitan antara visi, misi dan budaya perusahaan serta kode etik dengan rencana jangka panjang dan profil risiko yang dihadapi Perusahaan. Penerapan kode etik juga menjadi kajian manajemen untuk menjadi salah satu perangkat evaluasi keorganisasian Perusahaan.

Management Review and Evaluation

The Company's management consistently conduct studies in order to evaluate the Company's performance, including the relationship between the company's vision, mission and culture as well as the code of conduct with long-term plans and risk profile faced by the Company. The implementation of the code of conduct is also a management study to become one of the Company's organizational evaluation tools.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan ITDC senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang fair, nilai sportivitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Surat Keputusan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 003-1/KEP/DIR/ITDC/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Kebijakan, Pedoman dan Tim Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Dalam hal Anti Korupsi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia telah berhasil meraih Sertifikasi SNI ISO 37001-2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan Nomor Sertifikat G.05-ID0188-XII-2020 tertanggal 8 Desember 2020.

Kebijakan Perusahaan Terkait Anti Korupsi

Upaya memahami konteks terkait penyuapan, ITDC telah menentukan isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arahan strategi yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai Rencana Jangka Panjang, Kontrak Manajemen, *Key Performance Indicator*, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta tidak terjadi penyuapan dalam proses bisnis di ITDC sesuai persyaratan ISN ISO 37001:2016. Bagi Tim Implementasi SMAP ITDC dalam memantau dan meninjau informasi tentang isu-isu internal dan eksternal setiap tahunnya harus disesuaikan.

The Board of Commissioners, Board of Directors and all ITDC Personnel always uphold fair competition, the values of sportsmanship and professionalism, as well as GCG principles. The Company is also committed to creating a sound business climate, avoiding actions, behavior or actions that could give rise to conflicts of interest, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and always prioritizing the Company's interests above personal, family, group, or class interests.

The Company also always pays attention to anti-corruption policies as written in Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Decree of the Board of Directors of PT Indonesian Tourism Development (Persero) No. 003-1/KEP/DIR/ITDC/II/2020 dated February 28, 2020 concerning Policies, Guidelines, and Implementation Team for the Anti-Bribery Management System of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. In terms of Anti-Corruption, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia has succeeded in achieving SNI ISO 37001-2016 Certification concerning Anti-Bribery Management System with Certificate Number G.05-ID0188-XII-2020 dated December 8, 2020.

Company Policy Regarding Anti-Corruption

In an effort to understand the context related to bribery, ITDC has determined internal and external issues that are relevant to the objectives and strategic direction that can influence the ability to achieve desired results in accordance with the Long Term Plan, Management Contract, Key Performance Indicator, Work Plan, and Company Budget as well as there is no bribery in business processes at ITDC according to the requirements of ISN ISO 37001:2016. For the ITDC SMAP Implementation Team, monitoring and reviewing information about internal and external issues must be adjusted every year.



Adapun hal-hal isu internal dan eksternal yang harus diperhatikan adalah sebagaimana Prosedur dan Form terkait isu internal dan eksternal terlampir. Untuk pemutakhiran Prosedur dan Form ini dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Manajemen Representatif/Fungsi Kepatuhan Tim Implementasi SMAP.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Prosesnya

Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak dalam penerapan Kebijakan dan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan di ITDC telah menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara berkelanjutan. ITDC menentukan proses yang diperlukan bagi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan penerapannya di seluruh organisasi, dengan cara beberapa cara yang telah ditentukan Kegiatan yang dilaksanakan di ITDC dari sudut pandang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, bertujuan untuk mencapai standar bahwa dalam setiap proses bisnis di ITDC dapat dicegah dan ditanggulangi segala praktik penyuapan sehingga tidak terjadi praktik penyuapan sebagaimana harapan dari stakeholder, dan UU Tahun 1990 dan peraturan lainnya yang berlaku di ITDC sehingga dapat menghapus segala bentuk penyuapan dalam rangka menunjang terwujudnya *Good Corporate Governance* di ITDC.

ITDC juga telah menunjuk Tim Implementasi SMAP yang telah ditetapkan uraian tugasnya antara lain adalah menetapkan, mendokumentasi, menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meninjau dokumen dokumen terkait SMAP dan mengevaluasi, jika diperlukan, meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk proses dan interaksinya yang diperlukan, sesuai dengan persyaratan standar SNI ISO 37001:2016 dan peraturan lainnya yang berlaku bagi ITDC. ITDC telah menyimpan informasi terdokumentasi untuk memperagakan bahwa penilaian risiko penyuapan telah dilaksanakan dan digunakan untuk merancang atau meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan.

The internal and external issues that must be paid attention to are as per the procedures and forms related to internal and external issues attached. Updating these Procedures and Forms can be carried out and determined by the Representative Management/Compliance Function of the SMAP Implementation Team.

Anti-Bribery Management System and Process

The Steering Board and Top Management in implementing the Anti-Bribery Management System Policy and Guidelines at ITDC have established, implemented, maintained, and improved the Anti-Bribery Management System on an ongoing basis. ITDC determines the processes required for the Anti-Bribery Management System and its implementation throughout the organization, in several predetermined ways. Activities carried out at ITDC from perspective of the Anti-Bribery Management System, aim to achieve standards that in every business process at ITDC can be prevented and address all bribery practices so that bribery practices do not occur as expected by stakeholders, and the 1990 Law and other regulations that apply at ITDC so that they can eliminate all forms of bribery in order to support the realization of Good Corporate Governance at ITDC.

ITDC has also appointed an ABMS Implementation Team whose job descriptions include establishing, documenting, implementing, maintaining, and continuously reviewing SMAP-related documents and evaluating, if necessary, improving the anti-bribery management system, including the necessary processes and interactions, in accordance with the requirements of the SNI ISO 37001:2016 standard and other regulations that apply to ITDC. ITDC has maintained documented information to demonstrate that a bribery risk assessment has been carried out and used to design or improve an anti-bribery management system.

Kebijakan

Manajemen Puncak (*Management Representative*) dan Tim Implementasi SMAP ITDC menetapkan, menerapkan dan memelihara Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah strategi, menyediakan Kerangka Kerja untuk menetapkan sasaran SMAP, termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku dalam SNI ISO 37001:2016. Dalam komunikasi kebijakan dan pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan di ITDC harus tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dimengerti dan diterapkan dalam organisasi, dan tersedia jika diperlukan.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi kepada Karyawan

Selama tahun 2023, Perusahaan telah melakukan pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan melalui sejumlah kegiatan, di antaranya:

1. Membentuk Tim Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan perwakilan 1 orang dari masing-masing unit/bagian/divisi.
2. Memberikan Pelatihan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada Tim Implementasi SMAP.
3. Membuat buku saku SMAP ISO 37001:2016 dan dikirimkan kepada seluruh karyawan ITDC.
4. Memberikan Sosialisasi kepada vendor-vendor di ITDC.
5. Seluruh Komisaris, Direksi dan Karyawan menandatangani Komitmen Anti Penyuapan yang dilakukan secara berkala.
6. Mengupload Materi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ITDC di Web ITDC sehingga bisa dilihat oleh *Stakeholder*.
7. Mengupload Materi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ITDC di sistem HRIS (*Human Resource Information System*) sehingga bisa dilihat oleh seluruh karyawan.
8. Membuat Stand banner dan memasangnya di 3 wilayah kerja (Jakarta, Bali dan Lombok).

Policy

Top Management (Management Representative) and the ITDC SMAP Implementation Team establish, implement and maintain an Anti-Bribery Management System Policy that is in accordance with the goals and context of the organization and supports strategic direction, provides a framework for establishing SMAP targets, including commitment to fulfill the applicable requirements in SNI ISO 37001:2016. In communication, the Anti-Bribery Management System policies and guidelines at ITDC must be available and maintained as documented information, communicated, understood, and implemented within the organization, and available if needed.

Anti-Corruption Training/Socialization to Employees

During 2023, the Company has conducted anti-corruption training/socialization for employees through a number of activities, including:

1. Formed an Anti-Bribery Management System Implementation Team with 1 person representing each unit/section/division.
2. Providing training on Anti-Bribery Management System to the SMAP Implementation Team.
3. Created a SMAP ISO 37001:2016 pocket book and send it to all ITDC employees.
4. Provided outreach to vendors at ITDC.
5. All Commissioners, Directors and Employees sign the Anti-Bribery Commitment which is carried out periodically.
6. Uploaded ISO 37001:2016 ITDC Anti-Bribery Management System Material on the ITDC Web so that it can be seen by Stakeholders.
7. Uploaded ISO 37001:2016 ITDC Anti-Bribery Management System material in the HRIS (Human Resource Information System) system so that it can be seen by all employees.
8. Created banner stands and installed them in 3 work areas (Jakarta, Bali, and Lombok).



Pengelolaan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi

Management of Conflicts of Interest and Control of Gratification

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan tentu tidak terlepas dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, namun sejauh mana perusahaan dapat mengelola benturan kepentingan tersebut sehingga terhindar dari tindakan penyimpangan/*fraud*. Benturan Kepentingan adalah kondisi dimana insan ITDC memiliki kepentingan lain selain kepentingan Perusahaan yaitu kepentingan untuk diri sendiri, keluarga maupun pihak-pihak tertentu. Insan ITDC wajib mengetahui dan menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Insan ITDC wajib untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat timbul dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang mengatur kondisi benturan kepentingan diatur di dalam Surat Keputusan Direksi No. 028/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pedoman tersebut, Direksi juga telah menetapkan Pedoman Gratifikasi dengan Surat Keputusan Direksi No. 030/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang mengatur hal-hal terkait dengan gratifikasi, penolakan, penerimaan, pemberian hadiah/cenderamata dan hiburan (*entertainment*), prinsip dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi dan batasan penerimaan, pemberian, dan pemberian atas nama pihak ketiga. Hal ini selaras dengan komitmen Perusahaan terhadap penerapan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

In carrying out its business activities, the Company certainly cannot be separated from activities that can give rise to conflicts of interest, but to what extent could the company manage these conflicts of interest so as to avoid acts of deviation/*fraud*. Conflict of Interest is a condition where ITDC personnel have interests other than the Company's interests, namely interests for themselves, their families or certain parties. ITDC personnel are required to know and avoid activities that could give rise to a conflict of interest.

ITDC personnel are obliged to avoid all forms of conflicts of interest that may arise in carrying out their duties and responsibilities in accordance with applicable regulations. Regulations governing conflict of interest conditions are regulated in Decree of the Board of Directors No. 028/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 dated December 21, 2020 concerning Guidelines for Handling Conflicts of Interest within PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

In order to optimize the implementation of these guidelines, the Board of Directors has also established Gratification Guidelines in the Decree of the Board of Directors No. 030/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 dated December 21, 2020 concerning Guidelines for Reporting and Controlling Gratification within PT Pengembangan Pariwisata Indonesia which regulates subjects related to gratification, rejection, acceptance, giving of gifts/souvenirs and entertainment, basic principles, provisions of statutory regulations which regulates the classification of acts of gratification and limits on receiving, giving and providing on behalf of third parties. This is in line with the Company's commitment to implementing the Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2020 concerning Amendment to the Corruption Eradication Commission Regulation No.07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Inspection of State Officials' Assets.

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Information on Providing Funds for Political Activities

Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. ITDC secara tegas tidak mengizinkan Insan Perusahaan untuk menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik, sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan.

The Company has policy of prohibiting the involvement of individuals on behalf of the Company in political activities, including making donations for political purposes. ITDC strongly prohibits Company Personnel to use any facilities or resources for political campaigning, political fundraising or political participation purposes, as regulated in the Company's Ethics and Behavior Guidelines.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

State Officials Wealth Report

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

ITDC selaku bagian dari holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata wajib menaati peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat serta memegang semangat pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya

Basic Principles of State Officials' Wealth Report

ITDC as part of the SOEs holding in the aviation and tourism sector is obliged to comply with binding laws and regulations and uphold the spirit of eradicating corruption through implementing the obligation to report the assets of state officials (LHKPN). LHKPN is a list of all assets of State Officials as outlined in the LHKPN form determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Regulation No. 2 of 2020 concerning Amendment to Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Inspection of State Officials' Wealth.

Based on Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission confirms the authority of the Corruption Eradication Commission to carry out steps or efforts to prevent corruption, including through registration and examination of LHKPN. Apart from that, Law No. 28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism, mandates that every administrator is obliged to report and declare his assets before and after assuming office



sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan mengacu pada dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

and be willing to have his assets checked before and after taking office. In Law No. 28 of 1999 article 2 (7) along with its explanation, explains that other officials who have strategic functions in relation to state administrators include the Board of Commissioners, Board of Directors and other structural officials in State-Owned Enterprises SOEs and Regional-Owned Enterprises (BUMD).

The LHKPN assessment submitted to the Corruption Eradication Committee aims to create State Administrators who adhere to the general principles of state administration that are free from the practices of corruption, collusion, and nepotism, as well as other disgraceful acts. Every State Official is required to report his/her assets via the LHKPN form which has been provided by the Corruption Eradication Commission to be filled in honestly, correctly, and completely, hence the Corruption Eradication Commission can analyze, evaluate, and assess all amounts, types and values of the Assets reported, correctly, quickly, precisely, accurately, and responsibly.

Legal and Regulatory Basis for Implementing LHKPN in the Company

In implementing LHKPN, the Company refers to the legal and regulatory basis as a foundation for the perspective of implementing LHKPN within the Company, including:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.
2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
3. State Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/BUMN/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and its amendments.
4. Decree of the Secretary of the Minister of BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of GCG Implementation.

5. Peraturan KPK No. 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tanggal 5 Juni 2020.
6. Surat Keputusan Direksi No. 031/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 36/KEP/DIR/ITDC/VI/2017 tentang Pejabat Struktural PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia tanggal 29 Desember 2020.
5. Corruption Eradication Commission Regulation No. 02 of 2020 concerning Amendments to Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 concerning Methods for Registration, Announcement and Examination of the Assets of State Officials dated June 5, 2020.
6. Decree of the Board of Directors No. 031/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 concerning Amendments to the Decision of the Board of Directors of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 36/KEP/DIR/ITDC/VI/2017 concerning Structural Officials of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia who are required to submit report on the assets of state officials (LHKPN) and procedures for reporting the assets of state officials within PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dated December 29, 2020.

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 031/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 36/KEP/DIR/ITDC/VI/2017 tentang Pejabat Struktural PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia tanggal 29 Desember 2020, Perusahaan telah membentuk pengelola LHKPN yang terdiri dari:

Transparency of LHKPN for Company Officials in 2023

Based on the Decree of the Board of Directors No. 031/KEP/DIR/ITDC/XII/2020 concerning Amendments to the Decision of the Board of Directors of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia No. 36/KEP/DIR/ITDC/VI/2017 concerning Structural Officials of Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) who are required to submit report on the assets of state officials (LHKPN) and procedures for reporting the assets of state officials within Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dated December 29, 2020, the Company has formed LHKPN management consisting of:



No.	Pengelola LHKPN LHKPN Management	Penugasan Assignment
1.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Penanggung Jawab Person in Charge
2.	Vice President Human Capital & General Affair Vice President of Human Capital & General Affairs	Koordinator Bidang Kepegawaian Personnel Coordinator
3.	Vice President Internal Audit Vice President of Internal Audit	Koordinator Bidang Pengawasan Supervision Coordinator

Per 31 Desember 2023, ITDC memiliki 34 wajib lapor LHKPN dengan Rapor Kepatuhan dan Ketepatan Penyampaian LHKPN sebagai berikut:

As of December 31, 2023, ITDC has 34 mandatory report LHKPN with the Compliance Report and Accuracy of LHKPN Submission as follows:

Pejabat Officials	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Report	Jumlah yang Telah Melaporkan Number of People Who Have Reported	
		Jumlah Total	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	4	4	100%
Direksi Board of Directors	5	5	100%
Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi Officials One Level Below the Board of Directors	25	25	100%
Jumlah Total	34	34	100%

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Policy

Dalam menjalankan program kerja, Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi acuan utama semua aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan. Strategi dan Perencanaan pengadaan barang dan jasa memakai referensi rencana jangka pendek dan jangka panjang program-program di ITDC.

Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan senantiasa mempertimbangkan kualitas, *delivery time* dan harga dari penyedia barang dan jasa (*vendor*) yang memenuhi kualifikasi serta dilaksanakan melalui strategi dan perencanaan pengadaan yang efektif, efisien dan juga memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Perusahaan melakukan pembagian dan klasifikasi jenis pekerjaan pengadaan sesuai dengan sistem, cara dan pelaksanaan masing masing pengadaan, sebelum pada akhirnya dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan secara efisien, transparan dan akuntabel.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa ITDC terakhir kali diperbarui pada tahun 2020 untuk diselaraskan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan beberapa peraturan lainnya yang relevan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, dan wajar, serta akuntabel.

Prosedur dan Tata Cara Pengadaan

Perusahaan memiliki prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan secara efektif, efisien dan transparan, dengan menerapkan prinsip GCG tanpa adanya benturan kepentingan dalam prosesnya. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkup Perusahaan. Adapun Kebijakan umum dalam pengadaan Barang/Jasa antara lain:

In fulfilling work program, the Company has policy regarding the Procurement of Goods and Services which is the main reference for all Procurement of Goods and Services activities carried out. Strategy and planning for the procurement of goods and services uses short-term and long-term plans for programs at ITDC as reference.

The process of procuring goods and services always takes into account the quality, delivery time, and price of qualified providers of goods and services (*vendors*) and is conducted through procurement strategies and planning that are effective, efficient, and also comply with applicable laws and regulations. Furthermore, the Company divides and classifies types of procurement work according to the system, methods, and implementation of each procurement, before finally carrying out the process of selecting goods/service providers which is implemented efficiently, transparently and accountably.

The ITDC Goods and Services Procurement Guidelines were last updated in 2020 to be aligned with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 dated December 12, 2019 concerning General Guidelines for Implementing the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises and several other relevant regulations. This is intended so that goods and services procurement activities carried out by the Company can meet business needs while still paying attention to the principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, and reasonableness, as well as accountability.

Procurement Procedures and Methods

The Company has procedures and methods for procurement of goods and services which are implemented effectively, efficiently, and transparently, by fulfilling GCG principles without any conflict of interest in the process. This is as regulated in the policy regarding the procurement of goods and services within the Company. The general policies in the procurement of goods/services include:



1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang/Jasa untuk mengoptimalkan *value for money*;
2. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan;
3. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
4. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri;
5. Memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil;
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
7. Memanfaatkan Teknologi Informasi;
8. Memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan/atau sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN;
9. Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/atau
10. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko;
11. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa terjadi selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan yang dalam perjalanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan. Selain itu, pelaksanaan pengadaan dilakukan secara strategis, modern dan inovatif, serta memanfaatkan Teknologi Informasi.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pada perusahaan senantiasa berdasar kepada prinsip-prinsip pengadaan yang wajib untuk diterapkan oleh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula pada prosedur pengadaan barang dan jasa, pihak-pihak yang terkait tersebut menerapkannya sebagai kebijakan perusahaan. Secara garis besar tahapan proses pengadaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Tahapan perencanaan kebutuhan Barang/Jasa,
2. Tahapan pemilihan penyedia Barang/Jasa,
3. Tahapan pelaksanaan dan penerimaan Barang/Jasa.

Dalam hal pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung, Pengadaan Langsung, Pengadaan Barang/Jasa Khusus, Swakelola, *Repeat*

1. Improving quality of consolidative planning and Goods/Services Procurement strategies to optimize value for money;
2. Align procurement objectives with achieving company goals;
3. Implementing more transparent, competitive and accountable procurement of goods/services;
4. Prioritize domestic products in accordance with the provisions for utilizing domestic production;
5. Providing opportunities for national businesses and small businesses;
6. Strengthening institutional capacity and Human Resources for Procurement of Goods/Services;
7. Utilizing Information Technology;
8. Providing opportunities for subsidiaries and/or synergies between SOEs/Subsidiaries/SOEs Affiliated Companies;
9. Carrying out strategic, modern, innovative procurement; and/or
10. Strengthen procurement performance measurement and risk management;
11. The implementation of the procurement process for goods and services occurs in line with the achievement of company objectives which are carried out based on procurement principles. Apart from that, procurement is carried out strategically, modernly and innovatively, and utilizes Information Technology.

Goods and Services Procurement Process

Implementation of procurement process for goods and services in the company is always based on procurement principles which must be implemented by parties involved directly or indirectly. Likewise, in the procedures for procuring goods and services, the parties involved apply them as company policy. In general, the stages of the procurement process are divided into 3 (three):

1. Stage of planning the need for goods/services,
2. Stage of selecting goods/services providers,
3. Stage of implementation and receipt of goods/services.

In terms of selecting Goods/Services Providers, it can be done using several methods, namely Public Auction, Limited Auction, Direct Appointment, Direct Selection, Direct Procurement, Special Goods/Services Procurement, Self-Management, Repeat

Order, Pengadaan Kondisi Darurat serta Pengadaan Barang dan Jasa dengan sistem e-Procurement. Pemilihan metode pengadaan hal yang sangat penting untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini ITDC telah mulai memaksimalkan penggunaan dan penerapan Teknologi Informasi yaitu sistem e-Procurement yang diintegrasikan dengan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Integrasi sistem ini telah dilaksanakan antara sistem e-Procurement dengan sistem ERP *Procurement* dan juga integrasi antara sistem ERP *Procurement* dengan sistem ERP Keuangan. Dengan ketersediaan sistem maupun integrasinya tersebut dapat memudahkan dalam proses persetujuan penggunaan anggaran, kontrol penerimaan barang/jasa hingga proses validasi pembayaran.

Ini membuktikan bahwa, ITDC berusaha untuk terus mengikuti *best practice* di dunia usaha sehingga dapat memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan dapat mengelola risiko dengan meminimalisir terjadinya kesalahan yang diakibatkan oleh manusia (*human error*) sehingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan pencapaian prinsip *value for money*. Tidak hanya terbatas pada hal tersebut, ITDC juga sangat peduli terhadap pertumbuhan industri dalam negeri, sehingga dalam proses pengadaan barang dan jasa ITDC mendorong penggunaan produksi dalam negeri dan pelibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta ikut berpartisipasi untuk pengadaan barang pada marketplace UMKM yang dibangun oleh Kementerian BUMN yaitu Pasar Ditigal (PaDi) UMKM.

Hal lain yang dilakukan sebelum memilih penyedia barang/jasa adalah dengan melakukan proses Kualifikasi terhadap penyedia barang dan jasa baik dengan cara Prakualifikasi atau Pascakualifikasi. Proses kualifikasi ini bertujuan untuk menentukan kompetensi dan kemampuan penyedia yang saat ini telah dapat diakomodir dengan memanfaatkan *Vendor Management System* (VMS) yang merupakan salah satu sub bagian dari sistem e-Procurement.

Order, Emergency Condition Procurement and Goods and Services Procurement using the system e-Procurement. Choosing procurement method is very important to obtain goods or services needed in accordance with the requirements.

In this regard, currently ITDC has begun to maximize the use and implementation of Information Technology, namely the e-Procurement system which is integrated with the Enterprise Resource Planning (ERP) system in the process of implementing the procurement of goods and services. This system integration has been implemented between the e-Procurement system and the ERP *Procurement* system and also integration between the ERP *Procurement* system and the ERP Finance system. With availability of the system and its integration, it can facilitate the process of approving budget use, controlling the receipt of goods/services and even the payment validation process.

This proves that ITDC strives to continue to follow best practices in the business world so that it can strengthen procurement performance measurements and can manage risks by minimizing the occurrence of errors caused by humans (*human error*), hence in the end it can optimize the achievement of value for money principle. Not only limited to this, ITDC also pays attention on the growth of domestic industry, so that in the process of procuring goods and services ITDC encourages the use of domestic production and the involvement of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and participates in procuring goods in the MSME marketplace which was built by the Ministry of BUMN, namely the UMKM Ditigal Market (PaDi).

Another thing carried out before selecting goods/services provider is to conduct qualification process for goods and services providers either by pre-qualification or post-qualification. This qualification process aims to determine the competence and capabilities of providers which can currently be accommodated by utilizing the Vendor Management System (VMS) which is a sub-part of the e-Procurement system.



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) merupakan suatu wadah atau media bagi seseorang untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi ataupun tindakan pelanggaran yang terjadi dalam Perusahaan. Sistem ini berfungsi untuk mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perusahaan dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan ITDC.

Sebagai salah satu bentuk komitmen penerapan GCG, Perusahaan membangun mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran atau WBS. Penerapan WBS bermanfaat untuk pengembangan sistem pelaporan pelanggaran yang terkelola dengan baik, yang dapat menjadi fondasi bagi Perusahaan untuk merancang evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan. WBS juga menjadi bagian dari mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat sebuah pelanggaran. Bagi pelapor, WBS memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas.

Sebagai wujud dari kesadaran dan sifat antisipatif Perusahaan terhadap kebutuhan pengembangan etika dan perilaku bersih, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengambil prakarsa dengan menetapkan Surat Keputusan Bersama tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran yang telah diperbarui melalui SK Dekom Nomor:KEP/DEKOM/XII/2020 dan SK Direksi Nomor 030.1/SK/ITDC.01/XII/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran PT Pengembangan Pariwisata Indonesia pada tanggal 28 Desember 2020.

Penetapan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi di perusahaan melalui pihak eksternal maupun internal perusahaan. Fraud yang dilakukan insan ITDC dapat mengakibatkan kerugian dan mempengaruhi citra (*image*) Perusahaan yang berdampak terhadap produktivitas kerja jajaran maupun kelangsungan usaha secara keseluruhan. Manajemen ITDC

Violation reporting system or whistleblowing system (WBS) is a forum or medium for someone to convey information regarding indications or acts of violations that occur within the Company. This system functions to manage complaints/disclosures regarding unlawful behavior, unethical/improper acts in a confidential, anonymous and independent manner which is used to optimize the participation of Company Personnel and work partners in disclosing violations that occur within the ITDC environment.

As a form of commitment to implementing GCG, the Company has built a Violation Reporting System or WBS mechanism. The implementation of WBS is useful for developing a well-managed violation reporting system, which can be a foundation for the Company to design the necessary evaluation and follow-up. WBS is also part of an early detection mechanism (early warning system) for possible problems resulting from a violation. For whistleblowers, WBS guarantees protection and confidentiality of identity.

As a manifestation of the Company's awareness and anticipatory nature towards the need to develop ethics and clean behavior, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors took the initiative by establishing a Joint Decree regarding the Violation Reporting System which has been updated through Decree of the Board of Commissioners No:KEP/DEKOM/XII/2020 and Decree of the Board of Directors No. 030.1/SK/ITDC.01/XII/2020 concerning the Violation Reporting System of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia on December 28, 2020.

Determination of Violation Reporting System Guidelines

Fraud can occur in company through external or internal parties. Fraud committed by ITDC personnel can result in losses and affect the company's image, which has impact on staff work productivity and overall business continuity. ITDC management encourages ITDC personnel to play active role in preventing and even eradicating fraud together

mendorong insan ITDC untuk berperan aktif mencegah bahkan memberantas fraud secara bersama-sama melalui komitmen bersama bahwa “fraud adalah musuh ITDC”.

Wujud keseriusan ITDC memberantas fraud adalah dengan ditetapkannya Keputusan bersama Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sebagai sarana untuk melaporkan setiap menemukan dan melihat perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh jajaran ITDC, yang dirancang sebagai sarana pelaporan yang bersifat confidential sehingga memudahkan jajaran ITDC melaporkan setiap kejadian internal fraud tanpa harus merasa takut, karena kerahasiaannya terjaga.

Pengelola Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran di ITDC dikelola oleh Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran dan penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh karyawan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan/ Direksi/Komisaris/Organ Komisaris (TP2DK).

Ruang Lingkup Pelanggaran yang dapat Dilaporkan

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, standar prosedur operasi, kebijakan, kode etik, dan lainnya. Aktivitas yang termasuk dalam kategori pelanggaran meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. Melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
2. Melanggar pedoman kode etik.
3. Melanggar prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional, ataupun kebijakan, prosedur dan peraturan lain yang relevan dengan Perusahaan.
5. Menyalahkan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan/kelompok.
6. Melakukan ketidakberesan tindakan (*irregularity*), seperti pemalsuan dokumen, sumber daya, serta penggunaan yang tak berdasarkan otorisasi atau penyalahgunaan aset tetap, mesin dan peralatan kantor atau catatan/pembukuan administrasi kantor.

through shared commitment that “fraud is the enemy of ITDC.”

A manifestation of ITDC’s seriousness in eradicating fraud is the establishment of joint decision on the Violation Reporting System (Whistleblowing System) of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia as a means to report any fraud found and seen committed by ITDC staff, which is designed as a means of confidential reporting making it easier ITDC staff report every incident of internal fraud without having to feel afraid, because confidentiality is maintained.

Whistleblowing System Management

The Violation Reporting System at ITDC is managed by the Violation Reporting Management Committee and further handling of violation reports, especially those committed by employees, is carried out by the Employee/Board of Directors/ Board of Commissioners/Organ of Commissioners Disciplinary Violation Examination Team (TP2DK).

Scope of Reportable Violations

Violation is actions that violate statutory regulations, standard operating procedures, policies, codes of ethics, and others. Activities that fall into the violation category include, but are not limited to:

1. Violate statutory regulations, for example committing general crimes and special crimes.
2. Violate code of conduct guidelines.
3. Violate the principles of applicable Financial Accounting Standards.
4. Violate operational policies and procedures, or other policies, procedures and regulations relevant to the Company.
5. Blame authority or position for personal, family and/or class/group interests.
6. Carry out irregularities, such as falsifying documents, resources, as well as unauthorized use or misuse of fixed assets, office machines and equipment or office administration records/ bookkeeping.



7. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau pun *non-finansial* Perusahaan.
8. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.
9. Gratifikasi, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Benturan kepentingan yang diduga dapat menimbulkan dampak merugikan bagi Perusahaan.

7. Other fraudulent acts that could cause financial or non-financial losses to the Company.
8. Actions that endanger work safety.
9. Gratification, as regulated in statutory regulations.
10. Any alleged conflict of interest could have a detrimental impact on the Company.

Media Pelaporan

Apabila terjadi dugaan pelanggaran atau dugaan penyimpangan maka pelapor dapat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kepada Perusahaan melalui media yang telah disediakan oleh Perusahaan, yakni:

Reporting Media

For any alleged violation or suspected irregularity, the whistleblower can submit complaint of the alleged violation to the Company through media provided by the Company:

Layanan Pengaduan/Complaint Service
Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran/Violation Complaint Management Committee
 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
 Kawasan Pariwisata Nusa Dua
 P.O BOX 3 Nusa Dua, 80363, Bali-Indonesia
 E-mail: whistle.blowing@itdc.co.id

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan pengaduan yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan Pengaduan Pelanggaran dalam waktu 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Namun, apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.

The Violation Complaint Management Committee verifies incoming complaint reports and will decide whether or not further investigation into the Violation Complaint report is necessary within 30 days and can be extended by a maximum of 30 days. If verification results show that the complaint report is incorrect and there is insufficient initial evidence, it will not be processed further. However, if the verification result show indication of violation accompanied by sufficient initial evidence, then the complaint can be processed to the investigation stage.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan, Perusahaan memberikan dorongan agar setiap Insan ITDC dapat dengan cepat melaporkan segala bentuk pelanggaran melalui sistem pelaporan melalui sosialisasi *Whistleblowing System* dengan berbagai cara secara berkesinambungan. Salah satu upaya yang

Socialization of the Violation Reporting System

In an effort to create a clean and transparent work environment, the Company provides encouragement so that every ITDC Personnel can quickly report all forms of violations through reporting system through socialization of the Whistleblowing System in various ways on an ongoing basis. One of the efforts made by the Company is to increase

dilakukan Perusahaan meningkatkan pemahaman Insan Perusahaan atas Pedoman Etika dan Perilaku ITDC.

Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Laporan Pelanggaran

1. Pihak pelapor yang mengetahui adanya tindakan kecurangan, penyimpangan atau pelanggaran oleh insan ITDC (Persero) membuat laporan/menyampaikan kepada tim pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing*) yang dilakukan secara rinci/detail dengan disertai data atau bukti yang relevan melalui saluran pelaporan yang telah disiapkan.
2. Pelapor pelanggaran (*Whistleblowing*) yang diduga dilakukan oleh karyawan ditujukan kepada SPI. Administrasi Tim Pelapor Pelanggaran (*Whistleblowing*) akan menerima, meregistrasi & meneruskan pelaporan pelanggaran (sesuai dengan jalur yang ditentukan). Apabila penerima pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing*) di luar jalur yang ditentukan maka berkewajiban untuk meneruskan sesuai dengan jalur pelaporan yang ditetapkan Admin pelaporan pelanggaran bertanggung jawab atas kerahasiaan identitas pelapor.
3. Apabila hasil investigasi menyimpulkan pengaduan yang disampaikan mengandung unsur itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur fitnah, tanpa dasar/bukti yang jelas, maka pelapor tersebut dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perusahaan berkewajiban mengembalikan nama baik atau rehabilitasi terhadap terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan telah mengatur kewajiban untuk melindungi pelapor, meliputi:

1. Kerahasiaan identitas pelapor;
2. Segala bentuk ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, pemecatan, penurunan jabatan serta catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diajukan kepada pihak manapun;
3. Jaminan kerahasiaan identitas Terlapor sampai terbukti kesalahannya;
4. Informasi mengenai proses tindak lanjut yang sedang dilakukan;
5. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.

Company Personnel's understanding of the ITDC Ethics and Behavior Guidelines.

Mechanism for Submitting and Handling Violation Reports

1. The reporting party who is aware of any act of fraud, deviation or violation by ITDC (Persero) personnel makes a report/submits it to the violation reporting team (Whistleblowing) which is carried out in detail, accompanied by relevant data or evidence through the reporting channels that have been prepared.
2. Reporting violation (Whistleblowing) allegedly committed by employees is addressed to SPI. The Administration of the Whistleblowing Team will receive, register & forward the violation report (according to the specified route). If the recipient of the whistleblowing report is outside the specified route, they are obliged to continue according to the specified reporting route. The violation reporting admin is responsible for confidentiality of the whistleblower's identity.
3. If result of the investigation conclude that the complaint submitted contains elements of bad faith, conveys false evidence, contains elements of slander, without clear basis/evidence, then the whistleblower can be sued or subject to sanctions in accordance with applicable regulations.
4. The Company is obliged to restore the good name or rehabilitation of the reported party who is not proven to have committed a violation.

Protection for Whistleblower

The Company has set obligations to protect whistleblower, including:

1. Confidentiality of the identity of whistleblower;
2. All forms of threats, intimidation or unpleasant actions from any party, dismissal, demotion and detrimental entries in his/her personal data file as long as the whistleblower maintains the confidentiality of violation being complained of to any party;
3. Guarantee of confidentiality of the identity of the Reported Party until proven guilty;
4. Information regarding follow-up process being carried out;
5. Protection for Whistleblower also applies to parties carrying out investigations and parties providing information related to the Complaint.



Meski demikian, kebijakan tersebut tidak diberikan kepada Pelapor yang terbukti memberikan laporan palsu dan/atau fitnah, yang dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi bagi Pelanggar

Seluruh Insan Perusahaan, termasuk pengelola SPP, wajib memberikan perlindungan kepada pelapor maupun keluarganya dari potensi terjadinya pembalasan, tekanan atau ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi maupun penuntutan hukum. pelapor akan mendapat perlindungan balasan terhadap perlakuan yang merugikan antara lain seperti:

1. Penurunan jabatan atau pangkat.
2. Penundaan kenaikan pangkat.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala dan/atau tunjangan.
4. Pemutasian yang tidak adil.
5. Pemecatan yang tidak adil.
6. Pengenaan sanksi baik langsung maupun tidak langsung.
7. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya.
8. Intimidasi, pemaksaan atau menjadikan korban.
9. Catatan yang merugikan dalam arsip/file data pribadi atau kepegawaian pelapor.

Jumlah Pengaduan Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya

Jumlah pengaduan yang diterima melalui mekanisme WBS oleh Perusahaan, baik dari kalangan internal maupun eksternal per 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian Description	Jumlah Amount	Jenis Pelanggaran Violation Type
Jumlah pengaduan yang masuk Number of complaints received	Nihil None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang diproses Number of complaints processed	Nihil None	Nihil None
Komposisi pengaduan yang masuk dan yang diproses Composition of incoming and processed complaints	Nihil None	Nihil None

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan pada Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak mendapat adanya laporan pengaduan yang masuk ke mekanisme WBS ITDC. Dengan demikian, Perusahaan tidak melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut.

However, this policy is not provided to Whistleblower who proven to have provided false report and/or slander, which can be subject to sanction in accordance with applicable laws and regulations.

Sanction for Violator

All Company Personnel, including SPP management, are obliged to provide protection to the whistleblower and his/her family from potential retaliation, pressure, or threats whether physical, psychological, administrative, or legal prosecution. Whistleblower will receive retaliatory protection against detrimental treatment, including:

1. Reduction of position or rank.
2. Postponement of promotion.
3. Postponement of periodic salary increases and/or allowances.
4. Unfair transfer.
5. Unfair dismissal.
6. Imposition of sanctions, both direct and indirect.
7. Harassment or discrimination in any form.
8. Intimidation, coercion or victimization.
9. Adverse records in the file/personal data files or personnel of the whistleblower.

Number of Complaints in 2023 and Follow-up

The number of complaints received through the WBS mechanism by the Company, both from internal and external circles as of December 31, 2023 can be seen as follows:

Sanctions/Follow-up for Complaints in 2023

In 2023, the Company did not receive any complaint reports submitted to the ITDC WBS mechanism. Thus, the Company did not conduct any follow-up related to this matter.

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Policy Regarding Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perusahaan.

Perusahaan tidak memiliki kebijakan tertulis dan formal terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi harus dibuat sedemikian rupa agar proses pengambilan keputusan dapat diperkaya melalui berbagai sudut pandang dan latar belakang serta pengalaman dan keahlian.

The diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is part of the Company's efforts to encourage decision-making process that is more objective, comprehensive, optimal, and has positive impact on the supervision and management of the Company. It is expected that this diversity can enrich viewpoints and interests in the decision-making process within both the Board of Commissioners and the Board of Directors, so as to provide added value to the Company's operational and business aspects, as well as the implementation of Corporate Governance within the Company.

The Company does not have written and formal policy regarding diversity of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors. However, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors must be made in such a way that the decision-making process can be enriched through various points of view and backgrounds as well as experience and expertise.



Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi ITDC

Diversity in the Composition of the ITDC Board of Commissioners and Board of Directors

Nama dan Jabatan Name	Kewarganegaraan Nationality	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Education Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Ricky Joseph Pesik Komisaris Utama President Commissioner	Indonesia	Diploma Diploma	Diploma Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Institut Teknologi Bandung (1986-1989) Diploma in Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences from the Bandung Institute of Technology (1986-1989)	Ricky Joseph Pesik merupakan praktisi periklanan dan memiliki pengalaman panjang dalam industri komunikasi dan konten. Dalam kurun waktu 2002-2015, perusahaan yang dipimpinnya di bidang periklanan, meraih puluhan kali penghargaan Citra Pariwara. Secara individu, dalam kapasitasnya sebagai Copywriter, Creative Director, maupun sebagai Strategic Planner, ia meraih penghargaan sebagai Penulis Naskah Iklan Terbaik pada Citra Pariwara (2002) dan Penulis Iklan Televisi Favorit Pemirsa dari SCTV (2003). Dalam skala internasional Ricky Joseph Pesik dipercaya sebagai Vice- Chairman/ Conference Experience Director Asia Pacific Media Forum (2014), menjadi juri Spikes Asia di Singapura (2010 dan 2014) dan juri Cannes Lions International Advertising Festival di Cannes, Perancis (2012). Selanjutnya, dipercaya menjabat Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif pada 27 Juli 2015-25 Oktober 2019, sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap Pengawas Independen Perusahaan Umum Produksi Film Negara atau Perum PFN. Ricky Joseph Pesik is an advertising practitioner and has long experience in the communication and content industry. In the 2002-2015 period, the company he led in advertising sector won dozens of Citra Pariwara awards. Individually, in his capacity as Copywriter, Creative Director, and as Strategic Planner, he won awards as Best Advertising Script Writer for Citra Pariwara (2002) and Viewers' Favorite Television Commercial Writer from SCTV (2003). On international scale, Ricky Joseph Pesik was trusted as Vice-Chairman/Conference Experience Director of the Asia Pacific Media Forum (2014), was a judge for Spikes Asia in Singapore (2010 and 2014) and judge for the Cannes Lions International Advertising Festival in Cannes, France (2012). Furthermore, he was trusted to serve as Deputy Head of the Creative Economy Agency from July 27, 2015-October 25, 2019, as Chairman of the Supervisory Board and concurrently Independent Supervisor of the State Film Production Public Company or Perum PFN.	57	Laki-laki Male

Nama dan Jabatan Name	Kewarganegaraan Nationality	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Education Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
H. Irzani, M.Pd, M.Si Komisaris Commissioner	Indonesia	Magister (S2) Master	Magister Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (2010) Master of Education Management from Yogyakarta State University (2010)	Karirnya dimulai pada tahun 1996 sebagai Guru/Wakil Kesiswaan pada MA NW Pancor hingga tahun 2001. Ia juga bekerja bersama institusi Internasional yaitu University Network for Free and Fair Election (UNFREL) sebagai Presidium NTB (1998-2001) dan di United Nation Development Programme (UNDP) Partnership sebagai Local Expert (2002-2004). Ia kemudian menjadi Dosen di STKIP Hamzanwadi Selong (2004-2010) sekaligus menjadi Dosen di IKIP Mataram (2007-2013) dan Dosen di UIN Mataram (2004-2018). Dia sempat bertugas menjadi Sekretaris Dewan Riset Daerah NTB (2012-2017), Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon (PWNW) NTB (2012-sekarang) dan Wakil Sekretaris MUI NTB (2012-2017). Ia juga dipercaya sebagai Ketua Tim Penyelaras Kebijakan Gubernur NTB (2013-sekarang) dan Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Muslimat Nahdlatul Wathon (NW) NTB (2017) serta sebagai Dewan Pakar KNPI NTB (2017-sekarang). His career began in 1996 as Teacher/Student Representative at MA NW Pancor until 2001. He also worked with international institutions, namely the University Network for Free and Fair Election (UNFREL) as NTB Presidium (1998-2001) and at the United Nation Development Program (1998-2001). UNDP) Partnership as Local Expert (2002-2004). He then became a lecturer at STKIP Hamzanwadi Selong (2004-2010) as well as a lecturer at IKIP Mataram (2007-2013) and a lecturer at UIN Mataram (2004-2018). He served as Secretary of the NTB Regional Research Council (2012-2017), General Secretary of the NTB Nahdlatul Wathon (PWNW) Regional Management (2012-present) and Deputy Secretary of the NTB MUI (2012-2017). He is also trusted as Chair of the NTB Governor's Policy Alignment Team (2013-present) and General Chair of the NTB Muslimat Nahdlatul Wathon (NW) Education Development Foundation (2017) as well as on the NTB KNPI Expert Council (2017-present).	47	Laki-laki Male



Nama dan Jabatan Name	Kewarganegaraan Nationality	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Education Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Ir. Zainal Mutaqin, MM Komisaris Commissioner	Indonesia	Magister (S2) Master	Magister bidang Pemasaran dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) IPWI Jakarta (1998) Master in Marketing from the IPWI Jakarta College of Economics (STIE) (1998)	Ia memiliki karir panjang di BKPM, sejak menjabat sebagai Kasubag Pengawasan pada 1992 dan berbagai posisi Kepala Sub-Bagian, termasuk Kasubag Promosi Dalam Negeri (1996-1999), Promosi Luar Negeri (1999-2001), Penilaian Aplikasi (2002-2003), Aneka Industri (2004-2006), dan Promosi Kawasan Barat (2006-2008). Selanjutnya ia diangkat menjadi Kepala Bagian Penyusunan Program pada 2009-2012, Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran (2012-2018), dan Kepala Biro Umum (2018-2019), sebelum dipercaya menjadi Direktur Perencanaan Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya BKPM sejak 2019. He has had a long career at BKPM, since serving as Head of Supervision Subdivision in 1992 and various Sub-Section Head positions, including Head of Domestic Promotion Subdivision (1996-1999), Overseas Promotion (1999-2001), Application Assessment (2002-2003), Various Industries (2004-2006), and Promotion of the Western Region (2006-2008). Subsequently he was appointed Head of the Program Preparation Section in 2009-2012, Head of the Program Planning and Budget Bureau (2012-2018), and Head of the General Bureau (2018-2019), before being trusted to become Director of Agribusiness and Other Natural Resources Planning at BKPM since 2019.	62	Laki-laki Male
Ulin Ni'am Yusron Komisaris Independent Commissioner	Indonesia	Magister (S2) Master	Pascasarjana Penciptaan Seni dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ) (2021) Postgraduate Art Creation from the Jakarta Arts Institute (IKJ) (2021)	Ia memulai karir sebagai wartawan di Mingguana Ekonomi dan Bisnis KONTAN (sampai tahun 2008), kemudian mendirikan situs Beritasatu.com (sampai 2013). Ia juga sempat menggeluti dunia private investigation dan menjadi konsultan beberapa media online (2009-2013). Ia pernah menulis beberapa buku dan masih aktif menulis di beberapa media mengenai topik politik, media sosial dan dunia seni. Ia kini aktif menjadi penggiat media sosial dan vlogger dengan nama vlog #Jalania-Jalan-jalan Ceria di kanal Youtube. He started his career as journalist at KONTAN Economic and Business Weekly (until 2008), then founded the Beritasatu.com site (until 2013). He also worked in the world of private investigation and became a consultant for several online media (2009-2013). He has written several books and is still active in writing in several media on political topics, social media and the world of art. He is now active as a social media activist and vlogger with the vlog name #Jalania-Jalan-jalan Ceria on the YouTube channel.	48	Laki-laki Male

Nama dan Jabatan Name	Kewarganegaraan Nationality	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Education Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Direksi Board of Directors						
Ari Respati Direktur Utama President Director	Indonesia	Magister (S2) Master	Master of Science - Property Management, Arizona State University (2000)	Ia memulai karirnya sebagai Project Officer di sebuah perusahaan konstruksi di Amerika Serikat kemudian berlanjut sebagai Pengembang Bisnis di banyak proyek. Karir profesionalnya di bidang operasional hotel dimulai dari Sales Manager hingga General Manager di Hilton International, Santika Group, dan Holiday Inn di bawah InterContinental Hotels Group (IHG). Pada tahun 2015, Ari Respati memulai perjalanannya dalam berwirausaha dan memiliki hotel butik perkotaan YATS Colony yang terkenal di Yogyakarta. Ia merupakan pendiri perusahaan Konsultasi dan Manajemen Perhotelan bernama AR Hospitality (ARH), yang telah berkontribusi bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan di Indonesia. He started his career as Project Officer at construction company in the United States and then continued as Business Developer on many projects. His professional career in hotel operations started from Sales Manager to General Manager at Hilton International, Santika Group, and Holiday Inn under the InterContinental Hotels Group (IHG). In 2015, Ari Respati began his entrepreneurial journey and owned the famous urban boutique hotel YATS Colony in Yogyakarta. He is the founder of a Hospitality Consulting and Management company called AR Hospitality (ARH), which has contributed to the growth of tourism and hospitality sector in Indonesia.	49	Laki-laki Male
Ahmad Fajar Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Strategy, and Risk Management	Indonesia	Magister (S2) Master	Magister Manajemen - Manajemen Keuangan di Universitas Padjadjaran (2000) Master of Management - Financial Management at Padjadjaran University (2000)	Karir profesionalnya diawali dengan menjadi Manager Foreign Exchange Trader di Bank Bumi Daya (1992-1998), selanjutnya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Funding Manager (1998-2000), Senior Manager Head of Portfolio Investment (2000-2003), sampai menjadi Vice President Head of Debt & Capital Market (2004-2008). Ia kemudian mendapat penugasan dari Bank Mandiri sebagai Direktur di Bank Century (yang menjadi Bank Mutiara) dan selanjutnya sebagai Managing Director di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2008-2013). Karir berlanjut di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagai President Director (2014-2016) dan Komisaris (2017-2018). Ia kemudian menjadi Senior Advisor di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) (2017-2018) dan terakhir menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Victoria International Tbk (2018-2022). His professional career began with being a Foreign Exchange Trader Manager at Bank Bumi Daya (1992-1998), then at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Funding Manager (1998-2000), Senior Manager Head of Portfolio Investment (2000-2003), until became Vice President Head of Debt & Capital Market (2004-2008). He then received assignment from Bank Mandiri as Director at Century Bank (which became Bank Mutiara) and then as Managing Director at PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2008-2013). His career continued at PT Bank JTrust Indonesia Tbk as President Director (2014-2016) and Commissioner (2017-2018). He then became a Senior Advisor at the Indonesian Banking Development Institute (LPPI) (2017-2018) and most recently served as President Director of PT Bank Victoria International Tbk (2018-2022).	56	Laki-laki Male



Nama dan Jabatan Name	Kewarganegaraan Nationality	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Education Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Wenda Ramadya Nabel Direktur SDM dan Legal Compliance Director of HR and Legal Compliance	Indonesia	Magister (S2) Master	Master of Science – Human Resource Management, University of East London (1999)	Ia memulai karirnya sebagai HRD Coordinator di Toys R Us (2000-2002), HR Project Specialist di Thiess (2003-2004), Assistant Vice President Employee and Industrial Relations di HSBC (2004-2012), sebelum menjadi VP Employee & Industrial Relations Partner di Manulife (2012-2016) dan sempat menjadi pejabat caretaker Chief of Human Resources Officer di Manulife (2014-2015). Setelahnya, ia menjadi SVP and Head Human Capital Business Partner di Bank Muamalat Indonesia Tbk (2016-2018) dan Executive Director di Muamalat Institute (2018-2019). Sebelum bergabung di ITDC, ia menjabat sebagai Head of Human Resources di Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) (2020-2022). He started his career as HR Coordinator at Toys R Us (2000-2002), HR Project Specialist at Thiess (2003-2004), Assistant Vice President Employee and Industrial Relations at HSBC (2004-2012), before becoming VP Employee & Industrial Relations Partner at Manulife (2012-2016) and served as caretaker Chief of Human Resources Officer at Manulife (2014-2015). After that, he became SVP and Head Human Capital Business Partner at Bank Muamalat Indonesia Tbk (2016-2018) and Executive Director at the Muamalat Institute (2018-2019). Before joining ITDC, he served as Head of Human Resources at Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) (2020-2022).	49	Laki-laki Male
Ema Widiastuti Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development	Indonesia	Doktor (PhD) Doctor	PhD Candidate in Strategic Management, University at Albany (2007)	Ia memulai karirnya sebagai Operation Analyst and Director of Sales and Marketing di Hyatt Regency Yogyakarta (2011-2015), lalu CEO pada PT Gantari Prama Perspektif (GP Perspektif) (2015-2019). Bergabung dengan ITDC pada 2019 sebagai Kepala Divisi Pengembangan/Business Development Head, sebelum penunjukan sebagai Direktur Pengembangan ITDC. She started her career as an Operation Analyst and Director of Sales and Marketing at Hyatt Regency Yogyakarta (2011-2015), then CEO at PT Gantari Prama Perspektif (GP Perspektif) (2015-2019). Joined ITDC in 2019 as Head of Development Division/Business Development Head, before being appointed as ITDC Development Director.	51	Perempuan Female

Nama dan Jabatan Name	Kewarganegaraan Nationality	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Education Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Troy Reza Warokka Direktur Operasi Director of Operation	Indonesia	Sarjana (S1) Bachelor	Sarjana Ekonomi, STIE Perbanas (1998) Bachelor of Economics, STIE Perbanas (1998)	Ia memulai karir profesionalnya sebagai jurnalis di PT Era Media Global (1998-1999). Kemudian melanjutkan karirnya sebagai Assistant PR Manager di PT Binareksa Ekajaya (1999-2002), PR Coordinator 101 FM Radio One Jakarta (2001-2005) dan Chief Marketing Officer (CMO) di PT Avabanindo Perkasa (Mahaka Advertising) (2005-2007), sebelum bergabung di PT Mahaka Media Tbk sebagai Executive Vice President Inspire (2005-2019). Ia menjabat sebagai Direktur di PT Mahaka Media Tbk (2019-2022) dan Direktur PT Akasia Damcorp Waba (2021-2022), sebelum ditunjuk sebagai Direktur Operasi ITDC. He started his professional career as journalist at PT Era Media Global (1998-1999). Then continued his career as Assistant PR Manager at PT Binareksa Ekajaya (1999-2002), PR Coordinator 101 FM Radio One Jakarta (2001-2005) and Chief Marketing Officer (CMO) at PT Avabanindo Perkasa (Mahaka Advertising) (2005-2007), before joining PT Mahaka Media Tbk as Executive Vice President of Inspire (2005-2019). He served as Director at PT Mahaka Media Tbk (2019-2022) and Director of PT Akasia Damcorp Waba (2021-2022), before being appointed as ITDC Operation Director.	52	Laki-laki Male

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Di tahun 2023, Perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan yang terdiri dari Pajak PPh Badan sebesar “Nihil” dimana status SPT Badan “Rugi Fiskal”, Pajak PPh 21 sebesar Rp13.049.847.381, dan Pajak Final 4 ayat 2 sebesar Rp10.924.157.179.

Disclosure of Fulfillment of Tax Obligation

In 2023, the Company has fulfilled its tax obligations consisting of Corporate Income Tax of “Nil” where the status of Corporate Income Tax Return is “Fiscal Loss”, Income Tax 21 of Rp13,049,847,381, and Final Tax 4 paragraph 2 of Rp10,924,157,179.



Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency of Bad Governance Practices

Sesuai dengan komitmen Perseroan untuk menerapkan GCG, berikut adalah pengungkapan tindakan yang berkaitan dengan praktik *Bad Corporate Governance*:

In accordance with the Company's commitment to implementing GCG, the following is disclosure of actions related to Bad Corporate Governance practices:

Transparansi Praktik Bad Corporate Governance Tahun 2020-2023

Transparency of Bad Corporate Governance Practices 2020-2023

No	Praktik Practices	Tahun Year		
		2023	2022	2021
1	Aktivitas perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan Insider trading activities involving board of directors/commissioners, management and employees	X	X	X
2	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun Non-compliance in disclosing the fulfillment of tax obligations including a guilty verdict from the highest tax court regarding any tax issue	X	X	X
3	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Inconsistency in the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and SAK	X	X	X
4	Kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material Cases of non-compliance with laws, rules, and regulations relating to significant or material related party transactions	X	X	X
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan There is no disclosure of operating segments in the Financial Statements	X	X	X
6	Pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan Violation of any law relating to labor/employment/consumer/bankruptcy/commercial/competition or environmental issues	X	X	X
7	Sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting Sanctions from regulators for not making announcements within the timeframe specified for important events	X	X	X
8	Bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan Evidence that the company did not comply with any listing rules and regulations during the past year other than disclosure rules	X	X	X

V = ada/ exist
X = tidak ada/ none

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

ITDC senantiasa mengimplementasikan program TJSL secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan, serta pengelolaan dampak program TJSL sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian tujuan program TJSL BUMN.

ITDC consistently implementing Corporate Social Responsibility (CSR) programs in systematic and integrated manner to ensure the execution, achievement of success, and management of the impact of CSR programs in accordance with the priorities and/or achievement of the objectives of CSR programs of State-Owned Enterprises (SOEs).





07

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility Governance

Komitmen dan Kebijakan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

ITDC selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senantiasa menjalankan kegiatan usahanya untuk selalu selaras dengan visi Pemerintah. Dalam mewujudkan hal ini, Perusahaan memiliki peran untuk mewujudkan tanggung jawab sosial ke dalam seluruh lapisan, khususnya terkait peran BUMN sebagai agen pembangunan (*agent of development*).

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada BUMN merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Program ini juga merupakan kegiatan peran serta Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi Perusahaan.

ITDC senantiasa mengimplementasikan program TJSL secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan, serta pengelolaan dampak program TJSL sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian tujuan program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja. Sebagai bagian dari BUMN, ITDC berkomitmen untuk berperilaku transparan, etis, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.

Program TJSL Perusahaan senantiasa mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/03/2023, tanggal 26 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan juga peraturan lainnya yang masih berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, program TJSL ITDC berorientasi pada 4 (empat) pilar pembangunan, antara lain pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan memperhatikan prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) klaster BUMN jasa pariwisata dan pendukung, antara lain:

Commitment and Policy for Implementing Social and Environmental Responsibility Programs

As a State-Owned Enterprise (SOE), ITDC always aligns its business activities with the Government's vision. In realizing this, the Company plays a role in integrating social responsibility across all levels, particularly in the context of SOEs as agents of development.

The Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) in SOEs encompasses a series of activities carried out by the Company to support sustainable development. This program also represents the Company's participation in sustainable development by enhancing the quality of life and environment for the benefit of the general public and the Company.

ITDC consistently implements the TJSL program systematically and integratively to ensure execution, achievement of success, and management of the program's impact in accordance with the priorities and/or goals of the SOE TJSL program, guided by the work plan. As part of an SOE, ITDC is committed to acting transparently, ethically, and contributing to sustainable economic development, while improving the quality of life for its employees and their families, local communities, and society at large.

The Company's TJSL Program adheres to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/03/2023, dated March 26, 2023, concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises, as well as other applicable regulations. Based on these provisions, ITDC's TJSL program focuses on four (4) pillars of development: social, economic, environmental, and legal and governance, with attention to the priority Sustainable Development Goals (SDGs) for the tourism and supporting services SOE cluster, including:



TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
 TPB 8 : Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
 TPB 11 : Kota dan permukiman yang berkelanjutan
 TPB 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
 TPB 13 : Penanganan perubahan iklim
 TPB 16 : Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
 TPB 17 : Kemitraan untuk mencapai tujuan

SDG 3 : Good Health and Well-being
 SDG 8 : Decent Work and Economic Growth
 SDG 11 : Sustainable Cities and Communities
 SDG 12 : Responsible Consumption and Production
 SDG 13 : Climate Action
 SDG 16 : Peace, Justice, and Strong Institutions
 SDG 17 : Partnerships for the Goals

ITDC berupaya agar seluruh program TJSL yang dilaksanakan dapat dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat. Secara umum, program TJSL yang dijalankan oleh Perusahaan meliputi pengembangan sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, serta kesehatan dan peningkatan ekonomi melalui program pendanaan usaha mikro dan kecil (UMK) memberikan bantuan pinjaman berupa modal kerja dengan bunga yang relatif kecil kepada usaha kecil dan koperasi yang belum mempunyai akses perbankan, sehingga pengusaha kategori UMK mendapat tambahan modal untuk usahanya.

ITDC strives to ensure that all TJSL programs implemented have a positive impact on the community. Generally, the TJSL programs carried out by the Company include human resource development, environmental conservation, health, and economic enhancement through micro and small enterprise (UMK) funding programs. These programs provide working capital loans with relatively low interest rates to small businesses and cooperatives that do not yet have access to banking services, thereby providing additional capital for UMK entrepreneurs.

Uji Tuntas terhadap Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Kegiatan Perusahaan

Secara umum, uji tuntas atau *due diligence* merupakan sebuah proses yang komprehensif dalam menilai dampak positif dan negatif keputusan dan kegiatan perusahaan yang dapat memengaruhi lingkungan hidup, ekonomi, dan aspek sosial. Sebagai kelompok usaha yang peduli lingkungan sekitar, Perusahaan melaksanakan program TJSL memulainya dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan program harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan. Kemudian, pelaksanaan program dilakukan bersama masyarakat, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa dan Perguruan Tinggi, serta instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial budaya setempat, kondisi geografis dan kepentingan operasional Perusahaan. Dalam evaluasi program, Perusahaan melakukan pengukuran atas efektivitasnya program yang dijalankan agar dapat memberikan manfaat nyata dan nilai tambah, baik bagi Perusahaan sendiri maupun pemangku kepentingan yang disasar oleh program.

Due Diligence on the Social, Economic, and Environmental Impacts of Company Activities

In general, due diligence is a comprehensive process for assessing the positive and negative impacts of company decisions and activities that can affect the environment, economy, and social aspects. As a business group concerned with the surrounding environment, the Company implements the TJSL program from the planning stage to evaluation. Program planning must be made according to the actual needs of stakeholders, considering the Company's capabilities. Then, program implementation is carried out in collaboration with the community and coordinated with local governments, Non-Governmental Organizations (NGOs), mass organizations, universities, and other related agencies, taking into account local socio-cultural aspects, geographical conditions, and the Company's operational interests. In program evaluation, the Company measures the effectiveness of the programs implemented to provide tangible benefits and added value, both for the Company and the targeted stakeholders.

Stakeholder Penting yang Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Perusahaan

ITDC secara aktif berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat berpengaruh atau terdampak dari kegiatan usaha Perusahaan. ITDC telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terdampak atau berpengaruh berdasarkan tingkat kepentingan hubungan yang mempengaruhi kinerja Perusahaan, demikian juga sebaliknya. Perusahaan selalu berupaya untuk mengelola pelibatan para pemangku kepentingan guna meningkatkan nilai Perusahaan. Adapun daftar pemangku kepentingan yang berpengaruh atau terdampak dari kegiatan Perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Key Stakeholders Affected by or Influencing the Impact of Company Activities

ITDC actively interacts with various stakeholders, both directly and indirectly, who can influence or be affected by the Company's business activities. ITDC has identified stakeholders who are affected or influential based on the importance of relationships that affect the Company's performance, and vice versa. The Company always strives to manage stakeholder engagement to enhance Company value. The list of stakeholders who influence or are affected by the Company's activities can be outlined as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Definisi Definition	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Impact of Corporate Activities
Pemegang Saham Shareholder	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs)	Kinerja keuangan Perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran dividen yang diserahkan kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham The Company's financial performance will affect the amount of dividends paid to the Ministry of SOEs as the shareholder.
Karyawan Employee	Seluruh pekerja yang bekerja di Perusahaan All employees working in the Company	Kesinambungan Perusahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang The Company's sustainability impacts the long-term welfare of its employees.
Pemerintah Government	Pemerintah c.q Kementerian Keuangan Government, specifically the Ministry of Finance	Kinerja keuangan perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran pajak yang diserahkan kepada pemerintah sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk modal pembangunan The Company's financial performance will affect the amount of tax payments made to the government, which are used as state revenue for development capital.
Masyarakat Community	Masyarakat umum baik yang menggunakan produk-produk Perusahaan maupun tidak The general public, both those who use the Company's products and those who do not	Kegiatan bisnis Perusahaan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat baik melalui produk dan layanan maupun atas keberadaan Perusahaan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar The Company's business activities impact the quality of life in the community, both through its products and services and its presence, which can have a positive effect on the local economy.



Pemangku Kepentingan Stakeholder	Definisi Definition	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Impact of Corporate Activities
Konsumen/Pelanggan Customer	Para wisatawan baik domestik maupun asing Both domestic and foreign tourists	Kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada Konsumen akan berpengaruh terhadap loyalitas mereka dalam menggunakan produk dan layanan tersebut The quality of products and services provided to consumers will affect their loyalty in using these products and services.
Rekanan Partner	Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama, Proses Operasional Contracts and Cooperation Agreements, Operational Processes	Proses pengadaan yang adil dan transparan; Proses evaluasi yang objektif; Hubungan yang harmonis Fair and transparent procurement processes; objective evaluation processes; harmonious relationships.
Media Massa Mass Media	Media yang menyiarkan informasi tentang perusahaan baik media cetak, media elektronik maupun media sosial, media online maupun Media that disseminate information about the company, including print media, electronic media, social media, and online media	Kegiatan Perusahaan yang disampaikan oleh media massa, akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pariwisata nusantara The Company's activities reported by the media will influence the public's knowledge and understanding of domestic tourism.

Prinsip dan Landasan Hukum TJSL di Perusahaan

Principles and Legal Foundations of CSR in the Company

Prinsip dan Tujuan Program TJSL di Perusahaan

Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan 4 (empat) prinsip yang menjadi acuan agar penerapan program TJSL dapat dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan program, antara lain:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisis risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan.
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan Perseroan.
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan Perseroan.
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Dengan menerapkan pilar dan prinsip-prinsip TJSL BUMN, Perseroan berharap bahwa dengan melaksanakan program-program TJSL yang direncanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat tercipta harmonisasi yang baik antara Jasa Raharja dengan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang sekaligus berkontribusi bagi tercapainya TPB.

Landasan Hukum Program TJSL di Perusahaan

ITDC melaksanakan TJSL dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 2) mengemukakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 88) mengemukakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya

Principles and Objectives of the Company's CSR Program

The CSR programs of state-owned enterprises (SOEs) are implemented by adhering to four key principles. These principles ensure that CSR initiatives are executed systematically and integrally, guaranteeing both the implementation and achievement of the program's success. The principles are as follows:

1. Integrated: Based on risk analysis and business processes that have relevance to stakeholders.
2. Directed: Clearly oriented towards achieving the company's objectives.
3. Impact Measured: Making a significant contribution and providing benefits that result in changes or added value for stakeholders and the company.
4. Accountability: Ensuring transparency and accountability, thereby preventing potential misuse and deviations.

By implementing the pillars and principles of SOE CSR, the Company aims to harmonize its relationship with all stakeholders. This approach ensures the sustainability of the business in the long term while also contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Legal Basis of the Company's CSR Program

The ITDC implements its CSR program based on prevailing regulations and laws, including:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (Article 2), which states that one of the purposes of establishing SOEs is to actively provide guidance and assistance to small-scale entrepreneurs, cooperatives, and the community.
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (Article 88), which allows SOEs to allocate a portion of their net profit for the



untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74), yang berbunyi, "Perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran".
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
7. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/03/2023 tanggal 26 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Struktur Organisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Secara umum, penanggung jawab penerapan keberlanjutan dilakukan oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan keberlanjutan, dilaksanakan oleh divisi terkait dan mengelola lalu lintas data dan informasi terkait keberlanjutan. Sementara, pengelolaan program TJSL ITDC dilakukan oleh unit khusus, yakni Unit TJSL. Unit TJSL bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan keberlanjutan, mengkoordinir praktik keberlanjutan yang dilaksanakan oleh divisi terkait dan mengelola lalu lintas data dan informasi terkait keberlanjutan. Unit TJSL juga mengidentifikasi dan mengelola dampak risiko terkait ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang ada.

Adapun struktur organisasi terkait TJSL di Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

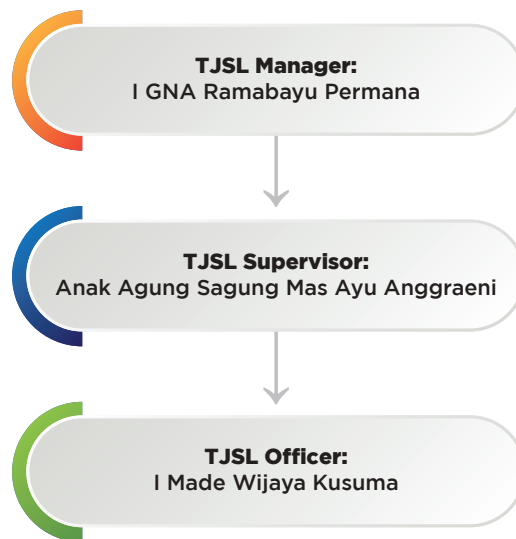
development of small businesses/cooperatives and community development around the SOE.

3. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Article 74), mandating that companies engaged in natural resource sectors must carry out Social and Environmental Responsibility, budgeted and accounted for as company expenses, conducted with fairness and reasonableness.
4. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.
5. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility for Limited Liability Companies.
6. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 of 2017 concerning the Implementation of Sustainable Development Goals.
7. Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/03/2023 dated March 26, 2023, regarding Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises.

Company's Social Responsibility Organizational Structure

In general, the responsibility for sustainability implementation is held by the CEO, who sets sustainability policies. This is executed by relevant divisions, while sustainability-related data and information are managed by these divisions. ITDC's TJSL program management is handled by the TJSL Unit, responsible for sustainability policies, coordinating sustainability practices among relevant divisions, and managing related data and information. The TJSL Unit also identifies and manages economic, environmental, and social risk impacts.

The organizational structure related to TJSL in the Company is as follows:



Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

ITDC melaksanakan kegiatan usaha secara berkelanjutan dengan berorientasi pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

ITDC menerapkan dan berbagi nilai-nilai Perusahaan dengan pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam berbagai kebijakan strategis terkait keberlanjutan serta dirancang sesuai dengan kebutuhan dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala untuk penyempurnaan sesuai dengan kondisi dan lingkungan bisnis.

Perseroan secara konsisten terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Perseroan mengharapkan agar dampak dari kegiatan usaha dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara Perusahaan, komunitas sekitar Perusahaan, pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat secara luas.

Program TJSJ dilaksanakan berdasarkan pilar utama:

- Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;

Scope of Company's Social Responsibility

ITDC conducts its business activities sustainably, aligning with the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

The Company applies and shares its values with stakeholders, contributing to various strategic sustainability policies designed to meet evolving needs. These policies are regularly evaluated for effectiveness and refinement according to business conditions and the environment.

Consistently, the Company enhances the quality and quantity of its sustainable business activities, aiming for mutually beneficial relationships between the company, local communities, shareholders, stakeholders, and society at large.

The TJSJ program is based on four main pillars:

- Social: Ensuring the equitable fulfillment of basic human rights to enhance the well-being of all.



- b. Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
 - c. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
 - d. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.
- b. Environmental: Sustainable management of natural resources and the environment as the foundation of all life.
 - c. Economic: Achieving quality economic growth through sustainable job and business opportunities, innovation, inclusive industries, adequate infrastructure, affordable clean energy, and supported partnerships.
 - d. Legal and Governance: Establishing effective, transparent, accountable, and participatory legal frameworks and governance to create security stability and achieve a rule-of-law state



Penghargaan terkait TJSL

TJSL-Related Awards

Nama Penghargaan Award Name	Tanggal Penghargaan Award Date	Diberikan oleh Granted by
BUMN CSR AWARD (Gold Award Grade 200)	8 Desember 2023 December 8, 2023	BALI CSR AWARD

Target dan Realisasi Anggaran Program TJSL

ITDC melaksanakan program TJSL mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Pada tahap awal, Perusahaan membuat pemetaan mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan atas kegiatan operasi dan bisnis yang dilakukan, kemudian dituangkan dalam rencana kebutuhan nyata pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.

Dari aspek ekonomi, Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan kinerja ekonomi yang berkelanjutan, bersih dari praktik korupsi, serta memiliki manfaat bagi para pemangku kepentingan. Pada aspek lingkungan, Perusahaan senantiasa mengkaji risiko terkait lingkungan hidup guna menentukan risiko lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasional serta langkah pengendaliannya. Sementara pada aspek sosial, perhatian Perusahaan tidak hanya pada pemangku kepentingan internal, melainkan juga eksternal.

Sepanjang tahun 2023, ITDC telah menyalurkan bantuan untuk mendukung kegiatan TPB prioritas dalam bentuk kegiatan TJSL Non-PUMK dan PUMK. Perusahaan telah merealisasikan penyaluran dana untuk program TJSL sebesar Rp1.475.000.000 dengan rincian penyaluran kegiatan TJSL Non-PUMK sebesar Rp475.000.000 yang berasal dari anggaran bagian TJSL pada Divisi Corporate Secretary yang telah menjadi biaya atau beban perusahaan, serta Rp1.000.000.000 untuk program TJSL PUMK yang bersumber dari dana bergulir hasil pengembalian pinjaman mitra binaan, pendapatan jasa administrasi pinjaman dan dari jasa giro bank.

Rincian mengenai target dan realisasi biaya untuk Program TJSL ITDC berdasarkan TPB prioritas untuk tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Target and Budget Realization for TJSL Programs

ITDC implements TJSL programs from planning to evaluation stages. Initially, the company maps out the social, economic, and environmental impacts of its operations and businesses, reflecting the genuine needs of stakeholders while considering the company's capabilities.

Economically, the Company ensures sustainable economic performance, free from corrupt practices, and beneficial to stakeholders. Environmentally, ITDC continually assesses environmental risks to determine operational risks and control measures. Meanwhile, on the social front, the company focuses not only on internal stakeholders but also external ones.

Throughout 2023, ITDC allocated funds to support priority SDGs activities through Non-PUMK and PUMK TJSL activities. The company disbursed a total of Rp1,475,000,000 for TJSL programs, with Rp475,000,000 allocated to Non-PUMK TJSL activities from the Corporate Secretary Division's TJSL budget, considered as company expenses. Additionally, Rp1,000,000,000 was allocated for PUMK TJSL programs, sourced from revolving funds generated from partner loan repayments, loan administration service revenue, and bank deposit service revenue.

Below is the breakdown of the target and realized costs for ITDC's TJSL Program based on priority SDGs for 2023:



No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal	RKA Per Bidang TPB 2023 RKA of Each Field of 2023 SDGs (Rp)	Realisasi Tahun 2023 Realization in 2023 (Rp)	Persentase Capaian Achievement Percentage (%)
A	Pilar Sosial Social Pillar			
1.	TPB 1 Tanpa Kemiskinan SDGs 1: No Poverty	20.000.000	-	-
2.	TPB 2 Tanpa Kelaparan SDGs 2: Zero Hunger	-	-	-
3.	TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera SDGs 3: Good Health and Well-being	15.000.000	7.262.000	48,41%
4.	TPB 4 Pendidikan Berkualitas SDGs 4: Quality Education	45.000.000	141.060.547	313,47%
5.	TPB 5 Kesenjaraan Gender SDGs 5: Gender Equality	-	-	-
B	Pilar Ekonomi Economic Pillar			
1.	TPB 7 Energi Bersih & Terjangkau SDGs 7: Affordable and Clean Energy	-	-	-
2.	TPB 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi SDGs 8: Decent Work and Economic Growth	2.279.505.443	1.171.677.453	51,40%
3.	TPB 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur SDGs 9: Industry, Innovation, and Infrastructure	-	-	-
4.	TPB 10 Berkurangnya Kesenjaraan SDGs 10: Reduced Inequality	-	-	-
5.	TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan SDGs 17: Partnerships for the Goals	-	-	-
C	Pilar Lingkungan Environmental Pillar			
1.	TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak SDGs 6: Clean Water and Sanitation	-	-	-
2.	TPB 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan SDGs 11: Sustainable Cities and Communities	200.000.000	155.000.000	77,50%
3.	TPB 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab SDGs 12: Responsible Consumption and Production	15.000.000	-	-
4.	TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim SDGs 13: Climate Action	-	-	-
5.	TPB 14 Ekosistem Lautan SDGs 14: Life Below Water	-	-	-
6.	TPB 15 Ekosistem Daratan SDGs 15: Life on Land	-	-	-
D	Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar			
1.	TPB 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan SDGs 16: Peace, Justice, and Strong Institutions	-	-	-
Jumlah Total		2.574.505.443	1.475.000.000	57,29%

Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2023

Implementation of the 2023 CSR Program

Bantuan Pencegahan Stunting



Perusahaan melakukan pemberian bantuan pencegahan stunting untuk anak-anak dengan kategori kurang berat badan (*underweight*) di Desa Penyangga Mandalika dengan memberikan bantuan makanan sehat yang mengandung protein hewani berupa telur ayam kepada anak-anak sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak.

Stunting Prevention Assistance



The Company provides stunting prevention assistance to underweight children in Penyangga Mandalika Village by distributing nutritious food containing animal protein, such as chicken eggs, to fulfill the nutritional needs during their growth phase.

Program Integrated Farming System



Perusahaan melakukan program *integrated farming system* berupa studi banding dan pelaksanaan budidaya tanaman, pengolahan & pemasaran hasil pertanian terintegrasi di Dusun Belar, Desa Sukadana. Dalam kegiatan studi banding, telah dilakukan program kunjungan oleh kelompok tani Dusun Belar, Desa Sukadana ke usaha budidaya anggur dan jamur, serta tempat pengolahan pupuk dari sisa-sisa kotoran ternak. Program *integrated farming system* ini juga merupakan kelanjutan program

Integrated Farming System Program



The Company implements an integrated farming system program, consisting of benchmarking and the implementation of cultivation, processing, and marketing of agricultural products in Belar Hamlet, Sukadana Village. In the benchmarking activities, a group of farmers from Belar Hamlet, Sukadana Village visited grape and mushroom cultivation enterprises, as well as facilities for processing manure into fertilizer. This integrated farming system program is a continuation of the previous year's program,



tahun sebelumnya, di mana masyarakat penerima program dari Dusun Ngolang dan Dusun Mongge, Desa Sukadana dengan program pengembangan budidaya hortikultura, pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk *organic* dan pengembangan madu trigona.

where the beneficiary communities from Ngolang and Mongge Hamlets, Sukadana Village, were involved in horticultural cultivation development, conversion of animal waste into organic fertilizer, and stingless bee honey production.

Injourney Hospitality House Mandalika



ITDC melaksanakan program pemberdayaan dan pelatihan secara berkelanjutan serta meningkatkan standar pelayanan dengan menghadirkan keramatahman Indonesia kepada pelaku usaha pariwisata atau masyarakat 5 DPSP.

Injourney Hospitality House Mandalika



ITDC implements sustainable empowerment and training programs while enhancing service standards by bringing Indonesian hospitality to tourism businesses or communities in the 5 DPSP areas.

Program Mandalika Child Learning Center dan Pembentukan Paguyuban Pedagang di KEK Mandalika



Di tahun 2023, ITDC melakukan program pemberdayaan anak dan kelompok pedagang di lingkaran Kuta Beach Park Mandalika dengan menyediakan fasilitas belajar dan bermain untuk anak sehingga diharapkan dapat memberikan nilai positif serta menumbuhkan niat belajar anak-anak. Pembinaan kepada kelompok pedagang asongan

Mandalika Child Learning Center and Merchant Community Formation in Mandalika Special Economic Zone (SEZ)



In 2023, ITDC conducted an empowerment program for children and merchant groups in the vicinity of Kuta Beach Park Mandalika by providing learning and playing facilities for children, with the hope of instilling positive values and fostering children's desire to learn. Guidance was also provided to street vendors in Mandalika to assist in the legalization

di Mandalika juga dilakukan dengan membantu proses legalisasi pedagang asongan menjadi sebuah asosiasi atau paguyuban pedagang yang legal.

Sarinah Pandu



Sarinah Pandu merupakan program *capacity building* untuk UMKM/Mitra Binaan BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar bisa naik kelas, memberikan akses pasar yang baru kepada UMKM, meningkatkan pengetahuan UMKM dalam pengembangan bisnis dan perluasan pasar, serta meluluskan brand milik UMKM agar menjadi brand unggulan nasional dengan kualitas ekspor. Kegiatan ini turut diikuti oleh 3 (tiga) mitra binaan ITDC dari NTB sebagai peserta.

process, transforming them into a legal association or merchant community.

Sarinah Pandu



“Sarinah Pandu” is a capacity-building program for MSMEs/State-Owned Enterprise (SOEs) Partner aimed at enhancing the capacity of MSMEs to move up the ladder, providing access to new markets, improving MSMEs’ knowledge in business development and market expansion, and elevating MSME-owned brands to become national flagship brands with export-quality. This program was attended by 3 (three) ITDC partner beneficiaries from NTB as participants.

InJourney Go Green



Perusahaan menjalankan program TJSL kolaborasi dengan InJourney Group berupa kegiatan penanaman 1.000 bibit pohon dan pendampingan Desa Wisata Kampung Osing Kemiren di Kawah Ijen Banyuwangi.

InJourney Go Green



The company is implementing a collaborative TJSL program with InJourney Group involving the planting of 1,000 tree seedlings and mentoring for the Tourism Village of Kampung Osing Kemiren in the Ijen Crater area of Banyuwangi.



Pembinaan UMK



Pada tahun 2023, ITDC telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi mitra binaan “Pengolahan Limbah pertanian untuk pakan serta pemeliharaan kesehatan Ternak Guna Mendukung produktivitas Sapi Bali” untuk Klaster Peternak Sapi Catur Mandiri Badung.

Guidance for MSMEs



In 2023, ITDC conducted training and mentoring activities for its partner program “Processing Agricultural Waste for Feed and Livestock Health Maintenance to Support the Productivity of Bali Cattle” for the Catur Mandiri Badung Cattle Farmer Cluster.

Program CSV Tahun 2023

ITDC menganggap bahwa kegiatan TJSL merupakan upaya untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan di daerah sosialnya. Program TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penciptaan nilai bersama yang berkelanjutan (*creating shared value*) yang dapat memberikan dampak positif bagi kinerja Perusahaan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Di tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan program CSV Integrated Farming System di Mandalika, pelatihan sadar wisata bagi pedagang asongan dan anak-anak di Kuta Beach Park, serta kegiatan Injourney Go Green. Terkait pelatihan sadar wisata bagi pedagang asongan dan anak-anak, kegiatan tersebut dilakukan dengan menyediakan fasilitas belajar dan bermain untuk anak sehingga diharapkan dapat memberikan nilai positif dan menumbuhkan niat belajar anak-anak.

Rincian kegiatan, anggaran, dan manfaat program CSV yang dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

CSV Program 2023

ITDC views TJSL activities as efforts to create and maintain harmonious relationships with the community and the environment in its social areas. The TJSL program implemented by the Company is expected to enhance sustainable shared value creation, providing positive impacts on the Company's performance while contributing positively to the surrounding community and environment.

In 2023, the Company implemented the CSV Integrated Farming System program in Mandalika, tourism awareness training for street vendors and children at Kuta Beach Park, and the Injourney Go Green initiative. Regarding tourism awareness training for street vendors and children, the activity involved providing learning and play facilities for children with the aim of instilling positive values and encouraging children's learning intentions.

Details of the activities, budget, and benefits of the Company's CSV program throughout 2023 are as follows:

No.	Program	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Lokasi Location	Nilai Manfaat CSV bagi Perusahaan Benefits of CSV for the Company
1.	Budidaya Tanaman, Pengolahan & Pemasaran Hasil Pertanian Terintegrasi di Dusun Belar, Sukadana Integrated Farming, Processing, and Marketing of Agricultural Products in Dusun Belar, Sukadana	51.250.000	53.203.000	NTB	Peningkatan sistem produksi hasil pertanian sehingga dapat menjadi suplai bahan baku F&B untuk hotel-hotel di kawasan The Mandalika Improving agricultural production systems to become a source of F&B raw materials for hotels in The Mandalika area.



No.	Program	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Lokasi Location	Nilai Manfaat CSV bagi Perusahaan Benefits of CSV for the Company
2.	Program Mandalika Child Learning Center dan Pembentukan Paguyuban Pedagang di KEK Mandalika Child Learning Center Program and Formation of Traders Association in the Mandalika Special Economic Zone (KEK)	36.250.000	36.250.000	NTB	Pembinaan dan pelatihan hospitality serta bahasa inggris bagi pedagang asongan dan juga pembentukan Child Learning Centre di Kuta Beach Park untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan Providing coaching and English language training for street vendors, as well as establishing a Child Learning Centre in Kuta Beach Park to enhance services for tourists.
3.	Injourney Go Green	15.000.000	15.000.000	NTB	Memperkuat citra perusahaan dalam program menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia Enhancing the company's image through environmental sustainability programs in Indonesia.

Program Prioritas di Bidang Pendidikan

Di tahun 2023, ITDC melaksanakan program TJSL prioritas di bidang pendidikan yang seluruhnya telah terealisasi. Adapun rincian pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Education Priority Programs

In 2023, ITDC implemented priority TJSL programs in the education sector, all of which have been fully realized. The details of the implementation of priority programs in the education sector are as follows:

No.	Program	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Lokasi Location	Status
1.	Pelatihan Sadar Wisata bagi Pedagang Asongan serta Pelatihan Seni dan Fotografi bagi Anak-Anak di Kuta Beach Park Training in Tourism Awareness for Street Vendors and Art and Photography Training for Children at Kuta Beach Park	36.250.000	36.250.000	NTB	Terealisasi Realized

2.	Pembinaan bagi Paguyuban Pedagang di Pantai The Nusa Dua Guidance for Vendor Associations at Nusa Dua Beach	30.000.000	45.000.000	Bali	Terealisasi Realized
3.	Pelatihan Indonesian Hospitality Indonesian Hospitality Training	15.000.000	81.060.547	NTB	Terealisasi Realized

Program Prioritas di Bidang Lingkungan

Program TJSL prioritas di bidang lingkungan dilakukan melalui kegiatan InJourney Go Green dengan rincian sebagai berikut:

Environmental Priority Program

The priority TJSL program in the environmental field is conducted through the InJourney Go Green initiative, with the following details:

No.	Program	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Lokasi Location	Status
1.	InJourney Go Green	15.000.000	15.000.000	NTB	Terealisasi Realized

Program Prioritas di Bidang Pengembangan UMK

Perusahaan melaksanakan program TJSL prioritas di bidang pengembangan UMK yang berlokasi di NTB dan Bali. Rincian pelaksanaan program prioritas di bidang pengembangan UMK adalah sebagai berikut:

MSMEs Development Priority Program

The company implements priority TJSL programs in the field of MSME development located in NTB and Bali. The details of the implementation of priority programs in MSME development are as follows:

No.	Program	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Lokasi Location	Status
1.	Budidaya Tanaman, Pengolahan & Pemasaran Hasil Pertanian Terintegrasi di Dusun Belar, Sukadana Integrated Farming, Processing, and Marketing of Agricultural Products in Dusun Belar, Sukadana	51.250.000	53.203.000	NTB	Terealisasi Realized
2.	Program UMKM Go Global (Sarinah Pandu) UMKM Go Global Program (Sarinah Pandu)	15.000.000	37.224.453	Bali	Terealisasi Realized



Program Pendanaan UMK

Di tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan program pendanaan UMK dengan realisasi penyaluran biaya sebesar Rp1.000.000.000. Perusahaan tidak mengalokasikan tambahan dana dari penyisihan laba bersih di tahun sebelumnya untuk dana program PUMK.

Terkait UMK naik kelas dalam triwulan III tahun 2023, belum terdapat mitra binaan TJSL ITDC yang telah memenuhi kriteria mitra naik kelas. Kegiatan pembinaan dan monitoring UMK untuk meningkatkan omzet, meningkatkan kapasitas produksi, perluasan pemasaran produk serta pelatihan kepada mitra binaan menggunakan dana operasional TJSL.

Adapun realisasi pendanaan untuk program PUMK sepanjang tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

UMK Funding Program

In 2023, the Company implemented the UMK funding program with a realized disbursement of Rp1,000,000,000. The Company did not allocate additional funds from retained earnings in the previous year for the MSME program fund.

Regarding the UMK upgrading in the third quarter of 2023, there were no TJSL ITDC partner companies that met the criteria for upgrading. The activities of coaching and monitoring UMK to increase revenue, enhance production capacity, expand product marketing, and training for partner companies are funded by TJSL operational funds.

The realization of funding for the MSME program throughout 2023 is as follows:

Uraian Description	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Persentase Capaian Achievement Percentage (%)
Dana Tersedia Available Funds			
Saldo Awal Initial Balance	(0)	270.455.276	-
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Repayment of Partner Loans	2.083.905.443	1.302.000.000	62,48%
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Service Revenue	11.600.000	2.375.000	20,47%
Pendapatan Jasa Giro Interest on Current Account Service	4.000.000	17.049.372	426,23%
Dana Tersedia Available Funds	2.099.505.443	1.591.879.648	75,82%
Penyaluran Dana dan Biaya Operasional Disbursement and Operational Costs			
Penyaluran Pinjaman kepada Mitra Loan Disbursement to Partners	-	-	-
Penyaluran Melalui BUMN lain - BRI Disbursement Through Other SOEs - BRI	2.099.505.443	1.000.000.000	47,63%
Penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan (Hibah) Partnership Development Fund Disbursement (Grant)	-	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Total Fund Disbursement	2.099.505.443	1.000.000.000	47,63%
Saldo Dana Fund Balance	(0)	591.879.648	-

Efektivitas Penyaluran Dana

Efektivitas penyaluran program pendanaan UMK sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 0% dengan skor 3. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. S-170/MBU/03/2023 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, indikator efektivitas penyaluran dan tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman diberikan skor penuh atau 3 (tiga) bagi seluruh BUMN dan Perusahaan Keuangan Negara dengan Kepemilikan Minoritas (PKNM) yang menyelenggarakan program pendanaan UMK pada tahun 2022 sampai dengan kebijakan baru terkait tingkat kesehatan BUMN diberlakukan.

Effectiveness of Fund Distribution

The effectiveness of micro and small business funding program disbursement until the end of 2023 was 0% with a score of 3. Based on Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. S-170/MBU/03/2023 regarding the Assessment of Health Levels in the Performance of Micro and Small Business Funding Programs for the 2022 Fiscal Year, the effectiveness indicator for fund disbursement and the collectability level of loan repayments are given a full score of 3 (three) for all State-Owned Enterprises (BUMN) and State Financial Enterprises with Minority Ownership (PKNM) that implemented micro and small business funding programs in 2022, until new policies regarding BUMN soundness levels are enforced.

Uraian Description	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)
Dana Disalurkan Secara Mandiri Funds Disbursed Independently	2.099.505.443	-
Dana Tersedia Available Funds	2.099.505.443	1.438.263.785
Efektivitas Penyaluran Dana Effectiveness of Fund Disbursement	100%	0%
Nilai/Skor Value/Score	3	3

Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

Kolektibilitas pengembalian pinjaman dihitung berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. S-170/MBU/03/2023 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022. Adapun tingkat kolektabilitas pada tahun 2023 adalah sebesar 23% dengan skor 3.

Collectibility of Loan Repayment

The collectibility of loan repayments is calculated based on the Circular of the Ministry of State-Owned Enterprises No. S-170/MBU/03/2023 regarding the Assessment of Health Levels in the Performance of Micro and Small Business Funding Programs for the Fiscal Year 2022. The collectibility rate in 2023 is 23% with a score of 3.

Uraian Description	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)
Kualitas Piutang Pinjaman Loan Receivables Quality		
Lancar Current	-	1.033.955.443
Kurang Lancar Less Current	-	-
Diragukan Doubtful	-	-
Macet Bad	2.466.339.232	3.390.089.227
Total	2.466.339.232	4.424.044.670



Uraian Description	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)
Rata-rata Tertimbang Weighted Average		
Lancar Current	-	1.033.955.443
Kurang Lancar Less Current	-	-
Diragukan Doubtful	-	-
Macet Bad	-	-
Total	-	1.033.955.443
Tingkat Kolektibilitas Collectibility Rate	0%	23%
Nilai/Skor Value/Score	-	3

Wilayah Pembinaan dan Jumlah Mitra Binaan berdasarkan Wilayah

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah mitra binaan dengan kategori lancar sampai dengan macet berjumlah 159 orang dengan sisa outstanding pinjaman sebesar Rp4.424.044.670. Adapun rincian terkait hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Mentoring Regions and Number of Assisted Partners by Region

Until the end of 2023, the number of assisted partners with categories ranging from current to bad totaled 159 individuals, with a remaining outstanding loan amount of Rp4,424,044,670. Details regarding this matter are as follows:

No.	Kabupaten/Kota Regency/City	Posisi Tahun 2023 2023 Position	
		Jumlah Mitra Binaan Total Foster Partner (unit)	Nominal Amount (Rp)
1.	Kabupaten Badung Badung Regency	1	16.666.662
2.	Kabupaten Bangli Bangli Regency	27	113.500.008
3.	Kabupaten Buleleng Buleleng Regency	12	259.324.548
4.	Kota Denpasar Denpasar City	3	64.583.339
5.	Kabupaten Gianyar Gianyar Regency	2	49.666.666
6.	Kabupaten Jembrana Jembrana Regency	52	49.666.666
7.	Kabupaten Karangasem Karangasem Regency	21	492.916.668
8.	Kabupaten Klungkung Klungkung Regency	7	155.791.656
9.	Kabupaten Tabanan Tabanan Regency	8	283.206.352
10.	Kabupaten Lombok Tengah Central Lombok Regency	26	870.705.441
Jumlah Total		159	4.424.044.670

Laporan Keuangan

Financial Statement

Laporan Posisi Keuangan Program TJSL

Financial Position Report of TJSL Program

Uraian Description	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Persentase Capaian Achievement Percentage (%)
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets			
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents			
Kas Cash	-	-	-
Bank	-	591.879.648	-
Piutang BUMN Pembina Receivables from Supervising SOEs	-	-	-
Piutang Pinjaman Mitra Binaan Loans to Partner SMEs	2.466.339.232	4.424.044.675	179,38%
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Allowance for Doubtful Accounts	(2.466.339.227)	(3.390.089.227)	137,45%
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Mitra Binaan Receivables from Partner SME Loan Administration Fees	34.125.000	34.125.000	100,00%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets			
Aset Tetap Bersih Net Fixed Assets	68.170.000	68.170.000	100,00%
Penyusutan Depreciation	(68.170.000)	(68.170.000)	100,00%
Piutang Pinjaman Kepada BUMN Lain - BRI Loans to Other SOEs - BRI	6.215.027.987	3.665.000.000	58,97%
Aset Lain-lain Other Assets			
Piutang Bermasalah Non-Performing Loans	3.180.915.029	3.180.915.029	100,00%
Alokasi Penyisihan Piutang Bermasalah Allocation for Non-Performing Loan Reserves	(3.180.915.029)	(3.180.915.029)	100,00%
Jumlah Aset Total Assets	6.249.152.992	5.324.960.096	85,21%
Liabilitas dan Aset Neto Liabilities and Net Assets			
Liabilitas Liabilities			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities			
Kelebihan Pembayaran Angsuran Excess Loan Repayments	-	-	-
Angsuran Belum Teridentifikasi Unidentified Installments	-	-	-
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	-	-	-
Aset Neto Net Assets			



Laporan Posisi Keuangan Program TJSL
Financial Position Report of TJSL Program

Uraian Description	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Persentase Capaian Achievement Percentage (%)
Aset Neto Tidak Terikat Unrestricted Net Assets	6.249.152.993	5.324.960.096	85,21%
Aset Neto Terikat Restricted Net Assets	-	-	-
Jumlah Aset Neto Total Net Assets	6.249.152.993	5.324.960.096	85,21%
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto Total Liabilities and Net Assets	6.249.152.993	5.324.960.096	85,21%

Laporan Aktivitas Program TJSL
TJSL Program Activity Report

Uraian Description	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Persentase Capaian Achievement Percentage (%)
Perubahan Aset Neto Tidak Terikat Changes in Unrestricted Net Assets			
Pendapatan Income			
Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina Allocation of Profit Share from Supervising SOEs	-	-	-
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Fee Revenue	11.600.000	2.375.000	20,47%
Pendapatan Jasa Giro Bank Giro Fee Revenue	6.000.000	19.194.372	319,91%
Pendapatan Lain-lain Other Revenue	-	-	-
Penerimaan atas Pemulihan Penyisihan Piutang Receipts from Recovery of Allowance for Doubtful Accounts	-	-	-
Jumlah Total	17.600.000	21.569.372	122,55%
Alokasi BUMN Peduli dan Aset Neto Terikat Temporer yang Berakhir Pembatasannya Allocation of Supervising SOEs Care and Temporary Restricted Net Assets Expiry			
ANTT - Berakhir Waktu Expiry Date of Supervising SOEs Care and Temporary Restricted Net Assets	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-
Jumlah Pendapatan Total Income	17.600.000	21.569.372	122,55%
Beban Expenses			

Laporan Aktivitas Program TJSL

TJSL Program Activity Report

Uraian Description	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Persentase Capaian Achievement Percentage (%)
Dana Pembinaan Program PUMK Funding for Partner SME Program	-	-	-
Penyaluran Program TJSL Disbursement of TJSL Program	-	-	-
Penyaluran Program PUMK Melalui Kolaborasi BUMN (Hibah) Disbursement of Partner SME Program through SOEs Collaboration (Grant)	-	-	-
Beban Administrasi dan Umum General and Administrative Expenses	2.000.000	2.145.000	107,25%
Beban Penyusutan Aset Tetap Depreciation of Fixed Assets	-	-	-
Beban Penyusutan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Depreciation of Allowance for Doubtful Accounts on Loans	(903.750.000)	(158.525.448)	17,54%
Beban dan Pengeluaran Lainnya Other Expenses and Expenditures	-	-	-
Jumlah Beban Total Expenses	(901.750.000)	(156.380.448)	17,34%
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat Increase (Decrease) in Unrestricted Net Assets	919.350.000	177.949.820	19,36%
Perubahan Aset Neto Terikat Temporer Changes in Temporary Restricted Net Assets			
ANTT - Penyisihan BUMN Peduli ANTT - Supervising SOEs Care Allowance	-	-	-
(ANTT - Terbebaskan) (ANTT - Exempted)	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat Temporer Increase (Decrease) in Temporary Restricted Net Assets	-	-	-
Perubahan Aset Neto Terikat Permanen Changes in Permanent Restricted Net Assets			
Sumbangan Contributions	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Permanen Increase (Decrease) in Permanent Restricted Net Assets	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Increase (Decrease) in Net Assets	919.350.000	177.949.820	19,36%
Aset Neto Awal Tahun Beginning Unrestricted Net Assets	5.329.802.993	5.147.010.276	96,57%
Aset Neto Akhir Tahun Ending Unrestricted Net Assets	6.249.152.993	5.324.960.096	85,21%

Laporan Arus Kas Program TJSL

Cash Flow Statement of the TJSL Program

Uraian Description	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Persentase Capaian Achievement Percentage (%)
Aktivitas Operasi Operating Activities			
Penerimaan Dana BUMN Pembina Receipts from SOEs Sponsorship	-	-	-
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Repayment of Partner Loans	2.083.905.443	1.302.000.000	62,48%


Laporan Arus Kas Program TJSL

Cash Flow Statement of the TJSL Program

Uraian Description	RKA Tahun 2023 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization (Rp)	Persentase Capaian Achievement Percentage (%)
Kelebihan Pembayaran Angsuran Excess Loan Repayment	-	-	-
Angsuran Belum Teridentifikasi Unidentified Installment Payments	-	-	-
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Revenue from Loan Administration Fees	11.600.000	2.375.000	20,47%
Pendapatan Jasa Giro Revenue from Giro Fees	6.000.000	19.194.372	319,91%
Pendapatan Lain-lain Other Revenues	-	-	-
Penyaluran Program PUMK melalui Kolaborasi BUMN Disbursement of PUMK Programs through SOEs Collaboration	-	(1.000.000.000)	-
Penyaluran Program PUMK Disbursement of PUMK Programs	(2.099.505.443)	-	-
Dana Pembinaan Program PUMK Funding for PUMK Program Development	-	-	-
Penyaluran Program TJSL Disbursement of TJSL Programs	-	-	-
Beban Administrasi dan Umum General and Administrative Expenses	(2.000.000)	(2.145.000)	107,25%
Pembayaran Beban dan Pengeluaran Lainnya Payment of Other Expenses	-	-	-
Kas Neto Diterima (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi Net Cash Received (Utilized) from Operating Activities	(0)	321.424.372	-
Aktivitas Investasi Investing Activities			
Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets	-	-	-
Kas Neto Diterima (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi Net Cash Received (Utilized) from Investing Activities	-	-	-
Aktivitas Pendanaan Financing Activities			
Aset Bersih Terikat Berakhir Pembatasannya Restricted Net Assets End	-	-	-
Hibah - BRI Grants - BRI	-	-	-
Kas Neto Diterima (Digunakan) untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Received (Utilized) from Financing Activities	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Neto dalam Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(0)	321.424.372	-
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	(0)	270.455.276	-
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	(0)	591.879.648	-

Laporan Keuangan

Financial Reports





**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES***

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022***

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES**

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		Directors' Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	Notes to the Consolidated Financial Statements
Informasi Tambahan		Additional Information
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	I	Statements of Financial Position (Parent Entity)
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	II	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	III	Statements of Changes in Equity (Parent Entity)
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	IV	Statements of Cash Flows (Parent Entity)
Informasi Tambahan (Entitas Induk)	V	Additional Information (Parent Entity)

Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
Board of Directors' Statement
Regarding the Responsibility for the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022

PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA DAN ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	Ari Respati	Name
Alamat Kantor	Menara BCA Lantai 39, Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat	Office address
Alamat Rumah	Jl. Sindoro No.16, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan	Domicile address
Nomor Telepon	021-80642791	Telephone
Jabatan	Direktur Utama/ President Director	Position
Nama	Ahmad Fajar	Name
Alamat Kantor	Menara BCA Lantai 39, Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat	Office address
Alamat Rumah	Emerald View Blok A 09, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan	Domicile address
Nomor Telepon	021-80642791	Telephone
Jabatan	Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko/ Finance, Strategy and Risk Management Director	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan Entitas Anaknya;	1. <i>We are responsible in the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia and its Subsidiaries;</i>
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. <i>The consolidated financial statements of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. <i>All information in the consolidated financial statements of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia and its Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;</i>
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan	b. <i>The consolidated financial statements of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia and its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and</i>
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan Entitas Anaknya.	4. <i>We are responsible for PT Pengembangan Pariwisata Indonesia and its Subsidiaries internal control system.</i>



Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Director's
Jakarta, 27 Februari / February 27, 2024



Ari Respati
Direktur Utama/
President Director



Ahmad Fajar
Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko/
Finance, Strategy and Risk Management Director



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00334/2.1030/AU.1/03/1698-2/1/III/2024

RSMIndonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha

Kami membawa perhatian ke Catatan 51 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang mengindikasikan bahwa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mengalami kerugian sebesar Rp278.417.472.512. Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memiliki akumulasi kerugian sebesar Rp295.665.880.329 dan liabilitas jangka pendek telah melampaui total aset lancar sebesar Rp1.037.677.302.056. Kondisi tersebut mengindikasikan suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana Manajemen untuk tindakan masa depan dalam menghadapi kondisi di atas telah dijelaskan dalam Catatan 51. Laporan keuangan konsolidasian terlampir telah disusun menggunakan asumsi bahwa Grup akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Material Uncertainty related to Going Concern

We draw attention to Note 51 to the accompanying consolidated financial statements which indicates that for the year ended December 31, 2023, the Group suffered a loss of Rp278,417,472,512. As of December 31, 2023, the Group has accumulated losses amounted to Rp295,665,880,329 and short-term liabilities have exceeded total current assets of Rp1,037,677,302,056. These conditions indicate material uncertainty that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. Management's plan for future actions in responding to the conditions above are described in Note 51. The accompanying consolidated financial statements have been prepared assuming that the Group will continue to operate as going concern. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2023, and for the year then ended, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan dasar akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

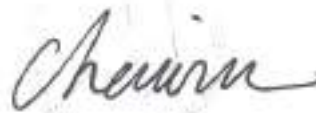
Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Chairul Wismoyo

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1698/
Public Accountant License Number: AP.1698

Jakarta, 27 Februari 2024/February 27, 2024



00334

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2g,2h,4	219,006,550,776	64,564,577,024	Cash and cash equivalents
Dana di lembaga keuangan yang dibatasi penggunaannya	5	354,745,507,126	627,804,324,702	Restricted fund in financial institution
Deposito berjangka	2g,6	--	11,539,677,364	Time deposits
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga-neto	2h,8	259,631,862,526	222,737,832,870	Third parties - net
Pihak berelasi-neto	2d,2h,8	91,994,852,650	41,222,053,023	Related parties - net
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak ketiga - neto	2h,9	2,609,428,914	729,590,048	Third parties - net
Persediaan	12	5,354,913,871	591,868,763	Inventories
Biaya dibayar di muka	2j,10	1,080,635,058	107,668,294	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	2q,19a	9,468,640,171	35,435,777,605	Prepaid tax
Uang muka	11	3,227,157,245	7,429,176,786	Advances
TOTAL ASET LANCAR		947,119,548,337	1,012,162,546,479	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset hak-guna	2v,24	179,468,984,443	198,623,599,853	Right-of-use assets
Properti investasi	2n,14	628,277,091,013	628,330,825,864	Investment properties
Aset tetap	2k,15	5,481,443,946,896	4,964,568,492,627	Property and equipment
Investasi pada surat berharga	2h,2m,7	2,820,273,502	2,963,797,698	Investment in marketable securities
Penyertaan saham				Investment in shares
Investasi pada entitas asosiasi	2h, 13	--	--	Investment in associate company
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h,13	50,244,712,000	46,473,000,000	Measured at fair value through other comprehensive income
Aset takberwujud	2o,16	2,271,874,535	2,192,741,468	Intangible assets
Aset pajak tangguhan	2q,19f	2,562,908,739	1,946,466,546	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	17	2,147,004,628	2,147,004,628	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		6,349,236,795,756	5,847,245,928,684	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		7,296,356,344,093	6,859,408,475,163	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	2d,2h,18	266,724,689,175	172,128,505,882	Related parties
Pihak ketiga	2h,18	156,514,426,702	144,907,247,055	Third parties
Utang pajak	2q,19b	32,776,648,587	13,379,298,491	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	20	814,270,598,363	674,404,500,514	Accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek	25a	199,642,167,170	136,356,373,960	Short-term bank loan
Pinjaman pihak berelasi	26	125,000,000,000	--	Loan from related parties
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Utang lain-lain	2h,21	56,962,283,504	49,529,943,031	Other payables
Liabilitas sewa	24	179,305,291,104	185,210,522,226	Lease liabilities
Liabilitas kontrak	2p,22	57,707,218,516	34,142,535,859	Contract liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	25b	95,893,527,272	1,135,037,396,244	Long-term bank loan
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		1,984,796,850,393	2,545,096,323,262	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang lain-lain	2h,21	3,268,431,431	3,465,179,259	Other payables
Liabilitas sewa	24	4,701,530,658	5,670,428,400	Lease liabilities
Liabilitas kontrak	2p,22	159,771,688,434	82,966,445,302	Contract liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	25b	3,239,928,004,057	2,046,866,258,087	Long-term bank loan
Liabilitas imbalan kerja	2r,23	39,436,165,919	34,097,516,232	Employee benefit liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		3,447,105,820,499	2,173,065,827,280	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		5,431,902,670,892	4,718,162,150,542	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham :				Capital stock :
Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				Class A Dwiwarna - Rp1,000,000 par value per share
Seri B - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				Class B - Rp1,000,000 par value per share
Modal dasar :				Share capital - Authorized :
Seri A Dwiwarna - 1 saham				Class A Dwiwarna - 1 share
Seri B - 3.499.999 saham				Class B - 3,499,999 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh :				Subscribed and fully paid :
Seri A Dwiwarna - 1 saham	27	1,000,000	1,000,000	Class A Dwiwarna - 1 share
Seri B - 2.147.659 lembar pada 31 Desember 2023 dan 2022	27	2,147,659,000,000	2,147,659,000,000	Class B - 2,147,659 shares as of December 31, 2023 and 2022
Tambahan modal disetor	28	148,007,499	148,007,499	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Keuntungan yang belum direalisasi dari aset keuangan pada nilai wajar - neto	30	9,328,542,736	5,642,082,000	Unrealized gain on financial assets at fair value - net
Keuntungan pengukuran kembali atas program imbalan pasti - neto	30	5,336,562,398	7,398,088,278	Gain on remeasurement of defined benefits program - net
Saldo laba				Retained earnings
Sudah ditentukan penggunaannya	29	412,046,441,472	412,046,441,472	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		(707,712,321,801)	(429,744,671,420)	Unappropriated
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk		1,866,807,232,304	2,143,149,947,829	Total equity attributable to the equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	31	(2,353,559,103)	(1,903,623,208)	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		1,864,453,673,201	2,141,246,324,621	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		7,296,356,344,093	6,859,408,475,163	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PENDAPATAN	32	885,213,811,783	657,487,651,938	REVENUES
BEBAN USAHA				EXPENSES
Beban pokok pendapatan	33	(532,769,357,026)	(357,831,166,976)	Cost of revenue
Beban penjualan	34	(6,231,970,034)	(1,869,971,027)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	35	(427,478,249,351)	(317,448,906,580)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain	36	14,286,024,828	18,561,430,842	Other income
Beban lain-lain	37	(32,518,305,578)	(107,555,192,012)	Other expense
Pendapatan keuangan	38	3,549,061,585	10,707,272,811	Finance income
Pajak final atas pendapatan keuangan		(709,812,317)	(2,141,454,562)	Final tax of finance income
Beban keuangan	39	(132,696,544,235)	(79,593,206,197)	Finance expense
RUGI SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN		(229,355,340,345)	(179,683,541,763)	LOSS BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK FINAL		(49,717,257,119)	(30,466,860,841)	FINAL TAX EXPENSE
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(279,072,597,464)	(210,150,402,604)	LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kini	2q,19e	--	--	Current tax
Pajak tangguhan	2q,19c,19f	655,124,952	184,035,362	Deferred tax
TOTAL MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		655,124,952	184,035,362	TOTAL INCOME TAX BENEFIT
RUGI TAHUN BERJALAN		(278,417,472,512)	(209,966,367,242)	LOSS FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (Kerugian)/keuntungan atas pengukuran kembali program manfaat pasti	23	(2,108,208,149)	12,065,772,069	Item that will not be reclassified to profit or loss (Loss)/gain on remeasurement of defined benefit program
Pajak penghasilan atas pengukuran kembali program manfaat pasti	19f	46,450,905	(265,446,985)	Income tax relating to remeasurement of defined benefit program
Keuntungan atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7,13	3,771,712,000	1,798,000,000	Gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan atas perubahan nilai wajar investasi saham	19f	(85,133,664)	(39,556,000)	Income tax relating to Fair value adjustment from investment in shares of stock
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		1,624,821,092	13,558,769,084	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(276,792,651,420)	(196,407,598,158)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				LOSS FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik entitas induk		(277,967,650,381)	(209,887,974,415)	Equity holders of the parent company
Kepentingan non-pengendali	31b	(449,822,131)	(78,392,827)	Non-controlling interests
		(278,417,472,512)	(209,966,367,242)	
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik entitas induk		(276,342,715,525)	(196,329,205,331)	Equity holders of the parent company
Kepentingan nonpengendali	31c	(449,935,895)	(78,392,827)	Non-controlling interests
		(276,792,651,420)	(196,407,598,158)	
Rugi per saham	2t,42	(129,638)	(99,340)	Loss per share

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS CHANGES IN OF EQUITY

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

|--|

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements taken as a whole

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022 *)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		891,571,064,051	672,681,819,876	Receipt from customers
Penerimaan bunga		6,006,284,857	10,384,086,519	Interest received
Pembayaran kepada pemasok		(534,037,286,301)	(350,570,545,730)	Payment to suppliers
Pembayaran pajak		(49,062,132,167)	(32,608,315,403)	Payment for tax
Pembayaran beban gaji dan tunjangan		(108,815,089,207)	(106,294,131,390)	Payment for salaries and benefits expense
Penerimaan operasional lainnya		20,623,647,591	29,268,703,653	Receipt from other operational revenue
Pembayaran untuk biaya operasional lainnya		(5,218,700,772)	(9,649,871,260)	Payment for other operational expense
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang		(72,717,499,307)	(63,004,873,944)	Interest payment of long-term loan
Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek		(59,562,660,386)	(12,951,283,679)	Interest payment of short-term loan
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi		88,787,628,359	137,255,588,642	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
(Penempatan)/Pencairan deposito berjangka	6	11,539,677,364	(11,539,677,364)	(Placement)/Withdrawal of time deposit
Pencairan investasi surat berharga	7	--	197,723,500	Withdrawal of investment in securities
Penambahan aset tetap	15	(443,890,839,817)	(876,208,329,493)	Addition to property and equipment
Penambahan aset takberwujud	16	(566,817,092)	(1,862,910,493)	Addition to intangible assets
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		(432,917,979,545)	(889,413,193,850)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	26	125,000,000,000	--	Proceeds from related party loan
Penerimaan dari pinjaman bank	25	273,869,264,856	608,657,771,634	Proceeds from bank loan
Pembayaran pinjaman bank	25	(166,635,430,409)	(22,997,781,820)	Payment bank loan
Kenaikan pada dana yang dibatasi penggunaannya	5	273,058,817,576	205,627,425,472	Increase of restricted fund
Pembayaran liabilitas sewa	24	(7,290,513,402)	(25,143,146,815)	Payments of lease liabilities
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan		498,002,138,621	766,144,268,471	Net cash provided by financing activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		153,871,787,435	13,986,663,263	NET INCREASE/(DECREASE) CASH AND CASH EQUIVALENTS
DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS		570,186,317	(2,658,042,464)	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		64,564,577,024	53,235,956,225	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		219,006,550,776	64,564,577,024	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

*) Direklasifikasikan (Catatan 52)

*) As reclassified (Note 52)

Lihat Catatan 49 atas laporan keuangan untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas.

See Note 49 to the financial statements for supplemental disclosures of cash flow information.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia-Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1972 dengan Akta Notaris Soelaiman Ardjasmita, S.H., No.33 tanggal 12 November 1973 di Jakarta.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan akta Notaris No. 63 dari Evi Susanti Panjaitan, S.H., tertanggal 24 Maret 2014, nama Perusahaan berubah yang semula Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) - Bali Tourism Development Corporation (BTDC) menjadi Perusahaan Perseroan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) - Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Perubahan nama Perusahaan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU- 15415.AH.01.02 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah dilakukan beberapa kali diantaranya terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1993 tanggal 3 Desember 1993 tentang perubahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2023. Perubahan terakhir dengan Akta No. 02 tanggal 2 Juni 2023 dari Notaris Desman, S.H., M.Hum. tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0036732.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersial pada bulan April 1982.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham

1. General

1.a. The Company's establishment

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia-Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ("the Company") was established based on Government Regulation No. 27 year 1972 with Notarial Deed No. 33 of Soelaiman Ardjasmita, S.H., dated November 12, 1973 in Jakarta.

Based on the Company's shareholders meeting as written in Notarial Deed No. 63 of Evi Susanti Panjaitan, S.H., dated March 24, 2014, the Company's name was changed from Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) - Bali Tourism Development Corporation (BTDC) to Perusahaan Perseroan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) - Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). The changes in the Company's name was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Acknowledgement Letter No. AHU-15415.AH.01.02 Year 2014 dated May 16, 2014.

The Company's Articles of Association has been amended several times in connection with Government Regulation No. 55 year 1993 dated December 3, 1993, concerning the changes in the capital contribution and amended by Government Regulation No. 44 Year 1998, Government Regulation No. 50 Year 2008, Government Regulation No. 33 Year 2009 and Government Regulation No. 3 Year 2023. The latest amendment was through Notarial Deed No. 02 of Desman, S.H., M.Hum. dated June 2, 2023, concerning Amendments to the Company's Articles of Association. The deed was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Acknowledgement Letter No. AHU-0036732.AH.01.02 Year 2023 dated June 27, 2023.

The Company started its commercial operations in April 1982.

Based on Government Regulation No. 3 year 2023 dated January 18, 2023 regarding Additional State Capital Injection of the Republic of Indonesia to Perusahaan

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviati Pariwisata Indonesia, seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebanyak 2.147.659 lembar saham dialihkan ke Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviati Pariwisata Indonesia. Pengalihan saham tersebut menyebabkan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia berubah menjadi Perseroan Terbatas.

Entitas induk Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviati Pariwisata Indonesia dan induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Menara BCA, Jakarta. Perusahaan mengoperasikan tiga unit bisnis yaitu Nusa Dua (Bali), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Golomori (Nusa Tenggara Timur).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki pegawai tetap masing-masing sejumlah 197 orang dan 193 orang (tidak diaudit).

1.b. Maksud dan tujuan Perusahaan

Sesuai akta pendirian, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang pariwisata, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah serta menggunakan tanah untuk keperluan daerah pariwisata dan menata serta membagi lebih lanjut dalam satuan-satuan lingkungan tertentu dan mengembangkan jasa-jasa prasarana dan fasilitas-fasilitas pariwisata lainnya;
- Menyerahkan dan menyewakan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga untuk membangun sarana pariwisata berikut segala fasilitas pendukungnya menurut persyaratan yang ditentukan Perusahaan

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

perseroan (Persero) PT Aviati Pariwisata Indonesia, all B Series shares of the Company owned by the State Republic of Indonesia of 2,147,659 shares were transferred to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviati Pariwisata Indonesia. Such transfer change the status of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia into Limited Liability Company.

The Company's entity parent is Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviati Pariwisata Indonesia and the Company's ultimate parent the is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company's head office is located in Menara BCA, Jakarta. The Company operates three business units, Nusa Dua Nusa Dua (Bali), Mandalika (West Nusa Tenggara), and Golomori (East Nusa Tenggara).

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has 197 and 193 permanent employees, respectively (unaudited).

1.b. The Company's aims and objectives

In accordance with the Company's deed of establishment, the aims and objectives of the Company are conducting business in tourism, as well as optimizing the utilization of resources owned by the Company to produce goods and/or services with high quality and strong competitiveness to gain profit in order to increase the Company's value by applying the principles applicable for a limited liability company.

To achieve such aims and objectives, the Company may conduct the following business activities:

- *Plan the use of land for purposes of tourism area development, organize and subdivide it in certain environmental units and develop infrastructure services and other tourism facilities;*
- *Submit and lease portions of land to third parties to build tourism facilities and all supporting facilities in accordance with the requirements set by the Company as the holder of the right, covering the terms of*

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

selaku pemegang hak, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu berikut keuangannya dengan ketentuan pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan yang diterapkan dalam anggaran dasar;

- Membangun, membeli, menjual dan mengelola properti pariwisata termasuk hotel, apartemen, kondominium, vila dan agrowisata serta fasilitas penunjang lainnya;
- Menyediakan jasa konsultasi di bidang pengembangan pariwisata, manajemen properti termasuk hotel, apartemen, kondominium dan vila meliputi manajemen pengelolaan, penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya;
- Merencanakan, membangun dan mengembangkan jasa-jasa prasarana dan fasilitas-fasilitas umum lainnya meliputi pengelolaan limbah, biro perjalanan, restoran, katering, fasilitas hiburan dan olahraga serta penyewaan ruangan dalam lingkungan daerah-daerah wisata;
- Membangun bangunan yang dipandang perlu untuk keperluan perusahaan dan administrasi daerah-daerah pariwisata;
- Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk usaha perkantoran, pusat perbelanjaan, *convention center* dan periklanan.

Kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perusahaan sampai dengan saat ini adalah merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah serta menggunakan tanah untuk keperluan daerah pariwisata (Nusa Dua, Bali dan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok), menyerahkan dan menyewakan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga untuk membangun sarana pariwisata berikut segala fasilitas pendukungnya, membangun hotel, vila dan agrowisata serta fasilitas penunjang lainnya dan merencanakan, membangun dan mengembangkan jasa-jasa prasarana dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

allotment, use, period and ensuring the financial terms related to the provision of land rights to third parties made by an authorized official, in accordance with the provisions of the articles of association;

- *Build, buy, sell and manage tourism properties including hotels, apartments, condominiums, villas and agro-tourism and other supporting facilities;*
- *Provide consultancy services in the tourism development, property management covering hotels, apartments, condominiums and villas including management, leasing, maintenance and provision of other supporting facilities;*
- *Plan, build and develop infrastructure services and other public facilities including waste management, travel agencies, restaurants, catering, entertainment and sports facilities as well as room rentals within the tourism area;*
- *Construct buildings deemed necessary for the purposes of development and administration of tourism areas;*
- *In addition to the main business activities as referred in paragraph (2), the Company may conduct business activities in order to optimize the utilization of its owned resources for office business, shopping center, convention center and advertising.*

The business activities undertaken by the Company to date are planning the designation and use of land and utilize land for tourism purposes (Nusa Dua, Bali and Mandalika Lombok Tourism Area), handing and leasing the land to third parties to build tourism facilities including supporting facilities, hotels, villas and agro-tourism as well as other supporting facilities and planning, constructing and developing infrastructure services and other public facilities.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1.c. Susunan dewan komisaris dan direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Ricky Joseph Pesik
Komisaris	Zainal Mutaqin
Komisaris	Irzani
Komisaris	Ulin Ni'am Yusron
<u>Dewan Direksi</u>	
Direktur Utama	Ari Respati
Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko	Ahmad Fajar
Direktur Sumber Daya Manusia dan Legal Compliance	Wenda Ramadya Nabel
Direktur Pengembangan Bisnis	Ema Widiastuti
Direktur Operasi	Troy Reza Warokka

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diangkat berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Nomor SK-364/MBU/11/2020 tanggal 13 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Perubahan susunan Dewan Komisaris ini telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0198747.AH.01.11 tanggal 26 November 2020.

Susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diangkat berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Nomor SK-169/MBU/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan susunan Direksi ini telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0163528.AH.01.11 tanggal 22 Agustus 2022.

1.c. Board of Commissioners and Directors

The Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Board of Commissioners</u>	
President Commissioner	Ricky Joseph Pesik
Commissioner	Zainal Mutaqin
Commissioner	Irzani
Commissioner	Ulin Ni'am Yusron
<u>Directors</u>	
President Director	Ari Respati
Finance, Strategy and Risk Management Director	Ahmad Fajar
Legal Compliance and Human Resources Director	Wenda Ramadya Nabel
Business Development Director	Ema Widiastuti
Operation Director	Troy Reza Warokka

The Company's Commissioners as of December 31, 2023 and 2022, were appointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Number SK-364/MBU/11/2020 dated November 13, 2020 regarding Discharge and Appointment of Members of the Board of Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. The change in the composition of the Board of Commissioners was reported to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in his Decision Letter No. AHU- 0198747.AH.01.11 dated November 26, 2020.

The Directors as of December 31, 2023 and 2022 were appointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Number SK-169/MBU/08/2022 dated August 8, 2022 regarding Dismissal, Changes in position Nomenclature and Appointment of Member of Director. The change in the composition of the Board of Directors was reported to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-0163528.AH.01.11 dated August 22, 2022.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Gaji dan kompensasi lainnya yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.894.796.733 dan Rp7.384.174.194. Gaji dan kompensasi lainnya yang telah dibayarkan kepada Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar masing-masing sebesar Rp15.521.178.063 dan Rp14.189.952.984.

Salaries and other compensation paid to the Board of Commissioners for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp7,894,796,733 and Rp7,384,174,194, respectively. Salaries and other compensation paid to the Directors for the years ended December 31, 2023 and 2022, amounted to Rp15,521,178,063 and Rp14,189,952,984, respectively.

1.d. Komite Audit

Susunan komite audit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1.d. Audit Committee

The Company's audit committee members as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	
<u>Komite Audit:</u>			<u>Audit committee</u>
Ketua	Ulin Ni'am Yusron*	Ulin Ni'am Yusron*	Chairman
Anggota	Dayan Hakim Natigor	Selvy Monalisa	Member
Anggota	Taufik Hidayat	Soniwell	Member

*) Merangkap sebagai Komisaris

*) Acting as a commissioner

Susunan komite audit pada tanggal 31 Desember 2023 diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No: 13/KEP/DEKOM/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan.

The audit committee members of December 31, 2023 were appointed based on the Decision of the Board of Commissioners No: 13/KEP/DEKOM/X/2023 dated October 16, 2023, regarding the Appointment of Members of the Company's Audit Committee.

Susunan komite audit pada tanggal 31 Desember 2022 diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No: 05/Kep/DEKOM/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan.

The audit committee members as of December 31, 2022 were appointed based on the Decision of the Board of Commissioners No: 05/Kep/DEKOM/10/2020 dated October 12, 2020, regarding the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Company's Audit Committee.

1.e. Struktur Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut:

1.e. Structure of the Subsidiaries

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has the following subsidiaries:

Entitas Anak Negara Perusahaan Berada/ Subsidiary Country of Incorporation	Dimulainya Kegiatan Komersial/ Start of Commercial Operations	Jenis Usaha/ Nature of Business	Kepemilikan Efektif (%)/ Effective Ownership (%)		Total Aset (dalam jutaan rupiah) (Sebelum eliminasi untuk Konsolidasi)/ Total Assets (in millions of Rupiah) (Before elimination for consolidation)	
			2023	2022	2023	2022
PT ITDC Nusantara Properti ("INP")	25 Juni 2020/ June 25, 2020	Induk Perusahaan untuk bisnis properti/Holding company for property business	99.96%	99.96%	26,444	30,728
PT ITDC Nusantara Utilitas ("INU")	15 Agustus 2019/ August 15, 2019	Perusahaan jasa di bidang utilitas/Services company for utility business	99.88%	99.88%	30,420	33,609

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas Anak Negara Perusahaan Berada/ Subsidiary Country of Incorporation	Dimulainya Kegiatan Komersial/ Start of Commercial Operations	Jenis Usaha/ Nature of Business	Kepemilikan Efektif (%)/ Effective Ownership (%)		Total Aset (dalam jutaan rupiah) (Sebelum eliminasi untuk Konsolidasi)/ Total Assets (in millions of Rupiah) (Before elimination for consolidation)	
			2023	2022	2023	2022
PT MGPA Nusantara Jaya ("MGPA")	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Operator penyelenggara event di Sirkuit Mandalika/ Event organizer operator at the Mandalika Circuit	99.95% (melalui/ through INP dan/and INU)	99.95% (melalui/ through INP dan/and INU)	122,236	72,627
PT Merese Mandalika Nusantara ("MMN")	31 Juli 2021/ July 31, 2021	Perwakilan pemilik hotel Pullman/Hotel Pullman owner representative	98.96% (melalui/ through INP)	98.96% (melalui/ through INP)	47,801	61,130
PT ITDC Nusantara Xplorin ("INX")	17 Maret 2017/ March 17, 2017	Agen tiket online/Online ticket agent	74.97% (melalui/ through INP)	74.97% (melalui/ through INP)	11,080	19,291

PT ITDC Nusantara Properti ("INP")

Pada tanggal 25 Mei 2018, Perusahaan mendirikan PT ITDC Nusantara Properti berdasarkan Akta Notaris Ary Supratno S.H., No. 96 beralamat di Menara BCA Lantai 39 dengan modal dasar sebanyak 33.556 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.

PT ITDC Nusantara Properti ("INP")

On May 25, 2018, the Company established PT ITDC Nusantara Properti, based on Notarial Deed No. 96 of Ary Supratno S.H., with registered address in BCA Tower 39th Floor and has an authorized capital stock of 33,556 shares with Rp1,000,000 par value.

PT ITDC Nusantara Utilitas ("INU")

Pada tanggal 25 Mei 2018, Perusahaan mendirikan PT ITDC Nusantara Utilitas berdasarkan Akta Notaris Ary Supratno S.H., No. 97 beralamat di Menara BCA Lantai 39 dengan modal dasar sebanyak 10.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.

PT ITDC Nusantara Properti ("INU")

On May 25, 2018, the Company established PT ITDC Nusantara Utilitas, based on Notarial Deed No. 97 of Ary Supratno S.H., with registered address in BCA Tower 39th Floor and has an authorized capital stock of 10,000 share with Rp1,000,000 par value.

PT MGPA Nusantara Jaya ("MGPA")

Pada tanggal 21 Januari 2019, PT ITDC Nusantara Properti, entitas anak Perusahaan mendirikan PT Kuta Mandalika Nusantara berdasarkan Akta Notaris Saharjo SH., M.Kn., M.H. No. 173 beralamat di Lot BS2 Kawasan Mandalika dengan modal dasar sebanyak 20.000 dengan nilai nominal Rp1.000.000.

PT MGPA Nusantara Jaya ("MGPA")

On January 21, 2019, PT ITDC Nusantara Properti, the Company's subsidiary established PT Kuta Mandalika Nusantara, based on Notarial Deed No. 173 of Saharjo SH., M.Kn., M.H., with registered address in Lot BS2 Mandalika area and has an authorized capital stock of 20,000 shares with Rp1,000,000 par value.

Pada tanggal 15 Juli 2020, PT Kuta Mandalika Nusantara berubah nama menjadi PT MGPA Nusantara Jaya berdasarkan Akta Notaris Ary Supratno, S.H. No. 28.

On July 15, 2020, PT Kuta Mandalika Nusantara changed its name to PT MGPA Nusantara Jaya, based on notarial deed No. 28 of Ary Supratno, S.H.

PT Merese Mandalika Nusantara ("MMN")

Pada tanggal 21 Januari 2019, PT ITDC Nusantara Properti, entitas anak Perusahaan mendirikan PT Merese Mandalika Nusantara berdasarkan Akta Notaris Saharjo SH., M.Kn., M.H. No. 174 beralamat di Lot TTA1 Kawasan Mandalika dengan modal dasar sebanyak 5.000 dengan nilai nominal Rp1.000.000.

PT Merese Mandalika Nusantara ("MMN")

On January 21, 2019, PT ITDC Nusantara Properti, the Company's subsidiary established PT Merese Mandalika Nusantara, based on Notarial Deed No. 174 of Saharjo SH., M.Kn., M.H., with registered address in Lot TTA1 Mandalika area and has an authorized capital stock of 5,000 shares with Rp1,000,000 par value.

PT ITDC Nusantara Xplorin ("INX")

Pada tanggal 11 Februari 2019, PT ITDC Nusantara Utilitas, entitas anak Perusahaan mengakuisisi PT Jelajah Keindahan Indonesia berdasarkan Akta Notaris Sugih Haryati SH, M.Kn., No. 48 dan 49. Nilai akuisisi yang dikeluarkan oleh PT ITDC Nusantara Utilitas sebesar Rp450.000.000 atau setara 75% dari modal PT Jelajah Keindahan Indonesia ("JKI").

Pada tanggal 5 Juli 2021, PT Jelajah Keindahan Indonesia telah mengubah nama menjadi PT ITDC Nusantara Xplorin berdasarkan Akta Notaris Ary Supratno, S.H. No. 05.

Pada tanggal 30 Juli 2021, Kepemilikan PT ITDC Nusantara Utilitas pada PT ITDC Nusantara Xplorin telah diambil alih oleh PT ITDC Nusantara Properti berdasarkan Akta Notaris Ary Supratno S.H. No. 22.

PT ITDC Nusantara Xplorin ("INX")

On February 11, 2019, PT ITDC Nusantara Utilitas, the Company's subsidiary acquired PT Jelajah Keindahan Indonesia based on Notarial Deed No. 48 and 49 of Sugih Haryati SH, M.Kn. Acquisition value paid by the PT ITDC Nusantara Utilitas amounting to Rp450,000,000 or equivalent with 75% from authorized capital of PT Jelajah Keindahan Indonesia ("JKI").

On July 5, 2021, PT Jelajah Keindahan Indonesia changes its name to PT ITDC Nusantara Xplorin based on Notarial Deed No. 05 of Ary Supratno S.H.

On July 30, 2021, ownership of PT ITDC Nusantara Xplorin by PT ITDC Nusantara Utilitas have been acquired by PT ITDC Nusantara Properti based on Notarial Deed No. 22 of Ary Supratno S.H.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi yang Material

Kebijakan akuntansi material berikut ini diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

2.a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1, "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK 1, menetapkan dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian, yang disajikan dalam Rupiah (mata uang penyajian dan fungsional), telah disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dengan dasar akrual dan menggunakan dasar

2. Material Accounting Policies Information

The following material accounting policies applied consistently in the preparation of the financial statements are as follows:

2.a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") including statements and interpretation issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK").

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1, "Presentation of Financial Statements". PSAK 1, prescribed the basis for presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity's financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities.

The consolidated financial statements, presented in Rupiah (presentation and functional currency), have been prepared based on going concern assumption with accrual basis and using the historical cost

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

biaya historis kecuali diungkapkan lain dalam catatan terkait di sini.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

2.b. Pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Panjang atau Jangka Pendek;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

2.c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Pengendalian diperoleh ketika Perusahaan terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara khusus, Perusahaan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika, Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

- i. kekuasaan atas *investee* (misalnya adanya hak yang memberikan Perusahaan kemampuan saat ini untuk mengarahkan aktivitas *investee* yang relevan);

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

basis except otherwise disclosed in the related notes herein.

The consolidated statement of cash flows presents receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the direct method.

2.b. New and revised statements and interpretation of financial accounting standards effective in the current year

The following are amendments and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;*
- *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Current or Non-Current;*
- *Amendments to PSAK 16: Fixed Assets Related to Proceeds Before Intended Use;*
- *Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;*
- *Amendment to PSAK 46: Income Tax regarding Asset-Related Deferred Tax and Liabilities Arising from a Single Transaction; and*
- *Revised PSAK 107: Accounting for Ijarah.*

The implementation of the above standards had no material effect on the amounts reported for the current period or prior financial period.

2.c. Principles of Consolidation

Control is achieved when the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Specifically, the Company controls an investee if, and only if, the Company has:

- i. *power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee);*

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- ii. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan Perusahaan dengan *investee*; dan
- iii. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil Perusahaan.

Umumnya, kepemilikan hak suara mayoritas menghasilkan pengendalian. Untuk mendukung hal ini dan jika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari hak suara mayoritas, atau hak sejenis atas suatu *investee*, Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i. pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara lainnya pada *investee*;
- ii. hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- iii. hak suara yang dimiliki Perusahaan dan hak suara potensial.

Perusahaan menilai kembali apakah masih mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal Perusahaan mendapatkan pengendalian hingga tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Labanya atau rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari Perusahaan dan kepentingan nonpengendali ("KNP"), meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit. Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat atas laporan keuangan entitas anak untuk menyesuaikan kebijakan akuntansinya sesuai kebijakan akuntansi Perusahaan. Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar Perusahaan dengan Entitas Anak, termasuk keuntungan dan kerugian belum terealisasi, jika ada, dieliminasi untuk merefleksikan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya sebagai kesatuan entitas bisnis.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- ii. *exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and*
- iii. *the ability to use its power over the investee to affect the returns.*

Generally, there is a presumption that a majority of voting rights result in control. To support this presumption and when the Company has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- i. the contractual arrangement(s) with the other vote holders of the investee;*
- ii. rights arising from other contractual arrangements; and*
- iii. the Company voting rights and potential voting rights.*

The Company re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Company gain control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Company and to the non-controlling interest ("NCI"), even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of Subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Company's accounting policies. All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains and losses, if any, is eliminated to reflect the consolidated financial position and financial performance of the Company and its subsidiaries as one business entity.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, kepentingan nonpengendali, dan komponen ekuitas lainnya serta mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian. Saldo investasi yang masih dimiliki diakui pada nilai wajarnya.

2.d. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas anak lainnya);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction.

If the Company loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while any related gain or loss is recognized in profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

2.d. Transactions with related parties

The Company has transactions with certain parties which have related parties relationship as defined under PSAK 7, "Related Party Disclosures".

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiaries are related to each others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh para pihak. Persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang signifikan diungkapkan dalam Catatan 40.

2.e. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam waktu paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties. The significant transactions and balances are disclosed in Note 40.

2.e. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- held primarily for the purpose of trading,
- expected to be realized within 12 months after the reporting date, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date.

All other assets are classified as non-current.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya paling tidak dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

2.f. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Perusahaan dan entitas anaknya mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anaknya.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan melibatkan mata uang selain Rupiah dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tukar yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Seluruh aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian neto dari selisih kurs dikreditkan atau dibebankan ke operasi berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Dolar Amerika Serikat	15,416	15,731
Euro Eropa	17,140	16,626

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

A liability is current when it is

- expected to be settled in the normal operating cycle,
- held primarily for the purpose of trading,
- due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

2.f. Foreign currency transactions and balances

The Company and its subsidiaries considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency. If indicators are mixed and the functional currency is not obvious, management uses its judgment to determine the functional currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Company and its subsidiaries.

Transactions of the Company involving currencies other than Rupiah are recorded in Rupiah amounts using the rates of exchange prevailing at the time the transactions occur.

All monetary assets and liabilities denominated in currencies other than Rupiah are translated to Rupiah at the Bank Indonesia's middle exchange rates prevailing on the reporting date. The resulting net foreign exchange gains or losses are credited or charged to current operations.

As of December 31, 2023 and 2022, the rates of exchange applied are as follows:

United States Dollar
European Euro

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau tidak penggunaannya.

Dana yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai bukan kas dan dicatat sebagai bagian dari aset lain-lain.

2.h. Instrumen keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anaknya menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan dan entitas anaknya mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anaknya diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2.g. Cash and cash equivalent

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposits with maturities within three months or less at the time of placements and not pledged as collateral for loans and other borrowings and are not restricted.

Restricted fund is classified as non-cash and presented as part of other assets.

2.h. Financial instrument

The Company and its subsidiaries recognize a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Company and its subsidiaries measure all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Company and its subsidiaries' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

(i) Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) The financial assets is held within a business model whose objective to hold the financial assets to collect contractual cash flows (held to collect); and

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- (2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

(ii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- (1) The financial assets is held within a business modal whose objective is achieved by both collective contractual cash flows and selling financial assets; and
- (2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income, except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Perusahaan dan entitas anaknya dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

**Pengukuran
Keuangan**

Perusahaan dan entitas anaknya mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

(iii) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Company and its subsidiaries may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortized cost, except for:

- (a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- (b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
- (i) Jumlah penyisihan kerugian; dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- (d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar neto diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Saat pengakuan awal, Perusahaan dan entitas anaknya dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (a) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- (b) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anaknya.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

involvement approach applies.

- (c) *Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:*
- (i) The amount of the loss allowance; and*
 - (ii) The amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.*
- (d) *Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.*

Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the consolidated statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

At initial recognition, the Company and its subsidiaries irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (a) eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or*
- (b) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Company and its subsidiaries's key management personnel.*

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anaknya mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Perusahaan dan entitas anaknya menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Perusahaan dan entitas anaknya secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perusahaan dan entitas anaknya terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Impairment of financial assets

The Company and its subsidiaries recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI.

At the end of each reporting date, the Company and its subsidiaries calculate any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 month expected credit loss is recognized.

The Company and its subsidiaries applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Company and its subsidiaries consider a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Company and its subsidiaries in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Company and its subsidiaries is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*
- iii. Reasonable and supportable information*

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Perusahaan dan entitas anaknya menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor perkiraan masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan dan entitas anaknya mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. The Company and its subsidiaries has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Company and its subsidiaries estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Reklasifikasi

Perusahaan dan entitas anaknya mereklasifikasi aset keuangan ketika Perusahaan dan entitas anaknya mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Ketika mereklasifikasi aset keuangan, Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perusahaan dan entitas anaknya tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Perusahaan dan entitas anaknya mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Perusahaan dan entitas anaknya melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Perusahaan dan entitas anaknya mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Perusahaan dan entitas anaknya mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Reclassification

The Company and its subsidiaries reclassifies a financial asset if and only if the Company and its subsidiaries' business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Company and its subsidiaries reclassify a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Company and its subsidiaries are not restated gains, losses (including impairment gains or losses) or interest previously recognized.

When the Company and its subsidiaries reclassify its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Company and its subsidiaries reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Company and its subsidiaries reclassify its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Company and its subsidiaries reclassify its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Perusahaan dan entitas anaknya mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Perusahaan dan entitas anaknya mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan dan entitas anaknya mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan dan entitas anaknya secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan dan entitas anaknya secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan dan entitas anaknya mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perusahaan dan entitas anaknya secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Company and its subsidiaries reclassify its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Company and its subsidiaries reclassify its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Company and its subsidiaries derecognize a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Company and its subsidiaries transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to received the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Company and its subsidiaries transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company and its subsidiaries derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Company and its subsidiaries neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Company and its subsidiaries continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Company and its subsidiaries retain substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company and its subsidiaries continues to recognize the financial asset.

kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anaknya tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Perusahaan dan entitas anaknya menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anaknya saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2.i. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Perusahaan dan entitas anaknya memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan yang diperlukan untuk menentukan pengendalian atas entitas-entitas anak. Investasi Perusahaan dan entitas anaknya pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Perusahaan dan entitas anaknya atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. *Goodwill* sehubungan dengan entitas asosiasi termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diuji untuk penurunan nilai secara terpisah.

Laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Perusahaan dan entitas anaknya atas hasil usaha entitas asosiasi. Setiap perubahan

The Company and its subsidiaries derecognize a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Company and its subsidiaries currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

2.i. Investment in associate

An associate is an entity over which the Company and its subsidiaries has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries. The Company and its subsidiaries investments in its associate are accounted for using the equity method.

Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Company and its subsidiaries share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is not tested for impairment separately.

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the Company and its subsidiaries share of the results of operations of the associate. Any

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penghasilan komprehensif lain dari *investee* tersebut disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya Perusahaan dan entitas anaknya ("OCI"). Apabila telah terjadi perubahan yang diakui secara langsung dalam ekuitas entitas asosiasi tersebut, Perusahaan dan entitas anaknya mengakui bagiannya atas perubahan, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat transaksi antara Perusahaan dan entitas anaknya dengan entitas asosiasi tersebut dieliminasi sesuai kepentingan entitas asosiasi.

Keseluruhan bagian Perusahaan dan entitas anaknya atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada laba rugi di luar laba operasi dan merupakan laba rugi setelah pajak dan KNP pada entitas-entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan dan entitas anaknya. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan untuk menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anaknya.

Setelah penerapan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anaknya menentukan apakah perlu untuk mengakui kerugian penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anaknya menentukan apakah ada bukti objektif bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Jika ada bukti tersebut, Perusahaan dan entitas anaknya menghitung jumlah penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang dapat dipulihkan dari entitas asosiasi dan nilai tercatatnya, dan kemudian mengakui kerugian tersebut dalam bagian "laba dari perusahaan asosiasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan terhadap entitas asosiasi, Perusahaan mengukur dan menilai investasi yang tersisa pada nilai wajarnya. Selisih yang timbul atas nilai tercatat dengan nilai wajarnya pada saat kehilangan pengaruh signifikan dan hasil yang diterima pada saat pelepasan diakui dalam laporan laba rugi.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

change in other comprehensive income of those investees is presented as part of the Company and its subsidiaries Other comprehensive income ("OCI"). In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Company and its subsidiaries recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealised gains and losses resulting from transactions between the Company and its subsidiaries and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Company and its subsidiaries share of profit or loss of an associate is shown on the face of the profit or loss outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period as the Company and its subsidiaries. When necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Company and its subsidiaries.

After application of the equity method, the Company and its subsidiaries determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on its investment in its associate. At each reporting date, the Company and its subsidiaries determines whether there is objective evidence that the investment in the associate is impaired. If there is such evidence, the Company and its subsidiaries calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value, and then recognizes the loss within "share of profit of an associate" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Upon loss of significant influence over the associate, the Company measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate upon loss of significant influence or joint control and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

2.j. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2.k. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu.

Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan aset tetap termasuk biaya penggantian bagian dari aset tetap pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuannya terpenuhi. Demikian pula, ketika pemeriksaan utama dilakukan, biaya pemeriksaan diakui sebagai nilai tercatat aset sebagai penggantian jika kriteria pengakuan terpenuhi.

Semua biaya perbaikan dan perawatan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Tahun	Class of Property and Equipment
Bangunan	20 - 30	Buildings
Lanskap dan taman	20	Landscape and garden
Mesin dan peralatan	8	Machinery
Peralatan kantor	4	Office equipment
Perlengkapan kantor	4	Office furniture and fixtures
Kendaraan bermotor	5	Vehicles

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

2.j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

2.k. Property and Equipment

Property and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period.

After initial recognition, property and equipment, except landright, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied.

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Construction in progress is presented under "Property and equipments" and stated at cost. The accumulated cost of the asset constructed is transferred to the appropriate property and equipment account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada akhir setiap periode pelaporan, nilai residu dan masa manfaat ditelaah dan disesuaikan secara prospektif jika sesuai dengan keadaan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbarui/diperpanjang pada saat masa berlakunya selesai.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

Biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB, dan HP ditangguhkan dan diamortisasi yang lebih pendek antara umur hukum hak atas tanah dan umur ekonomis tanah, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2.1. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anaknya menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perusahaan dan entitas anaknya mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included as profit or loss in the period the asset is derecognized.

At the end of each reporting period, the assets' residual values and useful lives are reviewed and adjusted prospectively if appropriate.

Land are stated at cost and not amortised as the management believes that it is probable the titles of land rights can be renewed/extended upon expiration.

Legal cost of land rights in the form of Right to Cultivate ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Right to Build ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Right to Use ("Hak Pakai" or "HP") when the land rights were acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Property and Equipment" account and are not amortised.

The extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP were deferred and amortised over the shorter between the land rights' legal life and the economic life of the land, and presented as part of "Other Non-current Assets" account in the consolidated statement of financial position.

2.1. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting date, the Company and its subsidiaries assesses, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company and its subsidiaries estimates the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset or Cash Generating Unit's fair value less costs to sell and its value in use, and is

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(UPK) dikurangi dengan biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia.

Perusahaan dan entitas anaknya mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Perusahaan dan entitas anaknya atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas kelompok arus kas terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan dan entitas anaknya mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available.

The Company and its subsidiaries bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations, which are prepared separately for each of the Company and its subsidiaries CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each estate's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Company and its subsidiaries estimates asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been

terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi.

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2.m. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- dalam hal tidak terdapat pasar utama, maka pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan dan entitas anaknya.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (input) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (input) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in the profit or loss.

After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

2.m. Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *in the principal market for the asset or liability; or*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company and its subsidiaries.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company and its subsidiaries uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikelompokkan dalam hierarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Perusahaan dan entitas anaknya menentukan apakah terdapat perpindahan antara level dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (input) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anaknya pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.n. Properti investasi

Properti investasi terdiri atas tanah atau bangunan yang dimiliki untuk sewa operasi atau kenaikan nilai, daripada untuk digunakan atau dijual dalam kegiatan operasi normal.

Properti investasi, kecuali tanah, diakui sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan estimasi masa manfaat.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kualitas output atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi. Properti investasi yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok properti investasi

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Company and its subsidiaries determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company and its subsidiaries at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.n. Investment property

Investment property represents land and building held for operating lease or for capital appreciation, rather than for use or sale in the ordinary course of business.

Investment property, except land, is recognized at cost and depreciated over the estimated useful life.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Expenditures which extend the useful lives of the property or result in increasing future economic benefits such as increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance is capitalized. When the property is retired or otherwise disposed of, the carrying value and the related accumulated

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berikut akumulasi penyusutan dan penurunan nilainya, jika ada. Keuntungan atau kerugian dari penjualan properti investasi tersebut dibukukan dalam laba rugi pada tahun penjualan terjadi.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan ("HPL"), Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("Hak Pakai") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari perolehan tanah dan tidak diamortisasi.

Sementara biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Properti investasi dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis dimasa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

2.o. Aset takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

depreciation and accumulated impairment losses, if any, are removed from the account. Gains or losses from sale of investment property are recorded in profit or loss in the year of sale.

Legal costs of landrights in the form of Hak Pengelolaan Lahan ("HPL"), Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") and Hak Pakai ("Hak Pakai") when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land and not amortized.

Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights are recognized as intangible assets and amortized over the shorter of the rights' legal life or land's economic life.

Investment property is derecognized from statement of financial position when the property is retired or otherwise disposed of, the carrying value and the related accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any, are removed from the account. Gains or losses from sale of investment property are recorded in profit or loss in the year of sale or disposal.

Transfer to investment property is made if, and only if there is a change of use indicated by termination of owner usage, commencement of operating lease to another party or the end of construction or development. Transfers from investment property are made if, and only if there is a change in use as indicated by commencement of owner-use or commencement of development for sale.

2.o. Intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is their fair value at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalised development costs, are not capitalised and the related expenditure is reflected in profit or loss in the

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dikapitalisasi dan pengeluaran terkait tercermin dalam laba rugi pada periode ketika pengeluaran terjadi.

Masa manfaat aset takberwujud dinilai baik terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai setiap ada indikasi bahwa aset takberwujud tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas dikaji paling lambat pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dianggap memodifikasi periode atau metode amortisasi, sebagaimana mestinya, dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset takberwujud dengan umur terbatas diakui dalam laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji untuk penurunan setiap tahun, baik secara individu atau pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa manfaat yang tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat yang tidak terbatas tetap dapat didukung. Jika tidak, perubahan dalam masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya.

2.p. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
Perusahaan dan entitas anaknya bergerak dalam bisnis penyediaan jasa penyewaan lahan dan jasa yang terkait dengan pengelolaan lahan tersebut. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat pengendalian lahan atau jasa dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

period in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite life is recognized in the statement of profit or loss in the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the statement of profit or loss when the asset is derecognized.

2.p. Revenue and expense recognition

Revenue from contracts with customers
The Company and its subsidiaries is in the business of providing land rent services and other services related to that land rent. Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods or services are transferred to customer at an amount that reflects the consideration to which

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Perusahaan dan entitas anaknya dalam pertukaran barang atau jasa tersebut. Perusahaan dan entitas anaknya secara umum menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah yang utama dalam pengaturan pendapatannya.

Perusahaan dan entitas anaknya mempertimbangkan apakah ada janji lain dalam kontrak yang merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah yang perlu dialokasikan sebagian dari harga transaksi (misalnya garansi, poin loyalitas pelanggan). Dalam menentukan harga transaksi untuk penjualan jasa, Perusahaan dan entitas anaknya mempertimbangkan pengaruh dari imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan yang signifikan, imbalan non-kas, dan utang imbalan kepada pelanggan (jika ada).

Pendapatan lainnya diakui pada saat diperoleh.

Beban diakui pada saat terjadinya secara akrual.

2.q. Perpajakan

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan kena pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK 46, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan pajak final sehubungan dengan penghasilan sewa tanah sebagai pos tersendiri.

Pajak penghasilan tidak final

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

the Company and its subsidiaries expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Company and its subsidiaries has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

The Company and its subsidiaries considers whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated (e.g., warranties, customer loyalty points). In determining the transaction price for the sale of services, the Company and its subsidiaries considers the effects of variable consideration, the existence of significant financing components, non-cash consideration, and consideration payable to the customer (if any).

Other income/revenues are recognized when earned.

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

2.q. Taxation

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction are recognizing losses.

Referring to PSAK 46, final tax is no longer governed by PSAK 46. Accordingly, the Company present the final tax arising from land rental revenue as separate line item.

Non-final income tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset.

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anaknya:

- a. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali: liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak; dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset.

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The Company and its subsidiaries offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Company and its subsidiaries:

- a. Has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and*
- b. Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except: when the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; in respect of taxable temporary differences associated with investments in

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan dan akumulasi rugi fiskal yang tidak terpakai. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali: jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

Dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perusahaan dan entitas anaknya menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui.

Perusahaan dan entitas anaknya mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

subsidiaries, associates and interests in joint arrangements, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses can be utilised, except: when the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

In respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interest in joint arrangements, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries reassess unrecognized deferred tax assets.

The Company and its subsidiaries recognize a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Perusahaan dan entitas anaknya memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

2.r. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek meliputi upah, iuran jaminan sosial, dan asuransi

Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program manfaat pasti untuk semua karyawan yang memenuhi syarat.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuarial berdasarkan metode *Projected Unit Credit* seperti yang diharuskan oleh PSAK 24 .

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

The Company and its subsidiaries offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a. The Company and its subsidiaries has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and
- b. The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:
 - i. The same taxable entity; or
 - ii. Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

2.r. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits includes wages, social security contributions, and insurances

Pension benefits and other post-employment benefits

The Company and its subsidiaries has defined benefit pension plan for all of eligible permanent employees.

For financial reporting purposes, the defined benefit pension plan is calculated using the actuarial assumptions based on the Projected Unit Credit method as required by PSAK 24.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba-rugi, yang terdiri dari:

- Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset);
- Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- Tanggal amendemen atau kurtailmen program; dan
- Tanggal pada saat Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto dalam laporan keuangan berupa:

- Biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian atas kurtailmen; dan
- Beban atau pendapatan bunga neto.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila entitas:

- Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang signifikan dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

Untuk program pensiun iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada usaha periode berjalan.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset) is recognized as other comprehensive income and not reclassified to profit or loss, which consists of:

- *Actuarial gains and losses;*
- *Return on program asset, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest; and*
- *Every changes in asset ceiling, excluding of amount included in liabilities (asset) net interest.*

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier of:

- *The date of the plan amendment or program curtailment; and*
- *The date that the Company recognizes related restructuring costs.*

Net interest is calculated by applying discount rate to the net defined benefit liability (asset) in the financial statement as follows:

- *Service costs comprising current service costs, past-service costs and gains and losses on the curtailment; and*
- *Net interest expense or income.*

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

A curtailment occurs when an entity either:

- *Is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan; or*
- *Amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.*

A settlement occurs when the Company and its subsidiaries enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

For the defined contribution pension plan, contributions payable are charged to current period operations.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan dan entitas anaknya juga memberikan imbalan kerja jangka panjang selain pensiun yang meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan masa kerja yang tidak didanai. Beban imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode *Projected Unit Credit* dengan metode yang disederhanakan di mana metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Total nilai neto dari biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui pada laba rugi tahun berjalan.

2.s. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut diumumkan oleh para pemegang saham.

2.t. Laba per saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Perusahaan dan entitas anaknya tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2.u. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Perusahaan dan entitas anaknya sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Perusahaan dan entitas anaknya telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Other long-term employee benefit

The Company and its subsidiaries also provide long-term employee benefits other than pension which include long-term compensation leave and service rewards which are unfunded. The cost of providing other long-term employee benefits is determined using the *Projected Unit Credit* method using simplified method of not recognizing remeasurements in other comprehensive income. The net total of service cost, net interest on the net defined benefit liability (asset) and remeasurements of the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss for the year.

2.s. Dividend

The distribution of dividend to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared by the shareholders.

2.t. Earnings per share

Basic earnings per share amounts are computed by dividing profit for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

The Company and its subsidiaries have no potential dilutive ordinary shares, and as such, diluted earnings per share are not calculated and presented in the consolidated statements of profit loss and other comprehensive income.

2.u. Borrowing costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Company and its subsidiaries incur in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the Company and its subsidiaries undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the

aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasi agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

qualifying assets for its intended use or sale are complete.

2.v. Sewa

Perusahaan dan entitas anaknya sebagai lessee

Perusahaan dan entitas anaknya menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai imbalan untuk imbalan.

Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Perusahaan dan entitas anaknya mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

i. Aset hak-guna

Perusahaan dan entitas anaknya mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul diawal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

Kelompok aset hak-guna	Tahun		Class of right-of-use assets
	10	20 - 30	
Lahan			Land
Bangunan			Building

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Perusahaan dan entitas anaknya pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

2.v. Lease

The Company and its subsidiaries as a lessee

The Company and its subsidiaries assess at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company and its subsidiaries apply a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company and its subsidiaries recognize lease liabilities to make lease payments and right of use assets representing the right-to-use the underlying assets.

i. Right-of-use assets

The Company and its subsidiaries recognize right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

If ownership of the leased asset transfers to the Company and its subsidiaries at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ii. Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan dan entitas anaknya mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dibawah jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh Perusahaan dan entitas anaknya, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Perusahaan dan entitas anaknya melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan suku bunga pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

iii. Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa mesin dan peralatan jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ii. Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company and its subsidiaries recognize lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and its subsidiaries, and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company and its subsidiaries exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Company and its subsidiaries use its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

iii. Short-term leases and leases of low-value assets

The Company and its subsidiaries applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of machinery and equipment (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa peralatan kantor yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan dan entitas anaknya sebagai lessor

Sewa di mana Perusahaan dan entitas anaknya tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

2.w. Informasi segmen

Untuk tujuan manajemen, mulai tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan dan entitas anaknya membagi tiga segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen Perusahaan yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 50, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

2.x. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar Akuntansi yang Telah Disahkan, tetapi Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2023.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

low-value assets recognition exemption to leases of office equipment that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company and its subsidiaries as a lessor

Leases in which the Company and its subsidiaries do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

2.w. Segment information

For management purposes, starts from December 31, 2021, the Company and its subsidiaries organized three operating segments based on their products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance.

Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 50, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

2.x. Accounting Standard and Interpretation of Accounting Standard which Has Issued but Not Effective Yet

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2023.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Amandemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang Dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik;
- Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang pengaturan pembiayaan pemasok;
- Revisi PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Revisi PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif;
- Amendemen PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 74: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 2: Laporan Arus Kas
- PSAK 13: Properti Investasi
- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16: Aset Tetap
- PSAK 19: Aset Takberwujud
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis
- PSAK 24: Imbalan Kerja
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset
- PSAK 50: Instrumen Keuangan Penyajian
- PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi
- PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Amendment and revised to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2024, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;
- Amendments PSAK 73: Lease Liability in a Sale and Leaseback;
- Amendments PSAK 2: Statement of Cash Flows and PSAK 60: Financial Instrument: Disclosure regarding supplier finance agreement
- Revised PSAK 101: Presentation of Shariah Financial Statements; and
- Revised PSAK 109: Accounting of Zakah, Infaq, and Sadaqah

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract;
- Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information;
- Amendments PSAK 10: Foreign Exchange Rate regarding lack of exchangeability.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 74: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 1: Presentation of Financial Statements
- PSAK 2: Statement of Cash Flows
- PSAK 13: Investment Property
- PSAK 15: Investment in Associated Entities and Joint Ventures
- PSAK 16: Fixed Assets
- PSAK 19: Intangible Assets
- PSAK 22: Business Combinations
- PSAK 24: Employee Benefits
- PSAK 48: Impairment of Asset
- PSAK 50: Financial Instruments: Presentation
- PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
- PSAK 58: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak memengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anaknya yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures
- PSAK 71: Financial Instruments
- PSAK 72: Income from Contracts with Customers

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

DSAK-IAI also ratified changes to the numbering of PSAK and ISAK which will be effective on January 1, 2024. This change does not affect the substance of the requirement in each PSAK and ISAK.

3. Source of Estimation Uncertainty

The preparation of the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in the following reporting period.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company and its subsidiaries' accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determination of functional currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. The management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anaknya yang diungkapkan di Catatan 2h.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Perusahaan dan entitas anaknya mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar RpNihil (31 Desember 2022: RpNihil). Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 19.

Estimasi akuntansi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan dan entitas anaknya mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan dan entitas anaknya. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company and its subsidiaries determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and its subsidiaries' accounting policies disclosed in Note 2h.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company and its subsidiaries recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of December 31, 2023 amounted to RpNil (December 31, 2022: Rpnil). Further details regarding taxation are disclosed in Note 19.

Accounting estimates

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company and its subsidiaries based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future development may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and its subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Perusahaan dan entitas anaknya mengestimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan penggunaan yang diharapkan dari aset dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan dan entitas anaknya terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan pembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Perusahaan dan entitas anaknya mengestimasi masa manfaat aset tetap antara 4 sampai dengan 30 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan dan entitas anaknya menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.481.443.946.896 (31 Desember 2022: Rp4.964.568.492.627). Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 15.

Estimasi imbalan kerja

Biaya program pensiun manfaat pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya serta nilai kini liabilitas imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan penilaian aktuarial. Penilaian aktuarial melibatkan penentuan berbagai asumsi, termasuk penentuan tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji masa depan, tingkat mortalitas, tingkat pengunduran diri karyawan, tingkat kecacatan dan tingkat hasil yang diharapkan dari aset program. Karena kerumitan penilaian, asumsi yang mendasari dan sifat jangka panjangnya, kewajiban

Estimation of useful life of property and equipment

The Company and its subsidiaries estimate the economic useful lives of its property and equipment based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of property and equipment is based on the Company and its subsidiaries' assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed each end of financial reporting and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The Company and its subsidiaries estimate the economic useful lives of these property and equipment to be within 4 to 30 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company and its subsidiaries conduct its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

The net carrying amount of the Company and its subsidiaries' property and equipment as of December 31, 2023 amounted to Rp5,481,443,946,896 (December 31, 2022: Rp4,964,568,492,627). Further details are disclosed in Note 15.

Employee benefits estimation

The cost of defined benefit pension plans and other long-term employee benefits and the present value of the defined benefit obligation are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions, which includes the determination of the discount rate, future salary increases, mortality rates, employee turn-over rate, disability rate and the expected rate of return on plan assets. Due to the complexity of the valuation, the underlying assumptions and its long term nature, a defined benefit obligation is

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

manfaat pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi-asumsi tersebut. Seluruh asumsi ditelaah setiap akhir periode pelaporan.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, manajemen memperhitungkan tingkat bunga (pada akhir periode pelaporan) dari obligasi pemerintah dalam Rupiah. Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk masing-masing entitas dalam Perusahaan dan entitas anaknya yang mencerminkan rata-rata perkiraan jadwal pembayaran imbalan dan mata uang yang digunakan dalam membayar imbalan. Tingkat mortalitas adalah berdasarkan tabel mortalitas yang tersedia pada saat publikasi. Tingkat kenaikan gaji masa depan didasarkan pada rencana kerja jangka panjang Perusahaan dan entitas anaknya yang juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi masa depan negara.

Walaupun Perusahaan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan entitas anaknya dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.436.165.919 (31 Desember 2022: Rp34.097.516.232). Penjelasan lebih rinci mengenai asumsi-asumsi yang digunakan diungkapkan pada Catatan 23.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha

Perusahaan dan entitas anaknya mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis yang diobservasi Perusahaan dan entitas anaknya. Perusahaan dan entitas anaknya akan memperbarui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Dalam hal tersebut, Perusahaan dan entitas anaknya mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at the end of reporting period.

In determining the appropriate discount rate, management considers the market yields (at the end of reporting period) on Indonesian Rupiah government bonds. The Company and its subsidiaries uses a single discount rate for each entity within the Company and its subsidiaries that reflects the estimated average timing of benefit payments and the currency in which the benefits are to be paid. The mortality rate is based on publicly available mortality tables. Future salary increase is based on the Company and its subsidiaries' long-term business plan which is also influenced by future inflation rates for the country.

While the Company and its subsidiaries believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company and its subsidiaries' actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount of the Company and its subsidiaries' long-term liabilities for employee benefits as of December 31, 2023 amounted to Rp39,436,165,919 (December 31, 2022: Rp34,097,516,232). Further details about the assumptions used are disclosed in Note 23.

Allowance for impairment losses on trade receivable

The Company and its subsidiaries evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. The Company and its subsidiaries use a provision matrix to calculate expected loss from accounts receivable. The provisioning matrix was initially based on the historical default rates observed by the Company and its subsidiaries. The Company and its subsidiaries will update the matrix to match historical credit loss experience with forward-looking information. In these cases, the Company and its subsidiaries use judgment, based on the best available facts and circumstances, including the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status, to record

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anaknya.

Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha. Nilai tercatat dari piutang usaha Perusahaan dan entitas anaknya sebelum cadangan kerugian untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp414.626.889.889 (31 Desember 2022: Rp318.782.867.892). Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 8.

Evaluasi penurunan nilai pada aset

Perusahaan dan entitas anaknya menelaah penurunan nilai atas aset tetap. Hal ini termasuk mempertimbangkan indikasi tertentu dari penurunan nilai seperti perubahan signifikan dalam penggunaan aset, penurunan signifikan nilai pasar aset, keusangan atau kerusakan fisik aset, kinerja yang secara signifikan kurang dari ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi mendatang dan kecenderungan negatif industri atau ekonomi yang signifikan. Sebuah aset diturunkan nilainya saat nilai terpulihkannya, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara harga jual neto dan nilai pakai, kurang dari nilai tercatatnya.

Perusahaan dan entitas anaknya juga menelaah penurunan nilai atas aset keuangan mereka. Hal ini memerlukan sebuah estimasi arus kas masa mendatang dari aset-aset tersebut dengan bukti penurunan nilai yang objektif.

Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.481.443.946.896 (31 Desember 2022: Rp4.964.568.492.627). Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 15.

Estimasi nilai wajar penyertaan saham

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Perusahaan dan entitas anaknya

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

specific provisions for customer against amount due to reduce its receivable amounts that the Company and its subsidiaries expects to collect.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional Information received affects the amount of allowance for impairment losses of trade receivables. The carrying amount of the Company and its subsidiaries' trade receivables before allowance for impairment losses as of December 31, 2023 amounted to Rp414,626,889,889 (December 31, 2022: Rp318,782,867,892). Further details are disclosed in Note 8.

Evaluation of impairment on assets

The Company and its subsidiaries reviewed impairment of property and equipment. This includes taking into account certain indications of impairment such as significant changes in asset use, significant impairment of asset market value, physical obsolescence or physical damage, performance significantly less than historical expectations or projected future operating results and significant negative economic or industry trends. An asset is written down at its recoverable amount, which is the higher of the net selling price and the use value, less than its carrying amount.

The Company and its subsidiaries also reviewed impairment on their financial assets. This requires an estimate of future cash flows from those assets with objective evidence of impairment.

The net carrying amount of the Company and its subsidiaries' property and equipment as of December 31, 2023 amounted to Rp5,481,443,946,896 (December 31, 2022: Rp4,964,568,492,627). Further details are disclosed in Note 15.

Estimation on fair value of investment in shares

In determining the fair value of financial assets and liabilities for which there is no observable market price, the Company and its subsidiaries use the valuation techniques. For financial

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

menggunakan teknik penilaian. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan tidak memiliki harga yang transparan, nilai wajarnya menjadi kurang objektif dan karenanya, membutuhkan tingkat pertimbangan yang beragam, tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi penentuan harga, dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen.

Nilai wajar atas penyertaan saham Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp50.244.712.000 (31 Desember 2022: Rp46.473.000.000). Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 13.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

instruments that are traded infrequently and have less price transparency, fair value is less objective, and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions, and other risks affecting the specific instrument.

The fair value of the Company and its subsidiaries's investment in shares as of December 31, 2023 amounted to Rp50,244,712,000 (December 31, 2022: Rp46,473,000,000). Further details are disclosed in Note 13.

4. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Kas	922,043,467	598,620,286
Bank		
Pihak berelasi (Catatan 40)		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	174,628,595,308	21,672,170,953
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,107,751,894	5,500,018,938
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6,357,081,192	2,216,449,809
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3,406,668,761	3,249,081
PT Bank Mandiri Taspen	1,040,888,650	992,783,207
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	145,079,838	--
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19,536,743,201	28,289,982,828
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	715,304,403	288,609,263
Euro		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,387,958	67,277,694

4. Cash and Cash Equivalents

This account consists of:

Cash on hand
Cash in banks
Related parties (Note 40)
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen
Indonesia Eximbank
United States Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Euro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	1,996,831,248	3,173,359,216	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank NTB Syariah	638,946,146	634,866,560	PT Bank NTB Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	4,580,000	4,940,000	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	603,059	120,123,639	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
PT Bank Mayapada International Tbk	830,000	1,265,000	PT Bank Mayapada International Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3,215,651	860,550	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Sub-jumlah bank	216,584,507,309	62,965,956,738	Sub-total bank
Setara kas			Cash equivalents
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak ketiga			Third party
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mega Syariah	1,500,000,000	--	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	--	1,000,000,000	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Sub-jumlah setara kas	1,500,000,000	1,000,000,000	Sub-total cash equivalents
Jumlah	219,006,550,776	64,564,577,024	Total
Tingkat bunga per tahun			Interest rate per annum
deposito berjangka			time deposits
Rupiah	2.84%-4.80%	2.32% - 4.39%	Rupiah

Kas di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang berdasarkan suku bunga deposito bank harian.

Cash in banks earns interest at floating rates based on daily bank deposit rates.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, deposito berjangka ditempatkan pada bank-bank pihak berelasi dan pihak-pihak ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatan.

As of December 31, 2023 and 2022, time deposits are placed in related parties banks and third parties with maturities of 1 (one) to 3 (three) months from the date of placement, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada kas dan setara kas yang dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of December 31, 2023 and 2022, no cash and cash equivalents are pledged as collateral for debt and other borrowings.

5. Dana di Lembaga Keuangan yang Dibatasi Penggunaannya

5. Restricted Fund in Financial Institution

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following:

	2023	2022	
Bank			Bank
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
Rupiah			Rupiah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	66,082,478,188	22,226,852,828	Indonesia Eximbank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36,589,747,953	4,660,551,544	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10,236,159,825	18,745,078,369	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,469,432,163	2,838,675,179	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,421,108,827	2,790,027,982	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	215,946,580,170	464,543,138,800	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Deposito			Time deposits
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23,000,000,000	112,000,000,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	354,745,507,126	627,804,324,702	Total

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan rekening pembayaran utang yang disyaratkan dalam pinjaman Sindikasi HIMBARA, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Asian Infrastructure Investments Bank.

Restricted fund represents debt repayment accounts that are required in the loan HIMBARA syndicate, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia and Asian Infrastructure Investments Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, deposito berjangka dibatasi penggunaannya memiliki jangka waktu 1 sampai 3 bulan sejak tanggal penempatan dengan suku bunga 3,41-4,25%.

As of December 31, 2023 and 2022, restricted time deposits are placed with maturities of 1 to 3 months from the date of placement with interest rates of 3.41-4.25%, respectively.

6. Deposito Berjangka

6. Time Deposit

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following:

	2023	2022	
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	11,539,677,364	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	--	11,539,677,364	Total
Tingkat bunga per tahun deposito berjangka			Interest rate per annum time deposits
Rupiah	0.00% - 2.75%	2.50% - 7.00%	Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2022, deposito berjangka tersebut mempunyai jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelaporan. Deposito berjangka tersebut tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of December 31, 2022, this time deposit has maturities of more than 3 (three) months from the reporting date, respectively. This time deposit is not restricted to use and not used as collateral for debt and other borrowings.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. Investasi pada Surat Berharga

7. Investment in Marketable Securities

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following:

	2023	2022	
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related party (Note 40)
Saving Plan PT Asuransi Jiwa IFG	3,529,449,501	3,924,896,501	Saving Plan PT Asuransi Jiwa IFG
Jumlah	3,529,449,501	3,924,896,501	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian			Allowance for
penurunan nilai atas investasi			Impairment loss of investment
surat berharga	(709,175,999)	(961,098,803)	in marketable securities
Jumlah	2,820,273,502	2,963,797,698	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian jangka panjang atas investasi			Non-current portion of investment
surat berharga	(2,820,273,502)	(2,963,797,698)	in marketable securities
Jumlah jangka pendek	--	--	Total current portion

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

Movement of allowance for impairment loss

	2023	2022	
Saldo awal	961,098,803	1,208,775,579	Beginning balance
Pemulihan penurunan nilai	(251,922,804)	(247,676,776)	Reversal of impairment loss
Saldo akhir	709,175,999	961,098,803	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah menyetujui usulan restrukturisasi pembayaran *saving plan* yang diusulkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai penerbit dari *saving plan*. Sesuai dengan perjanjian restrukturisasi, nilai investasi setelah restrukturisasi akan merepresentasikan sebesar 95% nilai investasi sebelum restrukturisasi dan akan dicicil pembayarannya selama 5 tahun.

As of December 31, 2021, the Company has approved the proposed restructuring of the payment of the saving plan proposed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as the issuer of the saving plan. In accordance with the restructuring agreement, the investment value after restructuring will represent 95% of the investment value before restructuring and will be paid in installments over 5 years.

Berdasarkan penelaahan status investasi pada surat berharga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai atas investasi pada surat berharga cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak terealisasi investasi tersebut.

Based on review of investment on marketable securities as of December 31, 2023 and 2022, management is of the opinion that the allowance for impairment loss of investment on marketable securities is adequate to cover possible losses on un-realization of investment.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. Piutang Usaha

8. Trade Receivables

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut :

This account consists of the following:

a. Berdasarkan pihak

a. Based on parties

	2023	2022
Pihak berelasi (Catatan 40)		
PT Pertamina (Persero)	45,169,600,000	--
PT Hotel Indonesia Properti	24,382,616,067	24,782,431,467
PT Telekomunikasi Selular	8,770,130,000	1,080,130,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,750,000,000	--
PT Peninsula Bali Resort	5,925,337,943	4,484,726,028
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	5,464,234,665	437,415,461
PT Nindya Karya	1,004,992,888	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	626,500,000	2,592,000,000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	246,883,498	6,939,239,740
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	193,750,000	3,193,750,000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp200 juta)	89,489,650	434,346,505
Sub-jumlah	100,623,534,711	43,944,039,201
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8,628,682,061)	(2,721,986,178)
Neto	91,994,852,650	41,222,053,023
Pihak ketiga		
PT Karya Agung Kisma Lestari	44,264,771,497	30,672,976,509
PT Nusa Dua Graha International	42,735,091,967	31,401,129,935
PT Pasific Resort Buana Indonesia	24,109,412,471	16,650,311,787
PT Wynncoor Bali	23,938,898,396	36,735,131,917
PT Banigati Betegak	15,961,249,226	23,785,592,107
PT Bali Nusa Dewata Village	14,151,401,951	21,226,441,583
PT Elmar Mitra Perkasa	12,002,994,586	10,035,542,220
PT Ankaa Mandalika Jaya	10,895,210,981	11,117,836,270
Dorna Sport	10,494,929,994	--
PT Bali Sunrise Beach	6,687,278,855	5,043,567,836
PT Agung Panorama Propertindo	6,435,955,286	6,613,777,836
PT Shell Indonesia	5,042,122,165	--
PT Lees International Development	4,708,547,306	4,805,778,790
PT Mahkota Permata Mandalika	2,799,035,947	1,859,325,230
PT Sejahtera Mandiri Jaya	2,423,934,760	2,473,463,785
PT Narendra Interpacific Indonesia	2,394,618,948	5,227,156,941
PT Adisakti Karya Mandiri	1,364,417,419	984,524,195
PT Intersis Grasindo	1,162,269,265	1,185,986,918
PT Mosaicque Jiva One Sky	1,120,457,233	1,143,351,890
PT Suryalaya Anindita International	296,124,807	10,379,678,279
PT Griya Pancaloka	101,287,694	10,556,544,621
PT Bali Holiday Village	31,662,392	4,333,063,790
PT Metafora International	29,478,142	2,004,298,467
PT Trisaka Reksa Waluya	7,459,263	1,551,080,218
PT Bali Nusa Indo Perkasa	--	5,096,075,284
PT Nusa Dua Indonesia	--	10,563,997
Lain-lain	80,844,744,627	29,945,628,286
Sub-jumlah	314,003,355,178	274,838,828,691
Cadangan kerugian penurunan nilai	(54,371,492,652)	(52,100,995,821)
Neto	259,631,862,526	222,737,832,870
Jumlah	351,626,715,176	263,959,885,893

<i>Related parties (Note 40)</i>
<i>PT Pertamina (Persero)</i>
<i>PT Hotel Indonesia Properti</i>
<i>PT Telekomunikasi Selular</i>
<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
<i>PT Peninsula Bali Resort</i>
<i>PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk</i>
<i>PT Nindya Karya</i>
<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
<i>PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk</i>
<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
<i>Others (each below Rp200 million)</i>
<i>Sub-total</i>
<i>Allowance for impairment loss</i>
<i>Net</i>
<i>Third parties</i>
<i>PT Karya Agung Kisma Lestari</i>
<i>PT Nusa Dua Graha International</i>
<i>PT Pasific Resort Buana Indonesia</i>
<i>PT Wynncoor Bali</i>
<i>PT Banigati Betegak</i>
<i>PT Bali Nusa Dewata Village</i>
<i>PT Elmar Mitra Perkasa</i>
<i>PT Ankaa Mandalika Jaya</i>
<i>Dorna Sport</i>
<i>PT Bali Sunrise Beach</i>
<i>PT Agung Panorama Propertindo</i>
<i>PT Shell Indonesia</i>
<i>PT Lees International Development</i>
<i>PT Mahkota Permata Mandalika</i>
<i>PT Sejahtera Mandiri Jaya</i>
<i>PT Narendra Interpacific Indonesia</i>
<i>PT Adisakti Karya Mandiri</i>
<i>PT Intersis Grasindo</i>
<i>PT Mosaicque Jiva One Sky</i>
<i>PT Suryalaya Anindita International</i>
<i>PT Griya Pancaloka</i>
<i>PT Bali Holiday Village</i>
<i>PT Metafora International</i>
<i>PT Trisaka Reksa Waluya</i>
<i>PT Bali Nusa Indo Perkasa</i>
<i>PT Nusa Dua Indonesia</i>
<i>Others</i>
<i>Sub-total</i>
<i>Allowance for impairment loss</i>
<i>Net</i>
<i>Total</i>

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

b. Berdasarkan umur

	2023	2022	
Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai	43,913,043,991	--	Neither past due nor impairment
Telah jatuh tempo			Pass due
Kurang dari 30 hari	80,527,660,018	2,228,451,486	Less than 30 days
Di antara 31-60 hari	59,732,925,605	120,311,319,203	Between 31-60 days
Di antara 61-90 hari	776,165,886	44,847,880,903	Between 61-90 days
Di antara 91-120 hari	--	--	Between 91-120 days
Lebih dari 120 hari	229,677,094,389	151,395,216,300	More than 120 days
Jumlah	414,626,889,889	318,782,867,892	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(63,000,174,713)	(54,822,981,999)	Allowance for impairment loss
Neto	351,626,715,176	263,959,885,893	Net

b. Based on aging

c. Berdasarkan mata uang

	2023	2022	
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
Rupiah	72,081,278,432	15,913,538,662	Rupiah
Mata uang asing	28,542,256,279	28,030,500,539	Foreign currencies
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Rupiah	109,564,014,233	49,915,562,487	Rupiah
Mata uang asing	204,439,340,945	224,923,266,204	Foreign currencies
Jumlah	414,626,889,889	318,782,867,892	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(63,000,174,713)	(54,822,981,999)	Allowance for impairment loss
Neto	351,626,715,176	263,959,885,893	Net

c. Based on currency

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

	2023	2022	
Saldo awal	54,822,981,999	39,360,108,090	Beginning balance
Penambahan (Catatan 37)	8,177,192,714	15,462,873,909	Addition (Note 37)
Saldo akhir	63,000,174,713	54,822,981,999	Ending balance

d. Movement of allowance for impairment loss

Manajemen memiliki keyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment losses of trade receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. Piutang Lain-Lain

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Pihak berelasi (Catatan 40)		
PT Garuda Adhimatra Indonesia	1,229,047,158	1,229,047,158
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,229,047,158)	(1,229,047,158)
Sub-jumlah	--	--
Pihak ketiga		
Piutang bunga	518,069,669	200,017,553
Pinjaman pegawai	2,091,359,245	582,419,716
	2,609,428,914	782,437,269
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(52,847,221)
Sub-jumlah	2,609,428,914	729,590,048
Jumlah	2,609,428,914	729,590,048

Piutang berelasi kepada PT Garuda Adhimatra Indonesia merupakan tagihan atas royalti pengelolaan wisata Garuda Wisnu Kencana ("GWK") Uluwatu atas penggunaan nama Perusahaan.

Piutang pendapatan bunga merupakan akrual pendapatan bunga atas penempatan deposito berjangka dan investasi pada surat berharga yang dimiliki.

Manajemen memiliki keyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak tertagihnya piutang lain-lain.

9. Other Receivables

This account consists of the following:

<i>Related parties (Note 40)</i>
<i>PT Garuda Adhimatra Indonesia</i>
<i>Allowance for impairment loss</i>
<i>Sub-total</i>
<i>Third parties</i>
<i>Accrued interest receivable</i>
<i>Employee loan</i>
<i>Allowance for impairment loss</i>
<i>Sub-total</i>
Total

The related party receivables from PT Garuda Adhimatra Indonesia represent claims for royalties on the management fees of Garuda Wisnu Kencana ("GWK") Uluwatu for the utilization of the Company's name.

Interest income receivable represents accrued interest income on the placement of time deposits and investments in marketable securities.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may result from uncollectible other receivables.

10. Biaya Dibayar di Muka

Akun ini terdiri dari biaya dibayar di muka atas:

	2023	2022
Asuransi bangunan	1,005,613,758	40,650,372
Asuransi kendaraan	32,972,764	24,969,386
Lain-lain	42,048,536	42,048,536
Jumlah	1,080,635,058	107,668,294

10. Prepaid Expenses

This account consists of prepayment for:

<i>Insurance of office building</i>
<i>Insurance of vehicle</i>
<i>Others</i>
Total

11. Uang Muka

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Uang muka pegawai	3,227,157,245	7,429,176,786
Jumlah	3,227,157,245	7,429,176,786

Uang muka pegawai merupakan uang muka yang diberikan kepada pegawai Perusahaan terkait perjalanan dinas dan uang muka operasional lainnya.

11. Advances

This account consists of the following:

	2023	2022
Advances to employees	3,227,157,245	7,429,176,786
Total	3,227,157,245	7,429,176,786

Advances to employees represent advances provided to employees of the Company for business travel and other operational advances.

12. Persediaan

Akun ini terdiri dari persediaan:

	2023	2022
Tanah	4,881,814,676	--
Bahan bakar	473,099,195	591,868,763
Jumlah	5,354,913,871	591,868,763

Persediaan tanah merupakan tanah di Tanamori, Nusa Tenggara Timur, yang dibeli oleh Perusahaan dengan maksud akan dijual kembali.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

12. Inventories

This account consists of the following:

	2023	2022
Land	4,881,814,676	--
Fuel oil	473,099,195	591,868,763
Total	5,354,913,871	591,868,763

Land inventories represent land in Tanamori, East Nusa Tenggara, which was purchased by the Company with the intention of resale.

Management believes that there is no changes in circumstances that indicate material impairment of inventories as of December 31, 2023 and 2022.

13. Penyertaan Saham

Investasi pada entitas asosiasi

PT Bali Griya Shanti

Perusahaan mempunyai penyertaan pada saham PT Bali Griya Shanti sebesar 40%. Penyertaan ini telah disetujui pemegang saham sesuai dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-407/MBU/2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lot SW-3 antara Perusahaan dengan PT Jakarta Kyoai Medical Center dan sesuai Akta Notaris Evi Susanti, S.H., No. 36 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Akta Perjanjian Kerjasama. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengembangkan lahan SW-3 yang dibangun Retirement & Wellness Resort dan hotel.

13. Investment in Shares

Investment in associates entity

PT Bali Griya Shanti

The Company has an investment in share of PT Bali Griya Shanti amounting to 40%. This investment activity was approved by the shareholders in accordance with Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-407/MBU/2004 dated August 10, 2004 concerning Approval of the Cooperation Agreement on the Development of Lot SW-3 between the Company and PT Jakarta Kyoai Medical Center and pursuant to Notarial Deed Evi Susanti, S.H., No. 36 dated 3 August 2004 on Deed of Cooperation Agreement. This agreement is intended to develop the SW-3 land built for Retirement & Wellness Resort and hotel.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat atas investasi Perusahaan pada saham PT Bali Griya Shanti tercatat adalah RpNihil.

**Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain**

	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	2023			
		Nilai tercatat 1 Jan 2023/ Carrying amount as of Jan 1, 2023	Penambahan investasi/ Addition of investment	Penyesuaian nilai wajar/ fair value adjustment	Nilai tercatat 31 Des 2023/ Carrying amount as of Dec 31, 2023
Investasi pada entitas asosiasi					
PT Bali Griya Shanti	40.00%	--	--	--	--
Metode nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					
PT Peninsula Bali Resort	16.76%	22,605,000,000	--	3,374,909,000	25,979,909,000
PT Garuda Adhimatra Indonesia	9.71%	21,582,000,000	--	943,803,000	22,525,803,000
PT Jasamarga Bali Tol	0.79%	2,036,000,000	--	(449,000,000)	1,587,000,000
PT Manajemen CBT Nusantara	8.33%	250,000,000	--	(98,000,000)	152,000,000
Jumlah		<u>46,473,000,000</u>	<u>--</u>	<u>3,771,712,000</u>	<u>50,244,712,000</u>

	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	2022			
		Nilai tercatat 1 Jan 2022/ Carrying amount as of Jan 1, 2022	Penambahan investasi/ Addition of investment	Penyesuaian nilai wajar/ fair value adjustment	Nilai tercatat 31 Des 2022/ Carrying amount as of Dec 31, 2022
Investasi pada entitas asosiasi					
PT Bali Griya Shanti	40.00%	--	--	--	--
Metode nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					
PT Peninsula Bali Resort	16.76%	21,957,000,000	--	648,000,000	22,605,000,000
PT Garuda Adhimatra Indonesia	9.71%	19,783,000,000	--	1,799,000,000	21,582,000,000
PT Jasamarga Bali Tol	0.79%	2,685,000,000	--	(649,000,000)	2,036,000,000
PT Manajemen CBT Nusantara	8.33%	250,000,000	--	--	250,000,000
Jumlah		<u>44,675,000,000</u>	<u>--</u>	<u>1,798,000,000</u>	<u>46,473,000,000</u>

PT Peninsula Bali Resort

Perusahaan memiliki investasi di PT Peninsula Bali Resort sebesar 16,76%.

Nilai wajar investasi saham di PT Peninsula Bali Resort ditentukan dengan menggunakan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Doli Siregar & Rekan dan KJPP Guntur, Eki, Andri, & Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 20 Februari 2024 dan 13 Maret 2023.

PT Garuda Adhimatra Indonesia

Perusahaan memiliki investasi di PT Garuda Adhimatra Indonesia sebesar 9,71%.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

As of December 31, 2023 and 2022, carrying amount of the Company's investment in share of PT Bali Griya Shanti is amounting to RpNil.

**Measured at fair value through other
comprehensive income**

	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	2023			
		Nilai tercatat 1 Jan 2023/ Carrying amount as of Jan 1, 2023	Penambahan investasi/ Addition of investment	Penyesuaian nilai wajar/ fair value adjustment	Nilai tercatat 31 Des 2023/ Carrying amount as of Dec 31, 2023
Investment in associates entity					
PT Bali Griya Shanti	40.00%	--	--	--	--
Fair value through other comprehensive income method					
PT Peninsula Bali Resort	16.76%	22,605,000,000	--	3,374,909,000	25,979,909,000
PT Garuda Adhimatra Indonesia	9.71%	21,582,000,000	--	943,803,000	22,525,803,000
PT Jasamarga Bali Tol	0.79%	2,036,000,000	--	(449,000,000)	1,587,000,000
PT Manajemen CBT Nusantara	8.33%	250,000,000	--	(98,000,000)	152,000,000
Total		<u>46,473,000,000</u>	<u>--</u>	<u>3,771,712,000</u>	<u>50,244,712,000</u>

	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	2022			
		Nilai tercatat 1 Jan 2022/ Carrying amount as of Jan 1, 2022	Penambahan investasi/ Addition of investment	Penyesuaian nilai wajar/ fair value adjustment	Nilai tercatat 31 Des 2022/ Carrying amount as of Dec 31, 2022
Investment in associates entity					
PT Bali Griya Shanti	40.00%	--	--	--	--
Fair value through other comprehensive income method					
PT Peninsula Bali Resort	16.76%	21,957,000,000	--	648,000,000	22,605,000,000
PT Garuda Adhimatra Indonesia	9.71%	19,783,000,000	--	1,799,000,000	21,582,000,000
PT Jasamarga Bali Tol	0.79%	2,685,000,000	--	(649,000,000)	2,036,000,000
PT Manajemen CBT Nusantara	8.33%	250,000,000	--	--	250,000,000
Total		<u>44,675,000,000</u>	<u>--</u>	<u>1,798,000,000</u>	<u>46,473,000,000</u>

PT Peninsula Bali Resort

The Company has total investment in PT Peninsula Bali Resort of 16.76% ownership.

The fair value of investment in shares in PT Peninsula Bali Resort was determined by using comparative companies listed in the stock exchange method. As of December 31, 2023 and 2022, the investment's fair values are based on valuations performed by KJPP Doli Siregar & Rekan and KJPP Guntur, Eki, Andri & Rekan, an independent appraiser registered with OJK, in their reports dated February 20, 2024 and March 13, 2023, respectively.

PT Garuda Adhimatra Indonesia

The Company has total investment in PT Garuda Adhimatra Indonesia of 9.71% ownership.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai wajar investasi saham di PT Garuda Adhimatra Indonesia ditentukan dengan menggunakan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Doli Siregar & Rekan dan KJPP Guntur, Eki, Andri, & Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 20 Februari 2024 dan 13 Maret 2023.

PT Jasamarga Bali Tol

Perusahaan memiliki investasi di PT Jasamarga Bali Tol sebesar 0,79%.

Nilai wajar investasi saham di PT Jasamarga Bali Tol ditentukan dengan menggunakan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Doli Siregar & Rekan dan KJPP Guntur, Eki, Andri, & Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 20 Februari 2024 dan 13 Maret 2023.

PT Manajemen CBT Nusantara

Perusahaan melalui entitas anaknya, PT ITDC Nusantara Utilitas mempunyai penyertaan saham pada PT Manajemen CBT Nusantara sesuai dengan Akta Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., No. 34 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Manajemen CBT Nusantara dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005057.AH.01.01 Tahun 2019. Perusahaan telah beroperasi pada bulan Maret 2019.

14. Properti Investasi

Properti investasi merupakan tanah yang disewakan kepada investor seperti yang disepakati di dalam *Land Utilization and Land Development Agreement* (LUDA) dengan rincian sebagai berikut:

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

The fair value of investment in shares in PT Garuda Adhimatra Indonesia was determined by using comparative companies listed in the stock exchange method. As of December 31, 2023 and 2022, the investment's fair values are based on valuations performed by KJPP Doli Siregar & Rekan and KJPP Guntur, Eki, Andri & Rekan, an independent appraiser registered with OJK, in their reports dated February 20, 2024 and March 13, 2023, respectively.

PT Jasamarga Bali Tol

The Company has total investment in PT Jasamarga Bali Tol of 0.79% ownership.

The fair value of investment in shares in PT Jasamarga Bali Tol was determined by using comparative companies listed in the stock exchange method. As of December 31, 2023 and 2022, the investment's fair values are based on valuations performed by KJPP Doli Siregar & Rekan and KJPP Guntur, Eki, Andri & Rekan, an independent appraiser registered with OJK, in their reports dated February 20, 2024 and March 13, 2023, respectively.

PT Manajemen CBT Nusantara

The Company through its subsidiaries, PT ITDC Nusantara Utilitas has an investment in share of PT Manajemen CBT Nusantara based on Notarial Deed of Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., No. 34 dated December 31, 2018 on the Establishment of Limited Liability Company of PT Manajemen CBT Nusantara and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0005057.AH.01.01 Year 2019. The company has been operating since March 2019.

14. Investment Properties

Investment properties are land leased to investors as agreed in *Land Utilization and Land Development Agreement* ("LUDA") with details as follows:

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
HPL - Tanah Kawasan Pariwisata			HPL - Tourism Area Land of
Mandalika Lombok ("KPML")	613,287,311,611	613,341,046,462	Mandalika Lombok ("KPML")
HPL Nusa Dua			HPL Nusa Dua
HPL 7	11,163,513,788	11,163,513,788	HPL 7
HPL 3	1,150,403,664	1,150,403,664	HPL 3
HPL 4	407,142,244	407,142,244	HPL 4
HPL 51	336,911,851	336,911,851	HPL 51
HPL Tanah Plaga	209,863,250	209,863,250	HPL Plaga land
HPL 8	198,247,556	198,247,556	HPL 8
HPL 80	161,708,550	161,708,550	HPL 80
HPL 26	154,280,927	154,280,927	HPL 26
HPL 9	127,687,677	127,687,677	HPL 9
HPL 83	121,059,432	121,059,432	HPL 83
HPL 44	109,004,965	109,004,965	HPL 44
HPL persediaan	46,236,363	46,236,363	HPL inventory
HPL lain-lain	803,719,135	803,719,135	HPL others
Jumlah	628,277,091,013	628,330,825,864	Total

Hak Pengelolaan Lahan ("HPL") Tanah Kawasan Pariwisata Mandalika ("KPML") merupakan properti investasi Perusahaan yang terletak di Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2008, Perusahaan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah berupa seluruh saham PT Pengembangan Pariwisata Lombok (PPL) yang underlying-nya berupa lahan seluas 1.175 ha yang terletak di Kawasan Pariwisata Kuta, Lombok Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan telah melakukan penilaian atas tanah tersebut dengan nilai pasar wajar sebesar Rp557.660.000.000 sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan No. 273/KMK.06/2008 tanggal 23 September 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan.

Perusahaan telah mengalihkan status kepemilikan tanah eks PT Pengembangan Pariwisata Lombok yang semula dalam status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Pengembangan Pariwisata Lombok menjadi HPL atas nama Perusahaan. Pengalihan ini berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 22/HPL/BPN RI/2009 tanggal 31 Agustus 2009, No. 23/HPL/BPN RI/2009 tanggal 31 Agustus 2009 dan SK lainnya tentang pemberian Hak Pengelolaan atas nama Perusahaan atas Tanah yang terletak di

Hak Pengelolaan Lahan ("HPL") of KPML land is an investment property of the Company located in Mandalika Lombok Tourism Area ("KPML"). Based on Government Regulation No. 50/2008, the Company obtained State Equity Participation (PMN) from the government in the form of all shares of PT Pengembangan Pariwisata Lombok (PPL) underlying its land area of 1,175 ha located in Kuta Tourism Area, Central Lombok. In relation with that, the Minister of Finance has conducted an assessment of the land with a fair market value of Rp557,660,000,000 in accordance with the letter Decree of the Minister of Finance No. 273/KMK.06/2008 dated September 23, 2008 and Government Regulation No. 30 Year 2009 concerning Amendment to Government Regulation No. 50 Year 2008 concerning the Addition of Capital Investment of the Republic of Indonesia into the Company's Shares Capital.

The Company transferred the status of the land previously owned by PT Pengembangan Pariwisata Lombok which was originally under the status of land right (HGB) on behalf of PT Pengembangan Pariwisata Lombok into HPL on behalf of the Company. This transfer is based on Decree of National Land Agency No. 22 /HPL/BPN RI/2009 dated August 31, 2009, No. 23/HPL/BPN RI/2009 dated August 31, 2009 and other decrees regarding the granting of Hak Pengelolaan on behalf of the Company to Land located in Central Lombok regency,

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tanggal 7 September 2020, Perusahaan telah melakukan penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset lahan untuk pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) - Mandalika seluas 29.933m². Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-592/MBU/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020. Nilai pemindahtanganan atas aset tersebut tercatat sebesar Rp41.587.155.474, dengan nilai buku sebesar Rp1.566.158.998.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan aset lahan untuk pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) - Mandalika seluas 1.027m². Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negera Nomor S-740/MBU/09/2021 tanggal 28 September 2021. Nilai pemindahtanganan atas aset tersebut tercatat sebesar Rp1.732.515.105, dengan nilai buku sebesar Rp53.734.694, sehingga Perusahaan dan entitas anaknya mencatat keuntungan penjualan atas properti investasi sebesar Rp1.678.780.411 (Catatan 36).

HPL lain-lain merupakan beberapa hak pengelolaan lahan yang berada di wilayah Nusa Dua. HPL yang dimiliki Perusahaan tidak memiliki masa manfaat karena selama Perusahaan memanfaatkan sesuai peruntukannya maka HPL tersebut sepenuhnya milik Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai wajar atas properti investasi Perusahaan masing-masing sebesar Rp12.494.864.000.000 dan Rp11.877.002.911.534 yang mencerminkan nilai pasar objek pajak atas properti investasi tersebut pada tanggal pelaporan.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

West Nusa Tenggara Province.

As of September 7, 2020, the Company has carried out a write-off and transfer of land assets for the construction of the Lombok International Airport (BIL) - Mandalika bypass road covering an area of 29,933 sqm. The write-off and transfer of these assets have received approval from the Minister of State-Owned Enterprises Number S-592/MBU/08/2020 dated August 26, 2020. The transfer value of these assets was recorded at Rp41,587,155,474, with a book value of Rp1,566,158,998.

As of December 31, 2023, the Company has carried out a write-off and transfer of land assets for the construction of the Lombok International Airport (BIL) - Mandalika bypass road covering an area of 1,027sqm. The write-off and transfer of these assets have received approval from the Minister of State-Owned Enterprises Number S-740/MBU/09/2021 dated September 28, 2021. The transfer value of these assets was recorded at Rp1,732,515,105, with a book value of Rp53,734,694, so that the Company and its subsidiaries recorded a gain on sale of investment property amounting to Rp1,678,780,411 (Note 36).

Other HPL represent landrights located in Nusa Dua area. HPL owned by the Company does not have a useful life because as long as the Company utilizes the land according to its allocation, the HPL belongs to the Company.

As of December 31, 2023 and 2022, fair value of the Company's investment properties amounted to Rp12,494,864,000,000 and Rp11,877,002,911,534 which reflects the market value of the tax object for the investment property at the reporting date

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. Aset Tetap

15. Property and Equipment

2023							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		Cost	
<u>Biaya perolehan</u>							
Tanah	4,334,516,100	--	--	4,334,516,100		Land	
Lanskap dan taman	39,182,318,988	257,926,833	--	39,753,345,821		Landscape and garden	
Bangunan	2,415,407,893,752	3,352,380,839	--	2,840,089,331,298		Buildings	
Mesin dan peralatan	257,378,909,618	1,930,729,479	--	259,309,639,097		Machinery	
Peralatan kantor	127,945,083,924	3,656,893,945	--	138,987,488,213		Office equipment	
Perlengkapan kantor	7,616,491,432	611,127,138	--	8,251,758,570		Office furniture and fixtures	
Kendaraan bermotor	12,286,640,351	1,772,900,900	--	14,059,541,251		Vehicles	
Aset dalam penyelesaian penugasan	2,299,759,198,857	654,455,434,218	--	(433,933,621,727)	2,520,281,011,348	Construction in progress assignment	
Aset dalam penyelesaian non penugasan	59,706,329,757	--	--	(1,019,755,000)	58,686,574,757	Construction in progress non assignment	
Jumlah biaya perolehan	5,223,617,382,779	666,037,393,352	--	(5,901,569,676)	5,883,753,206,455	Total cost	
<u>Akumulasi penyusutan</u>							<u>Accumulated depreciation</u>
Lanskap dan taman	12,168,951,698	1,711,981,446	--	(1,875,241,150)	12,005,691,994	Landscape and garden	
Bangunan	140,483,587,719	86,075,741,762	--	1,785,068,939	228,344,398,420	Buildings	
Mesin dan peralatan	27,477,743,770	36,754,299,257	--	90,172,211	64,322,215,238	Machinery	
Peralatan kantor	61,145,445,346	17,564,615,076	--	--	78,710,060,422	Office equipment	
Perlengkapan kantor	6,743,295,599	375,182,108	--	--	7,118,477,707	Office furniture and fixtures	
Kendaraan bermotor	11,029,866,020	778,549,758	--	--	11,808,415,778	Vehicles	
Jumlah akumulasi penyusutan	259,048,890,152	143,260,369,407	--	--	402,309,259,559	Total accumulated depreciation	
Nilai tercatat	<u>4,964,568,492,627</u>				<u>5,481,443,946,896</u>	Carrying amount	
2022							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		Cost	
<u>Biaya perolehan</u>							
Tanah	4,334,516,100	--	--	4,334,516,100		Land	
Lanskap dan taman	26,887,278,260	12,295,040,728	--	39,182,318,988		Landscape and garden	
Bangunan	1,389,910,855,434	321,391,745,412	--	704,105,292,906	2,415,407,893,752	Buildings	
Mesin dan peralatan	61,424,850,215	195,954,059,403	--	--	257,378,909,618	Machinery	
Peralatan kantor	50,233,323,491	77,711,760,433	--	--	127,945,083,924	Office equipment	
Perlengkapan kantor	6,760,540,003	855,951,429	--	--	7,616,491,432	Office furniture and fixtures	
Kendaraan bermotor	12,286,640,351	--	--	--	12,286,640,351	Vehicles	
Aset dalam penyelesaian penugasan	2,201,471,018,454	802,393,473,309	--	(704,105,292,906)	2,299,759,198,857	Construction in progress assignment	
Aset dalam penyelesaian non penugasan	60,659,776,168	--	--	(953,446,411)	59,706,329,757	Construction in progress non assignment	
Jumlah biaya perolehan	3,813,968,798,476	1,410,602,030,714	--	(953,446,411)	5,223,617,382,779	Total cost	
<u>Akumulasi penyusutan</u>							<u>Accumulated depreciation</u>
Lanskap dan taman	10,447,331,273	1,721,620,425	--	--	12,168,951,698	Landscape and garden	
Bangunan	72,144,788,725	68,338,798,994	--	--	140,483,587,719	Buildings	
Mesin dan peralatan	15,534,197,375	11,943,546,395	--	--	27,477,743,770	Machinery	
Peralatan kantor	40,747,274,495	20,398,170,851	--	--	61,145,445,346	Office equipment	
Perlengkapan kantor	6,154,178,501	589,117,098	--	--	6,743,295,599	Office furniture and fixtures	
Kendaraan bermotor	10,173,555,047	856,310,973	--	--	11,029,866,020	Vehicles	
Jumlah akumulasi penyusutan	155,201,325,416	103,847,564,736	--	--	259,048,890,152	Total accumulated depreciation	
Nilai tercatat	<u>3,658,767,473,060</u>				<u>4,964,568,492,627</u>	Carrying amount	

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan mereklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi persediaan masing-masing sebesar Rp4.881.814.676 dan RpNihil (Catatan 12).

As of December 31, 2023 and 2022, the Company reclassified inventory amounted Rp4,881,814,676 and RpNil, respectively (Note 12).

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan mereklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset tidak berwujud masing-masing sebesar Rp1.019.755.000 dan Rp953.446.411 (Catatan 16).

As of December 31, 2023 and 2022, the Company reclassified intangible asset amounted Rp1,019,755,000 and Rp953,446,411, respectively (Note 16).

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp143.260.369.407 dan Rp103.847.564.736,

Depreciation expense for the years ended December 31, 2023 and 2022, are Rp143,260,369,407 and Rp103,847,564,736, respectively, was recorded as part of general

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

dicatatkan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 35).

Aset tetap Perusahaan dan entitas anaknya telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran, banjir, gempa bumi, dan risiko lainnya pada PT Asuransi Jasindo (Persero) dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.395.278.518.973 dan Rp442.648.484.790. Manajemen berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup untuk menanggung risiko aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan dalam kegiatan operasional adalah masing-masing sebesar Rp92.055.334.156 dan Rp62.436.670.562.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan mengkapitalisasi biaya bunga pinjaman sebagai bagian dari perolehan aset dalam penyelesaian sebesar USD8,105,847,93 atau setara Rp137.948.347.861 dan dengan tingkat bunga 0,25% - 6,45%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan mengkapitalisasi biaya bunga pinjaman sebagai bagian dari perolehan aset dalam penyelesaian sebesar USD2,350,313,24 atau setara Rp25.786.007.265 dan Rp34.258.776.529 dengan tingkat bunga 0,25% - 5,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset dalam penyelesaian terutama merupakan akumulasi biaya pembangunan proyek Mandalika dengan persentase penyelesaian masing-masing sebagai berikut:

and administrative expenses (Note 35).

The Company and its subsidiaries' property and equipment are insured against losses from fire, flood, earthquake and other risks at PT Asuransi Jasindo (Persero) with the coverage amount of Rp3,395,278,518,973 and Rp442,648,484,790 as of December 31, 2023 and 2022, respectively. Management believes that the insurance is sufficient to cover the risk of property and equipment.

As of December 31, 2023 and 2022, the total acquisition cost of property, plant and equipment that has been fully depreciated but still being used in operational activities was Rp92,055,334,156 and Rp62,436,670,562, respectively.

For the years ended December 31, 2023, the Company capitalized the cost of the loan interest as part of the acquisition of assets in progress amounting to USD8,105,847,93 or equivalent to Rp137,948,347,861 and with an interest rate of 0.25% - 6.45%.

For the years ended December 31, 2022, the Company capitalized the cost of the loan interest as part of the acquisition of assets in progress amounting to USD2,350,313,24 or equivalent to Rp25,786,007,265 and Rp34,258,776,529 with an interest rate of 0.25% - 5.00%.

As of December 31, 2023 and 2022, construction in progress mostly represents the accumulated costs of constructing certain project in Mandalika with percentage of each completion as follows:

Klasifikasi aset tetap	2023			Class of Property and Equipment
	Nilai aset/ Amount of assets	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated time of Completion	
Tanah	184,921,878,494	79.17%	1 - 3 tahun	Land
Bangunan	85,522,560,973	86.46%	1 - 3 tahun	Building
Infrastruktur dasar	2,295,592,845,602	92.93%	5 - 20 tahun	Basic Infrastructure
Lainnya	12,930,301,036	97.30%	1 - 3 tahun	Others
Jumlah	2,578,967,586,105			Total

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Klasifikasi aset tetap	2022			Class of Property and Equipment
	Nilai aset/ Amount of assets	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated time of Completion	
Tanah	93,891,725,270	68.04%	1 - 3 tahun	Land
Bangunan	441,647,740,486	77.34%	1 - 3 tahun	Building
Infrastruktur dasar	1,762,922,478,441	18.96%	5 - 20 tahun	Basic Infrastructure
Lainnya	61,003,584,417	82.53%	1 - 3 tahun	Others
Jumlah	2,359,465,528,614			Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada aset tetap Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

As of December 31, 2023 and 2022, there is no the Company's property, plant and equipment that used as collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah melakukan penelaahan dan berkeyakinan tidak terdapat perubahan yang diperlukan terkait dengan estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan untuk aset tetap.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has reviewed and believes that no changes are needed in relation to the estimated useful lives, residual values and depreciation methods for property and equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan adanya penurunan nilai atas nilai tercatat aset tetap.

As of December 31, 2023 and 2022, the Management believes that there is no indication of a change in circumstances that would result in an impairment of the carrying value of property and equipment.

16. Aset Takberwujud

16. Intangible Assets

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following:

2023				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
<u>Biaya perolehan</u>				<u>Cost</u>
Piranti lunak	28,608,312,738	566,817,092	1,019,755,000	30,194,884,830
<u>Akumulasi amortisasi</u>				<u>Accumulated amortization</u>
Piranti lunak	17,852,056,405	1,507,439,025	--	19,359,495,430
Penurunan nilai	8,563,514,865	--	--	8,563,514,865
Nilai tercatat	2,192,741,468		2,271,874,535	Carrying amount
2022				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
<u>Biaya perolehan</u>				<u>Cost</u>
Piranti lunak	25,791,955,834	1,862,910,493	953,446,411	28,608,312,738
<u>Akumulasi amortisasi</u>				<u>Accumulated amortization</u>
Piranti lunak	13,800,415,002	4,051,641,403	--	17,852,056,405
Penurunan nilai	5,608,859,778	2,954,655,087	--	8,563,514,865
Nilai tercatat	6,382,681,054		2,192,741,468	Carrying amount

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.507.439.025 dan Rp4.051.641.403, dicatatkan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 35).

Amortization expense for the years ended December 31, 2023 and 2022, amounting to Rp1,507,439,025 and Rp4,051,641,403, respectively, was recorded as part of general and administrative expenses (Note 35).

17. Aset Tidak Lancar Lainnya

17. Other Non-Current Assets

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following:

	2023	2022	
Kas dibatasi penggunaannya	2,000,000,000	2,000,000,000	Restricted cash
Piutang kepada PT Incor Energy	1,110,154,628	1,110,154,628	Receivable from PT Incor Energy
Uang jaminan	36,850,000	36,850,000	Refundable deposit
	3,147,004,628	3,147,004,628	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	Allowance for impairment loss
Jumlah	2,147,004,628	2,147,004,628	Total

Piutang kepada PT Incor Energy

Piutang ini merupakan penempatan deposito pada PT Bank Permata Tbk sebesar Rp6.000.000.000 pada bulan Februari 2011, dengan tingkat suku bunga 7,25% per tahun, jangka waktu penempatan 1 (satu) bulan dan perpanjangan otomatis (*automatic roll over*).

Receivable from PT Incor Energy

This receivable represents placement of time deposits at PT Bank Permata Tbk amounting to Rp6,000,000,000 in February 2011, with an interest rate of 7.25% per annum, 1 (one) month placement period and automatic roll over.

Deposito tersebut telah dicairkan pada tanggal 16 Juni 2011 ke rekening atas nama PT Incor Energy. Pencairan deposito ditandatangani oleh direktur utama dan direktur keuangan Perusahaan terdahulu yang habis masa jabatannya pada bulan Maret 2011. Berdasarkan surat No. 406/SM/KF/IX- 02 tanggal 31 Agustus 2012 dari Suci Madio, S.H., selaku kuasa hukum direksi terdahulu, telah diklarifikasi bahwa tanda tangan yang tertera pada dokumen pencairan deposito bukan merupakan tanda tangan direksi yang bersangkutan. Sesuai hasil pertemuan antara Perusahaan, PT Bank Permata Tbk dan PT Incor Energy pada tanggal 7 Agustus 2012, PT Incor Energy mengakui telah menerima pencairan deposito tersebut dan bersedia untuk mengembalikan dengan batas pengembalian sampai dengan tanggal 14 September 2012.

The deposit was withdrawn on June 16, 2011, and deposited into the account of PT Incor Energy. Deposit withdrawn was signed by the Company's president director and financial director whose term ended in March 2011. Based on letter No. 406/SM/KF/ IX-02 dated August 31, 2012 from Suci Madio, S.H., as the attorney of the previous board of directors, it has been clarified that the signature on the document of withdrawn deposit is not a valid signature of the directors. Based on meeting between the Company, PT Bank Permata Tbk and PT Incor Energy on August 7, 2012, PT Incor Energy admitted receiving the withdrawal of such deposits and was willing to refund at the latest by September 14, 2012.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak berwajib dan juga telah mengirimkan surat somasi kepada PT Inco Energy pada tanggal 20 Oktober 2012. Atas kejadian tersebut, Perusahaan telah melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Agung RI bagian tindak pidana khusus pada tanggal 5 Maret 2013. Pada tanggal 5 Oktober 2016, Perusahaan telah menerima pengembalian uang sebesar Rp5.000.000.000.

Perusahaan telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar pokok nominal yang belum dibayarkan kembali.

Kas dibatasi penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan deposit dari PT Jaya Makmur Bersama sebagai pemenang tender Lot C-5 pada tanggal 19 September 2008.

Sesuai surat Perusahaan kepada PT Jaya Makmur Bersama No. 19/Dir/PT PPB/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dan surat No. 94/Dir/PT PPB/IX/2010 tanggal 24 September 2010, kesepakatan tersebut batal dilaksanakan karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 30 September 2012 belum ada kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Jaya Makmur Bersama terhadap beberapa hal terkait pembuatan LUDA.

Pihak PT Jaya Makmur Bersama menolak pembatalan kesepakatan tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Maret 2011. Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 174/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 14 Maret 2012. Atas putusan tersebut, PT Jaya Makmur Bersama kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 419/Pdt.G/2012/PN.DPs tanggal 12 Februari 2013 gugatan PT Jaya Makmur Bersama dikabulkan seluruhnya.

Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Perusahaan melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan surat kuasa No.29/SK/Dir./PT PPB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013. Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak upaya hukum kasasi tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.1788 K/Pdt/2014 tanggal 28 Januari 2015.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

The Company reported this incident to the authorities and sent a legal notice to PT Inco Energy on October 20, 2012. The Company reported this matter to the Supreme Court of the Republic of Indonesia, special criminal offense department on March 5, 2013. On October 5, 2016, the Company received a refund of Rp5,000,000,000.

The Company provides allowance for impairment losses for unpaid principal nominal value.

Restricted cash

Restricted cash represents a deposit from PT Jaya Makmur Bersama as the winner of Lot C-5 tender on September 19, 2008.

In accordance with the letter of the Company to PT Jaya Makmur Bersama No.19/Dir/PT PPB/V/2010 dated May 10, 2010 and letter No. 94/Dir/PT PPB/IX/2010 dated September 24, 2010, the agreement was canceled as the deadline on September 30, 2012 was not met since there has been no agreement between the Company and PT Jaya Makmur Bersama on several things related to LUDA.

PT Jaya Makmur Bersama rejected the cancellation of the agreement and filed a lawsuit to the Denpasar District Court on March 29, 2011. The Denpasar District Court rejected the lawsuit in accordance with the Denpasar District Court Decision No. 174/Pdt.G/2011/PN.Dps dated March 14, 2012. On that verdict, PT Jaya Makmur Bersama filed again a lawsuit to the Denpasar High Court. In accordance with the High Court of Denpasar Decision No. 419/Pdt.G/2012/PN.DPs dated February 12, 2013, PT Jaya Makmur Bersama lawsuit was granted entirely.

With the issuance of the Decision of the District Court, the Company through its attorney filed a cassation appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia in accordance with the power of attorney No. 29/SK/Dir./PT PPB/XII/2013 dated December 30, 2013. The Supreme Court of the Republic of Indonesia rejected the cassation law in accordance with the Supreme Court Decision No. 1788 K/Pdt/2014 dated January 28, 2015.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Atas Putusan Kasasi Perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai dengan surat No.18/ZP/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Perusahaan dan/atau pun kuasa hukumnya belum menerima Salinan Resmi atas Putusan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Pihak PT Jaya Makmur Bersama selaku penggugat yang dimenangkan dalam Putusan ini, hingga saat Laporan ini disusun juga belum mengajukan tindakan apapun dalam rangka Pelaksanaan atas putusan kasasi. Perusahaan masih akan mengajukan kembali upaya hukum yang dimungkinkan untuk permasalahan ini.

Sesuai kesepakatan antara Perusahaan dan PT Jaya Makmur Bersama, bunga atas deposito berjangka yang ditempatkan Perusahaan di Bank yang berasal dari uang jaminan yang diterima PT Jaya Makmur Bersama, bunga tersebut menjadi milik PT Jaya Makmur Bersama.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

On the Decision of the Cassation, the Company has submitted A Judicial Review Effort to the Supreme Court in accordance with letter No.18/ZP/X/2016 dated 26 October 2016. Up to the financial statements date, the Company and/or its attorneys have not yet received an official copy of the Judicial Review Decision. PT Jaya Makmur Bersama as the plaintiff also has not submitted any action in the context of executing the Decision. Thus the company will still resubmit any possible legal remedies for this issue.

Based on agreement between the Company and PT Jaya Makmur Bersama, interest on that time deposit placed by the Company which comes from security deposit from PT Jaya Makmur Bersama, belongs to PT Jaya Makmur Bersama.

18. Utang Usaha

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

	2023	2022
Pihak berelasi (Catatan 40)		
Rupiah		
KSO PT Wijaya Karya (Persero) -		
PT Bunga Raya Lestari	112,243,251,072	27,198,117,816
PT Adhi Karya (Persero) Tbk, JO	76,964,388,346	31,771,446,690
PT Wijaya Karya Bangunan		
Gedung Tbk	30,933,638,879	75,152,765,896
KSO PT Nindya Karya - Lestari	20,817,875,581	20,356,062,775
PT Angkasa Pura Logistik	17,382,640,881	--
PT Telekomunikasi Indonesia		
(Persero) Tbk	4,467,657,466	11,057,991,288
PT Asuransi Jasa Indonesia	1,474,855,995	--
PT Angkasa Pura Support	739,909,025	961,594,606
PT Hotel Indonesia Natour	669,042,352	982,550,768
PT Aviastri Pariwisata Indonesia	490,000,000	490,000,000
PT Indah Karya (Persero)	342,433,000	--
PT BRI Asuransi Indonesia	198,996,578	--
PT Wijaya Karya (Persero)	--	3,443,556,043
PT Superintending Company		
of Indonesia	--	714,420,000
Sub-jumlah	266,724,689,175	172,128,505,882

18. Trade Payables

Details of trade payables are as follows:

a. Based on vendor

Related parties (Note 40)
Rupiah
KSO PT Wijaya Karya (Persero) -
PT Bunga Raya Lestari
PT Adhi Karya (Persero) Tbk, JO
PT Wijaya Karya Bangunan
Gedung Tbk
KSO PT Nindya Karya - Lestari
PT Angkasa Pura Logistik
PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk
PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Angkasa Pura Support
PT Hotel Indonesia Natour
PT Aviastri Pariwisata Indonesia
PT Indah Karya (Persero)
PT BRI Asuransi Indonesia
PT Wijaya Karya (Persero)
PT Superintending Company
of Indonesia
Sub-total

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Pemerintah Kabupaten Badung	20,949,675,000	20,949,675,000	Badung Regency Government
PT Fasen Creative Quality	12,050,000,000	28,107,420,014	PT Fasen Creative Quality
PT Inacon Luhur Pertiwi JV			PT Inacon Luhur Pertiwi JV
PT Cirijasa E.C dan PT Bina Karya (Persero)	8,609,027,523	4,245,404,185	PT Cirijasa E.C dan PT Bina Karya (Persero)
PT Perentjana Djaja	6,216,891,555	1,717,851,506	PT Perentjana Djaja
PT Jaya Construction Management	3,432,052,524	5,307,068,000	PT Jaya Construction Management
PT Gading Asia Kencana	3,103,250,000	--	PT Gading Asia Kencana
PT Quindo Indonesia Cemerlang	3,034,582,145	--	PT Quindo Indonesia Cemerlang
PT Tiga Nama Produksi	2,574,945,000	--	PT Tiga Nama Produksi
PT Komunika Expo	2,155,580,359	--	PT Komunika Expo
Lalu Sungkul	2,054,000,000	--	Lalu Sungkul
RSUD Nusa Tenggara Barat	1,813,384,230	--	RSUD Nusa Tenggara Barat
Koperasi Nusa Jaya	1,649,743,405	2,490,436,621	Koperasi Nusa Jaya
PT Roadgrip Motorsport Indonesia	1,498,517,695	--	PT Roadgrip Motorsport Indonesia
PT Niabayu Exposindo	1,324,470,000	--	PT Niabayu Exposindo
PT Mahardika Insani Adiwarna	1,309,555,951	--	PT Mahardika Insani Adiwarna
PT Pijar Bumi Cakrawala	1,301,491,120	--	PT Pijar Bumi Cakrawala
PT AAPC Indonesia	1,285,708,738	939,724,807	PT AAPC Indonesia
PT Prima Karunia Kreasi	1,234,410,713	--	PT Prima Karunia Kreasi
PT Cakra Buana Consultants JV			PT Cakra Buana Consultants JV
PT Marga Graha Penta	1,180,593,721	1,212,242,051	PT Marga Graha Penta
PT Komala Indonesia	993,806,009	--	PT Komala Indonesia
PT Nusapratama Dwikharisma	870,877,809	870,877,809	PT Nusapratama Dwikharisma
PT Mandalika Mitra Bersama	863,439,987	634,112,086	PT Mandalika Mitra Bersama
DZE Asia Pte. Ltd.	862,144,000	--	DZE Asia Pte. Ltd.
PT Silcon Adilaras JV			PT Silcon Adilaras JV
PT Rekeasindo Mandiri dan PT Prajna Adhi Cakra	860,795,124	--	PT Rekeasindo Mandiri dan PT Prajna Adhi Cakra
PT Arkonin Engineering			PT Arkonin Engineering
Manggala Pratama	816,876,529	--	Manggala Pratama
Sandiva Legal Network	737,004,631	--	Sandiva Legal Network
PT Sejahtera Mandiri Bersama	509,466,684	--	PT Sejahtera Mandiri Bersama
PT Bakhtera Freight Worldwide	502,357,849	--	PT Bakhtera Freight Worldwide
Koperasi Mutiara Mandalika			Koperasi Mutiara Mandalika
Madani	690,684,150	1,592,422,563	Madani
Dyandra Global Edutainment	676,310,000	--	Dyandra Global Edutainment
PT Mitra Integrasi Informatika	662,782,464	122,239,250	PT Mitra Integrasi Informatika
KJPP Rengganis, Hamid, dan Rekan	602,782,464	--	KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan
PT Daya Genset Sarana	583,600,000	--	PT Daya Genset Sarana
PT Karvak Nusa Geomatika	563,841,765	563,841,765	PT Karvak Nusa Geomatika
Jupiter - Gilang Sunindya	550,120,000	--	Jupiter - Gilang Sunindya
KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan	536,520,577	959,898,855	KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan
PT Visi Tiga Media	518,604,240	--	PT Visi Tiga Media
PT Edpmedia Multimitra Pramanusa	506,469,125	1,345,435,947	PT Edpmedia Multimitra Pramanusa
CV Alap Sari Teknik	501,459,433	--	CV Alap Sari Teknik
PT Andal Aman Abadi	478,627,958	314,751,240	PT Andal Aman Abadi
PT Adicipta Cakrajaya	471,189,700	--	PT Adicipta Cakrajaya
PT AECOM Indonesia	440,891,604	712,061,855	PT AECOM Indonesia
PT Media Indra Buana	410,000,000	--	PT Media Indra Buana
Badan Promosi Pariwisata Daerah			Badan Promosi Pariwisata Daerah
Nusa Tenggara Barat	352,505,000	--	Nusa Tenggara Barat
CV Setia Megah Rasindo	347,067,633	--	CV Setia Megah Rasindo

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
PT Trijaya Nasional	336,439,854	599,371,770	PT Trijaya Nasional
Two Wheels Motor Racing	327,294,000	--	Two Wheels Motor Racing
PT Kuantum Graha Marga	288,743,067	581,585,500	PT Kuantum Graha Marga
PT Rega Dana Asia	287,490,000	--	PT Rega Dana Asia
PT Ciriayasa Cipta Mandiri	267,090,402	522,409,956	PT Ciriayasa Cipta Mandiri
PT Kompas Media	264,180,000	--	PT Kompas Media
PT Panen Raya	263,569,500	--	PT Panen Raya
PT Otello Asia Kreasindo	250,000,000	--	PT Otello Asia Kreasindo
PT Kirana Indo Pratama	50,000,000	2,979,291,700	PT Kirana Indo Pratama
PT Bayu Surya Bakti Konstruksi	13,513,514	3,586,316,129	PT Bayu Surya Bakti Konstruksi
PT Manggarai Anugerah Semesta	--	17,558,625,000	PT Manggarai Anugerah Semesta
PT Global Tiket Network	--	6,491,903,712	PT Global Tiket Network
PT Kreasi Sejahtera Bahagia	--	1,765,765,766	PT Kreasi Sejahtera Bahagia
PT Pico TBA	--	1,668,903,825	PT Pico TBA
PT Warna Warni Media	--	1,096,940,817	PT Warna Warni Media
PT ISS Facility Service	--	462,816,482	PT ISS Facility Service
PT Bunga Raya Lestari	--	406,158,682	PT Bunga Raya Lestari
PT Quadratura Indonesia	--	388,480,405	PT Quadratura Indonesia
CV Lighthouse Informatika Solusindo	--	373,520,245	CV Lighthouse Informatika Solusindo
PT Sigma Cipta Caraka	--	352,962,569	PT Sigma Cipta Caraka
KJPP Muttaqin Bambang Purwanto	--	--	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto
Rozak Uswatun & Rekan	--	347,253,200	Rozak Uswatun & Rekan
PT Perusahaan Air Indonesia	--	--	PT Perusahaan Air Indonesia
Amerika	--	320,496,868	Amerika
PT ISS Indonesia	--	301,040,953	PT ISS Indonesia
PT Klaasen Lighting Design	--	227,369,370	PT Klaasen Lighting Design
Persek Perdata Hendra Soenardi	--	147,000,000	Persek Perdata Hendra Soenardi
CV Ari Widhia Nugraha	--	4,537,136	CV Ari Widhia Nugraha
Lain-lain	61,478,001,952	32,639,033,416	Others
Sub-jumlah	156,514,426,702	144,907,247,055	Sub-total
Jumlah	423,239,115,877	317,035,752,937	Total

b. Berdasarkan umur

b. Based on aging

	2023	2022	
Sampai dengan 1 bulan	249,258,797,916	131,704,717,138	Within 1 month
1 - 3 bulan	77,023,778,335	7,210,548,022	1 - 3 month
3 - 6 bulan	3,714,027,351	13,237,312,815	3 - 6 month
6 bulan - 1 tahun	20,286,359,400	36,807,748,072	6 - 12 month
Lebih dari 1 tahun	72,956,152,875	128,075,426,890	More than 1 year
Jumlah	423,239,115,877	317,035,752,937	Total

Utang usaha kepada PT Wijaya Karya (Persero) - PT Bunga Raya Lestari, KSO, PT Wijaya Karya (Persero), PT Wijaya Karya Gedung dan PT Jaya Construction Management merupakan utang atas pembangunan proyek infrastruktur di Kawasan Mandalika.

Trade payables to PT Wijaya Karya (Persero) - PT Bunga Raya Lestari, KSO, PT Wijaya Karya (Persero), PT Wijaya Karya Gedung and PT Jaya Construction Management represent payable related to development of infrastructure project in Mandalika area.

Utang kepada PT Fasen Creative Quality merupakan utang atas penyelenggaraan event WSBK 2021, MotoGP 2022, dan MotoGP 2023.

Trade payable to PT Fasen Creative Quality represent payable related to organizing the 2021 WSBK, 2022 MotoGP, and 2023 MotoGP events.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Utang kepada Pemerintah Kabupaten Badung merupakan utang atas pembayaran BPHTB (biaya pajak legal) di Nusa Dua atas lahan seluas 24.300 m².

The payable to government regency of Badung represents payable related to the BPHTB (legal tax cost) for land of 24,300 sqm in Nusa Dua.

19. Perpajakan

19. Taxation

a. Pajak dibayar di muka

Akun ini merupakan pajak dibayar di muka dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	--	30,793,158,973
Sub-jumlah	--	30,793,158,973
Entitas anak		
Pajak penghasilan		
Pasal 23	660,310,073	--
Pasal 21	10,958,043	--
Pasal 28A	--	2,370,226,748
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	8,797,372,055	2,272,391,884
Sub-jumlah	9,468,640,171	4,642,618,632
Jumlah	9,468,640,171	35,435,777,605

The Company
Value Added Tax (VAT)

Sub-total

The subsidiaries

Income taxes

Article 23

Article 21

Article 28A

Value Added Tax (VAT)

Sub-total

Total

b. Utang pajak

Akun ini merupakan utang pajak dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Perusahaan		
Pajak penghasilan		
Pasal 21	2,893,982,006	1,361,224,567
Pasal 22	38,225,081	5,679,656
Pasal 23	1,241,098,454	58,581,946
Pasal 26	1,746,552,163	--
Pasal 4 (2)	1,392,881,450	49,942,737
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20,547,396,119	9,536,089,902
Pajak hotel dan restoran	1,078,133,881	459,519,505
Pajak hiburan	3,902,099	--
Sub-jumlah	28,942,171,253	11,471,038,313
Entitas anak		
Pajak penghasilan		
Pasal 21	1,023,916,236	1,147,826,254
Pasal 23	2,511,547,775	184,001,387
Pasal 4 (2)	120,408,061	88,079,577
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	178,605,262	488,352,960
Sub-jumlah	3,834,477,334	1,908,260,178
Jumlah	32,776,648,587	13,379,298,491

The Company

Income taxes

Article 21

Article 22

Article 23

Article 26

Article 4 (2)

Value Added Tax (VAT)

Hotel and restaurant tax

Entertainment tax

Sub-total

The subsidiaries

Income taxes

Article 21

Article 23

Article 4 (2)

Value Added Tax (VAT)

Sub-total

Total

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

c. Beban (manfaat) pajak penghasilan

c. Income tax expense (benefit)

	2023	2022	
<u>Pajak kini</u>			<u>Current income tax</u>
Perusahaan			The Company
Tahun berjalan	--	--	Current year
Entitas anak			Subsidiaries
Tahun berjalan	--	--	Current year
Sub-total	--	--	Sub-total
<u>Pajak penghasilan tangguhan</u>			<u>Deferred income tax</u>
Perusahaan	(198,404,952)	(184,035,362)	The Company
Entitas anak	(456,720,000)	--	Subsidiaries
Sub-jumlah	(655,124,952)	(184,035,362)	Sub-total
Jumlah - Neto	(655,124,952)	(184,035,362)	Total - Net

d. Perhitungan beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku sebesar 22% terhadap laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan, yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

d. Calculation of Income tax expense

The reconciliation between income tax expense calculated at the applicable tax rate of 22% to the profit before income tax and the income tax expense, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Rugi sebelum beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(279,072,597,464)	(210,150,402,604)	Loss before income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan entitas anak	(43,697,466,431)	(65,143,482,445)	Less profit (loss) before income tax of Subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perusahaan	(235,375,131,033)	(145,006,920,159)	Profit (loss) before income tax attributable to the Company
Pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku sebesar 22%	(51,782,528,827)	(31,901,522,435)	Income tax calculated at applicable tax rates of 22%
Beban pajak atas perbedaan permanen:			Tax expense on permanent differences:
Penghasilan sewa yang dikenakan pajak final	(391,743,712,569)	(62,994,607,741)	Rental income subject to final tax
Beban terkait dengan penghasilan pajak final	49,698,430,280	55,524,358,632	Expense subject to final tax
Beban yang tidak bisa dikurangkan	395,742,107,904	41,001,298,149	Non-deductible expenses
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(2,569,421,740)	(1,813,561,967)	Interest income subject to final tax
Beban pajak penghasilan - neto	(655,124,952)	(184,035,362)	Income tax expense - net

e. Lebih (kurang) bayar pajak penghasilan

Beban pajak kini dan perhitungan atas utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

e. Over (under) payment of income tax

Current income tax expense and computation of income tax payable are as follows:

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Rugi sebelum beban			Consolidated loss
pajak penghasilan konsolidasian	(279,072,597,464)	(210,150,402,604)	before income tax expense
Dikurangi laba (rugi) sebelum beban			Less profit (loss) before
pajak penghasilan entitas anak	(43,697,466,431)	(65,143,482,445)	income tax of Subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak			Profit (loss) before income
penghasilan Perusahaan	(235,375,131,033)	(145,006,920,159)	tax attributable to the Company
Koreksi fiskal:			Fiscal correction:
Perbedaan temporer	--	--	Temporary difference
Perbedaan permanen	235,375,131,033	145,006,920,159	Permanent difference
Estimasi penghasilan kena pajak			Estimated taxable income (loss) -
(kerugian) - tahun berjalan	--	--	current year
Beban pajak penghasilan badan - kini	--	--	Income tax expense - current
Pajak penghasilan dibayar dimuka			Prepayments of income taxes
Pajak penghasilan pasal 23	--	--	Income tax article 23
Pajak penghasilan pasal 25	--	--	Income tax article 25
Total	--	--	Total
Estimasi kurang bayar			Estimated income tax underpayment
pajak penghasilan pasal 29	--	--	of article 29

f. Aset pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

f. Deferred tax assets

Details of deferred tax assets and liabilities of the Company as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif lain Credited/ (charged) to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Entitas induk					Company
Liabilitas imbalan kerja	734,795,742	--	46,450,905	781,246,647	Employee benefits liability
Cadangan penurunan nilai piutang kepada PT Inco Energy (Catatan 17)	22,000,000	--	--	22,000,000	Allowance for impairment of trade receivable from PT Inco Energy (Note 17)
Cadangan penurunan nilai aset tetap	46,950,374	(46,950,374)	--	--	Allowance for impairment of property and equipment
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	1,221,455,220	179,898,240	--	1,401,353,460	Allowance for impairment of trade receivables
Cadangan penurunan nilai piutang lain-lain	27,039,037	--	--	27,039,037	Allowance for impairment of other receivables
Cadangan penurunan nilai investasi pada surat berharga	21,144,173	(5,542,302)	--	15,601,871	Allowance for impairment of investment in marketable securities
Perubahan nilai wajar investasi saham	(126,918,000)	70,999,388	(85,133,664)	(141,052,276)	Changes in fair value stock investment
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	1,946,466,546	198,404,952	(38,682,759)	2,106,188,739	Total deferred tax assets - net
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Entitas anak	--	456,720,000	--	456,720,000	Subsidiaries

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif lain Credited/ (charged) to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Entitas induk					Company
Liabilitas imbalan kerja	1,166,291,317	(166,048,590)	(265,446,985)	734,795,742	Employee benefits liability
Cadangan penurunan nilai piutang kepada PT Inco Energy (Catatan 17)	22,000,000	--	--	22,000,000	Allowance for impairment of trade receivable from PT Inco Energy (Note 17)
Cadangan penurunan nilai aset tetap	46,950,374	--	--	46,950,374	Allowance for impairment of property and equipment
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	865,922,379	355,532,841	--	1,221,455,220	Allowance for impairment of trade receivables
Cadangan penurunan nilai piutang lain-lain	27,039,037	--	--	27,039,037	Allowance for impairment of other receivables
Cadangan penurunan nilai investasi pada surat berharga	26,593,062	(5,448,889)	--	21,144,173	Allowance for impairment of investment in marketable securities
Perubahan nilai wajar investasi saham	(87,362,000)	--	(39,556,000)	(126,918,000)	Changes in fair value stock investment
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	2,067,434,169	184,035,362	(305,002,985)	1,946,466,546	Total deferred tax assets - net

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat kemungkinan memadai bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk memanfaatkan beda temporer yang dapat dikurangkan pada entitas anak tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2023 estimasi rugi fiskal tidak diakui sebagai berikut:

The Management of the Company believes that it is not probable that taxable profit will be available against which deductible temporary differences on certain subsidiaries can be utilized. As of December 31, 2023 the estimated fiscal loss has been not recognized as follows:

	Tahun kedaluwarsa/ Expired year	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Tahun pajak 2020	2025	30,523,416,928	2020 fiscal year
Tahun pajak 2021	2026	11,090,250,568	2021 fiscal year

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang tersisa dapat direalisasi.

The Management of the Company is in the opinion that the remaining deferred tax assets are recoverable.

20. Biaya yang Masih Harus Dibayar

20. Accrued Expenses

	2023	2022	
Konstruksi proyek	545,732,251,299	565,151,347,986	Construction
Event	225,804,362,418	81,298,078,710	Event
Konsultasi dan pengawasan	10,109,771,000	9,793,869,088	Consultation and supervision
Jasa borongan	7,769,973,066	4,092,771,548	Wholesale service
Bunga pinjaman	4,671,108,530	1,186,020,825	Loan interest
Manfaat pegawai	2,043,783,261	2,638,361,710	Employee benefits
Sewa	285,561,600	1,048,183,629	Rent
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	17,853,787,189	9,195,867,018	Others (each below Rp500 millions)
Jumlah	814,270,598,363	674,404,500,514	Total

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. Utang Lain-lain

	2023	2022
Utang jaminan	34,299,271,973	25,585,153,603
Utang karyawan	19,159,763,072	21,586,835,909
Utang kepada pemegang saham non-pengendali	1,595,449,324	1,609,891,604
Utang biaya pra-operasi	--	182,305,548
Lainnya (masing-masing dibawah Rp500 juta)	5,176,230,566	4,030,935,626
Sub-jumlah	60,230,714,935	52,995,122,290
Dikurangi:		
Bagian jangka panjang atas utang lain-lain	(3,268,431,431)	(3,465,179,259)
Jumlah porsi jangka pendek	56,962,283,504	49,529,943,031

Utang jaminan merupakan uang jaminan atas pelaksanaan *beauty contest* proyek pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok dan proyek pengembangan Lot di wilayah operasional Nusa Dua, termasuk *refundable deposit* Perusahaan dalam kasus dengan PT Jaya Makmur Bersama (Catatan 17).

Utang biaya pra-operasi merupakan utang PT ITDC Nusantara Xplorin ("INX"), entitas anak dari PT ITDC Nusantara Properti, yang timbul dari uang muka dan beban-beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh PT Indo Pratama Network. Akun ini tidak dikenakan beban bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti.

Utang kepada pemegang saham non-pengendali merupakan utang INX kepada pemegang saham minoritas INX. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 utang ini terutama timbul dari uang muka dan beban-beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu masing-masing oleh PT Amerta Arta Anugrah dan PT Indonesia Plus Induk Perusahaan (INPLUS). Akun ini tidak dikenakan beban bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti.

21. Other Liabilities

Deposit payable
Employee payable
Non-Controlling shareholder payable
Pre-operating expense payable
Others (each belows Rp500 millions)
Sub-total
Less:
Non-current portion of other payables
Total current portion

Deposit payable represents deposit for beauty contest process for Tourism Area of Mandalika Lombok and Lot development project in Nusa Dua operational area, includes refundable deposit of the Company in case with PT Jaya Makmur Bersama (Note 17).

Pre-operating expense payable represents payables of PT ITDC Nusantara Xplorin ("INX"), subsidiary of PT ITDC Nusantara Properti, that arising from advances and operational expenses paid in advance by PT Indo Pratama Network. This account does not incur any interest charges and without a fixed return schedule.

Non-controlling interest payable represents payable of INX to its minority shareholders. As of December 31, 2023 and 2022, this payable mainly arises from advances and operational expenses paid in advance by PT Amerta Arta Anugrah and PT Indonesia Plus Parent Company (INPLUS) respectively. This account does not incur any interest charges and without a fixed return schedule.

22. Liabilitas Kontrak

Rincian liabilitas kontrak adalah sebagai berikut:

22. Contract Liabilities

Details of contract liabilities are as follows:

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Kompensasi sekaligus	179,530,148,414	84,308,226,375	One time compensation
Kompensasi minimum	29,787,405,210	21,646,329,932	Minimum compensation
Kompensasi assessment	5,905,806,338	2,762,963,718	Assessment compensation
Lainnya	2,255,546,988	8,391,461,136	Others
Jumlah	217,478,906,950	117,108,981,161	Total
Dikurangi:			Less :
Liabilitas kontrak - jangka pendek	(57,707,218,516)	(34,142,535,859)	Contract liabilities - current portion
Liabilitas kontrak - neto dari bagian jangka pendek	159,771,688,434	82,966,445,302	Contract liabilities - net of current portion

Liabilitas kontrak kompensasi sekaligus merupakan pendapatan kompensasi yang diterima sekaligus pada periode awal masa sewa. Rincian liabilitas kontrak kompensasi sekaligus adalah sebagai berikut:

One time compensation contract liabilities represents one time compensation revenue is received in advance at the beginning of lease period. Details from one time receipt of contract liabilities are as follows:

	2023	2022	
PT Nusa Dua Mahajaya	100,589,248,063	--	PT Nusa Dua Mahajaya
PT Royal Pacific Nusantara	37,386,638,813	37,328,622,232	PT Royal Pacific Nusantara
PT Peninsula Bali Resort	14,212,945,155	14,688,029,673	PT Peninsula Bali Resort
PT Sejahtera Indoco	6,926,969,898	7,792,841,135	PT Sejahtera Indoco
PT Alam Hijau Mandalika	6,191,892,880	--	PT Alam Hijau Mandalika
PT Archouse Wisata Indonesia	5,049,011,680	--	PT Archouse Wisata Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia Komunikasi (Persero)	3,533,333,333	3,533,333,333	PT Telekomunikasi Indonesia Komunikasi (Persero)
PT Metafora International	3,503,174,910	3,630,178,230	PT Metafora International
PT Indomarco Prismaatama	1,064,583,340	1,283,333,335	PT Indomarco Prismaatama
PT Tri Parima Lestari	425,283,336	441,433,336	PT Tri Parima Lestari
PT Pacific Resort Buana	362,623,471	374,321,003	PT Pacific Resort Buana
PT Narendra Interpacific Indonesia	169,818,912	15,120,214,429	PT Narendra Interpacific Indonesia
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100 juta)	114,624,623	115,919,669	Others (each belows Rp100 millions)
Jumlah	179,530,148,414	84,308,226,375	Total

Kompensasi sewa lahan PT Nusa Dua Mahajaya dibayar secara sekaligus untuk masa sewa selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2029 sesuai LUDA tanggal 4 Desember 2023 antara Perusahaan dengan PT Nusa Dua Mahajaya.

Lease compensation from PT Nusa Dua Mahajaya was paid one - time in advance for the lease term of 7 (seven) years from January 1, 2023 to December 31, 2029 pursuant to the LUDA dated December 4, 2023 between the Company and PT Nusa Dua Mahajaya.

Kompensasi sewa lahan PT Narendra Interpacific Indonesia dibayar secara sekaligus untuk masa sewa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2025 sesuai LUDA tanggal 13 Mei 1989 antara Perusahaan, Pemerintah Provinsi Bali dengan PT Narendra Interpacific Indonesia dan telah diamendemen beberapa kali terakhir pada tanggal 18 September 2017 terkait pengembangan Lot.

Lease compensation from PT Narendra Interpacific Indonesia was paid one - time in advance for the lease term of 8 (eight) years from October 1, 2017 to December 31, 2025 pursuant to the LUDA dated May 13, 1989 between the Company, Government of Bali Province and PT Narendra Interpacific Indonesia and has been amended several times with the latest on September 18, 2017 related to Lot development.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Kompensasi sewa lahan PT Royal Pacific Nusantara dibayar di muka untuk masa sewa selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan 18 Februari 2058 sesuai Akta Notaris Evi Susanti Panjaitan, S.H., No. 63 tanggal 18 Februari 2008 tentang Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan Lot SW 4-5 di Kawasan Pariwisata Nusa Dua antara Perusahaan dengan PT Royal Pacific Nusantara.

Kompensasi sewa lahan PT Peninsula Bali Resort dibayar secara sekaligus untuk masa sewa selama 36 (tiga puluh enam) tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2054. Pembayaran kompensasi ini terkait dengan penjualan 102 (seratus dua) kamar yang sebelumnya dikelola oleh PT Peninsula Bali Resort kepada PT Indonesia MOC Services.

Kompensasi sewa lahan PT Sejahtera Indoco dibayar secara sekaligus untuk masa sewa selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak tanggal 17 Mei 1981 sampai dengan 17 Mei 2031 sesuai LUDA tanggal 10 September 1980 antara Perusahaan dengan PT Bukit Nusa Hotel Cooperation dan PT Sejahtera Indoco dan telah diamandemen pada tanggal 7 November 1990 terkait penambahan luas lahan yang disewakan seluas 3.070 m².

Liabilitas kontrak kompensasi minimum merupakan pendapatan kompensasi minimum untuk triwulanan yang diterima di muka. Rincian liabilitas kontrak kompensasi minimum adalah sebagai berikut:

Lease compensation from PT Royal Pacific Nusantara was paid in advance for the lease term of 50 (fifty) years commencing from February 18, 2008 to February 18, 2058 pursuant to the Notarial Deed of Evi Susanti Panjaitan, S.H., No. 63 dated February 18, 2008 on the Land Utilization and Land Development Agreement of Lot SW 4-5 in Nusa Dua Tourism Area between the Company and PT Royal Pacific Nusantara.

Lease compensation from PT Peninsula Bali Resort was paid one - time in advance for the lease term of 36 (thirty six) years from September 22, 2017 to December 31, 2054. This compensation is related to sale of 102 (one hundred two) rooms, previously managed by PT Peninsula Bali Resort, to PT Indonesia MOC Services.

Lease compensation from PT Sejahtera Indoco was paid one - time in advance for the lease term of 50 (fifty) years from May 17, 1981 to May 17, 2031 pursuant to the LUDA dated September 10, 1980 between the Company and PT Bukit Nusa Hotel Cooperation and PT Sejahtera Indoco and has been amended on

November 7, 1990 related to the addition of leased area of 3,070m².

Minimum compensation contract liabilities represents minimum compensation revenue on quarterly basis which was received in advance. Details of contract liabilities from minimum compensation are as follows:

	2023	2022	
Pihak Ketiga			Third parties
PT Bali Destinasi Lestari	9,325,987,500	--	PT Bali Destina Lestari
PT Bali Holiday Village	8,443,368,493	8,482,505,977	PT Bali Holiday Village
PT Wyncorr Bali	4,361,441,286	4,386,469,050	PT Wyncorr Bali
PT Nusa Dua Indonesia	4,109,061,451	--	PT Nusa Dua Indonesia
PT Peninsula Bali Resort	1,452,083,115	--	PT Peninsula Bali Resort
PT Trisaka Reksa Waluya	1,026,936,175	1,033,227,864	PT Trisaka Reksa Waluya
PT Narendra Interpacific Indonesia	--	7,460,713,121	PT Narendra Interpacific Indonesia
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	1,068,527,190	283,413,920	Others (each below Rp500 millions)
Jumlah	29,787,405,210	21,646,329,932	Total

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan *assessment* merupakan pendapatan yang berasal dari penggantian biaya untuk biaya keamanan dan pemeliharaan lanskap yang dihitung berdasarkan jumlah kamar per lot atau luas tanah yang disewa dengan tarif tertentu yang diberlakukan sama untuk semua *tenant*.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Assessment revenue is revenue derived from the reimbursement of expenses for landscape security and maintenance fees calculated based on the number of rooms per lot or leased land area at a certain rate which is applied equally to all tenants.

23. Liabilitas Imbalan Kerja

Perusahaan dan entitas anaknya menyediakan imbalan kerja jangka pendek, pensiun dan kesejahteraan karyawan lainnya untuk seluruh pegawai tetap yang masih aktif.

Perusahaan dan entitas anaknya menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program jaminan hari tua untuk seluruh pegawai tetap sesuai dengan Keputusan Direksi No. Kep/Dir/PT.PPB/72/VI/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Program Asuransi Pensiun Pegawai dan Keputusan Direksi No. Kep/Dir/12/II/2003.

Perusahaan dan entitas anaknya juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lain kepada pegawai sesuai dengan Keputusan Direksi No. Kep/Dir/66/XI/1992 tentang Ketentuan Pemberian Piagam Masa Kerja dan Penghargaan Pengabdian Kepada Pegawai dan Keputusan Direksi No. Kep/Dir/80/XI/2011 tentang Tunjangan Cuti Pegawai.

Program pensiun UU No.11/2020

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK") sebagaimana telah diamendemen dengan Perpu No.2/2022 dan UU No.6/2023 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh PT Padma Radya Aktuaria dan KKA Riana & Rekan, aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* berdasarkan laporan penilaian aktuarial masing tanggal 29 Januari 2024 dan 31 Januari 2023.

23. Employee Benefits

The Company and its subsidiaries provide short-term employee benefits, pensions and other employee benefits for all active permanent employees.

The Company and its subsidiaries have a defined benefit pension plan and retirement benefit program for all permanent employees in accordance with the Decree of the Board of Directors No. Kep/Dir/PT.PPB/72/VI/2013 on Termination of Employment and Employee Pension Insurance Program and Board of Directors Decree No. Kep/Dir/12/II/2003.

The Company and its subsidiaries also provide other long-term employee benefits in accordance with the Decree of the Board of Directors No. Kep/Dir/66/XI/1992 regarding Provisions on the Charter of Employment and Employee Service Award and Board of Directors Decree No. Kep/Dir/80/XI/2011 on Employee Leave Allowances.

UU No. 11/2020 pension plan

Liabilities for other long-term employment benefits and post-employment benefits in accordance with Law No. 11/2020 on Job Creation ("JCL") as amended by Perpu No.2/2022 and Law No.6/2023 as of December 31, 2023 and 2022 were calculated by PT Padma Radya Aktuaria and KKA Riana & Rekan, independent actuary using the Projected Unit Credit method based on actuarial valuation report dated January 29, 2024 and January 31, 2023, respectively.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Usia pensiun normal (tahun)	56	56	Normal retirement age (years)
Tingkat kematian	TMI - IV (2019)	TMI - IV (2019)	Mortality rate
Tingkat suku bunga diskonto	7.75%	7.75%	Discount rate
Kenaikan gaji	5.00%	5.00%	Salary increment rate
Persentase tingkat cacat per tahun	5% TMI - IV (2019)	5% TMI - IV (2019)	Disability rate per annum
Usia pensiun dini	Minimal 15 tahun masa kerja/ Minimum 15 years working period	Minimal 15 tahun masa kerja/ Minimum 15 years working period	Early retirement age
Tingkat pengunduran diri	3% sampai usia 40 kemudian menurun linear menjadi 0% pada usia 56/ 3% up to 40 decreasing linearly to 0% at age 56	3% sampai usia 40 kemudian menurun linear menjadi 0% pada usia 56/ 3% up to 40 decreasing linearly to 0% at age 56	Resignation rate

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The movements of the Company and its subsidiaries employee benefits liability as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023					
	Program Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja/ Severance Program and Long Service Pay	Program JHT dan UU No.6/2023/ JHT program and Law No.6/2023	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Program Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Program	Total/ Total	
Saldo awal	12,313,225,762	12,486,859,872	6,646,932,338	2,650,498,260	34,097,516,232	Beginning balance
Penyesuaian perubahan metode atribusi	--	--	--	--	--	Adjustment of changes in attribution method
Beban pensiun liabilitas imbalan kerja	2,636,071,823	1,393,905,538	1,955,403,952	509,281,051	6,494,662,364	Benefit expense during the period
Pembayaran liabilitas imbalan kerja	(478,931,354)	(1,006,761,272)	(1,778,528,200)	--	(3,264,220,826)	Benefit payments
Kerugian/(keuntungan) pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain	575,885,976	1,535,518,819	--	(3,196,646)	2,108,208,149	Remeasurement loss (gain) recognized as other comprehensive income
Saldo akhir	15,046,252,207	14,409,522,957	6,823,808,090	3,156,582,665	39,436,165,919	Ending balance
	2022					
	Program Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja/ Severance Program and Long Service Pay	Program JHT dan UU 11/2020/ JHT program and Law No.11/2020	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Program Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Program	Total/ Total	
Saldo awal	21,041,684,067	20,891,139,438	6,788,544,379	4,291,873,819	53,013,241,703	Beginning balance
Penyesuaian perubahan metode atribusi	(514,522,402)	-	--	--	(514,522,402)	Adjustment of changes in attribution method
Beban pensiun liabilitas imbalan kerja	3,208,322,292	2,086,590,307	803,351,359	(1,288,279,309)	4,809,984,649	Benefit expense during the period
Pembayaran liabilitas imbalan kerja	(4,025,273,583)	(5,822,082,416)	(944,963,400)	(353,096,250)	(11,145,415,649)	Benefit payments
Kerugian/(keuntungan) pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(7,396,984,612)	(4,668,787,457)	--	--	(12,065,772,069)	Remeasurement loss (gain) recognized as other comprehensive income
Saldo akhir	12,313,225,762	12,486,859,872	6,646,932,338	2,650,498,260	34,097,516,232	Ending balance

Beban pensiun Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries' pension expense as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023					
	Program Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja/ Severance Program and Long Service Pay	Program JHT dan UU No.6/2023/ JHT program and Law No.6/2023	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Program Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Program	Total/ Total	
Biaya jasa kini	1,840,877,084	510,057,546	1,757,198,656	432,819,910	4,540,953,196	Current service cost
Biaya jasa lalu	--	--	--	--	--	Past service cost
Biaya bunga	795,194,739	883,847,992	431,198,776	193,952,097	2,304,193,604	Interest cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial	--	--	(232,993,480)	(117,490,956)	(350,484,436)	Actuarial loss (gain)
Beban pensiun liabilitas						
Imbalan kerja	2,636,071,823	1,393,905,538	1,955,403,952	509,281,051	6,494,662,364	Benefit expense

	2022					
	Program Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja/ Severance Program and Long Service Pay	Program JHT dan UU 11/2020/ JHT program and Law No.11/2020	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Program Masa Persiapan Pensiun/ Retirement Preparation Program	Total/ Total	
Biaya jasa kini	1,950,104,606	762,034,969	1,902,233,461	567,372,251	5,181,745,287	Current service cost
Biaya jasa lalu	--	--	--	--	--	Past service cost
Biaya bunga	1,258,217,687	1,324,555,338	436,615,392	298,406,445	3,317,794,862	Interest cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial	--	--	(1,535,497,494)	(2,154,058,005)	(3,689,555,499)	Actuarial loss (gain)
Penyesuaian perubahan metode atribusi	(514,522,402)	--	--	--	(514,522,402)	Adjustment of changes in attribution method
Beban pensiun liabilitas						
Imbalan kerja	2,693,799,891	2,086,590,307	803,351,359	(1,288,279,309)	4,295,462,248	Benefit expense

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pembayaran imbalan kerja yang diharapkan pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the expected benefit payments in future years are as follows:

	2023	2022	
Dalam 12 bulan mendatang	9,955,353,282	6,472,479,748	Within the next 12 months
Antara 1 sampai 2 tahun	--	--	Between 1 and 2 years
Antara 2 sampai 5 tahun	44,192,221,497	18,653,969,718	Between 2 and 5 years
Di atas 5 tahun	147,783,318,841	128,849,641,449	Beyond 5 years

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 9,31 tahun dan 10,17 tahun.

The average duration of the employee benefit liability as of December 31, 2023 and 2022 is 9.31 years and 10.17 years, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, analisis sensitivitas atas asumsi-asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for actuarial assumption as of December 31, 2023 and 2022 is as following:

	2023				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat diskonto/ Discount rate		
	Kenaikan 1%/ Increase 1%	(Penurunan 1%)/ (Decrease 1%)	Kenaikan 1%/ Increase 1%	(Penurunan 1%)/ (Decrease 1%)	
Kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan kerja	(1,662,345,651)	1,818,376,839	2,029,476,543	(1,940,613,007)	Increase (decrease) an employee benefit liability

	2022				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat diskonto/ Discount rate		
	Kenaikan 1%/ Increase 1%	(Penurunan 1%)/ (Decrease 1%)	Kenaikan 1%/ Increase 1%	(Penurunan 1%)/ (Decrease 1%)	
Kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan kerja	(1,310,236,205)	2,150,996,257	2,388,879,417	(1,600,792,425)	Increase (decrease) an employee benefit liability

Manajemen berpendapat bahwa program pensiun yang ada dan imbalan pascakerja yang diberikan Perusahaan dan entitas anaknya adalah cukup untuk menutupi imbalan yang diwajibkan oleh Undang-Undang.

The management is of the opinion that the existing retirement plan and the post-employment benefits provided by the Company and its subsidiaries are adequate to cover the benefits required under Law.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa

Sewa bangunan umumnya memiliki jangka waktu sewa antara 20-30 tahun dan sewa lahan 10 tahun.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat dari aset hak-guna yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya dan pergerakannya selama tahun berjalan:

2023			
Saldo Awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
<u>Biaya perolehan</u>			
Lahan	12,636,297,190		12,636,297,190
Bangunan	239,433,249,657		239,433,249,657
Jumlah biaya perolehan	252,069,546,847	--	252,069,546,847
<u>Akumulasi penyusutan</u>			
Lahan	6,302,552,078	2,047,216,426	8,349,768,504
Bangunan	47,143,394,916	17,107,398,984	64,250,793,900
Jumlah akumulasi penyusutan	53,445,946,994	19,154,615,410	72,600,562,404
Nilai tercatat	198,623,599,853		179,468,984,443

Cost
Land
Building
Total cost

Accumulated depreciation
Land
Building
Total accumulated depreciation
Carrying amount

2022			
Saldo Awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
<u>Biaya perolehan</u>			
Lahan	12,636,297,190	--	12,636,297,190
Bangunan	239,433,249,657	--	239,433,249,657
Jumlah biaya perolehan	252,069,546,847	--	252,069,546,847
<u>Akumulasi penyusutan</u>			
Lahan	2,755,335,647	3,547,216,431	6,302,552,078
Bangunan	30,035,995,932	17,107,398,984	47,143,394,916
Jumlah akumulasi penyusutan	32,791,331,579	20,654,615,415	53,445,946,994
Nilai tercatat	219,278,215,268		198,623,599,853

Cost
Land
Building
Total cost

Accumulated depreciation
Land
Building
Total accumulated depreciation
Carrying amount

Mutasi tercatat liabilitas sewa:

Movement of leases liabilities:

	2023	2022	
Saldo awal	190,880,950,626	206,848,198,622	Beginning balance
Penambahan liabilitas	--	--	Addition of liabilities
Penambahan bunga	416,384,538	9,175,898,819	Addition of interests
Pembayaran	(7,290,513,402)	(25,143,146,815)	Payments
Sub-jumlah	184,006,821,762	190,880,950,626	Sub-total
Dikurangi bagian lancar	(179,305,291,104)	(185,210,522,226)	Less current portion
Bagian jangka panjang	4,701,530,658	5,670,428,400	Long-term portion

Pembayaran sewa minimum masa datang berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

The future minimum lease payments based on lease agreements are as follows:

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023 Rp	2022 Rp	
Pembayaran sewa minimum:			Minimum lease payment
< 1 tahun	179,673,613,781	185,982,309,002	< 1 year
1-5 tahun	3,745,454,546	4,727,272,727	1-5 years
> 5 tahun	2,000,000,000	2,000,000,000	> 5 years
Jumlah	185,419,068,327	192,709,581,729	Total
Dikurangi: Bagian bunga	1,412,246,565	1,828,631,103	Less : Interest expense
Liabilitas sewa - neto	184,006,821,762	190,880,950,626	Lease liabilities - Net
Liabilitas sewa - jatuh tempo dalam satu tahun	179,305,291,104	185,210,522,226	Lease liabilities current maturities
Liabilitas sewa - setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun	4,701,530,658	5,670,428,400	Lease liabilities - net of current maturities

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian: *Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income:*

	2023	2022	
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 35)	19,154,615,410	20,654,615,415	Depreciation expense of right-of-use asset (Note 35)
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 39)	416,384,538	9,175,898,819	Interest expense on lease liabilities (Note 39)
Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi	19,570,999,948	29,830,514,234	Amount recognized in profit or loss statement

Perusahaan dan entitas anaknya memiliki arus kas keluar untuk sewa masing-masing sebesar Rp7.290.513.402 dan Rp25.143.146.815 pada 31 Desember 2023 dan 2022. *The Company and its subsidiaries had total cash outflows for leases of Rp7,290,513,402 and Rp25,143,146,815 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.*

25. Pinjaman Bank

25. Bank Loan

a. Pinjaman bank jangka pendek

Pinjaman bank jangka pendek terdiri dari:

a. Short-term bank loans

Short-term bank loans consist of:

	2023	2022	
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	168,717,042,170	--	Indonesia Eximbank
PT Perusahaan Pengelola Aset	30,925,125,000	--	PT Perusahaan Pengelola Aset
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	34,089,093,490	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	34,089,093,490	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	34,089,093,490	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	34,089,093,490	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jumlah pinjaman bank jangka pendek	199,642,167,170	136,356,373,960	Total short-term bank loans

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sindikasi HIMBARA

Pada tanggal 3 September 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit modal kerja sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan nilai pinjaman sebesar Rp150.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 2 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian fasilitas kredit dan dapat direviu setiap tahunnya.

Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai keperluan umum Perusahaan untuk pengembangan proyek di Mandalika dan membiayai modal kerja operasional terkait dengan acara balap motor di Mandalika, Lombok (event MotoGP). Fasilitas pinjaman dapat dilunasi selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal berakhirnya event balap internasional (MotoGP/WSBK) dengan asumsi kebutuhan kredit modal kerja WSBK dibayar setelah event WSBK berlangsung dan kebutuhan kredit modal kerja MotoGP dibayar setelah event MotoGP berlangsung. Pada 1 September 2023, Perusahaan telah melunasi fasilitas kredit ini.

Selama 2023, Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp29.966.727.278 dan Rp47.154.384.922.

PT Perusahaan Pengelola Aset

Pada tanggal 2 Maret 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Perusahaan Pengelola Aset dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp61.850.250.000 (ekuivalen EUR3,638,250) dengan jangka waktu pinjaman 6 bulan sejak tanggal penarikan pertama.

Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai kebutuhan kas dalam rangka pembayaran *promoter fee* kepada Dorna WSBK Organization SL. Tidak ada pembatasan penting dan persyaratan keuangan yang harus dipenuhi dalam perjanjian ini. Pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan perubahan jangka waktu pinjaman menjadi 15 bulan sejak penarikan pertama.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

HIMBARA syndicate

On September 3, 2021, the Company signed a syndicated working capital credit facility agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with a loan value of Rp150,000,000,000 with a loan term of 2 years from the date of signing the credit facility agreement and can be reviewed annually.

The objective of this loan is to finance the Company's general needs for project development in Mandalika and to finance operational working capital related to motor racing events in Mandalika, Lombok (MotoGP event). The loan facility can be repaid no later than 60 calendar days from the end date of the international racing event (MotoGP/WSBK) assuming the WSBK working capital credit needs are paid after the WSBK event takes place and the MotoGP working capital credit needs are paid after the MotoGP event takes place. On September 1, 2023, the Company has paid off this credit facility.

During 2023, the Company repaid principal and interest payments of Rp29,966,727,278 and Rp47,154,384,922, respectively.

PT Perusahaan Pengelola Aset

As of March 2, 2023, the Company signed loan agreement with PT Perusahaan Pengelola Aset with total loan facility amounting to Rp61,850,250,000 (equivalent EUR3,638,250) with a loan term of 6 months from the date of the first drawdown.

The purpose of this loan is to finance cash needs in order to pay a promoter fee to Dorna WSBK Organization SL. There are no significant restrictions and financial requirements that must be met in this agreement. On December 1, 2023, the Company has changed the loan term to 15 months from the date of the first drawdown.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, jumlah fasilitas yang dicairkan adalah sebesar Rp30.925.125.000. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 12%. Total beban bunga selama tahun 2023 sebesar Rp3.698.887.500 dan selama tahun 2023 Perusahaan telah membayar bunga pinjaman sebesar Rp3.510.921.250.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada tanggal 26 Juni 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan nilai pinjaman sebesar Rp175.000.000.000. Jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal perjanjian pinjaman.

Tujuan pinjaman ini adalah untuk pembiayaan modal kerja operasional (OPEX) di kawasan KEK Mandalika. Tidak ada pembatasan penting dan persyaratan keuangan yang harus dipenuhi dalam perjanjian ini.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, saldo fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp168.717.042.170. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar *yield* atas Surat Berharga Negara (SBN) denominasi Rupiah dengan tenor 1 (satu) tahun. Sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada Perusahaan sebesar 5,61%. Total beban bunga selama tahun 2023 sebesar Rp4.708.992.777 dan selama tahun 2023 Perusahaan telah membayar bunga pinjaman sebesar Rp4.472.165.466.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

For the year ended December 31, 2023, the total disbursed facilities amounted to Rp30,925,125,000. This loan bears an interest rate of 12%. Total interest expense in 2023 is Rp3,698,887,500 and in 2023 the company paid loan interest amounting to Rp3,510,921,250.

Indonesia Eximbank

On June 26, 2023, the Company signed loan agreement with Exim Bank Indonesia with total loan amounting to Rp175,000,000,000. The loan period is for 12 months from the date of the loan agreement.

The purpose of this loan is to finance operational working capital (OPEX) in the Mandalika SEZ area. There are no significant restrictions and financial requirements that must be met in this agreement.

For the year ended December 31, 2023, the outstanding loan facility amounted to Rp168,717,042,170. This loan bears an interest rate equal to *yield* on Rupiah denominated Government Securities (SBN) with a tenor of 1 (one) year. For the year ended December 31, 2023, the loan interest rates charged to the Company is 5.61%. Total interest expense in 2023 is Rp4,708,992,777 and in 2023 the company paid loan interest amounting to Rp4,472,165,466.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

b. Pinjaman bank jangka panjang

Pinjaman bank jangka panjang terdiri dari:

b. Long-term bank loans

Long-term bank loans consist of:

	2023	2022	
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1,180,364,175,041	1,107,980,639,250	Indonesia Exim Bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	91,897,963,634	99,389,645,454	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	91,897,963,634	99,389,645,454	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	91,897,963,634	99,389,645,454	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	91,897,963,634	99,389,645,454	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sub-jumlah	1,547,956,029,577	1,505,539,221,066	Sub-total
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Asian Infrastructure Investment Bank	1,793,671,929,388	1,682,196,111,760	Asian Infrastructure Investment Bank
PT Bank NTB Syariah	4,494,124,279	4,806,453,448	PT Bank NTB Syariah
Sub-jumlah	1,798,166,053,667	1,687,002,565,208	Sub-total
Jumlah	3,346,122,083,244	3,192,541,786,274	Total
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(10,300,551,915)	(10,638,131,943)	Unamortized cost of loans
Jumlah	3,335,821,531,329	3,181,903,654,331	Total
Dikurangi:			Less :
Bagian jangka pendek pinjaman bank jangka panjang	(95,893,527,272)	(1,135,037,396,244)	Current portion of long-term bank loan
Bagian jangka panjang	3,239,928,004,057	2,046,866,258,087	Long-term portion

Asian Infrastructure Investment Bank

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB") dengan total fasilitas pinjaman sebesar USD248,400,000 yang digunakan untuk membangun infrastruktur utama untuk pengembangan wisata baru di Mandalika, Lombok.

Jangka waktu pinjaman selama 35 tahun dengan *grace period* pokok 10 tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah fasilitas yang dicairkan adalah sebesar USD116,351,319 atau setara dengan Rp1.793.671.929.388. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar LIBOR enam bulan ditambah margin 1,4%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada perusahaan sebesar 5,24-7,23% dengan

Asian Infrastructure Investment Bank

As of December 31, 2018, the Company signed loan agreement with Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB") with total loan facility amounting to USD248.400.000 to provide sustainable core infrastructure for the development of a new tourism destination in Mandalika, Lombok.

The loan period is for 35 years with a principal grace period of 10 years from the date of the loan agreement.

As of December 31, 2023, the total disbursed facilities amounted to USD116.351.319 or equivalent to Rp1,793,671,929,388. This loan bears an interest rate of six months LIBOR plus a 1.4% margin. For the years ended December 31, 2023, the loan interest rates charged to the Company is 5.24-7.23% and total interest is USD8.087.869,96 or equivalent to Rp136.691.072.592 and is

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

total bunga sebesar USD8,087,869.96 atau setara Rp136.691.072.592 dan dicatat sebagai penambahan aset dalam penyelesaian dalam akun aset tetap sebagai biaya pinjaman (Catatan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah fasilitas yang dicairkan adalah sebesar USD106,935,103 atau setara dengan Rp1.682.196.111.760. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar LIBOR enam bulan ditambah margin 1,4%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada perusahaan sebesar 1,55-2,53% dengan total bunga sebesar USD1,930,284 atau setara Rp18.329.004.824 dan dicatat sebagai penambahan aset dalam penyelesaian dalam akun aset tetap sebagai biaya pinjaman (Catatan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah fasilitas yang belum dicairkan adalah sebesar USD132,048,681 atau setara Rp2.035.662.470.612. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, tingkat bunga untuk pinjaman yang belum dicairkan sebesar 0,25% per tahun dengan total bunga fasilitas sebesar USD344,694.89 atau setara Rp6.293.943.308 dan dicatat sebagai penambahan aset dalam penyelesaian dalam akun aset tetap (Catatan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah fasilitas yang belum dicairkan adalah sebesar USD141,464,897 atau setara Rp2.225.384.288.240. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, tingkat bunga untuk pinjaman yang belum dicairkan sebesar 0,25% per tahun dengan total bunga fasilitas sebesar USD420,029 atau setara Rp7.457.002.441 dan dicatat sebagai penambahan aset dalam penyelesaian dalam akun aset tetap (Catatan 15).

Pinjaman ini dijamin oleh Negara Republik Indonesia (Kementerian Keuangan dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)). Atas jaminan Pemerintah tersebut, Perusahaan membayarkan biaya jasa jaminan sesuai dengan perjanjian penjaminan pinjaman dengan PT Penjamin

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

recorded as addition to construction in progress on Property and Equipment account as borrowing cost (Note 15).

As of December 31, 2022, the total disbursed facilities amounted to USD106.935.103 or equivalent to Rp1,682,196,111,760. This loan bears an interest rate of six months LIBOR plus a 1.4% margin. For the years ended December 31, 2022, the loan interest rates charged to the Company is 1.55-2.53% and total interest is USD1,930.284 or equivalent to Rp18,329,004,824 and is recorded as addition to construction in progress on Property and Equipment account as borrowing cost (Note 15).

As of December 31, 2023, the total facilities that had not been disbursed amounted to USD132.048.681 or equivalent to Rp2,035,662,470,612. For the year ended December 31, 2023, the interest rate for undisbursed loans is 0.25% per annum and total interest on undisbursed loan amounted to USD344.694.89 or equivalent to Rp6,293,943,308 and recorded as addition of construction in Progress on Property and Equipment account (Note 15).

As of December 31, 2022, the total facilities that had not been disbursed amounted to USD141.464.897 or equivalent to Rp2,225,384,288,240. For the year ended December 31, 2022, the interest rate for undisbursed loans is 0.25% per annum and total interest on undisbursed loan amounted to USD420.029 or equivalent to Rp7,457,002,441 and recorded as addition of construction in Progress on Property and Equipment account (Note 15).

This loan is guaranteed by the Republic of Indonesia (Ministry of Finance and PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)). For this Government guarantee, the Company pays the guarantee service fee in accordance with the loan guarantee agreement with PT Penjamin Infrastruktur

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Infrastruktur Indonesia (Persero). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, biaya penjaminan yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) masing-masing sebesar Rp1.303.728.146 dan Rp1.246.173.048 yang dicatat pada aset dalam penyelesaian pada aset tetap.

Pembatasan penting dalam pinjaman ini adalah *debt service coverage ratio* minimum 1,1x.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan *debt service coverage ratio* (DSCR) minimum 1,1x. Namun demikian kondisi ini tidak merupakan peristiwa wanprestasi berkelanjutan yang menyebabkan pinjaman menjadi segera jatuh tempo.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada tanggal 17 Februari 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.188.000.000.000 yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Jangka waktu pinjaman selama 35 tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah fasilitas yang dicairkan sebesar Rp1.180.364.175.041. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada perusahaan sebesar 5% dengan total bunga sebesar Rp60.734.067.535 yang seluruhnya dicatat sebagai beban bunga pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah fasilitas yang dicairkan sebesar Rp1.107.827.009.000. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada perusahaan sebesar 5% dengan total bunga sebesar Rp54.820.278.758. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp34.258.776.529 dicatat sebagai penambahan aset dalam penyelesaian dalam akun aset tetap sebagai biaya

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Indonesia (Persero). For the years ended December 31, 2023 and 2022, the guarantee costs incurred by the Company to PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) amounted to Rp1,303,728,146 and Rp1,246,173,048, respectively, that noted on work-in-progress in property and equipment.

An important limitation in this loan is a minimum debt service coverage ratio of 1.1x.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company did not meet the debt service coverage ratio (DSCR) requirement minimum of 1.1x. However, this condition does not constitute an event of continuing breach of covenant which causes the loan to become due immediately.

Indonesia Exim Bank

On February 17, 2020, the Company entered loan agreement with Indonesia Exim Bank with total loan amounting to Rp1,188,000,000,000 for support the management and development of the Mandalika Special Economic Zone. The loan period is for 35 years from the date of the loan agreement.

As of December 31, 2023, the total disbursed facilities amounted to Rp1,180,364,175,041. For the year period ended December 31, 2023, this loan bears an interest rate of 5% with total interest is Rp60,734,067,535 which was recorded as loan interest expense.

As of December 31, 2022, the total disbursed facilities amounted to Rp1,107,827,009,000. For the year period ended December 31, 2022, this loan bears an interest rate of 5% with total interest is Rp54,820,278,758. Of this amount, Rp34,258,776,529 is recorded as additions to construction in progress in the on Property and Equipment account as borrowing cost (Note 15) and Rp20,561,502,229 was recorded as loan

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pinjaman (Catatan 15) dan sebesar Rp20.561.502.229 dicatat sebagai beban bunga pinjaman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah bunga yang dibayarkan masing-masing sebesar Rp59.440.528.085 dan Rp29.148.593.778.

Pembatasan penting dalam pinjaman ini adalah *debt service coverage ratio* minimum 1,1x dan *debt equity ratio* maksimum 7x.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan *debt service coverage ratio* (DSCR) minimum 1,1x, sehingga Perusahaan telah mengklasifikasikan saldo pinjaman menjadi bagian utang jangka pendek. Pada tanggal 21 Desember 2023, Perusahaan telah menerima surat persetujuan *waiver letter* dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atas tidak terpenuhinya DSCR 1,1x pada tanggal 31 Desember 2023. Disamping itu, pada tanggal 23 Juni 2023, Perusahaan telah menerima surat persetujuan *waiver letter* dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atas tidak terpenuhinya DSCR 1,1x pada tanggal 31 Desember 2022 dan telah menjadi bagian utang jangka pendek.

Sindikasi HIMBARA

Pada tanggal 3 September 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan nilai pinjaman sebagai berikut:

1. Kredit Investasi sebesar Rp400.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun sejak tanggal penandatanganan fasilitas kredit atau 30 September 2026.
Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah fasilitas yang dicairkan adalah sebesar Rp367.591.854.536. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 5%. Sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

interest expense.

For the years ended December 31, 2023 and 2022 total interest paid amounted to Rp59,440,528,085 and Rp29,148,593,778, respectively.

An important limitation in this loan is a minimum debt service coverage ratio of 1.1x. Debt equity ratio maximum of 7x.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company did not meet the debt service coverage ratio (DSCR) requirement minimum of 1.1x, so the Company has reclassified the outstanding balance of the loan into current portion of long-term bank loan. On December 21, 2023, the Company has received waiver approval letter from Indonesia Eximbank for not fulfilling the DSCR of minimum 1.1x as of December 31, 2023. In addition, on June 23, 2023, the Company has received waiver approval letter from Indonesia Eximbank for not fulfilling the DSCR of minimum 1.1x as of December 31, 2022 and has reclassified the outstanding balance of the loan into current portion of long-term bank loan.

HIMBARA syndicate

On September 3, 2021, the Company entered a syndicated loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with the loan value as follows:

1. Investment Credit of Rp400,000,000,000 with a loan term of 5 years from the date of signing the credit facility or September 30, 2026.

As of December 31, 2023, the total facility disbursed amounted to Rp367,591,854,536. This loan bears an interest rate of 3 months JIBOR + 5%. For the years ended December 31, 2023, the loan interest rates charged to the Company is 11.38-11.78%. Total interest expense in

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan sebesar 11,38-11,78%. Total beban bunga selama tahun berjalan sebesar Rp46.829.129.932 dan Perusahaan telah membayar bunga pinjaman sebesar Rp47.154.384.920.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah fasilitas yang dicairkan adalah sebesar Rp397.558.581.816. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar JIBOR 3 bulan + 5%. Sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada Perusahaan sebesar 8,75-9,41%. Total beban bunga selama tahun berjalan sebesar Rp36.176.761.244 dan Perusahaan telah membayar bunga pinjaman sebesar Rp36.117.770.743.

Pembatasan penting dalam pinjaman ini adalah *debt service coverage ratio* (DSCR) minimum 1,1x dan *debt equity ratio* maksimum 4x.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan *debt service coverage ratio* (DSCR) minimum 1,1x. Namun demikian kondisi ini tidak merupakan peristiwa wanprestasi yang berkelanjutan yang menyebabkan pinjaman menjadi segera jatuh tempo. Disamping itu, pada tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022, Perusahaan telah menerima surat pembebasan dari agen sindikasi atas tidak terpenuhinya rasio keuangan tertentu masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

2. Fasilitas *Non Cash Loan* / SBLC sebesar EUR14,586,075 dengan jangka waktu maksimal 5 tahun.

Pada tanggal 13 Oktober 2023 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Fasilitas telah menerbitkan fasilitas SBLC sebagai jaminan pembayaran *Promoters Fee* atas event MotoGP tahun 2023 sebesar EUR9,450,000 dengan jatuh tempo sampai dengan 19 Januari 2024.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

current year is Rp46,829,129,932 and the company has paid loan interest amounted Rp47,154,384,920.

As of December 31, 2022, the total facility disbursed amounted to Rp397,558,581,816. This loan bears an interest rate of 3 months JIBOR + 5%. For the years ended December 31, 2022, the loan interest rates charged to the Company is 8.75-9.41%. Total interest expense in current year is Rp36,176,761,244 and the company has paid loan interest amounted Rp36,117,770,743.

An important limitation in this loan is a minimum debt service coverage ratio (DSCR) of 1.1x and debt equity ratio maximum of 4x.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company did not meet the debt service coverage ratio (DSCR) requirement minimum of 1.1x. However, this condition does not constitute an event of continuing breach of covenant which causes the loan to become due immediately. In addition, on December 29, 2023 and December 30, 2022, the Company has received a waiver letter from syndicate agent for incompliance of certain financial ratios as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

2. *Non Cash Loan* / SBLC facility of EUR14.586.075 with a maximum term of 5 years.

On October 13, 2023 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Facility Agent has issued an SBLC facility as a guarantee for the payment of the *Promoters Fee* for the 2023 MotoGP event amounting to EUR9,450,000 with a maturity date of January 19, 2024.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PT Bank NTB Syariah

Pada tanggal 12 Januari 2022, PT ITDC Nusantara Utilitas ("INU"), anak Perusahaan, memperoleh fasilitas pembiayaan dengan PT Bank NTB Syariah (NTB Syariah) dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp5.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman 120 bulan dengan nisbah bagi hasil 44,19% ke NTB Syariah.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, INU telah melakukan pembayaran atas pokok fasilitas syirkah sebesar Rp290.756.353 dan bagi hasil sebesar Rp605.108.087.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, INU telah melakukan pembayaran atas pokok fasilitas syirkah sebesar Rp193.546.552 dan bagi hasil sebesar Rp531.384.332.

PT Bank NTB Syariah

As of January 12, 2022, PT ITDC Nusantara Utilitas ("INU"), a subsidiary, obtained facility financing from PT Bank NTB Syariah (NTB Syariah) with total loan facility amounting to Rp5,000,000,000 with a loan term of 120 months with interest sharing of 44.19% to NTB Syariah.

For the year ended December 31, 2023, INU has paid the principal of the loan facility amounting to Rp290,756,353 and profit sharing on the loan amounting to Rp605,108,087.

For the year ended December 31, 2022, INU has paid the principal of the loan facility amounting to Rp193,546,552 and profit sharing on the loan amounting to Rp531,384,332.

26. Pinjaman Pihak Berelasi

26. Loan from Related Party

Pinjaman pihak berelasi terdiri dari:

Loan from related party consist of:

	2023	2022	
Perusahaan			The Company
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
Perusahaan Perseroan			Perusahaan Perseroan
PT Aviasi Pariwisata			PT Aviasi Pariwisata
Indonesia	125,000,000,000	--	Indonesia
Jumlah	125,000,000,000	--	Total

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dana talangan dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dengan nilai pinjaman sebesar Rp125.000.000.000. Jangka waktu pinjaman selama 4 bulan sejak tanggal perjanjian pinjaman.

Tujuan pinjaman ini adalah untuk pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh Perusahaan. Tidak ada pembatasan penting dan persyaratan keuangan yang harus dipenuhi dalam perjanjian ini.

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

On August 31, 2023, the Company signed bridging loan agreement with PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) with total loan amounting to Rp125,000,000,000. The loan period is for 4 months from the date of the loan agreement.

The purpose of this loan is to fulfil the Company's debt. There are no significant restrictions and financial requirements that must be met in this agreement.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, jumlah fasilitas yang dicairkan adalah sebesar Rp125.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 10,5%. Total beban bunga selama tahun 2023 sebesar Rp4.480.000.000 dan selama tahun 2023 Perusahaan telah membayar bunga pinjaman sebesar Rp4.370.625.000. Pada tanggal 27 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan perubahan jangka waktu pinjaman menjadi 11 bulan sejak tanggal 31 Agustus 2023 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2024.

As of December 31, 2023, the total disbursed facilities amounted to Rp125,000,000,000. This loan bears an interest rate of 10.5% Total interest expense in 2023 is Rp4,480,000,000 and in 2023 the company paid loan interest amounting to Rp4,370,625,000. On December 27, 2023, the Company has changed the loan term to 11 months starting the August 31, 2023 and mature on July 31, 2024.

27. Modal Saham

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, komposisi pemegang saham dan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

27. Capital Stock

As of December 31, 2023 and 2022, composition of shareholder and its respective share of ownership are as follows:

2023			
Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Ditempatkan dan dibayar penuh/ Subscribed and fully paid	
Pemegang Saham			Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna			Class A Dwiwarna share
Pemerintah			Government of Republic
Republik Indonesia	1	0.00005%	1,000,000
Saham Seri B			Class B share
Perusahaan Perseroan			Perusahaan Perseroan
PT Aviati Pariwisata Indonesia	2,147,659	99.99995%	2,147,659,000,000
Jumlah	2,147,660	100%	2,147,660,000,000
Total			
2022			
Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Ditempatkan dan dibayar penuh/ Subscribed and fully paid	
Pemegang Saham			Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna			Class A Dwiwarna share
Pemerintah			Government of Republic
Republik Indonesia	1	0.00005%	1,000,000
Saham Seri B			Class B share
Pemerintah			Government of Republic
Republik Indonesia	2,147,659	99.99995%	2,147,659,000,000
Jumlah	2,147,660	100%	2,147,660,000,000
Total			

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perubahan Anggaran Dasar, menyetujui pembubaran dan likuidasi, penggabungan, dan pengambil alihan Perusahaan dan semua hak-hak lainnya yang dimiliki saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

The Class A Dwiwarna share is a share that gives the holder preferred rights to approve the appointment and dismissal of Commissioners and Directors, amend the Articles of Association, approve the dissolution and liquidation, merger, and takeover of the Company and all other rights of Class B shares. The Class A Dwiwarna share may not be transferred to other parties.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Evi Susanti Panjaitan, S.H., M.A., No. 02 tanggal 4 Januari 2022 modal ditempatkan dan disetor penuh berubah dari Rp1.380.000.000.000 menjadi Rp1.850.000.000.000 terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nominal Rp1.000.000 dan 1.849.999 saham Seri B masing-masing dengan nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp1.849.999.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Evi Susanti Panjaitan, S.H., M.A., No. 06 tanggal 7 Februari 2022 modal ditempatkan dan disetor penuh berubah dari Rp1.850.000.000.000 menjadi Rp2.147.660.000.000 terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nominal Rp1.000.000 dan 2.147.659 saham Seri B masing-masing dengan nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp2.147.659.000.000.

Pada 18 Januari 2023, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia. Untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia dilakukan penambahan penyertaan modal ke modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sebesar 2.147.659 lembar saham seri B.

Status Perusahaan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia menjadi pemegang saham Perusahaan Perseroan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Based on the Notarial Deed of Dr. Evi Susanti Panjaitan, S.H., M.A., No. 02 dated January 4, 2022, the issued and fully paid-up capital changed from Rp1,380,000,000,000 to Rp1,850,000,000,000 consisting of 1 Dwiwarna Series A share with a nominal value of Rp1,000,000 and 1,849,999 Series B shares with a nominal value of Rp1,000,000, respectively. or in full with a nominal value of Rp1,849,999,000,000.

Based on the Notarial Deed of Dr. Evi Susanti Panjaitan, S.H., M.A., No. 06 dated February 7, 2022, the issued and fully paid-up capital changed from Rp1,850,000,000,000 to Rp2,147,660,000,000 consisting of 1 Dwiwarna Series A share with a nominal value of Rp1,000,000 and 2,147,659 Series B shares with a nominal value of Rp1,000,000, respectively. or in full with a nominal value of Rp2,147,659,000,000.

On January 18, 2023, the Government issued a Government Regulation of the Republic of Indonesia No.3 year 2023 regarding the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia. To strengthen the capital structure and increase the business capacity of the Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia, an additional capital investment was made into the share capital of the Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia originating from the transfer of all series B shares in Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia amounting to 2,147,659 series B shares.

The status of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia changed to a limited liability company and the Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia became a shareholder of Perusahaan Perseroan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

28. Tambahan Modal Disetor

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Penyertaan modal negara	--	--
Modal donasi	148,007,499	148,007,499
Jumlah	148,007,499	148,007,499

Penyertaan Modal Negara

Berdasarkan PP No. 33 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No. 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan, Perusahaan mendapatkan tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp557.660.000.000 yang underlying-nya adalah tanah seluas 1.175 ha, dari tambahan modal tersebut sebesar Rp260.000.000.000 merupakan nilai buku tanah sebelum dilakukan penilaian untuk nilai pasar yang wajar.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 273/KMK.06/2008 tanggal 23 September 2008 nilai pasar yang wajar atas tanah tersebut adalah Rp557.660.000.000, sehingga terdapat selisih antara nilai pasar dengan nilai buku sebesar Rp297.660.000.000.

Selisih nilai pasar dengan nilai buku tersebut dihibahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan sebagai insentif bagi pengembangan pariwisata di Kawasan Lombok Tengah dicatat sebagai tambahan modal disetor oleh Perusahaan.

Pada tahun 2022, berdasarkan Akta Notaris Dr. Evi Susanti Panjaitan, S.H., M.A., No. 06 tanggal 7 Februari 2022 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0029185.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022, atas selisih nilai pasar dengan nilai buku ini telah dikonversi menjadi bagian dari modal saham.

Modal Donasi

Modal donasi merupakan modal yang berasal dari sumbangan pihak ketiga (PT Narendra Interpacific Indonesia dan lainnya) kepada perusahaan untuk penggantian fasilitas lapangan tenis dan pembangunan musala yang berada di area kantor Perusahaan (lot C-5).

28. Additional Paid-In Capital

The details of additional paid in capital are as follows:

	2023	2022
State capital	--	--
Donation capital	148,007,499	148,007,499
Total	148,007,499	148,007,499

State capital

Based on PP No.33 year 2009 concerning Amendment of Government Regulation No. 50 year 2008 regarding Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Company's Share Capital, the Company obtained an additional government investment of Rp557,660,000,000 with underlying of land of 1,175 hectares, in the amount of Rp260,000,000,000 which represents the book value of the land prior to the valuation to fair market value.

In accordance with the Decree of the Minister of Finance No. 273/KMK.06/2008 dated September 23, 2008, the fair market value of the land was Rp557,660,000,000, resulting in a difference between market value and book value of Rp297,660,000,000.

The difference between the market value and the book value granted by the Government of the Republic of Indonesia to the Company considered as an incentive for tourism development in Central Lombok is recorded as additional paid-in capital by the Company.

In 2022, based on the Notary Deed of Dr. Evi Susanti Panjaitan, S.H., M.A., No. 06 dated February 7, 2022 and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in Decree No. AHU-0029185.AH.01.11 of 2022 dated February 11, 2022, for the difference between the market value and the book value, it has been converted to become part of the capital stock.

Donation capital

The donation capital is the capital derived from third party donations (PT Narendra Interpacific Indonesia and others) to the Company for the replacement of tennis courts facilities and construction of mosques located in the Company's office area (lot C-5).

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pencadangan Saldo Laba dan Pembagian Saldo Laba

Pembagian laba untuk tahun buku 2022 dan 2021 merupakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan Penggunaan Laba untuk masing-masing Tahun Buku.

Komposisi penggunaan laba tahun buku 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022		2021	
	Jumlah/ Total	%	Jumlah/ Total	%
Dividen	--	0%	--	0%
Cadangan Umum	--	0%	--	0%
Jumlah	--	--	--	--

Mutasi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal	412,046,441,472	412,046,441,472
Penambahan:		
Distribusi dari laba tahun 2022	--	--
Distribusi dari laba tahun 2021	--	--
Saldo akhir	412,046,441,472	412,046,441,472

29. Retained Earnings Establishment and Retained Earnings Allocation

Profit allocation for fiscal year 2022 and 2021 is based on the Resolutions of the General Meeting of Shareholders regarding of the Establishment of Profit Utilization for each Year.

The composition of the profit allocation of the year 2022 and 2021, are as follows:

	2022	2021
Dividends	--	--
General reserves	--	--
Total	--	--

Movements of appropriate retained earnings as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022
Beginning balance	412,046,441,472	412,046,441,472
Addition :		
Distribution of 2022 profit	--	--
Distribution of 2021 profit	--	--
Ending balance	412,046,441,472	412,046,441,472

30. Penghasilan Komprehensif Lain

Akun ini merupakan saldo selisih penilaian investasi saham dan perhitungan kerugian aktuarial atas program imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar:

	2023	2022
Keuntungan yang belum direalisasi atas pengukuran kembali program imbalan kerja - neto setelah pajak	5,336,562,398	7,398,088,278
Keuntungan yang belum direalisasi atas pengukuran aset keuangan pada nilai wajar - neto setelah pajak	9,328,542,736	5,642,082,000
Jumlah	14,665,105,134	13,040,170,278

30. Other Comprehensive Income

This account represents the balance of the fair value difference in shares of stock and the actuarial loss on the employee benefits plan as of December 31, 2023 and 2022, respectively amounting to:

	2023	2022
Unrealized gain from remeasurement of defined benefit program - net after tax	5,336,562,398	7,398,088,278
Unrealized gain on financial assets measured at fair value - net after tax	9,328,542,736	5,642,082,000
Total	14,665,105,134	13,040,170,278

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. Kepentingan Non-pengendali

- a. Rincian kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak adalah sebagai berikut:

	2023	2022
PT Merese Mandalika Nusantara	(505,079,437)	(314,777,832)
PT ITDC Nusantara Properti	(1,096,788)	206,643
PT ITDC Nusantara Utilitas	5,032,879	3,962,749
PT ITDC Nusantara Xplorin	(1,852,415,757)	(1,593,014,768)
Jumlah	(2,353,559,103)	(1,903,623,208)

- b. Rincian kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) neto entitas anak untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
PT Merese Mandalika Nusantara	(190,301,606)	(332,954,424)
PT ITDC Nusantara Properti	(1,303,431)	(681,768)
PT ITDC Nusantara Utilitas	1,183,894	989,770
PT ITDC Nusantara Xplorin	(259,400,988)	254,253,595
Jumlah	(449,822,131)	(78,392,827)

- c. Rincian kepentingan nonpengendali atas total penghasilan komprehensif entitas anak untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
PT Merese Mandalika Nusantara	(190,301,606)	(332,954,424)
PT ITDC Nusantara Properti	(1,303,431)	(681,768)
PT ITDC Nusantara Utilitas	1,070,130	989,770
PT ITDC Nusantara Xplorin	(259,400,988)	254,253,595
Jumlah	(449,935,895)	(78,392,827)

- d. Proporsi kepemilikan saham yang dipegang oleh kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	2023	2022
PT ITDC Nusantara Xplorin	25.00%	25.00%
PT Merese Mandalika Nusantara	1.00%	1.00%
PT ITDC Nusantara Utilitas	0.12%	0.12%
PT ITDC Nusantara Properti	0.04%	0.04%

31. Non-Controlling Interest

- a. The details of the non-controlling interests in net assets of Subsidiaries are as follows:

PT Merese Mandalika Nusantara
PT ITDC Nusantara Properti
PT ITDC Nusantara Utilitas
PT ITDC Nusantara Xplorin
Total

- b. The details of the share of the non-controlling interests in the net profit (loss) of Subsidiaries for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

PT Merese Mandalika Nusantara
PT ITDC Nusantara Properti
PT ITDC Nusantara Utilitas
PT ITDC Nusantara Xplorin
Total

- c. The details of the non-controlling interests in total comprehensive income of Subsidiaries for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

PT Merese Mandalika Nusantara
PT ITDC Nusantara Properti
PT ITDC Nusantara Utilitas
PT ITDC Nusantara Xplorin

- d. Proportion of equity interest held by non-controlling interest are as follows:

PT ITDC Nusantara Xplorin
PT Merese Mandalika Nusantara
PT ITDC Nusantara Utilitas
PT ITDC Nusantara Properti

32. Pendapatan Usaha

Saldo pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

32. Revenues

Balance of revenues for the years ended December 31, 2023 and 2022, are as follows:

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Kompensasi			Compensation
Kompensasi minimum	282,402,822,733	238,311,919,338	Minimum compensation
Kompensasi persentase	44,680,082,518	5,107,184,611	Percentage compensation
Kompensasi sekaligus	21,279,633,396	2,518,238,243	One time compensation
Kompensasi tanah lainnya	4,834,387,186	4,074,711,680	Other land compensation
	<u>353,196,925,833</u>	<u>250,012,053,872</u>	
Non kompensasi			Non-compensation
Event	321,729,206,809	252,243,845,021	Event
Hotel	75,301,278,218	16,190,010,784	Hotel
Bahan Bakar Minyak (SPBU)	68,356,058,786	52,428,311,203	Fuel oil (gas station)
Assessment	33,753,722,089	36,537,703,976	Assessment
Pengelolaan air limbah & irigasi	12,819,044,201	7,961,117,027	Waster water and irrigation
Air bersih	3,733,679,662	2,510,014,596	Water
Jasa akomodasi	2,489,584,648	8,143,056,619	Accommodation agent
Lain-lain	13,834,311,537	31,461,538,840	Others
	<u>532,016,885,950</u>	<u>407,475,598,066</u>	
Jumlah	<u>885,213,811,783</u>	<u>657,487,651,938</u>	Total

Termasuk di pendapatan event merupakan pendapatan penjualan tiket dan sponsorship yang diterima Perusahaan dari event MotoGP dan WSBK.

Included in event revenues represent revenue received by the Company from ticketing and sponsorship of MotoGP and WSBK events.

Rincian per pihak adalah sebagai berikut:

Details of counterparties are as follows:

	2023		2022		
	Pendapatan/ Revenues	%	Pendapatan/ Revenues	%	
PT Pertamina (Persero)	93,240,000,000	10.53%	51,443,100,000	7.82%	PT Pertamina (Persero)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,998,990,991	8.02%	--	--	Ministry of Tourism and Creative Economy
PT Karya Agung Kisma Lestari	46,466,961,848	5.25%	23,058,331,437	3.51%	PT Karya Agung Kisma Lestari
PT Bali Holiday Village	45,590,413,593	5.15%	37,651,260,297	5.73%	PT Bali Holiday Village
PT Nusa Dua Graha Internasional	40,859,362,713	4.62%	28,121,865,575	4.28%	PT Nusa Dua Graha Internasional
PT Griya Pancaloka	32,441,095,453	3.66%	27,452,036,467	4.18%	PT Griya Pancaloka
PT Suryalaya Anindita Internasional	29,293,727,628	3.31%	17,255,608,465	2.62%	PT Suryalaya Anindita Internasional
PT Hotel Indonesia Properti	27,705,537,947	3.13%	19,922,716,439	3.03%	PT Hotel Indonesia Properti
PT Wynncoor Bali	23,497,526,872	2.65%	25,132,506,250	3.82%	PT Wynncoor Bali
PT Pacific Resorts Buana Indonesia	23,230,329,880	2.62%	13,541,377,843	2.06%	PT Pacific Resorts Buana Indonesia
PT Nusa Dua Mahajaya	18,668,290,000	2.11%	--	0.00%	PT Nusa Dua Mahajaya
PT Bali Nusadewata Village	17,804,751,996	2.01%	15,673,743,314	2.38%	PT Bali Nusadewata Village
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15,840,765,766	1.79%	16,006,590,910	2.43%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Narendra Interpacific Indonesia	2,460,065,455	0.28%	16,808,273,762	2.56%	PT Narendra Interpacific Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	110,810,811	0.01%	15,756,000,000	2.40%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Banigati Betegak	-	0.00%	10,793,870,469	1.64%	PT Banigati Betegak
Lain-lain (masing-masing dibawah 4%)	397,005,180,830	44.85%	338,870,370,710	51.54%	Others (each below 4%)
Jumlah	<u>885,213,811,783</u>	<u>100%</u>	<u>657,487,651,938</u>	<u>100%</u>	Total

33. Beban Pokok Pendapatan

33. Cost of Revenues

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban pokok pendapatan Perusahaan dan entitas anaknya senilai Rp532.769.357.026 dan Rp357.831.166.976 dan dengan rincian sebagai berikut:

For the years ended December 31, 2023 and 2022, cost of revenues of the Company and its subsidiaries amounting to Rp532,769,357,026 and Rp357,831,166,976, respectively, with details as follows:

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

a. Beban pokok penjualan SPBU

	2023	2022
Persediaan awal barang dagang	664,952,940	870,136,922
Pembelian - bersih	66,897,199,913	50,266,329,323
Barang dagang tersedia untuk dijual	67,562,152,853	51,136,466,245
Persediaan akhir barang dagang	(966,520,222)	(664,952,940)
Beban pokok penjualan SPBU	66,595,632,631	50,471,513,305

Beginning balance of merchandise inventories
Purchases - net
Merchandise inventories available for sale
Ending balance of merchandise inventories
Cost of goods sold gas station

b. Beban penyelenggaraan event

	2023	2022
Beban event organizer	178,826,335,160	270,806,557,389
Fee promotor	234,465,658,048	--
Manajemen sirkuit	--	--
Lain-lain	--	--
Beban penyelenggara event	413,291,993,208	270,806,557,389

Event organizer fee
Promotor fee
Circuit management
Others
Expense related to the event

c. Beban pokok lain-lain

	2023	2022
Hotel	43,478,861,348	19,374,800,057
Mice Golomori	5,938,006,248	--
Air bersih	3,310,179,685	4,104,499,987
Beban pokok lain-lain	154,683,906	13,073,796,238
Beban pokok lainnya	52,881,731,187	36,553,096,282

Hotel
Mice Golomori
Water
Cost of goods sold other
Total cost of goods other

34. Beban Penjualan

Beban penjualan adalah beban yang terkait dengan biaya promosi Perusahaan dan entitas anaknya sehubungan dengan penyelenggaraan MotoGP dan WBSK dan branding untuk kawasan Nusa Dua dan Mandalika. Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah beban penjualan masing-masing sebesar Rp6.231.970.034 dan Rp1.869.971.027.

34. Selling Expenses

Selling expenses are expenses related to the promotion costs of the Company and its subsidiaries in connection with the implementation of MotoGP and WBSK event and branding for the Nusa Dua and Mandalika areas. For the years ended December 31, 2023 and 2022, total selling expenses amounted to Rp6,231,970,034 and Rp1,869,971,027, respectively.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. Beban Umum dan Administrasi

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Penyusutan (Catatan 15 dan 24)	162,414,984,717	124,502,180,151
Gaji pegawai	50,852,320,691	49,647,923,404
Logistik dan jasa lainnya	41,736,219,427	19,100,858,846
Gaji direksi	24,904,916,343	24,674,499,612
Pemeliharaan kawasan	20,125,636,423	16,259,409,069
Rumah tangga	19,705,178,345	5,879,597,662
Perjalanan dinas	14,823,583,448	5,779,664,225
Tunjangan pegawai	10,622,639,749	9,094,156,301
Pemeliharaan aset tetap	10,718,614,153	9,001,977,429
Utilitas	9,441,061,281	935,239,879
PPh 21 karyawan	7,889,301,498	9,034,959,125
Gaji dewan komisaris	8,640,156,408	8,349,944,689
Asuransi pensiun	7,886,606,419	5,247,331,517
Komando lapangan	5,806,862,265	4,708,429,871
Sewa	5,059,464,157	6,450,086,221
Pemeliharaan kesehatan	4,464,283,929	4,007,920,848
Bahan bakar	3,109,379,827	1,627,607,285
Telepon dan komunikasi	2,337,034,765	1,636,471,764
Pajak Bumi dan Bangunan	2,085,892,882	2,087,191,536
Amortisasi (Catatan 16)	1,507,439,025	4,051,641,403
Lainnya (di bawah Rp1,5 miliar)	13,346,673,599	5,371,815,743
Jumlah	427,478,249,351	317,448,906,580

35. General and Administrative Expenses

Details of general and administrative expenses are as follows:

Depreciation (Note 15 and 24)
Employee salaries
Logistic and other services
Director salaries
Land maintenance
Housekeeping
Travel expense
Employee allowance
Fixed asset maintenance
Utilities
Employee income tax article 21
Commissioners salaries
Pension insurance
Securities
Rent
Healthcare
Oil and gas expense
Telephone and communication
Property taxes
Amortization (Note 16)
Others (below Rp1.5 billion)
Total

36. Pendapatan Lain-lain

Rincian pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Keuntungan selisih kurs - neto	10,082,495,934	--
Denda keterlambatan piutang	1,831,348,480	13,525,598,299
Pemulihan cadangan hak pengelolaan lahan	--	4,341,150,000
Keuntungan pelepasan properti investasi (Catatan 14)	1,678,780,411	--
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga (Catatan 7)	251,922,804	247,676,776
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 juta)	441,477,199	447,005,767
Jumlah	14,286,024,828	18,561,430,842

36. Other Income

Details of other income are as follows:

Gain on foreign exchange - net
Late payment penalties
Recovery of allowance for land management rights
Gain on disposal of investment property (Note 14)
Recovery of allowance for impairment losses of investment in marketable securities (Note 7)
Others (each below Rp100 million)
Total

Denda keterlambatan piutang merupakan denda keterlambatan pembayaran kompensasi yang dibayarkan *tenants* kepada Perusahaan.

Late payment penalties represents penalties for late payment of compensation receivables by *tenants* to the Company.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. Beban Lain-lain

Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Beban non-operasional	16,596,455,088	9,073,436,666
Beban penurunan nilai piutang usaha (Catatan 8)	8,177,192,714	15,462,873,909
Beban manajemen pendanaan	6,959,796,612	9,684,503,429
Beban keagamaan	189,608,600	188,309,800
Beban penelitian dan pengembangan	146,046,625	8,327,661,066
Beban lainnya	449,205,939	185,774,021
Kerugian selisih kurs - neto	--	64,632,633,121
Jumlah	32,518,305,578	107,555,192,012

Termasuk di dalam beban non-operasional merupakan beban insentif tim kerja, beban seremonial manajemen, beban pengamanan hari raya dan sebagainya.

Termasuk di dalam beban lainnya merupakan bantuan kegiatan adat, denda pajak penghasilan, perjalanan dinas tim kerja, sumbangan-sumbangan dan lain sebagainya.

37. Other Expenses

Details of other expenses are as follows:

<i>Non-operating expense</i>
<i>Impairment loss of trade</i>
<i>receivables (Note 8)</i>
<i>Financing management expense</i>
<i>Religion expense</i>
<i>Research and development expense</i>
<i>Others</i>
<i>Loss on foreign exchange - net</i>

Total

Included in non-operating expenses are workload incentives for work teams, ceremonial management expenses, holiday security expenses and other various expenses.

Included in other expenses are cultural activity assistance, income tax penalties, team office travel, donations and other various expenses.

38. Pendapatan Keuangan

Rincian pendapatan keuangan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Bunga deposito	2,150,066,024	9,142,586,745
Bunga jasa giro	1,318,271,463	1,527,563,480
Bunga tabungan	80,724,098	37,122,586
Jumlah	3,549,061,585	10,707,272,811

38. Finance Income

Details of finance income are as follows:

<i>Interest from time deposit</i>
<i>Interest from current account</i>
<i>service</i>
<i>Interest from bank accounts</i>

Total

39. Beban Keuangan

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut :

	2023	2022
Beban bunga pinjaman bank	132,280,159,693	70,417,307,378
Beban bunga atas liabilitas sewa	416,384,542	9,175,898,819
Jumlah	132,696,544,235	79,593,206,197

39. Finance Expenses

Details of finance expenses are as follows:

<i>Bank loans interest</i>
<i>Interest on lease liabilities</i>

Total

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

40. Pihak Berelasi

40. Related Parties

Pihak berelasi, hubungan dan transaksinya adalah sebagai berikut :

Related parties, relationship and nature of their transactions are as follows:

Pihak Berelasi / Related parties	Hubungan / Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Republic of Indonesia</i>	Pemegang saham/shareholder	Setoran dalam bentuk aset/ tanah, hak pengelolaan dan hibah lahan/ <i>Capital contribution in the form of asset/land, management land rights and land grant</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Penempatan dalam giro, deposito dan pinjaman/ <i>Placement of current account, deposit and loan</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Penempatan dalam giro, deposito dan pinjaman/ <i>Placement of current account, deposit and loan</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Penempatan dalam giro, deposito dan pinjaman/ <i>Placement of current account, deposit and loan</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Penempatan dalam giro, deposito dan pinjaman/ <i>Placement of current account, deposit and loan</i>
PT Asuransi Jiwa IFG (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Pengelolaan investasi/ <i>Investment management</i>
PT Hotel Indonesia Natour	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sewa lahan dan penyewaan gedung/ <i>Land rental and office rental</i>
PT Hotel Indonesia Properti	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sewa lahan/ <i>Land rental</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Penyertaan saham pada entitas lain/ <i>Investment in shares of other entities</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sewa lahan/ <i>Land rental</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Biaya konstruksi/ <i>Construction cost</i>
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Biaya konstruksi/ <i>Construction cost</i>
PT Bank Mandiri Taspen	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Penempatan dalam giro dan Deposito/ <i>Placement of current account and time deposit</i>
PT Bali Griya Shanti	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Penyertaan saham dan sewa lahan/ <i>Investment in shares and land rental</i>
PT Peninsula Bali Resort	Entitas investasi/ <i>Investment entities</i>	Penyertaan saham dan sewa lahan/ <i>Investment in shares and land rental</i>
PT Garuda Adhimatra Indonesia	Entitas investasi/ <i>Investment entities</i>	Penyertaan saham/ <i>Investment in shares</i>
PT Jasa Marga Bali Tol	Entitas investasi/ <i>Investment entities</i>	Penyertaan Saham/ <i>Investment in shares</i>
PT Pertamina (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sponsor Event/ <i>Event sponsor</i>

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak Berelasi / Related parties	Hubungan / Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
PT Pindad (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sponsor Event/ <i>Event sponsor</i>
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Jasa konsultasi/ <i>Consulting service</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Penempatan dalam giro dan Deposito, utang pembiayaan/ <i>Placement of current account and deposit, debt financing</i>
Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Pelepasan aset/ <i>disposal of assets</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Biaya konstruksi, sponsor event <i>Construction cost, event sponsor</i>
PT Angkasa Pura Supports	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Jasa kebersihan/ <i>Cleaning service</i>
PT Telekomunikasi Selular	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sponsor Event/ <i>Event sponsor</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sewa booth/ <i>Booth rental</i>
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sponsor Event/ <i>Event sponsor</i>
PT Kimia Farma Diagnostika	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sewa booth/ <i>Booth rental</i>
PT Bukit Asam Tbk	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sewa booth/ <i>Booth rental</i>
PT Taspen (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sewa booth/ <i>Booth rental</i>
PT Angkasa Pura I	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sewa booth/ <i>Booth rental</i>
PT Aero Group Indonesia	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sewa booth/ <i>Booth rental</i>
PT Angkasa Pura Hotel	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sewa booth/ <i>Booth rental</i>
PT Sarinah	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Sewa booth/ <i>Booth rental</i>
PT Utama Karya (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Biaya konstruksi/ <i>Construction cost</i>
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Pendapatan konsultasi/ <i>Consulting revenue</i>
KSO PT Nindya Karya - Lestari	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Biaya konstruksi/ <i>Construction cost</i>
PT Utama Karya (Persero) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk, JO	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Biaya konstruksi/ <i>Construction cost</i>

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak Berelasi / Related parties	Hubungan / Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - KSO PT Wijaya Karya (Persero) - PT Bunga Raya Lestari PT Superintending Company of Indonesia	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i> Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Biaya konstruksi/ <i>Construction cost</i> Biaya konstruksi/ <i>Construction cost</i>
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Biaya event/ <i>Event cost</i>
KSO PT Yodia Karya (Persero) - PT Parama Karya Mandiri	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Biaya konstruksi/ <i>Construction cost</i>
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Pendapatan konsultasi/ <i>Consulting revenue</i>
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Pendapatan konsultasi/ <i>Consulting revenue</i>
PT Jaminan Kredit Indonesia	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Pendapatan konsultasi/ <i>Consulting revenue</i>
PT Permodalan Nasional Madani	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Pendapatan konsultasi/ <i>Consulting revenue</i>
PT Asuransi Kredit Indonesia	Perusahaan di bawah pengendalian Pemerintah/ <i>Company under Government control</i>	Pendapatan konsultasi/ <i>Consulting revenue</i>

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Details of balance and transaction with related parties are as follows:

	2023		2022	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)
<u>Aset/Assets</u>				
Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	194,166,726,467	2.66	50,029,431,475	0.73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6,357,081,192	0.09	2,216,449,809	0.03
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,823,056,297	0.12	5,788,628,201	0.08
PT Bank Mandiri Taspen	1,040,888,650	0.01	992,783,207	0.01
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	145,079,838	0.00	-	0.00
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3,406,668,761	0.05	3,249,081	0.00
	213,939,501,205	2.93	59,030,541,773	0.85
Dana di lembaga keuangan yang dibatasi penggunaannya/ <i>Restricted fund in financial institution</i>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	252,536,328,123	3.46	469,203,690,344	6.84
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33,236,159,825	0.46	130,745,078,369	1.91
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	66,082,478,188	0.91	22,226,852,828	0.32
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,469,432,163	0.02	2,838,675,179	0.04
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,421,108,827	0.02	2,790,027,982	0.04
	354,745,507,126	4.87	627,804,324,702	9.15

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023		2022	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)
Deposito berjangka/ Time deposit				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	0.00	11,539,677,364	100.00
Investasi pada surat berharga/ Investment in marketable securities				
PT Asuransi IFG (d/h PT Asuransi Jiwasraya (Persero))	2,820,273,502	0.04	2,963,797,698	0.04
Piutang usaha/Trade receivables				
PT Pertamina (Persero)	45,169,600,000	0.62	-	0.00
PT Hotel Indonesia Properti	24,382,616,067	0.33	24,782,431,467	0.36
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	246,883,498	0.00	6,939,239,740	
PT Peninsula Bali Resort	5,925,337,943	0.08	4,484,726,028	0.07
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	193,750,000	0.00	3,193,750,000	0.05
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	626,500,000	0.01	2,592,000,000	0.04
PT Telekomunikasi Selular	8,770,130,000	0.12	1,080,130,000	0.03
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	5,464,234,665	0.07	437,415,461	0.01
PT Bali Griya Shanti	--	0.00	373,674,091	0.01
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	--	0.00	33,000,000	0.01
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,750,000,000	0.12	--	0.00
PT Nindya Karya	1,004,992,888	0.01	--	0.00
PT Angkasa Pura Suport	--	0.00	27,672,414	0.01
	100,534,045,061	1.36	43,944,039,201	0.59
Liabilitas/Liabilities				
Utang usaha/ Trade payables				
PT Wijaya Karya				
Bangunan Gedung	30,933,638,879	0.57	75,152,765,896	1.59
KSO PT Nindya Karya - Lestari	20,817,875,581	0.38	20,356,062,775	
PT Utama Karya (Persero) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk, JO	76,964,388,346	1.42	31,771,446,690	0.67
KSO PT Wijaya Karya (Persero) - PT Bunga Raya Lestari	112,243,251,072	2.07	27,198,117,816	0.58
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	4,467,657,466	0.08	11,057,991,288	
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	--	0.00	3,443,556,043	0.07
PT Hotel Indonesia Natour	669,042,352	0.01	982,550,768	0.02
PT Angkasa Pura Suport	739,909,025	0.01	961,594,606	0.02
PT Superintending Company of Indonesia	--	0.00	714,420,000	0.02
PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero)	490,000,000	0.01	490,000,000	0.01
PT Angkasa Pura Logistik	17,382,640,881	0.32	--	0.00
PT Asuransi Jasa Indonesia	1,474,855,995	0.03	--	0.00
PT Indah Karya (Persero)	342,433,000	0.01	--	0.00
PT BRI Asuransi Indonesia	198,996,578	0.00	--	0.00
	266,724,689,175	4.91	172,128,505,882	2.98
Pinjaman bank jangka pendek/ Short term bank loan				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	168,717,042,170	0.85	--	0.00
PT Perusahaan Pengelola Aset	30,925,125,000	0.15	--	0.00
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	0.00	34,089,093,490	0.72
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	0.00	34,089,093,490	0.72
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	0.00	34,089,093,490	0.72
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	0.00	34,089,093,490	0.72
	199,642,167,170	1.00	136,356,373,960	2.88

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023		2022	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)
Pinjaman bank jangka panjang/ <i>Long term bank loan</i>				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1,180,364,175,041	21.73	1,107,980,639,250	23.48
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	91,897,963,634	1.69	99,389,645,454	2.11
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	91,897,963,634	1.69	99,389,645,454	2.11
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	91,897,963,634	1.69	99,389,645,454	2.11
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	91,897,963,634	1.69	99,389,645,454	2.11
	1,547,956,029,577	28.49	1,505,539,221,066	31.92
Pinjaman pihak berelasi/ <i>Loan from related parties</i>				
Perusahaan Perseroan				
PT Aviast Pariwisata Indonesia	125,000,000,000	100.00	--	--
<u>Pendapatan usaha/ Revenue</u>				
PT Pertamina (Persero)	93,240,000,000	10.53	51,443,100,000	7.82
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,998,990,991	8.02	-	0.00
PT Karya Agung Kisma Lestari	46,466,961,848	5.25	23,058,331,437	3.51
PT Bali Holiday Village	45,590,413,593	5.15	37,651,260,297	5.73
PT Nusa Dua Graha Internasional	40,859,362,713	4.62	28,121,865,575	4.28
PT Griya Puncaloka	32,441,095,453	3.66	27,452,036,467	4.18
PT Suryalaya Anindita International	29,293,727,628	3.31	17,255,608,465	2.62
PT Hotel Indonesia Properti	27,705,537,947	3.13	4,898,082,560	0.74
PT Wynnco Bali	23,497,526,872	2.65	25,132,506,250	3.82
PT Pacific Resorts Buana Indonesia	23,230,329,880	2.62	13,541,377,843	2.06
PT Nusa Dua Mahajaya	18,668,290,000	2.11	-	0.00
PT Bali Nusadewata Village	17,804,751,996	2.01	15,673,743,314	2.38
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15,840,765,766	1.79	15,909,090,910	2.42
PT Narendra Interpacific Indonesia	2,460,065,455	0.28	16,808,273,762	2.56
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	110,810,811	0.01	15,756,000,000	2.40
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	--	0.00	10,070,000,000	1.53
PT Telekomunikasi Selular	--	0.00	10,018,300,000	1.52
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	--	0.00	9,093,159,091	1.38
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	--	0.00	7,357,330,000	1.12
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	--	0.00	2,500,000,000	0.38
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	0.00	2,289,527,273	0.35
PT Peninsula Bali Resort	--	0.00	2,167,860,107	0.33
PT Bali Griya Shanti	--	0.00	247,094,712	0.04
PT Kimia Farma Diagnostika	--	0.00	196,200,000	0.03
PT Perusahaan Listrik Negara	--	0.00	88,181,818	0.01
PT Bukit Asam, Tbk	--	0.00	60,000,000	0.01
PT Taspen (Persero)	--	0.00	60,000,000	0.01
PT Angkasa Pura I	--	0.00	30,000,000	0.00
PT Aero Group Indonesia	--	0.00	30,000,000	0.00
PT Angkasa Pura Hotel	--	0.00	25,000,000	0.00
PT Sarinah	--	0.00	18,000,000	0.00
	488,208,630,953	55.14	336,951,929,881	51.23

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023		2022	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)
Pembelian/ Procurement				
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Bunga Raya Lestari, KSO	125,646,500,528	10.64	125,646,500,528	18.56
PT Nindya - Lestari, KSO	111,025,225,707	9.40	111,025,225,707	16
PT Utama Karya (Persero), Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk, JO	71,527,065,765	6.05	71,527,065,765	10.56
PT Pertamina (Persero)	22,625,438,676	1.92	22,625,438,676	3.34
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk- PT Bunga Raya Lestari, KSO	1,538,823,153	0.13	1,538,823,153	0.23
PT Hotel Indonesia Natour	785,666,251	0.07	785,666,251	0.12
	333,148,720,080	28.21	333,148,720,080	48.81

41. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dan nilainya setara dengan rupiah dihitung dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

41. Asset and Liabilities in Foreign Currency

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies and its equivalent value to rupiah are calculated using the rates of exchange prevailing at the consolidated statement of financial position date as follows:

	2023			
	Dalam mata uang aslinya (dalam satuan penuh)/ In original currency (full amount)			Setara Rupiah (nilai penuh)/ Rupiah Equivalent (full amount)
	USD/ USD	Euro/ Euro	Lain-lain/ Others	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	1,313,703	81	--	20,253,433,788
Dana di lembaga keuangan yang dibatasi penggunaannya	14,007,951	--	--	215,946,572,616
Piutang usaha	15,112,973	--	--	232,981,591,768
Liabilitas				Liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	116,351,319	--	--	1,793,671,933,704
Liabilitas Neto	(85,916,692)	81	--	(1,324,490,335,532)
				Net Liabilities
	2022			
	Dalam mata uang aslinya (dalam satuan penuh)/ In original currency (full amount)			Setara Rupiah (nilai penuh)/ Rupiah Equivalent (full amount)
	USD/ USD	Euro/ Euro	Lain-lain/ Others	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	8,039,848	3,554	--	119,431,142,929
Piutang usaha	16,247,946	--	--	210,893,298,006
Liabilitas				Liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	67,376,017	--	--	1,000,399,103,852
Liabilitas Neto	(43,088,223)	3,554	--	(670,074,662,917)
				Net Liabilities

Perusahaan dan entitas anaknya dipengaruhi oleh risiko kurs mata uang asing terutama Dolar Amerika Serikat. Manajemen tidak melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing yang timbul dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

The Company and its subsidiaries is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures primarily with respect to US Dollar. Management does not hedge the foreign currency exposure on its monetary assets and liabilities foreign currency-denominated.

42. Laba (Rugi) per Saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar masing-masing sebanyak 2.147.660 dan 2.113.623 lembar.

	2023	2022
Rugi bersih untuk perhitungan laba (rugi) bersih per saham dasar	(278,417,472,512)	(209,966,367,242)
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa	2,147,660	2,113,623
Rugi bersih per saham dasar	(129,638)	(99,340)

Perusahaan tidak menghitung laba per saham dilusian karena tidak terdapat instrumen yang berpotensi dilutif.

42. Earning (Loss) Per Share

Basic earnings per share amounts are computed by dividing profit (loss) for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

As of December 31, 2023 and 2022, total weighted average number of ordinary shares outstanding for earning per shares calculation amounting to 2,147,660 and 2,113,623 shares, respectively, are as follows.

Net loss for the calculation of basic earnings per share

The weighted average number of outstanding shares

Net loss per share

The Company did not compute diluted earnings per share since there were no potentially dilutive instruments.

43. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua nilai wajar dari instrumen keuangan telah ditentukan untuk menggunakan teknik penilaian tingkat dua (2). Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, instrumen keuangan yang menggunakan teknik penilaian tingkat dua (2) masing-masing sebesar Rp52.712.000.000 dan Rp46.473.000.000. Tidak ada pemindahan antarlevel pengukuran nilai wajar.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian dari aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

Aset dan liabilitas keuangan lancar

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan dan entitas anaknya terdiri dari kas dan setara kas, dana di lembaga keuangan yang dibatasi penggunaannya, deposito berjangka, investasi pada surat berharga, piutang usaha, piutang lain-lain, setoran jaminan, utang usaha, utang lain-lain bagian jangka pendek, beban akrual,

43. Fair Value of Financial Asset and Liabilities

As of December 31, 2023 and 2022, all the fair values of financial instruments were determined using level two (2) valuation technique. As of December 31, 2023 and 2022, the financial instrument which determined using level two (2) valuation technique amounting to Rp52,712,000,000 and Rp46,473,000,000. There were no transfers between intra-level fair value measurements.

As of December 31, 2023 and 2022, the details of the Company and its subsidiaries' financial assets and liabilities are as follows:

Current financial assets and liabilities

The Company and its subsidiaries' current financial assets and liabilities consist of cash and cash equivalents, restricted fund in financial institution, time deposits, investment in marketable securities, trade receivables, other receivables, refundable deposits, trade payables, other payables - current portion,

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang bagian jangka pendek. Nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan dan entitas anaknya mendekati nilai wajar karena sifat dasar jangka pendek dari akun aset dan liabilitas keuangan.

Aset dan liabilitas keuangan tidak lancar

Aset dan liabilitas keuangan tidak lancar Perusahaan dan entitas anaknya terdiri dari investasi saham, utang lain-lain bagian jangka panjang, dan pinjaman bank jangka panjang. Nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan tidak lancar Perusahaan dan entitas anaknya mendekati nilai wajarnya.

Metode penilaian termasuk penggunaan harga dalam transaksi pasar yang wajar (*arm's length*) terkini antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan, jika tersedia, referensi kepada nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskontokan dan model harga opsi (*option pricing models*).

Selain dari beberapa hal di atas, Perusahaan tidak memiliki item lainnya yang diukur atau disajikan pada nilai wajar.

44. Manajemen Risiko

Instrumen keuangan pokok Perusahaan dan entitas anak terdiri dari kas dan setara kas, dana di lembaga keuangan yang dibatasi penggunaannya, deposito berjangka, investasi pada instrumen keuangan, piutang usaha, investasi saham, pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang dan utang usaha yang terutama berasal dari kegiatan operasional Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak memiliki aset dan liabilitas keuangan lainnya seperti piutang pihak berelasi, piutang lain-lain, setoran jaminan, biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Dalam kebijakannya, Perusahaan dan entitas anak tidak melakukan perdagangan atas instrumen keuangannya. Risiko utama yang muncul atas instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Direktur Keuangan dan Strategi Korporasi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola setiap risiko yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

accrued expenses, short-term bank loan and long-term bank loan - current portion. The carrying values of the Company and its subsidiaries' current financial assets and liabilities approximate their fair values due to the short-term maturity of these financial assets and liabilities.

Non-current financial assets and liabilities

The Company and its subsidiaries' non-current financial assets and liabilities consist of investments in securities, other payables and long-term bank loans. The carrying amount of non-current financial assets and liabilities of the Company and its subsidiaries approximate its fair value.

Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing models.

Other than the items above, the Company does not have any other items measured or disclosed at fair value.

44. Risk Management

The Company's and its subsidiaries principal financial instruments comprise of cash and cash equivalents, restricted fund in financial institution, time deposits, investment in securities, trade receivables, short-term bank loan, long-term bank loan and trade payables mostly arising directly from its operations. The Company and its subsidiaries have various other financial assets and liabilities such as due from related parties, other receivables, refundable deposits, accrued expenses and other payables.

It is the Company's and its subsidiaries policy that no trading in financial instruments shall be undertaken. The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk, credit risk and liquidity risk. The Finance and Corporate Strategy Director reviews and approves policies for managing each of these risks, which are described in more detail as follows:

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar terbagi menjadi dua tipe risiko: risiko suku bunga dan risiko mata uang asing.

• Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Risiko suku bunga Perusahaan dan entitas anak kebanyakan timbul dari penempatan kas dan setara kas, dana di lembaga keuangan yang dibatasi penggunaannya, penempatan deposito berjangka, pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang. Saat ini, Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur suku bunga.

Profil instrumen keuangan Perusahaan yang dikenakan bunga adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Kas dan setara kas	219,006,550,776	64,564,577,024	Cash and cash equivalents
Dana di lembaga keuangan yang dibatasi penggunaannya	354,745,507,126	627,804,324,702	Restricted fund in financial institution
Deposito berjangka	--	11,539,677,364	Time deposits
Dikurangi :			Less:
Pinjaman pihak berelasi	(125,000,000,000)	--	Loan from related party
Pinjaman bank jangka pendek	(199,642,167,170)	(136,356,373,960)	Short term bank loan
Pinjaman bank jangka panjang	(3,335,821,531,329)	(3,181,903,654,331)	Long term bank loan
Jumlah	(3,086,711,640,597)	(2,614,351,449,201)	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika suku bunga instrumen keuangan lebih rendah/tinggi 100 basis poin dimana variabel lain tetap, rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, akan lebih tinggi/ rendah sebesar Rp30.867.116.406 yang terutama disebabkan pendapatan bunga dari kas dan setara kas, kas dan bank yang dibatasi penggunaannya, deposito berjangka dan beban bunga yang berasal dari pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang yang lebih tinggi/rendah.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika suku bunga instrumen keuangan lebih rendah/tinggi 100 basis poin dimana variabel lain tetap, rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market prices comprise of two type of risk: interest rate risk and foreign currency risk.

• Interest rate risk

Interest rate is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. The Company's and its subsidiaries interest rate risk mainly arises from the placement of cash and cash equivalents, restricted fund in financial institution, placement of time deposits, short term bank loan dan long term bank loan. Currently, the Company and its subsidiaries does not have a formal hedging policy for interest rate exposure.

The Company's interest bearing financial instrument profile are as follows:

As of December 31, 2023, if the interest rate of financial instrument been 100 basis points lower/higher with all other variables held constant, loss before tax for the years ended December 31, 2023, would have been Rp30,867,116,406 higher/lower, mainly as a result of higher/lower interest income from financial instrument in the form of cash and cash equivalents, restricted cash and bank, time deposits and interest expenses from short term bank loan and long term bank loan.

As of December 31, 2022, if the interest rate of financial instrument been 100 basis points lower/higher with all other variables held constant, loss before tax for the years ended December 31, 2022, would have

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Desember 2022, akan lebih tinggi/ rendah sebesar Rp26.143.514.492 yang terutama disebabkan pendapatan bunga dari kas dan setara kas, kas dan bank yang dibatasi penggunaannya, deposito berjangka dan beban bunga yang berasal dari pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang yang lebih tinggi/rendah.

- **Risiko mata uang asing**
Risiko mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran mata uang asing. Informasi mengenai saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan di Catatan 41.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat meningkat/menurun sebanyak 10% dengan semua variabel konstan, rugi sebelum beban pajak akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp132.449.172.387.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat meningkat/menurun sebanyak 10% dengan semua variabel konstan, rugi sebelum beban pajak akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp63.971.845.746.

Risiko kredit

Risiko kredit Perusahaan dan entitas anaknya terutama muncul dari risiko kerugian jika pelanggan gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktual. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa pengiriman barang dan penyediaan jasa dilakukan hanya kepada pelanggan dengan rekam jejak dan sejarah pembayaran yang baik. Adalah kebijakan Perusahaan dan entitas anaknya bahwa semua pelanggan yang bertransaksi secara kredit harus memenuhi prosedur pemeriksaan kredit. Perusahaan dan entitas anaknya memiliki kebijakan yang mengatur nilai batas kredit untuk tiap pelanggan. Lebih lanjut, saldo piutang selalu diawasi tiap waktu untuk mengurangi risiko Perusahaan dan entitas anaknya atas piutang gagal bayar.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

been Rp26,143,514,492 higher/lower, mainly as a result of higher/lower interest income from financial instrument in the form of cash and cash equivalents, restricted cash and bank, time deposits and interest expenses from short term bank loan and long term bank loan.

- **Foreign currency risk**
Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. Information regarding the balance of assets and liabilities in foreign currencies is presented in Note 41.

As of December 31, 2023, if the exchange rate of the Rupiah against United States Dollar increases/decreases by 10% with all variables held constant, the consolidated income before tax expense will be lower/higher by Rp132,449,172,387.

As of December 31, 2022, if the exchange rate of the Rupiah against United States Dollar increases/decreases by 10% with all variables held constant, the consolidated income before tax expense will be lower/higher by Rp63,971,845,746.

Credit risk

The Company and its subsidiaries' credit risk mainly arises from risk of loss if customer fails to discharge their contractual obligations. To mitigate this risk, the Company and its subsidiaries has policies in place to ensure that delivery of goods and services are made only to creditworthy customers with proven track record or good credit history. It is the Company and its subsidiaries' policy that all customers who wish to trade on credit are subject to credit verification procedures. The Company and its subsidiaries has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the Company and its subsidiaries' exposure to bad debts.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Kas dan setara kas	219,006,550,776	64,564,577,024	Cash and cash equivalents
Dana di lembaga keuangan yang dibatasi penggunaannya	354,745,507,126	627,804,324,702	Restricted fund in financial institution
Deposito berjangka	--	11,539,677,364	Time deposits
Piutang usaha	351,626,715,176	263,959,885,893	Trade receivables
Piutang lain-lain	2,609,428,914	729,590,048	Other receivables
Investasi pada surat berharga	2,820,273,502	2,963,797,698	Investment in marketable securities
Penyertaan saham	50,244,712,000	46,473,000,000	Investment in shares
Jumlah	981,053,187,494	1,018,034,852,729	

Risiko likuiditas

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan dan entitas anaknya mengawasi dan menjaga batas kas dan setara kas yang cukup untuk membiayai operasi Perusahaan dan entitas anaknya dan memitigasi pengaruh fluktuasi atas arus kas. Perusahaan dan entitas anaknya secara rutin mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual.

Tabel di bawah ini menyajikan periode jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya termasuk bunga di masa depan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

Liquidity risk

In managing its liquidity risk, the Company and its subsidiaries monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Company and its subsidiaries' operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. The Company and its subsidiaries regularly evaluates the projected and actual cash flows.

The following table sets out the maturity profile of the Company and its subsidiaries' financial liabilities, including future interest, based on contractual undiscounted payments:

	2023					
	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 year	lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total/ Total	
Utang usaha	423,239,115,877	--	--	--	423,239,115,877	Trade payables
Utang lain-lain	56,962,283,504	3,268,431,431	--	--	60,230,714,935	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	814,270,598,363	--	--	--	814,270,598,363	Accrued expenses
Pinjaman pihak berelasi						Loan from related party
Pokok	125,000,000,000	--	--	--	125,000,000,000	Principal
Bunga	7,656,250,000	--	--	--	7,656,250,000	Interest
Pinjaman bank jangka pendek						Short-term bank loan
Pokok	199,642,167,170	--	--	--	199,642,167,170	Principal
Bunga	6,278,769,283	--	--	--	6,278,769,283	Interest
Pinjaman bank jangka panjang						Long-term bank loan
Pokok	95,893,527,272	99,889,090,909	171,809,236,355	2,968,229,676,793	3,335,821,531,329	Principal
Bunga	102,320,529,216	91,024,271,704	197,293,754,299	295,091,043,760	685,729,598,979	Interest
Jumlah	1,831,263,240,685	194,181,794,044	369,102,990,654	3,263,320,720,553	5,657,868,745,936	Total

	2022					
	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 year	lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total/ Total	
Utang usaha	188,960,326,047	128,075,426,890	--	--	317,035,752,937	Trade payables
Utang lain-lain	56,962,283,504	3,268,431,431	--	--	60,230,714,935	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	814,270,598,363	--	--	--	814,270,598,363	Accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek						Short-term bank loan
Pokok	199,642,167,170	--	--	--	199,642,167,170	Principal
Bunga	8,692,718,840	--	--	--	8,692,718,840	Interest
Pinjaman bank jangka panjang						Long-term bank loan
Pokok	95,893,527,272	195,782,618,182	176,615,689,811	1,674,467,950,094	3,335,821,531,329	Principal
Bunga	34,786,375,909	32,164,287,272	45,099,924,543	569,623,247,614	681,673,835,338	Interest
Jumlah	1,399,207,997,105	359,290,763,775	221,715,614,354	2,244,091,197,708	5,417,367,318,912	Total

45. Manajemen Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha, pemingkat pinjaman yang kuat dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Selain itu, Perusahaan juga telah disyaratkan oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan minimal 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

45. Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to maintain healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

In addition, the Company has also been required by Law No. 40 of 2007 on Limited Companies, effective from August 16, 2007, to allocate at least 20% of the issued and fully paid share capital into a reserve fund that may not be distributed, the terms of such external capital will be considered by the Company at the General Meeting of Shareholders.

The Company manages their capital structure and make adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes for the years ended December 31, 2023.

The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

46. Peristiwa Kontinjensi

Dalam melakukan kegiatan normal usahanya, Perusahaan menghadapi berbagai perkara hukum yang belum terselesaikan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, jumlah kerugian yang mungkin timbul atas beberapa perkara hukum masih belum dapat ditentukan. Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian atas perkara hukum tersebut karena berkeyakinan memiliki posisi hukum yang kuat untuk memenangkan perkara hukum tersebut. Perkara hukum yang saat ini masih berlangsung dan menunggu keputusan akhir sebagai berikut:

46. Contingencies

In the normal business course, the Company faces various unresolved legal cases. Until the date of completion of the financial statements, the amount of losses that may arise in certain legal cases is still undetermined. The Company does not establish a reserve for such lawsuit of because the Company believes of having a strong legal position to win these lawsuits. These lawsuits that are still ongoing and awaiting final decision with details as follows:

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**a. Penyelesaian Persidangan Gugatan dari
PT Jaya Makmur Bersama**

Dalam rangka mengembangkan usahanya, Perusahaan berupaya melakukan kerja sama dengan investor dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan lahan LOT C-5 (kantor Perusahaan), yang terletak di atas lahan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan ("HPL") Perusahaan No. 4/Desa Benoa, Perusahaan mencari investor yang mampu mengoperasikan sarana pariwisata tersebut di bidang *Accommodation, Recreation dan Entertainment Center*. Perusahaan telah mengundang calon-calon investor, termasuk salah satunya adalah PT Jaya Makmur Bersama (JMB), untuk mengikuti seleksi (*beauty contest*) calon pengembang lahan Lot C-5. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2008, Perusahaan menetapkan PT Jaya Makmur Bersama sebagai investor terpilih.

Hingga batas waktu yang ditentukan, belum diperoleh titik temu antara para pihak atas *draft Land Utilization and Land Development Agreement* ("LUDA"). JMB mengusulkan agar diadakan perpanjangan jangka waktu MoU. Namun usulan ini ditolak oleh Perusahaan dengan alasan konsep LUDA merupakan standar yang berlaku umum di Kawasan Pariwisata Nusa Dua yang telah disetujui oleh Kementerian sebelum dipergunakan dalam kerja sama dengan investor di Nusa Dua.

JMB kemudian mengajukan gugatan dengan duduk perkara bahwa Perusahaan tanpa alasan yang wajar dan tanpa adanya itikad baik tidak memperpanjang MoU dan oleh karenanya telah melakukan wanprestasi, atas pokok gugatan yang diajukan oleh JMB dikabulkan untuk seluruhnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Februari 2013.

Pada tanggal 7 Maret 2013, Perusahaan mengajukan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dari Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukum mewakili Perusahaan sebagai Tergugat/Terbanding melawan PT Jaya Makmur Bersama. Tanggal 4 Desember 2013 telah dijatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**a. Settlement of Claim Trial from PT Jaya
Makmur Bersama**

In developing its business, the Company seeks cooperation with investors in for the purpose of land use and development of LOT C-5 land (the Company's office), located on the Right to Manage Certificate ("HPL") of the Company No. 4/Desa Benoa; the Company is looking for investors who are able to operate the tourism facilities in the field of Accommodation, Recreation and Entertainment Center. The Company has invited potential investors, including PT Jaya Makmur Bersama (JMB), to follow the potential developer selection (beauty contest) for Lot C-5 land. On August 15, 2008, the Company decided that PT Jaya Makmur Bersama as the appointed investor.

Until the deadline ended, there were no agreed point between the parties to the draft of Land Utilization and Land Development Agreement ("LUDA"). JMB proposed to extend the period of MOU. However, the Company refused the extension of the period for the reason that LUDA concept is a generally accepted standard in the Tourism Area Nusa Dua which has been approved by the Ministry before being used in cooperation with investors in Nusa Dua.

JMB then filed a lawsuit alleging that the Company without reasonable cause and in the absence of good faith does not extend the MoU and therefore has defaulted on the agreement. The principal lawsuit filed by JMB was granted for all by the judge based on the Denpasar District on February 12, 2013.

On March 7, 2013, the Company submitted Appeal to the Chairman of Denpasar District Court from the Attorney of the State as Legal Counsel representing the Company as Defendant against PT Jaya Makmur Bersama. On December 4, 2013, Bali High Court decided to reinforce the previous decision of Denpasar District Court.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 5 Februari 2014 Tim Kuasa Hukum Perusahaan (Kejaksaan Tinggi Bali dan Ihza & Ihza Law Firm) mengajukan Memori Kasasi.

Pada tanggal 28 Januari 2015, Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan Kasasi yang pada amarnya menyatakan menolak Memori Kasasi dari ITDC dan menguatkan Putusan Banding dan Putusan Tingkat Pertama di PN Denpasar:

- a. Uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,-/hari keterlambatan pemenuhan putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- b. Perusahaan tidak diperkenankan menawarkan dan atau mengikatkan diri dengan pihak lain terkait pengelolaan atau pengembangan Lahan Lot C-5 sampai dengan adanya putusan tetap;
- c. Perusahaan dan PT JMB menandatangani LUDA dengan ketentuan sesuai dengan MoU.

Atas Putusan Kasasi Perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai dengan surat No.18/ZP/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016. Namun sampai dengan laporan keuangan ini disusun, perusahaan dan/atau kuasa hukum perusahaan belum menerima Salinan Resmi atas Putusan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Pihak PT JMB juga belum mengajukan tindakan apapun dalam rangka Pelaksanaan atas putusan kasasi. Bahwa Putusan perkara *a quo* terkait hukuman pokok masih belum terlaksana dan/atau dilaksanakan serta masih diperlukan proses hukum lain untuk pelaksanaan Putusan perkara *a quo* yaitu permohonan pelaksanaan atau penetapan eksekusi yang harus diajukan oleh PT JMB. Terkait *dwangsom* (uang paksa) berdasarkan Pendapat Hukum dari Konsultan Hukum Eksternal Perusahaan, *dwangsom* adalah hukuman yang bersifat *accessoir* yang baru dapat dilaksanakan apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan setelah penetapan eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara *a quo* sehingga sampai dengan saat ini, *dwangsom* (uang paksa) belum berlaku.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

On 5 February 2014, the Company's Legal Team (Bali Attorney General and Ihza & Ihza Law Firm) filed Cassation.

On January 28, 2015, the Supreme Court refuses the Cassation Memory of ITDC and reinforces the Appeal Decision and First Level Decision in Denpasar District as follows:

- a. Forced money (dwangsom) amounting to Rp10,000,000,-/day of delay in the fulfillment of the decision from the time this decision has a permanent legal effect;*
- b. The Company is not allowed to offer and or engage with other parties related to the management or development of Lot C-5 land until a permanent decision is made;*
- c. The Company and PT JMB to sign the LUDA under the terms of the MoU.*

On the Decision of the Cassation, the Company has submitted a judicial review to the Supreme Court in accordance with letter No.18/ZP/X/2016 dated October 26, 2016. However, up to the financial statements date, the company and/or the company's attorneys have not received an official copy of the Judicial Review Effort ("PK) decision. PT JMB also has not submitted any action in the context of executing the Decision. Whereas the a quo decision regarding with the main sentence has not yet been done and/or implemented and other legal processes are still required for the implementation of the a quo decisions, viz. the request or determination of execution that must be submitted by PT JMB. Regarding with the dwangsom (forced money) based on the Legal Opinions from the Company's External Legal Consultants, dwangsom is an accessoir punishment that can only be carried out if the main sentence is not carried out after the execution determination is issued by the Head of the District Court who decides on the a quo case so up to this moment, dwangsom (forced money) still not applied.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Penyelesaian Perkara Pembatalan HPL 8 dan 9 Desa Kuta, Nusa Tenggara Barat

Pada tanggal 21 April 2011, terdapat Gugatan Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2011/PTUN.MTR dari Nurhuda (Penggugat) kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) dan Perusahaan (Tergugat II Intervensi) terhadap objek sengketa :

- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah No. SK.01/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 m2 yang terletak di Kuta Pujut.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah No. SK.02/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 m2 yang terletak di Kuta Pujut.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah No.SK.03/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan hak milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 m2 yang terletak di Kuta Pujut.
- Sertifikat HPL No. 08/Desa Kuta, surat ukur No. 14/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010 seluas 9.895 m2 atas nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar.
- Sertifikat HPL No. 09/Desa Kuta, surat ukur No. 15/KTA/2010 tanggal 30 Januari 2010 seluas 45.884 m2 atas nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar.

Terhadap Perkara tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan memerintahkan Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah) untuk mencabut Keputusan (SK dan Sertifikat HPL) sebagaimana disebut di atas.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

b. Completion of HPL Revocation Case 8 and 9 Desa Kuta, Nusa Tenggara Barat

On April 21, 2011, there was a State Administration Lawsuit with Case Register Number 19/G/ 2011/PTUN.MTR from Nurhuda (Plaintiff) to the Land Office of Central Lombok (Defendant) and the Company (Defendant II Intervention) against the object of dispute:

- Decision of the Head of the Land Office of Central Lombok Regency No. SK.01/TKBPN/ 052.02/2011 dated 12 April 2011 regarding the rejection of the request for property rights on behalf of Nurhuda on land of 3.350 sqm located in Kuta Pujut.
- Decision of the Head of the Land Office of Central Lombok Regency No. SK.02/TKBPN/052.02/ 2011 dated 12 April 2011 regarding the rejection of the request for property rights on behalf of Nurhuda on the land area of 17,960 sqm located in Kuta Pujut.
- Decision of the Head of the Land Office of Central Lombok Regency No. SK.03/TKBPN/052.02/2011 dated April 12, 2011 regarding the rejection of the request for property rights on behalf of Nurhuda on the land area of 8,930 sqm located in Kuta Pujut.
- Right to Manage Certificate No. 08/Desa Kuta, Measurement Letter No. 14/KTA/2010 dated January 30, 2010 covering an area of 9,895 sqm on behalf of PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) based in Nusa Dua Denpasar.
- Right to Manage Certificate No. 09/Desa Kuta, letter No. 15/KTA/2010 dated January 30, 2010 covering 45,884 sqm on behalf of PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) based in Nusa Dua Denpasar.

With regard to the Case, the Panel of Judges granted the plaintiff's claim in whole, and ordered the Defendant (Head of the Land Office of Central Lombok Regency) to revoke the Decree (Decision of the Head of the Land Office of Central Lombok Regency and Right to Manage Certificate) as mentioned above.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Atas Putusan tersebut, Perusahaan mengajukan Banding, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, amarnya berbunyi menerima permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Atas Putusan tingkat Banding tersebut Nurhuda mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, amarnya berbunyi mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Nurhuda), membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Atas Putusan Kasasi tersebut, Perusahaan mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ("PK") namun Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 25 PK/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014 menolak Peninjauan Kembali dari Perusahaan.

Berdasarkan Putusan PK tersebut telah dilakukan eksekusi dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, tentang Pembatalan Sertifikat HPL No. 08 dan 09/Desa Kuta Atas Nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Denpasar, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 21 September 2015.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 282/B/2016/ PT.TUN.SBY tanggal 17 Januari 2017, Perusahaan telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi namun Putusan Kasasi Nomor 246 PK/TUN/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang menolak Kasasi dari Perusahaan.

Per 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan akan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan telah memperoleh novum yang diharapkan akan memperkuat dalil-dalil hukum Perusahaan dalam proses Permohonan Peninjauan Kembali.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

On the verdict, the Company submitted an Appeal, and the Decision of the State Administrative High Court of Surabaya, states that it accepts the Defendant's Appeal and Defendant II Intervention/Complaint, and cancels the Decision of the State Administrative Court of Mataram.

On the Appeal decision, Nurhuda filed a Cassation Law Effort. The Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, states that it grants the request of the Cassation of the Cassation Appealant (Nurhuda), to cancel the Decision of the State Administrative High Court of Surabaya.

On the Decision of the Cassation, the Company filed a Judicial Review Effort ("PK") but the Supreme Court through its decision No. 25/PK/TUN/2014 dated May 21, 2014 rejected the Company's Judicial Review.

Based on the Decision of the PK, execution has been conducted based on the Decree of the Head of the Regional Office of the National Land Agency of West Nusa Tenggara Province on the cancellation of Right to Manage certificates No. 08 and 09/Kuta Village on behalf of PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) based in Denpasar, located in Kuta Village, District Pujut, Central Lombok regency, West Nusa Tenggara Province, dated September 21, 2015.

Upon the Decision of the State Administrative High Court of Surabaya No. 282/B/2016/ PT.TUN.SBY dated January 17, 2017, the Company has filed a Cassation Appeal Effort but the Decision of Cassation No. 246/PK/TUN/2017 dated June 19, 2017 rejected the Company's Cassation.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company will submit a Judicial Review and has obtained a novum which is expected to strengthen the Company's legal arguments in the process of the Judicial Review.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Usin

Gugatan Perdata Nomor 31/PDT.G/2016/PN.Pya tanggal 20 Juni 2016 Penggugat atas nama Bapak Usin, pada Pengadilan Negeri Praya, terkait sengketa kepemilikan sebidang tanah dengan luas 16.934 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 178, Surat Ukur Nomor 47/SKD/2009 Tanggal 23 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, tercatat atas nama Usin (Penggugat) terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No.68/Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar.

Atas Perkara tersebut Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
 - Menyatakan sebidang tanah dengan luas 16.934 m² berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 178, Surat ukur Nomor 47/SKD/2009 tanggal 23 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok tengah, tercatat atas nama USIN (Penggugat) terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah H. Ilham
Sebelah Selatan : Tanah Perusahaan
Sebelah Timur : Tanah Perusahaan
Sebelah Barat : Tanah Kebango dan Tanah Perusahaan
 - Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik atas tanah objek sengketa.
 - Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sampai hari ini sejumlah Rp2.245.000.
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Atas putusan Pengadilan Negeri Praya

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

c. Settlement of Civil Lawsuit of Usin

Civil Lawsuit Number: 31/PDT.G/2016/PN.Pya dated June 20, 2016 plaintiff on behalf of Mr Usin, at the Praya District Court, over a land ownership dispute of 16,934 sqm based on the Certificate of Property Right No. 178, Measurement Letter Number 47/SKD/2009 dated May 23, 2009, issued by the Land Office of Central Lombok Regency, recorded on behalf of Usin (Plaintiff) located in Sukadana Village, Pujut Sub-district, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, overlapping with Hak Pengelolaan Lahan No.68/ Sengkol Village, Pujut Sub-district, Central Lombok District, West Nusa Tenggara Province, on behalf of the Company domiciled in Nusa Dua, Denpasar.

On the Case the Panel of Judges gave the verdict with the following decision:

- *Declared the Plaintiff's claim to be partially granted;*
 - *To declare a plot of land with an area of 16,934 sqm based on the Freehold Title No. 178, Measurement Letter Number 47/SKD/2009 dated May 23, 2009, issued by the National Land Affairs Office of Central Lombok, registered on behalf of USIN (Plaintiff) located in Sukadana Village, Pujut District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province with boundaries as follows:*

North side : Land of H. Ilham
South side : Land of the Company
South side : Land of the Company
West side : Kebango Land and the Company Land
 - *Declared the Plaintiff is the sole owner of the land of the disputed object.*
 - *Punished the defendant to pay jointly of up to Rp2,245,000.*
 - *Refused the Plaintiff's claim aside and rest.*
- Upon the verdict of the Praya District*

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tersebut, Perusahaan melalui Kuasa Hukum Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengajukan Banding. Putusan Banding No.31/Pdt.G/2016/PN.Pya dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- menguatkan Putusan pengadilan Negeri Praya Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Pya, tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut, Perusahaan telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi namun Mahkamah Agung menolak kasasi Perusahaan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2513 K/PDT/2017 tanggal 5 Maret 2018.

Per 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki opsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai melalui kelanjutan Mediasi di Kantor Pertanahan Lombok Tengah sebagaimana Undangan Mediasi Nomor 95/und-52.02.MP.01.04/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022. Upaya Mediasi diharapkan dapat memberikan penyelesaian permasalahan yang bersifat *win-win solution*. Namun apabila mediasi ini tidak mencapai kesepakatan, perusahaan telah mempersiapkan bukti-bukti baru yang relevan untuk pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

d. Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Saye alias Amaq Maye / H. Maye

Gugatan Perdata Nomor 21/PDT.G/2023/PN.Pya tanggal 21 Juli 2023 Penggugat atas nama Bapak Saye alias Amaq Maye/H.Maye, pada Pengadilan Negeri Praya, terkait sengketa kepemilikan bidang tanah dengan luas 9.705 m2 yang merupakan sisa tanah milik Penggugat yang tidak pernah dipindahtanggankan kepada ITDC atau pihak lainnya, terdaftar dalam SPPT NOP : 52.02.020.014.066.0003 atas nama Amaq Maye yang terletak di Dusun Songgong,

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Court, the Company through the Attorney of the State Attorney of Nusa Tenggara Barat, filed an appeal. Appeal Decision No.31/Pdt.G/2016/PN.Pya with decision as follows:

- Accepting an appeal from the appellant, originally the Defendant;
- Strengthening the Decision of the Praya District Court Number 31/Pdt.G/2016/PN.Pya, dated December 15, 2016 appealed;
- Punishing the Appellant, originally Defendant, to pay a court fee on both levels of the court, which in the Appeals Level is set at Rp150,000.

Upon the Decision of the High Court of Mataram, the Company has filed a Cassation Law Effort. However, Supreme Court rejected the Company's Cassation based on the Decision of Cassation No. 2513K/PDT/2017 dated March 5, 2018.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has the option to resolve the issue amicably through Mediation at the National Land Affairs Agency Central Lombok as per Invitation Number 95/und-52.02.MP.01.04/VI/2022 dated June 2, 2022. Mediation efforts are expected to provide a win-win solution to the problems. However, if the mediation does not reach an agreement, the company has prepared new relevant evidence for filing a Judicial Review.

d. Settlement of Civil Lawsuit of Saye alias Amaq Maye / H.Maye

Civil Lawsuit Number 21/PDT.G/2023/PN.Pya dated July 21, 2023. Plaintiff on behalf of Mr. Saye a.k.a Amaq Maye/H.Maye, at the Praya District Court, regarding a dispute over ownership of a plot of land with an area of 9,705 m2 which is the remaining land owned by The plaintiff, who was never transferred to ITDC or another party, is registered in SPPT NOP: 52.02.020.014.066.0003 in the name of Amaq Maye located in Songgong Hamlet, Mertak Village, Pujut District,

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No.74/Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar.

Atas Perkara tersebut Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas putusan Pengadilan Negeri Praya Tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Banding. Putusan Banding No. 222/PDT/2023/PT/MTR dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 20 November 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Central Lombok Regency, which overlaps with the Certificate of Rights Management No.74/ Kuta Village, Pujut Sub-district, Central Lombok District, West Nusa Tenggara Province, on behalf of a Company domiciled in Nusa Dua, Denpasar.

On the Case the Panel of Judges gave the verdict with the following decision:

- Reject the Plaintiff's claim in its entirety;
- Sentenced the Plaintiff to pay court costs in the amount of Rp2,940,000.00 (two million nine hundred and forty thousand rupiah);

Upon the verdict of the Praya District Court's decision, the plaintiff's attorney filed an appeal. Appeal Decision No. 222/PDT/2023/PT/MTR with decision as follows:

- Accept the appeal request from the original Appellant, the Plaintiff;
- Strengthen the decision of the Praya District Court Number 21/Pdt.G/2023/PN Pya dated 20 November 2023, which is requested to be appealed;
- Sentenced the original Appellant to the Plaintiff to pay court costs at both levels of court, which at the appeal level was determined at Rp 150,000 (one hundred and fifty thousand rupiah).

47. Kontrak, Perjanjian dan Ikatan yang Signifikan

- a. Pada tanggal 28 Januari 2019, Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan Dorna Sports, S.L untuk penyelenggaraan FIM World Road Racing World Championship Grand Prix 2021 – 2025. Perusahaan memiliki kewajiban membayar biaya penyelenggaraan acara untuk tahun 2021 sebesar EUR9,000,000. Untuk tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 jumlah tersebut naik dengan indeksasi 5%. Pembayaran penyelenggaraan diangsur setiap tahun. Pembayaran dilakukan 50% enam puluh

47. Significant Contract, Agreements and Commitments

- a. On January 28, 2019, the Company entered into an agreement with Dorna Sports, S.L regulating the promotion of event FIM World Road Racing World Championship Grand Prix 2021 – 2025. The Company has obligation to pay the event fee for the year 2021 amounting to EUR9,000,000. For the following year/s 2022, 2023, 2024 and 2025, such sum in indexed upwards annually by 5%. The event fee is pursuant to installment each year. The instalments shall be made 50%,

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

hari sebelum acara dan 50% pada hari kerja pertama setelah acara. Pada tanggal 31 Desember 2022, biaya penyelenggaraan acara sebesar EUR9,000,000 dibayarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tanggal 12 Januari 2024, Perusahaan telah membayarkan biaya penyelenggaraan tahun 2023 sebesar EUR9,450,000 (Catatan 53.b).

- b. Pada tanggal 28 Januari 2019, Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan Dorna WSBK Organization SRL untuk penyelenggaraan FIM Superbike World Championship. Perusahaan memiliki kewajiban membayar biaya penyelenggaraan untuk tahun 2021 sampai 2025 masing-masing sebesar EUR3,000,000, EUR3,150,000, EUR3,307,500, EUR3,472,875, dan EUR3,649,518.75. Biaya penyelenggaraan setiap tahunnya dibayarkan 50% selambat-lambatnya 60 hari sebelum acara dan 50% paling lambat hari kerja pertama setelah acara. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah membayar tagihan sebesar EUR3,000,000 untuk biaya penyelenggaraan WSBK tahun 2021 dan dicatatkan sebagai bagian beban pokok penyelenggaraan event. Pada tanggal 31 Desember 2022, biaya penyelenggaraan acara sebesar EUR3,150,000 dibayarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tahun 2023, Perusahaan telah membayarkan tagihan sebesar EUR3,307,500 untuk biaya penyelenggaraan WSBK tahun 2023.

- c. Pada tanggal 6 November 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja dengan PT Jaya CM untuk pekerjaan jasa konsultan manajemen konstruksi proyek infrastruktur pariwisata Mandalika. Harga total pekerjaan adalah sebesar Rp55.584.487.200. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Perusahaan telah membayar tagihan sebesar Rp42.438.941.458 dan dicatatkan sebagai bagian aset dalam penyelesaian Mandalika dalam akun aset tetap pada laporan keuangan konsolidasian.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

sixty days before the event, and 50% in the first working day after the event. On 31 December 2022, the costs of holding the event amounted to EUR9,000,000 to be borne by the Ministry of Tourism and Creative Economy. On January 12, 2024, the Company paid the cost of holding the event in 2023 amount of EUR9,450,000 (Notes 53.b).

- b. On January 28, 2019, the Company entered into an event organizer FIM Superbike World Championship agreement with Dorna WSBK Organization SRL. The Company has obligation to pay from 2021 to 2025 amounting EUR3,000,000, EUR3,150,000, EUR3,307,500, EUR3,472,875, EUR3,649,518,75, and EUR3,649,518,75. The event fee is pursuant to installment each year. The 50% of instalments shall be made sixty days before the event, and 50% in the first working day after the event. As of December 31, 2022, the Company has paid the invoice of EUR3,000,000 for the 2021 WSBK event fee and was recorded as part of cost of goods sold event. On 31 December 2022, the costs of holding the event amounted to EUR3,150,000 to be borne by the Ministry of Tourism and Creative Economy. On 2023, the Company has paid the invoice of EUR3,307,500 for the 2023 WSBK event fee.

- c. As of November 6, 2019, the Company entered into an agreement with PT Jaya CM for consultant services for Management Contruction Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project. The contract is amounting to Rp55,584,487,200. For the year ended December 31, 2023, the Company has paid the invoice of Rp42,438,941,458 and was recorded as part of the construction in progress of Mandalika in the accounts of property and equipment in the consolidated financial statements.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- d. Pada tanggal 8 November 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk untuk pekerjaan Struktur Arsitektur Plumbing pembangunan hotel Pullman di Mandalika. Total nilai proyek adalah sebesar Rp342.400.000.000. Perjanjian pekerjaan telah mengalami enam kali adendum kontrak pekerjaan. Adendum pekerjaan pertama dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2019 untuk merevisi total nilai proyek menjadi Rp358.440.000.000. Adendum pekerjaan kedua dilakukan pada tanggal 13 November 2020 untuk merevisi jangka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 19 Oktober 2021 dan merevisi total harga pekerjaan menjadi Rp350.000.000.000. Adendum pekerjaan ketiga dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021 untuk merevisi total harga pekerjaan menjadi Rp372.072.800.000. Adendum pekerjaan keempat dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021 untuk merevisi jangka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 31 Oktober 2021. Adendum pekerjaan kelima dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021 untuk merevisi masa Kontruksi menjadi 24 Desember 2021 dan masa Pemeliharaan menjadi 1 Agustus 2023 dan biaya pekerjaan menjadi Rp367.680.900.000. Adendum pekerjaan keenam dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 untuk merevisi masa Kontruksi menjadi 24 Desember 2021 dan masa Pemeliharaan menjadi 30 November 2023 dan biaya pekerjaan menjadi Rp369.911.688.559. Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan telah membayar tagihan sebesar Rp334.579.198.826 dan dicatatkan sebagai bagian aset bangunan dalam akun aset tetap pada laporan keuangan konsolidasian.
- e. Pada tanggal 14 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk pekerjaan Non SAP pembangunan hotel Pullman Mandalika Resort. Total nilai proyek adalah sebesar Rp314.707.428.833. Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan telah membayar tagihan sebesar Rp308.919.108.036 dicatatkan sebagai bagian aset bangunan dalam akun aset tetap pada laporan keuangan konsolidasian.
- d. On November 8, 2017, the Company entered into a work agreement with PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk for the work of the Architectural Structure construction of the Pullman hotel in Mandalika. The total project value is Rp342,400,000,000. The work agreements has undergone a six-time work addendums. The first work addendum was carried out on August 26, 2019 to revise the total project value to Rp358,440,000,000. The second work addendum was carried out on November 13, 2020 to revise the work completion period to October 19, 2021 and revise the total project value to Rp350,000,000,000. The third work addendum was carried out on July 8, 2021 to revise the total project value to Rp372,072,800,000. The fourth work addendum was carried out on October 5, 2021 to revise the work completion period to October 31, 2021. The fifth work addendum was carried out on October 28, 2021 to revise the work contruction period to December 24, 2021, the maintenance period to August 1, 2023 and revise the total project value to Rp367,680,900,000. The sixth work addendum was carried out on July 4, 2023 to revise the contruction period to December 24, 2021, the maintenance period to November 30, 2023 and revise the total project value to Rp369,911,688,559. As of December 31, 2023, the Company had paid the invoice of Rp334,579,198,826 and was recorded as part of the building in the accounts of property and equipment in the consolidated financial statements.
- e. On January 14, 2021, the Company entered into a work agreement with PT Wijaya Karya Gedung Gedung Tbk. for the work of the Non SAP work on the construction of the Pullman Mandalika Resort. The total project value is Rp314,707,428,833. For the year ended December 31, 2023, the Company had paid the invoice of Rp308,919,108,036 and was recorded as part of the building in the accounts of property and equipment in the consolidated financial statements.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Pada tanggal 2 Maret 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur inti Paket 1 - sisi Barat dan Tengah dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. JV PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Bunga Raya Lestari. Total nilai kerjasama sebesar Rp940.385.250.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Perusahaan telah membayar tagihan sebesar Rp609.554.863.364 dan dicatatkan sebagai bagian aset dalam penyelesaian Mandalika dalam akun aset tetap pada laporan keuangan konsolidasian. Pada tanggal 18 Januari 2024, Perusahaan telah membayar tagihan sebesar Rp18.811.614.706 (Catatan 53.b).
- g. Pada tanggal 5 Maret 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur inti Paket 2 - sisi Timur dengan PT Hutama Karya (Persero) JO PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Total nilai kerjasama sebesar Rp753.096.103.452. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Perusahaan telah membayar tagihan sebesar Rp571.352.381.547 dan dicatatkan sebagai bagian aset dalam penyelesaian Mandalika dalam akun aset tetap pada laporan keuangan konsolidasian. Pada tanggal 19 Februari 2024, Perusahaan telah membayar tagihan sebesar Rp54.010.644.980 (Catatan 53.b).
- h. Pada tanggal 26 Oktober 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama paket pekerjaan pengembangan dan pembangunan MICE, Infrastruktur Tana Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dengan Nindya - Lestari KSO. Total nilai kerjasama sebesar Rp470.000.000.000. Adendum pekerjaan pertama dilakukan pada tanggal 20 April 2022 untuk merevisi nilai pekerjaan menjadi Rp462.156.837.902. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Perusahaan telah membayar tagihan sebesar Rp439.048.996.000 dan dicatatkan sebagai bagian aset dalam bangunan akun aset tetap pada laporan keuangan konsolidasian.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- f. On March 2, 2021, the Company signed a cooperation agreement for construction of core infrastructure package 1 - West and Middle side with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. JV PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Bunga Raya Lestari. The total value of the cooperation is Rp940,385,250,000. As of December 31, 2023, the Company has paid the invoice of Rp609,554,863,364 and was recorded as part of the construction in progress of Mandalika in the accounts of property and equipment in the consolidated financial statements. On January 18, 2024, the Company paid invoice in the amount of Rp18,811,614,706 (Notes 53.b).
- g. On March 5, 2021, the Company signed a cooperation agreement for construction of core infrastructure package 2 - East side with PT Hutama Karya (Persero) JO PT Adhi Karya (Persero) Tbk. The total value of the cooperation is Rp753,096,103,452. As of December 31, 2023, the Company has paid the invoice of Rp571,352,381,547 and was recorded as part of the construction in progress of Mandalika in the accounts of property and equipment in the consolidated financial statements. On February 19, 2024, the Company paid invoice in the amount of Rp54,010,644,980 (Note 53.b).
- h. On October 26, 2021, the Company signed a cooperation agreement for the development and construction work package of MICE, Tana Mori Infrastructure, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara with Nindya - Lestari KSO. The total value of the cooperation is Rp470,000,000,000. The first work addendum was carried out on April 20, 2022 to revise the value of the work to Rp462,156,837,902. As of December 31, 2023, the Company has paid the invoice of Rp439,048,996,000 and was recorded as part of the building in the accounts of property and equipment in the consolidated financial statements.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

48. Perubahan Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel di bawah ini menyajikan perubahan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya yang timbul dari aktivitas pendanaan (dalam jutaan rupiah):

	2023						31 Desember/ December 31,	
	1 Januari/ January 1,	Arus Kas/ Cash Flows	Valuta Asing/ Foreign Exchange	Biaya yang belum Diamortisasi/ Unamortised Cost	Lainnya/ Others	Reklasifikasi/ Reclassification		
Pinjaman bank jangka pendek	136,356	63,286	--	--	--	--	199,642	Short term-bank loan
Pinjaman pihak berelasi	--	125,000	--	--	--	--	125,000	Loan from related parties
Pinjaman bank jangka panjang - porsi jangka pendek	1,135,037	(29,967)	--	--	--	(1,009,177)	95,893	Long term-bank loan - current portion
Pinjaman bank jangka panjang - neto dari bagian jangka pendek	2,046,867	73,915	(20,365)	338	129,996	1,009,177	3,239,928	Long term-bank loan - net of current portion
Liabilitas sewa	190,881	(7,291)	--	--	416	--	184,006	Lease liabilities
Utang kepada pemegang saham non-pengendali	1,609	--	--	--	--	--	1,609	Liabilities to shareholder
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	3,510,750	224,943	(20,365)	338	130,412	--	3,846,078	Total liabilities from financing activities

	2022						31 Desember/ December 31,	
	1 Januari/ January 1,	Arus Kas/ Cash Flows	Valuta Asing/ Foreign Exchange	Biaya yang belum Diamortisasi/ Unamortised Cost	Lainnya/ Others	Reklasifikasi/ Reclassification		
Pinjaman bank jangka pendek	157,356	(21,000)	--	--	--	--	136,356	Short term-bank loan
Pinjaman bank jangka panjang - porsi jangka pendek	1,451,799	(1,998)	--	--	--	(314,764)	1,135,037	Long term-bank loan - current portion
Pinjaman bank jangka panjang - neto dari bagian jangka pendek	943,160	608,658	128,513	314	51,458	314,764	2,046,867	Long term-bank loan - net of current portion
Liabilitas sewa	206,848	(25,143)	--	--	9,176	--	190,881	Lease liabilities
Utang kepada pemegang saham non-pengendali	1,609	--	--	--	--	--	1,609	Liabilities to shareholder
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	2,760,772	560,517	128,513	314	60,634	--	3,510,750	Total liabilities from financing activities

Rincian lainnya merupakan biaya bunga yang dikapitalisasi sebagai pokok pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Perusahaan dengan AIIIB.

Details others represent interest expenses which capitalized as principal of loan which comply with loan agreement between the Company and AIIIB.

49. Aktivitas Non-Kas

Transaksi non-kas terdiri dari:

	2023	2022
Pembelian aset tetap melalui utang	(79,161,537,635)	(458,712,514,208)
Penambahan aset tetap dari kapitalisasi beban pinjaman (Catatan 25)	(142,985,015,900)	(75,681,187,013)
Transaksi non kas	(222,146,553,535)	(534,393,701,221)

49. Non-Cash Transactions

Non-cash transactions consists of:

Addition of property and equipment by account payable
Addition of intangible
Addition of fixed assets from capitalization of borrowing costs (Note 25)
Non-cash trasactions

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

50. Informasi Segmen

Untuk kepentingan manajemen, Perusahaan dan entitas anaknya menggolongkan unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki tiga segmen operasi, yakni lahan, event dan hotel, dan utilitas.

Segmen lahan berhubungan dengan aktivitas penyewaan lahan oleh *tenants* di kawasan pariwisata yang dikelola Perusahaan dan entitas anaknya; segmen event dan hotel berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan MotoGP dan WSBK dan pengelolaan hotel Pullman; dan segmen utilitas berkaitan dengan aktivitas pengelolaan air.

50. Segment Information

For management purposes, the Company and its subsidiaries is organizing business units based on their products and services and has three reportable operating segments, such as land, hotel and events, and utilities.

The land segment relates to land leasing activities by tenants in tourism areas managed by the Company and its subsidiaries; the event and hotel segments related to the activities of organizing MotoGP and WSBK and managing Pullman hotels; and the utility segment is related to water management activities.

2023							
	Lahan/ Land	Event dan Hotel/ Event and Hotel	Utilitas/ Utility	Eliminasi/ Eliminations	Total		
Pendapatan						Revenues	
Pendapatan dari pelanggan eksternal	395,180	398,376	91,658	--	885,214	Revenues from external customers	
Penjualan antar segmen	523	--	32	(555)	--	Inter-segment revenues	
Jumlah	395,703	398,376	91,690	(555)	885,214	Total	
Beban usaha yang dapat dialokasikan						Allocated operating expenses	
Harga pokok penjualan	(328)	(462,160)	(70,281)	--	(532,769)	Cost of goods sold	
Beban penjualan	(5,012)	(1,000)	(220)	--	(6,232)	Sale expenses	
Beban umum dan administrasi	(108,417)	(104,720)	(51,053)	634	(263,556)	General and administration expenses	
Beban penyusutan dan amortisasi	(17,240)	(144,219)	(2,526)	63	(163,922)	Depreciation and amortization expenses	
Beban keuangan	(10,107)	(121,801)	(789)	--	(132,697)	Financial expenses	
Pendapatan & beban lainnya	(49,781)	(12,522)	(3,047)	240	(65,110)	Other income and expenses	
Laba (rugi) usaha segmen dilaporkan	204,818	(448,046)	(36,226)	382	(279,072)	Reportable segment profit (loss)	
Beban lain yang tidak dapat dialokasikan					655	Unallocated other expenses	
Rugi tahun berjalan					(278,417)	Loss for the year	

2022							
	Lahan/ Land	Event dan Hotel/ Event and Hotel	Utilitas/ Utility	Eliminasi/ Eliminations	Total		
Pendapatan						Revenues	
Pendapatan dari pelanggan eksternal	313,410	249,802	95,963	(1,687)	657,488	Revenues from external customers	
Penjualan antar segmen	--	--	9,216	(9,216)	--	Inter-segment revenues	
Jumlah	313,410	249,802	105,179	(10,903)	657,488	Total	
Beban usaha yang dapat dialokasikan						Allocated operating expenses	
Harga pokok penjualan	(19,632)	(274,992)	(69,167)	5,960	(357,831)	Cost of goods sold	
Beban penjualan	(326)	(53)	(1,494)	3	(1,870)	Sale expenses	
Beban umum dan administrasi	(119,984)	(60,376)	(23,731)	7,093	(196,998)	General and administration expenses	
Beban penyusutan dan amortisasi	(20,459)	(102,956)	(2,362)	5,326	(120,451)	Depreciation and amortization expenses	
Beban keuangan	(9,177)	(69,863)	(617)	64	(79,593)	Financial expenses	
Pendapatan & beban lainnya	(33,549)	(38,266)	(6,471)	--	(78,286)	Other income and expenses	
Laba (rugi) usaha segmen dilaporkan	110,283	(296,704)	1,337	7,543	(177,541)	Reportable segment profit (loss)	
Beban lain yang tidak dapat dialokasikan					(32,425)	Unallocated other expenses	
Rugi tahun berjalan					(209,966)	Loss for the year	

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

51. Kelangsungan Usaha dan Rencana Manajemen

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 disusun dengan asumsi bahwa Perusahaan dan entitas anaknya akan terus melakukan kegiatan usahanya (*going concern*). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan dan entitas anaknya mengalami kerugian sebesar Rp278.417.472.512. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki akumulasi kerugian sebesar Rp295.665.880.329 dan liabilitas jangka pendek juga telah melampaui total aset lancar sebesar Rp1.037.677.302.056.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan dan entitas anaknya masih mencatatkan arus kas positif dari aktivitas operasi. Namun hal ini disebabkan karena Perusahaan dan entitas anaknya masih menunda pembayaran atas utang usaha yang timbul dari operasi bisnis. Perusahaan dan entitas anaknya berupaya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.

Kondisi-kondisi di atas telah secara signifikan mempengaruhi posisi keuangan dan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya (*going concern*). Untuk mengatasi masalah tersebut, Perusahaan dan entitas anaknya sedang dalam tahap pelaksanaan Program Strategi Optimalisasi Perusahaan yang berfokus pada:

1. Kawasan The Nusa Dua
Percepatan penagihan piutang lama maupun baru dan menerapkan skema pembayaran *upfront* kepada *tenant* yang menyewa lahan serta divestasi aset.
2. Kawasan The Mandalika
Penjajakan dengan Investor baru untuk percepatan LUDA dan menerapkan skema pembayaran *upfront* kepada *tenant* yang menyewa lahan. Selain itu, Manajemen juga akan melakukan *roadshow* kepada beberapa pihak nasional maupun internasional untuk menarik investor masuk ke Mandalika serta melakukan divestasi maupun optimalisasi (*long lease*) aset.

51. Going Concern and Management's Plan

The consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023 have been prepared on the assumption that the Company and its subsidiaries will continue to carry out their business activities (going concern). For the year ended December 31, 2023, the Company and its subsidiaries suffered a loss of Rp278,417,472,512. As of December 31, 2023, the Company and its subsidiaries have accumulated losses amounting to Rp295,665,880,329 and short-term liabilities also have exceeded total current assets of Rp1,037,677,302,056.

For the year ended December 31, 2023, the Company and its subsidiaries still recorded positive cash flows in operating activities. However, this is because the Company and its subsidiaries are still delaying payment of trade payables arising from business operations. The Company and its subsidiaries strive to continue to carry out their business activities and meet their financial obligations when due.

The above conditions have significantly affected the Company's financial position and ability to carry out its business activities (going concern). To overcome this problem, the Company and its subsidiaries are in the stage of implementing the Company Optimization Strategy Program which focuses on:

1. *The Nusa Dua Area*
Acceleration of collection of non-current and new receivables and implement an upfront payment scheme for tenants who rent land and divestment of assets.
2. *The Mandalika area*
Exploration with new investors to accelerate LUDA and implement an upfront payment scheme for tenants who rent land. In addition, Management will also conduct roadshows to several national and international parties to attract investors to Mandalika as well as to divest and optimize (long lease) assets.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Sport Tourism Kawasan Mandalika
Menyelenggarakan beberapa event balap selain WSBK dan MotoGP serta menyewakan sirkuit kepada beberapa pihak untuk pelaksanaan event guna meningkatkan pendapatan.
4. Hotel Pullman
Melakukan optimalisasi pendapatan hotel Pullman dan peninjauan dengan calon investor untuk divestasi aset Pullman.
5. Kawasan Golomori – Labuan Bajo
Melakukan optimalisasi pendapatan sewa MICE serta melakukan divestasi aset (lahan).

3. Sport Tourism in the Mandalika Region
Organized several racing events other than WSBK and MotoGP and rented circuits to several parties for events to increase revenue.
4. Pullman Hotels
Optimizing Pullman hotel revenue and assessing potential investors for the divestment of Pullman assets.
5. Golomori area – Labuan Bajo
Optimizing MICE rental income and divesting assets (land).

52. Reklasifikasi

Pos-pos berikut pada laporan arus kas konsolidasian tahun 2022 direklasifikasi agar konsisten dengan penyajian pada laporan arus kas konsolidasian tahun 2023.

Rincian akun yang direklasifikasikan adalah sebagai berikut:

52. Reclassification

Following items in the 2022 consolidated statement of cash flows were reclassified to be consistent with the presentation in the 2023 statement of cash flows.

Detail of reclassified account as follows:

	2022		
	Dilaporkan sebelumnya/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah reklasifikasi/ After reclassification
LAPORAN ARUS KAS			
Arus kas dari aktivitas operasi			
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang	--	(63,004,873,944)	(63,004,873,944)
Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek	--	(12,951,283,679)	(12,951,283,679)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	213,211,746,265	(75,956,157,623)	137,255,588,642
Arus kas dari aktivitas pendanaan			
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang	(63,004,873,944)	63,004,873,944	--
Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek	(12,951,283,679)	12,951,283,679	--
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	690,188,110,848	75,956,157,623	766,144,268,471
Saldo kas dan akhir kas pada akhir periode	64,564,577,024		64,564,577,024

STATEMENT OF CASH FLOWS

Cash flows from operating activities

Interest payment of long-term loan

Interest payment of short-term loan

Cash flow from financing activities

Interest payment of long-term loan

Interest payment of short-term loan

Cash flows from investing activities

Cash and cash equivalent at end of year

53. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

- a. Berdasarkan surat No.S-46/MBU/01/2024 tertanggal 25 Januari 2024, Kementerian BUMN menyetujui penambahan modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata kepada Perusahaan sebesar Rp872.090.000.000 yang bersumber dari Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2023.

53. Events After Reporting Period

- a. Based on letter No.S-46/MBU/01/2024 dated January 25 2024, the Ministry of State-Owned Enterprises approved an increase in the capital of the Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata to the Company in the amount of Rp872,090,000,000 sourced from the Additional Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata to the Company in the amount of for the 2023 Fiscal Year based on Government Regulation Number 65 of 2023.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Perusahaan telah membayar tagihan kepada Dorna Sports, S.L sebesar EUR9,450,000 pada 12 Januari 2024 (catatan 47.a); tagihan kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. JV PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Bunga Raya Lestari sebesar Rp18.811.614.706 pada 18 Januari 2024 (Catatan 47.f); dan tagihan kepada PT Hutama Karya (Persero) JO PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp54.010.644.980 pada 19 Februari 2024 (Catatan 47.g).

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- b. The Company has paid dues to Dorna Sports, S.L amounting to EUR9.450.000 on January 12, 2024 (note 47.a); bill to PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. JV PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Bunga Raya Lestari amounting to Rp18,811,614,706 on January 18, 2024 (Note 47.f); and bill to PT Hutama Karya (Persero) JO PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounting to Rp54,010,644,980 on February 19, 2024 (Note 47.g).

54. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi Direktur untuk terbit pada tanggal 27 Februari 2024.

54. Completion of Financial Statements

Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements that are authorized by Directors for issuance on February 27, 2024.

55. Informasi Keuangan Tambahan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

55. Supplementary Financial Information

The accompanying financial information of the Company (parent entity), consisting of statements of financial position as of December 31, 2023 and 2022, and statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the year then ended (collectively referred to as "Entity Financial Information"), which is presented as supplementary information to the attached consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not required as part of the accompanying consolidated financial statements according to Indonesian Financial Accounting Standards. The financial information of the Parent Entity is the responsibility of management and was generated from and is directly related to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements.

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	194,010,328,672	51,816,634,626	Cash and cash equivalents
Dana di lembaga keuangan yang dibatasi penggunaannya	354,745,507,126	627,804,324,702	Restricted fund in financial institution
Deposito berjangka	--	11,539,677,364	Time deposits
Piutang usaha	382,597,950,463	316,976,104,696	Trade receivables
Piutang lain-lain	2,246,206,257	296,853,703	Other receivables
Persediaan	4,881,814,676	--	Inventories
Biaya dibayar di muka	1,025,662,830	59,217,592	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	--	31,316,908,852	Prepaid tax
Uang muka	1,597,378,436	221,025,017	Advances
TOTAL ASET LANCAR	941,104,848,460	1,040,030,746,552	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Aset hak-guna	210,090,474,587	233,070,566,543	Right-of-use assets
Properti investasi	628,277,091,013	628,330,825,864	Investment properties
Aset tetap	5,403,224,653,275	4,860,884,264,907	Property and equipment
Investasi pada surat berharga	2,820,273,502	2,963,797,698	Investment in marketable securities
Penyertaan saham			Investment in shares
Investasi pada entitas anak	53,269,000,000	53,269,000,000	Investment in subsidiaries
Investasi pada entitas asosiasi	--	--	Investment in associate company
Diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain	50,342,712,000	46,473,000,000	Measured at fair value through other comprehensive income
Aset takberwujud	1,792,636,005	2,002,333,162	Intangible assets
Aset pajak tangguhan	2,106,188,739	1,946,466,546	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	2,447,004,628	2,447,004,628	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	6,354,370,033,749	5,831,387,259,348	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	7,295,474,882,209	6,871,418,005,900	TOTAL ASSETS

Lampiran I

Attachment I

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)**

As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	350,817,308,933	295,467,329,973	Trade payables
Utang pajak	28,942,171,253	11,471,038,313	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	742,869,714,108	614,299,729,076	Accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek	199,642,167,170	136,356,373,960	Current-term bank loan
Pinjaman pihak berelasi jangka pendek	125,000,000,000	--	Short-term loan from related party
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			Current maturities of long-term liabilities:
Utang lain-lain	50,919,069,684	43,426,339,743	Other payables
Liabilitas sewa	187,556,370,198	193,710,870,180	Lease liabilities
Liabilitas kontrak	56,781,662,565	27,382,475,774	Contract liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	95,893,527,272	1,135,037,396,244	Short-term bank loan
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1,838,421,991,183	2,457,151,553,263	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			Long-term liabilities - net of current maturities:
Liabilitas sewa	4,978,642,085	5,670,428,400	Lease liabilities
Liabilitas kontrak	155,100,438,431	76,877,836,917	Contract liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	3,235,433,879,778	2,042,059,804,639	Long-term bank loan
Liabilitas imbalan kerja	39,436,165,919	34,097,516,232	Post-employee benefits
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	3,434,949,126,213	2,158,705,586,188	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	5,273,371,117,396	4,615,857,139,451	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham :			Capital stock :
Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp1.000.000 per saham			Class A Dwiwarna - Rp1,000,000 par value per share
Seri B - nilai nominal Rp1.000.000 per saham			Class B - Rp1,000,000 par value per share
Modal dasar :			Share capital - Authorized :
Seri A Dwiwarna - 1 saham			Class A Dwiwarna - 1 share
Seri B - 3.499.999 saham			Class B - 3,499,999 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh :			Subscribed and fully paid :
Seri A Dwiwarna - 1 saham	1,000,000	1,000,000	Class A Dwiwarna - 1 share
Seri B sebesar 2.147.659 lembar saham pada 31 Desember 2023 dan 2022	2,147,659,000,000	2,147,659,000,000	Class B - 2,147,659 shares as of December 31, 2023 and 2022
Uang muka setoran modal	--	--	Advance of capital stock subscription
Tambahan modal disetor	148,007,499	148,007,499	Additional paid-in capital
Keuntungan yang belum direalisasi dari aset keuangan pada nilai wajar - neto	9,426,660,336	5,642,082,000	Unrealized gain on financial assets at fair value - net
Keuntungan pengukuran kembali atas program imbalan pasti - neto	5,333,134,388	7,398,088,278	Gain on remeasurement of defined benefits program - net
Saldo (defisit)/laba	(140,464,037,410)	94,712,688,672	(Deficit)/Retained earnings
TOTAL EKUITAS	2,022,103,764,813	2,255,560,866,449	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,295,474,882,209	6,871,418,005,900	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran II
Attachment II
**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
PENDAPATAN	678,157,811,606	538,566,445,227	REVENUES
BEBAN USAHA			EXPENSES
Beban pokok pendapatan	(365,201,321,009)	(230,530,277,070)	Cost of revenues
Beban penjualan	(6,050,570,414)	(563,644,047)	Selling expenses
			General and administrative
Beban umum dan administrasi	(347,247,945,191)	(265,996,088,249)	expenses
Pendapatan lain-lain	13,965,787,427	18,135,797,923	Other income
Beban lain-lain	(32,089,286,811)	(104,396,502,802)	Other expense
Pendapatan keuangan	2,569,421,740	8,243,463,486	Finance income
Beban keuangan	(129,780,598,101)	(78,972,606,597)	Finance expense
RUGI SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	(185,676,700,753)	(115,513,412,129)	LOSS BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK FINAL	(49,698,430,280)	(29,493,508,030)	FINAL TAX EXPENSE
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(235,375,131,033)	(145,006,920,159)	LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kini	--	--	Current tax
Pajak tangguhan	198,404,952	184,035,362	Deferred tax
TOTAL MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	198,404,952	184,035,362	TOTAL INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
RUGI TAHUN BERJALAN	(235,176,726,082)	(144,822,884,797)	LOSS FOR THE YEAR

Lampiran II

Attachment II

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (Kerugian)/keuntungan atas pengukuran kembali program manfaat pasti	(2,111,404,795)	12,065,772,069	Item that will not be reclassified to profit or loss (Loss)/gain on remeasurement defined benefit program
Pajak penghasilan atas pengukuran kembali program manfaat pasti	46,450,905	(265,446,985)	Income tax relating to remeasurement of defined benefit program
Keuntungan atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba komprehensif lain	3,869,712,000	1,798,000,000	Gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan atas perubahan nilai wajar investasi saham	(85,133,664)	(39,556,000)	Income tax relating to Fair value adjustment from investment in shares of stock
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	1,719,624,446	13,558,769,084	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(233,457,101,636)	(131,264,115,713)	TOTAL COMPREHENSIVE EXPENSE FOR THE YEAR
Rugi per saham	(108,703)	(61,522)	Loss per share

Attachment III

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(PARENT ENTITY)**

STATEMENTS CHANGES IN OF EQUITY

For the Years Ended

December 31, 2023 and 2022

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham/ Capital stock	Uang muka setoran modal/ Advance of capital stock subscription	Tambahkan modal disetor/ Additional paid in capital	Saldo laba/ Retained earnings	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		Total ekuitas/ Total equity
					Pengukuran kembali program manfaat pasti/ Remeasurement of defined benefit program	Pengukuran aset keuangan pada nilai wajar/ Measurement of financial asset at FVOCI	
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	1,380,000,000,000	470,000,000,000	297,808,007,499	239,535,573,469	(4,402,236,806)	3,883,638,000	2,386,824,982,162
Penyertaan modal negara	470,000,000,000	(470,000,000,000)	--	--	--	--	--
Kapitalisasi tambahan modal disetor	297,660,000,000	--	(297,660,000,000)	--	--	--	--
Rugi tahun berjalan	--	--	--	(144,822,884,797)	--	--	(144,822,884,797)
Laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan	--	--	--	--	--	--	--
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	--	--	--	--	11,800,325,084	--	11,800,325,084
Pengukuran aset keuangan pada nilai wajar	--	--	--	--	--	--	--
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	2,147,660,000,000	--	148,007,499	94,712,688,672	7,398,088,278	5,642,082,000	2,255,560,866,449
Penyertaan modal negara	--	--	--	--	--	--	--
Kapitalisasi tambahan modal disetor	--	--	--	--	--	--	--
Rugi tahun berjalan	--	--	--	(235,176,726,082)	--	--	(235,176,726,082)
Laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan	--	--	--	--	--	--	--
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	--	--	--	--	(2,064,953,890)	--	(2,064,953,890)
Pengukuran aset keuangan pada nilai wajar	--	--	--	--	--	--	--
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	2,147,660,000,000	--	148,007,499	(140,464,037,410)	5,333,134,388	9,426,660,336	2,022,103,764,813
						3,784,578,336	3,784,578,336

Lampiran IV

Attachment IV

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022 *)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	603,551,908,369	471,723,796,102	Receipt from customers
Penerimaan bunga	2,569,421,740	7,874,069,194	Interest received
Pembayaran kepada pemasok	(304,424,127,483)	(116,828,593,124)	Payment to suppliers
Pembayaran PPN dan pajak final	(49,500,025,328)	(10,493,508,030)	Payment for VAT and final taxes
Pembayaran beban gaji dan tunjangan	(84,492,309,534)	(96,037,861,852)	Payment for salaries and benefits expense
Penerimaan operasional lainnya	45,496,820,401	26,379,261,409	Receipt from other operational revenue
Pembayaran untuk biaya operasional lainnya	(6,440,961,157)	(9,563,644,047)	Payment for other operational expense
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang	(72,717,499,307)	(63,004,873,944)	Payment of long-term interest loan
Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek	(56,618,871,684)	(12,951,283,679)	Payment of short-term interest loan
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	77,424,356,016	197,097,362,029	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Pencairan/(Penempatan) deposito berjangka	11,539,677,364	(11,539,677,364)	Withdrawal/(Placement) of time deposit
Pencairan investasi pada surat berharga	(3,529,449,501)	197,723,500	Maturity of investment on marketable securities
Penambahan aset tetap	(442,335,241,092)	(872,465,292,855)	Addition to property and equipment
Penambahan aset takberwujud	209,697,157	(693,785,175)	Addition to intangible assets
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(434,115,316,072)	(884,501,031,894)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman bank	107,546,163,616	529,067,321,113	Proceeds from bank loan
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	125,000,000,000	--	Receipts of loan from related party
Kenaikan pada kas yang dibatasi penggunaannya	273,058,817,576	205,627,425,472	Increase of restricted cash
Pembayaran liabilitas sewa	(7,290,513,407)	(39,166,379,055)	Payments of lease liabilities
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	498,314,467,785	695,528,367,530	Net cash provided by financing activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	141,623,507,729	8,124,697,665	NET INCREASE/(DECREASE) CASH AND CASH EQUIVALENTS
DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	570,186,317	(2,658,042,464)	EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	51,816,634,626	46,349,979,425	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	194,010,328,672	51,816,634,626	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

*) Direklasifikasikan (Lampiran V.3)

*) As reclassified (Attachment V.3)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN
(ENTITAS INDUK)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
ADDITIONAL INFORMATION
(PARENT ENTITY)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri Entitas Induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada Entitas Anak yang disajikan berdasarkan harga perolehan.

1. Material Accounting Policies Information

Accounting policies adopted in the preparation of the Parent Entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investment in subsidiaries, which have been presented at cost.

2. Informasi Entitas Anak dan Asosiasi

Informasi mengenai Entitas Anak yang dimiliki Entitas Induk diungkapkan dalam Catatan 1.e atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Entitas Induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak dan entitas asosiasi sebagai berikut:

2. Information of Investment in Subsidiaries and Associates Company

Information pertaining to Subsidiaries of the Company is disclosed in Note 1.e to the consolidated financial statements.

As of December 31, 2023 and 2022, Parent Entity has the following investments in subsidiaries and investment in associates company as follows:

	2023 dan/and 2022	
	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai tercatat/ Carrying amount
Penyertaan saham pada entitas anak/ Investment in subsidiaries		
PT ITDC Nusantara Properti ("INP")	99.96%	33,543,000,000
PT ITDC Nusantara Utilitas ("INU")	99.88%	19,976,000,000
Penyertaan saham pada entitas asosiasi/ Investment in associates company		
PT Bali Griya Shanti	40.00%	--

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN
(ENTITAS INDUK)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
ADDITIONAL INFORMATION
(PARENT ENTITY)**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Reklasifikasi

Pos-pos berikut pada laporan arus kas tahun 2022 direklasifikasi agar konsisten dengan penyajian pada laporan arus kas tahun 2023.

Rincian akun yang direklasifikasikan adalah sebagai berikut:

3. Reclassification

Following items in the 2022 statement of cash flows were reclassified to be consistent with the presentation in the 2023 statement of cash flows.

Detail of reclassified account as follows:

	2022	
	Dilaporkan sebelumnya/ Before reclassification	Setelah reklasifikasi/ After reclassification
	Reklasifikasi/ Reclassification	
LAPORAN ARUS KAS		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang	--	(63,004,873,944)
Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek	--	(12,951,283,679)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	273,053,519,652	197,097,362,029
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang	(63,004,873,944)	63,004,873,944
Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek	(12,951,283,679)	12,951,283,679
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	619,572,209,907	695,528,367,530
Saldo kas dan akhir kas pada akhir periode	51,816,634,626	51,816,634,626

2023

Laporan Tahunan Annual Report



InJourney Tourism Development Corporation (ITDC)

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ©2023

Jakarta Representative Office

Menara BCA lantai 39 Jl. MH Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, 10310 Indonesia

Nusa Dua Office (Headquarters)

Kawasan Pariwisata Nusa Dua PO BOX 3, Nusa Dua, Badung, 80361 Bali, Indonesia

Mandalika Office

Komplek Masjid Nurul Bilad Jln. Pariwisata Pantai Kuta Kuta, Pujut,
Lombok Tengah, 83573 Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Golo Mori Office

Kawasan MICE Golo Mori Desa Golo Mori, Komodo, ManggaraiBarat,
86763 Nusa Tenggara Timur, Indonesia